



Kumpulan**Makalah**
Kongres
Kebudayaan

Buku 1

Kumpulan**Makalah**
Kongres V
Kebudayaan

BUKU 1

Kumpulan Makalah Kongres Kebudayaan V

Rancang Grafis: Pelita 12

Penerbit: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 2003

ISBN: 979-96755-8-8

PENGANTAR

Buku ini merupakan buku II yang berisi kumpulan makalah, setelah buku I yang berisi laporan penyelenggaraan kongres serta buku III yang menyajikan kumpulan tulisan tentang Kongres Kebudayaan 2003 yang termuat di media massa.

Kami menyadari kumpulan makalah ini kurang lengkap. Hal tersebut disebabkan beberapa kesulitan, antara lain karena ketidak hadirannya makalah yang sudah dijadwalkan sebelumnya dan spontanitas peserta yang memang diberikan wadah tersendiri untuk menyampaikan makalah atau menjadi pembahas mengenai topik masalah kebudayaan yang aktual. Sayangnya sejumlah pembicara tidak menyerahkan makalahnya kepada panitia.

Harapan kami dengan terbitnya buku kumpulan makalah ini agar mereka yang tidak sempat hadir dalam kongres tersebut juga dapat mengetahui pokok-pokok pikiran yang dibicarakan selama kongres kebudayaan. Di samping itu kumpulan makalah ini juga dapat dijadikan bahan dokumentasi dan informasi dalam penyusunan kebijakan di bidang kebudayaan selanjutnya.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam proses penerbitan buku ini

Jakarta, Medio Desember 2003
Panitia Pelaksana

PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

1.	EDIFIKASI DALAM INDUSTRI BUDAYA Oleh: Alois Agus Nugroho	1
2.	PELAJARAN MUATAN LOKAL Oleh: Ali Hadara	9
3.	BUDAYA INOVASI DAN KOMPETISI (SUATU PENELUSURAN AWAL) Oleh: Abu Hamid	15
4.	NASIONALISME INDONESIA VERSUS BUDAYA DAERAH DALAM PERSPEKTIF SASTRA INDONESIA Oleh: Agus R. Sarjono	22
5.	PEMEKARAN WILAYAH : HARUSKAH KE AKAR ETNIS? (AMATAN ATAS KASUS SULAWESI UTARA) Oleh: A.J. Ulaen	42
6.	PERKEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH Oleh: Ajip Rosidi	47
7.	OTONOMI DAERAH DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN INDONESIA: SEBUAH STRATEGI DEMOKRATISASI BANGSA-NEGARA MERDEKA Oleh: Anhar Gonggong	58
8.	BUDAYA SIAGA VERSUS BUDAYA NIAGA Oleh: Arswendo Atmowiloto	68
9.	BUDAYA BAHARI DALAM KONTEKS GLOBAL DAN MODERN (KASUS KOMUNITAS-KOMUNITAS NELAYAN DI INDONESIA) Oleh: Munsil Lampe	75
10.	"PLURALITAS KEPENDUDUKAN DALAM PRESPEKTIF BUDAYA" Oleh: Prof. Dr. Ny. Chalida Fachruddin	100
11.	WARISAN BUDAYA UNTUK SEMUA ARAH KEBIJAKAN PENGELOLA WARISAN BUDAYA INDONESIA DI MASA MENDATANG Oleh: Daud A. Tanudirjo	105
12.	PEMAHAMAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MADANI Oleh: M. Dawam Rahardjo	122
13.	INDUSTRI BUDAYA: ARAH UNTUK RISET DAN PEMBELAAN Oleh: Prof. Dr. Edi Sedyawati	132

14. MALIN KUNDANG DAN PERANTAU BUDAYA KITA Oleh: Edy Utama	135
15. MEMBANGUN KONSEP KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEBUDAYAAN UNTUK MEMBERANTAS KORUPSI, TANTANGAN KITA UNTUK MENGEMBALIKAN HARKAT DAN MARTABAT BANGSA Oleh: Emmy Hafild	141
16. Mencari Tungku Api ke-Indonesia-an ? Oleh: Garin Nugroho	151
17. APA GERANGAN “ INDONESIA” ? Oleh: Goenawan Mohamad	156
18. WE'RE FROM BANDUNG ! Oleh: Gustaff H. Iskandar	164
19. HAK CIPTA KOMUNAL Oleh: Miranda Risang Ayu, SH, LLM	172
20. TEKNOLOGI DAN PEMANFAATAN LINGKUNGAN LAUT BAGI NELAYAN BAGANG 'RAMBO' Oleh: Hamka Naping	186
21. BAHASA INDONESIA: PENGEMBANGAN CARA PANDANG BANGSA DAN PEMANFAATAN PERUBAHAN Oleh: Harimurti Kridalaksana	197
22. DARI INDONESIA MERDEKA KE INDONESIA MULIA, UTOPIA ATAU SEBUAH KENISCAYAAN? (VISI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF BUDAYA) Oleh: Husni Djamaluddin	203
23. SENI DALAM PERSPEKTIF KEBUDAYAAN Oleh: I Made Bandem	209
24. IDENTITAS DAN INTEGRASI (POKOK PIKIRAN UNTUK KONGRES KEBUDAYAAN) Oleh: Ignas Kleden	224
25. PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA KITA (SUATU PRESEPSI DARI HASIL PENGAMATAN DALAM BENTUK POKOK-POKOK PIKIRAN) Oleh: Ishak Ngeljaratan	242
26. BUDAYA MARITIM DAN OTONOMI DAERAH Oleh: Muchlis PaEni	249
27. SANTRI, TRADISI LOKAL DAN KEBUDAYAAN Oleh: KH. Maman Immanuel Haq Faqieh	268

28. PUSAKA: KEANEKARAGAMAN, KEUNIKAN, DAN KERANGKA DASAR GERAKAN PELESTARIAN Oleh: Laretna T. Adishakti	274
29. PLURALITAS KEPENDUDUKAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA Oleh: M.A Tihami	299
30. MENGGUGAT BUDAYA NEOLIBERAL Oleh: Mubyarto	305
31. INDUSTRI BUDAYA KITA DAN SEJUMLAH PERTANYAAN Oleh: N. Riantiarno	315
32. STRATEGI PENGEMBANGAN WARISAN BUDAYA (SEBUAH PANDANGAN DARI SISI ARSITEKTUR) Oleh: Naniek Widayati	335
33. MULTIKULTUR ; POLITIK KEBUDAYAAN YANG MEMBERI RUANG KEPADA POTENSI BUDAYA LOKAL Oleh: Ngurah Paramartha	347
34. SEKILAS TENTANG PENYELENGGARAAN KONGRES KEBUDAYAAN Oleh: Nunus Supardi	351
35. SIMBOL KESETARAAN GENDER DALAM NASKAH LONTARAQ TANETE KARYA RETNA KENCANA ARUNG PANCANA TOA COLLIQ PUJIE Oleh: Nurhayati Rahman	369
36. IDENTITAS BUDAYA DAN CITRA DIRI INDONESIA DI TENGAH KONSTELASI GLOBAL Oleh: Nyoman Nuartha	381
37. PARADOKS BISSU BUGIS ; Mencari Identitas sekaligus Kehilangan Identitas Oleh: Halilintar Lathief	386
38. PLURALITAS KEPENDUDUKAN DALAM PERSPEKTIF Oleh: Iwan Nurdaya, Djafar dan Pulung Swandaru	399

EDIFIKASI DALAM INDUSTRI BUDAYA

Oleh: Alois Agus Nugroho

1. Pendahuluan

Sub-tema yang disodorkan oleh Panitia pada Selasa, 14 Oktober lalu, ialah “industri budaya”. Ini menimbulkan kesulitan tersendiri di samping waktu yang sangat sempit. Karena apa? Karena yang selama beberapa bulan ini diantisipasi adalah tiga sub tema dari Prakongres pada bulan April lalu, ialah “Lokalitas, Nasionalitas dan Globalitas”, “Identitas dan Krisis Budaya”, serta “Perubahan dan Pemberdayaan”. Akan tetapi perlu diperhatikan pula bahwa pada akhir Prakongres itu memang ada rekomendasi yang berbunyi: “Dalam penyelenggaraan Prakongres Kebudayaan V di Denpasar belum tercakup beberapa wilayah dan tema-tema yang cukup penting dan perlu diikutsertakan mengingat relevansinya dalam kebudayaan. Rangkaian tema tersebut adalah: ekonomi tersebut adalah: ekonomi rakyat, industri budaya (perbukuan, seni populer dll, religi dan spiritualitas, kesetaraan gender, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa dan simbol serta lingkungan hidup”.

Menggunakan istilah “industri budaya” mengandaikan bahwa budaya adalah sesuatu hal yang dapat diadministrasikan, utamanya dalam administrasi bisnis, tetapi juga dalam administrasi publik. Dalam administrasi publik misalnya suatu saat kita akan bertanya, berapa sumbangan industri budaya ini terhadap Pendapatan Bruto Nasional dan bagaimana cara meningkatkan kontribusinya. Dalam makalah pendek ini kita akan menyurutinya dari sisi mikro saja, kemudian kita akan sedikit mengulasnya dari perspektif Teori Kritis dan akhirnya kita akan mencoba mengakhirinya dengan membuat klasifikasi tentang peran budayawan. Tetapi sebelumnya akan kita lihat lebih dulu bahwa “hubungan industrial”, katakanlah demikian, antara insan-insan bisnis dan kesenian hanyalah salah satu saja dari hubungan-hubungan yang mungkin antara keduanya.

2. Bisnis dan Kesenian

Memang benar bahwa bisnis itu dapat memperlakukan kesenian sebagai komoditi. Atau sebaliknya dapat pula dikatakan, bahwa kerja kesenian memerlukan fungsi yang biasanya dikerjakan

orang dalam organisasi bisnis. Tidak hanya bahwa kerja kesenian sering memerlukan bantuan dana dari sponsor yang tidak jarang berasal dari dunia bisnis atau yayasan-yayasan yang memperoleh dananya dari kalangan bisnis (entah itu Ford, Rockefeller, Bill Gates atau versi domestiknya), tetapi lebih-lebih yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa untuk dapat setidaknya bertahan hidup (*survival*), entitas kesenian (perkumpulan drama, sanggar, paduan suara, penerbit puisi atau apapun) harus memiliki ketrampilan mengelola “sumber daya manusia”, properti, uang dan “penikmat”. Itu kalau hanya mau *survive*, apalagi kalau mau *excellent*.

Selain itu bagi bisnis, kesenian memang dapat menjadi komoditi. Jaringan toko buku QB dengan *upmarket* sebagai pasar sasaran memasarkan karya-karya sastra Indonesia yang *trendy*. Majalah internasional yang menjadikan investor atau orang-orang yang ingin menjadi kaya sebagai pasar sasarnya, *Fortune*, pernah menurunkan laporan apa kelebihan menjadikan koleksi lukisan (serius) sebagai portofolio investasi. Sertifikat deposito, reksadana, saham ataupun obligasi dapat saja diperbesar dan dipajang di ruang tamu atau ruang keluarga. Tetapi lukisan tentu dapat “dinikmati”. Lagipula, pertumbuhan nilai (*growth*) dari lukisan tertentu dan dari pelukis tertentu dapat lebih besar dari pertumbuhan nilai kekayaan yang ditanamkan pada instrumen investasi berupa saham atau reksadana. Yang fenomenal dalam budaya populer kita, meskipun barangkali daur hidupnya (*product life cycle*) pendek, adalah dangdut dengan *brand* khusus, yaitu dangdut cap Inul. Pada akhir musim nanti, pada saat produk itu memasuki fase *declining*, kita bisa bertanya pada stasiun-stasiun televisi, utamanya SCTV, berapa *return on investment* dari portofolio Inul ini.

“Menikmati” lukisan (misal karya Claude Monet, Vincent Van Gogh atau Paul Gauguin), “menikmati” musik dan seni vokal (misal suara Josh Groban atau Helmut Lotti) dan “menikmati” dangdut cap Inul di televisi membawa kita kepada hubungan kedua antara dunia bisnis dan dunia kesenian. Dunia kesenian menawarkan “*rekreasi*” pada insan-insan bisnis dalam arti biasa kala itu, yaitu untuk melupakan hidup rutin sehari-hari. Pengalaman “*rekreasi*” itu tidak harus berupa “relaksasi” seperti dalam kasus dangdut cap Inul. Dia dapat penuh dengan untaian airmata yang kelihatan maupun tidak kelihatan (tidak kelihatan

karena lampu gedung bioskop dimatikan).

Tetapi sebenarnya keterkaitan dunia bisnis dan dunia kesenian lebih dari itu. Ada satu *linguistic currency* yang berlaku di dunia bisnis maupun di dunia kesenian, yaitu "kreativitas". Manajemen bisnis merumuskan istilah itu sebagai kemampuan berasosialisasi yang menghubungkan dua hal yang sebelumnya tidak dilihat sebagai berhubungan. C dari komputer dihubungkan dengan C dari komunikasi menghasilkan internet seperti yang kita nikmati sekarang ini. Para sastrawan Indonesia pernah menulis buku yang berjudul *Proses Kreatif*, sampai dua jilid. Perusahaan bernama 3M merupakan contoh perusahaan yang sangat mengeksplisitkan nilai kreativitas itu.

Dan sebenarnya, bisnis pun bisa belajar lebih dari sekadar "kreativitas". Kesenian dapat memperdalam dan mempertajam kepekaan manusiawi, etis dan estesis, dari para pelaku bisnis. Misalnya, dengan menatap dan merenungi lukisan "de Aardapeleters" dari van Gogh atau karya-karya Dede Eri Supria tentang anak-anak kecil yang bermain dengan latar pencakar langit Jakarta.

3. Industri Budaya

Ketika budaya menjadi komoditi maka dia tidak dapat mengelak dari tentakel konsep-konsep manajemen bisnis. Dia menjadi kosa kata dalam diskursus manajemen dan menjadi entitas dari bentuk kehidupan (*from of life*) perniagaan.

Kita misalnya, dapat mengidentifikasi produk budaya (atau lebih baik produk kesenian) sebagai barang atau jasa. Secara gampang dikatakan bahwa lukisan dan patung adalah benda, pementasan sandiwara, seni tari, seni suara adalah jasa. Dalam buku teks dikatakan bahwa jasa itu dibedakan dari produk yang berupa benda karena jasa itu *intangible*, *perishable*, *heterogeneous* dan keberhasilan "penikmatannya" melibatkan partisipasi konsumen.

Pada tingkat ini pun sudah ada kesulitan, utamanya mengenai produk yang berupa "benda": Produk berupa (buku) novel atau (buku) puisi itu benda atau jasa? "Penikmatan" lukisan juga memerlukan partisipasi penikmat sehingga lebih tepat dikategorikan sebagai *service encounter* (perjumpaan jasa) seperti halnya menghadiri pembacaan puisi, konser, pementasan teater atau (sekadar?) nonton ketoprak humor.

Pada produk budaya yang berupa “barang” atau “benda” seni senantiasa ada “Makna”, ide, pengalaman yang melibatkan penikmat, ada aspek “jasa”. Penikmatan benda budaya, seperti halnya jasa budaya, senantiasa merupakan “*service encounter*”. Dalam industri budaya ini, benda dan jasa seyogyanya tidak dilihat sebagai dua hal yang diskontinyu. Benda dan jasa dalam industri kebudayaan selayaknya dilihat sebagai dua kutub dalam sebuah kontinum dan “benda” seni tidak terletak di kutub ekstrim “benda” dalam kontinum itu. Benda seni memang *tangible*, tidak *perishable* tetapi unik dan dalam arti itu juga *heterogeneous* dan berhasil tidaknya proses penikmatannya memerlukan partisipasi penikmatnya. Pemasaran produk kesenian selayaknya menjadi model dari apa yang kini sedang menjadi *hype* dalam manajemen pemasaran, yakni *experience marketing*.

Banyak pembaca novel Umberto Eco, *The Name of The Rose*, barangkali menganggap novel itu sebagai kisah “*whodunnit*” saja, apalagi versi layar perak dibintangi oleh bintang Sean Connery. Yang agak menggelikan, perpustakaan sebuah sekolah tinggi filsafat ternama di Jakarta mengklasifikan buku itu ke dalam kategori “Sejarah Gereja” (apa batas fiksi dan fakta, dalam hal ini sejarah?) Kedua cara pandang ini tidak dapat mengartikan adagium yang terdapat pada akhir novel: *stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus* (mawar ada sebelum namanya, kita berpegang pada namanya belaka). Banyak pembaca novel Milan Kundera, *The Unbearable Lightness of Being*, mungkin menganggap novel itu mengkisahkan cinta segitiga dan mengesampingkan kalimat Goethe yang dikutip Kundera pada awal novel: *Einmal ist keinmal* (sekali itu sama dengan tidak pernah sama sekali). Apa yang dalam hermeneutika Gadamer disebut sebagai “horison” dari si Penikmat memainkan peranan penting dalam penikmatan produk kesenian, baik berupa -dalam istilah administrasi bisnis- benda ataupun jasa.

4. Edifikasi dalam Penikmatan Produk Budaya

Jika penikmatan karya seni memerlukan keterlibatan si Penikmat, maka sejauh mana diperhatikan dan bukan hanya benda atau peristiwa-apresiasi atau “pendidikan” terhadap horison penikmat merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan. Tanpa itu *service encounter* tidak akan terjadi, atau tidak akan terjadi secara efektif

atau akan terjadi dengan tingkat *service quality* yang rendah.

Dalam konteks ini, istilah Gadamer *Bildung* yang diinggriskan oleh Rorty menjadi *edification*, menampakkan relevansinya. Dalam edifikasi, peserta didik diperkenalkan kepada “morfologi”, “semantik” dan “idiom-idiom” dari cabang kesenian atau aliran kesenian tertentu sesudah apresiasi yang berupa persentuhan langsung dengan karya seni terkait. Edifikasi membuat peserta didik *familiar*, terbiasa dan akrab dengan satu karya seni sehingga dapat menikmatinya dalam suatu *service encounter*.

Edifikasi kesenian bukan hanya penting dalam rangka meningkatkan *service quality* dari “industri sektor budaya” kita. Edifikasi kesenian juga penting bagi mereka yang memiliki panggilan untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Dalam konteks meningkatkan “kualitas jasa” dari “industri sektor budaya” kita, edifikasi tidak lain adalah sosialisasi kepada pasar atau prospek yang berisikan hal-hal yang secara wajar dapat diharapkan dari suatu “pengalaman budaya”. Edifikasi adalah proses mempengaruhi “ekspektasi konsumen” sehingga dalam “kenikmatan jasa budaya” konsumen itu dapat berpartisipasi secara maksimal dan dengan demikian kualitas jasa yang dihasilkan juga maksimal, dengan pengandaian para pekerja budaya sendiri sudah berusaha mementaskannya secara maksimal.

Harus diakui bahwa dalam hal ini kita masih punya pekerjaan rumah yang banyak. Pengalaman di beberapa horeca (hotel, restoran, cafe) di Indonesia menunjukkan perlunya pembenahan itu. Dalam sebuah konvensi internasional di daerah Lembang, Bandung, pada penghujung tahun 1996 dipentaskan beberapa tarian Sunda sesudah jamuan makan. Peserta tidak diberitahu sama sekali apa nama tarian itu, apa artinya (kalau ada), kapan biasanya dipentaskan, dimana letak keindahan dan sebagainya. Dan dalam konvensi yang lain pertengahan 2003 ini, di salah satu hotel di Cisarua dipentaskan berturut-turut tiga tarian Bali di depan audiens yang semuanya awam tentang seni tari Bali, atau bukan, dan ketiganya dipentaskan tanpa nama, tanpa arti, singkatnya tanpa edifikasi.

Pendidikan seni dalam pendidikan formal sebaiknya juga merupakan edifikasi dan bukan sekedar pendidikan seni menghafal, jadi tidak hanya berhenti pada menghafal bentuk-bentuk sajak sejak zaman Abdullah bin Abdulkadir Munsji dan

menghapal judul-judul roman sejak zaman Balai Pustaka. Pada tingkat sekolah lanjutan, peserta didik sebaiknya sudah diajak membaca dan mengkliping tinjauan-tinjauan atau kritik-kritik seni di berbagai media dan mendiskusikannya. Dan tidak hanya berpikir monoton dengan nada dominan yang diberikan oleh buku-buku teks. Kita tidak tahu apakah kita sekarang ini tetap menganggap penting pendidikan kesenian di sekolah, tetapi kita dapat mencatat adanya kegandrungan di kalangan pakar pendidikan tentang intelegensi emosional (*emotional intelligence*), dan yang paling mutakhir tentang *multiple intelligence*.

Peran yang juga penting dalam proses edifikasi ini ialah peran para “komunikator” atau “pemasar” budaya, semisal para guru orkes (mengapa kesenian disatukan dengan olah raga?), kurator, *connoisseur*, para penggiat atau aktivitas komunitas penikmat seni, wartawan seni dan budaya dan para kritikus seni.

5. Edifikasi Sebagai Normalisasi

“Aku tidak bermain bagi bayi-bayi” kalimat Beethoven ini dikutip oleh penyair kita Soebagjo Sastrowardjo. “Yang bukan penyair tidak ambil bagian” ini kalimat penyair kita Chairil Anwar. Yang diacu bukanlah *gap* antara persepsi atas mutu jasa dan harapan calon konsumen. Yang diacu adalah harapan calon konsumen dengan harapan yang seharusnya, yang “normal”, dalam cabang kesenian terkait. Budayawan dalam arti “komunikator” budaya mempunyai tugas untuk menutup jurang di antara kedua harapan itu. Itulah fungsi edifikasi, yang oleh manajemen pemasaran sering disebut “sosialisasi”.

Sesudah pada tahun 1944 Adorno dan Horkheimer mengajukan kritik terhadap sosialisasi tentang ekspektasi yang normal ini. Kritik ini tidak berlaku pada budaya pop saja. Kritik ini berlaku pada budaya sejauh ia dilihat dan diperlukan sebagai “industri”. Sebagai istilah, kata “industri budaya” ini nampaknya juga diperkenalkan oleh kedua pemikir dari Aliran Kritis atau Frankfurt itu. Sosialisasi itu bagi Adorno dan Horkheimer tidak lain ialah usaha mempengaruhi ekspektasi pasar dan menyesuaikannya dengan apa yang oleh produsen dianggap “normal”. Dengan demikian terjadi standardisasi yang sangat penting bagi efisiensi industri.

Judul dapat berbeda-beda, untuk lakon yang pada intinya

sama. Sinetron “Kenapa harus Inul?” adalah versi pascamodern dari “kisah Bawang Merah” dan Cinderella. Beberapa tokohnya dapat saling dipertukarkan dengan telenovela misalnya “Esmeralda”. Di belakangnya ada resep normal yang standar. Orang sengsara yang bercucuran airmata dalam menapaki jalan hidupnya, perjalanan ke arah kebahagiaannya tertunda oleh bermacam konflik, namun akhirnya “*they live happily ever*”, “*ze leven lanng en gelukkig*”. Dan kaum pekerja dalam realitas sehari-hari terharu sekaligus terhibur dan memperoleh kekuatan dan harapan untuk bekerja lagi esok harinya dalam jenis kerja yang rutin, menjemukan dan dibayar murah. Mereka lupa untuk mogok dan memegang tidak perlu, karena harapan selalu ada seperti dialami oleh tokoh Inul dan Esmeralda. Perhatikan juga tiadanya batas antara fiksi dan fakta di sini. Dalam media cetak juga kita temui rubrik semacam “kisah nyata”, “Oh Mama. Oh Papa”, “Indonesiana” atau semacam itu.

Itu semua dihubungkan dengan mitos “selera pasar”. Seakan-akan “industri” didikte oleh pasar. Seakan-akan para penikmat dan konsumen itu agen-agen yang bebas, yang otentik. Banyaknya acara “dunia lain” versi pertelevisian Indonesia tampaknya bukan tanpa hubungan dengan “sukses” film “Jelangkung” dan dengan acara “the sceriest place” yang diimpor ke Indonesia. Dengan begitu, kisah-kisah itu menjadi bagian penting dalam *conversation*.

6. Budayawan Sebagai Insan Pembaru

Dalam konteks kritik terhadap dialektika pencerahan, apa yang dikatakan di atas tampaknya berlaku pula bagi kesenian yang normalnya dianggap lebih “serius”. Budayawan dalam arti komunikator budaya yang memainkan fungsi edifikasi memang bertugas untuk mensosialisasikan, mengefektifkan dan dengan demikian juga, melestarikan hal-hal yang dianggap normal, patut, dalam suatu kebudayaan atau cabang-cabang kesenian terkait. Dalam bahasa industrial itu berarti menyamakan ekspektasi sehingga ekspektasi itu tidak jauh berbeda dari apa yang ada dalam masyarakat. Akan tetapi, bahkan dalam zaman pascamodern pun, kerinduan terhadap “budayawan besar” (istilah Rorty ialah “*strong poet*”) itu tetap ada. Mereka itu ialah orang-orang yang berusaha “menerobos” normalitas, secara kreatif menjelajahi versi-versi yang lain dari yang normal, resep-

resep yang tidak menjadi “selera industri” dan sekaligus “selera pasar” dan selera kebanyakan kritikus yang ada.

Budayawan sebagai komunikator membawa masyarakat ini kedalam bentuk kehidupan yang sejahtera. Budayawan sebagai insan pembaharu ialah *risk-taker* yang berusaha mencari bentuk kehidupan yang lebih baik. Hidup seperti itu tidak meminimalkan risiko. Hidup seperti itu penuh risiko. Kita ingat keluhan Vincent van Gogh kepada Theo, adiknya, si penjual lukisan itu. Kita ingat kata-kata Chairil Anwar: “Kau kawin, beranak dan berbahagia/ sedang aku mengembara seperti Ahasveros/dikutuk sumpahi Eros aku merangkaki dinding buta/tak satu juga pintu terbuka”. Kita ingat kalimat yang dipakai oleh Albert Camus sewaktu mengutuk novelnya, “Mitos Sisiphus”: kita harus membayangkan Sisiphus bahagia.

*) Penulis adalah dosen filsafat di Universitas Indonesia, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dan Direktur Pascasarjana Unika Atma Jaya Jakarta. Kumpulan puisinya akan diterbitkan akhir 2003 oleh pernebit Indonesia Tera.

PELAJARAN MUATAN LOKAL

Oleh: **Ali Hadara**

Utusan Provinsi Sulawesi Tenggara

1. Pendahuluan

Muatan lokal (mulok) sebagai salah satu unsur muatan Kurikulum 1994 mulai diterapkan sejak tahun 1994. Status mulok sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah (dasar dan menengah) kemudian diperkuat posisinya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan pada tanggal 8 Juli 2003. Di dalam UU tersebut, mulok ditetapkan sebagai salah satu dari 10 mata pelajaran yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Akan tetapi, bagaimana dan apa isi mulok tersebut akan ditentukan kemudian dalam ketentuan peraturan lainnya seperti PP, Kepmen atau SK Dirjen. Dengan demikian, masih terbuka peluang masukan kepada pihak penentu kebijakan dalam rangka penyusunan ini (substansi) muatan lokal dalam Kurikulum 2004. Karena Kurikulum 2004 masih dalam proses, pelaksanaan mulok di sekolah tetap berpedoman pada ketentuan Kurikulum 1994 serta peraturan lainnya.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai masalah yang dihadapi selama kurang lebih 10 tahun penerapan mulok di sekolah. Khususnya di Sulawesi Tenggara, dalam aspek kebudayaan (mata pelajaran bahasa daerah) serta mencoba mengajukan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dalam penerapan mulok tersebut. Hasilnya diharapkan menjadi bahan saling tukar informasi dan diskusi bagi upaya pengembangan kurikulum muatan lokal, utamanya yang berkaitan dengan aspek kebudayaan di dalam kurikulum 2004.

2. Masalah yang Dihadapi

Berdasarkan Kurikulum 1994 pihak Depdikbud mengeluarkan kebijakan bahwa isi mulok pada tiap-tiap provinsi dapat berupa mata pelajaran kesenian, keterampilan (bercocok tanam, beternak, mengukir, menganyam, membantik, merajut, mengelas dan ketrampilan lainnya), bahasa daerah dan budaya daerah, dan bahasa Inggris untuk SD. Penentuannya dikaitkan

dengan ketersediaan tenaga pengajar, buku pelajaran dan sumber belajar lainnya serta sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Isinya ditentukan oleh daerah, dalam hal ini Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat informasi, saran dan masukan dari Pemerintah Daerah/Bappeda, para tokoh masyarakat dan instansi terkait, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten pada wilayah provinsi yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pihak Kanwil Depdikbud Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan bahwa daerah (Tolaki, Muna dan Wolio) sebagai muatan utama, sementara materi pilihan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah kecamatan, desa/kelurahan dan sekolah. Ketentuan ini termuat dalam SK Kakanwil Depdikbud Provinsi Sulawesi Tenggara No. 001/123/I/1994, tanggal 2 April 1994.

Selama kurang lebih 10 tahun penerapan mulok tersebut berbagai kendala yang dihadapi oleh pihak sekolah, utamanya yang berkaitan dengan aspek kebudayaan (bahasa daerah) dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, dari segi guru yang tidak dipersiapkan sebelumnya sehingga berlaku prinsip "tidak ada rotan akarpun jadi". Biasanya guru mulok (bahasa daerah) adalah guru yang dapat berbahasa daerah berdasarkan pengalaman sehari-hari saja, tetapi tidak menguasai secara teoritis. Bagaimanapun bahasa daerah memiliki kaidah dan aturan tata bahasa yang harus dipelajari secara sungguh-sungguh oleh guru. Sistem guru kelas juga merupakan kendala tersendiri. Masalah yang muncul di dalam sistem guru kelas ini adalah bagaimana dengan guru yang tidak menguasai bahasa daerah. Akibatnya, guru tidak serius mengajar, terkesan asal-asalan dan akal-akalan, apalagi mata pelajaran ini tidak diebtanaskan. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan buku paket serta buku-buku pendukung lainnya.

Kedua, dari segi siswa dengan latar belakang kultural yang berbeda-beda, terutama sekolah di kota dan daerah transmigrasi. Mereka kurang tertarik dengan pelajaran bahasa daerah karena merasa bukan bahasa ibunya, siswa merasa sebagai pendatang, atau tidak membutuhkan dalam aktivitas kesehariannya. Pihak Kanwil Depdikbud Sulawesi Tenggara hanya mewajibkan tiga bahasa daerah (Tolaki, Muna dan Wolio) padahal di daerah ini terdapat sekitar 30 bahasa lokal yang

tersebar di lima kabupaten dan dua kota, yang antara satu bahasa dengan bahasa lainnya sangat berbeda. Di Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau saja terdapat lebih dari 20 bahasa lokal namun hanya satu bahasa yang wajib dipelajari, yaitu bahasa Wolio. Ini menjadi masalah besar bagi sekolah yang tak satu pun gurunya mengerti bahasa Wolio apalagi mengajarkannya. Di kota kendalanya lebih rumit lagi, latar belakang etnik siswa di kota beranekaragam dan populasinya hampir seimbang. Artinya, tidak ada bahasa yang dominan, lantas bahasa daerah apa yang harus diajarkan. Demikian pula sekolah-sekolah di daerah transmigrasi yang umumnya berasal dari Jawa dan Bali, memerlukan belajar bahasa daerah lain.

Ketiga, Pemerintah pun menerapkan kebijakan “setengah hati”, kurang tegas, tidak disertai kebijakan pendukung seperti pengadaan guru mulok atau pelatihan guru mulok, pengadaan buku-buku paket, atau ketentuan pengaturan guru mulok. Keadaan ini ditambah dengan belum terbentuknya lembaga seperti Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah dalam usaha pengembangan kurikulum muatan lokal. Oleh sebab itu penerapan kurikulum mulok di sekolah terkesan “terseok-seok”, hidup enggan mati tak mau.

3. Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, kiranya perlu mempertimbangkan atau mengarusutamakan hal-hal berikut:

Pertama, tentunya perlu pengadaan guru mulok, paling tidak pelatihan terhadap guru yang sudah ada. Untuk memenuhi kebutuhan guru mulok, LPTK seperti FKIP perlu membuka jurusan/program studi bahasa daerah. Upaya ini harus dibarengi dengan kebijakan pengadaan buku-buku mata pelajaran muatan lokal di daerah-daerah. Sistem guru kelas harus diganti dengan guru bidang studi, seperti mata pelajaran agama dan olahraga. Jika di sebuah sekolah tidak terdapat guru mulok, dapat dilakukan sistem silang (lintas sekolah).

Kedua, kerjasama guru dengan para stakeholders terutama Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah perlu dikembangkan dan dimaksimumkan untuk memikirkan dan membicarakan berbagai masalah yang dihadapi dalam penetapan dan pengajaran muatan lokal. Hal ini harus diikuti dengan sikap tegas pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan

dan kebudayaan dalam pembinaan dan pengawasan.

Untuk pelajaran budaya lokal, antara lain, dapat diajarkan materi adat-istiadat atau nilai-nilai yang selama ini dijunjung tinggi dan bermanfaat bagi pembangunan sosial budaya, misalnya aspek gotong royong, adat sopan santun, tata krama pergaulan, dan falsafah hidup.

Materi sejarah lokal, antara lain, berupa perkembangan sejarah perjuangan menentang setiap bentuk penjajahan. Di sini kita akan menemukan tokoh-tokoh pejuang yang selama ini masih diselimuti oleh kabut kegelapan. Tidak hanya itu, mungkin pula kita akan menemukan para pemikir, tokoh agama, pahlawan kemanusiaan dan sebagainya. Pelajaran sejarah perjuangan akan membangkitkan semangat patriotisme dan kebanggaan nasional. Dari materi sejarah lokal, seorang siswa dapat mengambil pelajaran (hikmah) sehingga kelak menjadi arif dan bijaksana.

Pentingnya mempelajari budaya dan sejarah lokal ini telah diakui oleh para ahli. Misalnya, sejarawan Sartono Kartodisardjo (1982) mengatakan bahwa seringkali hal-hal yang ada di tingkat nasional baru bisa dimengerti dengan lebih baik apabila kita mengerti dengan baik pula perkembangan di tingkat lokal. Hal-hal di tingkat yang lebih luas itu biasanya hanya memberikan gambaran dari pola-pola serta masalah-masalah umumnya, sedangkan situasinya yang lebih konkret dan mendetail baru bisa diketahui melalui gambaran sejarah lokal. Dengan mempelajari budaya dan sejarah lokal, kita tidak hanya bisa memperkaya perbendaharaan kita tentang budaya dan sejarah nasional, tapi lebih penting lagi memperdalam pengetahuan kita tentang dinamika sosiokultural dari masyarakat Indonesia yang majemuk ini secara rutin. Dengan demikian, kita makin menyadari pula bahwa ada berbagai corak penghadapan manusia dengan lingkungannya dan dengan kepentingan mempelajari sejarah. Lebih tegas dikatakan oleh AB. Lopian (1980) bahwa kepentingan mempelajari sejarah lokal, pertama-tama adalah untuk mengenal berbagai peristiwa sejarah di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia dengan lebih baik dan lebih bermakna. Kedua, untuk bisa mengadakan koreksi terhadap sejarah nasional. Ketiga, untuk memperluas pandangan tentang dunia Indonesia.

Dengan demikian pengajaran budaya dan sejarah lokal dalam

jangka panjang akan memperjelas identitas dan jatidiri setiap daerah dengan segala kearifan lokalnya. Hal ini sangat dibutuhkan dalam kerangka otonomi daerah, dalam arti bahwa daerah memang membutuhkan identitas, jati diri atau ciri khas (ideografis) yang berbeda dengan yang lain, tetapi setara dalam satu kesatuan Negara Republik Indonesia serta menghindari kecenderungan munculnya disintegrasi sosial.

4. Penutup

Selama kurang lebih 10 tahun penerapan mata pelajaran mulok di sekolah berbagai kendala yang dihadapi di Provinsi Sulawesi Tenggara, utamanya yang berkaitan dengan aspek kebudayaan (bahasa daerah) dapat dilihat baik dari segi guru, buku paket, siswa, pemerintah, maupun stakeholder. Kendala bisa diatasi dengan jalan pengadaan dan pelatihan guru mulok, membuka jurusan/program studi bahasa daerah, pengadaan buku pelajaran muatan lokal, perlunya sistem guru bidang studi dan sistem silang, kerjasama guru dengan stakeholders, sikap tegas pemerintah, perlunya perubahan istilah bahasa “daerah” menjadi bahasa “lokal”, kalau perlu mereposisi mata pelajaran bahasa daerah menjadi mata pelajaran pilihan, bukan utama, diganti dengan mata pelajaran budaya lokal yang dapat diperkaya dengan materi sejarah lokal atau sebaliknya, sejarah lokal diperkaya dengan materi budaya lokal.

DAFTAR SUMBER

A. SUMBER TERTULIS

A. B. Lopian

1980 *Memperluas Cakrawala Melalui sejarah Lokal*,
Majalah Prisma, No. 8 tahun IX. LP3S, Jakarta

Anonim,

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

A. W. Pratiknya, dkk,

1993 *Kurikulum 1994 Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah*, Kelompok Kerja Pemasayarakatan
Kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Jakarta

Panitia Seminar Sejarah Lokal

1982 *Buku Petunjuk Seminar Sejarah Lokal*, Proyek
ISDN, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional
Depdikbud, Jakarta.

Sartono Kartodirdjo

1982 *Pemikiran dan Perkembangan Histortigrafi
Indonesia, Suatu Alternatif*, PT. Gramedia, Jakarta

William A. Haviland

1988 *Antropologi*, Terjemahan, Erlangga, Jakarta

B. SUMBER LISAN

Arah, Kepala SD 18, Poasia

Ahmad Abudin, Guru SLTN 4, Bau-Bau

Ali Hanan, Koordinator Pengawas Kabupaten Buton

Hawio, Kepala SD I Rukuwa, Binongko

Usman, Kepala SMU I, Binongko

La Ode Dulu, Guru SLTP I, Tomia

BUDAYA INOVASI DAN KOMPETISI

(SUATU PENELUSURAN AWAL)

Oleh : **Abu Hamid**

1. Pendahuluan

Wujud kebudayaan harus dipahami sebagai suatu sistem pengetahuan, gagasan, dan kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Fungsi dari sistem ini memberikan pedoman bagi masyarakat dalam hal bersikap dan berperilaku atas kontakannya dengan lingkungan alam dan sosial tempat mereka berada. Kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat merupakan kekuatan abstrak yang mampu memaksa dan mengarahkan pendukungnya untuk berperilaku sesuai dengan sistem pengetahuan, gagasan, dan kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat.

Kebudayaan sebagai suatu sistem, dimiliki oleh anggota masyarakat melalui proses belajar, sejak ia lahir sampai ajal menjemputnya. Kebudayaan mengatur kehidupan kita setiap saat, sadar atau tidak mengenai hal ini, rupanya ada tekanan untuk mengikuti dan membentuk perilaku kita sesuai dengan apa yang telah diciptakan oleh pendahulu kita. Banyak lagi penjelasan tentang dimensi kebudayaan seperti terlukis dalam buku C.Kluckhohn. Pandangan seperti ini melihat kebudayaan sebagai "warisan" yang tidak perlu diganggu, cukup mengikuti saja apa yang sudah ada, adalah suatu realitas yang sudah diciptakan dan sudah dilembagakan.

Apabila kebudayaan dipandang sebagai warisan sosial dengan segala yang tampak berupa perilaku dan benda-benda produk, kegiatan penelitian terhadapnya tentunya ide yang terbentuk dalam kelompok etnik, seperti halnya yang diperhatikan adalah berupa benda-benda fisik yang sudah jadi. Masih berkisar pada pandangan ini, dikatakan bahwa setiap kebudayaan merupakan susunan teknik-teknik adaptasi atau strategi terhadap ekosistem dan memperoleh input dari luar. Strategi adaptif tersebut lahir dari dalam masyarakat melalui lembaga yang berfungsi evaluatif, selektif dan dinamik mengembangkan semua aspek kebudayaan dan memproduksi output berupa perilaku pemangku kebudayaan. Semua itu adalah hasil kearifan budaya atau semacam *local knowledge*

yang menjadi sumber perkembangan budaya secara luwes melalui tranformasi. Apabila ilmuwan sosial mengandalkan penelitian terhadap proses perubahan masyarakat dan kebudayaan, maka yang menjadi perhatian mereka adalah perubahan bentuk, fungsi, dan peranan dari yang lama kepada yang baru, berarti pembaharuan ide-ide, pergeseran perilaku, dan perubahan wujud benda fisik yang sudah ada atau yang sedang terjadi.

Dalam hubungan dengan pendapat, bahwa kebudayaan menimbulkan berbagai kebutuhan dan kepentingan serta menyediakan cara-cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, selain kebutuhan primer, lebih besar biayanya adalah kebutuhan kebudayaan, seperti kebutuhan tentang gengsi sosial, gaya hidup, dan keinginan berprestasi. Kepentingan politik untuk posisi tertentu, menimbulkan berbagai konflik sosial, dalam arti konflik kepentingan, namun dalam kebudayaan itu sendiri sudah tersedia resep untuk meredam konflik, hanya anggota masyarakat belum menemukan resep tersebut. Kebudayaan yang dilihat dari aspek waktu, memiliki pancaran sejarah, yaitu aspek sejarah masa lalu, biasa dalam bentuk baru yang sudah mengalami seleksi berkembang secara trasformatif, akhirnya sampai pada kita. Penemuan dan invensi baru, material dan ideologis serta sistem kepercayaan, dipersiapkan oleh kelompok individu melalui kontak-kontak historis dengan individu lain atau dicipta oleh kelompok sendiri. Akumulasi sejarah berbagai warisan sosial, anak manusia yang lahir dari warisan tersebut melanjutkannya, biasanya dalam bentuk yang sudah disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan perkembangan masyarakat.

Uraian ringkas tersebut di atas, adalah pandangan yang melihat kebudayaan sebagai warisan yang sudah jadi dengan fungsinya yang transformatif, dijadikan latar untuk uraian selanjutnya dalam kesempatan yang mendadak ini sesuai penugasan panitia pengarah.

2. Daya Cipta Sebagai Unsur Kebudayaan

Hampir semua unsur-unsur kehidupan ini sudah mengalami transformasi atas perubahan waktu, terjadinya penemuan baru dan adanya difusi unsur budaya asing dari luar. Menurut teori transformasi, bahwa beberapa unsur budaya gugur karena tidak

diperlukan lagi dan yang lainnya berlanjut terus dengan modifikasi tertentu. Unsur budaya yang gugur tersebut, adakalanya muncul kembali dengan konsep yang diperbaharui dan interpretasi yang baru pula. Sementara unsur budaya yang berlanjut karena gagasan dan nilai yang dikandungnya masih disadari pentingnya oleh sebagian anggota masyarakat. Transformasi bisa membawa pembaharuan dan mungkin pula membawa kemerosotan, bila daya selektivitas kurang memadai

Transformasi tradisi, disebut demikian sejak kehidupan manusia tergantung atau ditentukan oleh alam, namun secara perlahan manusia mencipta dan memajukan kebudayaan. Pewaris secara simbolis, secara tradisi lisan/tulisan, melalui kultus, rias-ritus dan sistem kepercayaan inilah yang dipelajari dan disadari oleh generasi masyarakat sekarang.

Pertanyaan yang muncul, apakah masih perlu dianut ajaran teori transformasi dalam keadaan masyarakat yang serba cepat dengan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi canggih sekarang ini? Kondisi pemerintah dan kehidupan masyarakat telah mengalami perubahan mendasar yang tentunya berpengaruh pada budaya bangsa. Di samping perkembangan globalisasi dan modernisasi bidang-bidang kehidupan, perubahan itu adalah konsekuensi pula yang berpengaruh terhadap kebudayaan.

Sudah lama Soedjatmoko¹ memperingatkan pada kita suatu konsep "Revolusi Pengetahuan" yang harus digunakan secara konsekuen dari kemampuan ilmu pengetahuan untuk keperluan industrial. Inovasi dan invensi bukanlah merupakan peristiwa insidental, melainkan merupakan hasil pencaharian ilmiah yang direncanakan dan diatur secara sadar. Pengerahan ilmu pengetahuan terhadap pengembangan masyarakat dan kebudayaan, seharusnya perantara penelitian dan pengembangan yang berorientasi penemuan. Temuan-temuan dari hasil pengarahan ilmu pengetahuan, bukan temuan reduplikasi atau semacam inventarisasi, melainkan sesuatu yang bisa membawa perubahan dan pembaharuan bila

¹ Soedjatmoko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, Jakarta : LP3S. 1984, hlm. 28-30

² Lihat Thomas S. Khun, *The structure of Scietitic Revolution*, 1963 (diterjemahkan oleh Tjun Surjaman dengan judul *Paradigma dalam Revolusi Sains*) 1993

dimanfaatkan. Kenyataan sekarang, hampir semua instansi sudah memiliki lembaga penelitian, namun hasil penelitian tersebut belum diolah apalagi dipergunakan.

Revolusi pengetahuan yang menyangkut masalah mendasar sudah berjalan di negara-negara maju atau negara industri. Pengaruhnya terhadap kemajuan ekonomi industri, makin maju pesat dan makin kaya, sementara negara berkembang terlambat dan makin miskin. Kemajuan negara maju tersebut membangkitkan kekuatan sosial sebagai akibat dan invensi atas pengarahan pengetahuan melalui penelitian berencana dan mendalam, telah mengubah kehidupan manusia dalam paruh kedua abad ke 20. Dalam abad 21 ini negara maju sudah melaju dengan pembuatan barang-barang sintetis penyaringan air laut untuk keperluan irigasi, pengolahan bahan mentah menjadi bahan siap pakai, dan kemajuan lainnya.

Konsep revolusi pengetahuan, rupanya ada kemiripan dengan konsep Thomas S. Khun² yang mengajukan supaya berguru pada sejarah yang harus menjadi titik pangkal; penelitian. Dikatakan bahwa perubahan mendalam haruslah melalui revolusi ilmiah, bahwa kemajuan ilmiah pertama-tama bersifat revolusioner, bertentangan dengan sebelumnya, bahwa ilmu pengetahuan maju secara kumulatif. Khun adalah filosof yang berorientasi pada sejarah ilmu. Konsep pokok Khun ialah paradigma yang dapat ditafsirkan sebagai cara pandang terhadap dunia dan praktek ilmiah konkrit.

Marilah kita maknai konsep revolusi pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang sifatnya harus sistematis dan obyektif dalam aspek dinamis dan kreatif, yaitu kegiatan manusia kreatif, senantiasa mengejar pengetahuan baru, selalu tergugat jiwa dan pikirannya untuk menemukan sesuatu yang berguna, tanpa pernah puas atas semua temuannya itu. Semua komponen sosial, diharapkan memiliki sikap demikian, terutama kaum intelek yang merasakan dirinya alumnus perguruan tinggi tidak terbatas pada kaum intelek saja, namun pemimpin organisasi dan tokoh masyarakat disyaratkan selalu bersikap sebagai pengejar dan penemu konsep baru. Apakah pendidikan tinggi perlu menjadi *research university* atau membuat program studi doktor peneliti? Semua ini merupakan alternatif tentunya disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan, mengingat hambatan, dan kerumitan perlu terlebih dahulu disingkirkan,

seperti kondisi ekonomi dan politik. Tidak kalah pentingnya sebagai penghambat adalah mentalitas bangsa, dalam arti kondisi kebudayaan itu sendiri.

Inovasi unsur-unsur kehidupan berarti perubahan besar yang dilakukan secara berencana dan secara bersama diterima sukarela, maka ketika itulah budaya inovasi sudah terjelma. Daya cipta dibangun dengan revolusi pengetahuan melalui penelitian dan pengembangan kreativitas terus-menerus, sampai kegiatan itu dirasakan suatu kebutuhan, maka daya cipta sudah menjadi bagian kebudayaan. Inovasi dan daya cipta terkait satu dengan lainnya dan *inter play* antara keduanya yang memajukan perkembangan kebudayaan.

3. Kompetisi Sebagai Suatu Sistem Kebudayaan

Dalam masyarakat yang unik tidak dianut ajaran individualisme, Kompetisi dianggap sesuatu yang negatif karena kemajuan dan pembaharuan dianggap tidak perlu berkompetisi, cukup bekerja bersama dan bergotong royong menghasilkan yang bermanfaat, itu sudah satu kemajuan. Maju bersama dan menikmati hasil bersama, tanpa perlu memilih sikap kompetitif. Rupanya paham ini menyamakan pengertian antara kompetisi dengan konflik. Pengalaman masa lalu ketika mulai digiatkan Pembangunan Lima Tahun pertama dan kedua, suasana masyarakat dikendalikan sedemikian rupa dengan konsep “stabilitas sosial” sehingga kompetisi terpasung dan konflik terjaga tidak sampai mengganggu stabilitas.

Kompetisi adalah alamat masih adanya kehidupan, masih ada keinginan dan kebutuhan. Kompetisi adalah bagian dari gejala kemanusiaan bahwa semenjak adanya kelompok manusia, di dalamnya terdapat kompetisi apakah menggejala atau tersembunyi.

Masyarakat Indonesia yang majemuk ini terdiri atas berbagai suku bangsa dengan identitas kebudayaan masing-masing. Setiap kebudayaan mempunyai intensitas, kuantitas, dan kualitas kompetisi yang berbeda dan cara pengendaliannya pula berbeda. Muncul pertanyaan, sejauh mana kompetisi setiap kebudayaan membawa kemajuan dan pembaharuan? Rupanya kebudayaan yang meletakkan “harmonisasi” dalam hubungan sosial dan lingkungan. Kompetisi muncul sebagai akibat dari adanya aset sosial yang diperlombakan memilikinya sehingga

yang tampil di permukaan adalah memburu pemenuhan kebutuhan dan kepentingan, biasanya pemuasan diri atas benda-benda material dan posisi sosial. Bukanlah kompetisi dalam arti persaingan pada kemampuan ilmu dan teknologi yang didukung oleh sikap rasional, kritis, dan analitis.

Prasyarat sikap kompetitif harus menjunjung tinggi martabat manusia sebagai persona dengan nilai-nilai demokratis serta hak azasi seseorang, supaya dinamika hidup berlangsung secara dialektik. Dalam hal ini norma-norma sosial dan nilai budaya menjadi kontrol atas berlangsungnya kompetisi yang rasional dan sehat. Kompetisi diarahkan pada kegiatan produktif dan etos kerja tinggi, bebas dari sifat "kecemburuan sosial" terhadap prestasi yang dicapai oleh seseorang. Sementara, kebudayaan yang dimiliki oleh suku bangsa mungkin sebagian saja bahwa pada umumnya menempatkan "harmonisasi" lebih utama agar keseimbangan hidup lebih terpelihara. Sikap kompetitifnya tidak rasional, tetapi pendekatan simbolik menyertakan perasaan. Cukup dimengerti mempunyai kemampuan adaptasi, sedang dinamikanya terlihat pada kemampuan asimilasi dan daya serapnya tinggi yang datang dari sekitarnya.

4. Penutup

Uraian singkat dan sederhana ini dimaksudkan untuk membuka dialog budaya dalam menemukan konsep untuk pembangunan kebudayaan nasional masyarakat transisi seperti halnya Indonesia sekarang ini, antara inovasi dan kompetisi sedang *inter play* dan mungkin tidak akan ketemu atau menemukan ujung yang membawa kemajuan yang diharapkan. Kompetisi lebih banyak terjadi berputar-putar pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan sesaat, sementara inovasi berjalan lambat karena terpengaruh oleh gejala persaingan. Komponen sosial yang berada pada gelora kompetitif adalah dari kalangan pemimpin organisasi, elit sosial, pemuka masyarakat, bahkan mereka dari kalangan bawah yang memanfaatkan kesempatan kompetitif tersebut.

Inovasi dan kompetisi didekati dari segi kebudayaan karena keduanya merupakan hal yang mendasar dari gejala kemanusiaan yang kadang kala muncul sebagai gejala sosial. Keduanya pula dapat memacu kemajuan dan modernisasi jika dibarengi dan didukung oleh kondisi sosial.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdullah Taufik

- 1999 Korupsi, Kolusi dan Nepotisme- Sebuah Pendekatan Kultural, dalam Edy Suandi Hamid (ed), ***Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia***. Yogyakarta : Adity Media

Geertz E.

- 1973 ***The interpretation of Culture***. New York- Basic Book Inc

Goodenough W.

- 1971 ***Culture, Language and Society***. Reading, MA.- Addison Wesley M.Pub. No. 7

Koentjaraningrat

- 1969 ***Rintangan-rintangan Mental Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia***. Jakarta : Bhratara

Kluckhohn, C.

- 1949 ***Mirror for Man***. USA- Wittlesey House

Kleden Ignas

- 1987 ***Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*** . Jakarta-LP3ES

Soedjatmoko

- 1984 ***Dimensi Manusia dalam Pembangunan***. Jakarta-LP3ES

NASIONALISME INDONESIA VS BUDAYA DAERAH DALAM PERSPEKTIF SASTRA INDONESIA

Oleh: Agus R. Sarjono

1. Daerah Sebagai Masalah

Sastra Indonesia modern dimulai dengan proses belajar kepada Barat. Dan, Barat pada waktu itu tidak bisa lain adalah Belanda. Sastra Indonesia modern mau tidak mau belajarliah pada Belanda. Lagi pula pada dasarnya sastrawan Indonesia modern lahir dari tangan sastrawan yang terdidik secara Belanda via politik etis. Lewat proses belajar dengan Barat (Belanda) itu pulalah mereka bertemu dengan wacana romantik yang hidup dalam kebudayaan Eropa saat itu. Merekapun penuh rasa takjub bertemu dengan “keajaiban-keajaiban” akal pikiran modern Eropa.¹

Di sana, kemandirian manusia sebagai orang-seorang dimuliakan sedemikian rupa. Manusia adalah sesuatu yang menentukan jalannya sejarah. Manusia adalah sesuatu yang mandiri, rasional, dan merdeka di hadapan dunia. Wacana semacam inilah yang mewarnai kaum terdidik di Indonesia. Tidak mengherankan jika mereka akhirnya membandingkan semua ini dengan kenyataan bahwa pada dasarnya budaya daerah–hamparan kebudayaan kaum yang kalah yang memungkinkan bangsa-bangsa di Indonesia bertekuk lutut pada guru mereka, Belanda merupakan kebudayaan yang tidak kondusif bagi modernitas dan akal pikiran. Semua ini bertolak belakang dengan citarasa romantik kaum terdidik saat itu.

Hal yang segera terasa dan dekat di hati bukanlah hal-hal raksasa, bukan pula ideologi-ideologi besar, melainkan hal-hal

¹ Pertemuan anak bumiputera dengan pikiran-pikiran, kemajuan ilmu dan teknologi, serta dasar-dasar kebudayaan modern Eropa tergambar dengan baik dalam novel Pramoedya Ananta Toer, *Bumi Manusia*. Disana Minke –sang protagonis- merasa takjub pada kekuatan akal pikiran, posisi manusia yang merdeka dan penuh gairah mengarungi kehidupan, serta kemudian kebangkitan Jepang yang mengalahkan Russia, dsb. Semuanya diam-diam ia perbandingkan dengan alam pikiran feodal ayahnya yang dengan bangga sambil menggenggam cambuk kemaluan sapi jantan, melestarikan kebudayaan yang mengharuskan setiap manusia merangkak untuk bisa menghadap dia. Rasa takjub ini juga yang kurang lebih menyebabkan STA menggebrak dengan “Semboyan yang Tegas” dalam Polemik Kebudayaan.

yang dekat di hati dan akrab dalam keseharian mereka, khususnya bagi kaum muda. Hal-hal yang dekat itu adalah masalah cinta-asmara, perjodohan, dan sejenisnya. Pada persoalan yang kecil dan serba sehari-hari itulah mereka bermuka-muka dengan representasi budaya daerah-lokal-tradisional, yakni: kawin paksa.

Hal ini terlihat jelas pada novel *Siti Nurbaya* yang segera merebut hati publik. Novel ini lahir dengan mengambil latar daerah Minangkabau. Syamsul Bachri, seorang lelaki muda-tampan-terdidik yang saling jatuh cinta dengan Siti Nurbaya seorang perempuan muda-cantik-terdidik ternyata tidak dapat bersama menuju mahligai rumah tangga. Semua peluang untuk berbahagia ada pada keduanya. Semua harapan indah yang tumbuh di hati kedua sejoli ini dan secara bersama tumbuh pula di hati para pembaca muda dikecewakan, tidak lain tidak bukan gara-gara adat lama kawin paksa. Datuk Maringgih, lelaki tua buruk rupa dan buruk hati, yang dijadikan wakil bagi adat lama yang diandaikan tua-burukrupa-buruk hati², menghalangi semua harapan kaum muda untuk bahagia.

Maka masyarakat pembaca tidak bisa terima jika pasangan yang sama-sama muda, sama-sama terpelajar, tentu saja sama-sama elok rupawan, dan ini yang paling penting sama-sama saling mencintai, dipaksa untuk berpisah hanya karena adat lembaga membolehkan orang tua bertindak semena-mena pada anaknya. Dengan contoh yang dekat dengan hati mereka –cinta asmara- tumbuhlah kesadaran di kalangan luas bahwa adat lama daerah memang buruk rupa dan harus dilawan. Modernitas jadi pilihan.

Kebebasan kaum muda itu bukannya tidak mendapat kritik. Abdul Moeis dengan novelnya *Salah Asuhan* mengajukan gambaran bahwa anak muda didikan Eropa yang hendak bebas kebarat-baratan itu bukannya tidak bermasalah. Dia membawa kaum muda yang bebas saling cinta itu ke tingkat ekstrim, yakni dengan membuat Hanafi yang anak Minangkabau saling jatuh cinta dengan Corrie yang anak indo. Hanafi yang rendah diri, jatuh bangun untuk berusaha menjadi Belanda (baca: menjadi Barat). Pengarang tidak menghalangi perjodohan mereka.

² Masalah ini agak sering saya singgung. Lihat misalnya bagian pengantar dalam Agus R. Sarjono (ed.). 1999. *Pembebasan Budaya-budaya Kita*. Jakarta: Gramedia.

Dalam pada itu adat lama dari tradisi daerah yang dihidupi kaum tua oleh Hanafi tidak digubris pula. Adakah mereka berbahagia? Ternyata tidak!

Meskipun menganggap remeh budaya daerah dan seringkali tidak menggubrisnya, Hanafi “menerima” juga ketika ia dinikahkan orang tuanya dengan gadis pilihan orang tua sesuai upacara dan tatacara pernikahan dalam budaya daerah. Ternyata perkawinan ini gagal pula. Hanafi tidak berbahagia. Menjadi Barat ternyata bukan jawaban. Sementara menjadi orang daerah juga tidak membuat bahagia. Lantas bagaimanakah semestinya?

Berbagai novel yang lahir pada masa itu serta berlatarkan daerah tertentu, umumnya mengangkat konfrontasi dengan tradisi. Dan, nyaris semuanya menunjukkan perlawanan terhadap tradisi dan adat daerah yang digambarkan sebagai adat yang lapuk, bobrok, dan tak bermasa depan. Pendeknya, *daerah adalah sumber masalah*. Daerah dengan segala adat tradisinya adalah manifestasi kegelapan di mana setiap kaum muda terdidik berupaya untuk memerangi dan/atau menyingkalkannya agar mencapai cahaya³

2. Nasionalisme Indonesia Sebagai Jalan Keluar

Muhammad Yamin yang menyanyikan madah ke hadirat Sumatera Raya, segera merasakan bahwa menyanyikan Sumatera tak lagi mencukupi. Ia kemudian beralih menyanyikan madah ke hadapan duli Indonesia⁴. Sejak itu pula Muhammad Yamin dengan keras hati menyanyikan Indonesia (bukan daerah) yang belakangan meledak dalam sebuah sumpah/komitmen publik pertama di tanah Nusantara, yakni “Sumpah Pemuda”. Negara Indonesia sebagai sebuah kenyataan belum lagi ada waktu itu. Ia hadir dalam sebuah impian, sebuah imajinasi bersama yang dicanangkan oleh kaum muda di seluruh belahan Nusantara. Ini jelas sebuah pertanda bahwa Indonesia tidak

³ Kartini merumuskannya sebagai “Habis Gelap Terbitlah Terang”, yang artinya habis kegelapan adat daerah, terbitlah cahaya modernitas (via pendidikan Barat). Benedict Anderson menulis menarik mengenai saat-saat kegelapan dan saat-saat terang dalam kesadaran bumiputera dengan mengambil contoh biografi Dr. Sutomo. Mereka yang berminat dapat membaca lebih jauh Benedict Anderson. 1998. *The Spectre of Comparisons*. London, New York: Verso.

⁴ Lihat misalnya sejak Yamin “Indonesia Tumpah Darahku”, dimuat dalam Taufiq Ismail dkk. (ed.). 2001. *Dari Fansuri ke Handayani*. Jakarta: Horison.

dilahirkan dari tangan penjajah, tidak pula dari tangan raja-raja, bupati-bupati, ambtenaar-ambtenaar. Ia lahir langsung dari rahim rakyat Nusantara, tepatnya lahir dari rahim kaum muda Nusantara. Raja-raja, bupati-bupati, ambtenaar-ambtenaar, bahkan macam-macam pimpinan adat dan kaum penghulu, saat itu tengah berkumpul nyaman di samping penjajah dan bahu membahu menganiaya rakyat jelata di berbagai pelosok Indonesia⁵

Sutan Takdir Alisyahbana (STA) kemudian mengumumkan sajaknya yang terkenal “Menuju ke Laut”. Dalam sajak itu ia menegaskan seluruh pemikirannya selama ini, yakni menolak berdiam dalam tasik budaya lokal-tradisional-kedaerahan yang harus mati semati-matinya⁶. Dan jika Indonesia –sang entitas baru itu- ingin berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia, ia harus menengok ke Barat. Mengapa menengok ke Barat? Karena di sana berdiam tenaga-tenaga yang menyanggupkan sebuah bangsa untuk berdiri tegak sebagai bangsa yang bermartabat, bukan bangsa yang lembek bermental hamba-sahaya sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai budaya daerah. Berbagai budaya daerah “pra-Indonesia” sama sekali tidak mendapat penghargaan dari para intelektual generasi itu.

Memang dalam Polemik Kebudayaan ada cukup banyak suara yang bahu-membahu menyerang STA dengan menghidupkan hujjah pentingnya Timur di samping Barat. Namun, “Timur” di sana seringkali tidak mengacu pada budaya-budaya daerah, melainkan budaya-budaya timur, seperti India, misalnya⁷. Budaya-budaya lokal tradisional yang hidup di berbagai daerah tidak pernah mendapat simpati karena budaya

⁵ Dalam negeri Indonesia merdeka kelak di kemudian hari, ternyata raja-raja, bupati-bupati, ambtenaar-ambtenaar, juga penghulu-penghulu bermacam lembaga, berlaku sama pula: duduk manusia di samping penguasa dan bahu-membahu menganiaya rakyat jelata. Rakyat Indonesia yang itu juga.

⁶ Kesepakatan yang menakjubkan dari berbagai kaum muda untuk memilih bahasa Melayu sebagai bahasa bersama dan langsung diberi nama “Bahasa Indonesia” (bukan bahasa Melayu) selain berbagai alasan teknis –Bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan, bahasa pers dsb.- tampaknya didorong pula oleh kehendak untuk memutuskan mata rantai ingatan dengan segala tradisi yang diharapkan atau dianggap telah silam guna menuju dan menggagas sebuah bangsa –tepatnya komunitas imajiner baru.

⁷ Hal ini terlihat dari metafora yang mereka pilih bagi manusia Indonesia, yakni gabungan Faust dengan Arjuna. Sajak-sajak Sanusi Pane banyak dipengaruhi budaya India; Amir Hamzah pun menerjemahkan sejumlah karya dari Timur yang terbit di bawah judul *Setinggi Timur*.

lokal-tradisional-daerah inilah yang mereka anggap sebagai biang keladi dijajahnya bangsa Indonesia; budaya yang membiarkan orang-orangnya bertekuk lutut tak berdaya di bawah kaki penjajah sekian lamanya. Terlalu lama untuk alasan apapun⁸. Polemik Kebudayaan pun meledaklah. Semua silang gagasan yang ramai di mana para intelektual dengan sungguh-sungguh mendebatkan sosok macam apa yang mereka bayangkan bakal baik buat Indonesia masa depan. Hingga kini, belum pernah ada sebuah polemik semacam itu lagi. Namun, pada saat itu pula banyak salah faham ditimpakan pada STA. Banyak orang yang beranggapan –bahkan hingga kini- bahwa STA sejenis Hanafi yang ingin menjadi barat. Tidak! Ketika STA menyebut Barat ia tidak tengah menunjuk sebuah spirit, sebuah wilayah budaya. Belakangan dengan mudah ia mengganti “Barat” itu dengan Jepang dan Korea Selatan, karena ia menemukan spirit yang sama di sana.

Di tengah gegap gempita itu, Amir Hamzah dengan tenang mengayuh biduk Melayunya melintasi Indonesia. STA memuji dan mengelu-elukannya. Amir Hamzah, ternyata selamat sejahtera mengarungi ombak lautan sastra Indonesia dengan biduk Melayu, dan pada kenyataannya secara tragis ia menemukan kematian dalam sebuah revolusi sosial di daerahnya. STA kelak justru mengecam keras kapal barat modern yang digunakan Chairil Anwar dengan gagah perkasa dan heboh mengarungi gejolak sastra Indonesia. Gejala ini sebenarnya aneh, karena pada dasarnya Chairil Anwar menulis sajak tidak lain tidak bukan justru dari dasar-dasar pemikiran STA. Akar budaya Chairil Anwar adalah akar budaya yang dianjurkan oleh STA sendiri untuk dihidupkan. Bahwa individualisme yang girang mengolah kehidupan, melainkan melahirkan pula individualisme yang keras bermuka-muka dengan realitas dan kedirian manusia hingga meradang menerjang meninggalkan (atau merasa terbuang dari)

⁸ Ketika melihat analoginya dengan krisis yang kita alami sekarang ini. Sebuah krisis yang terlalu lama bagi bangsa mana pun di dunia. Krisis ekonomi di ASEAN dimulai di Thailand, dan perlahan menyebar ke Malaysia, Philipina dan kemudian berangsur-angsur menghantam Indonesia. Semua negeri tersebut kini telah berdiri tegak kembali, hanya Indonesia yang tetap setia dengan nasibnya yang hina. Begitu lama. Terlalu lama, bahkan bagi sebuah bangsa yang sudah hancur lebur berkeping-keping nyaris jadi debu seperti Vietnam yang kini berdiri sebagai negara yang lebih bermartabat di banding negara besar di Indonesia Raya.

kumpulannya⁹, tentu saja ia konsekuensi logis dari sebuah landasan budaya yang banyak sisinya¹⁰.

Chairil Anwar hadir dengan meradang menerjang, sebuah sikap budaya yang tentu saja bukan lokal tradisional. Dengan individualismenya yang berkobar ia menggebrak keindonesiaan setiap orang dengan keindonesiaannya. Tak ada lagi aroma daerah dalam sikap hidupnya. Asrul Sani juga menghardik orang (dengan budaya) daerah untuk segera menepi saja, karena ia berdiri di hadapan pintu terbuka ke arah modernitas¹¹.

3. (Nasionalisme) Indonesia Macam Apa? Atawa Bagaimana Indonesia Diwacanakan

Di masa-masa revolusi itulah lahir karya-karya sastra Indonesia yang mewacanakan keindonesiaan dan lahirnya sebuah bangsa. Mereka melahirkan karyanya di tengah gebalau revolusi kemerdekaan. Di antara mereka yang menonjol adalah *Jalan Tak Ada Ujung* Mochtar Lubis, *Keluarga Gerilya* Pramoedya Ananta Toer, dan *Atheis* Achdiat Kartamihardja. Tentu juga cerpen-cerpen Idrus dan sajak-sajak Chairil Anwar. Lewat novelnya, Mochtar Lubis mewacanakan kemerdekaan dalam perspektif Hazil sebagai kemerdekaan individu-individu, manusia orang-seorang dan bukan manusia dalam kumpulan¹².

Sementara persengketaan pikiran-pikiran besar yang bersilang-berseteru di awal kemerdekaan Indonesia antara manusia sebagai individu bebas, dengan manusia sebagai

⁹ Jelas terdapat kesejajaran antara mereka. STA meninggalkan tasik komunitas lama yang tentram menuju ke laut. Chairil mengidentifikasi dengan binatang jalang yang terbuang (membuang diri?) dari ketentraman komunitas juga.

¹⁰ Belakangan kita menemukan hal yang sama, ketika Ajip Rosidi yang demikian giat mengkampanyekan kembali ke daerah kaget dan mengecam keras sajak-sajak Sutardji Colzum Bachri, dan memuliakan Rendra. Kita menemukan kesejajaran Rendra-Amir Hamzah di satu sisi dengan Chairil-Sutardji di sisi lain. Belum ada penjelasan memadai mengenai gejala ini. Salah satu yang mungkin adalah, spirit modernitas "Barat" STA dan Spirit "daerah" Ajip menemukan representasinya yang agung-terang pada Amir Hamzah dan Rendra, sedang Chairil-Sutardji dianggap membawa sisi gelap dari pemikiran mereka. Amir Hamzah-Rendra memang dapat dianggap lahir dari basis estetik apollonian, sedang Chairil-Sutardji dari basis estetik Dyonisian, jika kita boleh meminjam analogi dari estetika Yunani.

¹¹ Lebih jauh, lihat buku Agus R. Sarjono. 2001. *Sastra dalam Empat Orba*. Yogyakarta: Bentang Budaya; khususnya bab "Sastra Indonesia dalam Empat Orde Baru".

¹² Hazil dalam *Jalan Tak Ada Ujung* mengemukakan sbb: "Bagiku individu itu adalah tujuan dan bukan alat mencapai tujuan. Kebahagiaan manusia adalah dalam perkembangan orang-orang dan bukan alat mencapai tujuan. Kebahagiaan manusia

berada di tengah kumpulannya (yang adalah daerah-lokal-tradisional) serta “berada dalam kumpulannya” yang lain, yakni partai dan kelas *proletar* dalam sistem Marxisme sekuler, diangkat dalam novel *Athesis*. Tokohnya adalah orang dari wilayah lokal tradisional yang gamang untuk menetap di tempatnya semula, namun gamang pula untuk masuk dalam kemerdekaan individualitas gaya Barat, serta cemas pula untuk bergabung dengan komunalisme sekuler marxistis. Ia akhirnya terkatung-katung didera penyakit dan tak berdaya. Inilah gambaran Achdiat mengenai masalah Indonesia pada umumnya.

Yang tegas dan tanpa keraguan menarasikan lahirnya sebuah bangsa adalah anak-anak muda “*Keluarga Gerilya*” Pramoedya Ananta Toer. Di sana seluruh keluarga kaum gerilya tanpa *reserve* merelakan segala saja yang mereka punya – bahkan nyawa ayah mereka yang mereka bunuh, selain tentu saja nyawa mereka sendiri- demi sebuah keluarga besar yang diandaikan akan menjadi tempat nyaman bagi kemanusiaan, yakni Indonesia merdeka. Dalam semua kekerasan-pelaan untuk merelakan segalanya bagi lahirnya sebuah bangsa merdeka yang penuh kasih merawat anak-anaknya yang sudah kehilangan rumah real mereka. Mereka dengan sepenuh hati mengorbankan segala kepentingan diri mereka pribadi demi nasion dengan andaian bahwa nasion Indonesia merdeka adalah jalan ke luar bagi semua persoalan. Dengan lahirnya *nasion* lah maka harapan setiap manusia Indonesia untuk berbahagia terbuka lebar¹³.

Kedua sastrawan ini bukan hanya pandangan hidupnya berbeda, bahkan dalam kenyataan pun mereka berseteru.

adalah dalam perkembangan orang-seorang yang sempurna dan hamonis dengan manusia lain. Negara hanya alat. Dan individu tidak boleh diletakkan di bawah negara. Ini musik hidupku, Ini perjoanganku. Ini jalan tak ada ujung yang kutempuh. Ini revolusi yang kita mulai. Revolusi hanya alat memperkaya kebahagiaan dan kemuliaan penghidupan manusia-manusia.” (hal 43). Bandingkan dengan “aku ini binatang jalang, dari kumpulannya yang terbuang”, dalam sajak “Aku” Chairil Anwar.

¹³ Kita menemukan sikap nasionalisme Pramoedya ini dengan sikap nasionalisme Soekarno. Sikap Soekarno tersebut memiliki kesejajaran dengan sikap nasionalisme Hitler, sebagaimana tampak pada pidatonya: “Ambillah Hitler, sebagai contoh –wah, Hitler benar-benar luar biasa pintar- mungkin dia ingin mengatakan bahwa kebahagiaan tidaklah mungkin hanya didasarkan pada materi semata, dan oleh sebab itu, dia menyuarakan ideal lain, cita-cita itu disebutnya the *Dritte Reich*, Kerajaan Ketiga. Kerajaan ketiga tersebut *benar-benar* dan *pasti* membawa

Kebetulan keduanya menghadirkan dua cara pandang yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Mochtar Lubis –sekurang-kurangnya Hazil- memandang negara sebagai alat bagi kelahiran individu merdeka; sementara Pramoedya Ananta Toer – sekurang-kurangnya Sa’aman dan adik-adiknya- memandang negara sebagai tujuan tempat kelak manusia-manusia akan merdeka-bahagia-sentosa. Ironisnya, kedua kecenderungan berbeda ini, sejauh menyangkut para penulisnya, berujung pada nasib yang sama. Keduanya mengalami perlakuan yang lebih kurang sama. Keduanya dikirim ke penjara sekian lama tidak lain bukan dengan alasan demi “ketentraman” negara Indonesia. Tentu saja, pada kenyataannya yang mengirim mereka adalah penguasa, bukannya nasion Indonesia¹⁴. Namun di Indonesia – entah mengapa- lazim terjadi para penguasa/pemerintah (*government*) mengidentikkan diri dengan negara (*state*) bahkan bangsa (*nation*); sehingga setiap kritik yang dialamatkan pada mereka dengan segera dianggap sebagai kritik terhadap negara atau bahkan bangsa¹⁵.

4. Pada Mulanya adalah Latar: Daerah Sebagai Bagian (juga) dari Indonesia

Gerakan untuk menengok kembali tradisi dan budaya daerah dalam sastra telah dicoba oleh Ajip Rosidi dan dkk. Sambil

kebahagiaan bagi rakyat Jerman. Kerajaan Pertama adalah *der altte Fritz*, sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Fritz tua; kerajaan kedua hadir sebelum perang dunia, dan kini kerajaan itu telah hancur dalam perang dunia. 'Marilah kita bangun kerajaan ketiga, dan di dalam Kerajaan Ketiga, wahai saudari-saudari, kalian akan hidup bahagia; wahai saudara-saudara, anda semua akan hidup bahagia; hei anak-anak, kamu semua bakal hidup bahagia; wahai kalian para pahlawan Jerman, kamu akan melihat Jerman duduk menjulang di atas semua orang di dunia ini. "Bukan main pandainya Hitler, saudara-saudara dan saudari-saudari, dalam mengungkapkan cita-citanya". Saya belum berhasil menemukan aslinya. Kutipan ini saya terjemahkan dari terjemahan Anderson. *Ibid.* (1998:1-2). Kursif dari saya, ARS.

¹⁴ Agak mengherankan pemisahan yang tajam atas bangsa, negara, dan pemerintahan (*nation, state, government*) tidak pernah menjadi wacana utama. Soekarno nyaris tidak pernah membuat perbedaan antara nasion dengan negara apalagi pemerintahan; Hatta hanya sesekali saja menyebut negara dan pemerintahan. Tidak kalah mengherankannya, hingga kini orang kerap menyebut Indonesia tanpa perbedaan yang tajam antara bangsa, negara, dan pemerintah.

¹⁵ Chairil Anwar, misalnya, menyeru Soekarno untuk kasi tangan, karena "kita satu urat, satu nafas" dimana Chairil mengandaikan Soekarno sebagai representasi bagi revolusi, identifikasi bagi nasion. Lihat sajak Chairil dalam. *Dera-dera Cemara*. Jakarta: Horison.

mengumumkan “Angkatan Terbaru”-nya Ajip menyebutkan bahwa generasi terbaru sastra Indonesia –yang adalah generasinya- tidak belajar dari sastra dunia, khususnya sastra Barat, melainkan belajar dari para sastrawan Indonesia sendiri di satu sisi dan budaya lokal yang mereka hidupi sebelumnya di sisi lain. Dengan bekal itulah, mereka menulis sastra. Ajip kemudian menulis sajak “Jante Arkidam”. Sajak itu berkisah mengenai *jawara* (preman) desa di sebuah perkebunan tebu (di Jawa Barat). Adakah di sana unsur lokal kedaerahan? Ya dan tidak. Ditilik dari latarnya, memang sajak itu bermain di daerah perkebunan tebu. Namun, tidak terdapat aspirasi budaya daerah tertentu di dalamnya. Kita hanya menduga bahwa daerah perkebunan tebu itu kurang lebih di Jawa Barat. Namun, kita tidak dapat mencium aroma kesundaan di dalamnya. Jika latar sajak itu diubah menjadi perkebunan tembakau di Deli, atau Wonosobo, tak ada kesulitan apa-apa. Alhasil, unsur daerah dalam sajak-sajak itu adalah (sekadar) latar.

Umumnya sastrawan era 50-an yang mencanangkan kembali ke daerah itu pada dasarnya menulis bukan dari pusat jantung budaya daerah mereka. “Robohnya Surau Kami”, misalnya, dengan mudah dapat saja diterakan pada latar yang lain, Jawa Barat, atau Sulawesi Selatan misalnya. Tentu saja di sana ada unsur surau yang memiliki signifikansi makna sebagai salah satu akar tradisi Minang. Namun dalam cerpen Navis, ia tidak signifikan mengacu pada surau sebagai sebuah basis budaya Minang. Surau di sana mengacu pada sebuah basis kultur keagamaan tertentu. Kelak, kecenderungan semacam ini muncul pula di era-era berikutnya. Unsur daerah dalam novel *Saman*, Ayu Utami, misalnya, kurang lebih sejajar dengan unsur daerah dalam cerpen Navis tersebut. Latar Prabumulih dalam novel Ayu Utami tersebut dapat saja dengan mudah digantikan dengan Riau, misalnya. Bahkan latar New York yang terdapat di sana dapat saja diganti dengan latar Amsterdam atau Paris, misalnya, tanpa memberi dampak kelewat besarnya pada karya bersangkutan.

Kelak semangat kembali ke daerah ini akan hidup kembali pada tahun 80-an. Sebuah seminar besar dilangsungkan di UGM dengan tema warna lokal dalam sastra Indonesia. Tentu saja hadir dalam seminar itu orang-orang “daerah”, seperti

A.A. Navis, Linus Suryadi, Ahmad Tohari dan lain-lain. Hadir pula di sana Umar Kayam. Di TIM tema ini pun diseminarkan dengan pembicara Mursal Esten dan Bakdi Sumanto¹⁶.

Pada era 80-an kecenderungan mengangkat warna lokal dalam sastra Indonesia memang menguat. Tidak bisa tidak salah satu pemicunya adalah lahirnya dua novel yang fenomenal, yakni: *Ronggeng Dukuh Paruk* karya Ahmad Tohari yang sangat kuat warna lokalnya, dan *Pengakuan Pariyem* yang juga basah oleh lokalitas kedaerahan¹⁷. Dua karya ini dapat dijadikan contoh bagi dua kecenderungan menggali daerah dalam sastra Indonesia. Pada *Ronggeng Dukuh Paruk* (RDP), daerah adalah sebuah latar. Namun, berbeda dengan misalnya “Jante Arkidam” dan/atau “Robohnya Surau Kami”, latar pada RDP tidak dapat digantikan dengan latar lain tanpa menghancurkan novel itu. Latar di sana menjadi bagian yang tak tergantikan. Bahkan latar dapat dikatakan menjadi pemeran utama.

Ronggeng Dukuh Paruk menyajikan daerah sebagai sebuah latar yang solid. Tak tergantikan. Latar tidak menjadi warna lokal, karena lokalitas di sana menjadi acuan peristiwa serta melahirkan peristiwa. Kita menemukan gejala yang sama pada novel Mochtar Lubis *Harimau! Harimau!*, yang sebagaimana RDP tidak dapat digantikan latarnya. Harimau sebagai kenyataan real tidak dapat kita temukan di pelosok hutan Kalimantan, misalnya, meskipun harimau sebagai metafor hasrat liar dan ganas manusia boleh saja ada di sana. Permainan antara harimau sebagai binatang buas di satu sisi dengan harimau yang bermain di sudut hati tokoh-tokohnya hanya mungkin disajikan dengan latar rimba raya Sumatera.

Kebetulan (atau justru bukan kebetulan?) dalam sastra Indonesia memang tidak kelewat banyak karya sastra yang mengolah latar suatu daerah dengan solid dan mantap sehingga pembaca seakan-akan dapat merasakan bahwa seluruh karya sastra itu lahir dan tumbuh halaman demi

¹⁶ Makalah Mursal Esten berjudul “Pengaruh Budaya Daerah dalam Sastra Indonesia”; makalah Bakdi Sumanto “Warna Tradisi dalam Sastra Kita. Sembadra, Sri, Tun, Bawuk, Iyem: Sebuah Garis Luruh”. Jika tidak salah seminar ini dilaksanakan tanggal September 1984.

¹⁷ Dalam kegairahan ini pula terbit novel Korie Layun Rampan *Upacara*; novel Darman Moenir *Bako*.

halaman, peristiwa demi peristiwa, bab demi bab, dari tanah daerah tempat yang menjadi latarnya. Latar sebagian besar sastra Indonesia cenderung sulit dirujuk, dan kerap mengacu pada "Indonesia". Banyak sastrawan tinggal di daerah namun jarang sekali lahir karya sastra langsung dari permasalahan inti dan intim dalam daerah itu, dengan manusia-manusia daerah, kecemasan-kecemasan daerah, cinta asmara daerah. Dari lokalitas yang tergarap baik, mudah sekali lahir universalitas kemanusiaan. *Ronggeng Dukuh Paruk* sebuah contoh yang baik. Halaman demi halaman, peristiwa demi peristiwa, bab demi bab, tumbuh dari "dukuh paruk" itu sendiri. Ketika kita membacanya, kita bisa merasakan kecemasan, rasa sangsai, gairah, dan berbagai hal di dalamnya sebagai sesuatu yang bisa terjadi pada manusia di mana saja. Intensitas menggarap persoalan daerah membawa novel ini merdeka dari kungkungan kedaerahan. Wibawa novel ini diantaranya yang memicu kegairahan untuk membicarakan warna lokal daerah dalam sastra Indonesia, yang demikian meriah sepanjang tahun 80-an.

5. Dari Latar ke Ideologi

Bersamaan dengan itu, bermunculan pula karya-karya sastra yang lahir dari hati nurani daerah, dengan ideologi (ke)daerah(an) tertentu, sebagaimana ditunjukkan oleh *Pengakuan Pariyem*, serta kemudian juga cerpen dan novel Umar Kayam seperti "Sri Sumarah", "Bawuk", serta *Para Priyayi*. Berbeda dengan RDP Ahmad Tohari, misalnya, *Pengakuan Pariyem* tidak bermula pada latar, melainkan pada ideologi daerah. Latar kisah ini dapat ditukar ke mana saja, Jakarta, Sulawesi, atau Kalimantan, namun sejauh yang bermain di dalamnya adalah manusia Jawa semacam Pariyem dalam relasinya dengan bangsawan Jawa seperti Cokrosentono, maka ia tetap bisa tegak. Hal ini berbeda dengan jika tokohnya diganti. Begitu tokoh utamanya diganti menjadi perempuan Minang, misalnya, maka novel ini tidak bisa jalan, hancur berkeping tidak karuan. Jawa dan kejawaan dalam *Pengakuan Pariyem* menjadi unsur utama. Demikian pula kejawaan "Sri Sumarah", "Bawuk", atau *Para Priyayi*.

Hadirnya manusia-manusia yang kuat kedaerahannya dalam *Pengakuan Pariyem* maupun "Bawuk", "Sri Sumarah", atau *Para Priyayi* ditandai pula dengan banyaknya ungkapan-

ungkapan daerah dan/atau kosa kata daerah (Jawa) dalam novel bersangkutan. Hal ini dihadirkan untuk menjadi tandingan terhadap dominasi bahasa Indonesia (*sic!*) dan dominannya wacana keindonesiaan dalam kehidupan di Indonesia¹⁸. Ironisnya, kecenderungan serupa juga muncul pada penguasa pemerintahan, sebagaimana ditunjukkan oleh terbitnya buku Presiden Soeharto yang berisi ujar-ujar, sejumlah nasehat beserta tuntutan bagi anak-cucu¹⁹ berisi nilai-nilai luhur budaya Jawa (bukan budaya Indonesia). Jadi, kecenderungan untuk meneguhkan budaya daerah dalam berindonesia itu datang juga secara bersemangat dari tangan penguasa. Kecenderungan dalam sastra untuk menjadikan daerah sebagai ideologi tandingan bagi Indonesia kini makin menguat di berbagai daerah. Gus TF lewat novelnya *Tambo* jelas-jelas menyajikan budaya Minangkabau yang diromantisir dan diidealisir sedemikian rupa sebagai tawaran alternatif dan jalan ke luar bagi budaya Indonesia di masa depan²⁰.

Kecenderungan ketiga dalam mengelola tenaga budaya daerah adalah dengan menjadikan (sastra) daerah sebagai kritik. Di sini bukan latar dan/atau manusia-manusia daerah yang terutama dihadirkan, melainkan penggunaan teknik sastra daerah. Tentu saja yang paling menonjol dan berhasil dalam hal ini adalah Sutardji Calzoum Bachri. Di tangannya, mantra sebagai salah satu bentuk sastra daerah dapat bertransformasi sedemikian rupa dan menyeruak dalam khasanah sastra Indonesia. Banyak yang terkejut karenanya, dan diam-diam atau terus terang banyak pula sastrawan yang mulai menggali-gali khasanah sastra daerah untuk

¹⁸ Umar Kayam pernah menulis mengenai kegerahan sastrawan untuk hidup di bawah hegemoni bahasa Indonesia Baku dan membuat tandingan atasnya. Lihat Satyagraha Hoerip (ed.). 1984. *Sejumlah Masalah Sastra*. Jakarta: Sinar Harapan.

¹⁹ Tuntutan buat anak-cucu di sini dapat diartikan sebagai tuntunan bagi seluruh rakyat Indonesia, mengingat hubungan presiden dengan rakyatnya, hubungan panglima militer dengan serdadunya, atau hubungan guru dengan muridnya, berjalan dalam hubungan bapak (orang tua)-anak. Analisis bagus mengenai pewacanaan negara sebagai sebuah keluarga, lihat Saya Shiraishi. 1997. *Young Heroes: The Indonesian Family in Politics*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program Publications.

²⁰ Jika para sastrawan dan budayawan asal Minangkabau pada tahun 20-an dan 30-an bahkan hingga 40-50-an membaca novel ini, niscaya mereka akan terkejut bahwa budaya daerah yang mereka kecam habis dan dianggap harus mati semati-matinya itu akan diidealisir sedemikian rupa oleh kalangan muda berpuluh tahun kemudian sebagai jawaban dan alternatif budaya bagi Indonesia.

dimanfaatkan tekniknya bagi sastra modern Indonesia²¹.

Sebelum Sutardji, kecenderungan untuk memanfaatkan teknik dari khasanah tradisi daerah sudah terlihat pada Rendra sebagaimana nampak pada kumpulan sajaknya yang pertama *Balada Orang-orang Tercinta*, yang sarat dengan aroma sastra rakyat Jawa, khususnya *dolan* anak-anak. Hal yang sama terlihat pula pada sajak-sajak Ramadahan KH pada *Priangan Si Jelita* yang banyak memanfaatkan teknik tembang Sunda. Namun, pada Rendra pemanfaatan teknik ini menjadi sebagian saja dari pilihan teknik yang dia gali bagi sajak-sajaknya. Latar Amerika dalam sajak-sajaknya Blues untuk Bonnie tidak membuat Rendra menjadi Amerika. Ia tetap mencampurkan teknik sastra rakyat Jawa dengan berbagai teknik lainnya, yang kemudian menjadi teknik khas Rendra sendiri. Daerah di tangan Rendra dan Sutardji telah menjadi keniscayaan, karena pada keduanya semuanya telah menjadi bentuk mereka sendiri.

Pada masa kini, pemanfaatan khasanah sastra daerah sebagai teknik ungkapan terlihat pada misalnya sajak-sajak Taufik Ikram Jamil yang menggunakan teknik bersajak Melayu sebagaimana terlihat pada kumpulan puisinya *Tersebab Haku Melayu*. Kita sesekali juga menemukan penggunaan teknik berkaba atau pada sajak-sajak Hamid Jabar, misalnya.

Kecenderungan keempat adalah penggunaan daerah sebagai sumber inspirasi. Kecenderungan semacam ini paling kuat terlihat pada D. Zawawi Imron. Madura, misalnya, terus-menerus menjadi sumber inspirasi bagi sajak-sajaknya. Dan sebuah kumpulan sajak berjudul *Berlayar di Pamor Badik*, lahir dari tangannya yang tidak lain tidak bukan merupakan hasil dijadikannya Makassar sebagai sumber inspirasi bagi sajak-sajaknya. Jika kita menemukan semangat dan sikap Madura (jika boleh disebut demikian), hal ini tidak lain tidak bukan karena penyairnya memang menjadikan Madura sang tanah kelahiran dengan segala seluk-seginya sebagai inspirasi. Dan manakala kita berhadapan dengan *Berlayar di Pamor Badik*, maka kita mencium semangat dan “sikap” Makassar di sana karena daerah

²¹ Daya gugah kehadiran Sutardji ini tidak hanya mempengaruhi sastrawan generasi setelahnya, melainkan juga menginspirasi generasi sebelumnya. Tidak kurang dari Sitor Situmorang kemudian melahirkan sajak-sajak dengan memanfaatkan bentuk sastra lama tradisi daerahnya sebagai bentuk ungkapan. Hal ini tampak pada kumpulan sajaknya *Angin Danau*. Bandingkan sajak di dalamnya dengan sajak-sajaknya sebelumnya.

itulah yang dijadikan sumber inspirasi penyairnya. Hal serupa dengan intensitas dan warna berbeda terjadi pula pada Y.B. Mangunwijaya dalam novelnya *Ikan Hiu*, *Ido*, *Homa* yang menjadikan kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore sebagai latar dan sumber inspirasi.

6. Indonesia Sebagai Sumber Masalah: Daerah sebagai Jalan Keluar

Sejarah Indonesia membawa segenap bangsa Indonesia pada sebuah kenyataan yang tak seorang pun sebenarnya ingin menerimanya, yakni: Indonesia sebagai sumber masalah. Pramoedya yang membariskan tokoh-tokoh novelnya untuk menyerahkan segalanya bagi duli Indonesia Raya demi sebuah rumah nyaman tempat hidupnya kemerdekaan dan kemanusiaan, secara konkret mengalami arti dari Indonesia itu bagi dirinya pribadi. Mochtar Lubis yang membayangkan revolusi Indonesia sebagai jalan menuju kemerdekaan individu orang-seorang, mengalami pula dirinya sebagai individu justru tidak merdeka karena mendekam di dalam penjara dua rezim sekaligus. Dan Indonesia yang dinyanyikan dalam madah-madah revolusi sebagai sebuah tempat.

*Di sana tempat lahir beta
Dibuai dibesarkan bunda
Tempat berlindung di hari tua
Sampai akhir menutup mata.*²²

Pada kenyataannya kini banyak dijuluki sebagai “Negeri kekerasan dan kekejian”²³. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara Indonesia merdeka dengan Hindia Belanda di era penjajahan, karena keduanya memiliki kecenderungan yang sama, yakni berpihak kepada uang dan kaum berpunya, dan bahu-membahu menganiaya rakyat jelata. Penyerapan berbagai sumber daya alam ke pusat pemerintahan (Indonesia merdeka

²² “Indonesia Tumpah Darahku”, karangan Ismail Marzuki. Lagu ini sangat populer dan dijadikan lagu wajib di Indonesia.

²³ Tulisan Henk Nolte, “The Country of Violence”, *IISAS News Letter*, Leiden University (2000), seperti ingin meneguhkan andaian ini. Juga Benedict Anderson menyunting buku berisi tulisan penelitian berbagai ahli Indonesia mengenai bentangan kekerasan yang terjadi selama rezim Suharto. Lebih jauh lihat Benedict Anderson, 2001. *Violence and the State in Suharto's Indonesia*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program Publications.

ke Jakarta dan Pulau Jawa umumnya; Hindia Belanda, via Batavia ke Amsterdam dan Belanda umumnya), membuat daerah-daerah senantiasa berada pada keadaan yang mengenaskan²⁴. Makin jauh dari pusat, makin mengenaskan dan makin tak berpengharapan. Sebuah terjemahan cerpen-cerpen Papua New Guinea telah diterbitkan Yayasan Obor, dan lewat terjemahan itu kita bisa bertemu dengan hasil imajinasi masyarakat Papua New Guinea. Pada saat yang sama, tak seorangpun mungkin mendapat gambaran dunia batin masyarakat Irian Jaya yang masih satu pulau dengan Indonesia terhadap wilayah ini bertahun-tahun lamanya, pada hal semua bahan bagi kemakmuran tersedia di sana?

Di tengah kecenderungan semacam itu, terjadilah hal berbalikan dengan masa-masa awal kelahiran Indonesia. Jika pada masa itu daerah diandaikan sebagai sumber masalah dan Indonesia merupakan jalan keluar; sekarang Indonesia-lah yang diandaikan menjadi sumber masalah hingga beramai-ramai banyak wilayah bersepakat menjadikan daerah sebagai jalan keluar.

Berbeda dengan pewacanaan (budaya) daerah sebagai sumber masalah dan Indonesia sebagai jalan keluar yang demikian berlimpah pada era 20-an hingga masa revolusi, pewacanaan (budaya) Indonesia sebagai sumber masalah dan (budaya) daerah sebagai jalan keluar tidaklah banyak jumlahnya. Pewacanaan Indonesia sebagai sumber masalah dalam sastra Indonesia cukup banyak jumlahnya. Bahkan, Rendra yang menulis kritik-kritik keras terhadap (kenyataan dan budaya) Indonesia tidak memandang daerah sebagai jalan keluar. Ia justru menganggap Indonesia sebagai sumber masalah dan (budaya) daerah (sekurang-kurangnya Jawa)²⁵ sebagai sumber masalah pula, karena budaya Indonesia masih belepotan dengan budaya daerah yang buruk rupa.

Baru dalam wacana politik kecenderungan untuk merumuskan Indonesia sebagai sumber masalah dan daerah sebagai jalan keluar benar-benar mengentara sebagaimana

²⁴ Sebuah anekdot Madura yang populer pula di banyak daerah berbunyi: "Di Jakarta tidak ada sungai tapi banyak sekali jembatan; di daerah banyak sekali sungai tapi tidak ada jembatan".

²⁵ Lihat misalnya "Megatruh", terdapat dalam Agus R. Sarjono (ed.). 1999. *Pembebasan Budaya-budaya Kita*. Jakarta: Gramedia.

terlihat pada kegandrungan akan otonomi daerah. Masalahnya, benarkah daerah merupakan jalan keluar bagi Indonesia yang sumber masalah? Jawaban mudah senantiasa berakhir pada problem yang tidak mudah. Jawaban untuk memenangkan daerah –dalam bahasa birokrasi politik disebut otonomi daerah– belum-belum sudah menunjukkan benih-benih masalah. Beberapa penguasa daerah sudah mulai menunjukkan gelagat tak beres dengan menjadi penguasa-penguasa kecil yang korup. Hal ini mirip dengan perilaku kepala daerah di zaman penjajahan yang begitu mengendor pengawasan dari pusat di Batavia atau Buitenzorg segera saja semena-mena memeras rakyat setempat. Sementara ketika kekuasaan pusat di Batavia atau Buitenzorg yang menguat, kepala daerah tidak berdaya, namun penguasa pusat inilah yang bertindak menguat, kepala daerah tidak berdaya, namun penguasa pusat inilah yang bertindak semena-mena memeras rakyat daerah itu. Kedua kecenderungan berbeda ini bagi rakyat sama-sama menyakitkan.

Tidak bisa tidak, karya-karya sastra yang mengangkat dan lahir dari kehidupan real daerah-lah yang akan sangat membantu mengatasi problem ini. Sebagaimana menjadi Indonesia menjadi mungkin lewat berlimpahnya pewacanaan sastra; maka menengok daerah pun akan membutuhkan pewacanaan yang memadai. Karya-karya sastra yang berlatarkan daerah dan/atau mengambil inspirasi dari (sastra) daerah menjadi kebutuhan yang mendesak.

Menuju Multikulturalisme Sastra Indonesia

Untuk mengambil analogi pada sastra, kita berhadapan dengan kenyataan bahwa sastra bukanlah sekadar latar. Ia berisi tokoh-tokoh, peristiwa-peristiwa, problema-problema, dan tentu juga suasana serta alur beserta konfliknya. Masing-masing unsur sastra itu (latar, alur, misalnya) bisa ada bisa tidak, bisa dominan bisa sekadar membayang. Namun, tidak demikian dengan manusia. Manusia adalah bagian yang tidak bisa dihilangkan dari sastra. Bahkan pada sajak-sajak paling liris dan imajis pun kita akan menemukan intensi pada manusia. Hanya manusia dan yang mengacu kepada manusia yang menjadikan karya sastra teguh sebagai karya sastra. Maka di tengah kecenderungan memilih Indonesia atau memilih daerah, sastra tidak akan

mendapat apa-apa dari keduanya jika tidak melibatkan unsur terpenting, yakni hadirnya manusia.

Begitu tiba pada manusia, maka segera problemnya menjadi sama, baik “Indonesia” maupun daerah, yakni intensitas bermuka-muka dengan kenyataan real kehidupan yang membentang di depan hidung sastrawan. Kenyataan yang dihidupi dan dihayati pengarangnya dengan segala permasalahan dan bahagia-sedihnya. Dari sana akan membayangkan latar yang kokoh tempat segala peristiwa tumbuh dari dalamnya. Jika pengarangnya tinggal di daerah, tidak bisa tidak maka perjumpaannya yang habis-habisan dengan kenyataan yang dihidupi di sekitarnya akan menumbuhkan representasi dari persoalan (manusia) di daerah yang partikular, namun sekaligus akan menggapai universalitasnya sendiri.

Di Indonesia pernah ada sebuah gerakan sastra yang menanamkan diri “Revitaliasi Sastra Pedalaman”, namun karya-karya para penggeraknya sama sekali tidak menunjukkan aroma pedalaman yang mereka sebut-sebut. Karya-karya mereka merupakan gema lemah dari kecenderungan sastra pusat. Jadi, pergulatan habis-habisan sastrawan dengan permasalahan real di lingkungan mereka (perumahan elite, komunitas miskin urban, desa-desa di daerah, lautan, nelayan dsb.) akan menghasilkan warna daerah yang kuat dan hidup tanpa menjadi aparat politik kepentingan (daerah atau nasional). Untuk sekedar diketahui, hingga saat ini belum ada karya sastra yang mengangkat dunia pertanian dengan segala masalahnya padahal Indonesia merupakan negeri agraris yang hamparan tanah pertaniannya berlipat-lipat lebih luas dibanding perkotaan²⁶.

Sastra bagi saya tidak punya komitmen pada daerah atau pusat. Komitmennya pada manusia, yakni melawan segala upaya untuk mengabsolutkan dan memfinalkan definisi tentang manusia²⁷. Maka lewat warna daerah, seorang sastrawan akan mengangkat problem manusia di suatu daerah pada suatu waktu pada suatu momentum, dengan segala kekhasan situasinya,

²⁶ Hal ini telah saya bicarkan pada “Sosok Petani dalam Sastra Kita”. Lihat Agus R. Sarjono. 2001. *Sastra dalam Empat Orba*. Yogyakarta: Bentang Budaya.

²⁷ Rumusan ini saya kemukakan dalam wawancara dengan Linde Voûte, yakni “Witing poems or other litetrary works is astruggle against every final and absolute definition about mankind”. Lihat Linde Voûte “Agus R. Sarjono: The Poet who eavesdropped on a conversation between a golf course and a daisy”, *IIAS Newsletter* 25; July 2001.

dengan segala kecintaan, kesakitan dan daya kritisnya. Karya semacam ini dengan sendirinya akan mempertanyakan semua definisi final tentang Indonesia dan manusianya. Bahkan juga akan mempertanyakan ulang semua definisi stereotip mengenai daerah bersangkutan. Ia akan menyajikan sebuah Indonesia yang dekat di hati, melalui sebuah daerah yang juga dekat di hati.

Lewat karya sastra yang mengangkat kehidupan manusia dan latar daerah dengan segala permasalahannya, lewat karya sastra yang menggali inspirasi dari daerah-daerah, serta dari karya-karya sastra yang lahir dari transformasi (teknik) sastra daerah tertentu, kita bisa bertemu dengan hasil-hasil imajinasi dan denyut batin daerah-daerah di Indonesia. Makin banyak karya semacam ini makin ramailah pergaulan wacana dalam mengisi Indonesia kita. Bahkan gerakan menuju otonomi daerah menjadi lebih mungkin dan masuk akal manakala denyut batin manusia-manusia di daerah berhasil ditemui dalam karya sastra yang memungkinkan pembaca dari daerah-daerah bersangkutan serta daerah-daerah lain bisa menghayati segala impian-denyut-hati-kecemasan-kesulitan-permasalahan-kegetiran-kebahagiaan-cinta dan segala segi kehidupan batiniah dengan intim dari hati ke hati. Menjadi otonom bukan lagi sekedar pengertian politik kewilayahan melainkan tumbuh menjadi pengertian manusiawi yang berakar jauh di hati.

Dengan gelagat ini semua, daerah yang kelak bermunculan mengucapkan diri ke tengah Indonesia akan menghasilkan keberagaman budaya, atau dalam bahasa teknis akademis, multikulturalisme. Indonesia akan menanggung hasil berupa kekayaan dan keberagaman manifestasi manusia dari berbagai daerah, dari berbagai alam pikiran, dari berbagai situasi dan permasalahan, dengan semua itu perlahan akan tercipta ruang bagi pembaca untuk menghikmati keberbagaian yang menumbuhkan peluang bagi dialog hingga kecenderungan untuk meniadakan *si lain (the other)* perlahan dapat disadari sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Kecenderungan untuk meniadakan si lain menjadi mungkin manakala sebuah rumusan (apalagi mengenai manusia) difinalkan dan diabsolutkan. Dengan mengangkat bahan langsung dari kehidupan yang dihayati dan dekat di hati sastrawannya kompleksitas permasalahan manusia akan hadir mengentara di mana rumusan tertentu, juga rumusan necis-final tentang daerah, tidak bisa meyakinkan.

Keperluan terhadap sastra yang mengangkat masalah daerah menjadi lebih mendesak lagi belakangan ini bersama ramainya gerakan otonomi daerah, agar otonomi daerah itu tidak tumbuh menjadi sebuah gerakan isolasi terhadap daerah lain sehingga mewacanakan budaya tunggal yang sudah kita alami bersama dampaknya semasa Orde Baru. Karena, dalam sastra mengangkat anak nelayan Madura di Madura dengan segala problemnya sama menantang dan menariknya dengan mengangkat anak nelayan Riau di Madura, misalnya.

Semua ini –sekali lagi- akan menghadiahi Indonesia dengan keberagaman budaya, keberagaman ungkapan dari keberagaman permasalahan dan keberagaman persinggungan manusia dengan beragam tempat, beragam daerah, beragam kultur, dengan beragam permasalahan kehidupan mereka. Di sana, ruang untuk menghidupi suatu keadaan dan mempertanyakan segala sesuatu menjadi mungkin. Dengan begitu, Indonesia akan menjadi sebuah tempat yang kaya dengan suara-suara di mana setiap suara mendapatkan haknya untuk didengar, untuk dipercakapkan, untuk dikritik, untuk didukung dan dimuliakan dalam sehangat-hangat perdebatan. Tanpa ini, kita tak yakin benarkah Indonesia masih diperlukan.***

Agus R. Sarjono

Agus R. Sarjono lahir di Bandung, 27 Juli 1962. Menyelesaikan studinya di FPBS, IKIP Bandung dan pascasarjana Universitas Indonesia. Semasa mahasiswa aktif di Unit Pers Mahasiswa IKIP Bandung, sebagai ketua (1986-1988).

Dia menulis sajak, cerpen, esai, kritik dan drama. Karyanya dimuat diberbagai koran, majalah, dan jurnal di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Seseekali dia diundang membacakan sajaknya di event internasional, antara lain: Asean Writers' Conference/Workshop (Poetry), Manila (1998); Malam Puisi Indonesia-Belanda, Erasmus Huis Jakarta (1998); Festival de Winternachten, Den Haag, Belanda (1999); Poetry on the Road, Bremen, Jerman (2001), dan internationales literature festival Berlin, Jerman (2001).

Kumpulan sajaknya adalah Kenduri Airmata (1994, 1996); Suatu Cerita dari Negeri Angin (2001); A Story from the Country of the Wind (2001); serta Knöchen aus Banyuwangi (2003). Buku esainya adalah Bahasa dan Bonafiditas Hantu (2001), dan Sastra

dalam Empat Orba (2001). Buku yang dieditorinya al: Saini KM: Puisi dan Beberapa Masalahnya (1993); Catatan Seni (1996); Kapita Selekta Teater (1996); Pembebasan Budaya-budaya Kita (1999); dan Horison Sastra Indonesia (2002). Terjemahannya yang telah terbit adalah: Kepada Urania, Joseph Brodsky (1998) dan Impian Kecemburuan Seamus Heaney (1998).

Dia menjadi ketua komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) periode 1998-2001 ini dan sehari-harinya bekerja sebagai pengajar pada Jurusan Teater Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung, serta redaktur Majalah Sastra Horison. Kini dia menjabat sebagai Ketua (Bidang Program) DPH DKJ. Sejak Februari hingga Oktober 2001, dia tinggal di Leiden, Belanda, sebagai writer-in-residence atas undangan Poets for All Nations dan peneliti tamu pada International Institute for Asian Studies (IIAS), Leiden Universiteit, Belanda. Dia juga menjadi tamu kehormatan untuk tinggal dan menulis di rumah sastrawan besar Jerman peraih Nobel Sastra, Heinric Böll, atas undangan Heinrich Böll Stiftung (November 2002 – Februari 2003). Terjemahan kumpulan sajaknya dalam bahasa Jerman, *Frische Knöchen aus Banyuwangi* diluncurkan Februari 2003, di Berlin, Jerman. Selama di Jerman dia membaca puisi dan berceramah di sejumlah perguruan tinggi, antara lain: Universitas Humbolt, Universitas Bonn, Universitas Hamburg, Universitas Goethe-Frankfurt serta di beberapa pusat kesenian antara lain: Heinrich-Böll Stiftung, Berlin; Brecht-Haus, Berlin; Literaturhaus, Köln, dsb.

Bukunya yang hendak terbit adalah: Atas Nama Cinta (drama)l serta Rumah vs Nasion: Studi atas Novel Jalan Tak Ada Ujung Mochtar Lubis dan Keluarga Gerilya Pramoedya Anata Toer.

PEMEKARAN WILAYAH - HARUSKAH KE AKAR ETNIS ? AMATAN ATAS PENGALAMAN SULAWESI UTARA

Oleh: A.J. Ulaen

1. Pengantar

Usulan pemekaran wilayah-administratif-baik itu tingkat provinsi dan kabupaten maupun kecamatan dan desa atau kelurahan – semenjak lima tahun terakhir ini menggejala umum di tanah air. Pulau Sulawesi, ketika Indonesia baru merdeka, merupakan satu wilayah administrasi berstatus provinsi. Kini sudah terbagi atas lima provinsi¹. Itu pun terasa belum cukup. Masih terdengar tuntutan pemekaran wilayah provinsi baru². Belum lagi pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan. Kesemua usulan itu memanfaatkan peluang desentralisasi sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintah Daerah³.

Apabila semua usulan pemekaran seperti itu semata-mata dijiwai oleh alasan-alasan politis-administratif serta efektivitas penyelenggaraan layanan masyarakat (warga), maka gejala seperti itu dapat ditafsirkan sebagai adanya kesadaran warga berikut-peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadaannya menjadi berbalik dan cukup mengkhawatirkan ketika satuan-satuan wilayah yang diusulkan untuk dimekarkan berkorelasi dengan aspek sosio-kultural dan historis, yakni alasan dan pertimbangan kesuku-bangsaan dalam suasana penguatan kekuatan politik di tingkat daerah atau lokal. Mengkhawatirkan, seperti yang dipertanyakan oleh Elizabeth Morrell dalam artikelnya berjudul *Desentralisasi atau Separasi?*⁴

¹ Yakni Propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Sulawesi Utara, dan Propinsi Gorontalo.

² Propinsi Sulawesi Timur, Propinsi Ajatappareng, Propinsi Sulawesi Barat, Propinsi Luwu Raya (di wilayah Propinsi Sulawesi selatan); Propinsi Minahasa, Propinsi Bolaang-Mongondow dan Propinsi Sangihe dan Talaud (di Sulawesi Utara).

³ Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839; serta Undang-Undang Nomor 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

⁴ Elizabeth Morrell, 2002. "Desentralisasi atau Separasi? Suatu Tujuan dari Sulawesi Selatan". Dalam Antropologi Indonesia 68, 2002: 13-14

membahas gejala serupa yang sedang terjadi di daerah Sulawesi Selatan. Sayangnya, kajian Morrell ini tidak mengungkapkan keterkaitan antara pemekaran wilayah dengan kecenderungan penguatan semangat keetnisan, melainkan lebih melihat pada alasan pengembangan wilayah. Tulisan ini, sebatas kasus Sulawesi Utara, akan memaparkan keterkaitan antara pertimbangan etnis sebagai salah satu alasan yang melandasi tuntutan pemekaran wilayah.

2. Dari Provinsi Sulawesi ke Provinsi Sulawesi Utara

Pembagian wilayah administratif di Indonesia – dengan beberapa pengecualian – sebagian besar didasarkan pada prinsip pewilayahan warisan Pemerintah Kolonial Belanda. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda juga menata wilayahnya berdasarkan prinsip teori-tradisional. Maksudnya, didasarkan pada “pewilayahan hukum adat”.

Sulawesi – pada awalnya berstatus satu provinsi dalam sistem pewilayahan administratif Republik Indonesia – pada tahun 1960 dimekarkan menjadi dua wilayah administratif setingkat provinsi, yakni Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara-Tengah, disingkat Sulutteng. Wilayah yang disebut terakhir ini didasarkan pada latar dan pertimbangan historis, yakni bekas wilayah “*Keresidenan Manado*”. Pada tingkatan wilayah kabupaten atau daerah tingkat dua, juga bekas mengikuti satuan-satuan wilayah yang sudah terbentuk semasa pemerintahan kolonial, entah itu bekas wilayah swapraja, kerajaan dan sebagian besar adalah wilayah etnis.

Pemekaran wilayah administratif setingkat provinsi di Sulawesi masih berlanjut setelah adanya Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah. Sekilas, usulan pemekaran wilayah seperti ini mengesankan adanya pertimbangan-pertimbangan rasional untuk pengembangan wilayah, efisiensi layanan publik dan sebagainya. Itu yang terbaca dalam dokumen-dokumen resmi usulan pemekaran baik dari pihak eksekutif maupun pihak legislatif di provinsi-induk. Namun, dapat dijumpai alasan-alasan lainnya – yang tidak mengindikasikan adanya alasan-alasan emosional-emosional primordial; sebagai reaksi atas “kebijakan-kebijakan baik pada tingkat penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi.

Pengalaman kesejarahan menunjukkan bahwa tuntutan “status ekonomi” dalam artian adanya perimbangan kekuasaan dan pembangunan antara penyelenggara pemerintah di “pusat” dengan penyelenggara pemerintahan di “daerah” sudah disuarakan oleh tokoh-tokoh daerah Sulawesi yang kemudian dikenal dengan “Peristiwa Permesta” pada tahun 1957 (Harvey, 1984; Leiriza, 1991). Pemekaran provinsi Sulawesi menjadi dua provinsi tampaknya tidak dapat dipandang lepas kaitannya dengan peristiwa di atas. Di satu sisi, tuntutan atas “status ekonomi” diobati dengan pemekaran wilayah. Di sisi lain hal ini dapat dipahami sebagai upaya mereduksi dan memperkecil kekuatan di daerah agar mudah dikontrol.

Di era desentralisasi atau setelah diberlakukannya UU No. 22/1999, wilayah provinsi yang semula dikenal dengan sebutan Provinsi Sulawesi Utara, dimekarkan menjadi dua provinsi. Provinsi Sulawesi Utara dengan wilayahnya meliputi kabupaten Bolaang-Mongondow, Mihanasa, Sangihe dan Talaud, serta dua kota yakni Manado dan Bitung. Provinsi Gorontalo meliputi wilayah kabupaten Gorontalo. Pada tingkatan kabupaten di wilayah provinsi Sulawesi Utara, wilayah kabupaten Sangihe dan Talaud telah dimekarkan menjadi kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud; Kabupaten Minahasa dimekarkan menjadi dua kabupaten yakni kabupaten induk (Minahasa) dan kabupaten baru (Minahasa Selatan) ditambah satu kota (Tomohon). Tampaknya, ini belum merupakan hasil akhir. Warga Minahasa yang berada dan berasal dari wilayah bagian Utara menuntut adanya kabupaten Minahasa Utara. Begitu juga dengan warga pulau-pulau Siau-Tagulandang-Biaro, menuntut kehadiran kabupaten Si Taro.

3. Komunitas Etnis di Sulawesi Utara

Antropolog dan etnolog yang menaruh perhatian atas wilayah ini mendeskripsikan keberadaan komunitas-komunitas etnis yang ada di wilayah administrasi provinsi Sulawesi Utara, yakni “orang Gorontalo” sebagai kelompok etnis terbanyak. Sensus penduduk tahun 2000 mencatat sebanyak 897.235 jiwa yang menetap di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Peringkat kedua dalam hal jumlahnya adalah “orang Minahasa” dan terdiri atas sub-etnis Tontemboan, Toulour, Tombulu, Tonsea, Tonsawang, sebanyak 824.600 jiwa. Orang Sangir berada pada urutan ketiga

dengan jumlah 396.510 jiwa. Orang Bolaang dan Mongondow 224.749 jiwa. Orang Talaud 79.838 jiwa⁵. Selain itu masih ada komunitas etnis dalam jumlah yang kecil, yakni orang Bantik, orang Bajau, orang Jaton dan komunitas dari Nusantara yang sudah lama menetap di Sulawesi Utara.

Pengalaman kesejarahan telah menempatkan orang Minahasa sebagai komunitas etnis yang berperan-besar dalam berbagai aspek kehidupan di daerah Sulawesi Utara. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari ketersediaan pranata pendidikan modern yang sudah diperkenalkan sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dan terpusat di daerah Minahasa, ditunjang oleh ciri budaya⁶ dan tradisi-sumekolahnya⁷.

4. “Bohusami”, Etnisitas dalam Slogan Politik

Pada tahun 1980-an, dalam ranah-politik di daerah Sulawesi Utara muncul semangat kesetaraan dari warga komunitas non-etnis Minahasa terutama keinginan dan keterlibatannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Gejala ini oleh elit politik dan eksekutif di tingkat provinsi ditanggapi dengan kebijakan-politik yang tercermin dalam slogan *bohusami*, sebuah akronim dari *bo* = Bolaang-Mongondow, *hu* = Hulontalo (Gorontalo), *sa* = Sangihe dan Talaud, *mi* = Minahasa.

Kebijakan ini mengakomodasi keterwakilan komunitas etnis baik pada tataran elit politik terutama eksekutif. Jika gubernurnya orang Mianasa, maka diusahakan agar pejabat pada aras Pimpinan Daerah seperti Sekretaris daerah, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Tinggi dan bahkan Kapolda serta Komandan Korem sebaiknya diisi oleh warga komunitas etnis lainnya. Lambat laun kebijakan seperti ini menjadi kesepakatan yang tidak tertulis dan diterapkan hingga unit kerja yang lebih kecil,

⁵ Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Utara. *Penduduk Sulawesi Utara (termasuk Gorontalo). Hasil Sensus Penduduk 2000*. Tabel 06.3.3 “Penduduk menurut Wilayah Administrasi dan Suku Bangsa”. Halaman 41.

⁶ Baik Lundstrom-Burghoorn (antropolog asal Swedia), Buchholt & Mai (Sosiolog asal Jerman) dan beberapa penulis menggambarkan ciri budaya orang Minahasa terbuka dan cepat menerima unsur-unsur budaya luar. Wiol Lundstorm-Burghoorn, 1981, *Minahasan Civilization. A. Tradition of Change*. Acta Universitatis Gothoburgensis. Swedia; Helmut Buchholt & Ulrich Mai (Eds.), 1994. *Continuity, Change and Aspirations, Social and Cultural Life in Minahasa, Indonesia*. ISEAS-Singapore.

⁷ B.H. Moningka, dkk. 1997. *Manusia di Panggung Sumekolah. Sosok Intelektual W.J. Waworoentoe*. Unsrat Press.

pada organisasi soaial dan politik. Pada awalnya kebijakan seperti itu mampu meredam riak-dinamika politik di daerah⁸. Namun, sepanjang tahun 1990-an, ketika orang Gorontalo merasa sudah saatnya mereka diberi kesempatan menduduki jabatan Gubernur dan hal itu tidak terpenuhi, pemekaran menjadi solusi utama. Kasus ini menjadi pelajaran bagi elite politik di daerah. Slogan-politik *bohusami* seakan terlupakan bersamaan dengan pemekaran wilayah provinsi Sulawesi Utara menjadi Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. Sebagai gantinya dipopulerkan slogan "*torang samua basudara*" (Kita semua bersaudara).

Tuntutan pemekaran wilayah di sisi lain menjadi semacam "cara untuk menggertak" pemerintah provinsi, apabila ada wilayah yang kurang mendapat perhatian atau permintaannya tidak dipenuhi⁹. Reaksi seperti itu seringkali disuarakan baik oleh para wakil rakyat maupun politisi. Lebih tragis lagi ialah pernyataan yang disuarakan oleh salah seorang wakil-rakyat dengan nada sumbang dan dapat ditafsirkan sebagai manifestasi cara berpikir disintegratif¹⁰.

5. Catatan Akhir

Lepas dari pertimbangan dan alasan-alasan rasional-obyektif, menguatnya kesadaran-etnis menjadi salah satu faktor pendorong dan pertimbangan mengajukan tuntutan pemekaran wilayah-administratif di Sulawesi Utara. Menariknya ialah proses pemekaran dan penunjukan pejabat yang akan bertugas di "daerah baru" hasil pemekaran disambut dengan wacana "putra-daerah" sebagai syarat utama; keinginan seperti ini kalau tidak disimak, diasiasi, dan dikelola secara cermat dan bijak, akan menjadi lahan-subur bagi tumbuhnya benih-benih disintegrasi.

⁸ Kebijakan ini juga memiliki kelemahan karena dengan mengutamakan perimbangan etnis, lalu mengabaikan kualitas individu yang dipandang menjadi representasi etnis yang dipilih. Keadaan ini terungkap melalui guyonan, "katak pun akhirnya jadi lembu".

⁹ Hal ini terbaca jelas dalam pemberitaan media cetak daerah. Isu pemekaran (Propinsi Bolaang-Mongondow dan propinsi Sangihe-Talaud) selalu terangkat bersamaan atau sesudah adanya pemberitaan tentang perimbangan Anggaran Belanja Daerah atau Dana Alokasi Umum, dan sebagainya di tingkat Propinsi.

¹⁰ Pemberitaan media lokal minggu kedua bulan ini mengangkat pernyataan seorang anggota legislatif fraksi PDI-P asal Talaud yang menyatakan daerahnya (Talaud) bisa saja bergabung dengan negara tetangga, apabila tidak mendapat alokasi dalam ABT dan DAU/DAK.

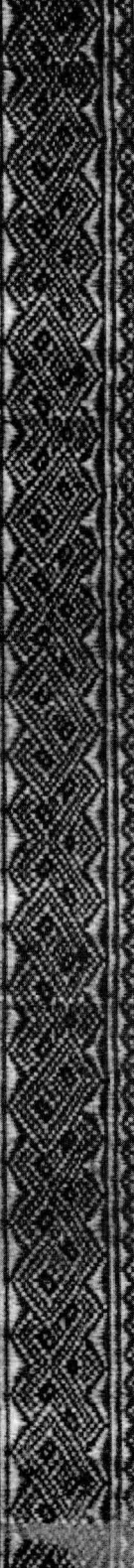
PERKEMBANGAN BAHASA DAN SASTERA DAERAH

Oleh: **Ajip Rosidi**

Menyelenggarakan pemberian Hadiah Sastera “Rancage” setiap tahun sejak 15 tahun yang lalu. untuk sastera bahasa Sunda, sejak 10 tahun yang lalu. untuk sastera bahasa Jawa dan sejak 6 tahun yang lalu. untuk sastera bahasa Bali, memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti perkembangan sastera daerah di Indonesia seperti tercermin dalam ketiga bahasa daerah tersebut. Perlu dikemukakan bahwa karya sastera bahasa daerah yang dinilai untuk mendapat hadiah sastera “Rancage” terbatas pada karya-karya sastera modern yang terbit berupa buku. Pembatasan itu perlu dilakukan agar tidak usah mengikuti karya-karya sastera bahasa daerah yang banyak juga dimuat dalam majalah atau surat kabar. Kalau karya-karya sastera dalam bahasa daerah yang bertebaran di dalam majalah atau surat kabar juga harus dinilai, terus terang saja kami tak mampu.

Dan sepanjang pengamatan kami, hanya dalam ketiga bahasa daerah itulah ada karya sastera modern yang terbit berupa buku. Yang dimaksud dengan “modern” di sini adalah karya sastera ciptaan seseorang zaman sekarang, baik dalam bentuk karya. sastera pengaruh dari Eropa (roman, sajak, cerita pendek, esai, drama) maupun dalam bentuk tradisional daerahnya. Sebab ternyata bentuk-bentuk sastera tradisional daerah sampai batas tertentu masih diminati orang, baik penulis maupun pembaca. Dalam bahasa Sunda ada beberapa sasterawan yang menulis guguritan, yaitu puisi tradisional pengaruh Jawa yang berbentuk dangding yang terikat jumlah larik setiap bait, jumlah engang setiap larik, bunyi vokal terakhir setiap larik dan berbagai ketentuan lain. Malah ada beberapa buku kumpulan guguritan yang terbit, antaranya *Jamparing Hariring* (Anal~panah senandung) oleh Dedy Windyagiri, *Guguritan Munggah Haji* oleh Yus Rusyana, *Jaladri Tingtrim* (L.lutan Tcntcr.lm) oleh Dyah Padmini, dll. *Jailidri Tillglrim* mcnd.lpat hadiah Sastra.1 Rancage tahun 2001.

Dalam bahasa Bali juga nampaknya bentuk-bentuk sastera tradisional masih banyak ditulis oleh para sasterawan zaman sekarang. Tentu saja meskipun mempergunakan bentuk



tradisional, isinya memperlihatkan warna pribadi penulisnya masa kini. Temanya pun bersifat kontemporer, sehingga dengan mudah dapat kita bedakan daripada karya tradisional warisan nenek-moyang. Gejala demikian sebenarnya wajar saja. Kalau sasterawan yang lain di Indonesia dapat mempergunakan bentuk sastra yang disebut modern (karena datang dari Barat, walaupun sebenarnya lebih tua daripada bentuk sastra tradisional kita yang sejarahnya baru beberapa ratus tahun), maka apa salahnya mereka mempergunakan bentuk sastra tradisional peninggalan nenek-moyangnya?

1. Beberapa kenyataan yang menarik

Ternyata para sasterawan yang menulis dalam bahasa daerah itu baik dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda maupun bahasa Bali, tidak semuanya dari generasi tua. Memang ada orang-orang yang dilahirkan pada tahun 1920-an, bahkan tahun belasan, begitu juga yang lahir tahun 1930-an dan 1940-an; namun setiap saat selalu muncul penulis baru dari generasi yang lebih muda. Dalam ketiga bahasa daerah itu misalnya, terdapat sasterawan kelahiran tahun 1950-an, tahun 1960-an, tahun 1970-an bahkan tahun 1980-an. Mereka yang lahir tahun 1930-an atau lebih tua, di sekolahnya masih sempat belajar bahasa daerah, bahkan mungkin di Sekolah Rakyat (sekarang Sekolah Dasar) dipergunakan bahasa daerah sebagai pengantar seluruh mata pelajaran. Di sekolahnya masih terdapat perpustakaan sekolah yang meminjarkan buku-buku terbitan Balai Pustaka yang banyak juga dalam bahasa daerah, atau perpustakaan partikelir yang banyak terdapat di setiap kota. Karena belum ada televisi —walaupun ada radio —maka ketika mereka anak-anak, tidaklah terlalu terpicat oleh siaran-siaran yang hampir 100% dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Mandarin, India dll. Mereka masih aktif bermain dengan kawan-kawannya sekampung berbagai permainan tradisional yang sering disertai dengan lagu-lagu dalam bahasa daerahnya.

Yang lahir tahun 1940-an atau sesudahnya adalah generasi yang bukan saja tidak sempat belajar bahasa daerah dengan baik, melainkan tidak sempat membaca buku-buku dalam bahasa daerah terbitan sebelum perang yang hancur dimakan waktu. Balai Pustaka tidak lagi menerbitkan buku bahasa daerah, walaupun ada jumlahnya sangat sangat tidak memadai. Penerbit

partikelir yang pada masa sebelum pada masa sesudah perang —sejak zaman pendudukan Jepang— tidak ada yang melanjutkan usahanya. Dengan demikian generasi ini tidak mendapatkan kesempatan bertemu secara leluasa dengan buku-buku bahasa daerah yang pernah terbit. Mungkin saja ada secara kebetulan memperolehnya dari orang tuanya atau tempat lain, tapi niscaya jumlahnya hanya beberapa saja. Namun generasi yang lahir tahun 1940-an ketika duduk di kelas I-III SD masih belajar dengan bahasa pengantar bahasa daerahnya. Generasi yang lahir akhir tahun 1960-an bahkan lebih repot lagi, karena ketika mereka duduk di SD, ditetapkan Kurikulum 1975 yang menetapkan bahwa bahasa pengantar di seluruh Indonesia sejak kelas 1 SD —bahkan sejak TK— harus dalam bahasa Indonesia.

Kenyataan-kenyataan itu menimbulkan pertanyaan: Dorongan apakah yang telah menyebabkan mereka menulis dalam bahasa daerahnya? Umumnya mereka dapat dan lebih mudah kalau menulis dalam bahasa nasional, bahasa Indonesia. Lagipula kalau menulis dalam bahasa Indonesia, mereka akan lebih mudah mendapatkan tempat untuk memuatkan karangannya itu. Dan honorariumnya pun jumlahnya lebih banyak.

Sampai sekarang belum ada penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, sehingga jawaban yang ada hanyalah dugaan-dugaan belaka, misalnya bahwa rasa cinta akan bahasa daerahnyalah yang mendorong mereka menulis dalam bahasa daerahnya itu. Tapi bagaimana tumbuhnya rasa cinta itu tak pernah jelas. Yang jelas umumnya mereka merasa lebih sukar menulis dalam bahasa daerah, terutama karena kurangnya buku yang dapat mereka jadikan contoh penulisan bahasa daerah yang baik.

2. Penerbitan bahasa daerah

Penerbitan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu penerbitan pers (majalah dan surat kabar) dan penerbitan buku. Sekarang tidak ada sebuah pun surat kabar yang terbit dalam bahasa daerah. Pada masa sebelum perang ada beberapa surat kabar yang terbit dalam bahasa Jawa dan Sunda seperti Sipalahoenan, Siliwangi dan Sinar Pasoendan dalam bahasa Sunda, *Expres* dan *Bromorlani* dalam bahasa Jawa. Pada masa pendudukan

Jepang semua penerbitan dalam bahasa daerah dilarang, termasuk penerbitan surat kabar dan majalah. Tapi pada tahun 1950-an sampai 1960-an, bahkan awal tahun 1970-an masih ada yang mencoba menerbitkan surat kabar dalam bahasa daerah, walaupun hidupnya merana.

Yang masih ada adalah penerbitan majalah dan tabloid. Dalam bahasa Jawa ada *Penyebar Semangat*, *Joyoboyo*, *Djoko Lodang*, 011. Dalam bahasa Sunda ada *Mangle*, *Kalawarta Kudjang*, *Galura*, *Cupumanik*, dll. *Panjebar Semangat* yang didirikan oleh Dr. Soetomo terbit sejak tahun 1930-an, *Joyoboyo* yang mula-mula terbit di Kediri tahun 1940-an, kemudian pindah ke Surabaya sampai sekarang. Keduanya berupa majalah. *Djoko Lodang* berupa tabloid. *Mangle* mula-mula bulanan, sekarang mingguan terbit sejak tahun 1957. *Cupumanik* terbit bulanan sejak Agustus 2003, keduanya berupa majalah, sedangkan *Kalawarta Kudjang* terbit mingguan sejak 1950-an dan *Galura* terbit mingguan sejak 1970-an berupa tabloid. Di samping itu banyak majalah dan tabloid yang pernah terbit dalam bahasa Jawa dan Sunda tetapi hanya beberapa tahun atau beberapa bulan bahkan.

Umumnya penerbitan itu lebih didorong oleh rasa cinta terhadap bahasa daerah sehingga kebanyakan tidak dilakukan secara profesional, baik redaksional maupun (apalagi) pemasarannya. Jumlah tirasnya sekarang cenderung menurun. Umumnya juga mereka bukan saja membayar honorarium tulisan dari luar (sangat) rendah, melainkan juga gaji para karyawannya pun lebih rendah daripada penerbitan dalam bahasa nasional. Umumnya kelangsungan hidup penerbitan-penerbitan itu tergantung kepada langganan, sedangkan iklan tak dapat diharapkan, karena para pemasang iklan cenderung lebih suka memasang iklan dalam penerbitan bahasa nasional. Isinya umumnya berupa cerita, baik cerita pendek maupun cerita bersambung, di samping itu, banyak memuat puisi, terutama sajak (atau geguritan dalam bahasa Jawa) dan puisi tradisional (atau guguritan dalam bahasa Sunda). Tulisan-tulisan yang lain kebanyakan tentang agama, sejarah atau legenda, kepercayaan akan adanya yang gaib-gaib, perimbon, pengobatan tradisional dan semacamnya. Ada juga berita, tetapi umumnya jauh terlambat dibandingkan dengan pers bahasa nasional. Kadang-kadang ada tulisan populer mengenai hukum, pertanian,

kesehatan dan ilmu-ilmu yang lain. Bahasa Jawa dan Sunda yang dahulu pernah menjadi bahasa budaya yang dipergunakan untuk menulis mengenai apa saja tentang kehidupan dan kebudayaan masing-masing, sehingga melahirkan karya seperti *Serat Centhini* dalam bahasa Jawa, sekarang hanya dipergunakan sebagai bahasa lisan (itu pun sekedar berkomunikasi sehari-hari karena begitu hendak mengemukakan hal yang lebih rumit secara otomatis pindah ke dalam bahasa Indonesia) dan bahasa tulisan berupa artikel pendek, di samping digunakan untuk penulisan cerita dan sajak. Tidak ada yang menulis karya ilmiah yang serius dalam bahasa daerah.

Bentuk penerbitan lain adalah berupa buku. Umumnya penerbitan buku bahasa daerah dilakukan oleh orang-orang yang merasa terdorong untuk memelihara kelanggengan bahasa daerahnya. Penerbit komersial umumnya hanya menerbitkan buku-buku bahasa daerah yang dipergunakan di sekolah-sekolah, terutama buku-buku teks. Orang yang menerbitkan buku bahasa daerah karena terdorong oleh rasa cinta itu tidak melakukannya secara profesional. Mereka merasa tugasnya selesai begitu melihat buku itu selesai dicetak. Tak pernah memikirkan bagaimana caranya agar buku-buku itu sampai ke tangan pembaca. Sedangkan penerbitan buku teks yang dipergunakan di sekolah-sekolah sering dilakukan karena adanya KKN antara penerbit dengan pejabat yang berwenang menentukan dan memesan buku yang akan dipakai di sekolah. Penerbit merasa tugasnya selesai kalau sudah menyerahkan dana KKN kepada pejabat yang bersangkutan, dan si pejabat sering tidak peduli apakah bukunya benar dicetak sebanyak pesanan dan apakah benar disampaikan ke sekolah yang bersangkutan. Karena itu sering terjadi bahwa buku yang dipesan itu tidak layak pakai, karena bukan saja tidak sesuai dengan semua teori pendidikan, melainkan juga menyalahi tata bahasa daerah yang bersangkutan. Bisa saja orang yang tidak berasal dari lingkungan penutur sesuatu bahasa menulis buku pelajaran tentang bahasa tersebut, tetapi hal itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga akan membuktikan keahlian penyusunnya dalam soal bahasa tersebut. Di Jawa Barat pernah pihak P dan K mengesahkan dan memesan buku pelajaran bahasa Sunda yang ditulis oleh bukan orang Sunda

dan isinya banyak menyalahi tata bahasa dan kosakata bahasa Sunda. Baru-baru ini pihak diknas menerbitkan sendiri buku yang ditulis oleh salah seorang karyawannya dalam bahasa Sunda dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang menyebabkan orang tertawa terpingkal-pingkal karena ngaconya.

Biasanya menghadapi keadaan penerbitan bahasa daerah yang menyedihkan itu, para ahli bahasa dan sastra bahasa daerah mengharapkan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, turun tangan, misalnya dengan menerbitkan buku-buku bahasa daerah oleh penerbit pemerintah Balai Pustaka seperti pada masa sebelum perang, atau menyediakan perpustakaan di sekolah-sekolah. Tetapi, pemerintah RI baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sejak berdiri tahun 1945 tidak pernah menaruh perhatian serius terhadap mati-hidupnya bahasa dan sastra daerah (dan juga bahasa dan sastra nasional), karena pemerintah tidak pernah menganggap kebudayaan penting dalam kehidupan berbangsa. Mereka menganggap kebudayaan itu sebagai barang jadi berupa komoditi yang dapat dijual untuk menarik wisatawan yang akan menghasilkan dolar. Karena itu sekarang kebudayaan digabungkan dalam satu atap dengan pariwisata. Memang kadang-kadang pejabat dari yang terendah sampai yang tertinggi berbicara muluk tentang kebudayaan, tetapi sepanjang sejarah tak pernah ada pemerintah yang mempunyai program yang nyata dan kontinyu untuk pembinaan kebudayaan. Kalau sekali-sekali mengadakan hajatan besar seperti kongres, bukanlah karena menganggap penting memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi dalam bidang kebudayaan, tetapi karena kegiatan seperti ini adalah semacam proyek yang memerlukan dana yang cukup besar, sehingga semua pejabat yang bersangkutan dengan kegiatan ini dapat memperoleh penghasilan tambahan karena gajinya sendiri konon tidak cukup. Setelah acara seperti ini selesai, hasilnya akan tertumpuk di dalam lemari di sudut dan tak seorang pun pejabat yang teringat untuk melaksanakan keputusan dan rekomendasinya.

3. Radio dan televisi

Media yang juga potensial untuk mengembangkan bahasa dan sastra daerah adalah radio dan televisi. **RRI** sejak masa awalnya menyediakan waktu untuk siaran bahasa daerah, dan

banyak radio swasta yang bahkan menyediakan lebih banyak waktu untuk siaran bahasa daerah, termasuk sandiwara atau pembacaan cerita-cerita. Siaran-siaran sandiwara dalam bahasa daerah, ternyata banyak menarik minat para pendengar lapisan bawah - yaitu penutur bahasa daerah yang potensial.

Yang menarik adalah bahwa banyak pemasang iklan melalui radio yang mempergunakan unsur-unsur bahasa dan kesenian daerah dalam iklannya, bahkan ada juga iklan yang seluruhnya disampaikan dalam bahasa daerah, terutama dalam radio-radio daerah. Hal itu menunjukkan bahwa pemasang iklan itu sadar bahwa ada segmen masyarakat yang hanya dapat dicapai melalui bahasa atau kesenian daerah. Artinya, unsur-unsur kedaerahan dimanfaatkan untuk menjual atau mempromosikan produknya.

Saya dengar ada juga radio yang khusus untuk bahasa Jawa, tetapi sepanjang tahu saya tidak ada radio yang khusus untuk siaran bahasa Sunda. Hal itu menunjukkan bahwa radio berbahasa daerah pada suatu waktu nanti akan menjadi keniscayaan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti dalam penerbitan buku, untuk lahirnya radio khusus berbahasa daerah juga memerlukan pandangan-jauh seorang investor.

Dalam siaran televisi, bahasa daerah lebih rumit kedudukannya. TVRI Pusat pada suatu masa menganggap bahwa menyelenggarakan acara berbahasa daerah ini bertentangan dengan misinya, sehingga pertunjukan kesenian daerah harus menggunakan bahasa Indonesia juga. Tentu saja siaran seperti itu tidak memuaskan siapapun juga - bahkan mungkin termasuk mereka yang mengambil kebijakan demikian. Para penggemar yang sudah terbiasa menyaksikan pertunjukan kesenian daerah merasa keindahan seninya dikebiri, sedang mereka yang belum biasa menyaksikannya tidak mustahil merasa ganjil yang nicaya tidak mendorong minatnya untuk mengapresiasinya. Para penyelenggara kesenian itu sendiri sering mengambil kebijaksanaan menggunakan bahasa Indonesia yang berbau daerahnya, sehingga lahirlah bahasa Indonesia yang niscaya bertentangan dengan semboyan "berbahasa Indonesia dengan baik dan benar" yang dipromosikan oleh Pusat Bahasa melalui acaranya melalui TVRI juga.

Tumbuhnya televisi-televisi swasta memberikan

kemungkinan timbulnya siaran- siaran kesenian daerah dalam bahasa daerahnya yang asli dan bahkan dalam bentuknya yang asli pula seperti siaran wayang kulit sampai pagi. Sampai sekarang belum ada -mungkin belum ada yang memikirkannya sekali pun- televisi swasta yang sepenuhnya berbahasa daerah atau yang sebagian besar acaranya dalam bahasa daerah. Namun kemungkinan seperti itu tidak mustahil kalau telah tumbuh stasiun-stasiun televisi daerah.

Radio dan televisi dalam menyusun acara siarannya niscaya berpegang juga kepada peraturan-peralihan pemerintah yang berkenaan dengan bahasa. Sayang dalam hal ini, pemerintah sendiri belum mempunyai kebijaksanaan yang jelas yang dapat dijadikan pegangan.

4. Hari depan bahasa dan sastra daerah

Sampai sekarang pemerintah menyerahkan mati-hidupnya bahasa dan sastra daerah kepada para penuturnya saja. Padahal Undang-undang Dasar memberi tugas kepada pemerintah agar mengembangkan bahasa daerah yang dipelihara baik-baik oleh para penuturnya. Dengan demikian kalau para pencinta dan ahli bahasa serta sastra daerah mengharapkan pemerintah yang akan turun tangan membina dan mengembangkan bahasa dan sastra daerah, jelaslah harapan itu takkan terpenuhi. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, baru melakukan sesuatu untuk budaya daerah atau untuk bahasa dan sastra daerah kalau kebetulan pejabat yang ditempatkan pada jabatan yang mengurus budaya, bahasa dan sastra daerah itu orang yang mempunyai minat dan mencintainya. Dan, kebetulan bukanlah sesuatu yang dapat selalu terjadi, karena berada di luar sistem, sedangkan penempatan pejabat dalam pemerintah kita diatur oleh suatu sistem yang tidak terdapat dalam teori manajemen yang mana pun.

Artinya, pengembangan bahasa dan sastra daerah sepenuhnya tergantung kepada orang-orang yang memiliki bahasa dan daerah bersangkutan. Para pencinta dan ahli bahasa serta sastra daerah hendaknya berhenti mengharapkan sesuatu yang mustahil seperti mengharapkan pemerintah baik di pusat maupun di daerah akan turun tangan membina dan mengembangkan bahasa dan sastra daerah secara konseptual

dan kontinyu. Memang ada usaha pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah yang wewenangya sepenuhnya berada di tangan pemerintah seperti pengajaran di sekolah-sekolah karena pemerintah yang mengatur kurikulum, begitu juga pembentukan perpustakaan di sekolah-sekolah yang isinya terdiri dari buku bahasa daerah juga. Tetapi penyediaan buku dalam bahasa daerah agar anak-anak memperoleh kesempatan untuk membaca buku dalam bahasa daerahnya, dapat dilakukan, tanpa menunggu pemerintah turun tangan. Tentu saja untuk itu harus tersedia modal dan tenaga profesional.

Orang-orang tua yang karena waktu mereka kecil berkesempatan membaca buku-buku bahasa daerah yang ketika itu banyak terdapat dalam masyarakat baik melalui perpustakaan maupun melalui penerbit dan toko buku, sering menyalahkan anak-anak sekarang yang tidak suka membaca buku bahasa daerah seperti dirinya. Mereka lupa bahwa anak-anak sekarang tidak suka membaca buku-buku bahasa daerah karena mereka tak pernah bertemu dengan buku berbahasa daerah yang dapat menarik minatnya. Seharusnya daripada menyalahkan anak-anak yang tidak berdosa itu atau meminta, mendesak atau memaki pemerintah karena tak kunjung melakukan apa-apa yang mereka inginkan seperti yang pernah mereka alami pada masa penjajahan Belanda dahulu lebih elok kalau mereka mengusahakan agar tersedia buku-buku bahasa daerah sehingga anak-anak mempunyai kesempatan untuk membaca dan membina apresiasinya terhadap buku bahasa daerah. Susahnya yang merasa perlu agar tersedia buku-buku bahasa daerah itu umumnya para sasterawan dan para ahli bahasa dan sastra saja. Para pemodal dan pengusaha jarang yang berminat terhadapnya. Maka para ahli harus dapat meyakinkan bahwa penerbitan buku bahasa daerah itu prospektif. Hitung saja jumlah orang Jawa dan orang Sunda berapa puluhjutakah? Kalau sepersepuluh saja darinya yang membaca buku bahasa daerah niscaya usaha penerbitan buku bahasa daerah akan merupakan usaha yang menguntungkan. 10% orang Jawa adalah sekitar 6-7 juta orang, 10% orang Sunda adalah sekitar 3-4 juta orang. Bayangkan kalau setiap buku dibaca oleh 10 orang, maka tiras penerbitan buku bahasa Jawa akan 600-700 ribu eksemplar, yang dalam bahasa Sunda akan 300-400 ribu eksemplar. Jelas penerbitan dengan tiras sebanyak

itu merupakan lahan yang menguntungkan. Dengan menerangkan keuntungan yang mungkin akan dapat diperoleh, lebih mudah meyakinkan para pemodal untuk terjun dalam bisnis yang prospektif ini daripada dengan meyakinkan mereka akan pentingnya bahasa dan sastra daerah bagi kehidupan budaya bangsa dan negara, karena mereka yang mempunyai uang lebih suka mentemakkan uangnya daripada memikirkan nasib bangsa atau negara. Maka yang penting ialah bagaimana caranya agar orang-orang Jawa suka membaca buku dalam bahasa Jawa, orang Sunda suka membaca buku dalam bahasa Sunda, orang Bali suka membaca buku dalam bahasa Bali dan seterusnya.

Langkah pertama yang sangat penting adalah bagaimana caranya membuat orang Indonesia membaca buku -dalam bahasa apa pun juga-. Usaha ke arah itu sudah terbengkalai sejak 60 tahun, sehingga kegemaran membaca bangsa kita sekarang mendekati titik nol dan kita menjadi bangsa yang termasuk paling sedikit membaca di dunia. Dalam hal ini memang tanggungjawab pemerintahlah yang terbesar. Namun belakangan sudah mulai muncul orang-orang yang sadar bahwa dalam hal ini kita tak dapat mengharapakan sesuatu yang kongkrit dilakukan oleh penerintah, sehingga mereka sendiri terjun mengajar dan menyediakan buku bacaan bagi anak-anak jalanan yang telantar, atau menyumbangkan buku untuk mengisi perpustakaan-perpustakaan yang mulai didirikan orang. Perusahaan juga ada yang mulai giat dalam bidang ini. Hanya dengan melakukan hal-hal kecil yang kongkrit seperti menyelenggarakan penerbitan buku bahasa daerah secara profesional, mendirikan perpustakaan yang juga menyediakan buku bahasa daerah dalam koleksinya, masa depan bahasa dan sastra daerah dapat berkembang.

Hal yang seperti itu juga berlaku buat mereka yang ingin bergerak dalam bidang radio dan televisi. Mengadakan siaran bahasa dan kesenian daerah sebanyak mungkin akan menumbuhkan minat dan apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan kesenian daerah. Mereka yang beranggapan bahwa anak-anak sekarang tidak dapat atau tidak menyukai kesenian daerahnya sendiri dan lebih menggemari musik pop yang datang dari luar, lupa bahwa hal itu disebabkan oleh faktor kesempatan. Sementara musik pop yang datang dari luar didukung oleh modal sehingga dapat didengar orang setiap saat melalui radio, televisi,

kaset dan lain-lain, kesenian daerah kian sedikit dan kian jarang saja tampil baik dalam bentuk pertunjukan di atas panggung maupun melalui siaran radio atau televisi. Kalau kesenian-kesenian daerah mendapat kesempatan ditonton dan didengarkan secara terus-menerus, niscaya akan menumbuhkan minat dan apresiasi generasi muda terhadapnya.

Pabelan, 15 Oktober 2003.

OTONOMI DAERAH DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN INDONESIA SEBUAH STRATEGI DEMOKRATISASI BANGSA- NEGARA MERDEKA**

Oleh: Anhar Gonggong***

1. Pendahuluan: Pencapaian Panjang dan Kontradiksi di dalamnya

Sejak para pendiri bangsa-negara ini di dalam periode pergerakan Nasional (1900-1945), hal-hal yang menjadi judul makalah ini sebenarnya telah menjadi pencapaian utama untuk kemudian menjadi landasan dan cara mengatur diri, *jika kelak kita merdeka*. Sejalan dengan itu, masalah demokrasi, misalnya, tetap menjadi pembicaraan yang ramai di dalam periode Pergerakan Nasional itu. Hal itu terlihat di dalam pidato Cokroaminoto pada Kongres III Sarekat Islam pada tahun 1916 di Bandung. Di samping “meminta” diberikannya kepada anak negeri sebuah *Selfbestuur*, tokoh besar Pergerakan Nasional yang awal ini, juga telah menerangkan bahwa sistem pengaturan hidup bersama ialah bertegak di atas prinsip-prinsip demokrasi¹. Juga Soekarno dan Hatta, telah mendiskusikan pengertian dan gagasan mereka tentang demokrasi; dan sejak awal kedua tokoh besar kita, pendiri bangsa-negara itu, telah menciptakan istilah demokrasi ekonomi. Artinya pemahaman terhadap demokrasi tidaklah sekedar dalam kaitannya dengan pengaturan hidup di bidang politik, melainkan dengan pengaturan bidang ekonomi².

Selanjutnya, persoalan yang berkaitan dengan

** Disampaikan di depan peserta Kongres Kebudayaan V – atas perintah panitia- di bukittinggi, Sumatera Barat, pada tanggal 20-23 Oktober 2003

*** sampai sekarang masih dipercaya dan diberi kesempatan untuk memegang jabatan Deputy Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, juga mengajar sejarah dan Sistem Politik Indonesia di Fakultas Ilmu Administrasi Unika Atma Jaya, Jakarta

¹ untuk keterangan lebih lanjut tentang hal ini, lihat Anhar Gonggong, *Riwayat Hidup Cokroaminoto*, Proyek IDSN, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 1987, hal 23.

² untuk ini tulisantulisan mereka di dalam *Di Bawah Bendera Revolusi dan Kumpulan Karangan Muhammad Hatta*

pengembangan kebudayaan, telah menjadi hal yang dianggap penting untuk landasan hidup bersama di dalam Indonesia. Demikian pentingnya posisi kebudayaan di dalam pemikiran mereka, tampak pada penegakan Boedi Oetomo yang dibentuk dengan tujuan yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan. Demikian pula, tampak di dalam metode dan kurikulum pendidikan di lingkungan Taman Siswa yang dipimpin oleh Ki Hadjar Dewantara.

Tetapi, di dalam kenyataannya setelah kita merdeka, semua hal yang sejak awal diterima sebagai (akan) menjadi landasan kehidupan bersama di alam kemerdekaan, ternyata ketika akan dijalankan, maka nampak bahwa di alam kemerdekaan, ternyata ketika akan dijalankan, maka nampak bahwa di antara kita dan (mungkin) juga di dalam ide-ide tersebut, mengandung *kontraversi*, yang pada akhirnya menjadi polemik, sampai sekarang. Otonomi daerah, misalnya, berdasar pada pasal 18 UUD'45 jelas bersifat desentralisasi. Tetapi ketika akan diterapkan maka pada akhirnya cenderung ke sentralisasi. Itu terjadi pada tahun 1960-an, demikian pula tahun 1970-an, seperti UU No. 5/1974 dan UU No. 5/1979. Berkaitan dengan itu, maka usaha kita untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat bangsa dan pemerintah negara kita berdasar pada prinsip-prinsip demokrasi, sampai sekarang masih "gagal". Sepanjang 58 tahun merdeka, kita telah menjalankan 3 (tiga) jenis demokrasi, tetapi ketiganya tampak "gamang" di dalam pelaksanaannya. Kita telah menjalankan *Demokrasi Liberal* selama $\pm$ 13 tahun, tahun 1945-1958. Kemudian diganti dengan rumusan demokrasi "yang sesuai dengan kepribadian Indonesia" yang dirumuskan oleh Presiden Soekarno, Demokrasi Terpimpin, yang dijalankan dalam jarak waktu 6 (enam) tahun 1959-1965. Kemudian dilanjutkan- setelah melalui periode transisi sekitar 3 (tiga) tahun, 1966-1969 dengan demokrasi yang dirumuskan oleh (Jenderal) Soeharto/Orde Baru – dengan apa yang dikenal dengan *Demokrasi Pancasila*, 1970-1998, dan sekarang kitapun masih *mencari* sebuah sistem demokrasi, dan sejalan dengan itu, Amien Rais, di awal reformasi- sebelum menjadi Ketua Umum PAN dan Ketua MPR – ketika ditanya oleh reporter TV mengenai demokrasi apa yang diinginkan; dan ia menjawab: "*Demokrasi tanpa embel-embel*" (di ANTV, 1998).

Halnya sama dengan persoalan pengembangan kebudayaan

kita, setelah kita merdeka. Berdasar pada UUD'45 pasal 32, maka ada beberapa istilah yang dapat melahirkan perdebatan, seperti Kebudayaan Nasional, Kebudayaan Bangsa, Puncak-Puncak Kebudayaan di daerah dan lain sebagainya. Seingat saya, tokoh penting dan "berpengaruh" seperti Prof. Dr. Umar Kayam, tidak setuju dengan istilah Kebudayaan Nasional dan istilah Puncak-Puncak Kebudayaan di Daerah. Hal ini tidak jarang dikatakannya secara terbuka dan juga beberapa kali dikatakannya kepada saya di dalam pelbagai kesempatan omong-omong santai, baik di Jogja maupun di Jakarta.

Apa yang digambarkan di atas sangat menarik-dalam mengembangkan pikiran lebih lanjut-untuk dikaitkan dengan pemikiran konseptual dari Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta yang disampaikannya di depan senat Universitas Gajah Mada pada tahun 1956, sebelum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita kutip sebagian dari pemikiran konseptual beliau sebagai berikut :

"Apabila kita mau mendekatkan demokrasi yang bertanggungjawab kepada rakyat, melaksanakan cita-cita lainnya yang tertanam dalam pengertian "pemerintah dari yang diperintah" maka sebaik-baiknya adalah titik berat pemerintah sendiri diletakkan pada Kabupaten. Provinsi dalam sistem ini menjadi badan koordinasi daripada segala Kabupaten yang berada di dalam lingkungannya³

Sepanjang yang saya tangkap dari isi pidato untuk penganugerahan gelar Doktor Kehormatan (Doktor HC.) di bidang hukum itu, tujuan utamanya

Dalam kaitan itu, usaha-usaha pemberdayaan rakyat di dalam alam merdeka sekarang ini, tampak masih menghadapi kendala yang amat rumit. Bahkan di dalam periode dari pelaksanaan Otonomi daerah – yang diletakkan pada daerah Tingkat II – kabupaten – Kendala yang dimaksud makin rumit. Dan

³ Mohammad Hatta, Lampau dan Datang, Djambatan, Djakarta, 1956, hal 25 ialah untuk memberdayakan rakyat yang dinilai dari wilayah yang menampung "rakyat bawah:" paling banyak, yaitu daerah Kabupaten. Pemberdayaan rakyat di situ berkaitan dengan bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya.

karena itu, sampai sekarang persoalan pelaksanaan Otonomi daerah, tetap menjadi '*wilayah polemik yang belum selesai*'!

Berdasar pada keterangan-keterangan di atas, saya akan melanjutkan uraian seperti di bawah ini.

2. Mencari sebuah Strategi-kebijakan

Kini kita berada di bagian awal dari usia 58 dari (proklamasi) kemerdekaan kita yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi-dengan perasaan sedih-harus diakui bahwa para pemimpin kita, baik pemimpin yang berada di tengah masyarakat dalam arti yang tidak duduk di dalam pemerintahan, dan terutama pemimpin yang memegang jabatan-jabatan pemerintah, telah dan masih gagal melahirkan strategi kebijakan untuk membangun kehidupan yang demokratis dan pengembangan kebudayaan Indonesia.

Tentu saja usaha untuk melakukan demokratisasi dan pengembangan kebudayaan Indonesia memang berhadapan dengan beberapa kenyataan yang rumit, terutama yang berkaitan dengan kenyataan dari kita. Sehubungan dengan itu, paling tidak ada 2 (dua) hal yang merupakan kendala utama di dalam kaitannya dengan usaha menjalankan pemerintah yang demokratis yang sekaligus melakukan pengembangan kebudayaan Indonesia. Yang pertama, masih kuatnya pengaruh "sistem" otoritarianisme yang bersumber dari dua sistem yang kita warisi dari masa lampau kita; yaitu dari *sistem feodalisme* dan dari *sistem imperialis-kolonisme*. Keduanya bersumber dari apa yang sering saya sebut sebagai *masyarakat warisan*.

Yang kedua, ke-Bhinekaan, kemajemukan diri kita sebagai bangsa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kenyataan ini sering dipandang dengan sudut pandang yang bersifat stereotipe, sudut pandang yang negatif. Artinya, suku yang satu memandang sifat-sifat buruk dari suku yang lainnya⁴. Kenyataan diri yang bersifat *bhineka*, majemuk itu telah melahirkan pelbagai

⁴ Robert W Hafner, "Pengantar Demokrasi dan Tantangan Pluralisme" di dalam M. Jadul Maula (Ed), Ngesuki Desa sak Kukuban Lokalitas, Pluralisme, Moral Sosial Demokrasi, Seri Penelitian, Lkis, Yogyakarta, 2002, hal.xii demokratisasi melalui penerapan otda, yaitu dengan tujuan untuk memberdayakan rakyat dari yang paling bawah. *Strategi Hatta*, kalau dijalankan dengan *baik dan benar*, memang mencakup tujuan untuk melakukan pelibatan kemajuan-dalam arti tingkah laku demokrasi itu sendiri dan lembaga-lembaga negara yang akan digunakan untuk melakukan proses demokratisasi yang dikehendaki.

hal dengan nilainya yang berbeda di dalam pandangannya masing-masing. Kemajemukan itu, tentu saja mengandung makna bahwa ketika mereka bertegak di dalam *keindividualannya*, maka itu berarti bahwa mereka telah menunjukkan milik yang mereka miliki secara sendiri-sendiri. Hal itu terjadi ketika kita mengaitkannya dengan istilah *Nusantara* dan *Nederlandsch Indie*. Di dalam periode Nusantara telah bertegak sekian banyak kerajaan-kerajaan tradisional “di wilayah” nusantara itu, seperti- menurut Clifford Geertz, terdapat ratusan, bahkan mungkin ‘ribuan’ kerajaan di wilayah Indonesia ketika itu-Sriwijaya, Majapahit, Mataram, Gowa, Banten dan lain sebagainya, yang bertegak dengan sistem pemerintahannya sendiri-sendiri. Dan di dalam periode itu, kerajaan-kerajaan tradisional di Nusantara, di samping membangun persahabatan dan “koalisi” amat sering saling bertentangan, bermusuhan yang pada ujung akhir melahirkan perang fisik di antara mereka.

Kenyataan dari kerajaan-kerajaan tradisional-dalam arti yang saling bertentangan itu telah menjadi *suatu titik lemah* ketika VOC dan pasukan militernya melakukan tindakan-tindakan penguasaan antar kerajaan itu, titik lemah yang lain, menurut Prof. Dr. Sartono Kartodirjo, ialah *tidak adanya* sistem suksesi di kerajaan tradisional tersebut. Dari sinilah nanti kekuasaan VOC atau Belanda menggunakan peluang politik pecah belah untuk melakukan penaklukan-penaklukannya yang berhasil.

Apa yang tampak dari situasi yang digambarkan singkat di atas, ialah untuk membangun sistem kehidupan bersama dan pemerintahan yang bertegak di atas prinsip-prinsip demokrasi, diperlukan sebuah visi-strategi dengan implementasi kebijakan yang dikerjakan berdasar program yang jelas. Beberapa tahun yang lalu, sebuah disertasi dari Fakultas Psikologi UI yang telah dipertahankan oleh Suwarsih Warnaen, yang menyangkut dengan sifat-sifat suku-suku bangsa di Indonesia, dengan pandangan stereotipe, telah melahirkan reaksi yang cukup keras dari beberapa suku yang disebut di dalam disertasi itu. Salah satu bagian yang mendapat reaksi keras karena pandangan stereotipe itu ialah Orang Minangkabau. Tidak kurang dari Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar dari UI dan Rosihan Anwar, wartawan senior yang telah memberikan reaksinya, karena tidak sependapat dengan

pandangan stereotipe dari disertasi Suwarsih Warnaen

Sebenarnya, ketika kita sudah berhasil untuk memenangkan Perang Kemerdekaan kita, 1945-1949, dan Kerajaan Belanda *tidak dapat lagi menunda* pengakuan kedaulatan atas keberadaan Negara Republik Indonesia, maka usaha demokratisasi kehidupan dan pemerintahan yang juga-bersamaan dengan itu- merumuskan sebuah strategi dan kebijakan dalam bidang kebudayaan dilakukan pula. Strategi bersama itu seharusnya berusaha menjalankan demokratisasi, dengan *tujuan untuk memotong akar-akar masyarakat warisan yang terdiri dari 2 (dua) jenis sistem, yaitu feodalisme dan kolonialisme*, seperti yang telah disebutkan di atas.

Dalam kaitan itu, pemotongan akar-akar masyarakat warisan itu, pada saat yang bersamaan, maka strategi pengembangan kebudayaan Indonesia juga dirumuskan. Inilah yang merupakan tantangan utama bagi bangsa Indonesia di dalam menegakkan Negara Republik Indonesia yang hendak ditata di atas prinsip-prinsip demokrasi. Tantangan di masa kemerdekaan yang sudah berlangsung selama 58 tahun hingga sekarang masih belum dapat dijawab dengan memuaskan, untuk tidak menyatakannya bahwa kita masih “gagal” merumuskan strategi kebudayaan yang disepakati bersama. Dalam rangka itulah Kongres Kebudayaan V ini, diharapkan dapat merumuskan sebuah strategi kebudayaan dan kebijakan kebudayaan yang akan menjadi pegangan untuk melaksanakan demokratisasi bangsa dan pemerintahan dengan pengembangan kebudayaan Indonesia di masa depan.

3. Otonomi Daerah dan Pengembangan Kebudayaan Indonesia: Sebuah Strategi Demokratisasi Bangsa- Negara Merdeka

Setelah melalui pergumulan panjang, maka sejak 1999 melalui pemilu di dalam periode reformasi-sebuah pemilu yang dianggap cukup memadai dalam arti memenuhi standar minimal dari pelaksanaan pemilu yang bebas dan jujur, maka rumusan dan penetapan sistem (pemerintahan) otonomi daerah (otoda) berdasar pada UU No. 22/1999 yang menekankan pelaksanaannya pada Daerah Tingkat II atau Kabupaten/kotamadya. Dengan demikian, langkah Otoda yang dijalankan sekarang yang berdasar pada UU No.22/1999, sebenarnya

sudah merupakan *langkah strategis* yang membuka peluang untuk menciptakan *strategi kebudayaan* yang dikaitkan dengan pelaksanaan otda tersebut. Hal itu juga berkaitan dengan usaha demokratisasi kehidupan bersama kita sebagai bangsa merdeka dengan tatanan demokrasi di dalam pemerintahan Republik Indonesia.

“Demokratisasi sebagai pelibatan kemajuan ke arah pencapaian kekuasaan mayoritas atau rakyat⁴.” Problem yang sering dihadapi oleh kita dan juga pada umumnya negara-negara berkembang ialah usaha yang berada di dalam situasi masyarakat majemuk, plural. Sehubungan dengan itu Robert W. Hafner memberikan keterangan bahwa :

“Dalam antusiasme kita terhadap kedaulatan rakyat, kita seringkali lupa bahwa kedaulatan hanya benar-benar demokratis bila ia mengakui batas-batas yang didefinisikan berdasarkan pada penghormatan kita terhadap pluralitas kepentingan dan identitas masyarakat. Lalu, demokrasi pertama-tama dan terutama merupakan sistem politik dan budaya politik untuk menghormati dan melindungi pluralitas masyarakat dan secara damai mengkoordinasikan keumuman dan perbedaan lintas pembelahan masyarakat⁵”.

Sejalan dengan kedua keterangan Hafner di atas, maka kehendak pemimpin utama kita yang merupakan “penegak demokrasi” melalui tingkah lakunya yang pasti, Wakil Presiden Hatta, untuk memulai proses. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat melalui demokratisasi itu, tentu juga berkaitan dengan kehendak membangun sistem politik dan budaya politik yang melindungi pluralitas masyarakat. Sebagai bangsa yang memiliki kenyataan diri yang majemuk, kemampuan kita untuk membangun sistem politik dan budaya politik yang melindungi kemajemukan kita, kemajemukan masyarakat adalah, sebenarnya, *taruhan* kehidupan bersama kita di dalam Indonesia di masa depan.

Dalam pengertian di atas, maka kita seharusnya mampu mengembangkan sebuah strategi kebudayaan yang akan memberdayakan diri kita di tengah-tengah kenyataan diri kita

⁵ Ibid., hal.xiii-xiv

yang majemuk itu. Pada sisi inilah kita juga seharusnya *mampu menghargai* perbedaan-perbedaan yang kita miliki, karena justru dengan menghargai perbedaan itu, maka kita akan mampu melakukan proses demokratisasi secara dinamis, sekaligus melakukan “semacam reproduksi” kemanusiaan kita secara benar. Artinya penghargaan kepada perbedaan merupakan pula penghargaan kepada makna diri sebagai manusia dengan nilai kemanusiaan. Hal ini merupakan simbol sekaligus realitas diri kita sebagai manusia yang lahir dan berkembang dari perbedaan jenis diri kita, yaitu *perempuan* yang pada akhirnya menjadi ibu dari anak-anaknya. Demikian pula seorang laki-laki tidak mungkin menjadi ayah tanpa hidup bersama dengan seorang perempuan. Tentu saja kehidupan bersama itu harus ditopang oleh nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya.

Dengan keterangan di atas, salah satu bentuk dari tujuan demokratisasi yang membudayakan, tidak lain ialah memahami dan menghargai perbedaan. Dalam kaitan dengan itu, *strategi kebudayaan yang berjalan bersama dengan demokratisasi* juga bertujuan untuk membangun pemahaman kita tentang istilah-istilah yang akan kita gunakan di dalam pengembangan kebudayaan kita itu. Yang saya maksudkan ialah apakah yang akan kita gunakan ialah kebudayaan Indonesia atau kebudayaan nasional dan/atau kebudayaan bangsa? Istilah tersebut mungkin selintas dianggap “sama dan sebangun”.

Seperti yang anda lihat pada judul makalah ini, saya menggunakan istilah *Kebudayaan Indonesia* dan tidak menggunakan istilah kebudayaan nasional dan juga istilah kebudayaan bangsa. Istilah-istilah kebudayaan Indonesia, setidaknya bermakna, pertama mencakup semua suku bangsa-etnik yang ada di Indonesia yang dianggap lebih tinggi, lebih sempurna dan ada yang dianggap lebih rendah, primitif dan pemahaman yang bersifat stereotipe lainnya. Karena itu, bagi saya dengan sebutan kebudayaan Indonesia, sekaligus juga akan memberikan makna demokratisasi di dalam pengembangan kebudayaan kita sebagai bangsa-negara.

Sebaliknya jika kita menggunakan sebutan kebudayaan nasional yang dikaitkan dengan puncak-puncak kebudayaan di daerah, jelas memberikan bangunan pemahaman hirarkis, yaitu adanya kebudayaan nasional yang mempunyai

kedudukan “lebih tinggi, lebih sempurna” dari kebudayaan-kebudayaan lokal, yang sering dianggap memiliki kedudukan “lebih rendah” daripada kebudayaan nasional itu. Sejalan dengan itu, ada istilah *Kebudayaan Daerah* yang dianggap tidak sesempurna dengan kebudayaan nasional. Demikian selanjutnya dengan istilah puncak-puncak kebudayaan yang juga memberikan makna yang lebih sempurna dan lebih tinggi dari kebudayaan yang bukan puncak. Tentu pemahaman-pemahaman itu harus diakhiri di dalam proses demokratisasi yang memberdayakan.

Strategi kebudayaan yang memberdayakan rakyat itu tentu harus diletakan dalam rangka bangsa-negara yang merdeka. Dengan peletakan posisi yang demikian, maka strategi kebudayaan harus bertujuan untuk (melanjutkan) memotong akar-akar kedua jenis masyarakat warisan, yaitu masyarakat feodalistik dan masyarakat kolonialistik. Karena kedua sistem masyarakat warisan itu, sepanjang perjalanan sejarah manusia kita sebelum kita menyatakan diri secara formal-sebagai bangsa merdeka dan menegakkan negara merdeka pula, telah menjadikan kita sebagai bangsa terbelenggu dan bangsa terjajah. Dengan demikian, *strategi kebudayaan yang sekaligus juga digunakan untuk melakukan proses demokratisasi kehidupan bangsa dan menegakkan pemerintahan yang demokratis, adalah bermakna pembebasan manusia Indonesia dari semua jenis pembelengguan yang bersumber dari kedua jenis (sistem) masyarakat warisan yang disebut di atas.*

Walaupun di atas saya hanya menggambarkan tentang kenyataan diri kita dan keadaan internal bangsa-bangsa Indonesia, namun, harus diakui pula bahwa kita tidak dapat mengabaikan pengaruh-pengaruh asing, baik lembaga dalam pengertian negara asing, maupun dalam pengertian lembaga Bank Dunia dan IMF. Singkatnya, kita tidak dapat mengabaikan pengaruh globalisasi, yang juga memberikan dampak membelenggu diri kita baik secara individu maupun bangsa-negara. Dengan demikian, strategi kebudayaan yang kita “rancang” itu, juga akan digunakan untuk memberdayakan diri di dalam menghadapi arus globalisasi yang dimaksud; yaitu setiap hari menampakkan arusnya yang makin deras.

4. Penutup: visi Ke-Indonesiaan

Sengaja saya menempatkan pembicaraan tentang visi ini sebagai bagian penutup. Kesengajaan itu didasari oleh tujuan untuk mempertegas posisi strategi yang harus didasari oleh sebuah visi yang jelas. Dalam pandangan Marleau Ponty, sebagaimana dikutip oleh Dawam Rahardjo, adalah "*an Organized perception*" suatu pandangan yang teratur dan sistematis dirumuskan. Isinya adalah *an imagined patterns of possibility to which the whole nation can be drawled*⁷. Pokoknya, demikian Dawam Rahardjo, visi adalah konsep tentang masa depan. Tetapi tidak hanya itu, visi bisa disebut visi jika ia mempunyai kekuatan yang mampu membawa seluruh bangsa kepadanya⁸.

Ketika kita merancang sebuah strategi kebudayaan, maka ia harus didasarkan pada sebuah visi bersama sebagai sebuah bangsa yang satu dan bersatu, yaitu visi ke-Indonesiaan. Dalam kaitan itu, maka kita harus memahami ke-Indonesiaan, *kebangsaan sebagai*—kembali meminjam Dawam Rahardjo— *wawasan kebudayaan*. Dengan itu, kita akan merancang strategi kebudayaan dalam arti pelanjutan penciptaan ke-Indonesiaan kita ke hari depan, dan itu ditopang oleh kekuatan yang nilai-nilai budayanya bersumber dari kenyataan diri kita, Bhinneka Tunggal Ika.

Saya berharap tawaran-tawaran strategi—dalam arti strategia kebudayaan yang memberdayakan rakyat, demokratisasi yang memberdayakan— yang bertumpu pada pemikiran Wakil Presiden Hatta tentang Otonomi daerah Kabupaten yang bertujuan untuk pelaksanaan demokratisasi dari bawah dengan visi ke-Indonesiaan yang dibangun bersama, akan berguna untuk kelanjutan Indonesia, dalam arti sebagai bangsa yang satu, bersatu yang bertegak dengan harga diri yang kokoh, dengan tetap menyandang nama Negara: Republik Indonesia !

⁷ M. Dawam Rahardjo, Tantangan Indonesia sebagai Bangsa (Esai-esai Kritis tentang Ekonomi, Sosial dan Politik) UII Press, 1999, hal. 2)

⁸ *ibid.*, hal.25

**DENGAN MODAL LEGENDA RATU LAUT
SELATAN, KITA BERHARAP DATANGNYA RATU ADIL
TERNYATA MUNCUL MALAH RATU NGEBOR**

atau

**BUDAYA KEDAERAHAN = NYO LORO KIDUL
BUDAYA MASSA = INUL**

atau

**KENAPA BUBUR AYAM LEBIH SAKTI
DIBANDINGKAN NASI LIWET SOLO**

atau

**KENYATAANNYA PENGUASAAN MEDIA MASSA
YANG MELAHIRKAN BUDAYA MASSA MAKIN
TERPUSAT DAN MAKIN MENGUAT**

atau

BUDAYA SIAGA VERSUS BUDAYA NIAGA *)

Oleh: **Arswendo Atmowiloto**

Ada saatnya—dan cukup lama, kedaerahan menjadi pusat nilai: cermin keunggulan, dan identitas yang karenanya berbeda dengan daerah lain. Daerah lain menjadi ‘bukan daerah kita’, atau ‘belum seperti daerah kita, nanti akan menjadi seperti kita’,

*) untuk bahan diskusi dalam Kongres Kebudayaan Indonesia, yang diselenggarakan di Bukittinggi, 18-23 Oktober 2003. Judulnya ada beberapa versi, seperti biasanya proses budaya massa yang ada. Biasanya untuk sinetron, misalnya, ada kompromi untuk judul, untuk peran, dan terutama pemeran. Ini berbeda sekali dengan karya sastra yang lain seperti cerpen, cerita bersambung, atau puisi. Istilah budaya niaga dan budaya siaga, saya dengar dalam konteks lain dari Harry Tjan Silalahi, sewaktu saya wawancara. Contoh lain saya peroleh masukan dari teman-teman, sewaktu mengobrolkan hal ini di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 30 September 2003.

atau bahkan 'harus diangkat, perlu dibina' Pada zaman kerajaan-kerajaan kebesaran diukur dengan keluasan wilayah. Di zaman provinsial, kedaerahan yang berdasar geografis—, yang diperinci makin kecil. Provinsi, kota atau bahkan kemudian kabupaten. Kadang batas geografis ini hanya ditandai oleh sebuah sungai, yang seperti alamiahnya tidak lurus—menjadi pemilah yang capistis. Kita mendengar dan menerima istilah-istilah: seni budaya Jawa, seni budaya Bali, seni budaya Sunda, seni budaya Minang, dengan pakem-pakem yang membedakan. Bahkan kemudian dibedakan dan dipisahkan lagi. Semasa Jawa: Yogya-Solo menjadi beda. Sama-sama kain batik: latar hitam, beda dengan latar putih, paesan warna pengantin beda—apalagi yang lain. Pedan, wilayah antara Yogya-Solo, memiliki cap sendiri dengan 'tenun pedan'. Makanan pun diberi nama tambahan nama daerah: soto Betawi, soto Sokaraja, soto Malang, di samping perbedaan karena unsur daging: ayam, sapi, kikil, babat, jeroan...

Sebagai pusat nilai, rumusan atau pakem yang membedakan bagus-buruk, salah-benar, halus-kasar, hanya 'berlaku' di masing-masing kedaerahannya. Karena makin mendekati rumusan makin dianggap adiluhung, dan makin tidak setia makin menjadi asing. Mempertahankan dan 'nguri-uri' identitas, yang adalah nilai utama atau terutama. Sehingga kalau bersentuhan dengan budaya yang berbeda, diterima sebagai 'budaya jajahan'—ada sedikit kompromi. Ya batik, tapi batik pesisiran, 'ya bagus, tapi sabrangan'. Begitu juga kalau bertemu dengan budaya massa, 'modern', 'pop' (ayam pop, juga ada), diwadahi sebagai bagian dari budaya kedaerah tadi: 'pop Jawa', 'pop Minang', 'pop Sunda'.

Kedaerahan menjadi pusat, menjadi kiblat, dan karenanya sakral untuk tetap orisinal. Ini soal mati hidup, akhlak, moral, budi pekerti, makna—atau apa saja.

Karena perkembangan atau perubahan komunikasi, mobilitas gerakan, pembeda kedaerahan makin kabur, toh sungai bukan lagi halangan, jarak bukan masalah (dulu untuk jarak tak sampai 10 kilometer, Keraton Kartasura menjadi berbeda dengan Keraton Surakarta, seperti juga Kyoto dengan Tokyo), kedaerahan makin ciut, dan karenanya mengkeras. Sejarah pun ditulis dalam rangka kedaerahan. Demikian juga dongeng-dongeng, mithos tercipta sendiri-sendiri, walau pada dasarnya

sama. Misalnya tokoh Nyi Roro Kidul. Masyarakat Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur (Jawa Selatan, Jawa Utara) menganggap Nyi Roro Kidul-nya lebih asli, lebih punya silsilah, dan punya bukti-bukti keberadaannya. 1)

Sebaliknya budaya massa tidak berorientasi pada tempat, pada daerah yang selalu sama. Budaya massa di atas budaya daerah: dalam pengertian harafiah, satelit yang menjadi medium—siaran televisi, cetak jarak jauh, hubungan internet—letaknya di atas langit. Teknologi ini memakai pengantar udara, yang juga bergerak dan menjauhi seluruh ruang. Batas geografis buatan manusia—tapal batas, dan buatan alam—sungai, bahkan laut, terasa mengada-ada.

Budaya massa, juga memiliki dan hidup dengan pakem-pakemnya. Bedanya pakem-pakemnya ini transparan, berlaku di sana- dan disini, bentuk medianya sama: televisi, media cetak, kaset, film, buku, komik—

- rating, kayak indeks harga saham/tiras
- sharing/jumlah khalayak
- rate card, tarif iklan yang berbeda pada waktu yang berbeda
- transparan, karena biasa niaga milik publik

Dengan sistem tata nilai yang berbeda ukuran dan cara mengukurnya, hal-hal yang sulit diberi angka eksak terabaikan. Misalnya nilai-nilai moral, nilai-nilai agama. Kalau pun masih diperhatikan, sebenarnya karena unsur 'agar aman', atau memberi rasa kasihan.

- siaran televisi, acara azan magrib terasa sangat dipaksakan. Wilayah jangkauan siaran melampaui batas perbedaan waktu. Sehingga perlu ditambah dengan: untuk keperluan tempat tertentu.
- Dengan bersiaran 24 jam sehari, televisi bahkan menyatukan jam-jam prima, jam-jam istirahat, jam-jam yang berlaku di daerah

Budaya kedaerahan, lebih bersifat siaga. Budaya yang selalu siaga kalau-kalau ada serbuan dari luar, kalau ada gangguan dari luar. Karena harus siaga, dengan sendirinya ekstra waspada, serba curiga.

Budaya massa lebih bersifat niaga. Kalau ada kesempatan menyerbu ke luar, tiap ada kesempatan berbenah ke dalam.

Budaya siaga seperti siskamling—sistem keamanan

lingkungan, bertolak belakang dengan budaya niaga yang efektif dan efisien. Siskamling lebih meneliti kesalahan warga di dalamnya—kenapa si kaya tak mau ikut ronda, misalnya. Siaga terus karena merasa ada orang jahat akan menyantroni wilayahnya—persekutuan terkecil, yaitu rukun warga.

Seperti halnya budaya ‘pengantenan seharian penuh’²⁾ yang masih terjadi di daerah budaya Betawi. Demikian juga budaya *nyekar*, *nyadran*, (berdoa ke makam leluhur) atau bahkan mudik, masih lebih berorientasi pada tempat. Sama seperti grup-grup olahraga—sepakbola, bulu tangkis—yang namanya pun lebih orientasi tempat.

Fanatisme kedaerahan ini ketika dibingkai dengan frame nasionalisme, sebagian terwadahi, sebagian saling bertentangan. Sebagian berjalan dengan pemaksaan: apa alasan seragam batik sesuai untuk ‘korpri’? Lebih lagi busana nasional adalah kain kebaya dan sanggul bagi perempuan?

Budaya niaga adalah budaya pasar. Tak melakukan pemaksaan, tapi menyediakan pilihan yang—nilai dalam niaga—lebih murah, lebih banyak, lebih terjamin kuantitasnya. Judul-judul komik dari luar negeri yang diterbitkan di sini memberi contoh yang membedakan antara pendekatan industrial dan ‘kerja rumahan’. Bahkan materi filmnya pun jauh lebih murah dibanding membuat sendiri. Judul-judul telenovela—juga hanya berharga seperduapuluhnya kalau diproduksi di sini, padahal biaya produksi di sana delapan kali lipat biaya produksi di sini, lebih banyak lagi. Juga film India, yang rata-rata berdurasi tiga jam bisa ditayangkan menjadi tiga episode. Saya pernah mempertanyakan bagaimana mungkin telenovela yang berasal dari Amerika Latin, yang kental dengan idiom-idiom agama Katolik bisa sukses besar di Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Mungkin pertanyaan ini mengada-ada—walau pernah ada telenovela yang diprotes dan dihentikan penayangannya karena menghina agama—karena toh Mahabarata dari India yang juga kental dengan agama Hindu sukses besar. Begitu juga ajaran-ajaran agama Buddha dalam cerita silat. Ini mungkin realitas lain dari media massa, yang menjembatani perbedaan yang ada atau diadakan.

Dalam industri pertelevisian, keleluasaan yang diperoleh oleh sementara orang adalah mendirikan stasiun televisi—bukan memproduksi program. Seperti halnya pertokoan, mal,

hypermarket yang bermegahan berdiri dengan produk-produk non daerah lagi. Karena kalau semua dilihat dengan kaca mata niaga: 'ayat-ayat' pop lebih klop di sana: *makin banyak sawerannya, makin asyik goyangannya*. Bukan kebetulan kalau jenis musik dangdut lebih cepat memassa, karena unsur kedaerahan yang menjadi darah kekhasannya memang tak murni dan tak kebtal.2)

(Bandingkan dengan, misalnya, tari serampang 12, atau tayuban, atau ngibing, yang masih memakai seragam daerah sebagai identitas. Dalam panggung dangdut penyanyi bisa muncul dengan pakaian daerah, atau koboi, atau pamer puser, atau apa saja untuk lagu apa saja.

Bandingkan dengan penggunaan bahasa daerah, yang sebagian idiomnya sudah punah dari ingatan. Bandingkan gambaran umum lirik-liriknya dengan cinta: cemburu, rindu, selingkuh, merana, janda, atau tokoh-tokohnya bisa muncul siapa saja, Jacky, dan bukan, misalnya pahlawan nasional. Bandingkan nama-nama baru penyanyi dangdut yang tak terikat nama suku, nama warga, nama keluarga. 3)

Akankah dangdut bisa dianggap musik yang mengintegrasikan tanah air. Jawabannya: jelas iya, selama dalam pakem dan rumusan niaga. Nama Inul Daratista 4) memenuhi rumusan niaga, yaitu pendekatan industrial "melibatkan penuh media massa, bukan identitas kelompok/daerah, perhitungan '*win-win solutions*', bukan istilah untuk rugi yang dipakai, melainkan sama-sama untung—, dalam pengertian jangkaan pasar—minimal—nasional.

Di masa depan, pendekatan industrial dalam produksi, peranan niaga dan keterlibatan media massa, lepasnya identitas kedaerahan atau ciri khas kelompok dengan tata krama kental, menjadi idiom-idiom integrasi. Itu bisa berarti mi instan, air minum mineral, bubur ayam (dan bukan nasi liwet solo yang njlimet), poco-poco, menikah tamasya, 5) juga kumpul kebo.

Semakin kental identitas—identitas daerah, identitas suku, identitas etnis—semakin susah memassa, karena kena budaya siaga, kena 'siskamling'. Biduan perempuan keroncong menyanyi dengan celana panjang—apalagi pendek, bisa dituding merusak keroncong. Atau menjadi 'keroncong comberan'. Sehingga pada awal saja, sudah menjadi sumber pertentangan. Bukan diskusi sebagai jalan keluar, karena

menyangkut nilai-nilai yang diterima secara sakral, tak perlu ditawarkan. Demikian juga 'nasi liwet solo'. Memiliki ciri yang kalau berbeda sedikit saja, cara menghidangkannya, dianggap bukan nasi liwet, bukan asli Solo. Sedangkan bubur ayam—makanan sarapan bagi petani Cina yang miskin, sehingga memakai air lebih banyak—lebih mungkin terapresiasi dan termodifikasi, lagi-lagi dicoba didaerahkan menjadi : bubur ayam Sukabumi, bubur Manado, bubur ayam 'nama hotel'.

Industri rokok kretek sudah lebih dulu menjadi bagian dari budaya massa—bukan hanya menanggalkan nama kota Kudus—dengan isi dan kemasan yang tak 'kretek', tak 'klobot', tak 'kemenyan' lagi. Demikian juga industri jamu seduhan, tradisi pijat, tak mengingatkan diri dengan identitas tempat. Bahkan nama pijat tradisional punya konotasi yang tak ada hubungannya dengan pijat, atau gaya 'tradisional'.

Kalau ini ada benarnya, agaknya 'puncak-puncak kebudayaan daerah' adalah kebudayaan Indonesia, tidak memadai lagi. Puncak seni daerah, selama masih menjadi identitas daerah itu—justru membeku. Tidak selalu berarti buruk, juga tak berarti mati, tapi perlu dihargai, diwaspadai, diuri-uri, dibina agar tidak 'dirusak'.

Justru yang bukan cap kedaerahan, bukan cap kesukuan, bukan cap keetnisan, bukan cap kekomunitas terbatas, bukan yang murni identitas seratus persen, yang lebih mempunyai peluang berkembang. Lebih diharapkan mampu berperan menterjemahkan integritas nasional.

Dalam hal ini budaya bukan hanya seni, bukan hanya agama, politik, melainkan secara keseluruhan.

Dengan kata lain, kalau integrasi suatu daerah—atau negara, hanya semata-mata mengandalkan sejarah, mempertahankan dengan ciri khas, mendasari pada sistem nilai untuk disamakan—agak-makin susah. Ikatan penyatuan itu terbukti makin melemah. Bahkan, ikatan ideologi politik seperti komunisme pun tak mampu bertahan dalam hitungan abad.

Yang menggelisahkan adalah kenyataan bahwa penguasaan media massa yang melahirkan budaya massa makin lama makin memusat dan makin kuat.

Namun sebenarnya yang lebih membahagiakan, dalam pendekatan budaya, tidak hanya satu jenis, tidak juga dua atau lima saja yang berkembang. Juga karena pendekatan budaya

tak mengenal adanya '*close captions*', selalu terbuka untuk tafsir dan takdir.

- 1) salah satu kelebihan Nyi Roro Kidul yang digambarkan cantik, sensual, adalah 'selalu bisa menjadi perawan kembali setiap habis bersenggama'. Gambara ini mungkin manis, terhormat, tapi kayaknya kok malah menempatkan posisi perempuan sebagai obyek seks.
- 2) heboh pertentangan di musik dangdut, kurang lebihnya juga begitu. Kehadiran Inul Daratista dianggap merusak, membawa ke 'comberan'. Mereka yang 'bersiaga' dengan dangdut, merasa perlu mewaspada. Bandingkan dengan garapan tari Sardono W. Kusumo, yang juga dilempari telur busuk oleh mereka yang merasa perlu menjaga budaya Jawa—khususnya tari. Bandingkan sajak-sajak 'pamplet' Rendra, yang sempat dianggap bukan sajak. Gema ke masyarakat saja yang membedakan, karena yang terlibat musik dangdut jumlahnya berbeda yang terlibat soal tari, soal puisi.
- 3) Nama penyanyi itu sama sekali baru. Kalaupun memakai nama asal-usul agak sama. Evi Tamala (karena dari Tasikmalaya), atau Ayu A.G. (asal Garut), selebihnya nama 'baru'.
- 4) Nama Inul Daratista, kalau diartikan dari bahasa Jawa/Sangsekerta, bias kelebihan, Inul 'dara-yang berpayudara'
- 5) 'kawin tamasya', sebenarnya lebih mirip dengan 'kawin lari', yang adalah menolak keterikatan dengan tempat, dengan tata krama daerah. Dengan melarikan diri, meninggalkan tempat, tak ada lagi ikatan dalam tata nilai setempat.

BUDAYA BAHARI DALAM KONTEKS GLOBAL DAN MODERN (KASUS KOMUNITI-KOMUNITI NELAYAN DI INDONESIA)¹

Oleh: **Munsi Lampe**

1. Pendahuluan

Kajian literatur cukup luas tentang sosial budaya bahari di berbagai tempat di dunia termasuk Indonesia (lihat antara lain: Firth, 1975; Acheson, 1981; 1977; Andersen dan Cato Wadel, 1982; Vereruijsse, 1984; Bavinck, 1984; Ushijima dan Cynthia Neri Zayas, 1994; Palson, 1991; Masyhuri, 1996) serta studi lapangan (field work) intensif, khususnya pada komuniti-komuniti pesisir dan pulau-pulau di Sulawesi Selatan, ²sesungguhnya menunjukkan fenomena sosial budaya yang sangat kompleks, bahkan dalam banyak segi lebih kompleks daripada yang mencirikan kategori-kategori sosial yang hidup di darat dengan berbagai sektor ekonomi/matapencaharian hidup seperti komuniti-komuniti petani, peternak, pemburu dan peramu, pekerja jasa dan industri di lingkungan pedesaan dan perkotaan. Kompleksitas sosial budaya bahari tersebut terutama dicirikan pada sekurang-kurangnya lima fenomena menyolok. Pertama, kelompok-kelompok sosial kebaharian seringkali bukan sekadar berupa kelompok-kelompok kerja yang merupakan sub-sub komuniti desa, tetapi dalam banyak ukuran bisa dikategorikan sebagai suatu sub-sub etnik (seperti berbagai desa-desa nelayan Bugis, Mandar, Makassar, Madura di kawasan pesisir dan pulau-pulau); bisa relatif merupakan kelompok-kelompok etnik sepenuhnya (seperti berbagai desa nelayan Bajo di

¹ Makalah disajikan pada Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi, Sumatera Barat Tgl. 20-23 Oktober 2003.

² Bahan untuk deskripsi dan ilustrasi sebagian terbesar diambil dari: Lampe dkk. (1996/1997). "Studi Analisa Sosial – COREMAP Provinsi Sulawesi Selatan". *Laporan penelitian*, Buku 1 dan 2. Universitas Hasanuddin – PPT-LIPPI. Jakarta; Lampe dkk. (1997/1998). "Studi Analisa Sosial – COREMAP Provinsi Sulawesi Selatan". *Laporan penelitian*, Buku 1 dan 2. Universitas Hasanuddin – PPT-LIPPI. Jakarta; Lampe dkk. (2000). "Studi Pemanfaatan Sumberdaya Laut dalam Rangka Optimalisasi Zonasi Taman Nasional Taka Bonerate". *Laporan penelitian*. Universitas Hasanuddin Bekerjasama COREMAP LIPI, Jakarta.

Kepulauan Riau, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah), bahkan suatu negara atau kerajaan seperti antara lain Kerajaan Goa hingga abad ke-17 (Mukhlis Paeni 1995), Kesultanan Buton (Schoorl, 1984) yang semasa dengan kalau bukan lebih tua dari Kerajaan Bahari Goa. Di Eripah dan negara-negara pantai dan kepulauan maju lainnya selain pelayar, nelayan, pengangkut barang dengan berbagai kategorinya, dan marinir, juga dikenal kelompok-kelompok awak kapal pengeruk dasar sungai dan perairan pantai kota-kota, kelompok-kelompok olah ragawan laut antara lain seperti perselancar dan penyelam, kelompok organisasi pencinta lingkungan laut yang anggota-anggotanya berasal dari ²kota-kota bahkan dari negara-negara berlainan (Ginkel dan Verrips, 1988). Setiap kategori dan level sosial tersebut mempunyai atau dicirikan dengan pola-pola budaya konteks lokal dan global.

Kedua, munculnya sedemikian banyaknya kategori-kategori sosial bahari tersebut tentu dikondisikan oleh tumbuh dan berkembangnya jenis-jenis usaha ekonomi laut terkait cukup banyak dan kaya dengan variasi dan tingkatan skalanya masing-masing. Termasuk dalam sektor-sektor ekonomi kebaharian utama antara lain perikanan, pelayaran/usaha transportasi laut, industri maritim, pertambangan, pariwisata bahari, jasa pengamanan wilayah laut dan isinya, dan lain-lain. Terhadap sektor-sektor dan sub-sub sektor ekonomi maritim tersebut oleh pelaku dan pengelolanya (komuniti, kelompok, keluarga, individu atau pengusaha privat) seringkali melakukan berbagai gaya manajemen berupa ekstensifikasi dengan strategi diversifikasi, intensifikasi dengan usaha tunggal, osilasi di antara berbagai sektor ekonomi terkait laut dan dengan sektor-sektor lain. Di Indonesia misalnya selama ini, dalam rangka pengembangannya yang melibatkan pemerintah, ini seringkali diacukan pada kerangka pengembangan terpadu yang ideal yang menguntungkan ²kota-kota bahkan dari negara-negara berlainan (Ginkel dan Verrips, 1988). Setiap kategori dan level sosial tersebut mempunyai atau dicirikan dengan pola-pola budaya konteks lokal dan global.

Setiap sektor, tetapi seringkali juga dilakukan secara parsial yang menjurus pada gejala persaingan dan konflik kepentingan yang pada gilirannya berdampak pada sektor-sektor usaha kecil milik rakyat dengan gaya manajemen tradisionalnya.

Ketiga, bahwa selain pelaku dan pengguna langsung, ada banyak kategori-kategori sosial dengan tingkatan-tingkatan sosialnya masing-masing terlibat secara tidak langsung dalam setiap sektor ekonomi kebaharian (pemanfaatan sumberdaya dan jasa-jasa laut). Sektor perikanan misalnya – ini merupakan sektor ekonomi cukup banyak jenisnya menurut spesies sumberdaya laut diusahakan dan tipe-tipe teknologi eksploitasi digunakan serta bertingkat-tingkat menurut skala investasi modal usaha — melibatkan nelayan sebagai pelaku dan pengguna langsung, para pembuat perahu dan alat tangkap, pedagang, pengusaha dan rentenir, koperasi dan bank, pasar dan TPI, pemerintah/instansi terkait, keamanan laut, peneliti dan praktisi dari lembaga perguruan tinggi, pihak donor pembangunan, ornop, dan lain-lain. Kategori-kategori sosial dari luar yang tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan aktivitas kemaritiman tersebut justru merupakan kekuatan-kekuatan eksternal yang memberi pengaruh pada atau menentukan tatanan dan dinamika kehidupan sosial budaya komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok sosial kebaharian utama seperti nelayan dan pelayar. Karena itu fenomena masyarakat dan budaya bahari harus dipahami juga dalam konteks eksternalnya.

Keempat, fenomena sosial budaya maritim bukan hanya tampak pada aspek-aspek budayanya (sistem-sistem pengetahuan, gagasan, kepercayaan, nilai, norma, bahasa, organisasi sosial, ekonomi, teknologi, pola pemukiman, kesenian) dengan kategori-kategori dan hirarki sosial pendukungnya yang berbeda-beda. Fenomena tersebut yang dicirikan dengan saling keterkaitan internal antara unsur-unsur serta sifat homogene dan difersitasnya merupakan kerumitan tersendiri. Fenomena budaya dari setiap kategori atau sub-sub kategori sosial dicirikan dengan karakter kepribadian kebahariannya masing-masing. Setiap kategori sosial sebagai nelayan, kelompok awak kapal angkutan, komunitas pembuat perahu/kapal, kelompok olahragawan laut, satuan marinir, dan sebagainya bisa menunjukkan karakter budaya bahari berbeda-beda. Bahkan di antara kelompok-kelompok nelayan rumpon (Mandar), nelayan bagang (Bugis), penyelam tripang (Bajo, Bugis, Makassar) dan pemburu hiu (Bajo) dari Sulawesi Selatan

bisa mencerminkan sikap kepribadian budaya bahari berbeda-beda.

Kelima, kompleksitas fenomena sosial budaya bahari ditunjukkan pula dalam proses dinamikanya. Di sana ada perubahan sepenuhnya seperti motorisasi perahu nelayan yang menggantikan fungsi layar dan dayung; ada proses transformasi struktural mengenai kelompok-kelompok kerja nelayan dan pelaut serta jaringan pemasaran; ada proses perkembangan internal seperti perubahan tipe bagang tancap ke bagang perahu melalui bentuk-bentuk transisi bagang rakit/apung di Sinjai (Sulawesi Selatan); dan proses difusi (persebaran) yang menyolok seperti persebaran rumpon dari Majenne (Sulawesi Selatan), bubu dari Buton (Sulawesi Tenggara), sebuah bentuk perahu tradisional dari Kalimantan dimodifikasi menjadi tipe jolloro di Bira (Bulukumba) kurang lebih dua dekade terakhir; dan bahkan seringkali ada manipulasi identitas etnis secara sementara atau permanen seperti dilakukan oleh sebagian besar kelompok-kelompok masyarakat Bajo di mana-mana dalam rangka adaptasi sosial budayanya; bertahannya tradisi seperti pengetahuan kelautan, pembuatan perahu, dan aturan bagi hasil. Lebih lanjut dalam konteks Indonesia misalnya, di sana ada wacana tentang kearifan lokal (local indigenious) tetapi banyak kali kontradiksi dengan segala dampak negatifnya bagi kondisi sosial ekonomi, lingkungan dan sumberdaya laut (berdasarkan pandangan etik dan emik). Di sana ada juga fenomena paternalisme yang melibatkan pemerintah, kalangan akademisi dan organisasi non-pemerintah (Ornop) di samping berpengaruh positif juga negatif bagi tatanan dan dinamika sosial budaya lokal.

Pengkajian masyarakat dan budaya bahari yang demikian kompleks tersebut di muka menuntut diperlukannya (1) pendekatan studi/kajian multi dan atau interdisipliner yang melibatkan bukan hanya antropologi tetapi juga disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora lainnya, bahkan non-sosial (seperti perikanan dan kelautan, biologi, ekologi, teknik perkapalan) yang relevan dengan fenomena sosial budaya dan fenomena fisik yang bisa saling interkoneksi dan dikontekskan; dan (2) konsep budaya, model/kerangka penjelasan/analisis yang empirik serta metode koleksi data lebih aplikatif. Pada kesempatan ini penyajian berikut dibatasi pada upaya menentukan perangkat

konsep budaya yang relevan dengan studi sosial budaya bahari yang kompleks, gambaran wujud budaya bahari komuniti-komuniti nelayan di Indonesia, konteks eksternal dan modern, dan mengarahkan dinamika serta perubahan secara bijak sebagai penutup. Penulisan ini menggunakan berbagai laporan penelitian, bahan etnografi komuniti-komuniti nelayan di Indonesia terutama dari Sulawesi Selatan, dan dokumen-dokumen.

2. Konsep Budaya Bahari

Kompleksitas fenomena sosial budaya, terutama berkaitan dengan beragamnya kelompok dan kategori sosial terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan laut serta beragamnya sektor mata pencaharian terkait laut menjadi alasan lebih cocok memilih term 'budaya bahari' daripada term-term 'budaya maritim' dan 'budaya marin' dalam rangka pengkajian ilmiah. Term kedua menurut perasaan linguistik Eropah lebih mengacu kepada kegiatan pelayaran, sedangkan term ketiga diacukan kepada aktivitas menangkap ikan semata (Nishimura, 1976). Jika kedua term asing diaplikasikan secara konsisten, kedua wilayah studi tersebut akan saling eksklusif, yang berarti bagian-bagian tertentu dari kedua subjeknya tereduksi. Konsep budaya bahari akan mencakup semua fenomena dan untuk pembatasan dan penyederhanaan subjek kajian kiranya dilakukan fokus-fokus studi pada setiap atau beberapa fenomena sosial budaya yang kompleks tersebut.

Dalam rangka deskripsi, penjelasan dan analisis fenomena budaya bahari yang kompleks kiranya lebih memadai memanfaatkan konsep tiga wujud kebudayaan (sistem gagasan, sistem sosial, budaya material) dari Koentjaraningrat daripada melakukan reduksi wujud kedua dan ketiga seperti dilakukan para antropolog kognitif (Goodenough, 1961: 522; Keesing, 1981: 68) dan simbolik (Geertz dalam Harris, 1999: 20) atau secara berlebihan menekankan pada pertimbangan rasional biaya dan keuntungan (*cost-benefit considerations*) seperti dilakukan para penganut materialis budaya (Harris, 1999: 19). Sebuah formulasi batasan budaya secara jelas mencakup ketiga wujud tersebut dikemukakan oleh Koentjaraningrat sebagai "*keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia*

dalam rangka kehidupan yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar” (Koentjaraningrat, 1980: 193).

Meskipun konsep moderat seringkali dikritik oleh para penganut kognitivisme dan simbolisme karena dinilai mencakup segalanya, namun konsep ‘tiga wujud kebudayaan’ justru sebetulnya memadai sebagai model deskripsi atau analisis karena tidak mengurangi dan tidak melampaui fenomena sosial budaya ke atas dan ke bawah. Bahkan kalau mendengarkan perbincangan masyarakat lokal pada semua tingkatan, kebudayaan yang mereka pahami ternyata meliputi tiga wujud seperti dikonsepsikan oleh Koentjaraningrat. Memadainya konsep tiga wujud kebudayaan untuk analisis fenomena sosial budaya juga pernah diungkapkan Ignas Kleden dalam acara seminar pada Kongres Asosiasi Antropologi Indonesia di Hotel Indonesia, 1996.

Mengacu kepada konsep tiga wujud dan definisi budaya tersebut, untuk studi fenomena sosial budaya bahari yang kompleks, maka ***budaya bahari difahami sebagai sistem-sistem gagasan/ide, perilaku/tindakan dan sarana/prasarana fisik yang digunakan oleh masyarakat pendukungnya (masyarakat bahari) dalam rangka pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan merekayasa jasa-jasa lingkungan laut bagi kehidupannya.*** Budaya bahari mengandung isi/unsur-unsurnya berupa sistem-sistem pengetahuan, kepercayaan, nilai, norma/aturan, simbol komunikatif, kelembagaan, teknologi dan seni berkaitan kelautan. Adapun kelemahan-kelemahan dikaji bersama berbagai perspektif berupa asumsi-asumsi tentang homogeniti, tertutupan, totalitas, keseimbangan, normatif, esensialis, abstrak dan general, yang dalam penjelasan tidak atau kurang empirik kiranya bisa diatasi dengan konsep ‘kreasi dan dinamika budaya’ dari Sanjek dan mode penjelasan kontekstualis progresif dari A.P. Vayda (1988; 1992).

Kerumitan fenomena sosial budaya, khususnya budaya bahari, terutama dalam proses dinamika, berubah dan bertahannya sebagaimana digambarkan di muka kiranya dapat dijelaskan dan dianalisis dengan konsep proses kreasi dan dinamika seperti dinyatakan oleh Sanjek (dalam Borofsky, 1994: 313) bahwa kebudayaan “*is ... under continuous creation — fluid, interconnected, diffusing, interpenetrating, homogenizing,*

diverging, hegemonizing, resisting, reformulating, creolizing, open rather than closed, partial rather than total, crossing its own boundaries, persisting where we don't expect it to, and changing where we do." Kelihatannya kompleksitas proses kreasi dan dinamika budaya perangkat-perangkat proses kreasi tertentu kalau bukan sepenuhnya bisa digunakan sebagai model deskripsi dan eksplanasi dengan konsep atau perspektif budaya tertentu. Tidak menjadi masalah, apakah proses kreasi budaya dimaksudkan oleh Sanjek pada dimensi kognitif dan simbolik, meliputi pikiran dan perilaku, atau ketiga wujud gagasan, perilaku sosial dan material. Kelihatannya bahwa setiap dari penganut dapat memanfaatkan konsep dari Sanjek tersebut hingga pada batas-batas tertentu. Memadukan berbagai kekuatan dari berbagai perspektif, termasuk perspektif-perspektif teoritis berlawanan sekalipun, kalau memang relevan dengan masalah yang dikaji merupakan langkah penyelamatan jika tidak mau menanggung risiko dengan mengandalkan suatu perspektif teoritis tunggal (Bernard, 2000: 174-175).

3. Wujud dan Karakteristik Budaya Komuniti Nelayan

Diasumsikan bahwa keterlibatan dan hubungan manusia dengan lingkungan lautnya didasari dengan pengetahuan dan gagasannya tentang arti dan fungsi (konsumtif dan non-konsumtif) dari sumberdaya dan lingkungan laut bagi kehidupannya. Gagasan muncul kemudian ialah diperlukannya kerjasama dan kelembagaan untuk mengusahakan berbagai keperluan mutlak (sarana/prasarana fisik berupa perahu/kapal, sarana eksploitasi sumberdaya, modal, sarana perlengkapan lainnya). Pokoknya pola pengelolaan pemanfaatan sumberdaya dan jasa-jasa laut melibatkan sistem-sistem budaya (kognitif), kelembagaan (kelompok/organisasi, aktivitas, aturan), sarana dan prasarana pengangkutan dan teknologi eksploitasi sumberdaya (fisik/material).

3.1. Sistem budaya bahari

Sistem budaya bahari mencakup sistem-sistem pengetahuan, gagasan, keyakinan/ kepercayaan, nilai, dari norma/aturan berkenaan dengan pemanfaatan sumberdaya dan jasa-jasa laut. Sistem pengetahuan meliputi antara lain :

Sistem Pengetahuan. Sistem pengetahuan nelayan mencakup antara lain: pengetahuan tentang biota laut bernilai ekonomi tinggi, pengetahuan tentang lokasi dan sarang ikan, pengetahuan tentang musim, pengetahuan tentang tanda-tanda (di laut, darat, angkasa/perbintangan), dan pengetahuan tentang lingkungan sosial budaya.

Pengetahuan tentang biota laut bernilai ekonomi meliputi spesies-spesies ikan, udang, kepiting, cumi-cumi, gurita, penyu (spesies-spesies liar) dan karang/siput-siputan, teripang, akar bahar, tali arus, rumput laut/agar-agar, dan berbagai jenis karang, dan lain-lain.

- √ Nelayan Jawa dan Madura misalnya masing-masing mengenal 77 jenis dan 83 jenis ikan (Welvaartcommissie, 1905:44, 45-46).
- √ Seperti halnya nelayan Pulau Sembilan mengenal kurang lebih 40 jenis teripang (t.koro, t.buang kulit, t.tai kongkong, t.batu, t.kassi, t.nenas, t.pandang diurut dari yang termahal), kerang (k.mutiara, lola, batu laga, mata tujuh, kima), ikan karang terutama sunu (*red snapper*), kerapu (*grouper*), laccukang/langkoe (napoleon), hiu (diambil siripnya), udang/lobster (u.mutiara, u.bambu, u.kipas, u.setang). Spesies-spesies tersebut merupakan komoditi ekspor. Sedangkan jenis-jenis ikan pelagik antara lain seperti layang, cakalang/tongkol, banjara'/sarisi (sardin) merupakan jenis-jenis yang laku di pasar lokal dan regional.

Pengetahuan tentang lokasi penangkapan dan letak rumah ikan misalnya nelayan pancing ikan karang Liang-liang (Pulau Sembilan) mempunyai pengetahuan beberapa lokasi penangkapan dengan letak rumah-rumah ikan sunu di taka-taka (gugusan karang), antara lain:

Taka/lokasi karang	letak rumah ikan
Taka Malambere	selatan
Pasi' loangnge	utara dan selatan
Taka Pangami	ujung timur
Taka Limpoge	utara dan tengah
Taka Lakaranga	utara dan selatan
Taka Lagenda	timur

Pengetahuan nelayan tentang musim di perairan Nusantara ini sekurang-kurangnya mengetahui tiga pola musim, yang menentukan waktu-waktu intensif dan sepi aktivitas pemanfaatan sumberdaya laut dan pelayaran, yaitu musim barat, musim timur dan musim pancaroba.

- √ Bulan 12 – 6 berlangsungnya musim barat dengan hujan lebat, angin/badai besar dan arus kuat dari arah barat ke timur tidak atau kurang memungkinkan aktivitas nelayan dan pelayaran rakyat.
- √ Musim timur berlangsung antara bulan 7 — 12 ditandai dengan angin dan arus agak lemah dari timur ke barat memberikan peluang besar bagi nelayan dan pelayaran rakyat beroperasi secara intensif.
- √ Dari musim barat ke timur ada musim beralihan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan (bln 5 – bln 7) membawa angin dengan guncangan ombak kurang menentu tak henti-hentinya. Di beberapa perairan terbuka di Indonesia Bagian Timur, termasuk Sulawesi Selatan, kecuali sebagian kecil Teluk Bone, sulit di masuki selama musim peralihan tersebut.
- √ Nelayan ikan sunu dari Pulau Sembilan mempunyai pengetahuan tentang waktu-waktu munculnya sunu dan kerapu, yaitu antara bulan 10 — bulan 4. Mereka mengetahui juga bahwa dalam setiap bulan musim hanya 15 hari, yaitu paruh kedua bulan itu, digunakan menangkap ikan, selama 15 hari pertama dari setiap bulan adalah waktu-waktu bersembunyi ikan-ikan.

Pengetahuan tanda-tanda di laut dan angkasa berupa kilat, awan hitam, bunyi kemudi perahu, cahaya laut, yang dihubungkan dengan peristiwa atau hal datangnya angin kencang, angin tornado, adanya batu karang, makhluk berbahaya seperti gurita, dan lain-lain. Untuk hal-hal ini pelayar atau nelayan Bugis dan Makassar mendasarkan pengetahuannya dengan indra **pakkita** (penglihatan), **parangkalinga** (pendengaran), **paremmau** (penciuman), **penedding** (firasat) dan **tentuang** (keyakinan). Pengetahuan astronomi dengan dasar letak

bintang-bintang seperti **sulo bawiE** (muncul di sebelah timur, menandakan akan datangnya angin timur); **wara-waraE** (menandakan akan datangnya panas terik); bintang **tanraE** (menandakan akan datangnya angin kencang); **manuE** (menandakan musim kemarau sudah datang); **lambaruE** (menandakan musim barat mulai datang); dan **tellu-telluE** (petunjuk berlayar ke arah barat atau ke timur) (Abu Hamid, 2003).

Pengetahuan nelayan atau pelayar mengenai lingkungan sosial budayanya dengan mana mereka berinteraksi, bekerjasama atau bersaing memperebutkan peluang-peluang penguasaan sumberdaya, kalau bukan menganggapnya sebagai musuh yang menghambat aktivitasnya, seperti:

- √ Para pedagang hasil laut, pengusaha modal, TPI, dan lain-lain di mana-mana merupakan lingkungan sosial dengan siapa nelayan bekerjasama dan bertransaksi.
- √ Kelompok-kelompok nelayan lain yang mengusahakan jenis-jenis tangkapan sama merupakan pihak-pihak/kelompok-kelompok penyaing.
- √ Bagi nelayan Pulau Sembilan, komuniti-komuniti sasi di Maluku dan Irian Jaya dan personil keamanan laut (Jagawana, Babinsa, Minmas/KP3, Angkatan Laut) adalah kelompok atau pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama kalau bukan justru harus dihindarinya.

Sistem Gagasan/ide. Gagasan budaya nelayan tentang kondisi laut dan sumberdaya adalah bervariasi antara lain seperti: isi laut melimpah dan diperuntukkan bagi semua, sumberdaya laut untuk semua tetapi hanya sebagian bisa memanfaatkannya, laut luas tetapi tidak semua bisa dimasuki. Gagasan **bahwa isi laut melimpah dan diperuntukkan bagi semua** adalah salah satu gagasan yang telah melekat dalam pandangan budaya bahari sebagian besar masyarakat nelayan Bugis, Bajo, Makassar, Buton, Mandar dan mungkin juga Madura — kelompok-kelompok masyarakat tersebut menurut Horridge (1986: 3) merupakan kelompok-kelompok pewaris budaya maritim dari Melayu-Polinesia spesialis pembuatan dan pencinta perahu sejak 2000 tahun lalu. Beberapa nelayan Bugis dari Pulau Sembilan mengungkapkan gagasannya seperti berikut :

"Pertama, ikan di laut dalam kondisi melimpah "tidak akan habis sepanjang/selama daun-daun pohon di darat belum habis."

"laut yang luas dengan segala isinya tidak ada orang tertentu memilikinya, ini diciptakan oleh Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan doa dan usaha keras."

"dengan teknologi eksploitasi apa saja tidak akan menghabiskan isi laut, kecuali hanya mengurangi populasinya."

"Usahakan dan manfaatkanlah rahmat/berkah atau pemberian Yang Maha Pencipta tersebut, janganlah memancing ikan-ikan kecil di pinggris laut, tetapi pergilah ke laut dalam menangkap ikan-ikan besar agar usahanya berkembang."

Sumberdaya laut untuk semua, tetapi hanya sebagian yang bisa memanfaatkannya dianut antara lain oleh komuniti-komuniti nelayan Bugis, Makassar, Bajo dan Buton. Ini bisa ditunjukkan pada sekarang-kurangnya tiga kategori akses pemanfaatan sumberdaya dimiliki kelompok-kelompok nelayan tertentu, yaitu (1) akses nelayan tertentu bernasib baik pada pemanfaatan sumberdaya laut; (2) akses sebagian nelayan pada pemanfaatan sumberdaya laut di lokasi-lokasi yang medannya sulit dan dianggap keramat; dan (3) kontrol dan dominasi para ponggawa darat, pedagang lokal, pedagang atau pengusaha besar/bos terhadap masyarakat nelayan dan mendapatkan keuntungan jauh lebih banyak daripada yang keluarga-keluarga nelayan pada umumnya peroleh.

"Laut luas, tetapi tidak semua bisa dimasuki"

merupakan suatu kesadaran atau pandangan budaya bahari dianut sebagian masyarakat nelayan Bugis, Makassar dan Bajo justru tumbuh dari pengalaman-pengalaman nelayan berhadapan dan bersentuhan dengan institusi-institusi pengelolaan pemanfaatan sumberdaya laut, baik dipraktekan dalam dan dalam perairan Sulawesi Selatan pada umumnya, maupun di daerah-daerah lainnya di Indonesia, terutama di kawasan timur Indonesia sejak dua atau tiga dasawarsa terakhir. Institusi-institusi

dimaksudkan seperti pemilikan individual/privat, komunal, dan kontrol/penguasaan negara, dan lain-lain.

Daftar kebutuhan prioritas dalam budaya komuniti-komuniti nelayan. Keluarga-keluarga nelayan Pulau Sembilan misalnya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pada: kebutuhan subsistem, membayar utang, mengembangkan usaha, dan naik haji ke Tanah Suci Mekkah.

Sistem Keyakinan atau Kepercayaan. Berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya laut, khususnya perikanan, di banyak tempat di dunia nelayan mempraktekkan keyakinan-keyakinan dari agama atau kepercayaan dianutnya sebagai mekanisme pemecahan persoalan-persoalan lingkungan fisik dan sosial yang dihadapinya sehari-hari. Contohnya, seperti:

- √ Sebagian terbesar nelayan Bugis, Bajo, Buton, Makassar dan Madura yang beragama Islam sangat percaya kepada kekuasaan Tuhan Allah dan takdirnya. Sedikit banyaknya hasil diperoleh senantiasa dikembalikan kepada takdir. Rintangan ombak besar, dalamnya laut yang diselami pencari tripang, angkernya banyak tempat-tempat yang kaya sumberdayanya, semuanya dihadapi dan dilawan dengan keyakinan adanya suatu kekuatan lebih menentukan, yaitu Tuhan. Keberanian nelayan/pelaut-pelaut dari Sulawesi Selatan dan Tenggara menjelajahi perairan Nusantara sebagian terbesar didasari keyakinan agama tersebut dipadukan dengan pengalaman dan ketrampilan berlayar serta etos ekonominya yang kuat.
- √ Sebagian besar kelompok-kelompok nelayan di NTT, Maluku dan Irian mengandalkan upacara penyembahan roh-roh halus dan praktek-praktek mejik dalam rangka menghindari bahaya-bahaya di laut dan perolehan rejeki dari laut.

3.2. Aspek kelembagaan

Pada komuniti-komuniti bahari dari negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, terdapat sekurang-kurangnya empat kelembagaan/pranata tradisional (*traditional institution*) yang tetap bertahan, yaitu paranata kekerabatan (*kinship/domestic institution*), pranata agama/kepercayaan (*religious*

institution), pranata ekonomi (*economic institution*), pranata politik (*political institution*) dan pranata pendidikan (*educational institution*). Bagi komuniti-komuniti bahari, pranata — merupakan perangkat-perangkat aturan terpadu dengan organisasi/kelembagaan yang mengatur kegiatan-kegiatan tertentu — difungsikan sebagai mekanisme penyesuaian diri dengan lingkungan atau pemecahan masalah-masalah sosial ekonomi yang mendesak, yang dengan demikian menjadi bagian dari dan menandai gaya pengelolaan (*management style*). Berikut ini diberikan dua contoh kelembagaan ekonomi masyarakat bahari, yaitu kelembagaan kerjasama dan kelembagaan hak pemanfaatan sumberdaya laut.

Kelembagaan Ponggawa-sawi. Dalam masyarakat nelayan, kelompok kerja biasanya sekaligus berperan mengatur berbagai kegiatan ekonomi, baik dalam proses-proses produksi, distribusi maupun konsumsi. Dalam masyarakat nelayan Bugis, Makassar dan Bajo dari Sulawesi Selatan misalnya, *kelompok ponggawa-sawi* yang di samping mengatur pembagian dan menyerap tenaga kerja, juga sekaligus berperan sebagai lembaga perolehan modal (menyerupai fungsi koperasi), sebagai pasar, penyelesaian urusan utang piutang, menetapkan aturan bagi hasil, dan bahkan berperan sebagai wadah sosialisasi kelompok dan jaminan-jaminan sosial ekonomi nelayan. *Ponggawa-sawi* ini bisa dibandingkan dengan kelompok Juragan-Pandega di Jawa dan Tanase-Wasanae di Maluku.

Kelembagaan pemilikan hak atas sumberdaya dan wilayah perikanan. Lautan yang luas dengan kekayaan sumberdaya hayati dan non-hayati dikandungnya merupakan faktor produksi terpenting bagi pengembangan dan bertahannya sektor usaha ekonomi perikanan, khususnya perikanan rakyat/masyarakat pesisir dan pulau-pulau di Indonesia. Faktor produksi tersebut dimanfaatkan dengan berbagai bentuk institusi hak penguasaan seperti berikut:

- (1) Hak milik/penguasaan bersama kelompok masyarakat (*community property right*)
- (2) Hak milik individual/pribadi (*individual/family property right*)
- (3) Hak milik usaha privat (*private property right*)
- (4) Hak milik negara (*state property right*)

- (5) praktek pemanfaatan secara bebas/terbuka (*open access/use*).

Di Indonesia, berbagai bentuk hak kontrol/penguasaan wilayah dan sumberdaya laut seperti ini ditemukan di beberapa tempat, seperti berikut:

- √ Di Maluku, institusi pemilikan komunal atas wilayah darat dan pantai yang disebut 'sasi' ditemukan antara lain di pantai Ambon, Haruku, dan desa-desa Nolloth, Ihamahu, Saparua, dan Porto (P.Saparua) mulai dipraktekkan sejak kurang lebih 130 tahun lalu, lebih dahulu daripada mulai tumbuhnya kesadaran akan perlunya konservasi laut di negara-negara barat sekitar 105 tahun lalu. Institusi seperti ini juga masih bertahan di Irian jaya. Pengaruh kebijakan pemerintah RI sejak beberapa dekade terakhir dan pertumbuhan ekonomi pasar cenderung mengikis dan melemahkan peranan institusi lokal tersebut (Zerner 1984: Soselisa, 1999).
- √ Lokasi-lokasi sepanjang pantai utara Jawa dan Madura hingga periode terakhir Zaman Kolonial dimanfaatkan dengan model pengelolaan institusi pemilikan komunal tingkat distrik dan desa-desa. Justru di masa Indonesia merdeka institusi tersebut mulai melemah dan akhirnya hilang sama sekali.
- √ Seperti di Jawa, sistem pengelolaan pemanfaatan sumberdaya perairan pantai di Aceh dan Sumatera Selatan secara komunal bertahan hingga berakhirnya kekuasaan pemerintahan Hindia-Belanda.
- √ Di Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan, praktek pemanfaatan sumberdaya laut dalam dan pesisir pada umumnya diatur secara terbuka (*open access/use*). Memang masih ada juga beberapa masyarakat (tingkat desa/dusun) di tempat-tempat sangat berjauhan seperti di Gorontalo, daerah Teluk Banggai, Danau Tempe, sebuah dusun pemilik gugusan karang/taka di Bulukumba Barat. Di Selayar menurut keterangan dari masyarakat setempat terdapat sebuah wilayah komunal laut yang melibatkan upacara komunal tahunan.

- √ Usaha perikanan dengan teknik rumpon dan bagang yang banyak dipraktekkan nelayan Bugis, Jawa dan Madura di perairan NTT, Maluku, Irian, Selat Makassar, dan lain-lain merupakan praktek pemanfaatan secara individual.
- √ Di berbagai lokasi perairan dalam kawasan timur Indonesia berkembang perusahaan-perusahaan perikanan tongkol milik swasta yang menghaki gugusan lokasi perairan melalui pemilikan lisensi dari pemerintah.
- √ Di Indonesia, beberapa kawasan lindung sejak dekade 1980-an diadakan oleh pemerintah seperti Taman Laut Bunaken, Takabonerate, P.Seribu dan yang di Maluku, Irian, dll. Di dalam kawasan lindung di daerah karang seperti itu diadakan zona inti (sanctuary zona), z.penyangga, z.pemanfaatan tradisional, dan z. pemanfaatan intensif di luar kawasan. Penguasaan negara seperti ini dimaksudkan untuk menyelamatkan ekosistem-ekosistem laut (khususnya terumbu karang) yang spesies-spesies utamanya mulai terancam. Di samping itu untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan oleh masyarakat penggunaanya.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian lapangan, kemerosotan sumberdaya biota dan non-biota dan kerusakan lingkungan ekosistem laut sebagian terbesar dimungkinkan oleh praktek pemanfaatan secara terbuka/bebas. Pemanfaatan secara bebas dan juga privat banyak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi pasar regional dan global komoditi hasil-hasil laut akhir-akhir ini.

3.3. Teknologi kebaharian

Bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau di Nusantara ini, sektor-sektor ekonomi perikanan dan usaha transportasi/pelayaran masih selalu merupakan sektor-sektor andalan yang bertahan dan berkembang dengan teknologi pelayaran dan penangkapan ikan tradisional dalam berbagai bentuk dan arsiteknya. Berbagai tipe perahu tradisional milik kelompok-kelompok etnis di Indonesia antara lain sebagai berikut:

Pinisi Bugis	P. Patorani Makassar
Lambo Mandar, Lambo Buton	Sandeq, Pangkur, Bago Mandar
Bagan Bugis	Jalloro (tipe terbaru, akhir 1980-an)
Janggolan Madura	Janggolan Bali
Mayang Jawa	Prahu jaring Madura
Lis-alis, Golekan, Leti-leti Jawa	Nade Sumatra
Jukung Jawa	

Salah satu ciri khas perahu Jawa dan Bali ialah penuh dengan ukiran dan gambar-gambar binatang menggunakan kombinasi warna mengandung berbagai makna simbolik. Pinisi adalah salah satu tipe perahu Sulawesi Selatan yang konstruksinya memang bagus, namun kurang dari segi ukiran dan motif-motif gambar bermakna. Konstruksi ini lebih mengutamakan fungsi daya muat, keseimbangan dan kecepatan. Di Sulawesi Selatan, perahu-perahu tradisional mulai dilengkapi dengan motor (motor tempel dan motor dalam) di awal tahun 1970-an.

Teknologi penangkapan ikan di Indonesia (lihat P.N.van Kampen, 1909) secara garis besar dikategorikan kedalam:

- (1) Net (di Sulawesi Selatan: *panjak, gae, lanra, panambe*)
- (2) Pancing (di Sulawesi Selatan: *p.labuh, p.rintak, p.tonda, p.kedo-ke*)
- (3) Perangkap (di Sulawesi Selatan: *Bubu, sero/belle*)
- (4) Alat tusuk (di Sulawesi Selatan: *tombak, pattek, ladung*)
- (5) teknik lainnya (di berbagai tempat: *bahan peledak, bius*)
- (6) Alat selam: tabung, kompresor (tidak tercantum dalam P.N.van Kampen)
- (7) Linggis, parang, menangkap/memungut dengan tangan (tidak tercantum dalam karangan P.N.van Kampen)

Nelayan Jawa dan Madura cukup kaya dengan alat tangkap pukat. Pajang saja mempunyai jenis (*p.besar, p.peperék, p.krakat, p.arad, p.kopek, p.dedang, p.bhanton*). Sebagian besar dari jenis-jenis pukat tersebut masih digunakan sebagian besar nelayan Jawa dan Madura hingga sekarang ini.

4. Tradisi dan Dinamika Budaya Bahari dalam Konteks Eksternal dan Modern

Eksistensi budaya bahari baik dalam bentuk tradisional maupun dinamikanya hanya bisa dipahami dalam konteks eksternalnya. Seperti halnya perilaku penyelaman teripang oleh nelayan-nelayan Bugis, Bajo, dan Makassar dari Sulawesi Selatan tidak cukup hanya difahami dalam konteks sosial budaya lokal, tetapi juga dalam konteks eksternal, karena kenyataan lapangan memang menunjukkan fenomenanya demikian. Pengetahuan dan praktek menyelam mencari tripang bagi mereka bukanlah fenomena baru, melainkan fenomena lama yang bisa dilacak ke beberapa dekade bahkan beberapa abad ke belakang (*backward in time*) dan melacak jaringan perdagangannya ke luar (*outward in space*) hingga melampaui batas-batas negara ke pasar ekspor seperti Singapura, Hongkong, Taiwan, RRC, Korea dan Jepang. Pada mulanya nelayan tidak banyak tahu dan memperhatikan spesies tripang karena tidak bernilai. Biota ini mulai dicari ketika kapal-kapal dagang Cina yang ramai berlabuh di Pelabuhan Kota Somba Opu (pusat kota Kerajaan Makassar yang jaya hingga abad ke-17) di abad ke-17 mencari komoditi ekspor, termasuk hasil-hasil laut seperti tripang, agar-agar, sirip hiu, sarang burung walet, penyu, dan lain-lain, yang biasa ditukar langsung dengan barang-barang rongsokan: pakaian, tembikar, porselin, lilin, dan lain-lain (lihat antara lain Macknight, 1976; Sutherland. 1987). Meskipun digunakan nama-nama lokal terhadap spesies-spesies ini, namun kondisi permintaan pasarlah yang banyak menyumbang kepada pengkayaan hingga mencapai tidak kurang dari 40 jenis tripang. Demikian juga pedagang Cina-lah mengajarkan sorting menurut tingkatan nilai tukar dari yang paling tinggi hingga yang rendah. Pengenalan nelayan pada perilaku dan habitat tripang, pengaktifan fungsi sarana tangkap tradisional dalam situasi modern, terbentuknya varisi baru dalam struktur kelompok kerja nelayan, hubungan-hubungan produksi (ke dalam dan ke luar) dan distribusi (termasuk aturan bagi hasil), semua ini merupakan kontribusi awal dari hubungan dengan dunia luar, dengan pedagang Cina. Pedagang asing tersebut sebetulnya digerakkan oleh fungsi tripang yang konon bagi orang Cina di samping sebagai santapan enak, juga sebagai bahan obat-

obatan untuk kesehatan, nutrisi, vitalitas, memperpanjang umur, dan menambah keperkasaan laki-laki (Akimichi, 1996).

Meningkatnya jumlah konsumen, pedagang dalam negeri dan dari negara tetangga terlibat dalam jaringan pasar komoditi tersebut mendorong adopsi inovasi perangkat alat selam berupa tangki/tabung gas digunakan oleh penyelam dari Pulau Sembilan sejak awal periode 1980-an, yang ditingkatkan lagi di awal periode 1990-an dengan mengganti tangki/tabung gas dengan kompresor. Pada mulanya pengusaha Cina dari Makassar membawa langsung pelatih selam yang kemudian merekrut dua atau tiga pembantu lokal yang lebih dahulu trampil menggunakan perangkat alat selam modern tersebut. Seiring dengan proses adopsi sarana selam modern adalah modernisasi perahu-perahu nelayan dengan pemasangan motor tempel (outboard motor), kemudian dilakukan peningkatan kapasitas muat perahu dengan peningkatan kekuatan mesin dipasang pada bagian dalam bodi perahu (inboard motor). Adopsi inovasi teknologi dan peningkatan kapasitas muat perahu yang berarti peningkatan skala investasi usaha berkonsekuensi pada terjadinya proses penetrasi kapitalisme, transformasi struktural kelompok ponggawa-sawi, dan merosotnya secara drastis populasi tripang dari berbagai spesies dan kerang (mutiara, lola) yang diambil dari kawasan taka-taka Pulau Sembilan. Demikianlah kedua faktor situasi pasar yang tetap membaik dan kondisi terkurasnya sumberdaya laut setempat pada akhirnya mendorong kelompok-kelompok penyelam dari Kambuno dan Kodingare terpaksa melakukan ekspansi area penangkapan (fishing grounds) ke tempat-tempat lainnya di Sulawesi Selatan dan berbagai provinsi lainnya terutama di kawasan Timur Indonesia, bahkan mengunjungi Australia di akhir tahun 1980-an hingga paruh pertama tahun 1990-an. Ketika komoditi lobster dan ikan hidup laku di pasar ekspor (Hongkong dan Singapura), sebagian terbesar nelayan penyelam kembali lagi ke Pulau Sembilan dan beralih ke usaha lobster dan ikan hidup. Dan mulailah sejarah budaya tentang lobster dan ikan hidup (kerapu, sunu, napoleon). Bagaimana kedua komoditi yang pada mulanya melimpah di taka-taka Pulau Sembilan — karena tidak mempunyai nilai tukar dan hanya sedikit dimakan karena oleh sebagian besar penduduk pulau merasakan itu menjijikkan atau mengganggu menyebabkan kebiasaan malas jika dimakan — pada akhirnya

hanya memerlukan sekitar tujuh tahun saja populasi spesies-spesies ini merosot drastis karena sebagian terbesar nelayan setempat dan pendatang menangkapnya. Meningkatnya permintaan lobster dan ikan hidup di pasar ekspor sebenarnya disebabkan oleh faktor terjadinya perubahan pola makan kelas konsumen elit di negara-negara pengimpor dari mengonsumsi hasil laut dalam kondisi segar yang sudah dihidangkan di meja restoran sea-food ke model baru di mana para pengunjung terlebih dahulu memancing ikan atau lobster hidup dari kolam-kolam penampungan lalu diolah dan disajikan para pelayan menurut selera pengunjung masing-masing. Pola makan baru di restoran-restoran Cina seperti ini di samping terkait pada nilai kenikmatan santapan, juga karena ini dapat memperkuat status sosial konsumennya (Akamichi, 1996).

Konteks birokrasi melalui pelaksanaan kebijakan pemerintah juga menyumbang kepada perubahan-perubahan keputusan dan perilaku nelayan melalui respons-respons ide dan sikap-sikap (menerima atau menolak). Motorisasi perahu dan adopsi gae (istilah Bugis) atau rengge (istilah Makassar) – sejenis pukat apung raksasa (purse seine) yang merupakan teknik tangkap andalan untuk ikan pelagik (terutama layang) di Sulawesi Selatan — sebetulnya diperkenalkan oleh dan melalui jalur promosi pemerintah di tahun 1970-an. Sebaliknya terbentuknya berbagai strategi/taktik sebagian nelayan untuk mempertahankan aktivitas ilegalnya seperti membom dan membius atau berhentinya sebagian di antara mereka dari aktivitas ilegal tersebut dipengaruhi oleh aturan hukum (antara lain: Peraturan Pemerintah Daerah TK.I Sulawesi Selatan No.7 1987, tentang larangan pengambilan dan pengrusakan terumbu karang di sepanjang perairan pantai Sulawesi Selatan) dan cara-cara pengawasan oleh para penegak hukum di setiap wilayah tugasnya masing-masing. Eksploitasi berbagai spesies laut untuk komoditi ekspor seperti tripang, kerang (mutiara, loa), rumput laut, sirip hiu, telur ikan, ikan (segar dan hidup), lobster (segar dan hidup) dimungkinkan oleh kerjasama dagang antar negara dengan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), terkecuali bagi usaha-usaha nelayan kecil (antara lain dalam Amandemen Peraturan Dirjen Perikanan No.HK.330/DJ.8259/95, tentang skala, lokasi, dan prosedur menangkap (*napoleon wrasse*). Ikut berpengaruh pada berhentinya sebagian besar

nelayan mengambil batu karang, menangkap ikan napoleon (untuk ukuran tertentu), penyu, kima, kerang mata tujuh, batu laga, ikan hias) di kawasan lindung seperti Pulau Kapoposang (Pagkep) dan taman nasional Taka Bonerate ialah usaha-usaha penyadaran lingkungan dilakukan oleh LP3M dan WWF dengan penyebaran poster-poster jenis-jenis biota laut langka dilindungi dunia. Kembalinya semua perahu nelayan cantram Galesong Utara (takalar) akhir-akhir ini (akhir Desember 2002) dari Sinjai disebabkan oleh penolakan masyarakat nelayan setempat (didukung oleh pemerintah daerah setempat) terhadap penggunaan teknik (menyerupai pukat harimau mini) yang bisa dengan cepat menguras berbagai jenis biota laut dan merusak kondisi dasar.

Berbagai kebijakan pemerintah (tentang pelarangan atau pembangunan), isi dan formulasinya banyak mengacu kepada rekomendasi peneliti dari lembaga perguruan tinggi berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Demikian juga berbagai praktek ekonomi nelayan baru seperti budidaya rumput laut, keramba penampungan ikan dan lobster hidup, budidaya teknik keramba, penetasan telur dan pembesaran bibit bandeng dan udang di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan merupakan bagian dari studi/praktek lapang atau pengabdian masyarakat dilakukan oleh peneliti atau praktisi dari lembaga perguruan tinggi. Oleh karena itu perguruan tinggi sebagai penggagas ide dan inovator teknologi merupakan konteks eksternal bagi proses dinamika sosial budaya masyarakat bahari khususnya komuniti-komuniti nelayan.

Penjelasan prilaku dan proses dinamika sosial budaya komuniti-komuniti nelayan juga sedikit banyak dikontekskan pada kehadiran berbagai Ornop di sana. Periode 1990-an merupakan periode mulainya keterlibatan secara meluas berbagai Ornop di desa-desa nelayan pantai dan pulau-pulau di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Ornop dengan paradigma keberpihakan kepada kepentingan rakyat mengemban visi dan misi pokok pada peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, peningkatan sumberdaya manusia dan ketrampilan penduduk, penumbuhan jiwa demokrasi, kelestarian sosial budaya dan lingkungan fisik, biasanya meramu wawasannya dari masyarakat lokal, lembaga perguruan

tinggi, dan wawasan global terutama melalui wacana berkembang dalam dunia Ornop sendiri. Di Kawasan Taka Bonerate misalnya, WWF dan LP3M mencoba menggalang sebaigian masyarakat nelayan di beberapa desa pulau untuk terlibat dalam berbagai program kegiatan meliputi penyadaran lingkungan, pembentukan kelembagaan, pelatihan ketrampilan, pembentukan dan pengelolaan zona-zona perlindungan terumbu karang dan biota-biota langka berasosiasi karang. Hal mana juga dilakukan dikawasan-kawasan karang lainnya seperti Biak dan Maluku dengan keterlibatan LSM lokal, nasional dan internasional (WWF) (lihat Osseweijer, 2001). Sebetulnya lembagasasi di Maluku muncul sebagai mekanisme masyarakat lokal merespons pasar global sejak ratusan tahun silam (Zerner, 1994), demikian juga munculnya ponggawa-sawi di Sulawesi Selatan sebagai respon pelaut atau nelayan terhadap permintaan pasar global akan hasil-hasil laut komoditi ekspor sejak abad ke-13 atau 14 silam.

Hingga seberapa jauhkah ke belakang dan ke luar benang-benang pengaruh konsteksual perlu dilacak? Ternyata ada juga konteks historik dari prilaku eksploitasi sumberdaya laut yang perlu dilacak jauh ke belakang, namun konteks eksternalnya tidak melintasi batas-batas fisik dan sosial budaya jauh ke luar. Ini dicontohkan pada praktek pemancing ikan-ikan campuran, pengguna bubu, pemukat, pengelola bagang dan rumpun, dan sebagainya yang sudah berlangsung cukup lama, namun asal mula dan proses kemunculannya hanya melintasi batas-batas daerah, pulau, etnis dan provinsi berdekatan. Demikian halnya jaringan pemasarannya hanya mencapai pasar dan konsumen regional, antar pulau, bahkan lokal saja. Bahkan gagasan dan praktek penambang batu karang dan pasir ditaka-taka oleh penduduk pulau-pulau di kawasan karang yang sudah berlangsung puluhan atau ratusan tahun lalu, namun kepentingannya semata untuk pembangunan pemukiman penduduk lokal, jadi konteks penjelasannya internal.

Aturan penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya laut secara terbuka (*common property right/open use*) juga menyebabkan suatu lokasi dieksploitasi secara bersama-sama. Misalnya kawasan taka Pulau Sembilan bukan hanya dieksploitasi oleh penduduk nelayan setempat, tetapi juga oleh kelompok-kelompok nelayan desa-desa pantai Teluk Bone

(Sinjai, Bone, Luwu, Bulukumba Timur), nelayan pulau-pulau dari Kodya Makassar, Pangkep, Takalar, penyelam tripang dan mutiara dari Selayar, pencari karang mata tujuh dari Buton (Sultra) dan Palu di tahun 1990-an, nelayan ikan hias dan pemburu penyu dari Bali di tahun 1990-an, dan penyelam tripang dari Madura sejak tahun 2000 hingga sekarang.

Meskipun telah terjadi modernisasi perikanan dan adanya pengaruh pasar globalisasi yang kuat, namun dalam budaya bahari kebanyakan komunitas nelayan masih ada banyak unsur-unsur pengetahuan, pandangan, kelembagaan dan teknologi eksploitasi bertahan dan difungsikan. Fenomena ini bisa ditunjukkan antara lain pada komunitas nelayan Liang-Liang (Pulau Sembilan) yang tetap mempertahankan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya kawasan karang secara tradisional dan arif. Secara kolektif mereka tetap mempertahankan lokasi-lokasi dan sarang-sarang ikan yang dimiliki sejak dahulu dan tetap menggunakan pancing labuh. Meskipun dikelilingi oleh kelompok-kelompok nelayan pengguna bahan peledak dan busur, para pengusaha dan agen eksportir dengan mana tangkapan ikan dan lobster hidup dan dijual, namun mereka tetap mempertahankan sistem-sistem tradisional.

5. Penutup: mengarahkan dinamika budaya bahari Indonesia

Meskipun dinamika budaya bahari komunitas-komunitas nelayan di Indonesia selama ini tidak atau masih sangat kurang mendapat pengarahan dari pemerintah, namun tampak di mana-mana suatu proses dinamika berlangsung cukup pesat. Tanpa memandang rendah beberapa kearifan lokal masih tersisa, antara lain seperti *sasi* (Maluku), *panglima laut* di Aceh, pengelolaan komunal tradisional di Kapuas Hulu (Kalimantan), teknik rumpon nelayan Mandar (Sulawesi Selatan), lembaga kerjasama pengelolaan modal *pongawa-sawi* (Sulawesi Selatan), ternyata bahwa proses dinamika, modernisasi dan globalisasi banyak membawa dampak-dampak negatif, berupa kemiskinan ekonomi sebagian terbesar penduduk nelayan tradisional skala kecil, konflik-konflik antar kelompok-kelompok nelayan, terkurasnya populasi sumberdaya laut, kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang. Hal ini adalah akibat dari suatu proses dinamika komunitas-komunitas nelayan yang kurang terarahkan secara bijak, mereka itu "*close to the stone*,

far from the throne” menurut Pujo Semedi (2000) atau untuk nelayan Bugis, Makassar dan Bajo, tepatnya “*dekat ke ponggawa/bos, jauh dari negara.*”

Apa yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak berkepentingan seperti pemerintah, kalangan akademisi, LSM, tokoh masyarakat, dan lembaga donor ialah menemukan arah-arrah pengelolaan pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan laut secara berkelanjutan, berwawasan lingkungan, untuk kesejahteraan bersama masyarakat. Tumbuhan pandangan dan kesadaran bahwa sumberdaya laut rentan terhadap ancaman perilaku-perilaku tertentu; jadi tanpa perlakuan bijak kondisi sumberdaya laut akan menjadi semakin berkurang/terbatas; manusia harus arif dan bertanggung jawab dalam perilaku pemanfaatan sumberdaya laut; mengubah pandangan budaya dan praktek akses terbuka/bebas ke penguatan hak-hak pemilikan. Menumbuhkan dan revitalisasi kelembagaan-kelembagaan tradisional yang menekankan moral pemerataan atau keadilan dalam kesempatan berusaha dan pembagian hasil, pembentukan institusi baru, penguatan atau revitalisasi sistem-sistem tradisional yang potensil berkaitan dengan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya dan jasa-jasa laut.

Dalam wujud teknologi perlu pengembangan teknologi perikanan tangkap ramah lingkungan, pengembangan teknologi budidaya dan semi budidaya, teknologi pascapanen, serta membangun institusi pasar lokal, regional, nasional dan global yang tidak semata dikendalikan kekuatan-kekuatan eksternal.

Karena budaya bahari adalah pragmatis, segala contoh nyata yang memberikan makna praktis bagi mereka niscaya akan dinilai tinggi dan diperebutkan.

Kepustakaan

Acciaioli, G.L.

- 1989 "Searching For Good Fortune: the Making of A Bugis Shore Community at Lake Lindu, central Sulawesi". *Disertasi*. Australian National University.
- 1998 "Bugis Entrepreneurialism and Resource Use: Structure and Practise". *Indonesian Jurnal of Social and Cultural Anthropology*. No.57, Th. XXII September-Desember 1998:81-91

Acheson, James, M.

- 1981 "Anthropology of Fishing". In Bernard J. Siegel, Alam R. Beals dan Stephen A. Tyler (eds). *Annual Review of Anthropology*. Vol.10 : 275-316, Palo Alto.

Akimichi, Tomoya

- 1991 Coastal Foragers in Transition. *Senri Ethnological Studies* No.42, National Museum of Ethnology.

Andersen, R. dan Cato Wadel

- 1982 North Atlantic Fishermen: Anthropological Essays on Modern Fishing. Newfoundland Social and Economic Research, Memorial University of Newfoundland.

Bernard, H.Russel

- 1994 Research Metods in Anthropology. London: Sage Publications.

Betke, F.

- 1985. "Modernization and Socio Economic Change in The Coastal Marine fisries of Java: Some Hypotheses". *Paper*. Sociology of Development Research. Centre University Bieleveld.

Borofsky, Robert

- 1994. *Assessing Cultural Anthropology* Mc Graw-Hill, Inc., New York.

1994. "Cultural in Motion". In Robert Borofsky (ed). Assessing Cultural Anthropology (Section five). Mc Graw-Hill, Inc., New York.
- 1994 "On The Knowledge and Knowing of Cultural Activities". In Robert Borofsky (ed). Assessing Cultural Anthropology (Section five). Mc Graw-Hill, Inc., New York.

Curtin, Philip D.

- 1984 Cros Cultural Trade in World History. Cambridge University Press, London, New York.

Bavinck, Marten

- 1984 Small Fry: The Economic of Petty Fishermen in Northern Sri Lanka. VU Uitgeverij/Free University Press. Amsterdam.

Firth, Raymond

- 1975 Malay Fishermen: Their Peasant Economy. W.W. Norton & Company Inc. New York.

“PLURALITAS KEPENDUDUKAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA”

Oleh: **Prof. Dr. Ny. Chalida Fachruddin**

1. Pendahuluan

Makalah ini mengungkapkan ihwal pluralitas kependudukan di provinsi Sumatera Utara yang membicarakan: Kesetaraan Gender dalam pemahaman berbagai etnik berdasarkan cerita rakyat yang terdapat di Sumatera Utara. Lalu dibicarakan religi yang menyangkut agama-agama yang dianut penduduk seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Kong Hu Cu dan berbagai aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa antara lain Parmalim, Pelbegu, dan lain-lain. Kemudian pembicaraan mengenai posisi industri budaya yang berpotensi dari sisi komoditas ekonomi, di samping perkembangan teknologi yang memberi dampak pada munculnya seni populer di berbagai kalangan masyarakat Sumatera Utara. Selanjutnya dibicarakan mengenai perpustakaan dan bahasa di Sumatera Utara dengan beragam bahasa lokal. Untuk itu pelestarian dan pengembangan bahasa etnik dilakukan melalui pembukuan dan perpustakaan.

2. Kesetaraan Gender dalam Cerita Rakyat di Sumatera Utara

Istilah gender di Indonesia begitu mencuat kepermukaan tetapi dalam pemahaman konsepnya telah terjadi kerancuan makanan dengan jenis kelamin (sex) (Fachruddin 2002). Yang mudah dilihat melalui ciri fisik primer dan secara sekunder yang ada pada laki-laki dan perempuan, tidak dapat dipertukarkan dan diubah dari masa ke masa.

Jenis kelamin (sex) adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis perbedaan ini merupakan kodrat, sifatnya permanen dan universal (Fakih 1996). Perbedaan ini berakibat pada pembedaan posisi perempuan dengan laki-laki mulai dari keluarga, meluas ke masyarakat dan akhirnya ke negara (Sumatau 2001). Perbedaan jenis kelamin pada gilirannya menjadi perbedaan peran dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang sedang populer dengan istilah “gender”.

1. Disampaikan pada Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi tanggal 19-23 Oktober 2003, Makalah ini merupakan rangkaian empat (4) makalah dalam kegiatan Dialog Kebudayaan Daerah Sumatera Utara 2003, Rabu 8 Oktober 2003 di Medan. Dengan nara sumber dan judul sebagai berikut.
2. Prof. Br. Ny. Chlida Fachruddin, : Kesetaraan Gender dalam Perspektif Budaya.
3. Drs. Agustruno : Keagamaan dan Kepercayaan Masyarakat Sumatera Utara.
4. Drs. Ben Pasaribu, MMA : Seni Populer dan Industri Budaya.
5. Prof. H. Ahmad Samin Siregar : Perbukuan dan Bahasa di Sumatera Utara

Dalam hal ini gender dipahami sebagai perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang sebenarnya hasil bentukan masyarakat (*socially constructed*) sebagai ciri biologis atau sebuah kodrat Tuhan. Pembentukan ini terjadi oleh proses enkulturisasi (pembudayaan) dan sosialisasi yang berlangsung dalam suatu setting sosial sejak seseorang dilahirkan hingga dewasa. Kebudayaan suatu masyarakat yang memberi bingkai kepada pemahaman perbedaan peran berdasarkan jenis kelamin tersebut (Lubis 2003) Haryoso (1977) juga mengatakan bahwa faktor sex telah menjadi arcibed status yang universal. Dalam hampir setiap masyarakat faktor sex ini membawa konsekuensi dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan dan dalam sistem pembagian kerja artinya setiap masyarakat menetapkan peraturan-peraturan, kode-kode yang merupakan pedoman bagi tingkah laku perempuan dan laki-laki misalnya perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga sedang laki-laki dianggap tidak pantas. Menjadi pemimpin masyarakat seperti dalam adat, kepala desa dan lebih pantas oleh laki-laki dan sebagainya. Gender untuk mengacu pada beban sosial dikotomi antar peran laki-laki dan elemen-elemen kepribadian maskulin (kelelakian) dan feminin (keperempuan) Vitalaya 1990).

Fenomena ini melahirkan ketidakadilan terhadap perempuan dalam bentuk peminggiran (marjinalisasi) penomor duaan (subordinasi) perlabelan negatif (stereotype) beban ganda (double burden) dan tindak kekerasan fisik maupun non fisik (Fakih, 1998).

Istilah gander yang dipopulerkan sejak 10 tahun yang lalu di Indonesia diartikan sebagai "Jenis Kelamin" padahal gender merupakan suatu tuntutan untuk menyuarakan pentingnya

eksistensi perempuan dalam negara atau masyarakat sipil, baik perorangan atau golongan dengan secara sekuler atau agama, konservatif atau radikal (Subhan 2002) Perbedaan perempuan dan laki-laki oleh pemahaman yang keliru tentang gender dan konsep sex mengakibatkan ketidakadilan berlaku dalam masyarakat. Keadilan gender (gender equity) adalah perlakuan adilnya yang diberikan baik untuk perempuan maupun laki-laki atau kondisi adil bagi perempuan dan laki-laki untuk mengaktualisasikan dan mendedikasikan diri bagi pembangunan bangsa dan negara. Keadilan gender ini berlaku atau berkaitan dengan adanya kesetaraan gender (gender equity) yaitu kesamaan peluang dan kesempatan dalam bidang sosial, politik ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian setiap warga negara dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Tentunya kondisi ini amat penting mengingat perempuan dan laki-laki merupakan unsur dalam pluralitas kependudukan di Indonesia khususnya di Sumatera Utara.

Seperti dikatakan di atas bahwa kesalahpahaman konsep jenis kelamin dan gender dimunculkan dan dilestarikan oleh kebudayaan. Untuk itu dalam makalah ini penulis melihat dari subunsur kebudayaan yaitu kesenian. Subunsur kesenian itu pula adalah seni sastra dalam hal ini akan diperbandingkan/ kesetaraan gender faktor/cerita rakyat. Faktor merupakan bagian kebudayaan dari berbagai kolektif di dunia yang disebarluaskan secara turun menurun di antara kolektif bersangkutan antara lain bentuk lisan (Danandjaya 1994) Nilai-nilai yang terjalin dalam kesenian rakyat itu merupakan refleksi dari cara-cara hidup sehari-hari atau bersumber kepada mitos, legenda dan lain-lain (Harsoyo 1977).

Dari delapan etnik yang tersebar diberbagai kawasan dalam Provinsi Sumatera Utara hanya etnik melayu yang tidak menganut prinsip patrilineal, yang jelas mengutamakan peran laki-laki. Begitu juga etnik melayu dalam kehidupan sosialnya juga patriarkhi.

Namun dalam kajian beberapa cerita rakyat penulis menemukan kesetaraan gender misalnya dari 30 cerita rakyat melayu yang diteliti oleh Maini Trisna Jayanti dkk (1997) terdapat 10 judul dengan nama perempuan yaitu cerita Bunga Melur dan Tuntung Kapur, Putri Pucuk Kecubung, Putri Burung, Putri Buluh,

Putri Merak Jingga, Selendang Delima, Si Minah Anak Yatim, Sri Dayang, Si Putih Cermi, Tuan Putri Kelumpang. Dari etnik Karo amat populer cerita Putri Hijau, Beru Genting Pase, Siberu Rengga Kuning, Silalahi Sabungan dan Sibaru Batang Hari, Siberu Sanduduk, Najombalik dari Batak Toba. Cerita si Bur Tumbaga dan etnik pesisir. Kemudian dari Mandailing Batu Marhosing, cerita seorang Raja (saudagar muda) Si Raja Omas, terjadinya Tinggi Raja. Sedangkan dari etnik Pakpak penulis mengambil, cerita asal mula Sidikalang salah satu kota di Kabupaten Dairi.

Dalam semua cerita rakyat dari beberapa etnik itu penulis menemukan bahwa perempuan yang menjadi pokok cerita pada umumnya cantik wajahnya, cantik hatinya dan prilakunya serta cekatan. Dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya perempuan berjuang untuk keluarga dan masyarakatnya, berkepribadian yang tangguh mandiri dan sanggup mengambil keputusan, sekalipun harus ditebus dengan nyawanya. Seperti halnya Putri Hijau memilih menghilang (dihilangkan) ke laut dalam daripada menjadi istri orang yang menang perang karena tipu daya. Cerita Burung Kuau yang menceritakan putri kuau yang pulang ke kayangan meninggalkan suaminya yang tidak mau mendengar kata-katanya dan memaksa kehendaknya. Batu Marhosing menceritakan seorang perempuan bernama Rosma Sari akhirnya memilih menjadi batu karena laki-laki yang diharapkannya (Pardamean) membohonginya. Sedangkan cerita Boru Giting Pase menceritakan bagaimana Boru Giting Pase berusaha membangkitkan batang terendam, menjadi pembela keluarganya dengan mengembalikan/ merebut harta orang tuanya dari tangan pakciknya yang menipu keluarganya. Begitu juga cerita Najubu Ilik dari Batak Toba merupakan orang yang teguh pendirian. Segala sesuatu yang akan diperbuat dipersiapkan dengan matang. Cerita Si Boru Tumbaga dan Sorkam dengan segala penderitaan berjuang untuk menjalin silaturahmi kembali dengan kerabat ayahnya.

Dari kajian cerita rakyat tersebut jelas bahwa perempuan dalam kebudayaan daerah Sumatera Utara berada pada posisi yang menonjol karena perempuan merupakan bagian kehidupan manusia dan masyarakat. Dengan cerita-cerita tersebut diperlihatkan sebenarnya kesetaraan gender pernah ada dan diakui sebagaimana yang diungkapkan oleh Baried (1984) bahwa



perempuan selalu muncul dalam karya sastra yang dihasilkan dari masa lampau dan menampilkan secara wajar sebagai makhluk hidup lainnya di segala ruang dan waktu. Hanya oleh perkembangan kebudayaan yang dipertegas dan dibakukan melalui faktor struktural (ekonomi, politik, lingkungan dan sebagainya). Menjadi kondisi seperti sekarang. Untuk mengembalikan keadilan gender yang berlanjut kepada kesetaraan gender harus dimulai dari gerakan kebudayaan. Artinya proses mereduksi ketidakadilan gender harus diawali dan dimaknakan dan menafsirkan tentang keadilan gender tadi. Tentunya sosialisasi antara lain melalui cerita rakyat seperti diatas, tidak hanya dari etnik yang di sekitar kita juga dari daerah lain bahkan dari negara/bangsa lain.

WARISAN BUDAYA UNTUK SEMUA ARAH KEBIJAKAN PENGELOLA WARISAN BUDAYA INDONESIA DI MASA MENDATANG

Oleh : **Daud A. Tanudirjo**
Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

1. Kilas Balik Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia

Kesadaran akan pentingnya pengelolaan dan pelestarian warisan budaya kini sudah semakin tinggi. Bahkan, banyak di antara pencinta dan pemerhati warisan budaya yang berkeyakinan bahwa sumber daya budaya itu tidak saja merupakan warisan, tetapi lebih-lebih adalah pusaka bagi bangsa Indonesia. Artinya, sumber daya budaya itu mempunyai kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu dan melindungi bangsa ini dalam menapaki jalan ke masa depan. Sebagai pusaka, warisan budaya itu harus tetap di jaga agar kekuatannya tidak hilang dan dapat diwariskan kepada generasi penerus tanpa berkurang nilainya (JPPI, 2003) Namun, kalau kita lebih teliti menelusuri perkembangan pengelolaan warisan budaya di Indonesia, akan jelaslah bahwa minat terhadap warisan budaya di Indonesia dan upaya pelestariannya muncul dan berkembang dalam alam lingkungan kolonial, terutama atas usaha komunitas Eropa pencinta barang seni dan benda unik-antik. Acapkali **G.E. Rumphius**, seorang ahli ilmu alam yang banyak berkarya di Maluku, disebut-sebut sebagai salah satu ilmuwan yang memicu minat terhadap warisan budaya di Indonesia. Pada tahun 1705, sarjana ini menerbitkan buku berjudul **D'Amboinsche Rariteitkamer** yang beberapa bagiannya menguraikan tentang temuan kuno seperti kapak batu, kapak perunggu, dan nekara (sejenis genderang) perunggu serta mitos-mitos yang ada di balik benda-benda itu. Sejak itu, banyak peminat benda-benda unik-antik mulai melakukan penelitian dan mengkoleksiinggalan-tinggalan masa lampau, termasuk batu-batu candi dan benda-benda dari masa prasejarah. Bahkan, pada tahun 1778 berdirilah organisasi peminat dan peneliti benda seni dan antik yang diberi nama **Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en**

Wetenschappen. Badan ini sempat mendirikan museum yang kini menjadi Museum Nasional di Jakarta (Suleiman dkk., 1976: Tanudirjo, 1995).

Ketika Sir Thomas S. Raffles berkuasa di Indonesia (awal abad ke-19), penelitian terhadap warisan budaya Indonesia meningkat. Sebagian hasilnya diuraikan dalam buku **The History of Java**. Setelah Belanda berkuasa kembali di Indonesia, benda warisan budaya Indonesia dianggap akan dapat meningkatkan citra mereka di luar negeri. Karena itu, mereka membentuk komisi khusus yang menangani warisan budaya di Indonesia pada tahun 1822. Dapat dikatakan bahwa, pada saat itulah upaya pengelolaan warisan budaya untuk pertama kalinya menjadi urusan lembaga pemerintahan, meskipun kerja komisi itu sebenarnya tidak cukup efektif. Dengan alasan itu pula, pada tahun 1885, pemerintah Belanda ikut membidani lahirnya perkumpulan peminatinggalan sejarah dan purbakala amatir di Yogyakarta. Salah satu warisan lembaga ini adalah Museum Sono Budoyo di dekat Kraton Yogyakarta.

Tahun 1900, benda-benda warisan budaya Indonesia dipamerkan dalam Pameran Kolonial Internasional di Paris dan mendapat perhatian yang luar biasa dari khalayak Eropa. Sukses ini mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk menggiatkan lagi komisi yang dulu. J.L.A. Brandes ditunjuk untuk menjadi Ketua Lembaga yang dimanai **Commisie in Nederlandsche-Indie voor Oudheidkundige Orderzoek op Java en Madoera**. Komisi ini bekerja efektif cuma hingga tahun 1905 dan kinerjanya merosot setelah ditinggal Brandes yang wafat tahun itu juga. Penggantinya, N.J. Krom, baru ditunjuk pada tahun 1910. Krom menganggap pengelolaan warisan budaya di Indonesia tidak mungkin hanya ditangani oleh sebuah komisi, karena begitu banyaknya jumlah dan ragam warisan budaya yang ada. Karena itu, Krom lalu mengusulkan agar “Komisi” tadi ditingkatkan menjadi “Jawatan” atau “Dinas” dengan diperkuat oleh para peneliti arkeologi dan sejarah yang handal.

Atas desakan Krom, pada tanggal 14 Juni 1913 pemerintah Belanda mendirikan Oudheidkundige Dienst in Nederlandsche-Indie (Jawatan atau Dinas Purbakala di Nederland-Indie). Sejak saat itu, semua urusan yang berkaitan dengan warisan budaya di negara ini, termasuk upaya untuk mengumpulkan, mendaftar, meneliti, serta melestarikan dan memanfaatkannya menjadi

urusan negara. Di lingkungan arkeologi, pelebmbagaan urusan warisan budaya (benda-benda arkeologi) seperti itu disebut sebagai “*archaeology in the service of the state*” atau “Arkeologi pengabdian negara” (Kohl dan Fawcett, 1995). Peran negara menjadi semakin kuat dengan diteyapkannya **Monumenten Ordonnantie No. 19 tahun 1931 Staatblad 238** (diperbaiki tahun 1934). Ketentuan dalam ordonansi itu menyiratkan begitu besar penguasaan negara atas warisan budaya. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya MO 1931 merupakan upaya pemerintah kolonial Belanda untuk menjamin akses mereka terhadap warisan budaya milik bangsa Indonesia. Dengan begitu, para peneliti dan peminat benda cagar budaya yang mayoritas orang Eropa dapat lebih leluasa melakukan eksplorasi sumber daya budaya itu.

Setelah negara Indonesia merdeka, pengelolaan warisan budaya dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Namun, kebijakan pengelolaan tidak mengalami perubahan berarti. **Monumenten Ordonnantie 1931** tetap menjadi landasannya. Warisan budaya makin ketat menjadi urusan negara, karena itulah semua peneliti dan pejabat pengelolanya pun adalah pegawai negeri. Pada umumnya, mereka memaknai warisan budaya secara “formal” sebagaimana disebut dalam MO 1931 yang telah menekankan pada nilai penting dari segi keilmuan. Padahal, masyarakat tentu memiliki pemaknaannya sendiri yang lebih beragam dan umumnya bersifat praktis. Akibatnya, upaya pengelolaan warisan budaya di Indonesia seringkali diwarnai dengan konflik kepentingan antara masyarakat dan pemerintah (a.l. Tanudirjo; 1998)

Ketika undang-undang baru tentang benda cagar budaya pengganti MO 1931 dirancang pada awal 1990-an, cara pandang yang lama itu tanpa disadari masih tetap dipakai. Tidak mengherankan, Undang-Undang no. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (UU BCB) yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan MO 1931. Peranan negara dalam pengelolaan warisan budaya tetap dominan dan cenderung menjadi bagian dari birokrasi pemerintah. Sementara itu, hak dan peran partisipatif masyarakat luas belum dapat diwadahi dengan selayaknya. Sejauh ini, penelitian di situs-situs purbakala hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah, sebagaimana juga terjadi di bidang pemugaran dan pelestarian. Hingga kini pun,

masyarakat merasa pemanfaatan warisan budaya hampir selalu ditentukan pemerintah dan jarang memperhatikan aspirasi masyarakat. Karena itu, sikap masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan warisan budaya menjadi skeptis atau bahkan apatis, barangkali karena pendekatannya cenderung satu arah “dari atas ke bawah” (*trickle down*). Bahkan, di berbagai tempat hal itu juga menimbulkan konflik. Kasus penolakan masyarakat Bali terhadap upaya memasukkan Pura Besakih ke dalam Daftar Warisan Budaya Dunia bisa menjadi salah satu contoh. Kasus lain yang mencuat beberapa saat lalu adalah rencana pembuatan Jagat Jawa di sekitar Borobudur dan pembuatan gardu pandang di Situs Sangiran.

Cara-cara pengelolaan warisan budaya sebagaimana disebut di atas dapat dipasukan tidak akan dapat diterapkan lagi di masa mendatang. Jika pun dipaksakan hanya akan menimbulkan lebih banyak konflik daripada keberhasilan dalam pelestariaanya. Karena itu, diperlukan suatu arah kebijakan baru dalam pengelolaan warisan budaya, diperlukan adanya penataan kembali peran pemerintah (baca lebih lengkap dalam Tanudirjo, 2000) dalam pengelolaan sumber daya budaya ini. Reposisi itu menjadi suatu keharusan karena situasi dunia yang telah berubah begitu cepat dalam beberapa dasawarsa terakhir ini.

2. Situasi yang telah berubah

Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, situasi dunia mengalami perubahan yang sangat cepat. Revolusi dalam bidang teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi telah mengakibatkan terjadinya proses yang kini populer dengan nama globalisasi. Kini, dunia bagaikan kampung besar, *the global village*, penghuninya bak tetangga ala kampung yang setiap saat bisa saling mendengar, melihat, dan berbincang-bincang. Namun, proses globalisasi penuh dengan kontradiksi. Di situ sisi mengakibatkan penyeragaman atau homogenisasi, tetapi pada saat yang sama juga menyebabkan peragaman (heterogenisasi, dan pluralisme baca : Friedman, 1994; Martin and Schumann, 1996).

Fenomena seperti di atas ternyata juga berimbas kepada cara pandang terhadap warisan budaya. Banyak pihak menyatakan bahwa warisan budaya di mana pun berada adalah

warisan budaya seluruh umat manusia. Ahli konservasi David Lowenthal (1981) menulis *"the past belongs to everyone; the need to return home, to recall the view, to refresh a memory, to retrace a heritage, is universal and essential"*. Seorang Direktur Jenderal UNESCO pernah pula menyatakan, *"....., manking is finding out that it has a shared past, and the history of each country belongs to everyone"* (dalam Little, 2002). Namun, di sisi lain, tidak semua masa lalu dan warisan budaya selalu harus dimaknai sama oleh setiap orang. Sebaliknya, pluralisme yang muncul dalam era global ini justru menimbulkan tuntutan agar setiap orang atau pihak boleh memaknai warisan budaya menurut apa yang digagasnya.

Barangkali memang benar apa yang dikemukakan beberapa pakar arkeologi (a.l. Hodder, 1991; Layton, 1989; Cleere, 1990; Little, 2002) bahwa warisan budaya tidak hanya memiliki publik yang tunggal tetapi jamak. Masing-masing pihak merasa punya kepentingan dan ingin mengambil manfaat dari warisan budaya. Hal ini tentu saja wajar karena warisan budaya memang dapat memiliki nilai penting yang berbeda bagi setiap pihak. Ada yang menilai pentingnya suatu warisan budaya dari segi ilmu pengetahuan (untuk pengajian dan pengujian akademik), etnik (jatidiri dan latar kehidupan suatu bangsa tertentu), estetik (bukti hasil seni yang adiluhung), ataupun publik (kepentingan masyarakat secara umum) termasuk untuk pendidikan masyarakat, daya tarik wisata, serta keuntungan ekonomis (Schiffer dan Gumerman, 1977). Perbedaan kepentingan ini jelas berpotensi menjadi sumber pertentangan atau konflik.

Di samping itu, harus diperhatikan bahwa arti penting setiap warisan budaya juga berjenjang. Walaupun pada dasarnya warisan budaya di suatu tempat adalah warisan budaya semua orang, dalam kenyataannya pemaknaan setiap warisan budaya tidak sama pada tingkat lokal, nasional, regional, ataupun internasional. Ada warisan budaya yang hanya bermakna pada tataran masyarakat yang tinggal di desa, kabupaten, atau provinsi, tetapi tidak dianggap cukup bernilai bagi masyarakat di luar itu, sehingga warisan budaya itu dianggap hanya bernilai **lokal**. Ada pula warisan budaya yang arti pentingnya diakui oleh seluruh masyarakat atau bangsa di suatu negara sehingga dapat dinilai berada pada tataran **nasional**. Suatu warisan budaya dianggap berada pada tataran regional jika arti pentingnya diakui

oleh masyarakat di beberapa negara sebagai bukti adanya keterkaitan budaya tertentu di antara mereka (misalnya saja ASEAN, Uni Eropa, negara-negara OKI). Apabila seluruh dunia mengakui nilai penting sumberdaya budaya itu, sehingga dapat dicatat dalam World Heritage List, maka warisan budaya itu dapat dikategorikan mempunyai nilai penting secara **internasional**. Upaya menentukan peringkat ini pun tidak jarang menimbulkan konflik, seperti yang terjadi pada kasus Pura Besakih.

Selain itu, maraknya euforia otonomi daerah telah menambah daftar panjang kasus konflik dalam pengelolaan warisan budaya. Setiap daerah merasa memiliki hak terhadap warisan budaya tertentu melebihi hak daerah lain ataupun pemerintah pusat. Karena itu, tidak jarang pemerintah daerah menerapkan kebijakannya sendiri yang seringkali justru makin memperuncing konflik dan malah mengikis nilai nilai warisan budaya sebagai pusaka bangsa.

Konflik kepentingan dan pluralisme yang berkembang dalam masyarakat juga menimbulkan wacana baru dalam visi pelestarian. Selama ini, harus diakui kebijakan pelestarian terkesan selalu diarahkan pada upaya 'tidak mengubah' atau 'mengembalikan kekeadaannya semula' suatu warisan budaya. Kebijakan seperti itu dirasakan terlalu kaku, cenderung picik, dan kurang dapat mewadahi upaya pemanfaatannya. Seolah-olah pelestarian adalah untuk pelestarian itu sendiri. Namun, kini kebijakan seperti itu sering dipermasalahkan dan di berbagai tempat sudah mulai ditinggalkan. Memang disadari sepenuhnya bahwa warisan budaya adalah sumberdaya budaya yang tak-terbaharui (non-renewable), terbatas (finite), dan khas (contextual). Karena itu, segala upaya untuk mempertahankan nilainya harus selalu diusahakan. Namun, disadari pula bahwa upaya mempertahankan nilainya itu tidak selalu berarti 'sekedar mengabadikan keadaan semula', tanpa mau tahu berarti atau tidaknya upaya pelestarian itu bagi masyarakat. Sebaliknya, pelestarian justru harus dilihat sebagai suatu upaya untuk mengaktualkan kembali warisan budaya dalam konteks sistem yang ada sekarang. Tentu saja, pelestarian harus dapat mengakomodasi kemungkinan perubahan, karena pelestarian harus diartikan sebagai upaya untuk memberikan makna baru bagi warisan budaya itu sendiri (Tanudirjo, 1996).

Kerangka pikir ini barangkali dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep transfirmasi yang dikemukakan oleh M.B. Schiffer (1976;1985;lihat skema di bawah). Bagi sarjana ini, ada dua konteks utama yang dapat menjelaskan keberadaan sumberdaya budaya, yaitu konteks sistem dan konteks arkeologi. Konteks sistem adalah lingkungan budaya yang masih berlangsung. Dalam konteks ini, sumberdaya budaya masih berperan aktif dan dipergunakan oleh masyarakat. Konteks arkeologis adalah lingkungan tempat sumberdaya budaya (baik yang tangible maupun yang intangible) sudah tidak digunakan lagi. Sumberdaya yang tidak digunakan ini seringkali menjadi rusak, hilang, dan punah. Namun, tidak jarang sumberdaya budaya ini masih ada tetapi tidak tampak dan masih mungkin ditemukan kembali. Pelestarian pada hakikatnya adalah upaya mempertahankan agar suatu sumberdaya budaya tetap berada pada konteks sistem agar dapat berfungsi aktif atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Agar tetap bertahan, sumberdaya budaya yang masih ada dalam konteks sistem mungkin saja harus dipakai ulang atau didaur ulang. Sementara itu, sumberdaya budaya yang sudah berada pada konteks arkeologis akan dapat dilestarikan kalau sumberdaya itu dapat dimasukkan kembali ke dalam konteks sistem melalui proses reklamasi maupun daur ulang. Proses reklamasi dan daur ulang sudah tentu mengandung makna perubahan, yaitu mengubah sumberdaya budaya yang sudah tidak lagi bermakna agar dapat kembali mempunyai makna atau arti penting bagi sistem budaya yang masih berlangsung. Proses penemuan kembali Candi Borobudur yang dulunya sudah tercampak, upaya pemugaran dan pemanfaatannya bagi kebanggaan umat manusia (sebagai World Heritage) dan daya tarik wisata tidak lain adalah proses reklamasi dan daur ulang tadi. Karena itu, pada dasarnya, upaya pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan sumberdaya dalam konteks sistem dengan memberikan makna baru bagi sumberdaya budaya itu sendiri, jika tidak ada pemaknaan baru, hakekat pelestarian itu sendiri sulit atau kadang tidak akan tercapai.

3. PROSES TRANSFORMASI

Karena pelestarian adalah upaya memberi makna baru dan dalam masyarakat yang pluralistik pemberian makna itu dapat beragam, maka pelestarian warisan budaya harus dapat dibicarakan bersama, dinegosiasikan dan perlu disepakati bersama pula melalui suatu dialog yang terbuka dan seimbang. Perbedaan pemberian makna suatu warisan budaya harus sedapatnya dihargai dan diwadahi (Tanudirjo, 2002; 1996) dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis.

Dalam era global ini, masyarakat banyak mengalami pencerahan termasuk dalam bidang warisan budaya. Ada kesadaran yang makin kuat bahwa warisan budaya pada sumberdaya budaya itu haruslah sepengetahuan masyarakat luas (McGimsey dan Davis, 1977; Cleere, 1990; Schaafsma, 1990; Little, 2002). Kesadaran seperti juga muncul di Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Masyarakat sekarang tidak lagi terlalu mengantungkan harapan pada upaya pemerintah dalam pelestarian warisan budaya. Tidak jarang mereka malah meragukan kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan warisan budaya. Situasi ini akhirnya yang diperhatikan terhadap pelestarian warisan budaya. Selain itu, setiap masyarakat pada hakekatnya selalu mempunyai konsep-konsep pelestariannya sendiri (disebut : **etnoconservation**). Yang menarik, upaya pelestarian yang mereka lakukan secara mandiri terbukti cukup efektif dan sangat membantu pemerintah. Karena itu, peran serta mereka amat perlu diberikan tempat dalam arah kebijakan pengelolaan yang baru.

Serangkaian gejala sosial yang muncul akibat globalisasi tadi sekali lagi mengamanatkan pada para pengambil keputusan untuk segera mengubah arah kebijakan dalam pengelolaan warisan budaya. Apabila tidak, dikhawatirkan masalah warisan budaya akan menjadi sumber konflik yang tidak berkesudahan, baik antara berbagai komunitas dalam masyarakat, antara pemerintah daerah (lokal) dan umat manusia (internasional). Jika konflik-konflik itu merebak, dengan sendirinya upaya pelestarian tidak akan mencapai sasarannya. Sebaliknya, pusaka-pusaka bangsa akan hancur.

4. Visi ke depan : “menjadi Abdi masyarakat”

Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada sekarang, kini sudah saatnya visi pengelolaan warisan budaya di Indonesia diubah. Kalau hingga kini kiblat visi pengelolaan masih kepada ‘pengelolaan warisan budaya untuk negara’ (dari *archeology in the service of the state*), mulai saat ini hendaknya lebih dituntut oleh visi baru yaitu ‘pengelolaan warisan budaya untuk masyarakat’ (atau *publik archeology*). Sebagai konsekkuensinya, dalam kebijakan yang baru, para aparatus negara atau pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan warisan budaya tidak lagi menjadi ‘**abdi negara**’ tetapi menjadi ‘**abdi masyarakat**’. Di samping itu, harus selalu disadari bahwa warisan budaya adalah sumberdaya di masa mendatang tentunya harus dilandasi prinsip **menajemen konflik**.

Lalu, bagaimana pengelola warisan budaya harus menempatkan diri dalam visi baru ini. Ada beberapa fungsi yang mungkin dapat diperankan oleh pengelola warisan budaya, khususnya yang ada di pemerintah. Sebagaimana telah disinggung di atas, pada dasarnya pelestarian adalah proses memberi makna baru bagi warisan budaya agar tetap berada dalam konteks sistem. Karena itu, salah satu tugas yang harus diemban oleh para pengelola warisan budaya adalah membantu masyarakat atau menjadi **fasilitator** dalam proses pemaknaan atau pemanfaatan sumberdaya, sesuai dengan keahlian dan pengetahuan, sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan mereka sendiri dengan tepat. Selain itu, para pengelola dapat membantu masyarakat atau pihak-pihak yang berbeda kepentingan menemukan resolusi di antara mereka. Karena, pada dasarnya setiap masyarakat selalu mempunyai kearifan-kearifan untuk menyelesaikan konflik.

Karena pengelolaan warisan budaya di masa mendatang harus memperhatikan manajemen konflik, pengelola warisan budaya hendaknya memegang peran sebagai **mediator**. Untuk dapat mengemban peran ini, pengelola warisan budaya harus aktif terlibat dalam masalah –masalah yang dihadapi masyarakat, mampu memberikan pendapat dalam diskusi dan debat publik, memberikan narasi-narasi tentang warisan budaya yang penting dan relevan dengan masalah yang ada di masa kini. Pengelola warisan budaya juga harus kritis melihat bagaimana kepentingan masa kini mempengaruhi interpretasi masa lampau, sebagai

perantara masa lampau dan masa kini, pengelola warisan budaya harus peka baik terhadap keragaman minat dan kepentingan akan masa lampau di mana kini maupun dampaknya terhadap kualitas sumberdaya arkeologi yang tersedia (hodder,1999). Untuk itu, mereka juga harus akomodatif terhadap beragam kepentingan kalau selama ini pengelola warisan budaya yang mewakili pemerintah sangat mendominasi penentuan kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya budaya, sejak dini identitas (termasuk ekskavasi penyelamatan dan studi kelayakan), penentuan nilai penting, pemanfaatan hingga mitigasi-nya, kini mestinya mereka harus lebih banyak mendengar 'suara-suara' dari pihak lain. Selain itu, pengelola sumberdaya budaya perlu juga lebih banyak melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam pengambilan keputusan, antara lain lewat kerjasama dengan berbagai pihak dalam masyarakat. Dengan kata lain, pengelola sumberdaya budaya tidak lagi mengabdikan pada kepentingan tunggal (negara), tetapi kepentingan yang beragam dari masyarakat luas.

Mengikuti pendapat Mayer-Oakes (1990), pengelola sumberdaya budaya harus sadar bahwa sumberdaya budaya adalah milik masyarakat luas yang memiliki beragam kepentingan. Karena itu, anggapan bahwa merekalah yang menentukan nasib sumberdaya budaya harus dihilangkan. Sebaliknya, pengelola warisan budaya yang bijaksana akan menempatkan dirinya sebagai **steward (penjaga-pengelola)**. Sedikit berbeda dengan peran manager yang lebih berkonotasi pengemudial (**contrller**) atau penguasa (**authority**), steward lebih berperan sebagai seorang penjaga dan pengelola. Artinya, ia harus sadar bahwa yang dijaga akan dikelola bukanlah miliknya sendiri (lihat: Oxford American Dictionary, 1986). Secara profesional, pengelola warisan budaya harus melaksanakan hal itu, ia juga mengingat bahwa sumberdaya yang dikelola itu bukanlah miliknya, sehingga ia dapat menentukan secara semena-mena apa yang akan diperbuat terhadap sumberdaya itu. Sebaliknya, penjaga-pengelola harus banyak mendengar kemauan dan kepentingan pemilik sumberdaya itu sendiri, yaitu masyarakat luas. Hanya dengan cara demikian, maka pengelolaan warisan budaya akan dihargai oleh masyarakat, dan tidak sebaliknya malah dicela dan dicap sebagai penghambat pembangunan. Mungkin ada baiknya pula

dikutipkan gagasan R.S. Dickens dan C.E. Hill (dalam Mayer-Oakes, 1990 diterjemahkan bebas) untuk pengelolaan sumberdaya budaya :

Kita harus melestarikan sumberdaya itu jika kita ingin mengambil manfaat darinya, kita harus mempelajarinya jika ingin memahami manfaat yang dapat kita peroleh, dan kita harus menerjemahkan pengetahuan yang kita peroleh untuk masyarakat. Jadi, dari masyarakatlah proses ini berawal, dan kepada merekalah semua itu haru diserahkan'.

Barangkali, perubahan sikap dari abdi negara menjadi abdi masyarakat ini akan menjadi lebih jelas dengan satu contoh kasus dalam pengelolaan sumberdaya budaya, khususnya dalam kaitannya dengan kecenderungan pemanfaatan sumberdaya budaya untuk daya tarik wisata. Kecenderungan seperti ini mkiranya dapat dipahami. Di tengah krisis produksi komoditas lain di Indonesia, memanfaatkan warisan budaya untuk daya tarik wisata cukup.praktis dan termasuk investasi yang relatif berbiaya rendah. lagipula, permintaan jasa wisata warisan budaya juga cukup besar dalam konteks globalisasi. Di samping itu, wisata warisan budaya juga cukup besar dalam konteks globalisasi. Di samping itu warisan budaya (heritage tourism) seperti ini berpotensi menyerap tenaga kerja dan meningkatkan penghasilan negara (devisa). Namun, sebagai abdi masyarakat, pemngelola warisan budaya tetap harus waspada. Harus dipahami, menjadikan warisan budaya sebagai daya tarik wisata berarti memberi tekanan pada pemanfaatannya secara global (global use), yang bisa menyebabkan benda cagar budaya itu terisolir dari kehidupan masyarakatnya. Dampak negatifnya tidak kecil. Aksesibilitas masyarakat terhadap warisan budaya lantas jauh berkurang, mungkin saja karena ada pungutan bea masuk, atau tidak mendapat ijin melaksanakan tradisi (ritual, sosial, religi), atau tidak mendapat keuntungan ekonomis, bahkan sampai tertutup untuk melakukan penelitian (lihat Tanudirjo, 2000). Fenomena seperti ini sudah terjadi, antara lain setelah penetapan Taman Wisata candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. Dalam konteks ini, adanya penolakan rencana pembangunan Jagat Jawa di sekitar Borobudur adalah reaksi wajar dari dampak negatif pemanfaatan warisan budaya

tersebut. Apabila pengelolanya tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, mestinya, persoalan ini akan dapat jika pengelola warisan budaya (pemetintah) bisa hadir sebagai mediator untuk menjembatani kebutuhan investor (PT Taman Wisata) dan masyarakat setempat. Bersamaan dengan itu, dilakukan kajian dampak terhadap sumberdaya arkeologinya jika proyek tersebut dilakukan. Disinilah peran pengelola warisan budaya sebagai manajer konflik diharapkan kiprahnya.

Sebagai bandingan barang kali dapat dikemukakan pengelolaan sumberdaya budaya di Kakadu National Park di Northern Territory, Australia, yang termashur akan seni cadasnya (Altman, 1988). Sejak awal pengembangan daerah itu menjadi daya tarik wisata, penduduk setempat sudah diikutkan dalam pengambilan keputusan. Konsultasi dengan masyarakat juga dilakukan setiap ada rencana pengembangan. Bahkan, mereka diberi kesempatan mengambil inisiatif dalam wisata arkeologi di sana. Caranya, mereka disertai pengelolaan sarana wisata tertentu (hotel, tour operator) melalui organisasi mereka, yaitu **Gagudju Association**. Selain itu, banyak penduduk setempat yang lalu berprofesi sebagai konsultan budaya maupun *ranger* (pemandu). Keterlibatan masyarakat setempat menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan, karena dianggap menciptakan citra 'asli' kehidupan setempat. Ini merupakan bukti bahwa pendekatan sebagai mediator akan lebih berhasil ketimbang sebagai legislator (penentu segalanya).

5. Beberapa catatan akhir

Dari uraian sebelumnya, kiranya cukup jelas bahwa arah kebijakan pengelolaan warisan budaya di masa mendatang haruslah didasarkan pada jiwa atau semangat 'warisan budaya untuk semua'. Dengan pendekatan ini masyarakat luas dapat lebih aktif terlibat dalam pengelolaan warisan budaya itu. Pada saat yang bersamaan, dominasi pemerintah sebagai wakil negara dalam proses tersebut dapat dikurangi. Semestinya pemerintah lebih dapat diposisikan sebagai **fasilitator** sekaligus **mediator**. Sebagai fasilitator, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan kemudahan-kemudahan serta wadah atau forum untuk berdialog bagi setiap pihak yang terkait dengan warisan budaya sehingga semua lapisan masyarakat dapat terlibat dalam proses pemberian makna baru kepada sumberdaya budaya.

Sebagai mediator, pemerintah harus mampu bertindak sebagai manajer konflik yang 'netral' sehingga dapat mencari jalan keluar yang terbaik (win-win solution) agar kepentingan berbagai pihak (yang sering amat bertentangan) sedapat mungkin dapat terakomodasi. Untuk itu, UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang dalam proses revisi harus memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat. Selain itu, dalam memperlakukan sumberdaya budaya, pengelola warisan budaya harus menempatkan diri sebagai *steward*, yang bertanggungjawab akan kelestarian dan pemanfaatannya, tetapi sekaligus mau mendengar kemauan pemilik sumberdaya budaya itu sendiri, yaitu masyarakat.

Mengingat peran-peran yang telah disebutkan di atas (mediator, fasilitator, dan juga penjaga-pengelola), pengelolaan warisan budaya harus didukung dengan lembaga yang luas baik kewenangan maupun jaringan kerjanya. Ini dibutuhkan karena mereka harus dapat mengatasi persoalan lintas sektoral dan pada berbagai jenjang. Dibutuhkan suatu lembaga yang berada pada tataran nasional. Lembaga-lembaga pengelola warisan budaya akan sulit melakukan fungsinya apabila menjadi bagian dari aparat pemerintah daerah yang kadang justru terlibat dalam konflik kepentingan dengan daerah lain. Di samping itu, nilai-nilai penting warisan budaya umumnya berlaku secara lintas batas administratif. Suatu daerah pada dasarnya tidak dapat mendaki (*claim*) terhadap warisan budaya yang ada di daerahnya begitu saja, karena masyarakat dari daerah lain pun juga mempunyai hak untuk memanfaatkannya. Sulit dibayangkan, bagaimana pengelolaan sumberdaya budaya akan dapat dilakukan dengan baik jika diserahkan begitu saja kepada masing-masing pemerintah daerah. Namun dalam hal ini pemerintah daerah pun tidak boleh ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, mereka harus dilibatkan secara aktif bersama komponen masyarakat lain, termasuk akademika (perguruan tinggi, lembaga penelitian) untuk ikut dalam menentukan langkah-langkah pelestarian budaya.

Adanya lembaga pengelola warisan budaya pada tataran nasional akan membuka peluang pengelolaan warisan budaya dapat dilakukan dalam 'kebersamaan'. Artinya, lembaga di pusat akan dapat membantu daerah-daerah yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan melalui penggalangan sumberdaya

(resources) dengan dibantu oleh daerah-daerah lain (semacam mekanisme subsidi silang). Bahkan, hibah warisan budaya antar daerah pun dimungkinkan.

Peran masyarakat dalam memberikan makna pada warisan budaya, yang berarti pula peran sertanya dalam pelestariannya, dapat diserap melalui keterlibatan mereka dalam menentukan nilai penting suatu warisan budaya maupun pengambilan keputusan untuk pemanfaatannya. Dengan demikian, pemerintah bukan lagi penentu utama dalam proses pelestarian warisan budaya. Masyarakat juga dapat dilibatkan dalam proses nominasi sumberdaya budaya yang berada di wilayah publik (**public domain**) menjadi benda cagar budaya (Tanudirjo, 2003). Selama ini, proses nominasi hanya dilakukan oleh pemerintah. Apabila nominasi dari bawah (bottom up) diterapkan, masyarakat tidak hanya pasif menunggu tetapi juga aktif berperan dalam proses pelestarian warisan budaya.

Akhirnya, hakekat “Wasrisan Budaya Untuk Semua” adalah juga “Semua Untuk Warisan Budaya”. Artinya, semua pihak terlibat dan berperan aktif dalam upaya pelestarian warisan budaya agar semua mendapat manfaat dari warisan budaya’..

Kepustakaan

Altman, J.C.

- 1988 Aborigines, tourism and development: The Northern Territory experience. *Australian National University North Australia Research Unit Monograph*, Darwin

Cleere, Henry F

- 1990 Introduction : the rationale of archaeological management, dalam Henry F. Cleere(ed), *Archaeological heritage management in the modern world*. London unwin-Hyman.

Friedman, J

- 1994 *Cultural identities and global process*. London:sage Publication

Hodder, I.

- 1999 *The Archaeological process, an introduction*. Oxford:Blackwell

Holton, R.J.

- 1998 *Globalization and the nation-state*. New York: MacMillan Press

Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia

- 2003 *Draft Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia*

Kohl.P.L. dan C.Fawcett

- 1995 *Nationalism, politics, and the practice of Archaeology* London : Cambridge University Press

Little, Barbara J.

- 2002 *Archaeology as a shared vision*, dalam Barbara J. Little (ed) *Public benefits of Archaeology*. Gainesville. University Press of Florida. Hlm.3-19

Lowenthal, D.

- 1981 Conclusion : dilemmas of preservation, dalam D. Lowenthal dan M. Binney (eds), *Our past before us*,

why do we save it ?, London, Tample Smith. Hlm.
213-237

Martin, H.P. dan H. Schumann

1996 *Global trap*, Pretoria : HSRC-RGN

Mayer-Oakes, Willian J.

1990 *Science, service, and stewardship : a basis for the ideal Archaeology of the future*, dalam Henry F. Cleree(ed). *Archaeological haritage management in the modern world*. London : Unwin-Hyman

McGimsey, C. dan H. Davis (eds).

1977 *The management of Archaeological resource, the airlie House Report*. Special Publicatoin of the Society for American Archaeology

Schaafsma, Curtis F.

1990 *Significant until proven otherwise : problems versus representative samples*, dalam Henry Cleree (ed). *Archaeological heritage management in the modern world*. London Unwin-Hyman Hlm. 38-50

Schiffer, M.B.

1976 *Behavioral Archaeology*. New York Academic Press

Schiffer, M.B.

1985 *Formation processes of the Archaeological record*. Albuquerque, University of New Mexico

Schiffer, M.B. and G.J. Gummerman (ed).

1977 *Conservation Archaeology*. New York : Academic Press

Suleiman S.R. Mulia, N.S. Anggraeni & F.X. Supandi (eds).

1976 *50 athun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional*. Jakarta : Pusat Penelitian Arkeologi Nasional

Tanudirjo, D.A.

1995 *Theorecal trend in indonesia Archaeology*, dalam

- P.Ucko (ed), *Theory in Archaeology, a world perspective*. London:Routledge, Hlm 61-75
- 1996 arkeologi pasca-modernisme untuk direnungkan. Makalah disampaikan dalam pertemuan Ilmiah Arkelogi VII di Cipanas ,1996
- 1998 CRM sebagai manajemen konflik. *Artefak* no. 19 Februari 1998
- 2000 Reposisi arkeologi dalam era global. *Buletin cagar budaya*, vol.1 no,2, Juli 2000 (suplemen). Hlm.11-26
- 2001 "Wisata Arkeologi" antara Ilmu dan Hiburan, dalam M.I. Mahfud (ed), *Memediasi masa lalu, spektrum arkeologi dan pariwisata*, Makassar :Balai Arkeologi Makassar dan Lephass . Hlm. 90-110
- 2003 gagasan untuk Nominasi Benda Cagar Budaya di Indonesia. Makalah disusun dalam rangka Lokakarya Penyusunan Piagam Pelestarian Pusaka untuk Indonesia di Lakiurang, 30 September – 3 Oktober 2003

PEMAHAMAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MADANI¹

Oleh : **M. Dawam Rahardjo**²

Istilah “masyarakat Madani” mula-mula diperkenalkan oleh Dt. Anwar Ibrahim, waktu itu Wakil Perdana Menteri Malaysia, dalam acara simposium Festival Islam Istiqlal, pada tahun 1995. Dalam makalahnya itu, Anwar Ibrahim mengatakan bahwa istilah “Masyarakat Madani” itu sebenarnya adalah terjemahan dari istilah “*civil society*”, suatu istilah yang sudah lama tenggelam dan baru muncul kembali setelah runtuhnya sistem sosialis pada awal dasawarsa 90-an. Namun sebenarnya dalam wacana ilmu-ilmu sosial, istilah *civil society* sering dibahas sejak tahun 1970-an. Pada dasawarsa 80-an, istilah tersebut muncul dalam pembicaraan mengenai teori “*state and society*” sebagai kritik terhadap gejala otoritarianisme. Dari sinilah muncul persepsi bahwa *civil society* (masyarakat warga) adalah “tandingan” terhadap *state* (negara).

Sebagai teori atau konsep, *civil society* sebenarnya sudah lama dikenal sejak masa Aristoteles pada zaman Yunani Kuno, Cicero, pada zaman Roma Kuno, pada abad pertengahan, masa pencerahan dan masa modern. Dengan istilah yang berbeda-beda, *civil society* mengalami evolusi pengertian yang berubah dari masa ke masa. Di zaman pencerahan dan modern, istilah tersebut dibahas oleh para filsuf dan tokoh-tokoh ilmu-ilmu sosial seperti Locke, Hobbes, Ferguson, Rousseau, Hegel, Tocquville, Gramsci, Hebermas.

Dahrendorf, Gellner dan di Indonesia dibahas oleh Arief Budiman, M. Amien Rais, Fransz Magnis Suseno, Ryaas Rasyid, AS. Hikam, dan Mansour Fakhir.

Pembahasan mengenai konsep atau teori *civil society* di Indonesia, bukan pertama kali dilakukan di Indonesia, melainkan di Australian National University (ANU), Australia pada tahun

¹ Makalah disampaikan pada acara Kongres Kebudayaan V tahun 2003, diselenggarakan oleh Depdiknas RI, di Bukittinggi, Sumatra Barat, tanggal 19 s/d 23 Oktober 2003.

² Adalah Presiden The International Institute of Islamic Thought (IIIT-Indonesia).

1989 dalam suatu eminar yang mengambil tema "State and Society in Indonesia". Seminar tersebut pada pokoknya peduli terhadap berkembangnya otoritarianisme di Indonesia, sebagaimana sistem politik tersebut berkembang di berbagai bagian di dunia, di Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah dan Asia, selain dinegara-negara sosialis. Arahnya adalah mencari jalan menuju ke Demokratisasi. Gagasan tersebut muncul sehubungan dengan apa yang disebut dengan gelombang ketiga (*the third wave*) demokratisasi yang dipelopori oleh Portugal, dengan terbentuknya pemerintahan demokratis pada tahun 1974. Terbentuknya pemerintahan demokratis di Eropa Selatan itu ternyata bukan gejala unik, tetapi rupanya merupakan sebuah gelombang global.

Dalam proses sejarah, demokratisasi tidak timbul begitu saja, sekalipun karena perjuangan politik. Ada preseden yang mendahuluinya. Preseden yang dimaksud adalah *civil society*. Teori ini dikemukakan oleh seorang filsuf sosial Prancis abad ke-19, Alexis de Toquville yang berkunjung ke benua Amerika pada tahun 1830-an dan kemudian kembalinya ke tanah airnya, ia menulis laporannya yang kemudian terbit dalam buku "Democracy in America" (1834). Di negara Amerika Serikat yang baru, dengan penduduk yang sebagian besar kaum migran dari benua Eropa yang mengalami diaspora untuk mencari kebebasan itu, ia melihat tumbuhnya berbagai macam asosiasi, sejak dari perkumpulan tetangga dan klub-klub hingga gerakan keagamaan. Suburnya asosiasi itu, kemudian diketahui karena berkembangnya nilai-nilai sosial utama (*social virtue*) yang menjadi perekat antara individu dalam tumbuhnya organisasi. Beelakangan oleh ahli-ahli ilmu-ilmu sosial dan sejarah seperti Coleman, Putman dan Fukuyama, nilai-nilai itu disebut sebagai modal sosial (*social capital*).

Lebih lanjut, Putman dalam penelitiannya di berbagai daerah di Itali menemukan (1993) bahwa di mana lembaga demokrasi paling sukses adalah daerah-daerah dimana modal sosial telah relative berkembang beberapa abad sebelumnya. Horison (1985, 1992 dan 1997) juga mengemukakan argumen bahwa pembangunan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang mendasar, sedangkan Fukuyama (1995) juga berpendapat bahwa kemampuan suatu masyarakat untuk bersaing di pasar global dikondisikan oleh amanah sosial (*social trust*). Semua

pandangan itu mengarah kepada pentingnya peranan nilai-nilai budaya yang disebut sebagai modal sosial itu, baik bagi perkembangan politik (demokrasi), ekonomi, maupun pembangunan secara keseluruhan.

Secara singkat dan sederhana, Fukuyama mendefinisikan modal sosial sebagai “seperangkat nilai-nilai informal yang instan atau norma-norma yang diyakini bersama di antara anggota kelompok yang memungkinkan mereka untuk bekerja sama satu sama lain”. Kerja sama itu membentuk suatu organisasi dimana para anggotanya secara sukarela menyerahkan sebagian hak-hak individunya untuk bekerja bersama-sama mencapai suatu tujuan, berdasarkan aturan-aturan yang disepakati. Kesepakatan tersebut menyebabkan setiap orang melaksanakan kewajibannya masing-masing secara bebas tanpa perlu diawasi karena satu sama lain menaruh kepercayaan bahwa setiap orang akan melaksanakan kewajibannya. Itulah yang disebut saling percaya (*mutual trust*) karena setiap orang berusaha untuk mengemban amanah.

Asosiasi-asosiasi itu disebut juga organisasi non-pemerintah (*non-government organization*) yang bersifat otonom dan tumbuh spontan dalam masyarakat tanpa dibina oleh pemerintah berdasarkan berbagai peraturan yang memungkinkan intervensi negara terhadap masyarakat. Asosiasi atau organisasi non-pemerintah yang di Indonesia lebih populer dengan sebutan lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu adalah wujud kelembagaan dari *civil society* yang bebas dari intervensi pemerintah. Dengan melihat esensinya, Habermas, seorang filsuf besar Jerman kontemporer, mendefinisikan *civil society* sebagai “ruang diskursus bebas dari intervensi negara”. Sebagai ruang bebas, *civil society* mengandalkan kepada kreativitas, inovasi, dan keswadayaan guna mempertahankan eksistensi dan perkembangannya.

Civil society, membedakan dirinya dan menyatakan otonomi dan independensinya dari negara. Dengan demikian, *civil society* adalah wilayah publik yang bukan merupakan wilayah politik, seperti halnya negara. Antoni Gramsci, seorang filsuf sosial sosial Itali, dalam pemikiran yang dimuat dalam bukunya “Prison Notebooks” juga menyebut dua macam masyarakat yaitu masyarakat sipil dan masyarakat politik. Konsep inilah yang menarik perhatian gerakan-gerakan sosial sehingga timbul apa

yang disebut sebagai “gerakan masyarakat baru” (*new social movement*) yang bertujuan mentransformasikan masyarakat pada gerakan *civil society*. Gejala seperti ini nampak juga di Indonesia pada zaman Orde Baru, ketika Muhammadiyah mencanangkan konsep “masyarakat utama” dan NU menyatakan “kembali kepada khittah 1926” dalam muktamarnya di Situbondo pada tahun 1984. Gerakan yang bertujuan membentuk suatu masyarakat tertentu itu disebut juga sebagai “gerakan cultural”.

Dalam konsep di atas, *civil society* adalah *counterpart* dari negara dalam kerangka teori *state and society* yang populer dalam dasawarsa ‘80-an. Namun, pengertian tentang *civil society* mengalami perkembangan. Pemahamannya pun, seperti tercermin dalam terjemahan istilah itu, berbeda-beda. Mohammad AS Hikam cenderung untuk tidak menerjemahkan istilah itu, karena tidak menemukan padangan kata yang tepat, sedangkan Mansour Fakhri menerjemahkannya menjadi “masyarakat sipil”. Lembaga Etika Atmajaya memilih terjemahan “masyarakat warga”, sedangkan Ryaas Rasyid memakai istilah “masyarakat kewargaan”. Kalangan gerakan Islam cenderung memakai istilah yang diperkenalkan oleh Prof. Naguib al-Atas, “masyarakat madani” yang dibawa ke Indonesia oleh Dt. Anwar Ibrahim. Namun kalangan NU pernah mengeluarkan istilah lain, yaitu “masyarakat *muttamaddin*”. Di Mesir, *civil society* ternyata diterjemahkan sebagai masyarakat “madani” (*al mujtama ‘al madani*).

Pada zaman pemerintahan B.J. Habibie, wacana tentang masyarakat madani sangat marak karena kalangan pemerintahan mengadopsi istilah itu. Masyarakat madani sering dijadikan tujuan proyek, misalnya membentuk masyarakat madani di daerah transmigrasi, padahal *civil society* itu pada umumnya diasosiasikan dengan masyarakat kota (*urban*) yang dinilai sebagai “pusat peradaban” atau “puncak peradaban”. Dalam wacana itu, maka masyarakat madani mengalami perubahan arti. Masyarakat madani tidak lagi identik dengan *civil society*. Dr. Didin Damanhuri dari IPB pernah mengingatkan bahwa konteks pembentukan *civil society* adalah masyarakat Eropa dan Amerika Utara. Di dalamnya terkandung gagasan sekularisme. Di lain pihak, timbul pula kritik terhadap pandangan yang mempertentangkan *civil society* dengan *state* (negara).

Padahal keduanya tak bisa ada tanpa keberadaan yang lain. Dengan perkataan lain, keberadaan *civil society* tak bisa dipahami tanda keberadaan negara. Karena itu tanpa berkembang pengertian baru mengenai masyarakat madani, yaitu yang mencakup negara dan masyarakat (*state and society*) yang bersifat komplementer. Dengan demikian, ideal masyarakat madani berubah pengertiannya menjadi “masyarakat idel” seperti yang tercermin dalam ungkapan “Indonesia yang dicita-citakan”, atau meminjam istilah Ben Anderson “*the imagined community*” yakni sebuah masyarakat madani.

Di lingkungan sosiologi sendiri juga terjadi perkembangan pemikiran. Seorang sosiolog AS, Robert Wunthow, antara lain, mengemukakan teori “*three sectors model*” atau model tiga sektor. Dalam teori tersebut seluruh masyarakat itu dibagi menjadi tiga sektor, yaitu sektor swasta, atau sektor pasar (*market sector*), sektor negara atau masyarakat politik (sebagaimana disebut oleh Gramsci) dan sektor voluntir yang disebut juga sektor ketiga (*the third sector*). Pilar-pilar utama sektor negara adalah lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, pemerintah dan lembaga pengadilan. Pilar utama sektor pasar adalah perusahaan-perusahaan, termasuk bank-bank sedangkan pilar sektor ketiga adalah LSM atau lembaga gerakan masyarakat baru (*new social movement*). Di ketiga sektor itu berlaku nilai-nilai yang berbeda. Di sektor negara berlaku prinsip kekuasaan yang memaksa (*coercion*), dimana negara, seperti dikatakan oleh Max Weber, memiliki monopoli dalam menjalankan kekerasan guna menegakkan hukum dan peraturan-peraturan, misalnya dalam menarik pajak, menjamin berlakunya perjanjian dan menjaga keagamaan. Nilai utama sektor swasta adalah mekanisme pasar untuk mendapatkan keuntungan (*market mechanism for profit*), sedangkan prinsip sektor ketiga adalah kesukarelaan (*voluntary*), *non profit* dan *non-coersive*. Masing-masing sektor bekerja secara mandiri, tetapi saling berinteraksi. Sebagai contoh, dimana modal sosial atau masyarakat lemah, maka diperlukan peranan pemerintah di bidang hukum dan administrasi. Di bidang bisnis, ketekoran (*defivicit*) dalam modal sosial memerlukan intervensi administrasi bisnis (*business administrations*). Modal sosial atau kesehatan budaya (*cultural health*), meminjam Tocquville, itu adalah elemen dasar dari sektor ketiga. Perkembangan sektor

politik (demokrasi) dan perkembangan ekonomi dan bisnis, sebagaimana ditemukan oleh sosiolog, sangat ditentukan oleh stok modal sosial. Namun jika modal sosial tekor di sektor ketiga, diperlukan bantuan dari sektor negara dan swasta.

Teori Wuthnow memang membuat konsep masyarakat madani lebih operasional. Namun agaknya ada satu sektor lagi yang dilupakan, yaitu wilayah primordial, yang nilai intinya adalah kebebasan dan *privacy*. Memang dalam teori *civil society* yang dikembangkan oleh Hobbes, berkembangnya *civil society* ditandai dengan meninggalkan *state of nature*, atau kondisi primordial. Namun tak berarti kehidupan primordial menjadi lenyap. Bahkan dalam era pasca modern ini, nilai-nilai primordial muncul lagi, melalui konsep hak-hak asasi manusia dan hak-hak kultural. Dengan demikian, maka seluruh masyarakat madani itu terdiri dari empat sektor yang saling berkaitan dan berinteraksi. Sektor keempatnya adalah sektor primordial atau keadaan alami. Hanya saja sektor keempat ini tidak boleh dominan, karena jika dominan, yang terjadi adalah ekadaan anarki (*state of anarchy*). Dalam keadaan anarki, yang terjadi adalah anomalie dimana masyarakat tidak punya pegangan nilai karena tidak memiliki modal sosial. Disini akan berlaku apa yang dikayakan oleh filsuf Inggris Hobbes, sebagai *homo-homini lupus*, manusia merupakan serigala bagi yang lain. Contoh dari keadaan anarki yang anomalie ini adalah konflik lokal di Ambon, Poso dan Sampit. Tanpa nilai-nilai, manusia menjadi serigala atau binatang. Karena itu, upaya untuk mencegah timbulnya konflik di daerah-daerah tersebut adalah penanaman kembali modal sosial.

Pertanyaannya di sini adalah bagaimana meningkatkan stok modal sosial itu. Menurut ahli-ahli sosiologi, modal sosial adalah produk sampingan (*by-product*) agama, tradisi dan pengalaman sejarah bersama sebagai masyarakat atau bangsa. Sumber-sumber modal sosial itu seringkali di luar kontrol pemerintah atau negara. Namun kebijaksanaan publik bisa mempengaruhi pertumbuhan modal sosial misalnya lewat pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi modal sosial itu bisa dibawa oleh pengaruh dari masyarakat luar, termasuk masyarakat luar negeri.

Cara kedua yang bisa dilakukan untuk mengembangkan modal sosial adalah melalui pendidikan. Di sini, pemerintah bisa

mengembangkan modal sosial lewat pengembangan sumber daya manusia (SDM). Kini SDM diakui juga sebagai modal yang disebut modal manusia (*human capital*). Tapi modal manusia itu mengandung beberapa unsur modal yang juga semakin penting peranannya sebagai faktor produksi yang menghasilkan pendapatan dan kekayaan. Unsur itu adalah, modal intelektual (*intellectual capital*), modal sosial (*social capital*), modal kultural (*cultural capital*), dan modal spiritual (*spiritual capital*). Terdapat perbedaan antara ketiga jenis modal itu, walaupun kesemanya melekat pada manusia. Unsur modal intelektual adalah kesemuannya pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dan kemampuan inovasi yang sebenarnya identik dengan modal manusia. Unsur utama modal sosial adalah nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini bersama. Esensi modal kultural adalah kreativitas dan estetika, sedangkan esensi modal spiritual adalah keyakinan (*faith*) dan semangat (*spirit*). Kesemua unsur modal itu bisa diciptakan melalui pendidikan, yaitu pendidikan yang tercerahkan (*enlightened education*), sebagaimana yang disebut dalam Prakongres kebudayaan di Bali.

Ketiga, pemerintah bisa pula mendorong terciptanya modal sosial dengan menyediakan secara efisien barang-barang umum (*public good*), terutama hak milik pribadi (*property rights*) dan keselamatan umum (*public safety*) atau keamanan. Keamanan atau keselamatan umum ini penting yang memberikan proteksi bagi orang untuk ikut dalam perkumpulan, bersukarela, memberikan suara, dan menjaga satu sama lain. Kondisi ini yang menimbulkan sikap amanah (*trust*) dalam masyarakat karena setiap warga merasa aman dalam suatu negara.

Keempat, pemerintah bisa menimbulkan akibat buruk terhadap modal sosial apabila melakukan sesuatu (membuat program atau proyek) yang sebenarnya bisa diserahkan atau dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri. Jika negara melakukan segala hal, maka masyarakat akan tergantung pada negara, sehingga tidak timbul prakarsa keswadayaan dan kepercayaan pada diri sendiri, padahal kemampuan untuk bekerjasama dalam organisasi itu berdasar pada kebiasaan dan praktek. Dengan demikian, pemerintah bisa meningkatkan stok modal sosial, justru dengan membiarkan atau memberi kebebasan kepada masyarakat untuk bekerjasama dalam berkreasi dan berinovasi.

Kelima, tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah

adalah tidak melakukan pengrusakan terhadap modal sosial yang telah hidup dalam masyarakat. Misalnya upaya-upaya untuk menggantikan nilai kekeluargaan dengan nilai persaingan dalam Amandemen Konstitusi beberapa waktu yang lalu oleh sejumlah ekonom adalah sebuah tindakan yang sangat keliru. Sebab, nilai kekeluargaan dan gotong royong, sebenarnya adalah sebuah modal sosial yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pemerintah seharusnya memelihara dan melindungi modal sosial tersebut. Menurut Fukuyama justru nilai kooperatif itulah yang akan memperkuat daya saing suatu bangsa.

Indonesia dewasa ini, ketika memasuki masa krisis, mengalami berbagai masalah, yaitu konflik horisontal dan vertikal (antara rakyat dan pemerintah), maraknya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), pelanggaran hukum dan kriminalitas. Kesemuanya itu mengakibatkan erosi terhadap modal sosial. Erosi modal sosial mengakibatkan melemahnya sektor voluntir atau sektor sosial yang pada gilirannya melemahkan masyarakat madani.

Pengembangan masyarakat madani harus dilakukan dengan memfungsikan keempat sektor kemasyarakatan. Di bidang pemerintahan, perlu diterapkan konsep *Good Government* yang terdiri dari sepuluh prinsip, yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap (responsif), wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektivitas, dan profesionalisme. Sesuai dengan Wuthnow, negara atau pemerintah harus menghargai otonomi dan independensi masing-masing sektor karena selama ini, khususnya di masa Orde Baru, pemerintah, negara, atau masyarakat untuk terlalu mendominasi sektor-sektor lain. Karena itu di masa mendatang, sektor swasta harus lebih diserahkan kepada mekanisme pasar yang terkendali. Demikian pula pemerintah harus menjaga independensi dan otonomi sektor voluntir atau sektor sosial dan sektor primordial.

Pemberdayaan kini adalah istilah yang paling banyak dipakai dalam manajemen bisnis. Artinya, adalah pendelegasian, desentralisasi atau pemberian otonomi ke bawah. Dalam pengembangan kemasyarakatan, pemberdayaan adalah pemberian kebebasan, pengakuan kesetaraan dan membiarkan keswadayaan. Desentralisasi di bidang pemerintahan melalui UU Otonomi Daerah, adalah salah satu bentuk kebijaksanaan

pemberdayaan.

Perkembangan masyarakat madani tergantung ke pada beberapa perkembangan sebagai berikut. Pertama adalah berkembangnya kelas menengah. Perkembangan kelas menengah ini berarti pengentaspan masyarakat dari kemiskinan dan pengurangan konsentrasi dan sentralisasi kekayaan di kalangan elit. Perkembangan itu akan melahirkan apa yang disebut “masyarakat belah ketupat”, dimana sebagian besar masyarakat terdiri dari kelas menengah, sehingga orang miskin dan orang kaya merupakan minoritas. Berkembangnya kelas menengah ini akan menimbulkan sikap yang independen dari otoritas kekuasaan sehingga memperkuat sektor sosial atau keswadayaan masyarakat.

Kedua adalah berkembangnya tanggung-jawab sosial perusahaan (*corporate sosial responsibility*) dengan penerapan etika bisnis dan etika manajemen. Tanggung-jawab sosial perusahaan ini mengimbangi peran mekanisme pasar bebas yang kompetitif dengan menerapkan prinsip koperasi dan kekeluargaan. Dalam proses modernisasi, nilai-nilai solidaritas organik-mekanis hendak dihantikan dengan solidaritas fungsional. Sebenarnya yang harus dilakukan adalah mengkombinasikan kedua jenis solidaritas itu dalam dunia bisnis.

Ketiga adalah tumbuhnya modal sosial, modal intelektual modal kultural dan modal spiritual yang terpadu dalam modal manusia atau sumberdaya manusia. Modal sosial tersebut akan melandasi proses demokratisasi maupun marketisasi. Dewasa ini, sebagaimana dikatakan oleh Stewart, modal intelektual dan modal manusia lebih penting peranannya sebagai faktor produksi daripada modal material (mesin, peralatan, pabrik) dan modal finansial. Masyarakat madani bekerjanya didasarkan pada mutu populasi dan SDM yang memiliki nilai-nilai budaya dan norma-norma yang diyakini bersama.

Keempat, masyarakat madani dan *civil society* yang disebut juga masyarakat warga, akan mengalami pemberdayaan melalui penegakan hak-hak asasi manusia. Masyarakat warga harus terbebas dari ketakutan dan kelaparan (*freedom from fear dan freedom from hunger*), bebas berbicara dan berkumpul. Amartya K. Sen, pemenang Hadiah Nobel di bidang ekonomi tahun 1998 menyebut pembangunan sebagai kebebasan (*development as*

freedom).

Kelima, erat kaitannya dengan penegakkan hak-hak asasi manusia adalah penyediaan barang-barang umum (*public good*) yang *intangible*, terutama keselamatan dan keamanan yang menjadi tugas pemerintah untuk menyediakannya. Keselamatan dan keamanan ini akan mendorong tumbuhnya modal sosial.

Pemberdayaan pada dasarnya adalah pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil prakarsa dan keputusan berdasarkan hak-hak asasi manusia. Dalam strategi pemberdayaan ini, intervensi negara dan masyarakat politik sejauh mungkin dibatasi. Namun pemerintah bisa berperan penting melalui apa yang disebut Anrhony Giddens sebagai “investasi sosial” (*social investment*), yaitu melalui pendidikan, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang meyakini bersama nilai-nilai dan norma-norma yang membangun amanah atau kepercayaan (*trust*) yang merupakan perekat dan pelicin proses kerjasama dalam organisasi masyarakat warga.

INDUSTRI BUDAYA

ARAH UNTUK RISET DAN PEMBELAAN

Oleh: Prof. Dr. Edi Sedyawati

1. RISET UNTUK MENOPANG PERKEMBANGAN INDUSTRI BUDAYA

Pokok masalah yang tertera pada sub-judul ini terkait dengan butir-butir tertentu dari "Tujuan Strategis" Dewan Riset Nasional, Yaitu

- butir (5) "Peningkatan Kemandirian dan Keunggulan", dan
 - butir (6) "Penyelarasan dengan Perkembangan Global";
- serta juga dengan "Prioritas Utama Nasional"
- ke-1, yaitu "Sosial Budaya", dan
 - ke-10 "Informasi dan Mikroelektronik";
- serta dengan "Kinerja Pembangunan Iptek Nasional" pada aspek:
- (1) Inovasi dan Difusi Teknologi Sektor Produksi;
 - (2) UKMK berbasis Teknologi;
 - (3) Kemitraan UKMK dengan Industri Besar; serta
 - (8) Dukungan Sektor Keuangan

Industri Budaya adalah yang menghasilkan produk yang bermuatan pesan, artinya produk tersebut berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan yang dapat berpengaruh terhadap: **pemikiran/pemahaman; penganggapan; penyikapan; pemihakan;** serta **selera** pada manusia yang meng-'konsumsi'-nya.

Produk Industri budaya itu meliputi, antara lain benda-benda yang didalamnya terkandung unsur-unsur : **teks** (seperti pada buku, CD-Rom); **non-teks** (seperti pada karya / kerajinan; rekaman musik);

Ataupun campuran (seperti film, video, VCD, kemasan 'newmedia'). Dengan kata lain dapat pula dikatakan bahwa bahwa benda-benda produk Industri Budaya itu dapat mempunyai unsur-unsur substantif baik yang visual, auditif, kinetis, maupun taktil. Di samping yang berupa benda-benda, industri budaya juga dapat memproduksi jasa, misalnya yang berupa penataan acara (khususnya yang terstruktur dan berkala), seperti festival, pertunjukan, dan peragaan adat-istiadat.

Posisi bangsa Indonesia dewasa ini terdesak dan terlenda oleh hasil-hasil industri budaya negara-negara maju (khususnya yang terbanyak dari USA) khususnya berupa produk-produk audio-visual (sinetron dan video-clip yang disiarkan melalui TV), maupun kemasan-kemasan rekaman (seperti VCD) yang dapat dibeli untuk diputar sendiri. Hasil budaya massa itu pun menulari produk dalam negeri sehingga sejumlah hasil industri budaya dalam negeri pun pada hakikatnya berupa tiruan belaka dari budaya bangsa lain.

Muatan budaya yang 'serius', artinya yang mengajak ke arah perenungan dan pengkajian, dewasa ini tampak kalah oleh muatan yang ringan, glamur, dan sensasional. Dalihnya adalah bahwa yang disebut terakhir itu memang "dikehendaki pasar", atau "sesuai kebutuhan zaman". Premis seperti itu perlu dipertanyakan. Perlu dipelajari bagaimana 'perjuangan' negara-negara kuat itu untuk mendominasi pasar dengan berbagai rekayasa, baik dari segi tata aturan maupun dengan 'sales promotion' melalui berbagai acara dalam siaran-siaran "informasi" nya. (Dalam hubungan ini perlu diingat nilai-nilai budaya yang mengunggulkan kekerasan, pergaulan bebas, kurang-ajaran anak terhadap orang tua, serta penilaian yang melecehkan terhadap bangsa-bangsa kulit berwarna, khususnya Arab, meresap tanpa disadari melalui banjir film/video impor itu. Dalam sinetron-sinetron Amerika tertentu bahwa telah terang-terang disebut nama bangsa Jepang, Irak, dan Libya sebagai pihak yang jahat dan rendah).

Dewasa ini bukan hanya yang serius dikalahkan oleh yang hiburan ringan, melainkan juga yang nasional sedang didesak-desak ke pinggir terus untuk memutlakkan "yang global", yang formatnya sudah ditentukan lebih dahulu dinegara (-negara) adidaya itu. Singkatnya, industri budaya nasional perlu dibela untuk dibangkitkan; kebudayaan Indonesia perlu dikuatkan dengan exposure yang lebih kokoh dan berwibawa. Potensi kreatif sesungguhnya cukup banyak tersedia di dalam bangsa Indonesia; yang kurang adalah dukungan system dukungan sistem dari permodalan.

Permasalahan keterdesakan budaya yang disebabkan oleh ketidak-imbangan produk dan pemasaran industri budaya impor dan dalam negeri ini harus diatasi secara sistemik. Studi yang cermat perlu secepatnya dilakukan mengenai posisi dan situasi

industri budaya di Indonesia dewasa ini, baik dilihat dari sudut kualitas (bandingkan yang impor, dengan melihat pula varian asal negaranya, dan yang buatan dalam negeri) maupun dari sudut kualitas (keunggulan artistic, teknik, serta isi pesannya). Lebih jauh lagi perlu dikaji dampak dari ekonomi global beserta kekuatan-kekuatan dominasi yang bermain di dalamnya, terhadap peluang tumbuhnya industri budaya nasional Indonesia, baik di pasar nasional sendiri maupun di pasar global. Di samping itu perlu pula dikaji peluang-peluang perbaikan keadaan yang dapat dimanfaatkan secara optimal.

2. Pemberdayaan Industri Budaya Nasional

Industri budaya Indonesia di pasar nasional sendiri harus dibuat hidup dalam suatu suasana ekonomi-sosial-politik-budaya yang memungkinkannya berperan sebagai sarana untuk **pembentukan dan pemantapan aspek-aspek jatidiri bangsa**. Upaya pemberdayaan agar peranan tersebut dapat dijalankan memerlukan **koordinasi antar sektor** yang betul-betul diikat oleh satu visi, antara sektor-sektor **kebudayaan, pendidikan, industri dan informasi**. Sektor **pertahanan** pun perlu mengikuti dan memantau perkembangan di bidang industri budaya ini, karena efek industri budaya dewasa ini telah amat kuat terhadap pembentukan watak dan ketahanan budaya bangsa. Seperti telah dikemukakan di muka, yang dipengaruhi oleh pesan-pesan (yang nyata maupun yang terselubung) dari substansi industri budaya itu meliputi : pemahaman, penganggapan, penyikapan, selera, maupun pemihakan. Suatu kiat **perlindungan** tertentu perlu diambil untuk pembelaan industri budaya nasional ini. Salah satu daripadanya adalah perangsangan untuk muncul dan tersiarnya karya-karya industri budaya yang mencerdaskan dan memuliakan bangsa. Untuk itu diperlukan **mobilisasi modal**, baik yang berupa dana maupun kemahiran dan kepakaran. Indonesia sebenarnya kaya akan potensi artistik dan kreatif, namun penjodohnya dengan dunia industri masih terlalu banyak diwarnai oleh selera yang tidak tinggi.

MALIN KUNDANG DAN PERANTAU BUDAYA KITA¹

Oleh: **Edy Utama**²

Dalam beberapa dekade terakhir, kebudayaan kita telah melakukan perantauan yang jauh ke negeri asing, dan sekali-kali pulang kampung dengan wajah malu-malu. Tetapi ada juga yang “merantau Cina” karena tidak pernah kembali lagi ke kampung halamannya. Ia menjadi si “Anak Hilang” yang terlupakan. Kebudayaan kita bagaikan legenda Malin Kundang. Malin Kundang pergi merantau dan kemudian pulang kampung setelah “Kaya” dan punya seorang isteri cantik dari negeri yang jauh. Ia membawa berbagai atribut dan simbol-simbol baru, yang relatif belum begitu dikenal di negeri ibunya sendiri. Ketika pertemuan terjadi, antara keduanya tidak lagi begitu saling mengenal dan tidak lagi merasa memiliki masa lalu yang sama. Bahkan keduanya merasa asing dan berjarak. Di antara keduanya terdapat tirai pemisah yang sulit dipertemukan.

Syukurlah kemudian, Sang Ibu yang setia menunggu kampung Malin Kundang, dalam kenangan masa lalunya masih dapat mengenal sedikit tanda dalam diri anaknya. Sang ibu sangat yakin, lelaki yang didampingi perempuan cantik dengan segala atribut tersebut adalah anak kandungnya anak yang dilahirkan dari rahim warisan budaya nenek-moyangnya. Sang ibu menyapa anaknya dengan perasaan galau dan cemas, karena khawatir Sang Anak tidak lagi mengenal dirinya. Sang ibu berharap Malin Kundang tidak melupakan. Namun Malin Kundang tidak lagi begitu mengenali masa lalunya, meskipun di dalam dirinya kadang-kadang muncul lintasan-lintasan kenangan tentang kampung, tentang ibunya, tentang masa kecilnya, tentang saudara-saudaranya, tetapi semuanya berwujud dalam kesamaran ingatannya. Ia tidak begitu yakin tentang masa lalunya tersebut, karena bagi Malin Kundang yang telah merantau jauh tidak lagi memerlukan masa lalu tersebut. Ia telah menjadi masa kini, di tengah zaman yang dapat

¹ Tulisan untuk Kongres Kebudayaan Indonesia di Bukittinggi 19-23- Oktober 2003

² Pengamat budaya dan pernah menjadi Ketua Umum Dewan Kesenian Sumatera Barat

menyediakan kebutuhan duniawinya. Itu pulalah sebabnya, ketika perjumpaan budaya terjadi antara ia Oktober 2000 – Maret 2003 dan ibunya, antara rantau dan kampung, antara masa lalu dan masa kini, ia tidak lagi merasa ada hubungan emosional di antara keduanya. Malin Kundang tidak lagi mampu mengenal dan mengerti perjumpaan tersebut sebagai peristiwa kultural yang memiliki tali sejarah yang berkesinambungan. Tali sejarah itu telah terputus atau diputuskan oleh pengalaman kekinian, yang begitu bergemuruh, memukau, instan, exotis, telanjang, memabukan, dunia yang selalu bergoyang dan segala bentuk kesenangan sesaat yang selalu dimimpikan. Malin Kundang telah mengalami keterputusan sejarah dengan lingkungan budayanya sendiri, yang sebelumnya telah mengasuh dan membesarkan.

Seperti yang kita ketahui, mitos Malin Kundang beerakhir dengan sebuah tragedi. Sebuah *chaos*. Tetapi, mungkin juga merupakan sebuah pembebasan budaya dari penjelajahan duniawi yang dilakukan Malin Kundang. Ia telah menjadi sebuah simbol yang asing bagi masa lalu dari kebudayaannya sendiri. Sebuah simbol yang tidak lagi mengenal bumi yang melahirkannya. Oleh karena itu, ia kemudian dikutuki sang ibu sebagai anak yang durhaka, dan kemudian menjadi batu. Malin Kundang kemudian menjadi simbol pembangkangan budaya dan penafian masa lalu. Bahkan ia dikutuki secara bersama-sama.

Akan tetapi, salahkan Malin Kundang? Salahkan ibu yang telah melahirkannya? Salahkan masa lalunya? Salahkan masa kininya? Salahkan tempat ia dibesarkan? Salahkan masyarakat yang telah mengasuhnya? Entahlah. Apakah Malin Kundang yang pergi disebabkan ketidaknyamanan lingkungan budaya yang mengasuhnya dapat disalahkan sebagai anak yang durhaka? Bukankah perantauannya didorong oleh kenyataan, bahwa lingkungan budaya dan masyarakat tempat ia tumbuh tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang dapat menentramkan kegelisahan kultural yang dirasakannya? Jadi, ada alasan-alasan tersembunyi di dalam kebudayaan ibunya, yang tidak lagi begitu disadari dan dipertanyakan sebagai sumber-sumber “kegelisahan kultural” dari Malin Kundang. Dalam konteks ini, Malin Kundang dapat dilihat sebagai sosok yang ingin mencari “sorga” baru yang lebih sesuai dengan gejolak bathinnya sendiri,

namun tidak dipahami oleh sejarah budayanya sehingga dapat dianggap sebagai sebuah pembangkangan? Atau hanya sekedar pilihan, karena tekanan, kepungan dan godaan budaya di sekitarnya yang tak terelakkan?

Namun ibunya yang merupakan masa lalu Malin Kundang, mungkin juga tak dapat disalahkan. Ia telah menunggu dan menjaga rumah budaya yang ditinggalkan Malin Kundang. Sang Ibu selalu menanti dan berharap, Malin Kundang suatu saat akan kembali lagi dan dapat mengenal masa lalunya. Sang ibu masih ingin menuturkan kembali dongeng-dongeng dari negari antah baratah, yang menjadi permainan tidur Malin Kundang pada kecilnya. Sang ibu sngat berharap Malin Kundang kembali kepangkuannya di dalam rumah warisan budaya, yang sudah mulai ditinggalkan oleh banyak orang kampungnya.

Sebuah legenda, sebuah peristiwa budaya, baik yang datang dari masa lalu maupun yang akan datang dari masa kini, sangat terbuka untuk ditafsirkan dari berbagai perspektif. Tak ada yang dapat ditafsirkan secara tunggal. Tafsiran ini bergerak dan berkembang sesuai dengan konteks zamannya dan pengalaman manusia yang ada di dalamnya. Sebuah kebudayaan apapun bentuknya, selalu membutuhkan tafsiran yang baru yang bersifat dinamis, sehingga mampu menangkap tanda-tanda zaman yang berubah mampu membaca dan sekaligus memberikan tafsiran tentang masa lalu, tentang apa yang telah terjadi serta kecenderungan-kecenderungan masa depan yang mengepung dari segala penjuru.

Begitu juga halnya dengan Malin Kundang. Malin Kundang sebagai manifestasi kultural mungkin dapat ditafsirkan dari berbagai sudut pandang yang berbeda pula. Selama ini ia lebih banyak dipandang sebagai “anak durhaka” dan kemudian menjadi batu karena mendurhaka kepada ibunya. Pandangan tentang Malin Kundang sebagai anak durhaka sepertinya telah menjadi bagian dari paradigma kebudayaan kita. Namun, bagi sastrawan A.A. Navis yang durhaka itu justru sebaliknya. Bagi A.A. Navis yang mendurhaka itu justru adalah “Ibunya”. A.A. Navis telah memberikan suatu tafsiran baru tentang Malin Kundang.

Dalam konteks inilah saya kira menarik untuk menyimak

kembali apa yang telah ditulis sastrawan A.A. Navis. Dalam salah satu cerita pendeknya, "Malin Kundang Ibunya Durhaka", A.A. Navis dengan tajam telah mengaktualkan berbagai persoalan yang lebih kontekstual dari lingkungan budaya tersebut. Melalui cerita pendek itu, A.A. Navis mengemukakan berbagai persoalan mendasar dalam kehidupan kebudayaan kita, baik yang bersumber dari masa lalu maupun masa kini, persoalan gap antar generasi, kesetiaan budaya dan sekaligus penghianatan yang ada di dalamnya, telah digambarkan melalui interpretasi baru legenda Malin Kundang. Dengan argumentasi yang berbeda, A.A. Navis memberikan alasan-alasan baru kenapa Malin Kundang sebagai anak zaman melakukan pembangkangan dan pendurhakaan terhadap ibunya. Dalam cerita pendek tersebut, A.A. Navis tampaknya ingin menegaskan kembali bahwa pendurhakaan Malin Kundang terhadap ibunya, bukanlah disebabkan oleh Malin Kundang itu sendiri, tetapi lebih didorong oleh perilaku budaya masyarakat yang telah ditinggalkan Malin Kundang. Malin Kundang bagi A.A. Navis telah menjadi simbol pembangkangan budaya yang bersifat konstruktif.

Seperti diceritakan dalam cerpen tersebut, ketika Malin Kundang pulang kampung dengan membawa isteri yang cantik, dan tentu saja dengan kekayaannya yang diperoleh di perantauan, Malin Kundang marah besar karena melihat kampungnya sendiri telah berubah telah menjadi wilayah yang gersang, kering kerontang karena digerogeti untuk berbagai kepentingan. Kekayaan alamnya, budayanya, dan segala hal yang indah-indah yang masih terpelihara ketika Malin Kundang akan pergi ke perantauan, telah lenyap di telan bumi. Malin Kundang menemukan kerusakan yang luar biasa dari tanah kelahirannya. Ia tidak lagi menemukan keakraban masa lalunya. Itulah yang menyebabkan Malin Kundang menganggap ibunya tak mampu menjaga dan memeliharanya.

Amukan Malin Kundang tidak membuat ibunya marah karena memang telah merasa bersalah menjaga amanah. Ibunya bahkan berhiba-hiba pada Malin Kundang. Itu pulalah dalam versi cerita pendek ini Sang Ibu tidak mengutuk Malin Kundang sebagai anak durhaka. Namun Malin Kundang yang kemudian mengutuki dirinya sendiri sehingga menjadi batu. Malin Kundang tidak mau menjadi anak yang durhaka, tetapi ia juga merasa

bersalah membiarkan negerinya dihancurkan ketika ia sedang melakukan perantauan. Malin Kundang marah kepada dirinya sendiri dan mengutukinya. Malin Kundang telah memiliki keberanian kultural untuk melakukan sebuah otokritik yang radikal terhadap dirinya sendiri, sebuah keberanian yang sangat jarang terjadi.

Dari sinilah tragedi baru Malin Kundang mulai menjadi persoalan kebudayaan kita. Tragedi yang melahirkan berbagai kecemasan budaya karena setelah itu, semakin banyak yang meninggalkan kampungnya dan melakukan perantauan yang jauh ke dunia lain, yang penuh dengan ketidak jelasan dan ketidak kepastian. Banyak orang berangkat meninggalkan tradisinya dan merayakan tanpa mempersoalkan masa lalu dan masa depan. Perayaan inilah yang sekarang kita sebut dengan perayaan budaya massa. Semuanya tumpah ke daratan kehidupan budaya yang begitu hiruk pikuk dan memabukkan. Tapi tak banyak yang berani memilih menjadi Malin Kundang seperti dalam cerita pendek A.A. Navis.

Tafsiran A.A. Navis tentang legenda Malin Kundang melalui cerita pendeknya ini, saya kira sesuatu yang sangat tepat untuk menggambarkan situasi kultural kita dewasa ini. Situasi kultural yang compang-camping, tanpa akar budaya, penuh dengan paradok, serta tercabik-cabik akibat tarik-menarik antara keinginan untuk melanjutkan tradisi yang diwarisi dengan budaya massa yang digerakkan oleh kekuatan industri-kapitalisme dengan segala kekuatan teknologinya. Malin Kundang yang ingin digambarkan A.A. Navis, adalah Malin Kundang yang tanpa sabar telah melakukan penyebrangan kultural dari wilayah tradisi kepada budaya massa dengan sebuah pertanggungjawaban kultural.

Beberapa dasawarsa terakhir dalam kehidupan kebudayaan kita, memang telah terjadi migrasi budaya besar-besaran. Telah terjadi perantauan yang jauh dengan meninggalkan kampung halamannya sendiri. Banyak pendukung kebudayaan tradisi dari berbagai etnik di Indonesia, yang bermigrasi ke kota-kota sebagai rantau yang menjadi basis pertumbuhan dari budaya massa tersebut. Sekarang pun kampung-kampung telah dirambah pula oleh budaya massa tersebut. Banyak perantau



yang pulang, dan menularkannya, baik secara langsung maupun melalui teknologi yang makin canggih. Sayangnya tak banyak yang mau menjadi Malin Kundang seperti yang digambarkan A.A. Navis, yang memiliki keberanian untuk mengutuki dirinya sendiri, sebagai sebuah pertanggungjawaban kultural. Kita lebih senang menyalahkan orang lain, sehingga terhindar dari perasaan berdosa.

MEMBANGUN KONSEP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEBUDAYAAN UNTUK MEMBERANTAS KORUPSI TANTANGAN KITA UNTUK MENGEMBALIKAN HARKAT DAN MARTABAT BANGSA

Oleh: **Emmy Hafild**

Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kongres Kebudayaan V yang terhormat,

Alangkah senangnya saya mendapat tempat terhormat untuk berbicara di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, orang-orang ternama, ahli kebudayaan dari seluruh pelosok negeri. Sebetulnya, saya merasa rendah diri berhadapan dengan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian karena siapalah saya, hanya seorang aktivis yang lantang berbicara, tetapi tanpa pengetahuan yang mendalam tentang kebudayaan. Oleh karena itu, sejak pertama kali saya diundang untuk turut memberikan sumbangan pada kongres ini saya berkecil hati. Akan tetapi dalam beberapa minggu ini, banyak pihak mendorong saya untuk tampil dan berbicara di depan Kongres ini karena korupsi adalah masalah kita dan ini harus dibahas dalam kongres kebudayaan. Oleh karena itulah saya memberanikan diri untuk tampil dan berbicara di depan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Hadirin yang saya hormati,

Indonesia adalah salah satu dari negara-negara yang mempunyai tingkat kematian bayi dan ibu tertinggi di dunia, yang tingkat pendidikannya rendah dan yang pelayanan umumnya rendah. Tingkat *Human Development Index* (HDI) Indonesia memang sudah termasuk dalam kelompok negara menengah, namun pada garis yang paling bawah, dan cenderung menurun, dan tingkat HDI kita lebih rendah dari pada Vietnam, Malaysia dan Philipina. Hampir separuh rakyat Indonesia hidup hanya dengan US \$ 2 per hari, dan hampir 20 % rakyatnya hidup hanya dengan US \$ 1 per hari.¹

¹ Salah satu indikator kemiskinan yang dibuat oleh UNDP adalah penghasilan US \$ 2 dan US \$ 1 per hari.

Dari segi kualitas lingkungan hidup, Indonesia adalah salah satu dari negara-negara yang laju kerusakan hutannya, kerusakan terumbu karangnya, kepunahan keanekaragaman hayatinya, polusi airnya dan erosi tanahnya yang tertinggi di dunia. Negeri ini, dimana dahulu tempat paru-paru dunia berada, dimana sungai- sungai terpanjang dan terlebar (di luar Yangtze, Gangga, Mekhong dan Nil) berada, rakyatnya sulit mendapatkan air bersih, Indonesia yang indah nan rupawan, kota-kotanya adalah yang paling terpolusi di dunia, yang membunuh anak-anak balitanya. Jakarta adalah kota terpolusi nomor tiga di dunia². Alangkah sedihnya, negeri ini, yang dulu dipuja oleh para pujangga kita sebagai zamrud khatulistiwa, gemah ripah loh jinawi, negeri subur yang apabila tongkat dilemparkan akan tumbuh, mengalami krisis lingkungan hidup kekeringan dan kebakaran di musim kering, banjir dan longsor di musim hujan.

Mengapa kita jatuh terpuruk di mata negara-negara di dunia, negara yang kaya akan sumber daya alam, setelah pembangunan yang demikian kencang selama hampir 40 tahun? Kalau negara-negara Eropa kehilangan keanekaragaman hayatinya pada awal industrialisasinya, namun dapat menghasilkan teknologi, infra struktur serta sumber daya manusia yang meningkat setiap generasi, maka mengapa kita tidak dapat menghasilkan hal

yang sama? Mengapa sumber daya alam yang dikuras, yang katanya untuk menghapus kemiskinan, belum memberikan hasil yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan mengangkat kita dari keterpurukan?

Jawabannya adalah satu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, yaitu KARENA KORUPSI. Oleh karena itu, maka ijinlah saya, dalam Kongres Kebudayaan yang terhormat ini, untuk memfokuskan diri berbicara masalah korupsi.

² Pembunuh anak-anak Balita di Indonesia adalah muntaber dan ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas), ini disebabkan oleh air kotor dan kualitas udara yang buruk.

Hadirin yang terhormat,

Untuk masalah korupsi, kita adalah salah satu dari negara dan bangsa yang paling korup dari 133 negara di dunia. Sejak pertama kali Indeks Persepsi Korupsi diperkenalkan oleh Transparansi Internasional tahun 1995, nilai IPK Indonesia tidak pernah melebihi angka 3, dari rentang nilai 1-10, dimana angka 10 menunjukkan negara paling bersih dari korupsi. Bahkan sejak tahun 1998, nilai kita tidak pernah melebihi 2, dan selama 4 tahun terakhir secara konsisten berada di bawah angka 2.

Tidak berbeda dengan tahun lalu, nilai Indeks Perspesi Korupsi Indonesia tahun ini masih sama yaitu 1,9, ranking ke 122 dari 133 negara yang disurvei. Ranking pertama diduduki oleh Finlandia dengan nilai 9,7.³ Bersama Kenya, Indoensia adalah negara paling korup nomor 6 dari 133 negara, dibanding dengan tahun 2002 dimana Indonesia merupakan negara paling korup nomor 4 dari 102 negara.⁴ Kecuali Myanmar, diantara negara ASEAN yang disurvei, Indonesia merupakan negara terkorp. Sementara untuk negara-negara di Asia yang survei, hanya Bangladesh dan Myanmar yang lebih korup dari Indonesia.

Sedihnya lagi, nilai IPK kita ternyata lebih rendah dari negara-negara tetangga seperti Papua New Guinea (2,1), Vietnam (2,4), Filipina (2,5), dan Malaysia (5,2) serta Singapura (9,4). Negara-negara yang mempunyai IPK lebih buruk dari Indoensia adalah Angola, Azerbaijan, Kamerun, Georgia, Tajikistan, Paraguay, Haiti, Nigeria dan Bangladesh. Sementara lima negara terbaik adalah Finlandia (9,7), Islandia (9,6), Denmark (9,5), Selandia Baru (9,5) dan Singapura (9,4).

Tabel 1 menunjukkan nilai IPK kita dari sejak tahun 1998, yang menunjukkan penurunan dari 2,00 menjadi 1,7 dan persisten di nilai 1,9 sejak tiga tahun terakhir. Bandingkan misalnya Malaysia, yang pada tahun 2002 nilai IPKnya masih 4,9, sekarang pada tahun 2003 nilai IPKnya meningkat secara signifikan menjadi 5,2. Ini merupakan hal yang sangat ironis, mengingat reformasi kita basisnya adalah penghapusan KKN.

³ Nilai IPK Indonesia tahun 2003 ini diambil dari 13 survei independen yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei internasional, dimana nilai terendah adalah 0,7 dan nilai tertinggi adalah 2,9 dengan standar deviasi 0,5

⁴ Kenaikan ranking dari nomor 4 menjadi nomor 6 bukanlah karena perbaikan nilai, tetapi karena penambahan jumlah negara yang disurvei.

Tabel 1. Nilai IPK Indonesia dari Tahun 1995 sampai 2003

Tahun	Ranking	Nilai IPK
1998	Nomor 80 dari 85 negara	2,00
1999	Nomor 96 dari 98 negara	1,7
2000	Nomor 85 dari 90 negara	1,7
2001	Nomor 88 dari 91 negara	1,9
2002	Nomor 96 dari 102 negara	1,9
2003	Nomor 122 dari 133 negara	1,9

Sumber : Transparency International, Corruption Perception Index 1998-2003

Hadiran yang saya hormati,

Setelah 20 tahun berkecimpung dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup kita dari kehancuran, dan menemukan bahwa akar permasalahannya adalah korupsi, maka saya berpaling pada upaya memberantas korupsi di Indonesia dan terlibat dalam mendirikan organisasi anti korupsi di Indonesia, yaitu Transparency International Indonesia. Dalam upaya memberantas korupsi ini, maka organisasi kami lebih konsentrasi pada pembangunan sistem untuk mencegah korupsi. Dalam upaya membangun sistem inilah, kami bekerjasama dengan antara lain dua Bupati, yaitu Tanah Datar dan Solok. Aya katakan Bupati, karena Bupatiyalah yang mengambil inisiatif, dan berupaya agar inisiatif tersebut ditangkap dan diterima oleh stafnya.

Ternyata sistem tidak dapat dibentuk dalam kehampaan. Dia bertumpu pada nilai-nilai yang dianut masyarakat. Tanpa nilai yang mendukung, maka sebaik apapun sistem tersebut, tidak akan dapat secara efektif memberantas korupsi. Dalam proses sosialisasi sistem tersebut, jelas ada persepsi masyarakat yang menghambat pejabat untuk berperilaku bersih, di luar masalah gaji yang sangat rendah. Permintaan sumbangan, harapan orang sekampung, ninik mamak, dsb, adalah suatu hal yang nyata dan sulit sekali untuk ditolak. Bagaimana pejabat hanya mengandalkan gaji apabila perilaku masyarakat terhadap dia seperti itu?.

Kemudian saya melihat sekeliling saya, ternyata saya menemukan bahwa nilai-nilai yang ada di sekitar kita tidak

mendukung seseorang untuk berperilaku bersih dari korupsi. Lalu dengan gampang, orang-orang yang mengambil keuntungan dari situasi korup mengatakan bahwa korupsi sulit untuk diberantas di Indonesia karena itu sudah merupakan budaya. Banyak pula pejabat yang berpendapat bahwa perilaku korupsi adalah cara Asia, *It is the Asian way to do business, it is part of the culture*. Apakah itu benar?

Apakah benar bahwa budaya kita sangat permisif terhadap korupsi?

Apakah itu merupakan budaya apabila masyarakat mengolok-olok seorang pejabat yang bersih, yang tidak mempunyai rumah mewah, yang tidak mempunyai mobil mewah, yang tidak mempunyai tanah ber hektar-hektar, yang tidak dapat menyekolahkan anaknya ke luar negeri, yang tidak dapat menyantuni keluarga besarnya, karena dia tidak korupsi?

Apakah itu budaya, apabila masyarakat bangga dengan pejabat yang memberikan sumbangan besar untuk pembangunan masjid, kepada gereja, sumbangan kepada anak yatim piatu, sumbangan kepada kelompok pemuda, organisasi kemasyarakatan, yang selalu bermurah hati dan memberikan sumbangan kepada setiap kelompok yang meminta kepadanya?

Apakah itu budaya, apabila masyarakat tidak bertanya, mengapa si Fulan, yang pejabat itu, demikian murah hatinya, dan tidak pernah bertanya darimana datangnya uang sumbangan yang diberikannya padahal kita tahu gajinya sebagai seorang pejabat tidak memungkinkan dia memberikan uang sebanyak itu?

Apakah itu budaya, apabila sanak keluarga pejabat mengatakan sorang pejabat sombong, lupa kacang akan kulitnya, apabila beliau tidak memasukan anak kemenakannya sebagai pegawai, tidak mau memberikan proyek, dan tidak mampu untuk menyantuni keluarga besarnya?

Apakah itu budaya, apabila seorang gubernur lebih mementingkan pembangunan pagar untuk mengelilingi taman, membangun patung, dengan biaya milyaran rupiah padahal harga sebenarnya jauh lebih rendah, padahal jalan banyak yang rusak dan fasilitas umum berada pada kondisi yang sangat menyedihkan, dan kita diam saja?

Apakah itu budaya, apabila kita tidak berbuat apa-apa, pada saat atap sekolah runtuh dan membunuh anak-anak SD yang sedang belajar di bawahnya, padahal pejabat pemerintah dan anggota DPR berseliweran dengan mobil mewah, dan kita diam saja?

Apakah itu budaya, apabila pejabat di bagian pendidikan, tega untuk mengkorupsi biaya pembuatan buku sekolah, sehingga buku tersebut mutunya sangat buruk, tega mengkorupsi biaya pembangunan sekolah sehingga kualitas gedung sekolah sangat buruk, dan kita mendiampkannya?

Apakah itu budaya, apabila pejabat di dinas sosial, tega mengkorupsi bantuan untuk korban gempa, korban banjir, untuk pengungsi, bantuan untuk rakyat miskin, dan kita mendiampkannya?

Apakah itu budaya, apabila pejabat di bagian keagamaan tega memanfaatkan fasilitas dan mendapatkan keuntungan pribadi dari pengelolaan ongkos naik haji dan zakat dan kita mendiampkannya?

Apakah itu budaya, apabila pejabat naik haji dengan biaya pemerintah, dari uang pajak rakyat, dan kita menganggap itu normal?

Apakah itu budaya, apabila seseorang yang kecurian, atau dirampok, atau kehilangan barang, atau tabrakan, harus membayar suap kepada polisi agar kasusnya disidik dan pelakunya ditangkap, dan kita mendiampkannya?

Apakah itu budaya, apabila rakyat harus membayar hakim dan panitera agar kasusnya dimenangkan di pengadilan dan kita mendiampkannya?

Apakah itu budaya, apabila seorang yang dipidana 3 tahun karena kasus korupsi dan masih pejabat Ketua DPR dan mencalonkan diri bahkan didukung oleh sebagian masyarakat untuk menjadi Presiden negara ini?

Apakah korupsi itu suatu keharusan, agar status sosial naik karena ada rumah bagus, ada mobil, ada telepon genggam, pakai jas? Atau korupsi suatu keharusan agar anak dapat sekolah di sekolah yang bagus?

A.A Gym bertanya: "Masyallah, bagaimna negara kita yang merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia dapat menjadi salah satu negara yang paling korup di dunia? Bukankah Islam mengajarkan supaya pejabat tidak korupsi?"

Kalau memang benar mayoritas agama kita adalah Islam, mengapa seorang pejabat yang sedang berpuasa, sanggup menerima amplop dari pengusaha yang meminta fasilitasnya?

Hadirin yang terhormat,

Saya tidak tahu jawaban atas semua pertanyaan tersebut di atas, mungkin karena saya bukan seorang budayawan. Tetapi saya tahu betul dari pengalaman saya di lapangan, bahwa nilai-nilai yang kita anut tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, malah cenderung melanggengkan korupsi. Keadaan ini membuat saya bertanya-tanya terus, kepada setiap orang, dan mencoba mencari jawabannya.

Saya bertanya kepada Pak taufik Abdullah, dan beliau menyatakan bahwa masalah pejabat berperilaku KKN dan Masyarakat menganggap itu normal, adalah karena konsep kenegaraan kita seperti konsep keluarga. Beliau mengatakan bahwa konsep bernegara itu tidak dapat didekati dengan prinsip kekeluargaan, tetapi harus dengan prinsip hukum. Sehingga menurut beliau, seorang pejabat harus dipisahkan dari konsep kekeluargaan dan harapan-harapan keluarga terhadap dia harus dibatasi.

Saya bertanya pada pak Syafei Maarif, Pak Amin Abdullah dan Masdar Mas'udi soal ajaran Islam mengenai anti korupsi, dan mereka semua mengatakan bahwa Islam mengajarkan tentang itu. Pak Amin Abdullah dai Univ. Muhammadiyah Yogyakarta mengatakan kita memerlukan pendidikan kritis mengenai hal ini karena saat ini ada dualisme kelslaman di masyarakat kita, yang diritualkan (sholat, sampai zakat), tetapi ada ajaran yang tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya soal korupsi ini.

Barangkali itu benar, lalu kemudian bagaimana konsep, kebijakan dan strategi kebudayaan menjawab itu semua? Apakah ada bangsa di Asia yang sudah melakukannya? Marilah kita lihat IPK yang dikeluarkan TI, apakah ada negara Asia yang masuk peringkat tertinggi bebas korupsi? Ternyata ada, Singapura dan Hongkong adalah dua negara Asia yang dianggap paling bersih dari Korupsi. Hongkong 20 tahun yang lalu, adalah salah satu negara yang paling korup di dunia, dan sekarang termasuk 15 negara di dunia yang paling bersih dari korupsi. Demikian pula Singapura, tetangga terdekat kita, 25

tahun yang lalu juga termasuk negara yang paling korup, sekarang termasuk lima besar negara terbersih di dunia.

Barangkali, argumentasi bahwa korupsi merupakan fenomena Asia dan bahwa itu merupakan budaya Asia hanyalah cara pejabat dan politisi untuk mengelak dari tanggungjawab untuk memberantas korupsi. Barangkali orang-orang yang beranggapan seperti ini adalah orang yang mendukung status quo, yang tidak mau ada perubahan, karena dia diuntungkan oleh situasi ini.

Hadirin yang terhormat,

Tantangan bagi konsep, kebijakan dan strategi kebudayaan kita untuk 20 tahun ke depan adalah :

Bagaimana agar pejabat yang korup di anggap rendah oleh masyarakat, dihina dan diasingkan dari pergaulan.

Bagaimana gerakan budaya dapat menyebabkan orang malu apabila dia sebagai pejabat hidup mewah, mempunyai harta benda yang di dapat dari hasil KKN.

Bagaimana agar masyarakat tidak selalu meminta sumbangan kepada pejabat atau kalau mendapat sumbangan, bertanya asal sumbangan tersebut darimana.

Bagaimana agar masyarakat tidak mengharapkan pejabat untuk memasukan anak kemenakannya sebagai pegawai, sebagai rekanan, atau sebagai kontraktor.

Bagaimana agar masyarakat menolak apabila dia dimintai suap oleh polisi atau pejabat pengadilan, atau pejabat apa saja.

Bagaimana agar masyarakat memperjuangkan hak-haknya sebagai pembayar pajak, dan mempertanyakan pengeluaran pemerintah dari setiap sen pajak yang dikumpulkan dari rakyat?

Bagaimana konsep dan strategi kebudayaan dapat memecahkan rasa frustrasi dan apatisme masyarakat sehingga mereka melawan terhadap korupsi dan ketidakadilan yang diterimanya akibat korupsi tersebut?

Bagaimana konsep, kebijakan dan strategi kebudayaan dapat menciptakan persepsi baru di masyarakat bahwa pejabat yang jujur dan tidak korup adalah pejabat yang terhormat dan mendapatkan status sosial tinggi di masyarakat.

Bagaimana memperkenalkan nilai-nilai integritas, kredibilitas, tanggungjawab (akuntabilitas), konsep konflik kepentingan, keterbukaan, pada masyarakat sehingga mereka memilih

pemimpin yang mempunyai karakter ini sebagai anggota DPR, DPRD dan Presiden?

Hadirin yang terhormat,

Memberantas korupsi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, apalagi oleh LSM saja. Korupsi hanya dapat diberantas kalau semua elemen masyarakat bekerja sama bergandengan tangan. Baik Pemerintah, legislatif, masyarakat sipil, media massa, yudikatif, badan-badan pengawas, kalangan bisnis, secara bersama-sama bergerak untuk menciptakan lingkaran-lingkaran kebajikan untuk mencegah korupsi. Elemen-elemen ini merupakan pilar-pilar yang tertumpu pada nilai-nilai yang dianut masyarakat sebagai hasil dari kesadaran yang tinggi bahwa korupsi harus dihapus. Pilar-pilar ini kemudian menjunjung atap yaitu harkat dan martabat bangsa (integritas nasional) yang membawa bangsa ini menuju pembangunan yang berkelanjutan, kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang berlandaskan pada hukum dan peningkatan kualitas kehidupan rakyat. Seperti yang digambarkan dalam sebuah kuil Yunani di gambar 1.

Kalangan bisnis yang tergabung dalam KADIN telah mencanangkan ikrar untuk tidak memberi, menawarkan atau menerima suap, walaupun banyak pihak yang skeptis terhadap efektifitasnya. NU-Muhammadiyah sudah mencanangkan gerakan anti korupsi, dan berupaya membangun kesadaran internal bahwa korupsi itu melanggar Islam. LSM anti korupsi sudah bermunculan dimana-mana. Kelompok rakyat miskin telah memulai gerakan melawan korupsi.

Sekarang, bagaimana dengan kalangan budayawan?

Barangkali gerakan kebudayaan seperti yang dilakukan oleh Pujangga Baru tahun 30an, yang dapat mengubah pandangan-pandangan masyarakat dapat ditiru. Pujangga baru dengan karyanya Siti Nurbaya, Layar Terkembang, dll., merubah pandangan masyarakat secara drastis terhadap kawin paksa atau percintaan antar suku bangsa, dan ikut membangun persepsi terhadap bangsa Indonesia.

Apakah mungkin pujangga-pujangga Indonesia saat ini, dapat secara bersama-sama menciptakan karya-karya yang mempunyai pengaruh sehingga dapat mengubah persepsi dan

pandangan masyarakat terhadap korupsi?

Kalau Pujangga Baru menciptakan kara-karya sastra monumental berupa buku dan puisi, maka mungkin pujangga-pujangga sekarang harus memikirkan cara lain yang lebih aktual dan realistis untuk berupaya mempengaruhi nilai masyarakat. Misalnya, janganlah budaya massal yang diperkenalkan MTV dihujat dan dijauhi, karena itu adalah realitas kita sekarang. Tetapi tantangannya adalah bagaimana memanfaatkan nilai-nilai baru yang penting sebagai bagian dari mempersiapkan bangsa ini menghadapi gempuran globalisasi.

Gambar 1. Bangunan sistem Harkat dan Martabat Bangsa (Sistem Integritas Nasional) Untuk Memberantas Korupsi.

Pada bulan Desember nanti, Konvensi PBB tentang anti korupsi akan ditanda tangani di Meksiko. Sekarang Konvensi Negara-negara yang tergabung dalam OECD tentang Anti Penyuapan di negara lain telah berlaku efektif. Ini adalah juga globalisasi, yang mau tidak mau harus kita ikuti, kalau kita mau masuk ke dalam kelompok negara-negara yang bermartabat. Kalau tidak, maka kita akan terpuruk, dan terasing dari negara-negara di dunia.

Salah satu usulan saya untuk dikeluarkan dalam kongres ini adalah memperjuangkan Undang-undang Kebebasan Mendapatkan Informasi, yang sekarang sedang dibahas di DPR. Undang-undang ini merupakan mandat TAP MPR VIII/2001, dan ditentang habis-habisan oleh kalangan intelejen. Kolusi antara anggota DPR dan kalangan intelejen dapat membuat undang-undang ini tidak bergigi. Budayawan harus ikut memperjuangkan lolosnya undang-undang ini agar dapat berguna untuk mencerdaskan bangsa dan sekaligus memberantas korupsi.

Kami dari LSM menunggu kerjasama dari para budayawan untuk secara bersama-sama menyingsingkan lengan baju, melawan korupsi.

Bukit Tinggi, 20 Oktober 2003

MENCARI TUNGKU API KE –INDONESIA –AN ?

Oleh: **Garin Nugroho**

Daya hidup kebudayaan seperti layaknya makanan sebagai produk kebudayaan, senantiasa memerlukan tungku nan tiga untuk terus menghidupkannya agar makanan itu hangat dan masak, yakni tungku dengan tiga sendi yang kokoh menyangganya. Demikian juga dengan setiap proses menjadi Indonesia, ia dihidupkan dengan tiga penyangga, yakni pergulatan tentang falsafah, ditegakkan oleh hukum, dan mempunyai daya hidup sosiologis dalam masyarakat. Pada sisi lain, ke tiga sendi itu senantiasa harus memberi hidup pada tiga sendi dari suatu produk kebudayaan, yakni kebudayaan umum (massa, komersial), kebudayaan alternatif (Seni, temuan-temuan, personal), dan kebudayaan klasik, mengandung dimensi kesejarahan.

KASUS 1

Cobalah simak, di Perancis, film-film seni hampir delapan puluh persen dikelola dari pajak tontonan, yang dilindungi mekanismenya oleh hukum. Dana pajak tontonan, tersebut lewat strategi kebudayaan diupayakan untuk membangun dua aspek penting, yakni moment kreasi dan moment apresiasi. Maka dana dari pajak disubsidikan tidak saja kepada para pencipta, namun juga bioskop hingga televisi dan ruang-ruang apresiasi lainnya. Pada sisi lain, strategi kebudayaan untuk film dalam kemasan budaya populer dikelola dalam mekanisme ala kredit Bank, sementara untuk film seni (alternatif) dianggap sebagai modal sosial, yang dipentingkan adalah nilai gunanya, maka ia dijaga

Dengan mendapatkan ruang apresiasi yang juga telah disubsidi, demikian juga dengan daya hidup sinematek yang menyimpan film-film klasik, ia dikelola sebagai modal sosial.

KASUS 2

Cobalah simak juga televisi di Inggris, khususnya BBC. Stasiun ini dananya diambil dari iuran setiap pembeli televisi, Inggris membangun stasiun televisi memulai dengan televisi publik, dan kemudian baru tumbuh televisi swasta. Hal ini berbeda dengan Amerika , yang siarannya ditumbuhkan. Dari pasar, maka kultur

stasiun siaran di Amerika bertumbuh dari televisi swasta, namun untuk menjamin nilai-nilai publik, tumbuhlah kemudian televisi Publik, yang disebut PBS.

KASUS 3

Cobalah simak, program Sesame Street, program boneka Anak-anak di PBS, program ini dikelola berdasar strategi kebudayaan yang menyangkut pendidikan dan pengajaran pada berbagai ketimpangan berdasar riset nasional bangsa Amerika, maka, seri program ini, lima tahun pertama, dimaksud untuk membantu keteringgalan pendidikan **pada kaum kulit hitam** Amerika lewat program boneka Anak khusus untuk membaca dan matematika, dan lima tahun berikutnya untuk masyarakat Spanyol-Amerika.

Contoh-contoh kasus di atas mengajarkan bahwa falsafah negara senantiasa berhubungan dengan konsep hukum dan daya sosiologis produk kebudayaan dalam suatu masyarakat. Maka, Inggris dan Perancis yang cenderung pada hukum kontinental, yang lebih sebagai negara kesejahteraan, pada gilirannya negara harus ikut menjaga nilai-nilai publik (modal sosial) secara sosiologis, lewat perlindungan hukum dan tidak terlepas dari falsafahnya. Untuk itu, strategi kebudayaan dalam pengambilan keputusan politik, senantiasa harus mempresentasikan sendi falsafah dan hukum. Dengan demikian strategi memiliki daya hidup di masyarakat, seperti layaknya film-film Perancis, yang dipasar Perancis sendiri dikalahkan oleh film-film Amerika. Namun, pajak film Amerika lewat strategi kebudayaan menghidupkan moment kreasi dan moment apresiasi film perancis.

Hal di atas berbeda dengan Amerika yang Anglo Saxon, lebih berpijak pada hukum Pasar. Oleh karena itu, sistem hukumnya mestilah yang melindungi pasar yang sehat agar secara sosiologis, produk-produk kebudayaan mampu menumbuhkan masyarakat sipil yang sehat. Maka, sebutlah rating, meski menjadi ukuran penting di televisi, ia terlebih dahulu lewat seleksi sistem hukum dan kode etik sebagai panduan, serta dijaga oleh infraskrutur yang menjadi prasyarat sebuah penyiaran.

Keseluruhan proses di atas tak terlepas dari syara-syarat demokratisasi, entah itu dalam pengambilan keputusan maupun dalam negosiasi serta transparansi modal ekonomi yang digunakan.

Contoh-contoh praktis dan sederhana di atas, seringkali menjadi semacam cermin bagi saya untuk melihat kembali bagaimana ke – Indonesia-an di paska reformasi, khususnya pada produk kebudayaan, lebih khusus lagi pada kesenian. Pada gilirannya melahirkan berbagai pertanyaan :

“ Apakah produk Pemilu dalam semangat reformasi telah melahirkan penentu kebijakan negara yang mampu mengembangkan strategi kebudayaan, suatu strategi yang menjaga agar kebudayaan umum, alternatif dan khusus saling bersinergi serta mampu memiliki daya hidup di masyarakat sekaligus merepresantasikan falsafah bernegara dalam sistem Demokrasi ? “

Dengan kata lain, di tanah tempat Hatta hingga Tan Malaka bersekolah ini, sesungguhnya saya bertanya :

“ Mampukah kita menghidupkan semangat Yamin, Soekarno, Hatta hingga Tan Malaka dalam kebudayaan umum yang dikonsumsi sehari-hari masyarakat, dan kebudayaan alternatif yang senantiasa mempertanyakan dan menemukan dialog, maupun kebudayaan klasik yang mampu menyimpannya dalam semangat sejarah yang hidup yang memberi penghargaan pada proses sejarah? Bukankah ini tungku nan tiga yang memberi Api pada berbagai Aspek kehidupan? Bukankah ini salah satu proses memasak menjadi **Indonesia** ?”

Kebudayaan massa dewasa ini, khususnya di televisi, menurut, saya, kehilangan tungku nan tiga tersebut. Ia hidup dalam penyangga budaya tanpa strategi budaya. Pada gilirannya, Kebudayaan massa hanya menghidupkan dirinya tanpa falsafah dan sistem hukum yang menegakkannya. Ia menjadi kebudayaan massa yang konsumtif dan menjadi alat kekuasaan baru. Ia , seperti layaknya anak teknokapitalis tanpa etika, menjalankan kehidupan dengan serba cepat, banyak, tanpa tujuan serta penegakan hukum. Maka, simaklah di televisi, yang terkenal bukan ketrampilan sepakbola, maupun organisasi sepakbola, serta sistem pertumbuhannya mapun penegakkan etika, apalagi falsafahnya, namun yang lebih dikenal tak lebih dari kuis, hingga kasus kekerasan dan suap. Hal ini paralel dengan politik kita dewasa ini, bukan terkenal karena ketrampilan, penegakan dan dialog falsafah politik, namun pada kekerasan serta kekuatan uang di politik dan massa.

Jika dikembalikan pada proses memasak menjadi Indonesia,

maka saya mengalami kebingungan dengan pertanyaan: Ranah publik dan privat mana yang harus dilindungi negara dan dibebaskan pasar ? Haruskah negara melindungi lewat strategi kebudayaan terhadap produk-produk budaya alternatif dan klasik ? ataukah dibiarkan dalam sistem pasar? Manakah yang cocok berdasar dialog falsafah kita ? Kalaupun pasar, sudahkan sistem pasar seperti Rating memiliki prasyarat intrakstruktur industri pasarnya ?

Oleh karena itu, dibawah ini dengan secara sederhana, saya mencoba menulis beberapa kesimpulan dan saran :

1. Krisis dewasa ini dikarenakan pemimpin dan pelaku politik yang angkuh dengan politik praktisnya, namun kehilangan kemampuan mensinergikan dialog falsafah, penegakan hukum dan daya hidup sosiologis di masyarakat, karena keputusan politik tidak disertai strategi budaya. Ia hanya hidup dalam ekonomisme (meminjam istilah Mubyarto) dan politikisme yang praktis untuk kekuasaan, yang melahirkan konsumerisme dan model-model kekerasan tanpa panduan. Mereka lalu hanya hidup . Dari Indonesia (mengisap) dan tidak menghidupi proses menjadi Indonesia.

Oleh karena itu, kita harus mencari pemimpin dan pelaku politik yang melakukan kerja keputusan politik dalam konsep, kebijakan dan strategi budaya. Dalam padanan sederhana, mencari pemimpin yang mampu menghidupkan semangat Hatta, Sjahrir, Soekarno hingga Tan Malaka dalam kebudayaan umum, klasik, maupun seni dalam dialog Demokratisasi.

Lebih jauh lagi, kita harus menumbuhkan pengelola budaya yang memahami proses tawar menawar dalam politik sekaligus memahami .Strategi kebudayaan yang mengandung unsur strategi politik, ekonomi dan peta produk kebudayaan itu sendiri.

2. Kebudayaan massa khususnya oleh televisi mencerminkan roda kehidupan sehari-hari yang dikelola dalam teknokapitalis tanpa etika yang melahirkan budaya serba cepat, banyak konsumtif dan penuh kekerasan sekaligus kehilangan panduan, maka kebudayaan massa mematikan kebudayaan. Alternatif dan klasik. Sementara pada kebudayaan umum kehilangan Nilai

produktifitasnya dalam proses menjadi Indonesia, namun lebih pada konsumtifnya.

Teknokapitalis televisi dikonstruksi untuk memanfaatkan tiap detik waktu senggang dan produktif kehidupan masyarakat sehari-hari, maka televisi memberi bias besar kepada seluruh aspek kehidupan berbangsa.

Suatu strategi komunikasi berbangsa yang melawan bentuk-bentuk Kebudayaan massa yang konsumtif dan dipenuhi model-model kekerasan serta kekuasaan dan monokultur haruslah dilakukan. Maka, diperlukan tekanan politik agar mampu melahirkan pelaku politik yang mampu melahirkan strategi politik Komunikasi yang melahirkan masyarakat yang produktif, multikultur dan Demokratis.

3. Seluruhnya proses menjadi Indonesia pasca reformasi yang dipenuhi khaos, Dialog, tambal sulam, dan pergulatan selayaknya dilihat kembali Dalam tungku tiga kaki, yakni sinergi dialog falsafah, hukum dan Sosiologisnya.

Untuk mengakhiri catatan yang sederhana ini, selayaknya di tanah tempat kongres ini, kita menghidupkan kembali pergulatan Sjahrir, Hatta hingga Tan Malaka, yang hidup dari tanah ini dan menjadi serta mengalami ke Indonesia-an dalam proses yang tidak pernah mati didialogkan hingga Kongres ini berlangsung.

Garin Nugroho
Pekerja dan pengamat Komunikasi.

APA GERANGAN “INDONESIA”?

Oleh: **Goenawan Mohamad**

Untuk Kongres Kebudayaan, 20 Oktober 2003,
di Bukittinggi.

1

Hari ini kita ingat apa yang pernah dan masih terus terjadi — di Papua, Ambon, Poso, Kalimantan Barat, Bali, Aceh, Jakarta: kekerasan, konflik, permusuhan antarkaum, teror, juga hasrat untuk memisahkan diri. Dalam keadaan itu, kita memang terpaksa bertanya, dan patut bertanya: apa gerakan “Indonesia”?

Bertahun-tahun lamanya “Indonesia” adalah sebuah nama yang menyorankan sebuah batasan — baik batasan makna ataupun lebih spesifik lagi, batasan geografis. Bertahun-tahun lamanya batasan itu telah menandai sesuatu yang seakan-akan lahir dan tumbuh secara alamiah. Seakan-akan “Indonesia” adalah sebuah kehadiran “ontologis”.

Dalam proses sejarah itu, apa yang kini disebut dengan berderap sebagai “NKRI” berangsur-angsur tak mengenal lagi genesisnya, bagaikan kacang yang lupa akan lanjarannya. “NKRI” tak dianggap lagi sebagai sebuah produk dari “kebetulan sejarah”. Kini kita tahu bahwa Bengkulu, dan bukan Brunai, Singkawang, dan bukan Singapura, yang merupakan bagian dari “Indonesia”. Tapi kini kita tak lagi ingat, atau tak mau ingat, bahwa hal itu terjadi semata-mata karena Brunai dan Singapura pada tahun 1945 bukanlah bekas jajahan Belanda, melainkan jajahan Inggris. “Aksiden” atau “kebetulan” sejarah itulah akhirnya yang ikut membentuk “Indonesia” sebagaimana ia kita fahami sekarang. Maka kita pun bernyanyi, bahwa Indonesia adalah “pusaka abadi yang jaya”. Maka kita pun bernyanyi seakan-akan “Indonesia” “sejak dulu kala dipuja-puja bangsa”. Dengan kata lain, kita membayangkan, bahwa “Indonesia”, sebagaimana yang kita fahami sekarang, lahir nun di zaman jauh yang tak lagi teringat, dan akan berakhir nun di masa kelak yang tak terlihat.

Bennedict Anderson, yang karyanya tentang nasionalisme, *Imagined Communities*, jadi buah bibir di mana-mana, mengatakan bahwa “*the magic of nationalism*” atau tuahnya

nasionalisme-lah, yang telah mengubah “kebetulan sejarah” itu menjadi seakan-akan suatu “takdir”, atau *destiny*.

Tapi sebagaimana hal-hal lain, “tuah nasionalisme” itu juga bisa susut, dan memang kini berkurang dayanya. Orang-orang tua acapkali menyalahkan susutnya tuah nasionalisme itu ke arah generasi muda. Tapi saya kira mereka khilaf.

2

Pada hemat saya, ada lima perkara yang menyebabkan “Indonesia” sulit dibayangkan lagi sebagai sebuah entitas yang lahir dan tumbuh secara alamiah, sebagai sebuah “takdir” yang tak akan lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan.

Yang *pertama* dari lima perkara itu adalah pengambil-alihan Timor Timur secara militer. Pengambil-alihan atau *Anschluß* ini – yang menimbulkan perlawanan yang kian lama kian meluas dari rakyat Timor Timur, juga sebuah tindakan bersenjata yang tak diakui oleh PBB — telah menampilkan sebuah cerita lain tentang apa arti “Indonesia”.

Cerita itu berbeda dengan konstruksi Indonesia yang disiapkan oleh Bung Hatta dan teman-temannya dalam *Indonesische Vereeniging* sejak 8 Februari 1925, juga oleh sejumlah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta, dan akhirnya oleh para pemimpin pergerakan nasional di bulan Juli 1945.

Cerita terbentuknya “Indonesia” ala Hatta dan kawan-kawan menggambarkan apa yang mungkin bisa disebut sebagai “momen ethis” nasionalisme. “Momen ethis” itu adalah suatu saat ketika satu atau sekelompok manusia menerima, menjelang, dan menyalami manusia yang-berbeda, ketika mereka mengulurkan tangan dan menjabat dunia yang-lain. Saya kira itulah yang menyebabkan nasionalisme yang dirintis Sukarno, Hatta dan generasinya mengandung sinar dan getar universalitas; dengan kata lain, sebuah nasionalisme yang terbuka, sebuah nasionalisme yang tak mengibarkan ethos tentang “keaslian” yang “murni” dalam hal “darah dan tanah” (*Blut und Bode*), seperti nasionalismenya kaum Nazi di Jerman atau kaum Fascist di Jepang masa itu.

Memang tak jarang nasionalisme punya kecenderungan yang patologis. Tak jarang nasionalisme berusaha membentuk

sebuah bangsa dengan membayangkan sebuah komunitas bagaikan sebuah karya arsitektural yang agung dan rapi. Nasionalisme semacam ini, yang kita lihat dalam gagasan Hitler di Jerman, akan cenderung menyingkirkan apa yang “tak pas”, yang “tak cocok”, yang “ganjil”, dan yang “tak murni”, sebagai cela dan najis.

Dalam ekspresinya yang lain, nasionalisme yang tertutup seperti itu menyatakan dirinya dalam dua macam alegori. Alegori pertama adalah alegori “sapu lidi”. Alegori kedua adalah alegori “Taman Mini”.

Mereka yang menghasratkan bangsa yang bersatu padu bagaikan seikat sapu lidi umumnya menganggap bahwa dengan integritas seperti itulah sebuah bangsa jadi kompak dan kuat. Yang sering dilupakan ialah bahwa alegori ini sebenarnya mencerminkan sebuah imajinasi totaliter; sebab dalam sapu lidi, setiap bilah lidi nyaris sama dengan bilah-bilah lidi yang lain — dan keseragaman itu ditegaskan dengan kekuatan yang represif yang melingkarinya dari luar. Usaha untuk memaksakan adanya “asas tunggal” (yakni Pancasila) dalam pelbagai organisasi sosial dan politik adalah contoh yang bertolak dari alegori sapu lidi ini. Bung Hatta akan menyebutnya bukan “persatuan”, melainkan “per-sate-an” — dan di mata kita terbayang sederet daging yang dipotong seukuran dan ditusuk pada sebatang bambu yang lurus dan tajam.

Adapun alegori “Taman Mini” memang tak memuja keseragaman, dan tampaknya merayakan keberagaman. Namun seperti kita lihat dalam “Taman Mini Indonesia Indah”, keberagaman di sana adalah kebhinekaaan yang telah membeku. Ia menjelma menjadi identitas, khususnya identitas budaya. Dengan melihat unsur-unsur bangsa dalam identitas budaya, dilupakanlah masalah kelas dan ekspresi sosiologis yang lain. Dan, dengan identitas yang dibekukan dan dibakukan itu, tak diakui pula kontradiksi-diri, gerak mengalir dan memecah (“fluidity”) dan perubahan — yang sebenarnya merupakan proses “mem-beda”.

Tiap, identitas budaya yang disahkan dengan sendirinya membungkam yang lain, yang dianggap tak sah. Dengan alegori “Taman Mini”, nasionalisme ini hanya mengakui apa yang disebut oleh Ki Hadjar Dewantara sebagai “puncak-puncak kebudayaan daerah”. Yang dilupakan Ki Hadjar dan para

pengikut nasionalisme ini ialah bahwa untuk menentukan mana yang “puncak” dan bukan “puncak” sebenarnya terjadi proses, bahkan intervensi, kekuasaan. Akhirnya represi. Ketika kita bicara soal Jawa Tengah (atau “Jawa”) kita cenderung membungkam apa yang berbeda di Banyumas; ketika kita bicara soal Jawa Barat (atau “Sunda”) kita mengabaikan apa yang lain di Cirebon; ketika kita bicara soal Sumatra Barat (artinya “Minang”), kita melupakan apa yang tak sama di Mentawai. Dan di daerah-daerah budaya yang dibayangkan “Taman Mini” itu, kita hapus dari catatan kita apa yang tumbuh dari kalangan keturunan Cina, Arab, atau pun India, misalnya, seakan-akan mereka si “asing” yang hinggap tanpa jejak.

Singkat kata, ada laku represif di kedua alegori yang saya sebut tadi. Laku represif paling tajam kemudian berlangsung ketika pemerintahan “Orde Baru” mengambil-alih Timor Timur. Dengan darah dan besi, sebuah “Indonesia” baru pun terjadi, yang mengubah “Indonesia” yang dibentuk di tahun 1945. Dari sini orang seakan-akan diingatkan, bahwa ternyata “Indonesia” bisa berarti hanya sebuah komunitas yang dipaksakan, dan bukan yang digagas (“*imagined*”), bahwa “Indonesia” tak menemukan wujudnya melalui “momen *ethis*” nasionalisme, melainkan dengan bedil dan bui.

Tak mengherankan bila kemudian muncul perkara *kedua*. Yakni: dorongan memisahkan diri dari Republik. Saya pernah berkunjung ke sebuah dusun di sebuah pulau kecil beberapa ratus kilometer dari Jayapura. Di desa Tablanusa itu, seorang lelaki yang pernah dicurigai sebagai pendukung OPM dan disiksa oleh sepasukan militer mengatakan: “Saya sebenarnya ingin menjadi orang Indonesia, tapi TNI tak memperkenankannya.” Saya pernah berjumpa dengan seorang pemuda Timor Timur yang belajar di Amerika dan selalu ikut dalam pertemuan silaturahmi mahasiswa Indonesia, dan ia mengatakan: “Seandainya tak ada si Jenderal....(ia sebut sebuah nama), kami akan dengan berbahagia jadi satu dengan Indonesia”. Saya duga, ungkapan yang mirip akan dapat didengar di Aceh sekarang. Demikianlah, apa yang terdengar ialah hilangnya sebuah “Indonesia” yang ikhlas, dan munculnya sebuah “Indonesia” yang dipermak. Semakin kuat dan acap kecenderungan sentrifugal itu, semakin oleng pula gambaran “Indonesia” sebagai sebuah “takdir” yang pernah menjelma dari

tuahnya nasionalisme.

Perkara *ketiga* yang menyebabkan “Indonesia” tak mudah dibayangkan lagi sebagai sebuah entitas yang alamiah ialah metode pemerintahan “Orde Baru” dalam merencanakan dan membangun ekonomi nasional. Tak ada yang “alamiah” di sini. Yang ada semata-mata apa yang dikonstruksikan dari “luar”, tepatnya dari atas. Seorang pakar dari Universitas Andalas menyebutnya sebagai “*supply-driven development*”; artinya, pemerintah memiliki uang, punya staf, dan pembangunan dilaksanakan tanpa konsultasi dengan masyarakat yang hidup di dekat akar padi.

Dalam pada itu, keharusan untuk menjadi tetap efektif telah mendorong lahirnya standarisasi dalam manajemen – dan dalam hasrat itu terjadilah penyeragaman dari atas. Penyeragaman administrasi desa di tahun 1979, misalnya, merupakan contoh yang mencolok dari dorongan itu. Pada gilirannya, reaksi terhadap penyeragaman yang berlebihan itulah tumbuh kehendak untuk melepaskan diri dari tekanan itu – sesuatu yang kini tampak arus baliknya, sehingga tercermin juga dalam dunia sastra, yang oleh Agus Sardjono, dalam makalah yang akan dibawakannya nanti, dilihat sebagai membawakan “daerah” sebagai “ideologi.”

Dengan uraian tadi, saya tak bermaksud mengesankan, bahwa kecenderungan sentrifugal di Indonesia ini hanya tumbuh sebagai reaksi atas terjadinya “Indonesia” yang sentralistik, dengan sebuah Negara yang kukuh kekar. Saya ingin juga menunjukkan, sebagai perkara *keempat* yang ingin saya uraikan, bahwa ikatan kesetiaan kepada kesatu-bangsaan dapat kendur atau lepas karena faktor di luar Negara.

Mari kita ingat tentang apa yang terjadi di Pulau Nunukan, Kalimantan Timur, beberapa bulan yang lalu. Sekitar 25 ribu warga negara, orang sebangsa, menjadi orang usiran, yang terdampar, lapar, patah harapan, tergeletak di tepi-tepi jalan. Mereka tak ada tempat untuk menetap, hanya ada tempat untuk pergi. Mereka adalah pencari kerja di negeri seberang yang kemudian diusir dari negeri itu. Mereka hendak pulang. Tapi ke mana mereka akan pulang? Nunukan, wilayah ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia’, sama-sama tertutup bagi mereka seperti halnya Sabah, wilayah Kerajaan Malaysia. Di sini, di kancan 25 ribu warga negara itu, tak ada bendera yang

dikibarkan dengan gagah, tak ada lagu kebangsaan yang dinyanyikan dengan khushuk. Yang ada hanyalah penawaran, permintaan dan kecemasan.

Dalam arti itu, mereka adalah bagian dari globalisasi, keadaan yang kini sering disebut itu, keadaan ketika seakan-akan perbatasan nasional raib bersama raibnya kesetiaan kepada sebuah negeri “tempat lahir dibesarkan bunda”. Dalam arti itu, — meskipun dengan nasib yang berbeda — mereka sebenarnya sejajar dengan gerak modal dan lalu lintas para pakar di pasaran dunia.

Dan dalam arti tertentu pula — namun dengan dorongan yang sama sekali berlainan — mereka seperjalanan dengan sejumlah aktivis dan pengikut keyakinan agama, yang tak menganggap bahwa “Indonesia” adalah sesuatu yang mampu atau berhak memanggil ikatan loyalitas mereka; bagi mereka ini, “Indonesia” bukanlah sesuatu tempat mereka “berjanji” dan “berbakti”. Ada sesuatu yang melintasi “Indonesia”, yakni ikatan iman, satu hal yang misalnya tercermin dalam semangat untuk mendirikan sebuah Negara Islam yang mencakup pelbagai wilayah Nusantara dan sekitarnya ini.

Akhirnya, ada perkara *kelima*. Bagi saya ini tak kalah pentingnya yang menyebabkan kita kini semakin tak mudah menerima “Indonesia” seperti dalam bayangan yang lahir dari sebuah nasionalisme. Perkara ini menyangkut kehadiran Negara, salah satu anasir dalam dwi-tunggal “Negara-bangsa”.

Seorang teman pernah mengatakan kepada saya penemuannya yang menarik bahwa dalam telaahnya atas pikiran para pemimpin nasionalisme sejak sebelum perang, juga pada karya-karya Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir dan lain-lain (kecuali mungkin pada para pemikir sayap kiri dengan tradisi Marxis-Lenisnis), tak banyak dijumpai gagasan tentang Negara. Lebih banyak mereka membahas tentang bangsa.

Tapi Negara menjadi penting, ketika “demokrasi terpimpin” diperkenalkan. Pada masa itulah pelbagai usaha swasta asing diletakkan di bawah kekuasaan negara. Tapi bagaimana sistem dan institusionalisasi kenegaraan masih merupakan eksperimen yang belum diuji. Pada gilirannya, dari sini lahirlah korupsi dalam skala yang meluas, dan makin meluas di masa berikutnya — satu skala yang tak dialami oleh negara seperti Malaysia,

Singapura, Thailand dan Filipina di mana nasionalisasi dan eksperimen sosialisme dalam perekonomian tak pernah terjadi. Sebab, di Indonesia, ketika birokrasi menjadi menentukan, juga dalam menghimpun dan mengelola sumber-sumber ekonomi, dan tak ada prosedur politik untuk akuntabilitas, salah urus, bahkan penyelengan dengan mudah terjadi.

Tapi agaknya keliru untuk mengatakan bahwa korupsi lahir dari negara yang kukuh dan lapar kekuasaan. Korupsi lahir dari Negara sebagai paradoks. Yakni “negara” yang represif tapi rentan, cerewet tapi ceroboh. Kita lihat bagaimana penyuapan — sejak di tepi jalan sampai di lembaga-lembaga tertinggi negara — menunjukkan terjadinya proses jual beli, tawar menawar antara “negara” dengan yang “bukan-negara”.

Contoh yang paling mencolok ialah dalam hal perdagangan keamanan dan kekerasan. Kita baru saja mendengar seorang pengusaha yang dengan membayar Rp 4 juta dapat menyewa sejumlah marinir untuk membunuh lawannya, dan dalam saat yang sama, membunuh seorang anggota pasukan khusus yang disewa untuk menjaga pengusaha yang ditembak itu.

Korupsi menimbulkan keretakan yang serius dalam “negara”, tapi pada saat yang sama, mencoba mengukuhkan kekuasaan atas nama “negara”. Korupsi menyebabkan “NKRI” seakan-akan cerita hantu: antara ada dan tiada, seram tapi juga tak menentu.

3

Apa yang akan mempertautkan susutnya daya integratif? Mungkin, kita masih bisa berharap dari pelbagai hal. Misalnya peran perdagangan antarwilayah dalam sebuah ekonomi nasional yang mulai terbentuk sejak tahun 1970-an. Misalnya peran media massa dan tak kurang dari itu penggunaan bahasa nasional. Mungkin, seperti yang akan dikemukakan nanti oleh Arswendo Atmowiloto, akan tumbuh dari salah satu sisi peran industri budaya, yang lebih bergerak atas dasar “niaga” dan bukan “siaga”.

Mudah-mudahan kita masih bisa membentuk harap. Mudah-mudahan kita tak hanya bisa mengutuk kegelapan, tapi juga menyalakan lilin. Mudah-mudahan kita ingat akan kata-kata Bung Hatta di sidang pengadilan di Den Haag hampir delapan

dekade yang lalu: 'Hanya satu tanah air yang dapat disebut Tanah Airku. Ia berkembang dengan usaha, dan usaha itu ialah usahaku.'

WE'RE FROM BANDUNG !¹

Oleh : **Gustaff H. Iskandar**

Judul tulisan ini saya temukan secara tidak sengaja pada bagian belakang t-shirt teman saya berawal dari situ, saya kemudian mulai merasa kalau ini ternyata bukan judul tulisan biasa. Di Bandung t-shirt semacam ini memang satu hal yang lazim. Demikian juga dengan geng motor tua, sepeda bmx, hip-hop, break dance sampai dengan komunitas punk yang tersebar di beberapa tempat di kota Bandung. Dengan penampilannya yang spesifik, kelompok ini menyebar di kampus-kampus, pojok-pojok jalan, daerah pertokoan, mal dan lain sebagainya. Di malam minggu, beberapa komunitas ini biasanya bisa terlihat di sekitar Jalan Dago, Gasibu, BIP, Cihampelas, sampai jalan Braga. Bandung memang berbeda dengan Jakarta. Di Kota ini, kebanyakan orang masih punya banyak waktu luang untuk memikirkan beberapa hal detail yang bermuara pada bermacam kecenderungan akan gaya hidup, perilaku dan aliran pemikiran.

Dadan Ketu, sebutlah demikian. Terlahir di kota Bandung pada tahun 1973, pemilik nama ini bukanlah figur yang asing lagi bagi mereka yang akrab dengan komunitas underground di kota Bandung di era pertengahan 90-an. Bersama 8 orang temannya, pada sekitar tahun '96, ia berinisiatif untuk membentuk sebuah koleksi yang kini dikenal dengan nama Riotic. Melalui ketertarikan akan satu model ideologi yang sama, komunitas ini kemudian mulai memproduksi musik lisan mereka sendiri, yang kemudian berkembang menjadi sebuah toko kecil yang menjual segala macam pernak-pernik dari mulai kaset, merchandise band, t-shirt dan lain sebagainya. Lain lagi dengan Dede yang bersama keempat temannya mendirikan sebuah distro yang bernama Anonim pada tahun 1999. Terutama karena ketertarikan pada musik dan film, mereka kemudian mulai menjual t-shirt yang dipesan secara online melalui internet. Kini selain menjual barang-barang import, mereka juga menjual

¹ Sebagian dari artikel ini telah diterjemahkan ke dalam artikel bahasa Inggris yang berjudul "Bandung Underground on Parade". Dipublikasikan untuk majalah Latitudes Edisi Maret / april 2003

kaset-kaset underground dan produk-produk dari label clothing lokal, yang konon kabarnya mencapai sekitar 200 label clothing yang muncul bergantian seperti cendawan di musim hujan.

Riotic dan Anonim, dua nama ini adalah sedikit dari deretan nama-nama seperti Disconnect, Harder, Monik, 347, No Label, Airplane, Ouval, dan lain sebagainya. Sejak pertengahan '90-an, di Kota Bandung memang bermunculan beberapa komunitas yang menjadi pelanggan tetap toko-toko kecil-sebutlah distro yang menjual barang-barang yang tidak ditemui di kebanyakan toko, mal dan factory outlet yang kini juga tengah menjamur di kota Bandung. Berbekal modal seadanya, ditambah dengan hubungan pertemanan dan sedikit kemampuan untuk membuat dan memasarkan produk sendiri, kemunculan distro-distro semacam ini kemudian mulai ikut menandai perkembangan scene anak muda di kota Bandung, termasuk juga kota-kota lain semisal Jakarta dan Yogyakarta.

Adalah Reverse, sebuah studio musik di daerah Sukasenang yang kemudian menjadi cikal bakal yang penting bagi perkembangan komunitas anak muda di Kota Bandung pada era '90-an. Diawal pemunculannya pada sekitar tahun '94, semua Richard dan Helvi-2 orang pendiri pertama dari Reverse – hanya memasarkan produk-produk spesifik yang terutama diminati oleh komunitas skate board. Dapat dikatakan, komunitas ini kemudian merupakan simpul pertama bagi perkembangan komunitas ataupun subkultur anak muda pada saat itu. Ketika semakin berkembang, Reverse kemudian menjadi sebuah distro yang mulai mendatangkan CD, kaset, poster, artwork, asesoris, dan lain sebagainya. Kemudian bermunculan sederet komunitas baru yang lebih spesifik lagi, dari yang semula hanya dijangkau oleh komunitas skate board. Reverse kemudian mulai didatangi oleh beberapa kelompok scene yang lain. Mulai dari yang meminati musik semacam pop, metal, punk, hardcore, sampai pada kelompok skater, bmx, surf dan lain sebagainya. Menurut Richard, saat ini kemunculan beragam komunitas semacam ini juga didorong oleh munculnya film-film seperti *The Warrior* (Walter Hill/1979), *BMX Bandit* (Brian Trenchard-Smith/1983), *Thrashin* (David Winters/1986), *Gleaming The Cube* (Graeme Clifford/1989), dan film-film sejenis yang bercerita mengenai berbagai macam

² wawancara dengan Ricard Mutter

komunitas anak muda di Barat (Eropa-Amerika).²

“Dulu gua kalo mau nyari posternya Frank Zappa nggak mungkin dapat di tempat lain, pasti gua nyarinya ke Reverse”, ujar Edi Khemod, seorang penulis yang juga merupakan salah seorang anggota dari Bio Sampler, sebuah kolektif yang sering muncul dalam aktifitas artistik di club scenekota Bandung dan Jakarta. Kondisi sepsifik inilah yang kemudian terbawa sampai pada distro-distro. Pada generasi sesudahnya. Kembali menurut Richard, menurutnya mereka yang datang ke reverse itu kebanyakan mencari barang yang tidak terdapat di toko, mal, atau departemen store. Hal ini juga diakui oleh Dadan dan Dede. Menurut mereka yang datang ke distro itu orang-orang yang punya kebutuhan spesifik yang berbeda dengan kebutuhan orang kebanyakan. Karena itu mereka mencari sesuatu yang lain, yang sulit ditemukan di wilayah yang lebih mapan.

Ada kemungkinan juga kemudian membuat dinamika perkembangan industri musik dan terutama fashion di Bandung selalu menemui banyak perkembangan. Dan, mulai jaman celana Jeans Di Jalan Ciampelas, Tas Ransel Jaya Giri. Jaman strit- c59, clothing lokal band-band undergroup dan seterusnya. “perjumpaan yang terus menerus dengan hal/orang/barang yang sama, kadang-kadang menimbulkan perasaan jenuh/bosan/ muak: bila tak tertahankan lagi, orang ingin keluar/melepaskan diri dari situasi itu : ingin tamoil beda. Demikian urai Yuswadi Saliya, seorang dosen arsitek yang tinggal di Bandung ketika membahas pertanyaan dalam email saya. Saya pikir demikianlah adanya, kota Bandung memang memiliki segudang rutin yang memaksa setiap warganya untuk terus bergerak mencari sesuatu yang baru.

Biografi Kota : Dari Aktuil, Geng Motor Sampai Punk Scene

Sejak semula saya memang sudah menduga kalau tabiat masyarakat di kota Bandung juga terkait dengan setiap peristiwa, tempat dan fakta-fakta sejarah yang berlaku di kota ini. Konon kabarnya sejak dahulu kota Bandung memang dikenal sebagai kota yang penuh dengan pembaharuan. Sejak dinobatkan sebagai kota terbuka oleh Gubernur Jendral JB Van Heutz pada tanggal 21 Februari 1906, kota Bandung kemudian menjadi tempat bagi tujuan wisata, perdagangan dan pendidikan yang sedikit banyak memang membawa pengaruh bagi proses

pembaharuan yang ada di kota ini, malah, pernah dahulu kota Bandung disebut sebagai 'Parijs Van Java', dan diusulkan untuk menjadi pusat bagi koloni orang Eropa yang singgah di daerah katulistiwa oleh seorang ilmuwan yang bernama Ir.R. Van Hoevell. Kota Bandung memang di rancang untuk menjadi kota modern yang dapat memenuhi kebutuhan warganya yang kosmopolit. Tampaknya ini juga yang kemudian mendorong tumbuhnya sarana-sarana bagi pola kehidupan modern di kota Bandung yang memang sangat mendukung bagi perkembangan di bidang musik sampai pada fashion.

Lebih jauh lagi, sebuah kota yang modern tentunya memiliki setumpuk rutin yang dapat menyebabkan munculnya kebutuhan untuk memunculkan sesuatu yang baru, atau sebut saja berbeda, Hal inilah yang agaknya menjadikan pola-pola resitensi di dalam konteks sebuah kota menjadi sebuah tradisi. Sebagian kalangan di Indonesia tentu kenal dengan angkatan majalah Aktual yang muncul di Bandung pada tahun 70-an. Dengan tiga dedengkotnya, yaitu Sonny Suriaatmadja, Denny Sabri Gandanegara, dan Remy Sylado, pada tahun 1973-1974 majalah ini sempat berhasil menembus tiras sekitar 126 ribu eksemplar dan menjadi trend setter anak muda yang penting pada masa itu, sampai kemudian berhasil mendatangkan kelompok musik Deep Purple pada tahun 1975.³

Mungkin ada juga yang tahu mengenai keberadaan geng motor yang populer di kota ini sejak tahun '70 sampai dengan '80-an yang didominasi oleh para penggemar motor tua semacam Harley Davidson, Ariel, BMW dan lain sebagainya. Pada masa itu, setidaknya ada 2 kelompok seperti Black Angel dan The Motor yang kemudian pada akhir tahun '80-an mendorong lahirnya kelompok yang masih eksis sampai sekarang, yaitu Bikers Brotherhood.⁴ Di era ini, selain komunitas motor tua, sejak dibangunnya sebuah skate park kecil di Taman Lalu Lintas (Taman Ade Irma Suryani) pada pertengahan '80-an, muncul komunitas skate board yang kemudian menjadi cikal bakal bagi kelompok bmx, pink, dan hardcore yang mulai populer di tahun '90-an lahir belakangan, selain distro, clothing, record label, sederet nama yang kemudian menjadi catatan yang

³ Dari www.pantau.or.id/download terakhir 1 Maret 2003

⁴ Wawancara dengan Tommy Sujatmiko

penting bagi kota ini adalah kelompok-kelompok band seperti Puppen (bubar pada tahun 2001), Pas, Koil, Jeruji, Full of Hate, Forgotten, Burger Kill, Jasad dan masih banyak lagi. Band-band inilah yang sering meramaikan acara-acara musik underground di tempat seperti GOR Saparua, dimana biasanya banyak komunitas anak muda yang memanfaatkan acara ini untuk saling berkumpul dengan dandanan yang sangat spesifik.

Sebuah fenomena baru kemudian merebak di penghujung tahun 2001. Setelah pertunjukan musik underground semakin jarang diadakan karena semakin dipersulitnya masalah perizinan dan kendala dalam soal dana, dalam beberapa waktu terakhir pada hampir setiap malam Minggu, kita bisa menemui sebagian warga Kota Bandung berparade di jalan-jalan utama semisal Jalan Dago di wilayah utara kota. Berbagai komunitas berkumpul sambil berpesta pora, meneruskan kebiasaan yang sebetulnya sudah menunjukkan gelagatnya sejak awal tahun 90-an. Seiring dengan rontoknya rezim Soeharto, perilaku warga Kota Bandung pun memperlihatkan polanya yang baru. Setidaknya sejak sekitar tahun '96. Orang-orang mulai terbiasa menyalurkan aspirasi mereka sebebaskan-bebasnya. Hal ini ditunjukkan dengan persentuhan yang mulai merasuk ke ruang-ruang publik.

Seketika kelompok-kelompok dari berbagai komunitas dari mulai mahasiswa, penggemar atomotif, pelajar SMU, kelompok hobi, pedagang dan lainnya mulai tampak sering muncul di jalan-jalan utama kota Bandung. Di jalanan, setiap warga kota kemudian bertemu untuk saling menonton dan menunjukan dirinya. Hal inilah yang agaknya kemudian membawa berkah istimewa bagi perkembangan streef fashion di Bandung, yang kemudian sedikit banyak juga ikut mendorong distro-distro yang ada untuk terus berkembang biak. Selain itu, sebagian warga kota juga kemudian mendapatkan sarana fashion daur ulang di wilayah Tegalega Mal yang dihuni oleh sekitar 3000 lapak penjaja pakaian bekas yang sejak tahun '95-an berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain semisal daerah Cibadak, kebun kelapa, sampai akhirnya di daerah Tegalega ini terlihat jauh lebih sederhana. Pakaian bekas didatangkan dari luar negeri, sesampainya di lapak langsung disetrika dengan uap panas dan dijual dengan harga yang sangat murah oleh para pedagang, yang kebanyakan adalah perantau dari daerah Padang, Sumatra Barat. Di Tegalega Mal banyak orang dapat menemukan

pakaian-pakaian bekas dengan berbagai macam model, dari mulai t-shirt, sweater, gaun, jaket kulit, berbagai macam asesoris sampai pada jenis pakaian model vintage yang kuno dan ketinggalan jaman.

Struktur kota yang memiliki karakteristik yang khas inilah yang tampaknya sangat berperan dalam merebaknya fenomena-fenomena baru yang terus menerus mewarnai perkembangan kota Bandung. Jalan-jalan kota yang layak untuk dimanfaatkan untuk ngeceng dan berparade. Distro-distro yang kemudian ikut menjadi penunjang bagi pola pembentukan identitas kolektif dari setiap komunitas yang ada. Semua sepertinya menunjuk pada satu hal, baik secara geografis maupun sosial kota Bandung memang sangat menunjang aktifitas warganya. 'Karena Bandung kotanya kecil, jadi mau ngapa-ngapain gampang.....lagian orang-orangnya juga kekeluargaan, cair banget, baturalah, semua dianggap sama'. Ujar Dede pada suatu kesempatan. Hal ini juga kembali disepakati oleh Dadan Ketu. Menurutnya, mereka yang berusaha di bidang clothing lokal tidak menemui kesulitan yang berarti mereka harus memproduksi. 'Mau cari bahan gampang pisan, tinggal ke Jalan Otista, Tamin, Cigondewah, Cimahi, Majalaya, terus tukang nyablon juga di sini mah banyak pisan, jadi nggak susah', jelasnya.

1990 : Desa Global, GMR, dan MTV

Tidak hanya di era '90-an, sejak awal kemunculannya harus diakui Kota Bandung memang punya banyak kelebihan. Namun, pada periode ini tidak dapat dipungkiri kalau ada pengaruh lain yang tak kalah penting bagi perkembangan scene anak muda di Bandung, yaitu media. Di bidang musik misalnya, melalui tangan dingin seorang Samuel Marudut(alm), dulu pada tahun '92-an sebuah radio yang bernama GMR menjadi satu-satunya radio di Indonesia yang membuka diri untuk memutarakan rekaman demo dari band-band baru yang ada di kota ini. Hal ini setidaknya memiliki peran yang tidak sedikit karena melalui stasiun inilah beberapa band underground Bandung mendapat kesempatan untuk didengar oleh publik secara lebih luas. Selain itu, para presenter MTV pun tidak segan-segan untuk memakai produk-produk dari clothing lokal yang berasal dari kota Bandung, sehingga produk mereka menjadi semakin populer.

Dampaknya tentu saja tidak kecil. Selama beberapa tahun

terakhir warga kota Bandung mungkin sudah mulai terbiasa dengan jala-jalan yang macet pada setiap akhir Minggu. Selain menyerbu factory outlet, para pengunjung yang datang ke kota Bandung pun ikut berbondong-bondong mendatangi distro-distro yang ada, sehingga memicu pola pertumbuhan yang dapat dikatakan penting.

Kemunculan beberapa stasiun TV, radio, majalah, dan terutama internet, semakin mendorong perkembangan beberapa komunitas anak muda di Bandung. Selain menjadi beragam keberadaan media ini juga menambah perluasan jaringan sampai ke kota-kota lain di luar Bandung, malah sampai ke luar negeri. Ketika mulai merilis dibawah label 40124, Richard mengaku pernah mendapatkan pesanan kaset rilisannya dan seorang penggemar musik-musik underground dari Jepang, yang memesan melalui internet. Sementara itu Dadan Ketu menyatakan kalau sekarang ini memang sudah sangat biasa kalau ada salah seorang pengunjung distro di Bandung datang dari luar negeri, semisal Singapura atau Malaysia. ' Mereka datang biasanya langsung ngeborong, bawa kaset 100 biji untuk dijual lagi di negeri asalnya, ada yang bayar kontan, ada yang nyicil,' ujarnya.

Wujud dari terbentuknya jaringan yang meluas ini sebetulnya sudah mulai terasa sejak tahun '97. Pada bulan Agustus 1997 sebuah label rekaman punk dari Perancis yang bernama Tian An Men 89 Records merilis sebuah kompilasi yang berjudul " Injak Balik, a Bandung HC/Punk comp'. Kompilasi ini didukung oleh sejumlah band Bandung seperti Puppen, Closeminded, Savor of Filth, Deadly Ground, Piece of Cake, Runtah, Jeruji, Turtles Jr, dan All Stupid . Tidak hanya berhenti di sini, pada tahun 1999, label lokal yang bernama Fast Forward kemudian merilis beberapa album dari band yang berasal dari luar negeri seperti The Chinkees (Amerika), Cherry Orchard (Perancis), 800 Cheries (Jepang), dan lain sebagainya. Menurut Marin, salah seorang pendiri dari FastForward, setidaknya media-media komunikasi seperti internet, mesin fax dan jaringan telepon punya andil besar dalam proses produksi album dari band-band ini.

Perluasan jaringan yang mempertautkan perkembangan di bidang musik dan fashion dengan perkembangan media dan teknologi informasi ini setidaknya melahirkan sebuah kombinasi

perkembangan yang baru, baik dari segi wawasan maupun gaya. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimanapun perkembangan yang ada di kota Bandung tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan setiap gejala perkembangan di tingkat global. Setelah berdiri selama kurang lebih 194 tahun yang lalu, sejak Jenderal Maarschalk H.W.Daendles memerintahkan anak buahnya untuk membangun kota Bandung pada tahun 1809, kota ini terus menjadi saksi bagi setiap perkembangan masyarakatnya, seiring dengan waktu, sampai saat ini scene anak muda di kota Bandung masih terus tumbuh untuk melengkapi pola perkembangan dengan wajah dan versinya yang baru. Jangan kaget kalau tiba-tiba anda bertemu dengan sekelompok anak muda dengan gaya yang identik dengan gaya anak muda di belahan dunia yang lain. Kota ini memang sedari dulu sudah menjadi bagian dari kota-kota lain di seluruh dunia. Salut! Selamat datang di Kota Bandung!.

Kyai Gede Utama, 16 Januari 2003

***penulis adalah pekerja seni rupa, saat ini bekerja untuk Bandung Center For New Media Arts*

HAK CIPTA KOMUNAL

Oleh : **Miranda Risang Ayu, SH, LLM**¹

1. Latar Belakang Peristilahan

Berbicara tentang perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta manusia atau ekspresi budaya manusia, berarti berbicara tentang sistem perlindungan bagi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Salah satu pokok masalah dari HKI adalah Hak Cipta. Dalam konteks ini, kini tengah berkembang diskursus tentang Hak Cipta Milik Umum, Hak Cipta Kolektif, atau Hak Cipta Komunal. Arah dari diskursus ini sesungguhnya bermaksud untuk menggugat karakter individualistik yang amat kental dalam pokok-pokok masalah HKI yang telah ada, termasuk Hak Cipta.

Dalam sistem hukum Hak Cipta, yang disebut karya cipta “milik umum” itu sendiri sesungguhnya adalah karya cipta lama, yang telah habis masa perlindungan hukumnya. Dengan habisnya masa perlindungan, karya cipta itu dapat dipergunakan oleh siapa saja, tanpa harus membayar biaya lisensi kepada sang pencipta.

Berbeda dengan hak cipta milik umum yang telah menjadi istilah hukum, hak cipta kolektif atau hak cipta komunal sendiri merupakan istilah yang belum ada padanannya secara eksplisit di dalam hukum HKI yang kini berlaku. Namun, istilah “kolektif” biasanya lebih merujuk kepada organisasi profesi yang bersifat patembayan, sedangkan istilah “komunal” lebih dekat pengertiannya dengan kelompok masyarakat hukum adat, yang bersifat paguyuban. Karena beberapa alasan kepraktisan dan pemihakan, maka istilah yang akan dipakai adalah Hak Cipta Komunal.

2. Sistem Hukum Pelindung Hak Cipta Komunal

Sepanjang berkaitan dengan karya intelektual yang sudah menjadi milik umum, ekspresi budaya masyarakat asli, tribal, atau kesatuan masyarakat hukum adat, sistem hukum yang

¹ disampaikan dalam Sidang ke-20 Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi, Sumatera Barat, 20-23 Oktober 2003

terlibat sesungguhnya ada dua, yakni sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dikarenakan kelemahan sistem hukum HKI sekarang hanya mungkin melindungi sebagian kecil ekspresi kultural masyarakat hukum adat. Alasan utama yang menyulitkan perlindungan ekspresi kultural tersebut adalah karena secara hukum, karya-karya itu sudah kuno dan sudah telanjur habis masa perlindungan hukumnya.

a. Hak Kekayaan Intelektual

1) Sejarah Hak Cipta

Hak Cipta sesungguhnya adalah salah satu pokok Hak Kekayaan Intelektual yang paling tua, yang berkembang setelah Revolusi Industri turut menimbulkan persoalan dalam dunia penulisan (*literary works*). Mekanisasi, sebagai salah satu ciri dari Revolusi Industri di Eropa pada abad XVII, telah amat berpengaruh terhadap perkembangan tradisi penyampaian nilai dan ilmu. Semula, nilai-nilai yang bijak, mempesona, cerdas, dan bernilai dalam mencerdaskan masyarakat, diakses dan disebarluaskan secara interpersonal, dari mulut ke mulut, atau dari satu-dua karya tulis eksklusif dalam jumlah yang amat terbatas. Biasanya, yang dapat mengakses pun hanya kalangan ningrat atau keluarga tuan tanah. Jika akan direproduksi, karya-karya itu pun membutuhkan keterampilan tangan yang masih jarang dikuasai, dan dalam waktu yang sangat lama.

Dengan penemuan mesin cetak, ide-ide itu kemudian dapat direproduksi secara masal dalam waktu lebih cepat, dengan hanya melibatkan beberapa orang operator teknis mesin saja. Popularitas mesin cetak yang amat akseleratif terhadap efisiensi dan efektivitas reproduksi karya tulis, menjadikan tradisi reproduksi tulisan secara manual melenyap. Hal ini didukung oleh masyarakat, yang jadi lebih mudah untuk mendapat, menikmati dan menarik manfaat dari karya-karya tulis besar.

Tetapi, di sisi lain, mekanisasi pun membuat suatu karya tulis jadi relatif dingin dari keterlibatan manusia. Penulis

yang telah lama mengandung dan bersusah-payah melahirkan suatu karya tulis, menjadi relatif kehilangan kontrol terhadap karyanya sendiri. Untuk mempublikasikan karya-karyanya, sang penulis harus tergantung kepada sebuah industri sebagai suatu sistem modal, tenaga operasi, alat-alat, dan manajemen pemasaran, yang belum tentu memiliki empati terhadap proses kreatif individualnya yang telah menguras begitu energi, dan mungkin juga, sampai mengucurkan banyak darah hati. Bukankah biasanya, suatu industri percetakan dimiliki bukan oleh seorang sastrawan, tetapi seorang manajemen, yang juga memiliki modal dan kecerdikan untuk menarik keuntungan sebanyak mungkin dari hasil bantuannya kepada sang penulis untuk mereproduksi dan memasarkan suatu karya.

Banyaknya ketegangan yang terjadi antara seorang kreator dengan pemilik industri yang mereproduksi dan memasarkan karya-karya kreator itu kemudian membuat hak cipta menjadi sebuah diskursus. Jadi, di belakang konsep hukum “demi kepentingan pencipta”, hak ini sebetulnya berfungsi awal sebagai *penyangga sistem manajemen konflik kepentingan* yang tumbuh pasca Revolusi Industri. Dalam konteks ini, nilai optimal dari perlindungan atas hak ini harus membuat : pertama, seorang pencipta tidak merasa kehilangan kontrol dan dapat menarik manfaat yang adil atas karya yang telah dihasilkannya dengan penuh pengorbanan ; kedua, pihak industri reproduksi dan pemasaran dapat menarik keuntungan yang wajar atas kontribusinya dalam membesarkan karya itu di masyarakat ; dan ketiga, masyarakat dapat juga memiliki cukup kebebasan untuk mengakses karya-karya itu, dengan mutu yang terjaga. Ketiga kepentingan yang sering tarik-menarik ini harus dapat diseimbangkan melalui implementasi dari sistem perlindungan suatu hak. Hak inilah yang kemudian dikenal sebagai hak untuk mereproduksi, *the right to copy* atau *copyright*.

Mengapa hak cipta ? Karena hak ini berkaitan erat dengan perwujudan suatu proses kreatif atau daya cipta *menjadi* karya cipta. Dalam konteks ini, yang menjadi

obyek dari hak cipta bukanlah ide, tetapi wujud dari ide. Jadi, ide itu tidak hanya ada di pikiran, perasaan atau pembicaraan, tetapi harus sudah diwujudkan dalam bentuk yang konkrit. Konkrit di sini berarti bisa ditangkap oleh indera, dan bersifat tetap (*fixed*). Secara singkat, hak cipta dapat juga diartikan sebagai hak yang melindungi fiksasi dari daya cipta, yakni karya cipta.

Sesuai dengan sejarahnya, hak cipta pertama kali diberikan kepada karya-karya tulis, terutama sastra. Meski pun demikian, karena suatu proses kreatif tidak hanya berhubungan dengan karya tulis, tetapi juga karya seni dan karya-karya ilmiah, hak cipta ini kemudian diperluas untuk melindungi karya seni dan karya ilmiah juga.

Dalam konteks ini, karakter dasar dari obyek-obyek hak cipta tersebut adalah nilai artistiknya. Nilai artistik ini harus diartikan secara luas. Karenanya, suatu karya artistik yang dapat dilindungi hak cipta tidak hanya karya sastra atau karya seni adiluhung, tetapi juga karya-karya hasil proses kreatif lain, sepanjang karya tersebut secara nyata melibatkan upaya kreatif dari penciptanya. Adanya upaya kreatif inilah yang menentukan suatu karya dapat disebut sebagai obyek hak cipta atau tidak, meski pun dalam kenyataannya, penampilan obyek tersebut bisa jadi tampak amat sederhana atau bahkan tidak estetik sama sekali.

Dari sudut pandang nilai artistik yang luas inilah, satuan karya kreatif yang terdapat dalam teknologi informasi pun kemudian dapat dipandang sebagai karya bernilai artistik yang dilindungi oleh hak cipta².

2) Latar Belakang Yuridis Timbulnya Hak Cipta

Secara yuridis, Hak Cipta sesungguhnya adalah pokok masalah hukum bentukan TRIPs. Meski pun selain TRIPs, telah ada perjanjian-perjanjian internasional lain yang mengatur hak ini, TRIPs, atau *the Agreement on*

² Miranda Risang Ayu "Perlindungan Program Komputer Menurut UUHC Nomor 19 Tahun 2002" Technology Seminary STT Telkom Expo 2003 Bandung 24 September 2003

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, adalah perjanjian internasional paling signifikan bagi perlindungan HKI³. TRIPs sendiri adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh banyak negara (multilateral). Indonesia meratifikasi TRIPs dengan pemberlakuan UU Nomor 7 Tahun 1994. Dengan UU ini, TRIPs menjadi kaidah hukum nasional.

TRIPs merupakan salah satu hasil terpenting dari lembaga internasional GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang dikenal sebagai penyelenggara serangkaian perundingan antarnegara yang lazim disebut sebagai Putaran (*Round*). GATT sendiri berdiri pasca Perang Dunia II, dengan tujuan ideal untuk menyeimbangkan kembali kedudukan negara-negara yang menang dan kalah perang. Keseimbangan ini diharapkan dapat mencegah agar perang dunia jangan sampai pecah kembali.

Dengan asumsi bahwa keseimbangan antarnegara hanya dimungkinkan oleh kompetisi yang sehat, dan kompetisi itu hanya dimungkinkan terjadi jika barang dapat bebas mengalir, disinyalirlah beberapa hambatan. Hambatan yang ketika itu paling banyak menimbulkan persengketaan antarnegara adalah masalah tarif dagang. GATT kemudian terbentuk untuk mencegah agar persengketaan itu tidak sampai ke tingkat krisis hubungan antarnegara. Lembaga ini kemudian menentukan 80-90 % aturan main perdagangan dunia.

Dalam perundingan Putaran Uruguay 20 September 1986 di Punta del Este, salah satu hasil ambisius dari GATT adalah untuk memperluas hasil sidang kepada perumusan isu-isu baru yang bersifat non-tarif, termasuk perdagangan dari HKI⁴.

Perdagangan HKI inilah yang kemudian menjadi lampiran hasil Putaran Uruguay, yang bersifat mengikat bagi negara penandatangannya, termasuk Indonesia.

³ Jill Mc Keough et al *Intellectual Property : Commentary and Materials* Lawbook Co. 3rd edition A Thomson Company New South Wales Australia 2002, 4

⁴ H A Kartadjoemena *GATT dan WTO : Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan* UI Press Indonesia 1996, 171

Pada April 1994, GATT sendiri malih-rupa menjadi organisasi internasional di bidang perdagangan yang lebih kuat, yang kini populer dengan nama WTO (*World Trade Organization*)⁵.

Tujuan utama TRIPs tercantum dalam Pasal 7, yakni: “...contribute to the promotion of technological innovation ...to transfer and dissemination of technology to the mutual advantage of producers and users ...in a manner conducive to social and economic welfare and a balance of rights and obligations.”⁶

Prinsip-prinsip TRIPs pada dasarnya adalah antidiskriminasi. Hal ini berarti bahwa setiap negara penandatangan TRIPs terikat untuk tidak menerapkan perlakuan yang berbeda bagi negara-negara penandatangan TRIPs lainnya. Selain itu, TRIPs juga menganut prinsip perlindungan standar minimal. Artinya, TRIPs adalah batas minimal perlindungan. Konsekuensinya, setiap negara penandatangan tidak boleh membangun sistem perlindungan HKI nasional yang kurang dari standar-standar TRIPs. Boleh lebih, tetapi tidak boleh kurang.

Dalam kaitan dengan perlindungan Pengetahuan Tradisional, Putaran lanjut yang kemudian berusaha memperbarui hasil-hasil Putaran Uruguay, termasuk TRIPs, adalah Putaran Doha, yang mulai diselenggarakan pada akhir 2001. Dalam Pasal 27.3 (b) hasil peninjauan, dikemukakan pentingnya pengaturan khusus mengenai keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional sebagai sumber-sumber HKI juga⁷.

3) Hak Cipta Sebagai Bagian dari Sekelompok Hak Kekayaan Intelektual Menurut TRIPs

⁵ Ibid, 4

⁶ Philip Griffith “Lectures on Treaties” IPR short course IASTP II – University of Technology Sydney April-Juli 2002

⁷ Australian DFAT “TRIPs Update” IPR short course IASTP II – Law Faculty University of Technology Sydney April – July 2002

Dalam TRIPs, HKI sesungguhnya adalah hak ekonomi yang terdiri dari beberapa pokok bahasan. Selain Hak Cipta dan Hak Terkait, terdapat juga Hak Paten, Hak Merek Dagang, Hak Indikasi Geografis, Hak Desain Industri, Hak Rahasia Dagang dan Hak Tata Letak Sirkuit Terpadu. Belakangan, terdapat perlindungan khusus juga yang menyangkut Hak Varietas Tanaman. Dalam konteks ini, biasanya Hak Cipta dibedakan dari hak-hak lainnya tersebut, karena hak-hak lainnya itu lebih langsung berkaitan dengan industri dan murni bernilai ekonomis. Hak Cipta (dan Hak Terkait) sendiri terdiri dari hak ekonomis dan hak non ekonomis, yang lazim dikenal sebagai Hak Moral.

Hak Moral ini merupakan hak khusus yang menjamin integritas pencipta dan karya ciptaannya. Eksistensinya bukan berlandaskan TRIPs, tetapi Konvensi Berne. Jadi, bagaimana pun, pencipta berhak untuk tetap disebut namanya sebagai pencipta. Selain itu, ia berhak untuk mengontrol reproduksi atau pengalihwujudan karyanya agar tidak menghancurkan reputasi diri dan karyanya tersebut. Jangka perlindungan ini bervariasi di berbagai negara, tetapi umumnya berlangsung secara menerus.

Dalam beberapa produk, berbagai hak dalam TRIPs dapat tampil sebagai sekelompok hak. Efeknya jelas, mempertinggi kualitas, tetapi sekaligus juga mempertinggi harga jual.

4) Hak Cipta Menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002

Hak Cipta dalam UUHC 19/2002 sesungguhnya sejalan dengan TRIPs. Secara singkat, Hak Cipta memiliki kekhususan. Ia adalah hak ekonomi yang bersifat eksklusif, yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak yang sah, atas karya ciptaan yang bersifat baru (*original*), dalam bidang karya tulis, karya seni dan ilmu pengetahuan. Secara simplistik, Hak Cipta berkaitan dengan sifat artistik suatu karya. Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide, tetapi ekspresi atau materialisasi dari ide. Jangka waktu perlindungannya

adalah seumur hidup pencipta plus 50 tahun setelahnya. Perlindungan ini terjadi secara serta-merta, begitu karya itu menemukan bentuknya. Jadi, tidak seperti hak-hak kekayaan industrial lain, pendaftaran bagi obyek Hak Cipta dianjurkan, tetapi tidak merupakan kemestian.

Pada dasarnya, UUHC 19/2002 berniat melindungi semua hasil karya tulis seni dan ilmu pengetahuan yang bernilai artistik dan original, baik yang bersifat tradisional maupun populer, baik sebagai obyek hak ekonomi maupun hak moral. Selain melindungi karya-karya seni seperti lukisan, tari dan koreografi, musik, pahatan, patung, dan arsitektur dalam bentuk asli, ia pun melindungi karya-karya itu ketika telah dicetak atau direkam dalam berbagai alternatif media reproduksi (buku, koran, pamflet, piringan hitam, kaset, cakram optik), yang disebarluaskan melalui kabel maupun transmisi tanpa kabel. Dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi, basis data dan program komputer pun dilindungi. Selain itu, UUHC 19/2002 juga menyebut pewayangan, batik, kaligrafi sebagai obyek perlindungan. Jadi, beberapa bentuk ekspresi budaya nasional telah dapat dilindungi olehnya.

Sayangnya, berkaitan dengan ekspresi kultural yang merupakan pengetahuan tradisional, ada beberapa persoalan esensial yang membuat kebanyakan ekspresi itu tidak bisa dilindungi.

Pertama, Hak Cipta dan Hak Terkait yang kini berlaku, sesuai dengan TRIPs dan Konvensi Berne, berkaitan dengan nilai ekonomi dan nilai moral. Nilai spiritual, yang biasanya kental ditemui dalam berbagai ekspresi kultural masyarakat hukum adat atau tribal, tidak dikenal. Kedua, originalitas dan kepastian siapa pencipta yang asli dalam pemberian hak cipta, amat penting. Padahal, banyak sekali ekspresi kultural tersebut yang bersifat anonim. Ketiga, ekspresi-ekspresi kultural itu biasanya telah berusia ratusan tahun, sehingga telah dianggap milik umum. Dan keempat sekaligus yang terpenting, kepemilikan Hak Cipta bersifat individual dan bukan komunal. Artinya, tidak mungkin seorang pemangku adat, kendati ia adalah representasi yang

didukung kaumnya, kemudian memegang hak cipta dari ekspresi kultural tradisional milik bersama kaum tersebut. Paling jauh, yang bisa memegang hak cipta itu adalah “pribadi” yang telah membuat versi dari karya itu, meski sesungguhnya, ia hanyalah “tukang” dari kaum itu, dan bukan representasi yang sah.

5) Peran Negara

Pasal 10 UUHC 19/2002 sesungguhnya berusaha menjawab persoalan ini dengan menyatakan bahwa negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. Negara pun memegang Hak Cipta atas folklor atau hasil-hasil kebudayaan rakyat seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Pasal ini berusaha melindungi karya-karya tersebut dari pendakuan orang dari negara lain, dengan dalih karena semua karya itu telah menjadi milik umum.

Tetapi, detail lebih lanjut dari peran negara ini masih harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, yang sampai sekarang belum ada. Sementara itu, wajah pemerintah justru dipersulit dengan kriminalisasi yang tampak berlebihan. Pelanggaran Hak Cipta menurut UUHC baru ini dianggap sebagai delik biasa, yang harus ditumpas seperti menumpas maling ayam sampai korupsi. Artinya, polisi berhak bertindak secara agresif melakukan “pengamanan”, bahkan kepada para pedagang eceran yang baru tahu adanya Hak Cipta setelah barang dagangan mereka dirazia semua.

Singkatnya, hingga kini, Hak Cipta Komunal masih lebih merupakan diskursus hangat yang urgen secara budaya, tetapi belum diatur secara memuaskan dalam kaidah hukum.

b. Hak Asasi Manusia

Putaran Doha yang diselenggarakan oleh WTO telah

memasukkan perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai aspek baru yang perlu diupayakan perlindungan hukumnya secara khusus. Dalam kaitan ini, organisasi internasional di bidang HKI, yang dikenal sebagai WIPO (*World Intellectual Property Organization*), dengan kritis mengusung ide perlunya dipertimbangkan harmonisasi HKI dengan nilai-nilai HAM.

Khusus bagi perlindungan pengetahuan tradisional, ide harmonisasi ini penting, karena HAM sebagai suatu sistem hak yang bersifat asasi dalam hukum, dipandang harus menjiwai semua sistem hak dan sistem hukum praktis. HKI, sebagai sistem hak yang bernilai praktis, juga harus mempertimbangkan HAM sebagai landasannya.

Dalam konteks perlindungan ekspresi kultural masyarakat hukum adat dan tribal, beberapa perjanjian internasional terpenting adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*UDHR*), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*ICCPR*), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*ICESCR*), Konvensi Vienna 1993, Konvensi Organisasi Buruh Internasional (*ILO*) Nomor 169, dan Konvensi Keanekaragaman Hayati (*CBD*). Sayangnya, sebagian besar instrumen hukum internasional itu masih bersifat moral saja, karena belum diratifikasi oleh Indonesia.

UDHR sendiri adalah dasar moral dari semua nilai HAM yang paling populer dewasa ini. Tetapi, karena hanya merupakan deklarasi, UDHR lebih bersifat himbauan saja. Karenanya, kemudian dibentuk dua kovenan kembar yang bersifat implementatif, yakni ICCPR dan ICESCR. Karena kedua kovenan ini lahir pada masa perang dingin, maka ICCPR dimotori oleh Amerika Serikat, sedangkan ICESCR diusung oleh Uni Soviet. Sesuai dengan perkembangan sejarah, kedua kovenan ini kemudian dinyatakan sebagai satu mata uang dengan dua sisi yang saling tergantung dalam Konvensi Vienna tahun 1993. Yang menarik, dari kovenan kembar itu, diakui adanya dua hak asasi yang bersifat kolektif, yakni hak menentukan nasib sendiri (*rights of self-determination*) dan hak masyarakat adat (*right of indigenous people*). Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan prinsip dasar yang sama-sama dimuat dalam ketentuan awal kedua kovenan tersebut. Masyarakat adat sendiri dipandang logis untuk memiliki hak kolektif, karena mereka dikelompokkan sebagai masyarakat rentan yang memerlukan

diskriminasi positif untuk menaikkan posisi tawar ekonomi sosial politik mereka.

Konvensi ILO 169 adalah konvensi yang khusus mengatur masyarakat adat dan tribal. Hak partisipasi dan hak untuk mengontrol aset budaya mereka pun diatur secara terperinci. Sementara itu, CBD menekankan pentingnya pembagian keuntungan yang adil (*fair benefit sharing*) untuk diterima oleh komunitas lokal.

Meski pun Indonesia belum meratifikasi sebagian instrumen hukum internasional itu, pengaruh dari perjanjian-perjanjian itu tampak dalam perangkat hukum nasional. Dalam UUD 1945n Pasal 32, telah lama dikenal kewajiban pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional. Kemudian, pasal ini dikembangkan lebih lanjut dalam Amandemen II dan Amandemen IV.

Amandemen II UUD 1945 pada pokoknya meletakkan dasar-dasar baru bagi otonomi daerah dan perlindungan HAM. Dalam konteks ini, dalam amandemen yang menyangkut otonomi daerah, Pasal 18 A dan B Amandemen II UUD 1945 menyatakan bahwa hubungan kwewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, termasuk satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Dalam konteks ini, Prof. Bagir Manan menyatakan bahwa kekhususan ini dilandaskan kepada hak asli daerah yang berakar dari eksistensi *zelfbestuurende landschappen* (kerajaan-kerajaan sebelum Belanda masuk) dan *volkgemeenschappen* (kesatuan masyarakat hukum adat yang bukan kerajaan). Secara khusus, dinyatakan pula dalam Pasal 18 B ayat (2) bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang iatur dalam UU. “

Amandemen II UUD 1945 yang menyangkut HAM termuat dalam Pasal 28 I-J. Hak ekonomi sosial budaya anggota masyarakat, terutama untuk memperoleh manfaat dari pengetahuan, teknologi dan seni budaya, terdapat dalam pasal 28 C ayat (1). Hak asasi kolektif kemudian ditegaskan secara eksplisit dalam ayat selanjutnya (pasal 28 C ayat [2]) yang

menyatakan bahwa, *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*

Selain itu, pasal yang khusus menyangkut hak asasi kolektif masyarakat tradisional tercantum dalam Pasal 28 I ayat (2) yang pada dasarnya merupakan “ayat antidiskriminasi”, dan ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (3) yang menyatakan bahwa, *“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”*

Akhirnya, yang terpenting dari Amandemen IV ini adalah perubahan dari “pasal kebudayaan” sendiri, yakni Pasal 32 UUD 1945, yang menegaskan bahwa,

“ (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. “

Ketentuan-ketentuan konstitusi tersebut, yang dapat dianggap sebagai dasar dari hak-hak komunal bagi kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional (termasuk masyarakat tribal) dan komunitas lokal, kemudian ditegaskan secara lebih implementatif dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 yang bertajuk Hak Asasi Manusia.

3. Rumusan Persoalan Perlindungan Hak Cipta Komunal

Dari uraian yuridis tersebut diatas, persoalan perlindungan Hak Cipta Komunal dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sistem perlindungan hukum bagi HKI yang sekarang, khususnya Hak Cipta, baik di tingkat internasional maupun nasional, belum cukup melindungi hak cipta komunal secara integral
2. Di tingkat nasional, belum ada ketentuan hukum yang apresiatif terhadap isu internasional untuk mengupayakan perlindungan bagi pengetahuan tradisional, yang amat terkait dengan hak cipta komunal
3. Kriminalisasi yang berlebihan dalam UUHC 19/2002 mengindikasikan bahwa budaya hukum hegemoni negara masih kental, sehingga belum tampak upaya untuk mengatur penegakan hukum yang lebih partisipatif,

seperti pemberdayaan masyarakat kesatuan hukum adat, masyarakat tradisional, masyarakat tribal dan komunitas lokal yang bersifat paguyuban untuk membentuk organisasi patembayan yang bertugas mempertahankan dan mengembangkan perlindungan hukum bagi ekspresi kultural mereka

4. Belum ada politik hukum dari pihak pemerintah untuk melibatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik yang terkait dengan ekspresi kultural masyarakat adat, tradisional, tribal dan komunitas lokal. Padahal, partisipasi publik kelompok masyarakat pengusung budaya adat tersebut telah ditegaskan sebagai hak asasi kolektif yang diakui oleh konstitusi dan undang-undang
5. Perlindungan Hak Cipta Komunal belum tercermin secara memuaskan dalam peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik di Indonesia, kendati hak ini sudah menjadi kegelisahan dari kelompok masyarakat pengusung budaya adat dan bagian dari arus reformasi internasional

4. Alternatif Solusi

1. Harus ada peraturan perundang-undangan yang bersifat sui generis (hukum khusus yang meniadakan hukum yang lebih umum) bagi pengetahuan tradisional, yang :
 - a. mengadopsi nilai dan kebijakan adat dan tradisional
 - b. mendasarkan diri kepada hak asasi kolektif untuk turut menentukan kebijakan-kebijakan publik yang menyangkut eksistensi kolektivitas dan aset-asetnya, termasuk aset kekayaan intelektual tradisional / folklor
 - c. mengatur secara khusus eksistensi cipta komunal
2. Dekriminalisasi Undang-Undang Hak Cipta dalam jangka menengah dan panjang
3. Pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat pengusung budaya adat (masyarakat kesatuan hukum

adat, masyarakat tradisional, masyarakat tribal, komunitas lokal) untuk menyadari hak-hak asasi dan hak intelektual mereka, dan mendirikan institusi patembayan yang khusus bergerak dalam perlindungan hak kekayaan intelektual tradisional (collecting society) dan mampu mengupayakan royalti dan pembagian keuntungan yang adil lainnya.

4. Merubah perspektif budaya yang cenderung mengaitkan keragaman etnik sebagai isu politik yang memecah-belah, menjadi isu ekonomi yang mementingkan kerja sama dan kompetisi yang sehat.

Bukittinggi, 20 Oktober 2003
Miranda Risang Ayu

TEKNOLOGI DAN PEMANFAATAN LINGKUNGAN LAUT BAGI NELAYAN BAGANG 'RAMBO' DI SULAWESI SELATAN¹

Oleh : Hamka Naping²

1. Latar Belakang

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki luas wilayah laut dan Zona Ekonomi Eksklusif berturut-turut 3,1 dan 2,7 juta km, dikarunia sumberdaya pesisir dan lautan yang sangat beragam dengan jumlah besar. Kondisi ekologis wilayah laut Indonesia merupakan wilayah yang penuh daya tarik dan menantang dari sudut pengkajian berbagai ilmu pengetahuan. Ekosistem laut Indonesia mengandung sejumlah fenomena yang menarik untuk dikaji dari berbagai dimensi dan sudut pandang, baik dimensi fisik ekologis, maupun dimensi yang berkaitan dengan masalah sosiobudaya, termasuk didalamnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan laut.

Sumberdaya potensial bagi ekosistem laut Indonesia, baik sumberdaya yang dapat pulih (*renewble resources*), seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya pantai (tambak) dan marikultur, mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan rumput laut pada umumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Demikian pula dengan sumberdaya yang tidak dapat pulih (*unrenewble resources*), seperti minyak dan gas bumi, dan mineral lainnya serta jasa-jasa lingkungan (*environmental service*), yang meliputi energi, kawasan rekreasi dan pariwisata, masih banyak yang belum terjamah dan dimanfaatkan secara optimal (Dahuri, 1999 : 2). Belum termanaatkannya secara optimal dari segenap potensi sumberdaya laut tersebut terkait erat dengan masalah perkembangan teknologi yang dikuasai, baik oleh pemerintah maupun masyarakat maritim sendiri.

Pemanfaatan lingkungan alam laut sesungguhnya

¹ Disampaikan pada Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi, Sumatera Barat, Tanggal 20-23 Oktober 2003.

² Staf Pengajar Pada Jurusan Antropologi Fisip Unhas.

merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat dengan mendayagunakan sejumlah potensi yang terkandung di dalam lingkungan laut tersebut untuk memenuhi sejumlah kebutuhan manusia. Dalam upaya pemanfaatan lingkungan laut itu, teknologi sebagai wujud dan fungsi kebudayaan memegang peranan yang sangat penting. Bahkan Steward (1955) dalam (Manner, 1999) mengklasifikasikan sifat hubungan antara kelompok manusia yang secara spesifik berbeda dengan kelompok masyarakat lain disebabkan oleh pola pemanfaatan teknologi, disamping perbedaan sistem ekonomi dan sistem kepercayaan (*religion*) yang dianut.

Masyarakat nelayan di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan, melalui proses evolusi dan perkembangan teknologi yang berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, secara akumulatif menciptakan suatu bentuk teknologi penangkapan yang memiliki kapasitas dan kemampuan, baik dilihat dari volume fisik maupun daya tangkapnya, yang oleh nelayan lokal dikenal dengan nama bagang rambo.

Tulisan ini berusaha mengungkap bagaimana pola pemanfaatan teknologi dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan laut bagi masyarakat nelayan di Sulawesi Selatan dan nelayan Barru khususnya.

2. Sekilas Tentang Bagang Rambo

Bagang Rambo adalah suatu jenis bagang yang merupakan modifikasi dari sejumlah jenis bagang yang sudah ada sebelumnya dengan ciri yang menonjol adalah memanfaatkan kapal yang lebih besar sebagai rakit atau badan bagang, dan menggunakan pencahayaan dari lampu listrik menggantikan lampu petromaks yang digunakan pada jenis bagang sebelumnya. Jenis bagang ini memiliki sejumlah perbedaan, baik tipe maupun kapasitas daya tangkapnya, dengan jenis bagang lainnya. kata 'rambo' bermakna besar dan unggul sebagai bentuk dan makna asosiatif dari bagang yang dimaksud.

Jenis bagang ini dapat beroperasi secara terus menerus tanpa harus tergantung pada peredaran bulan karena walau bulan purnama bagang rambo juga dapat beroperasi karena pencahayaannya dapat mengatasi cahaya bulan sehingga tetap dapat memikat kawanan ikan. Dalam rangka penangkapan,

bagang rambo dioperasikan oleh paling sedikit 12 orang yang terdiri atas punggawa laut dan para sawinya, yang dibantu oleh sejumlah orang yang bertugas di kapal.

Untuk membuat sebuah bagang rambo, seorang nelayan, biasanya mereka yang berstatus sebagai punggawa harus mengeluarkan modal kurang lebih tiga ratus juta rupiah. Dengan biaya sebesar itu, nelayan membentuk kelompok-kelompok kerjasama sebagai mitra mengembangkan usaha bagang rambo, atau menjalin hubungan dengan lembaga keuangan formal seperti bank. Dengan demikian, bagang rambo memberi bobot baru dalam dimensi budaya nelayan, karena sistem pengorganisasian diri dan kemampuan mengembangkan mitra usaha semakin berkembang.

Keunikan lain yang menonjol dari satu unit bagang rambo adalah karena ia dilengkapi dengan fasilitas komunikasi yang cukup canggih seperti HT, telepon seluler, televisi, dan radio. Dengan sejumlah fasilitas seperti itu, komunikasi antara nelayan dengan punggawa di darat, antara bagang rambo yang satu dengan bagang rambo yang lain dapat berlangsung setiap saat.

3. Bagang Rambo, Kondisi Ekologis dan Sosiobudaya Masyarakat

Teknologi bagang rambo bagi masyarakat nelayan di Kabupaten Barru, tidak dapat dipandang hanya sebagai sebuah fenomena teknologis yang berdiri sendiri, melainkan fenomena tersebut harus dipandang dalam konteks yang lebih luas dengan melihat keterkaitannya dengan fenomena lain sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi secara utuh. Fenomena penerapan teknologi bagang rambo oleh masyarakat nelayan dalam pemanfaatan lingkungan laut adalah suatu fenomena yang tidak terlepas kaitannya dengan fenomena sosial budaya, bahkan dapat dikatakan bahwa peristiwa perkembangan teknologi penangkapan, mulai dari tingkat yang paling sederhana sampai pada taraf yang kompleks seperti saat ini. Masyarakat nelayan di Barru membangun dan mengembangkan teknologi bagang rambo sesungguhnya merupakan wujud kemampuan adaptif yang dimiliki dalam berinteraksi dengan lingkungan alamnya, dan itu semua merupakan hasil dari proses akumulatif yang melewati waktu panjang hingga mencapai wujudnya seperti sekarang ini.

Demikian pula penerapan teknologi bagang rambo bagi pemanfaatan lingkungan memiliki hubungan timbal balik (*feedback*), baik dalam konteks ekologis maupun pada tataran sosial budaya. Penerapan teknologi bagang rambo, dalam posisi relatif berkonsekuensi terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi yang dapat dilihat dari meningkatnya secara rata-rata pendapatan perkapita masyarakat nelayan, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam pemanfaatan bagang rambo. Konsekuensi ekologis dari penerapan teknologi bagang rambo adalah semakin rendahnya kualitas lingkungan laut, dan tereksploitasinya lingkungan laut secara besar-besaran yang menyebabkan populasi ikan semakin berkurang.

Secara umum dalam rangka pemanfaatan sistem teknologi, kenyataan aktual menunjukkan bahwa masyarakat maritim dalam menggunakan teknologi untuk pemanfaatan sumberdaya laut, selain mencatat sejumlah keberhasilan (seperti dalam bentuk peningkatan pendapatan rata-rata penduduk, dan penyerapan tenaga kerja potensial dalam bidang kenelayan) yang arahnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain juga berkonsekuensi terhadap berbagai fenomena sosial budaya seperti terjadinya ketegangan-ketegangan sosial yang dapat menjadi cikal bakal bagi terciptanya transformasi sosial budaya bagi masyarakat nelayan (Mamar, 1989, Naping, 1991).

Secara teoritis dapat dikemukakan bahwa pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pemanfaatan lingkungan alam tersebut, memiliki makna yang sangat strategis karena dengan itu, masyarakat nelayan memenuhi kebutuhan ekonominya, di samping kebutuhan sosial, budaya dan biologis lainnya.

Hal tersebut memang sesuai dengan prinsip alamiah yang dimiliki oleh manusia, yakni di samping rangsangan dan dorongan untuk memanfaatkan lingkungan alam sebesar-besarnya guna memenuhi sejumlah kebutuhan, baik kebutuhan dasar (biologis) maupun kebutuhan psikologis dan kebutuhan sosial.

Akan tetapi, lebih dari itu, disamping memanfaatkan lingkungan alam laut untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat nelayan bagang rambo di Barru juga memiliki seperangkat tatanan (norma dan nilai) yang mengarahkan mereka untuk tetap menjadi bagian dari lingkungan yang lestari. Fenomena empirik yang dapat dijadikan acuan atas pembenaran dari fakta ini

adalah dilakukannya sejumlah kegiatan ritual yang bermakna mewujudkan hubungan harmonis antara mereka dengan lingkungannya. Juga telah disepakatinya sejumlah nilai yang menganggap perbuatan negatif dan pemberian sanksi sosial segala hal yang merupakan tindakan destruktif bagi tindakan yang merusak lingkungan seperti penggunaan bom dan sejenisnya untuk kegiatan penangkapan. Dengan demikian, nelayan bagang rambo yang memainkan posisi sebagai antroposentris bagi lingkungan telah memainkan peran ganda, yakni di samping sebagai pengambil manfaat dari lingkungan, juga telah memposisikan diri sebagai pemelihara lingkungan, sehingga tercipta keserasian yang harmonis antara lingkungan di satu pihak dengan masyarakat nelayan itu sendiri pada pihak lain.

Dalam rangka memanfaatkan lingkungan laut, masyarakat nelayan bagang rambo mengembangkan seperangkat kebudayaan dalam bentuk idea, gagasan, aktivitas atau tindakan, serta teknologi yang berupa materi dan cara-cara atau strategi tertentu sebagai wujud dari penerapan ilmu pengetahuan yang mereka miliki (Abu Hamid, 1996). Elaborasi konsep teknologi dalam konteks ini mengacu pada pemahaman operasional bahwa teknologi, khususnya teknologi penangkapan seperti bagang rambo dan teknologi transportasi laut harus dipahami dengan penekanan pada bagaimana anggota masyarakat memberi tanggapan dan harapan serta bagaimana mekanisme pemanfaatannya (Abu Hamid, 1986 : 8).

Secara empirik, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat nelayan bagang rambo adalah bagian dari kelompok masyarakat yang memanfaatkan lingkungan alam laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sejak beberapa dasawarsa yang lalu hingga saat ini mengalami dinamikanya sendiri sebagai suatu proses menuju terciptanya sebuah perubahan, baik perubahan yang bersifat *microscopic* maupun perubahan yang bersifat *macroscopic*. Perubahan yang bersifat *microscopic* ditandai oleh adanya perubahan pada unsur-unsur yang detail dalam kehidupan masyarakat dan hanya dapat dideteksi melalui pengamatan yang cermat, sedangkan perubahan yang bersifat *macroscopic* adalah perubahan dalam skala besar yang tampak jelas walaupun hanya dengan pengamatan selintas. Perubahan yang terjadi merupakan akibat dari adanya dorongan internal,

berupa daya kreatifitas dan inovasi dari warga masyarakat, maupun karena pengaruh eksternal (dari luar masyarakat yang bersangkutan) dalam bentuk hasil serapan dan adopsi dari luar masyarakatnya. Diasumsikan bahwa sumber-sumber (penyebab) terjadinya perubahan sosial budaya nelayan bagang rambo yang terjadi hingga saat ini adalah karena pengaruh perangkat-perangkat teknologi bagang rambo yang mereka gunakan (Naping 2003:4).

Keberadaan perangkat teknologi bagang rambo dan inovasi-inovasi baru yang menyertainya diduga memberi fungsi tertentu bagi proses pergeseran pranata-pranata sosial budaya. Pergeseran mana adalah merupakan wujud responsif adaptif dan mekanisme penyesuaian dari perangkat teknologi baru. Dengan demikian fungsi teknologi bagang rambo dapat dipahami sebagai media terwujudnya transformasi dan perubahan sosial budaya.

4. Teknologi Bagang dan Perubahan Sosial Budaya Masyarakat

Dalam konteks pembahasan teknologi sebagai stimulan terjadinya perkembangan masyarakat nelayan bagang rambo harus dipahami dan memiliki makna sebagai fungsi bagi terwujudnya struktur sosial dan budaya dalam eksistensi masyarakat nelayan bagang rambo di Kabupaten Barru. Teknologi bagang rambo dapat dijadikan sebagai suatu pusat orientasi dan titik penting untuk memenuhi bagaimana berlangsungnya proses dan mekanisme perkembangan yang terjadi pada masyarakat tersebut. Pemahaman tentang teknologi bagang rambo yang digunakan mengantar kita untuk memenuhi kondisi obyektif masyarakat nelayan di Kabupaten Barru itu sendiri,. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bersumbu pada teknologi bagang rambo kita dapat menemukan benang merah yang merambat pada semua dimensi rambatan benang merah itu membawa kita pada pemahaman holistik tentang dunia kenelayanan dengan segala dimensinya.

Pada sisi yang lain, teknologi dan inovasi dalam rangka pemanfaatan lingkungan alam laut berfungsi untuk mewujudkan orientasi dan tujuan sistem dari struktur masyarakat yang ada. Jika tujuan dari sistem masyarakat adalah terwujudnya kesinambungan eksistensi, maka teknologi memainkan peran-

peran strategis menuju terciptanya tujuan tersebut melalui fungsi yang disumbangkan terhadap aktivitas hidup anggota masyarakat. Mengacu pada asumsi teoritis seperti itu, dapat dikemukakan bahwa teknologi sebagai sebuah inovasi maupun sebagai sebuah proses difusi dan akulturasi menjadi bagian yang terintegrasi dengan komponen lain dalam suatu struktur yang berfungsi. (Naping, 2003:5)

Munculnya struktur baru dalam masyarakat nelayan terutama yang disebabkan karena mausknya teknologi bagang rambo melalui dua saluran yakni berupa hasil inovasi kreatif warga masyarakat yang memiliki tingkat kecerdasan tertentu, dan hasil serapan dan adopsi dari luar. Teknologi bagang rambo merupakan produk kreatif, dan hasil adopsi yang tersosialisasi dan teradaptasi secara sukses bagi anggota masyarakat, sehingga ia menjadi sebuah produk budaya.

Mengungkap fenomena penerapan teknologi yang dihubungkan dengan transformasi sosial budaya nelayan sebagai bagian dari totalitas masyarakat pedesaan, sesungguhnya terkandung tujuan dan manfaat yaitu dapat mengantar kita memperoleh pengertian yang mendalam tentang nelayan dengan segala eksistensinya. Penerapan berbagai macam teknologi dalam konteks pemanfaatan lingkungan termasuk aktifitas kenelayanan, telah terjadi pergeseran unsur-unsur sosial dalam bentuk perubahan pranata sosial ekonomi, organisasi dan kelompok-kelompok sosial, pola-pola hubungan sosial, peranan dan status sosial. Terjadinya transformasi sosial ekonomi pada masyarakat nelayan tidak terlepas dari berbagai macam kebijakan pemerintah sebagai upaya untuk mengentaskan nelayan dari keadaan miskin. Skeitar tahun 1970-an misalnya, berdasar pada keinginan pemerintah meningkatkan derajat hidup masyarakat nelayan, ditetapkan kebijakan mengintrodusir penangkapan seperti perahu yang dilengkapi dengan mesin (*out board engine*).

Pandangan teoritis yang menjadi pegangan tulisan ini adalah bahwa dalam upaya memahami teknologi bagang rambo sebagai suatu unsur budaya dalam sistem masyarakat nelayan, bahwa teknologi bagang rambo adalah merupakan sebuah unsur dari sistem yang diyakini memainkan fungsi tertentu. fungsi tersebut antra lain mewujudkan stabilitas dinamis dari eksistensi masyarakat nelayan sebagai akibat dari meningkatnya

produktivitas merupakan.

Fungsi teknologi bagang rambo bagi struktur masyarakat nelayan adalah memantapkan struktur baru sebagai akibat dari transformasi struktur lama, di mana stuktur lama yang tidak fungsional lagi digantikan kedudukannya oleh komponen struktur yang lebih sesuai dengan strategi pencapaian tujuan sistem, yang dimantapkan oleh pola-pola nilai yang adaptif. Struktur baru yang mewarnai kehidupan masyarakat nelayan terutama dalam hubungannya dengan penguasaan dan pemanfaatan teknologi bagang rambo, mereka yang menguasai, memanfaatkan, dan memiliki teknologi baru dengan segala perangkatnya menduduki posisi-posisi baru dalam struktur masyarakat, dan mereka ini tentu saja memainkan peranan-peranan sosial tertentu sesuai dengan tuntutan statusnya yang baru.

Pola-pola hubungan yang tercipta dalam masyarakat nelayan pada saat masih menggunakan teknologi sederhana masih bersifat pola hubungan patron-clien, dimana pola seperti itu menjadi suatu pola hubungan yang tidak fungsional lagi pada saat mereka telah menggunakan teknologi bagang rambo, akibatnya pola hubungan itu harus disesuaikan dengan pola hubungan lain yang lebih bersifat organik, hal ini disebabkan oleh karena pemanfaatan tenaga kerja manusia yang dominan sebelum masuknya teknologi bagang rambo dengan segala perangkatnya digantikan oleh unsur-unsur teknologi baru, sehingga secara langsung atau tidak langsung pola hubungan lama harus bersesuai dan digantikan dengan pola hubungan antara status yang lebih bersesuai dan adaptif.

Kecenderungan meningkatnya tingkat kesejahteraan bagi nelayan sebagai konsekuensi dari penerapan teknologi bagang rambo merupakan fenomena sosial kontemporer yang sesungguhnya muncul dari fungsi teknologi tersebut. Demikian pula dapat diasumsikan bahwa pola-pola hubungan antar perorangan mengalami pergeseran mengikuti struktur baru, dimana pola hubungan yang didasari oleh prinsip ekonomi yang saling menguntungkan muncul secara fungsional menggantikan kedudukan pola-pola hubungan yang berdasar atas sistem dan pola kebersamaan yang didasari oleh semangat gotong royong dan kekerabatan. Struktur dan pola hubungan seperti itu memainkan fungsi tertentu dalam rangka memberi jawaban terhadap tuntutan masyarakat yang mengalami proses dinamika,

sehingga benar apa yang dikatakan oleh Brown (1952) bahwa jika ada salah satu unsur dari sistem bergeser maka unsur dari sistem lainnya harus menyesuaikan diri dalam rangka mencapai tujuan dan menciptakan kelangngan struktur sistem yang bersangkutan.

Mengacu pada penjelasan seperti telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa setiap komponen dalam suatu struktur sistem memainkan fungsinya sendiri-sendiri dan secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan dan berlangsungnya secara kontinyu struktur sistem yang bersangkutan. Oleh karena itu masing-masing unsur sistem memilik tanggung jawab secara bersama, maka apabila terjadi dinamika pada unsur sistem maka unsur sistem yang lain harus bersesuai membentuk sinergi secara fungsional.

Komunitas nelayan bagang rambo sesuai dengan perkembangan kebudayaan yang dimiliki, menerima inovasi-inovasi baru dalam bidang perikanan, baik yang berupa hasil cipta tokoh masyarakat yang kreatif (*indegenous knowledge*), maupun hasil adopsi dari luar, baik dalam bentuk perangkat lunak maupun perangkat kerasnya, membawa konsekuensi pada terjadinya stabilitas dinamis masyarakat nelayan. Perubahan struktur masyarakat nelayan adalah merupakan hasil transformasi budaya yang ada pada gilirannya menyebabkan terjadinya transformasi sosial ekonomi. (Abu Hamid, 1986)

Pergeseran pranata sosial ekonomi sebagai konsekuensi dari permintaan dan penerapan teknologi bagang rambo berimplikasi pada terjadinya pergeseran pada seluruh segmen pranata dalam totalitas kehidupan masyarakat nelayan. Pergeseran itu secara empirik dapat diamati kekerabatan, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian, sistem politik, sistem perlengkapan hidup, dan mungkin pada sistem kesenian dan bahasa, yang merupakan komponen penting dalam sebuah kebudayaan (Koentjaraningrat, 2992).

Terjadinya pergeseran dinamis seperti itu menampakkan sosok komunitas nelayan pada saat ini bertransformasi dalam bentuk dan struktur barum yang apabila diamati dalam jaringan yang luas ia akan memainkan peranan dan fungsi-fungsi baru dalam eskalasi sistem yang lebih luas.

Sebuah pernyataan kunci yang patut dikemukakan adalah bahwa terjadinya transformasi sosial ekonomi pada masyarakat

nelayan adalah merupakan fungsi teknologi dalam bidang kenelayanan yang diserap oleh mereka berdasarkan kemampuan dan wawasan-wawasan budaya yang dimiliki. Dengan terserapnya teknologi baru dalam bidang perikanan dan transportasi, memperkaya sistem struktur masyarakat sehingga dinamika internal struktur mengalami penyesuaian yang menyebabkan pula terjadinya pola struktur baru dalam masyarakat nelayan.

5. Catatan Penutup

Fenomena hidup dan kehidupan masyarakat maritim/nelayan tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan sistem teknologi yang memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan lautnya. Oleh karenanya pemahaman tentang masyarakat maritim yang baik harus selalu mengkaitkannya dengan eksistensi teknologi yang dimiliki. Hal ini disebabkan oleh karena seperti apa dikemukakan oleh Steward (1952) dengan konsep inti budaya (*culture core*) yang merambat dan mewarnai dimensi lain dalam kehidupan manusia. Teknologi dapat menjadi jendela bagi kita untuk menelusuri lebih dalam tentang seluk beluk masyarakat, termasuk di dalamnya

masyarakat maritim.

Kepustakaan

Abu Hamid

- 1986 Studi Sosio Antropologi Ekonomi Tentang : Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Sektor Kemaritiman di Sulawesi Selatan. Hasil Penelitian Bappeda Tk I – Universitas Hasanuddin. Tidak diterbitkan.
- 1987 Passompe Bagi Orang Bugis di Sulawesi Selatan. Workshop Trade. Society and Belief in South Sulawesi and Its Maritime Woerld. Nederland.
- 1998 Kebudayaan di Abad Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Suatu Penelusuran Awal. Materi Pengajaran dan Kertas Kerja ISBD, Makassar,

Brown, Redcliffe

1952 Structure and Function In Primitive Society. LC.
And West.

Kaplan, David & Albert A. Manners

1999 Teori Budaya. Terjemahan; The Theory
of Culture. Bandung Simatupang, Yogyakarta: Pustaka Press.

Koentjaraningrat

2002 Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan.
Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Cetakan ke duapuluh.

Malinowski, B.

1922 Agronouts of The Wester Pasific. London;
Routledge.

Mamar, Sulaeman

1986 Pengelolaan Sumberdaya Laut Pada Masyarakat
Nelayan Kaili di Teluk Palu Sulawesi Tengah; Suatu Kajian
Etnoekologi. Thesis, Jakarta : Program Pascasarjana Universitas
Indonesia.

Naping, Hamka

1991 Pengetahuan Kelautan Masyarakat Nelayan :
Suatu Studi Etnoekologi di Kelurahan Lappa Sulawesi Selatan.
Thesis S2. Jakarta : Program Pascasarjana Universitas
Indonesia.

2003 Teknologi dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan
Lingkungan Masyarakat Maritim di Sulawesi Selatan.
Makalah, yang disampaikan pada Seminar Budaya
Maritim yang dilaksanakan oleh Balai Jaranitra.
Makassar, 27-9-2003.

Makassar, 15 Oktober 2003

Terima kasih

BAHASA INDONESIA: PENGEMBANGAN CARA PANDANG BANGSA DAN PEMANFAATAN PERUBAHAN BAHASA

Oleh: **Harimurti Kridalaksana**

“Bahasa persatuan hendaknya bernama Bahasa Indonesia. Kalau belum ada, kita lahirkan Bahasa Indonesia melalui Kongres Pemuda Pertama ini.”

M. Tabrani, 2 Mei 1926

Bahasa Indonesia sebagai pranata hidup yang telah ditetapkan dan sudah menjadi identitas persatuan nasional mesti dilestarikan pada tataran pribadi dan pada tataran masyarakat.

Pada tataran pribadi bahasa itu, sebagaimana bahasa mana pun di dunia ini, sudah dan mesti diteruskan bukan hanya untuk menjadi sarana pengungkapan batin manusia dan kekayaannya, melainkan juga menjadi sarana untuk memandang dunia sekitar, sehingga dapat dikembangkan cara pandang bangsa Indonesia.

Seperti halnya bahasa-bahasa mana pun di dunia, Bahasa Indonesia senantiasa mengalami perubahan yang sering tidak dirasakan oleh penuturnya. Perubahan itu bisa bersifat sentrifugal, bisa bersifat sentripetal. Perubahan yang bersifat sentrifugal menghasilkan banyaknya ragam dan dialek yang mestinya dapat menjadi sarana pengungkapan kreatif kelompok dan individu penutur, namun pada akhirnya dapat mengakibatkan kegagalan komunikasi yang menghasilkan bahasa-bahasa yang berbeda. Perubahan sentripetal yang bertujuan untuk menghalangi atau mengurangi perkembangan sentrifugal dapat mengakibatkan keseragaman yang “menyesakkan”. Pembinaan bahasa sebagai bagian dari strategi kebudayaan mesti mengusahakan keseimbangan di antara kekuatan sentrifugal dan kekuatan sentripetal. Pelestarian pada tataran masyarakat akan menjaga kestabilan bahasa sebagai alat komunikasi yang kreatif.

1. Masa-Masa Awal Bahasa Indonesia

Ketika Bahasa Melayu diresmikan sebagai bahasa persatuan dan diberi nama Bahasa Indonesia, para pencetus Sumpah

Pemuda tidak memperhatikan Bahasa Melayu jenis mana yang akan digunakan, mengingat banyaknya variasi dalam Bahasa Melayu pada waktu itu, seperti halnya sekarang. Dalam Kongres Bahasa Indonesia Pertama tahun 1938 di Solo Ki Hadjar Dewantara menyatakan,

“Jang dinamakan “Bahasa Indonesia” jaitoe Melajoe jang soenggoehpoen pokoknja berasal dari “Melajoe Riau” akan tetapi jang soedah ditambah, dioebah atau dikoerangi menoeroet keperluan zaman dan alam baharoe, hingga bahasa itoe laloe moedah dipakai oleh ra’jat diseleroeh Indonesia; pembaharoean Bahasa Melajoe hingga mendjadi Bahasa Indonesia itoe haroes dilakoekan oleh kaoem ahli jang beralam baharoe, ialah alam kebangsaan Indonesia.”

Dalam perkembangannya karena Bahasa Indonesia sudah dianggap tidak sama dengan Bahasa Melayu, jadilah ia sebuah bahasa yang tidak sama dengan bahasa pokok atau bahasa asal itu. Namun Bahasa Melayu sendiri, bersama dengan bahasa-bahasa daerah lain berdampingan dengan Bahasa Indonesia bahasa persatuan Indonesia, tidak mati, bahkan tetap berkembang dengan subur seperti sediakala berupa dialek dan ragamnya di pelosok-pelosok Asia Tenggara.

Dalam pada itu Bahasa Indonesia, setelah mulai dengan tersendat-sendat dan kemudian didorong untuk tumbuh mandiri ketiga negeri ini dijajah Jepang, berkembang dengan sangat pesat dan sangat subur dalam semua bidang kehidupan, bukan hanya dalam bidang kesusastraan atau bidang administrasi dan pers saja, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan lebih dari itu, di luar dugaan dan tanpa rencana dan tanpa ada yang mengatur, Bahasa Indonesia menjadi bahasa ibu bagi generasi baru manusia Indonesia.

2. Perubahan Ekstern: Munculnya Generasi Penutur Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Pertama dan Persaingan Antara Bahasa

Tumbuhnya Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu dan terjadinya persaingan di antar bahasa nasional dengan bahasa-

bahasa daerah dalam pelbagai ranah kehidupan merupakan episode baru dalam sejarah bahasa kita. Dari sudut pandang para pesimis, keadaan itu membahayakan bahasa-bahasa daerah baik dalam pelbagai ranah kehidupan, maupun dalam penggunaan bahasa dan khazanah bahasanya. Bahasa nasional menyisihkan bahasa daerah yang semula lebih banyak digunakan sebagai bahasa dalam keluarga; bahasa daerah tidak mendapat kesempatan untuk berkembang menjadi bahasa ilmiah, misalnya. Juga kesusastraan daerah tersaingi oleh kesusastraan Indonesia yang lebih banyak peminatnya. Dari sudut pandang para optimis, keadaan itu dianggap merupakan keniscayaan sejarah, dan merupakan pertanda terjadinya pergeseran fungsi atau pembagian fungsi baru di antara kedua jenis bahasa itu, dan bila dikelola dengan baik akan terjadi bilingualisme yang tidak akan merugikan pengguna bahasa. Sementara itu bahasa daerah akan banyak berubah karena pengaruh kuat dari (atau dalam pandangan yang lebih optimistis, diperkaya oleh) Bahasa Indonesia.

Kalau kita amati pendapat para pakar dan peminat bahasa tentang perbenturan itu sebagaimana dapat dilihat dalam pelbagai pertemuan bahasa, seperti Kongres Bahasa Indonesia yang diselenggarakan lima tahun sekali (yang akan disinggung di bawah nanti) tidak ada satu orang pun yang menghendaki matinya bahasa dan kesusastraan daerah, walaupun kehendak dan keinginan itu jarang diterjemahkan menjadi tindakan atau program yang bernas. Memang nampaknya apakah monolingualisme yang menyisihkan bahasa-bahasa daerah ataukah bilingualisme berimbang yang akan terwujud secara praktis (yang sebagai prinsip tidak pernah mengemuka dalam perdebatan publik), tergantung pada faktor-faktor luar bahasa, seperti politik dan ekonomi.

Pergulatan di antara bahasa nasional dan bahasa daerah yang belum selesai tersebut diperumit oleh munculnya Bahasa Inggris yang dengan dukungan kekuatan politik dan ekonomi yang sangat dahsyat menjadi tantangan berat bagi kelanggengan konsensus nasional untuk mempertahankan persatuan nasional melalui Bahasa Indonesia. Dalam hal ini pun sebenarnya masalahnya serupa dengan masalah bahasa nasional lawan bahasa daerah: beberapa negara di Asia ataukah seperti sekarang dengan isme apa saja namanya (karena belum

ada istilahnya dalam linguistik), memperlakukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, menghormati bahasa-bahasa daerah sebagai kekayaan budaya, dan menganggap Bahasa Inggris tetap sebagai bahasa asing. Walau tidak pernah muncul dalam pembahasan publik, dapat kita pahami seandainya para penganut golobalisasi akan mendukung bilingualisme.

3. Perubahan Intern

Berlainan dengan pendapat beberapa ahli ilmu sosial dan linguistik asing yang tidak mendalami sejarah bahasa, Bahasa Indonesia jelas bukan bahasa '*artificial*' dan bukan pula kreol atau pijin, melainkan bahasa alami. Sebagai bahasa alami Bahasa Indonesia di samping mempunyai penutur yang berbahasa ibu itu, juga menumbuhkan variasi bahasa berupa dialek dan ragam bahasa. Terjadinya dialek dan ragam bahasa itu adalah karena bahasa alami menjadi sasaran apa yang lazim disebutkan perubahan bahasa yang bersifat sentrifugal yang bila tidak ada kendali masing-masing bisa menjadi bahasa sendiri. Di samping kekuatan itu, bahasa alami juga menjadi sasaran perubahan bahasa yang bersifat sentripetal yang mendasari terjadinya pembakuan bahasa, pembentukan bahasa profesi atau penyeragaman istilah yang bila tak terkendali akan terjadi uniformisasi yang mematikan kreativitas. Tanpa atau dengan intervensi pengendalian perubahan bahasa bisa dicapai dengan mengusahakan keseimbangan di antara kedua kekuatan itu. Intervensi itu bisa terencana, bisa tak terencana. Contoh yang terencana ialah penerbitan, persekolahan, atau kebijakan bahasa secara institusional; yang tak terencana ialah penciptaan kata-kata baru yang kemudian diterima masyarakat atau penggunaan kata *Ibu* dan *Bapak* untuk menyapa dengan hormat^{3/4}entah siapa yang memulainya.

Apa yang dikenal masyarakat luas sebagai pembakuan bahasa atau standardisasi sebagai salah satu bentuk intervensi semestinya dimaksudkan untuk menyeimbangkan kekuatan sentrifugal dan kekuatan sentripetal. Pembakuan bahasa bukan dimaksudkan untuk mencapai keseragaman bahasa, melainkan untuk memantapkan fungsi pelbagai ragam bahasa (satu di antaranya adalah ragam baku) disertai unsur-unsur bahasa sebagai pengungkapnya, mulai dari lafal dan ejaan sampai ke

wacana.

Standardisasi bahasa merupakan salah satu upaya apa yang dikenal sebagai pembinaan bahasa, yakni upaya untuk mengukuhkan pemakaian bahasa di kalangan penggunanya dengan memperdalam pengetahuan dan wawasan dan meningkatkan sikap positif terhadap bahasa itu.

Dalam sejarahnya yang hanya berlangsung selama kurang dari 75 tahun perubahan dalam Bahasa Indonesia yang sangat drastis telah terjadi, tetapi upaya intervensi pun tidak kurang dilaksanakan orang.

4. Aspirasi Masyarakat Terhadap Masa Depan Bahasa Indonesia

Sebagai konsekuensi Sumpah Pemuda 1928 persoalan bahasa merupakan persoalan yang akrab bagi semua orang dan tidak dapat dipisahkan dari persoalan kehidupan bangsa. Jadi semua persoalan itu menjadi bahan pembahasan dalam kajian ilmiah dan pertemuan kebahasaan, antara lain yang dijadikan tradisi berupa Kongres Bahasa Indonesia yang diselenggarakan sekali lima tahun, dan dihadiri oleh segala lapisan masyarakat. Dari waktu ke waktu ada pengulangan dalam topik yang dibahas, ada pergeseran fokus yang diminati orang, tetapi semuanya memiliki dasar yang bertujuan untuk mengukuhkan dan memantapkan konsensus nasional untuk:

1. mengekalkan dan mengembangkan Bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa;
2. mempertegas fungsinya dalam kehidupan berbangsa;
3. memuliakan bahasa-bahasa daerah sebagai kekayaan sosial budaya bangsa;
4. senantiasa mengorientasikan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan konstelasi dunia, khususnya dengan mempertegas fungsi bahasa-bahasa asing;
5. memanfaatkan perkembangan bahasa-bahasa dunia dengan karya sastra dan karya intelektualnya demi kemajuan peradaban bangsa Indonesia.

5. Pembinaan Bahasa Sebagai Bagian Strategi Kebudayaan

Kata kunci yang selalu muncul dalam pembahasan tentang



Bahasa Indonesia ialah *jati diri bangsa*. Dan memang itulah warisan sejarah persatuan bangsa kita yang secara tradisional terungkap dalam pepatah *Bahasa menunjukkan bangsa* dan dalam pantun *Yang kurik kundi, yang merah saga; yang baik budi, yang indah bahasa*. Dalam linguistik hubungan di antara bahasa dan penuturnya pernah diperdebatkan dalam rangka pemikiran bahwa bahasa mempengaruhi cara pandang penuturnya, dan bukan hanya sebaliknya. Kasus perubahan Bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia karena perubahan cara pandang penuturnya menguatkan tesis itu. Jadi bila kita percaya pada tesis itu dan ingin mempertahankan jati diri kita, tentunya yang perlu dilakukan ialah memelihara bahasa kita supaya sejak dini digunakan untuk memandang diri dan alam sekitar penuturnya.

Jalan satu-satunya ialah mengintegrasikan prinsip dan upaya pembinaan bahasa ke dalam strategi kebudayaan Indonesia.

DARI INDONESIA MERDEKA KE INDONESIA MULIA, UTOPIA ATAU SEBUAH KENISCAYAAN ?

(VISI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF BUDAYA)

Makalah untuk kongres kebudayaan V di Bukittinggi

Oleh : **Husni Djamaluddin**

Sejak konstitusi disusun oleh para pendiri bangsa, Indonesia sebagai suatu Negara yang akan dibentuk telah memiliki cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Sekalipun tidak menggunakan terminologi “ visi dan misi” seperti yang Izim digunakan sekarang ini, namun amatlah jelas bahwa Indonesia sejak lahirnya harus bisa dibawa kearah “ kesejahteraan rakyat”. Untuk itulah rakyat dari bangsa ini harus dicerdaskan, karena dengan kecerdasanlah bangsa ini bisa memiliki martabat dan kesetaraan dengan masyarakat dengan masyarakat dunia. Sebagai anggota dari masyarakat dunia. Indonesia yang cerdas akan dapat mendorong perdamaian dunia yang abadi.. Kira-kira begitulah alam pikiran dari para pendiri bangsa ini, sehingga dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alam pikiran itu kini masih eksis dan tak pernah teramandemen oleh era pemerintahan siapapun dan tak pernah diusili oleh MPR manapun dalam perjalanan panjang lembaga (ter)tinggi negara kita itu. Alangkah hebatnya cita-cita di atas, begitu sabarnya kita menunggu cita-cita itu yang sampai kini belum ada tanda-tanda untuk dicapai. Sungguh luar biasa kesabaran rakyat kita.

Setelah 58 tahun Indonesia merdeka, visi Indonesia yang tidak lain adalah “kesejahteraan rakyat” (bahasa dalam konstitusi “kesejahteraan sosial”) ternyata masih menuntut kesabaran hingga ke tingkat generasi yang seorangpun bisa meramalkannya. Cita-cita kesejahteraan sosial diakui sangat berhasil, tetapi hanya untuk sebagian kecil rakyat yang memperoleh peluang untuk menjadi cerdas memanfaatkan semangat keadilan sosial yang tak kunjung terwujud. Indonesia yang dicita-citakan untuk tertip dan beradab malah mencari

Bentuk sendiri kearah yang sebaliknya : konplik-konplik antar anak bangsa, kekerasan yang mulai membudaya dan konon telah menjadi salah satu basis terorisme. Kalau mau jujur, tanpa maksud untuk mengolok-ngolok diri sendiri (soalnya apasih

untungnya?). Indonesia kini bukan saja sedang berusaha menyelesaikan krisis, tetapi harus siap-siap untuk menghadapi krisis yang lebih sulit diselesaikan. Suatu krisis yang tak mudah dikuantifikasikan dalam kaidah-kaidah ilmiah untuk menebak dimensi waktu untuk menyelesaikannya.

Dunia intelektual sebenarnya sangat beruntung, ketika dikagetkan oleh peringatan Fritjof Capra. Dalam bukunya "The turning point of civilization", ilmuawan ini secara akademik percaya bahwa duna kini tengah mengalami krisis yang multi dimensional. Anehnya, krisis itu terjadi antara lain karena dampak dari kecerdasan yang telah berhasil dicapai oleh bangsa-bangsa di bagian lain dari planet ini. Sungguh ironis, kita baru saja sedang berjuang dengan susah payah untuk menjadi bangsa yang cerdas. Rupanya, cerdas adalah suatu tuntutan peradaban yang harus ada batasnya. Cerdas untuk apa dan untuk siapa. David C. Korten yang menulis "The post Cooperate Word" bahkan seakan mencibir kita yang baru masuk dalam gelanggang kapitalisme padahal menurutnya, kapitalisme tak membuat masa depan manusia menjadi lebih berarti. Fenomena kebudayaan global yang diperhamba oleh koporatisme telah membawa manusia ke dunia yang terisolasi dari kebermaknaan dirinya. Dan kita menjadi lebih kaget tak kala John Naisbitt secara logis menguraikan dengan meyakinkan bahwa teknologi, setidak-tidaknya untuk teknologi digital, budaya "kekerasan" telah ditransformasikan secara efektif oleh alat-alat komunikasi dan informasi ketengah-tengah perkembangan peradaban generasi saat ini. Semua demi kepuasan bisnis, untuk materi agar menjadi manusia yang modern dan maju. Dalam perspektif itulah maka John Naisbit merekomendasikan agar teknologi maju

(high tech) perlu diberi pula sentuhan tinggi (high touch). Itulah sebabnya dia memberi judul bukunya dengan "high tech high touch". Ketika tokoh ilmuwan di atas tentulah bukan paranoid karena tak ada tulisanya yang berbau fiksi, semuanya sarat dengan hasil-hasil pengamatan dan penelitian yang cukup komprehensif.

Lalu apa arti visi Indonesia dan apa relevansinya sekiranya kita menyebut peringatan-peringatan dari tigailmuwan di atas ?

Tidak ada maksud untuk mengusulkan amandemen UUD

1945 dan memuja-muja ilmuwan asing. Visi Indonesia tak ada hubungannya (untuk sementara) dengan peringatan-peringatan di atas. Tetapi tentu kita memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta menyelamatkan Indonesia agar tidak tersesat dalam belantara budaya yang kini tak terlepas dari pengaruh-pengaruh global disamping keberadaan budaya ke Indonesian yang kini terancam “gagal” untuk diberi yang namanya martabat, moralitas dan kemuliaan. Karenanya, makalah ini ingin mengingatkan kembali pesan dan peringatan yang tak kalah mengagetkan dari dua tokoh cendekiawan kita. Yang pertama ialah Prof. Syafi'i Maarif yang menduga bahwa krisis kita (maksudnya korupsi) telah nyaris sempurna dan sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Yang kedua ialah Frans Magnis Suseno yang bahkan melihat Indonesia sudah dipinggir jurang kehancuran karena korupsi tak mampu lagi dihentikan. Artikulasi dari pesan kedua tokoh itu, ialah bahwa Indonesia tak serius membangun budaya ke Indonesian yang bermartabat dan bermakna karena baik pemerintah maupun masyarakatnya telah terjebak dalam budaya materialisme, konsumerisme, hedonisme gaya hidup kepura-puraan. Kita telah lama membiarkan akar budaya yang bernilai tinggi tercabut dan membangun tanpa sadar budaya perilaku primitif. Sebabnya tidak lain karena kita memiliki visi dalam perspektif budaya

Tanpa bermaksud untuk merangkum, saya cuma ingin menyatakan bahwa visi Indonesia masa depan baiklah kita fokuskan pada adanya kecerdasan bangsa yang dibingkai oleh moralitas dan idealisme kemanusiaan. Manusia Indonesia perlu cerdas, berkecukupan, jujur, berani dan benar karena dengan sifat-sifat itulah keteraturan dan ketertiban bernegara bisa diwujudkan. Manusia-manusia Indonesia yang seperti itu bisa kita ciptakan melalui proses budaya yang panjang, berliku-liku dan (tak terelakkan) harus mampu beradaptasi dengan lingkungan strategis dan peradaban baru yang tengah bergerak entah kemana.

Oleh karenanya, visi manusia dan bangsa Indonesia dapat kita arahkan pada hanya satu kata yakni “mulia”. Manusia Indonesia yang mulia, bangsa Indonesia yang mulia. Mulia adalah puncak dari seluruh nilai yang melekat pada sosok seorang yang berbudaya dan berperadaban. Bangsa Indonesia haruslah menjadi bangsa yang mulia. Wage R. Supratman

dengan sangat bijak dan cerdas telah menuliskan syairnya dalam lagu Indonesia Raya : Indonesia Raya, Mulia ... Mulia ... Hiduplah Indonesia Raya.

Tetapi ada yang kemudian mencopot “kata mulia” dalam teks asli lagu kebangsaan Indonesia Raya dan menggantinya menjadi, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.

Penggantian itu mungkin tidak punya maksud jelek. Barangkali didorong oleh semangat tinggi dan peluang yang terbuka lebar untuk Indonesia merdeka pada tahun-tahun menjelang dan pasca Proklamasi Kemerdekaan R.I 17 Agustus 1945.

Tapi realitas sampai 58 tahun usia Indonesia Merdeka, bangsa Indonesia tak kunjung menyebrangi “jembatan emas” seperti yang disebut Bung Karno sebagai metafor kemerdekaan.

Kita belum juga menjejakkan kaki di seberang “jembatan emas” itu, di tanah yang ramah dan subur dengan kehidupan sosial yang adil dan makmur. Tragisnya, kemerdekaan yang disebut Bung Karno : Jembatan Emas, kini tinggal menjadi jembatan kayu yang rapuh. Kita memang salah satu bangsa dan negara di dunia yang merdeka dan berdaulat, sejak 58 tahun yang lalu. Tapi kita tidak “terdaftar” sebagai negara dan bangsa yang mulia di dunia ini. Kita bahkan terdaftar di urutan atas sebagai bangsa yang paling korup di dunia.

Kemudian apa yang kita peroleh sebagai negara eksportir babu, yang sebagai TKI paling sering diperkosa oleh majikan mereka di negara-negara Timur Tengah ?

Kemudian apa yang kita raih sebagai bangsa yang dikenal menjadi ekportir teroris, tapi sasaran teror bomnya justru negerinya sendiri : Bali (Pantai Kuta, Legian), Jakarta (Hotel J.W. Marriott), sejumlah gereja di Jakarta Medan dan Batam ?

Kita dikenal di seluruh dunia sebagai bangsa yang paling tega membiarkan adanya pemerkosaan massal seksual terhadap etnis Cina pada aksi kerusuhan 13 Mei 1998 di Jakarta.

Kemudian apa yang tersisa dari perilaku sejumlah koruptor yang sedikitpun tidak memiliki rasa bersalah walau telah menjarah uang negara (baca uang rakyat) sampai ratusan trilyun rupiah ?

Masa depan apa yang dijanjikan bangsa ini, jika sejumlah warganya (terutama para pejabat) tidak malu mempertontonkan

hasil korupsinya dalam bentuk mobil-mobil dan rumah-rumah mewah, ditengah-tengah gugusan rumah-rumah kumuh rakyat kecil yang masih harus hidup di bawah garis kemiskinan ?

Kemudian apa yang bisa segera dicapai jika dalam kualitas pendidikan Indonesia sudah berada dalam urutan di bawah Vietnam ? Semboyan Indonesia merdeka, meskipun diteriakkan dengan suara yang sangat lantang dan panuh semangat, tapi sudah tidak meninggalkan getar di dalam kalbu, mengapa ? Barangkali karena sudah kehilangan relevansinya dengan tuntutan yang aktual dari masyarakat Indonesia abad ke 21, masyarakat yang merindukan kehormatan dan martabatnya sebagai bangsa yang “dihitung” dan diapresiasi oleh bangsa-bangsa lain di planet bumi ini.

Kita perlu bergerak dengan paradigma budaya yang baru : Budaya Indonesia Mulia. Mencapai Indonesia Mulia tidak mesti melalui dulu pertumbuhan ekonomi nasional di atas 7%, tidak harus punya income per capita di atas USD 10.000 Indonesia Mulia memang akan menjadi utopia belaka, jika kita membebaninya dengan syarat-syarat ekonomi yang berstandar tinggi.

Indonesia Mulia akan menjadi sebuah keniscayaan, jika dimulai dengan keamanan politik dari “atas” dan dari “bawah” untuk menjadi bangsa yang mulia, yang terhormat. Indonesia bisa menjadi bangsa yang mulia dan dihormati oleh bangsa-bangsa beradab lainnya, meskipun hidup dalam kemiskinan ekonomi, tapi tidak menderita kemiskinan moral.

Indonesia yang rendah income per kapitanya bisa memperoleh respek jika masyarakat internasional tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang fair, yang komitmen politik dan komitmen ekonominya bisa dipegang, yang jajaran eksekutifnya, legislatifnya dan yudikatifnya, malu jika melakukan kebohongan (terhadap) publik malu menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, dan karena itu tidak mau melakukan korupsi. Contoh individual dalam masalah kemuliaan ini, bisa disebut tokoh yang dimuliakan bangsanya, Bung Hatta, Jenderal Sudirman, Jenderal AH Nasution, Prof. DR. H. Baharuddin Lopa, SH. padahal mereka dikenal hidup sederhana, tidak bergelimang kemewahan materi, jujur terhadap orang lain dan terhadap dirinya sendiri. Walhasil, Indonesia Mulia adalah sebuah keniscayaan, bukan pertama-tama dengan ukuran dan

tuntutan ekonomi melainkan dengan ukuran dan tuntutan moral. Gerakan budaya Indonesia Mulia, kita mulai dengan memilih Presiden (RI) yang mulia tutur katanya, mulia gagasan-gagasannya dan mulia perilaku individualnya, mulia perilaku sosialnya, dan mulia perilaku politiknya.

Dengan mulai memilih Presiden (RI) yang mulia, kita berharap dapat berdampak positif dengan memilih Wakil Presiden (RI) yang mulia, Menteri-menteri Kabinet yang mulia, Gubernur, Bupati dan Walikota yang mulia, anggota DPR-RI dan anggota DPD-RI yang mulia. Begitu pula lembaga-lembaga yudikatif akan dijabat oleh Hakim, Jaksa dan Pengacara yang mulai.

Pendeknya, semua das sollen yang disebut di atas, kita perjuangkan bersama, dan ini sebuah perjuangan kebudayaan untuk meng-sinkron-kannya dengan desain dalam kehidupan kebangsaan kita.

Tidak ada yang pertama-tama harus membebaskan bangsa Indonesia dari keterpurukan politik, ekonomi dan moral kecuali bangsa Indonesia sendiri, ya termasuk kita-kita inilah!

Makassar, 17 Oktober 2003-10-18

Husni Djamaluddin

Dengan izin penulis makalah dan persetujuan Panitia Kongres, dibacakan oleh :

DR. A. RASYID ASBA, Peserta dari Sulawesi Selatan dalam Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi Sumatera Barat.

SENI DALAM PERSPEKTIF KEBUDAYAAN

oleh: I Made Bandem

Seperti diketahui bersama, bahwa kita semua kini berada dalam ruang yang demikian luas berbikai globalisasi. Segala macam peristiwa dan perubahan yang tengah bergulir di manapun, melibatkan siapapun, dapat kita nikmati saat itu juga. Ruang dan waktu tidak lagi menjadi pembatas dan kendala komunikasi. Teknologi komunikasi yang semakin canggih, semakin melapangkan persilangan informasi dan komunikasi hingga ruang-ruang privasi setiap orang. Sedemikian jauh kita didorong untuk memasuki lorong waktu dan peristiwa yang nyaris tanpa batas. Bersamaan dengan itu, kita juga didorong untuk masuk dan berada dalam berbagai putaran arus, kecenderungan, selera dan tanda-tanda yang beragam. Pendeknya, kita berada dalam ruang budaya yang beragam (pluralisme budaya).

Pluralisme budaya yang kini lebih populer dengan istilah 'multikulturalisme' adalah sebuah lautan idiologi yang memperoleh perhatian besar dari kalangan para teoritis di Amerika Serikat. Hal ini disebabkan oleh luasnya permasalahan yang harus diseberangi, mulai dari kebijakan imigrasi, resolusi konflik, dan hukum internasional, sampai kepada penelitian arkeologi, penciptaan seni dan kebijakan pendidikan. Multikulturalisme mengibarkan bendera pertukaran dan pemahaman antar budaya. Istilah 'multikulturalisme' menunjukkan keanekaragaman budaya yang memungkinkan untuk hidup bersama, bukan membentuk *sin qua non* apa artinya hidup sebagai manusia.¹

Dalam tatanan yang agak berbeda, namun memiliki kenyataan yang rasional, multikulturalisme menjadi pencaharian yang amat panjang mengenai hak keseimbangan yang tidak tampak antara kebenaran mayoritas dan kebenaran minoritas. Hal ini sering dipahami sebagai kesenjangan pusat dan daerah.

¹ Alexander Makedon, "What Multiculturalism Should Not Be" (Chicago State University, 1996), 1.

Nasionalisme dan etnosentris, sentralisasi dan desentralisasi, yang berakibat terhadap kurang harmonisnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika telah diakui sebagai gerakan dalam haknya sendiri, multikulturalisme menawarkan jembatan sejajar bagi kelompok-kelompok yang berbeda budaya untuk hidup bersama.

Makalah singkat yang diberi judul “Seni dalam Perspektif Kebudayaan” akan membahas dua hal pokok yaitu mengenai hakikat seni yang terkait dengan pluralisme budaya dan pendidikan seni sebagai sebuah strategi untuk hidup bersama.

Kebudayaan menunjuk kepada sederetan sistem pengetahuan yang dimiliki bersama, perangai-perangai, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai peraturan-peraturan, dan symbol-simbol yang berkaitan dengan tujuan seluruh anggota masyarakat yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Dipandang dari wujudnya, menurut Koentjaraningrat kebudayaan memiliki 7 (tujuh) unsur pokok yaitu: sistim kepercayaan, bahasa, sistim ekonomi, sistim sosial, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Secara sederhana bahwa kebudayaan adalah nilai-nilai dan gagasan vital yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Seni adalah ekspresi dari jiwa manusia yang diwujudkan dalam karya seni. Pernyataan ini mengisyaratkan terjadinya kreativitas dalam hal olah imaji dan olah rupa, gerak, suara, cahaya, bau, dan sebagainya. Penciptaan seni terjadi oleh adanya proses cipta, karsa dan rasa. Penciptaan di bidang seni mengandung pengertian yang terpadu antara kreativitas, penemuan dan inovasi yang sangat dipengaruhi oleh rasa. Namun demikian, logika dan daya nalar mengimbangi rasa dari waktu ke waktu dalam kadar yang cukup tinggi. Rasa muncul karena dorongan kehendak naluri yang disebut karsa. Karsa dapat bersifat individu atau kolektif, tergantung dari lingkungan serta budaya masyarakat.²

Sebagai penampilan ekspresif dari penciptanya, seni mempunyai hubungan yang erat dengan unsur-unsur kebudayaan yang lain. Isi dan bentuk seni tak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam 7 (tujuh) unsur pokok

² But Muchtar dan Soedarsono, " Pendidikan dan Seni Indonesia (Jakarta: Ditjen Dikti, 1985).1

kebudayaan di atas. Tema-tema seni berakar pada nilai-nilai agama, organisasi sosial, sistim teknologi, sistim pengetahuan, bahasa, dan sistim ekonomi. Secara umum seni dapat digolongkan ke dalam 4 (empat) kelompok yaitu Seni pertunjukan (tari, kerawitan, pedalangan, musik, pencak silat, dan teater); seni rupa (lukis, patung, kriya, disain, instalasi dan arsitektur); seni sastra (puisi dan prosa); dan seni sinematografi (film, video dan animasi)

Dilihat dari sudut demografi, Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan etnis, bahasa, dan seni sudah lama menjadi sebuah masyarakat dengan pluralisme budaya. Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami difusi kebudayaan sejak berabad-abad yang lampau. Kepulauan ini pernah dihuni oleh berbagai jenis ras seperti manusia *Pithecanthropus Erectus* (*Homo Soloensis*). *Austro Melanesoid*, *Mongoloid*, *Proto Melayu*, dan lain-lain yang semuanya meninggalkan sisa-sisa kebudayaannya sampai sekarang. Agama-agama besar seperti Islam, Hindu, Budha, Kristen dan Katolik juga memberi warna dan corak kepada kebudayaan Indonesia yang ada sekarang. Belum diperhitungkan pengaruh kebudayaan Barat yang sedikit banyak menjadikan kebudayaan Nusantara lebih plural dan unik. Menurut C.A. van Peursen Indonesia kinimasih memiliki kebudayaan majemuk yang bersifat mistis, ontologis dan fungsional.³

Sungguh ironis ketika pada kenyataannya bahwa apresiasi, pemahaman dan interaksi tentang keragaman budaya itu belum sepenuhnya menjadi keniscayaan. Tidak banyak anggota masyarakat yang memahami arti penting dari pluralisme budaya, dan tidak banyak pula anggota masyarakat yang meyakini bahwa kita bisa hidup bersama dalam keragaman budaya. Sementara itu kontak sosial budaya antar warga negara Indonesia yang mempunyai latarbelakang keragaman budaya sudah menjadi lebih intensif. Demikian pula bahwa kontak dengan budaya asing telah dipercepat oleh adanya sistim komunikasi canggih.

Semua persoalan ini merupakan masalah yang esensial dalam pembahasan mengenai seni dan pluralisme budaya, atau

³ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999), 3-20., dan C.A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1988), 18

secara makro adalah seni dalam perspektif kebudayaan. Selanjutnya akan digambarkan interaksi antara seni dengan unsur-unsur budaya yang lain, sekaligus menyatakan betapa pentingnya nilai-nilai budaya sebagai hakikat dan isi dari sebuah karya seni. Kemudian berikutnya akan dibahas pula tentang kebijakan dalam hal pembinaan atau pendidikan seni di Indonesia.

Interaksi antara seni dan agama sudah lama menjadi kenyataan. Agama merupakan sumber etika dan moralitas. Seni adalah salah satu wahana yang paling tepat untuk mempromosikan kehidupan agama. Simbol-simbol agama disosialisasikan lewat pameran dan pementasan seni. Pameran dan pementasan karya seni Bali misalnya sering mendramatisasikan kehidupan agama Hindu. Pendidikan etika dan moralitas dilakukan lewat pementasan dan pameran karya seni. Di Indonesia masih banyak terpelihara seni sacral, seperti tari Belian di Kalimantan Timur, Selawatan di Jawa, Sang Hyang di Bali, Kuda Lumping di Jawa Barat, Reog di Jawa Timur. Semuanya memiliki nilai budaya yang dapat memberi pencerahan etika dan moralitas.

Seni memiliki nilai demokrasi yang kental, Inspirasi, aspirasi dan dialog muncul ketika seni dalam proses penciptaan. Dipandang dari perilaku masyarakat, proses penciptaan seni biasanya melibatkan dialog dan interaksi antar seniman. Gamelan adalah salah satu bentuk seni Nusantara yang menyimpan nilai-nilai demokrasi. Masing-masing instrumen dalam gamelan tidak saja menuntut adanya kemampuan individu yang kuat, tetapi juga membutuhkan interaksi kolektif yang mantap. Koordinasi antara pemain satu dengan lainnya adalah kunci keberhasilan sebuah pentas gamelan. Nilai ini kurang dipahami dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Di Amerika Serikat, Jepang, Australia dan Eropa, gamelan sudah lama dijadikan bagian dari kurikulum universitas-universitas besar, sebagai manifestasi pendidikan pluralisme budaya.

Seni dalam semua jenis dan sifatnya tak dapat dipisahkan dari lingkungan hidup. Pemahaman tentang fungsi lingkungan hidup sebagai tempat berlindung, mencari nafkah, dan mencari identitas sering dilukiskan dalam seni rupa maupun seni pertunjukan. Keindahan flora dan fauna Indonesia sering dijadikan tema bagi sejumlah seniman. Pelukis Wakidi sering mengolah panorama Sumatera Barat (Ngarai Sianok), atau Abdoellah

Soeriosoebroto dengan pemandangan di Jawa. Ahmad Tohari lewat sejumlah novelnya (*Ronggeng Dukuh Paruk*) yang piawai melukiskan detail-detail alam pedesaan Jawa (Banyumas). Atau pelukis Edvard Munch, juga Vincent van Gogh sering melukis lanskap negerinya, Norwegia dan Belanda, dan akhirnya menjadi identitas keduanya (identitas kepelukisan Munch maupun van Gogh, maupun identitas Norwegia dan Belanda). Keindahan flora dan fauna Indonesia dan *Tri Hita Karana* merupakan nilai keseimbangan antara manusia dengan alam lingkungan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, sering menjadi tema sentral karya seni.

Sejak Indonesia diakui sebagai negara kesatuan yang merdeka, hak individu diperhatikan. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak seseorang untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk hidup sejahtera dan lain sebagainya. HAM sampai saat ini masih menjadi persoalan yang tak pernah terselesaikan. Pertentangan antar etnis, suku, dan golongan terus berkembang dan tak pernah terselesaikan melalui hukum yang jelas. Para seniman mengangkat masalah-masalah HAM sebagai isi karya seni. HAM merupakan sebuah nilai kehidupan yang mutlak menjadi perhatian seluruh bangsa.

Seni berkaitan dengan konsepsi ruang, waktu dan keadaan. Di Jawa disebut *desa mawa cara*, sedangkan di Bali disebut *desa kala patra*. Hal ini diartikan sebagai penyesuaian diri dengan tempat, waktu dan keadaan. Disini seni diperlukan sebagai potensi untuk mengembangkan diri sendiri. Menerima suatu keadaan keragaman dalam keseragaman atau suatu perbedaan dalam kesatuan. Konsepsi ini memberikan landasan yang luwes dalam hubungan ke luar maupun ke dalam, dan menerima perbedaan dan variasi menurut faktor tempat, waktu dan keadaan.

Nilai atau konsepsi sejenis ini sangat beragam jenis dan sifatnya, di seluruh Indonesia terdapat ratusan nilai atau konsepsi semacam ini. Di Jawa ada beberapa jenis nilai seperti tersebut di atas yang dapat diangkat sebagai tema karya seni. Di antara nilai-nilai itu termasuk prinsip rukun, prinsip hormat, prinsip *mamayu hayuning bawana*, *mamayu hayuning bangsa*, *adigang adigung adiguna* (*sikap yang sombong*), *aja dumeh* (*jangan sok*), *ngono yo ngono ning ojo ngono* (*begitu ya begitu tetapi jangan begitu*).

Demikian pula di daerah Sumatera, dalam khasanah sastra Indonesia misalnya, kita mengenal berbagai novel yang bertemakan tentang kebangsawanan, kepahlawanan, kejujuran, percintaan, kesedihan, dan keagamaan yang semua dilaterbelakangi oleh kondisi sosio cultural dan sosio politik yang berkembang dalam masyarakat.

Akhirnya, nilai-nilai yang dibicarakan di atas merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam kebudayaan local, kebudayaan daerah, kebudayaan nasional, bahkan dalam kebudayaan internasional yang membentuk dalam kebudayaan nasional Indonesia. Dengan demikian seni sebagai produk kebudayaan, terus- menerus dihadapkan secara diametral dengan beragam persoalan kebudayaan semacam itu. Persoalan kini adalah dibutuhkan aksi dan langkah yang jelas bagaimana menciptakan agar bangsa ini bisa peduli, hormat, dan memahami nilai-nilai keragaman budaya tersebut, Sejumlah langkah mesti dilakukan. Salah satu diantaranya adalah menjadikan seni dengan pluralisme budaya sebagai strategi pendidikan untuk hidup bersama.

Pendidikan merupakan *social reproduction*, menyiapkan generasi muda untuk mengambil alih peranan pendahulunya. Pendidikan, khususnya pendidikan dasar, sepantasnya mengutamakan pendidikan kepribadian. Di samping mempelajari hal-hal yang bersifat akademis, pembekalan kepribadian penting artinya untuk menghadapi lingkungan dalam situasi apapun. Pembekalan kepribadian dapat dilakukan mulai dari rumah, sekolah dan masyarakat. Kerja kelompok dan demokrasi dapat dimulai dengan pelajaran olahraga dan kesenian.

Di samping masalah kepribadian dalam pendidikan untuk hidup bersama dibutuhkan adanya *law and order*. Penegakan dan tertib hukum adalah kunci untuk sukses. Oleh sebab itu perlu adanya *rule of law* dan *law enforcement*, serta HAM yang pelaksanaannya dijamin dan dilindungi oleh undang-undang tanpa diskriminasi.

Kecuali penegakan hukum, kepemimpinan (*leadership*) dalam pendidikan untuk hidup bersama merupakan faktor yang menentukan keberhasilan. Kepemimpinan pada semua tingkat memerlukan kompetensi, cara pandang, sikap dan perilaku yang tidak diskriminatif, berkeadilan, dapat mengakomodasikan pikiran semua pihak, konsisten, sehingga merupan contoh yang baik dalam hidup bersama dalam perbedaan.

Peter M. Senge, seorang ahli manajemen dari Amerika Serikat menyatakan bahwa paradigma untuk hidup bersama dalam memajukan sebuah perusahaan ditentukan oleh adanya *personal mastery*, keahlian pribadi dimana seseorang patut memiliki ilmu pengetahuan, dan ketrampilan yang tinggi; *system thinking*, berfikir secara sistematis yang mampu membuat seseorang hidup teratur, *team learning*, suatu tim pembelajaran bersama secara kukuh; *shared vision*, penetapan visi bersama atas dasar visi masing-masing; dan *mental model*, suatu mental yang dapat membangun *mutual care*, *mutual understanding* dan *mutual respect*. Semua keahlian ini terdapat pula dalam manajemen penciptaan karya seni.⁴

Pendidikan untuk hidup bersama dalam keragaman budaya memerlukan sebuah konsep dinamakan *belief system*. Orang tua dalam keluarga sejatinya memiliki pemikiran tentang pendidikan dan perkembangan anaknya. Dalam mengasuh, merawat, membesarkan, mendidik, dan mengarahkan anaknya benar-benar sesuai dengan fikiran, pengalaman, budaya yang dimiliki. Pancasila sudah menjadi falsafah bangsa Indonesia, merupakan *belief system* dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mengandung nilai-nilai dasar dan fundamental untuk menata dan membangun kehidupan bermasyarakat. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam *Millenium Summit 2000* telah mendeklarasikan hal-hal esensial yang berhubungan dengan kehidupan bersama bangsa-bangsa dengan menuangkan nilai-nilai dasar yaitu *freedom, equality, solidarity, tolerance, respect for nature, dan shared responsibility*, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini perlu dikembangkan dan disosialisasikan sedini mungkin sebagai bagian dari pendidikan untuk belajar hidup bersama.⁵

Persoalan yang muncul ketika melaksanakan pendidikan untuk hidup bersama dalam keragaman adalah masalah guru, kurikulum, sarana pembelajaran, dan metodologi pengajaran. Di Amerika Serikat dalam rangka mengembangkan pendidikan multicultural yang disebut *Teaching Art From A Global Perspective* (Pembelajaran Seni dan Perspektif Global), Eric Digest mengajukan beberapa tingkat pelaksanaan

⁴ Peter M. Senge, *Disiplin Kelima* (Jakarta Barat: Binarupa Aksara, 1996), 1-11

pendidikan seperti pembelajaran seni dalam konteks multinasional, pembelajaran seni dalam konteks multicultural, pembelajaran seni dalam konteks komunitas, dan pembelajaran seni dalam konteks Global. Setiap tingkat memiliki cara dan pelaksanaan yang berbeda dan materi pendidikan yang berbeda pula. Disinilah pentingnya penyiapan bahan pelajaran seni yang terkait dengan pluralisme budaya.⁶

Aksi lain yang dapat dilakukan untuk peningkatan pemahaman, penghormatan, dan kepedulian bagi pluralisme budaya adalah kegiatan kreativitas yang disebut sebagai Kolaborasi Seni. Indonesia memiliki budaya yang sangat majemuk untuk melaksanakan kreativitas ini. Setidaknya terdapat 931 suku bangsa, 600 bahasa local, dan ratusan jenis dan gaya seni yang tersebar antara Sabang sampai Merauke. Kolaborasi Seni dapat dilakukan antar satu budaya dengan budaya lain di tanah air (intrakultural), dan kolaborasi seni antar budaya di tanah air dengan budaya negara lain (interkultural).

Sardono W. Kusumo, seorang penari Jawa klasik, dan tokoh tari Kontemporer Indonesia mengadakan kolaborasi seni dengan masyarakat Bali di Teges Kanginan pada tahun 1971. Dengan wawasan seni Jawa dan tari kontemporer yang luas, Sardono tinggal di Bali selama 6 bulan, mengadakan eksplorasi, percobaan-percobaan untuk membentuk sebuah tari kreasi baru yang kemudian dinamakan Cak Rina. Tari Kecak yang telah memiliki bentuk yang mapan, diobrak-abrik oleh Sardono, dimasukkan gagasan tentang tari modern seperti konsep *chance*, *total theater*, improvisasi, dan berbagai jenis konsep global lainnya. Para penghulu agama ikut menari didalamnya dan anak-anak kecil telanjang bermain dengan *play instinct* menjadi bagian menonjol dalam tari kecak Rina. Anggota masyarakat dari Teges

Kanginan merasa memperoleh pengetahuan baru untuk mengembangkan keseniannya. Sebaliknya para pejabat dan otoritas kesenian Bali yang bernama Listibiya menjadi geram dan marah atas kreasi itu. Sardono dituduh mendesakralisasikan kesenian Bali. Media local mendukung Listibiya dan terjadi

⁵ Lily Rilantono dan I Made Bandem, dkk. "Pendidikan Untuk Hidup Bersama Dalam Perbedaan" (Jakarta: BPPN, 2001), 10

⁶ Eric Digest, "Teaching Art From A Global Perspective" (Bloomington: Sosial Science Education, 1990), 1-2

polemik dan wacana yang cukup panjang mengenai peristiwa itu Kecak Rina dibawa ke Eropa. Kantor imigrasi di Bali menolak memberi paspor. Tetapi Sardono memperoleh ijin ke luar negeri dari Kantor Imigrasi di Semarang. Pementasan Kecak Rina berhasil dengan sukses di Eropa. Media Eropa memberikan acungan jempol atas kreasi yang unik itu.

Bila dilihat dari sudut pandang plurisme budaya dan intrakultural, Sardono dengan kreasi itu telah membangun sebuah demokratisasi dalam kesenian. Menyebarkan gagasan kontemporer bagi Bali, menambah wawasan akan pentingnya budaya lain untuk dipelajari dan dipahami. Masyarakat Bali bangkit dan terpicu oleh peristiwa itu. Melalui wacana itu apresiasi masyarakat Bali makin meningkat mengenai makna pluralisme budaya dan gagasan seni kontemporer. Kini Sardono diterima sebagai warga masyarakat Bali dan menjadi panutan di desa Teges Kanginan. Mereka terus berkreasi dan tahun 1974 Sardono kembali menggemparkan Prancis dan Italia dengan karya seni berjudul *Wanita dari Dirah*. Karya itu diciptakan berdasarkan dramatari Calonarang Bali, dipentaskan oleh masyarakat teges Kanginan dengan penari-penari kawakan dari Bali dan Jawa. Sardono tidak lagi mengalami masalah imigrasi, dan Listibiya memberi rekomendasi atas perlawatan mereka. Hal ini mempunyai arti bahwa kolaborasi seni membawa dampak positif terhadap kreasi seni yang berdasarkan pluralisme budaya.

Mantle Hood, seorang ahli musik bangsa-bangsa dari Amerika Serikat mempelajari musik Jawa selama 2 tahun di Yogyakarta, dari tahun 1954-1956. Sesudah menyelesaikan Ph.D.nya di Amsterdam (Belanda), Mantle Hood kembali ke Amerika Serikat untuk membangun Institut Etnomusikologi di Universitas California at Los Angeles (UCLA). Sebagai Direktur dan dosen pada institut itu, Mantle Hood mewajibkan mahasiswa yang mengambil M.A. dan Ph.D. dalam bidang Etnomusikologi mempelajari gamelan Jawa dan Bali pada saat itu, Mantle Hood mengundang Hardja Susilo dari Yogyakarta dan Cokorda Agung Mas dan I Wayan Gandra dari Bali. Sambil mengajar gamelan, Harja Susilo disekolahkan oleh Mantle Hood dan kini dia menjadi guru besar musik di Universitas Hawaii. Semua mahasiswa doctoral tamatan UCLA mengembangkan gamelan Jawa dan Bali. Gamelan menjadi bagian kurikulum penting dalam mempelajari budaya lain di Amerika Serikat. Pada saat ini terdapat

lebih dari 400 kelompok gamelan yang berkembang di Amerika Utara, Eropa, Australia dan Jepang.

Hasil rumusan The First International Gamelan Festival and Symposium di Vancouver (Canada) pada tahun 1986, mencatat 6 (enam) jenis gamelan yang berkembang di luar negeri saat itu. Kelompok-kelompok itu adalah (1) Kelompok gamelan tradisional yang memainkan lagu-lagu tradisional maupun kreasi baru. Mereka menggunakan alat-alat gamelan tradisional seperti yang dilakukan oleh kelompok Gamelan dari Wesleyan University, Sekar Jaya dan Gamelan Boston. Kelompok ini tertarik dengan pengalaman estetis dan keinginan untuk memahami nilai-nilai budaya lewat gamelan; (2) Kelompok yang menggunakan gamelan tradisional untuk memainkan komposisi baru berdasarkan musik kontemporer Barat dan menggunakan sekelumit konsep gamelan seperti ostinato dan struktur kolotomik, dipertunjukkan oleh gamelan Dharma Budaya dari Kyoto, dan Gamelan Son of Lion dari New York; (3) Kelompok yang menggunakan instrumen sejenis gamelan untuk memainkan komposisi modern berdasarkan alat-alat tradisional seperti gamelan Si Betty of San Jose State University; (4) Kelompok yang menggunakan alat-alat baru menyerupai gamelan guna memainkan musik kontemporer seperti gamelan Pacifica of Seattle, the Berkeley Gamelan, dan The Bay Area New Gamelan; (5) Kelompok yang menggunakan segala peralatan bunyi untuk memainkan musik avangarde, seperti penampilan Banjar Gruppe Berlin dari Jerman, dan (6) Kelompok yang menggunakan instrumen musik Barat untuk memainkan komposisi baru dalam gamelan seperti komposisi oleh Claude Debussy, Colin McPhee, and Jose Evangelista.

Secara pribadi, saya memiliki juga pengalaman yang cukup unik dalam membangun intercultural dengan para ahli teater di Eropa dan Asia, dimana sejak tahun 1980-an saya bergabung dengan International School Theatre Anthropology (ISTA) yang didirikan oleh Eugenio Barba, membangun sebuah *Euroasian theatre*, menggabungkan para penari dari India, Bali, Jepang, China dan Odin Teatret dalam menciptakan sebuah karya yang disebut Theater Mundi. Kegiatan berupa lokakarya dan pementasan berlangsung nimaden dari satu negara ke negara lain untuk mendekatkan diri dengan lingkungan setempat. Kegiatan yang semula berlangsung di Bergamo (Italia) berpindah

tempat ke Denmark dan terakhir melakukan aktivitas di desa Londrina (Brasil).

Dewasa ini kolaborasi seni seperti di atas, makin banyak terjadi dan berbagai program diciptakan oleh komunitas-komunitas tertentu. I Wayan Dibia (Bali) dan Keith Terry (USA) berkolaborasi membangun *Body Cak* berunsurkan budaya Bali dan Amerika Serikat menyebabkan decak kagum penonton di Amerika Serikat dan Bali. Demikian pula kerjasama antara Putu Wijaya di La Mama New York menunjukkan betapa besar kontribusi teater Bali terhadap perwujudan pluralisme budaya. Edi Sedyawati dalam posisinya sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan tahun 1995 menciptakan sebuah kegiatan tiga tahunan yang dinamakan Art Summit Indonesia. Forum ini merupakan sebuah arena intelektual yang semakin waktu semakin melembaga dan kegiatannya meliputi kegiatan tari, musik, teater dan kini mengarah kepada pelibatan seni rupa. Seniman-seniman kaliber dunia berkumpul di Jakarta, mempergelarkan karya-karya puncak, membangun dialog, termasuk mendiskusikan kontribusi seni Indonesia di dunia Internasional.⁷

Di lain pihak dalam skala makro, barangkali dapat disebut sebagai upaya memberdayakan kantung-kantung budaya. Upaya memberdayakan kantung-kantung budaya dapat dipahami sebagai salah satu solusi untuk mengatasi benturan yang muncul, antara fungsi dengan kepentingan, antara yang horizontal dengan yang vertical. Dengan kantung-kantung budaya yang didukung fasilitasnya, mereka akan menggerakkan seluruh potensinya untuk terus berkreasi dengan harapan, suatu saat kelak meraih posisi (dan memiliki kekuatan posisi tawar) dalam ruang yang lebih luas.

Seni dipandang dari perspektif kebudayaan, akan terlihat kenyataan-kenyataan yang saling berhadapan, penuh paradoks, dan juga tegangan. Seni berada dalam tegangan dan hegemoni wacana maupun institusi internasional. Potensi terbangunnya kesalingmengertian dalam seni, semestinya terus dieksplorasi secara optimal.

Globalisasi telah menjadi kenyataan yang tak terelakan.

⁷ Edi Sedyawati, "The Challenge of Multiculturalism : Frontiers For Composers and Choreographers" (Jakarta: Depdikbud, 1997).5

Dalam konteks percaturan budaya global, kesadaran untuk mempertanyakan identitas justru semakin besar. Inilah paradoks dan tegangan yang mengiringi wacana tentang identitas (budaya).

Di satu sisi terdapat gairah untuk masuk dalam arus dan percaturan internasional (yang diliputi oleh semangat menepis batas-batas geografis, ideologis, politis, etnis, bangsa), namun di sisi yang lain justru muncul semangat untuk kembali pada etnisitas dan lokalitas.

Yang perlu terus diperjuangkan adalah menumbuhkan kesadaran, bahwa kekuatan local dapat sangat efektif untuk bekal memasuki *global village* (desa global) maupun *global culture* (budaya global). Kenyataan semacam itu hanya mungkin jika tumbuh kesadaran untuk terus-menerus membangun dialog, baik dalam skala personal maupun komunal, antara yang local dan yang global; antara yang tradisi dengan yang modern; dengan tendensi untuk saling melengkapi, saling memperkaya. Kemampuan dan kesadaran semacam itu hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki kapasitas sebagai *knowledgeable artist*, seorang seniman yang memiliki kemampuan dan pengetahuan luas. Seorang seniman yang terus memelihara daya kreasi dan semangat inovasi, serta membuka diri terhadap berbagai kemungkinan. Siapa yang ingin memberikan kontribusi yang berarti bagi kesenian, bagi kehidupan, dan bagi kemanusiaan secara luas, tak ada pilihan lain kecuali menumbuhkan kesadaran bahwa pergaulan global adalah sebuah keniscayaan. Kemudian setelah itu harus memiliki komitmen dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bilamana menyikapi seluruh persoalan yang diuraikan di atas, bagi Indonesia sudah semestinya menciptakan "praisa protektif" aturan-aturan resmi dan dilaksanakan dengan pelaksanaan hukum yang jelas. Kesenjangan yang terurai dalam kaitan dengan demokrasi, HAM, lingkungan hidup, dan nilai-nilai budaya lainnya sudah sepatutnya dibuatkan berbagai peraturan yang bisa dipatuhi oleh anggota masyarakat sehingga kesenjangan dalam memahami, mempedulikan dan menghormati nilai-nilai pluralisme budaya berjalan sesuai harapan bangsa. Sebuah harapan, hidup bersama dalam keberagaman budaya.

Yogyakarta, 14 Oktober 2003
I Made Bandem

KEPUSTAKAAN

Bandem, I Made.

1986 *Proceeding The First International Gamelan Festival and Sysposium*, Jakarta : Bappenas,.

1991 "Peranan Seniman Dalam Masyarakat." Jakarta: Kongres Kebudayaan Nasional,.

Barba, Eugenio

1985 *Beyond the Floating Islands*. New York: PAJ Publication.

But Muchtar dan Soedarsono

1985 "Pendidikan Seni Indonesia." Jakarta: Konsorsium Seni,.

Digest, Eric

1990 "Teaching Art From Global Perspective." Bloomington: Social Science Education.

Holt, Claire

1967 *Art in Indonesia: Continuities and Change*. Ithaca, New York: Cornell University Press.

Koentjaraningrat

1980 *Pengantar Antropologi*, Jakarta: PT Gramedia,.

1999 *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan,.

Makedon, Alexander

1996 "What Multiculturalism Shoud Not Be." Chicago: Chicago University,.

Peursen, van C.A.

1988 *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Rilantono, Lily, dan I Made Bandem, dkk.

2001 "Pendidikan untuk Hidup Bersama Dalam Perbedaan." Jakarta: BPPN,.

Sedyawati, Edi

1997 *The Challenge of Multiculturalism: Frontiers For Composers and Choreographers Art Summit Indonesia 1995* (Proceeding), Jakarta:Depdikbud.

Sedyawati, Edi dan Sapardi Djoko Damono

1981 *Seni Dalam Masyarakat*. Jakarta:Gramedia, Senge, Peter M.

1996 *Disiplin Kelima*. Jakarta Barat: Binarupa Aksara Soedarso, Sp.

2000 *Sejarah Perkembangan Seni Rupa Modern*. Yogyakarta: CV. Studio Delapan Puluh Enterprise dan Badan Penerbit ISI Yogyakarta,

Sutoyo

1990 "Peranan Kebudayaan Jawa Dalam Pembangunan Kebudayaan Nasional Dalam Pengembangan Kebudayaan Indoensia." Malang:Satyawacana.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PEMAKALAH

i. Identitas

Nama : Prof. Dr. I Made Bandem

Tempat/Tgl. Lahir : Singapadu, Gianyar/ 22 Juni 1945.

Pekerjaan : Dosen

Jabatan : Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta

Alamat Rumah : Puri Gejayan Indah Blok B. No. 12 Yogyakarta

Telepon/Fax : 0274-51889. HP. 0811267524

Alamat Kantor : Jalan Parangtritis Km 6, Yogyakarta

Telepon/Fax : 0274-371233

ii. Riwayat Pendidikan

B.A. dalam Bidang Tari dari ASTI Denpasar dan UCLA, 1970

M.A. dalam bidang Dance Ethnology dari UCLA, 1972.

Ph.D. dalam Bidang Ethnomusicology, dari Wesleyan University, 1980.

iii. **Pengalaman**

III. 1. Organisasi

Ketua GSNI Bali 1963-1973

Ketua ASTI Denpasar 1981-1988

Ketua STSI Denpasar 1988-1997

Rektor ISI Yogyakarta 1997-sampai sekarang

Anggota MPR-RI Utusan Daerah Bali 1988-1993, 1993-1998, 1998-2000

III. 2 Penelitian

Panji Characterization in the Gambuh Dance Drama, 1972

Topeng Sebagai Seni Pertunjukan Bali 1973.

Legong Keraton Sebagai Seni Pertunjukan Bali, 1974.

Barong Sebagai Seni Pertunjukan Bali, 1975.

Wayang Wong in Contemporary Bali 1980

Kaja and Kelod: Balinese Dance in Transition Oxford University Press, 1981, 1995.

III.3 Seminar dan Lokakarya

Telah mengikuti seminar dan lokakarya baik nasional maupun internasional dalam bidang seni dan pembangunan.

Karya Ilmiah (120 buah) di antaranya :

1. Indonesia Emas: Seni Lukis Bali dalam perjalanan Seni Lukis Indonesia, Denpasar: Rudana Arts Gallery, 1995.
2. The Arts Higher Education: Guardian of Values to National Identity. Jakarta: International Conference on Higher Education Reform, 2001.
3. Tradision of Indonesia Arts and Now. Kyoto: Ritsumeikan University, 2001.
4. Lingkungan Sosial Mendukung Perkembangan Seni Kriya Indonesia, Yogyakarta: ISI Yogyakarta, 2002.
5. Yogyakarta Art Festival: A Media And Strategy For Culture Development, Yogyakarta: UGM, ISI dan Osaka University, 2003
6. Tourism in Bali: A Cultural Approach To Development, Naha Citu, Okinawa, 2003.
7. Pembangunan Bangsa: Perspektif Manajemen Kebudayaan, Denpasar: STSI (kini ISI) Denpasar 2003.

IDENTITAS DAN INTEGRASI
(POKOK PIKIRAN UNTUK KONGRES KEBUDAYAAN)
Bukittinggi, 19-23 Oktober 2003

Oleh : **Ignas Kleden**

Birunya langit merindukan hijaunya bumi
Sementara angin yang berhembus di antaranya mengeluh:
“Aduh “
(Rabindranath Tagore, *Epigrams*)

Sebagai pendahuluan perlu saya sampaikan di sini bahwa pokok-pokok pikiran yang akan saya bawa pada hari ini bukanlah hasil pemikiran saya sendiri, tetapi lebih merupakan reproduksi suatu diskusi kecil yang diselenggarakan oleh Akademi Jakarta, pada 30 September yang lalu, di TIM, Jakarta, dengan mengundang beberapa teman dari DKJ, LIPI, Universitas Atmajaya Jakarta, dan beberapa cendekiawan bebas dari Jakarta dan Surabaya. Apa yang dibahas dalam diskusi tersebut jauh lebih kaya baik dalam data-data mau pun dalam argumentasinya. Makalah ini hanya memberi fokus pada satu masalah saja yaitu persoalan identitas dan integritas, yang dianggap cocok dengan tema umum Kongres Kebudayaan kali ini. Adalah jelas pula bahwa segala kekurangan dalam makalah ini menjadi tanggungjawab saya secara pribadi dan tak dapat dilimpahkan kepada rekan-rekan yang telah memberikan sumbangan pemikiran yang amat produktif pada 30 September yang lalu.

Pertama-tama perlu dikemukakan beberapa segi yang dimaksudkan dan tidak dimaksudkan dalam makalah ini. Yang dimaksudkan dengan integritas, atau lebih tepat integritas nasional di sini ialah suatu kesadaran dan bentuk pergaulan yang menyebabkan berbagai kelompok orang merasa dirinya sebagai suatu kesatuan dalam apa yang sekarang kita kenal sebagai bangsa Indonesia. Dengan demikian integritas teritorial, yang menjadi persoalan politik dan masalah keamanan pada saat ini tidak termasuk dalam diskusi ini, karena teritorialitas atau kewilayahan adalah unsur pembentukan sebuah negara, tetapi bukan unsur pembentukan suatu bangsa.

Demikian pun akan jelas dalam uraian pada bahagian-bahagian berikut nanti bahwa identitas mempunyai fungsi ganda

dalam pembentukan integritas. Pada satu sisi integritas terbentuk kalau ada identitas yang mendukungnya seperti halnya kesamaan bahasa, kesamaan dalam sistem nilai budaya, kesamaan cita-cita politik, atau kesamaan dalam pandangan hidup atau orientasi keagamaan. Pada pihak lainnya, integritas yang lebih luas hanya mungkin terbentuk apabila sekelompok orang menerobos identitasnya yang semula dan mengambil jarak dari segala apa yang selama ini dianggap membentuk watak dirinya atau watak kelompoknya. Dengan demikian perkembangan sosial yang memungkinkan orang menjauhi atau meninggalkan identitasnya, seringkali menjadi faktor yang kemudian membuka kemungkinan untuk pembentukan integritas yang lebih luas.

- ❑ Bahasa Indonesia adalah contoh yang jelas. Berasal dari kepulauan Riau, dan pada awalnya menjadi suatu atribut dari identitas penduduk kepulauan Riau, bahasa itu kemudian berkembang menjadi Melayu Pasar, yang digunakan oleh berbagai kelompok etnis yang bertemu di pasar dalam interaksi perdagangan. Kedudukan bahasa Melayu Pasar itu berubah dari sifatnya sebagai penunjuk suatu kelompok etnis (yaitu penduduk kepulauan Riau) dan berkembang menjadi *lingua franca*, yaitu suatu bahasa yang berfungsi sebagai sarana komunikasi semata-mata, tanpa menunjuk dari kelompok etnis atau dari kelas sosial mana seorang penutur berasal. Hal ini dapat dibandingkan dengan kedudukan bahasa Inggris di dunia pada saat ini.

Akan tetapi dalam berkembang lebih lanjut muncul suatu komunitas baru dengan jaringan yang jauh lebih luas, yaitu kelompok-kelompok yang menggunakan bahasa Melayu Pasar sebagai sarana komunikasi antara mereka. Akibat yang lebih lanjut ialah bahwa bahasa Melayu Pasar sebagai *lingua franca* kemudian menjadi ciri baru bagi suatu komunitas pengguna bahasa tersebut dan kemudian kembali berfungsi sebagai penunjuk identitas dari suatu jaringan kelompok-kelompok yang merasa dan ternyata dihubungkan satu sama lain oleh bahasa tersebut dan menemukan suatu kesatuan baru berupa integritas yang lebih luas. Dengan demikian ada gerak perubahan dari

bahasa sarana identifikasi ke bahasa sebagai sarana komunikasi dan kembali lagi ke bahasa sebagai sarana identifikasi. Atau dengan perkataan lain, integrasi terjadi karena ada gerak dari identitas menuju ke non-identitas dan kemudian kembali lagi ke identitas yang baru.

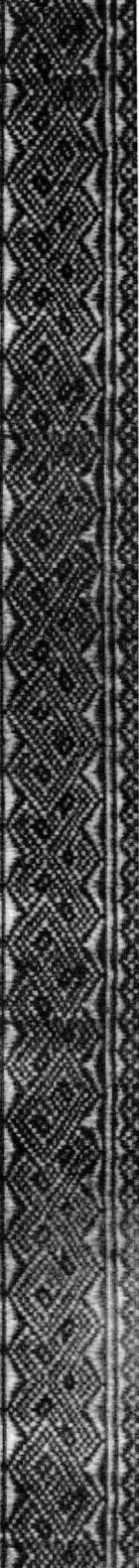
- Hal yang sama dapat dikatakan tentang perdagangan dan pasar. Seperti kita tahu, pasar adalah tempat orang mengadakan transaksi jual-beli. Apa yang penting dan yang menentukan bentuk pergaulan di sana adalah adanya permintaan dari orang yang hendak membeli dan adanya penawaran dari pihak yang hendak menjual. Sekali pun yang datang ke pasar adalah orang-orang yang berasal dari kelompok etnis yang berbeda-beda, dengan sistem nilai budaya yang berlainan, barangkali juga dengan keyakinan agama dan ideologi politik yang berbeda dan bahkan bertentangan, tetapi semua atribut tersebut untuk sementara waktu seakan-akan diabaikan atau ditempatkan dalam tanda kurung, dan orang hanya bertemu sebagai penjual dan pembeli. Di pasar blok A di Jakarta Selatan, kita barangkali masih tahu bahwa penjual daging ayam di sana berasal dari daerah Banten, penjual sayur berasal dari Tegal, dan pemilik toko sepatu berasal dari Sumatera Barat, akan tetapi hal ini menjadi faktor yang tidak penting dan tidak diperhitungkan di sana, karena yang terjadi adalah pergaulan dan interaksi kita sebagai pembeli dan mereka sebagai penjual. Terbentuk suatu jaringan pergaulan baru yang mengatasi sekat-sekat etnis, sekat-sekat agama, dan sekat-sekat budaya dan kelas sosial.

Tanpa kehilangan identitas masing-masingnya (karena penjual sayur dari Tegal tetap sebagai orang Tegal sekali pun dia sedang berjualan di Pasar Blok A di Jakarta Selatan) para penjual dan pembeli masuk ke dalam suatu interaksi baru yang memungkinkan mereka lambat laun membentuk suatu integrasi baru yang mengatasi identitas semula yang didasarkan pada faktor etnis, bahasa, kesukuan atau keagamaan. Kembali kita melihat bahwa integrasi terbentuk dan berkembang karena ada gerak dan peralihan dari identitas (dalam kelompok etnis) menuju

non-identitas dalam pasar (pembeli dan penjual tidak perlu mengetahui siapa diri mereka masing-masing) kemudian menuju suatu identitas baru (yaitu bentuk pergaulan dan jaringan sosial yang terbentuk dalam pasar).

Di sini kita menghadapi persoalan: seberapa besarnya lingkup pasar itu yang masih memungkinkan integrasi yang lahir karena munculnya identitas baru yang terbentuk dalam interaksi pembeli dan penjual, dan seberapa luas lingkup pasar itu sehingga integrasi dapat terancam untuk buyar karena tidak lagi memungkinkan terbentuknya suatu identitas baru? Globalisasi sekarang ini menjadi aktual karena kita, mau tak mau, diperhadapkan pada pertanyaan ini. Kalau transnasionalisasi modal dan transnasionalisasi tenaga kerja saat ini membuat seluruh dunia menjadi pasar global, masih mungkinkah masing-masing kelompok dan masing-masing individu mendapatkan identitasnya dalam pasar global tersebut? Inilah latarbelakang yang dapat menjelaskan bahwa di mana globalisasi menjadi sangat kencang melalui penciptaan pasar global, di sana juga muncul reaksi berupa menguatnya aspirasi-aspirasi lokal dalam kebudayaan dan dalam politik. Globalisasi dan lokalitas adalah dua dimensi yang saling berusaha meniadakan dalam ketegangan yang tetap, tetapi akan sangat sulit menghilangkan salah satunya karena keduanya pada dasarnya selalu saling mengandaikan. Pariwisata misalnya hanya mungkin berkembang kalau ada pasar global dan ada informasi global tentang kekhasan-kekhasan dan keunikan lokal di berbagai tempat di dunia.

- Integrasi nasional juga terbentuk karena dimungkinkan oleh terbentuknya kelompok-kelompok yang dipersatukan oleh suatu isu bersama baik yang bersifat ideologis, ekonomi mau pun sosial. Di Indonesia pembentukan kelas belum terjadi dengan mantap, karena kita masih tercekam oleh prahara Gerakan 30 September 1965, yang menurut keyakinan umum digerakkan oleh kelompok-kelompok kiri. Sekali pun demikian, tanpa menjadi komunis (yang praktis tidak mungkin terjadi lagi saat ini setelah runtuhnya blok Timur), tetapi dapat dibayangkan bahwa kaum buruh akan membentuk jaringan mereka sendiri untuk membela kepentingan



bersama mereka menghadapi kaum majikan dan pemilik modal. Atau para nelayan dan petani akan mengorganisasikan diri secara lintas-etnis dan lintas-daerah dalam suatu blok untuk menghadapi tuntutan dan kepentingan kaum juragan. Kalau jaringan-jaringan ini terbentuk berdasarkan kesamaan kepentingan ekonomi, maka di sana terbuka peluang untuk terbentuknya suatu bentuk interaksi baru yang berlainan dengan pergaulan dalam kelompok etnis atau dalam kelompok suku tertentu, dan memberi kemungkinan terciptanya suatu integrasi yang lebih luas.

Hal yang sama dapat dikatakan tentang gerakan perempuan, yang saat ini menciptakan suatu interaksi yang jauh lebih intensif dari masa-masa sebelumnya antara perempuan dari berbagai kelas sosial yang berbeda, dari kelompok budaya yang berlainan dan dari latarbelakang agama yang berbeda pula. Gerakan ini menyebabkan para perempuan terpelajar yang hidup dan menjadi dewasa di kota-kota besar turun ke desa-desa dan ke daerah-daerah untuk menyampaikan gagasan tentang perlakuan tidak adil terhadap kelompoknya yang diakibatkan oleh struktur patriarki yang dalam banyak kasus masih dibenarkan oleh sistem budaya lokal. Sebaliknya perempuan yang berada di daerah masuk ke dalam jaringan baru yang menciptakan mobilitas yang lebih tinggi bagi mereka dan ruang gerak yang lebih luas, karena mereka dapat bolak-balik ke kota-kota besar untuk menyampaikan persoalan mereka dan juga memperoleh dukungan dari kelompok perempuan dari daerah lain, dari kebudayaan lain, dan mungkin juga penganut agama yang berbeda.

- ❑ Sebelum kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda, sekolah-sekolah masih sangat sedikit dan sebahagian besarnya hanya terdapat di beberapa kota di Jawa dan Sumatera dan Sulawesi Utara. Karena jumlah sekolah yang sedikit maka anak-anak yang pandai dari berbagai daerah datang untuk belajar di sekolah-sekolah tersebut, dan di sana berkenalan dan kemudian bersahabat dengan para siswa dari daerah-daerah lainnya. Terbentuklah suatu komunitas kaum

terpelajar yang beranggotakan para pemuda dari berbagai daerah, berbagai suku, berbagai latarbelakang kebudayaan agama, dan mungkin juga dari berbagai kelas sosial. Pergaulan lintas-etnis dan lintas-daerah berkembang subur karena berlangsungnya pertemuan dan pergaulan di sekolah-sekolah tersebut.

Sekarang ini keadaan menjadi terbalik. Otonomi daerah menyebabkan bahwa tiap provinsi dan tiap kabupaten ingin mendirikan sekolah sendiri baik pada tingkat dasar, tingkat menengah, bahkan pada tingkat perguruan tinggi. Para siswa dan bahkan mahasiswa yang belajar di sana praktis berasal dari daerah yang sama dan juga dari latarbelakang budaya yang sama. Hal ini dalam jangka panjang bukannya tak mungkin akan menyebabkan menyempitnya rasa integrasi, karena integrasi ini kemudian lebih banyak didasarkan pada faktor-faktor etnis, faktor daerah dan faktor budaya, dan tidak begitu ditentukan lagi oleh visi bersama tentang perkembangan politik dan ekonomi pada tingkat nasional dan internasional atau bagaimana menyesuaikan kebudayaan nasional dengan perkembangan yang terjadi di dunia sekarang serta bagaimana pula meningkatkan harkat dan martabat bangsa kita dalam menghadapi persaingan dan bahkan tekanan internasional.

- ❑ Demikian pula birokrasi pemerintahan yang seharusnya dapat menjadi tempat pergaulan lintas-budaya dan lintas-etnis, sekarang menghadapi bahaya bahwa tiap daerah menuntut agar posisi-posisi birokratis ditempati oleh putera daerahnya sendiri. Sikap ini pun mungkin bukan tanpa sebab-musabab. Sentralisme politik Orde Baru untuk waktu yang cukup lama telah menjadikan birokrasi semata-mata sebagai alat pemerintah pusat dan bukan aparat yang menjadi pengatur hubungan di antara masyarakat dan negara. Birokrasi pemerintah daerah tidak memperhatikan kepentingan daerah, tetapi menjadi pelaksana kepentingan pusat di daerah, sambil mengabaikan kepentingan orang daerah sendiri. Daerah seakan-akan menjadi sapi perahan untuk pusat dan birokrasi daerah menjadi tukang susu bukan untuk daerah tetapi untuk pusat. Sekali pun demikian, politisasi

birokrasi selama Orde Baru tidak selayaknya dibalas dengan parokhialisasi birokrasi dalam masa reformasi ini, seakan-akan birokrasi pemerintahan hanyalah melayani kepentingan daerah saja, dan tidak lagi menjadi perantara di antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara, atau mesin penghubung kepentingan daerah dan kepentingan nasional.

Kalau penyempitan fungsi birokrasi ini terjadi maka bukan saja politik nasional menghadapi risiko politik yang didasarkan pada identitas, tetapi juga birokrasi negara menghadapi risiko birokrasi yang didasarkan pada identitas. Padahal kita tahu bahwa birokrasi adalah institusi yang semestinya bersifat impersonal, formal, dan harus menjadi mesin yang melayani kepentingan siapa saja sejauh dia memenuhi prosedur yang dipersyaratkan. Di sini kita berhadapan dengan beberapa risiko. Risiko politik praktis ialah bahwa dia hanya memperhatikan tujuan dan mengabaikan cara yang patut untuk mencapainya. Risiko birokrasi ialah bahwa dia berkuat pada cara dan prosedur tanpa peduli tujuan apa yang hendak dilayani dan dicapai dengan prosedur yang dijaganya. Risiko identitas ialah bahwa kita tidak terlalu memperhatikan tujuan, tidak terlalu memperhatikan cara dan tidak mempedulikan prosedur, tetapi semata-mata mempertimbangkan siapa yang melakukannya, apakah orang kita sendiri atau orang lain, apakah dia menganut agama yang sama atau agama lain, dan apakah pelaku tersebut asli atau pendatang.

Yang kita alami sehari-hari ialah bahwa politik yang didasarkan pada identitas lebih membahayakan integrasi nasional daripada politik yang tidak didasarkan pada identitas. Kalau partai politik dibentuk hanya berdasarkan kesamaan daerah, kesamaan asal-usul, kesamaan agama atau kesamaan bahasa daerah, maka politik tersebut akan lebih merugikan integrasi nasional karena identitas dalam politik membuat politik menjadi eksklusif. Kecenderungan kepada *internal fractioning* atau pemecah belahan ke dalam menjadi tinggi, sedangkan kemampuan untuk bergerak dan bergaul secara lintas-kelompok, lintas-daerah dan lintas-budaya menjadi menurun.

Sebaliknya politik yang tidak didasarkan pada identitas, tetapi didasarkan pada visi masa depan, pandangan kenegaraan,

paham pembangunan ekonomi, atau cita-cita pendidikan, dan aspirasi mengenai kualitas hidup, akan lebih memungkinkan integrasi, karena politik seperti itu bergerak lintas-etnis dan lintas-daerah, karena para anggota suatu partai politik bergabung ke dalam partainya berdasarkan cita-cita yang sama. Dalam jangka panjang kesamaan visi dan cita-cita ini kemudian membentuk suatu identitas baru yang lebih luas, sehingga tiap partai akan mendapat identitas sendiri, apakah dia lebih nasionalis, domokratis, sosialis, liberal, developmentalis, ekologis atau identitas lainnya.

Ilmu psikologi sosial memperkenalkan dua konsep tentang dinamika pengelompokan yaitu *membership group* atau kelompok keanggotaan dan *reference group* atau kelompok rujukan. Dalam kelompok keanggotaan orang bergabung karena kesamaan identitas atau karena mempunyai kartu penduduk atau mempunyai nenek moyang yang sama. Dalam kelompok rujukan orang bersatu karena mempunyai isi kepala yang sama dan isi hati yang sama. Pengelompokan keanggotaan didasarkan pada kesamaan orang-orangnya, sedangkan pengelompokan rujukan didasarkan pada kesamaan pandangan dan kesamaan nilai-nilai yang menjadi rujukan dan pegangan bersama.

Ini artinya identitas dalam berpolitik bukanlah hal yang diharamkan. Akan tetapi identitas dalam bidang ini sebaiknya tidak menjadi titik tolak pembentukan suatu pengelompokan politik tetapi menjadi hasil akhir pengelompokan politik tersebut. Kalau identitas menjadi titik tolak maka integrasi akan menyempit dan yang terjadi adalah fragmentasi politik, karena setiap kelompok akan sibuk mempertahankan identitasnya dalam berhadapan dengan identitas kelompok lain dan kemudian menjadi tertutup. Kalau identitas dibiarkan terbentuk dalam perkembangan suatu partai politik dan diharap muncul sebagai hasil pendidikan dan hasil budaya politik dalam partai bersangkutan, maka integrasi diperluas, karena anggota-anggota suatu partai yang berasal dari latarbelakang etnis yang berbeda, agama yang berbeda, dan daerah yang berbeda, berusaha membangun suatu kesadaran baru dan pandangan bersama tentang masyarakat, negara dan bahkan tentang perkembangan dunia, dan kemudian menciptakan bentuk pergaulan baru berdasarkan pandangan-pandangan tersebut.

- 
- Bahkan dalam komunitas-komunitas tradisional dapat kita temukan pola-pola budaya yang memungkinkan pembentukan dan perluasan integrasi tanpa sekelompok orang harus kehilangan identitasnya. Di kepulauan Maluku umpamanya terdapat suatu lembaga penyelesaian konflik dalam komunitas-komunitas di sana yang dinamakan pela gandong. Kalau keluarga A mengalami konflik dengan keluarga B dan bahkan terlibat dalam kekerasan antara keduanya, maka konflik tersebut dapat diatasi dengan melakukan upacara pela gandong. Dengan upacara ini konflik antara kedua keluarga diselesaikan melalui upacara adat. Akan tetapi selain itu, keluarga A dan keluarga B menjadi berkerabat dan membentuk suatu bentuk kekerabatan baru sehingga anak laki-laki dari keluarga A kemudian tidak diperbolehkan kawin dengan anak perempuan dari keluarga B. Kalau ada serangan dari luar terhadap salah satu dari dua keluarga tersebut maka keduanya akan menghadapinya bersama-sama. Demikian pun munculnya konflik baru antara keluarga A dan keluarga B menjadi hal yang hampir mustahil dan bahkan tak terbayangkan, karena mereka terikat oleh kepercayaan tentang sanksi-sanksi yang bersifat kosmologis.

Secara sosiologis terlihat di sini pola yang menarik, karena dalam hal ini konflik antara satu keluarga dengan keluarga lainnya, dan bahkan antara satu suku dengan suku lainnya justru menjadi jalan memperluas integrasi, karena setelah perdamaian yang dilakukan dan diresmikan dengan upacara pela gandong, maka tercipta satu keluarga dan bahkan satu kekerabatan yang lebih besar dan lebih luas dari sebelumnya, tanpa masing-masing pihak yang bersatu itu kehilangan identitasnya semula. Dalam kasus ini pola perluasan integrasi melalui tahapan identitas – non – identitas – identitas baru diterjemahkan dalam praktek menjadi perdamaian – konflik – perdamaian yang lebih luas.

Pada tahun bulan Maret 2000, ketika konflik di Ambon masih berkobar, kantor kami menyelenggarakan suatu Dialog Nasional di Langgur, Kei kecil, di Maluku Tenggara, dan dapat mempertemukan selama 4 hari 6 kelompok masyarakat dari masyarakat dari seluruh kepulauan Maluku. Dalam pertemuan

itu berulang kali saya mendengar pertanyaan penduduk setempat bahwa mereka sendiri tidak dapat mengerti mengapa konflik itu menjadi berlarut-larut. Seorang bapak dari Saparua berkata kepada saya dalam pertemuan itu: "Kami dari dulu biasa perang, tetapi kami juga biasa damai. Sekarang ini susah karena kami tidak bisa damai lagi". Menurut pengamatan dan wawancara yang kami lakukan, salah satu sebab berlarutnya konflik di Ambon ialah karena lembaga tradisional penyelesaian konflik seperti *pela gandong* dibuat menjadi tidak efektif lagi oleh unsur-unsur luar yang tidak diketahui siapa. Terlihat di sini hubungan yang erat di antara suatu pandangan hidup dan pranata sosial yang mendukung. Mungkin saja para penduduk Ambon dan Maluku dalam konflik-konflik tersebut masih berpandangan bahwa mereka harus berdamai kembali setelah bertempur, tetapi pranata yang memungkinkan perdamaian tersebut telah dibuat tak efektif atau malah dirusak oleh orang-orang yang tak dikenal atau sulit diidentifikasi.

II

Dari uraian di atas kiranya tampak beberapa hal yang dapat menjadi bahan pembicaraan kita lebih lanjut. Terlihat bahwa identitas bukanlah sesuatu yang selesai dan final, tetapi merupakan suatu kondisi yang selalu disesuaikan kembali, sifat yang selalu diperbaharui, dan keadaan yang dinegoisasikan terus-menerus, sehingga wujudnya akan selalu tergantung dari proses yang membentuknya. Dalam bahasa ilmu antropologi sekarang kita mengatakan bahwa identitas bukanlah suatu wujud, yang sudah ada sejak semula dan tetap bertahan dalam suatu esensi yang tetap dan abadi. Ini kalau dilihat dalam aspek waktunya. Seterusnya, kalau dilihat dalam aspek ruangnya, maka identitas juga bukan hanya satu, tetapi terdiri dari berbagai-bagai lapisan identitas. Lapis-lapis identitas ini tergantung pada peran-peran yang dijalankan, keadaan obyektif yang dihadapi, tetapi juga ditentukan oleh sikap dan pandangan seseorang tentang bagaimana dia menghadapi semua keadaan dan peran tersebut. Buat sebahagiannya identitas itu terbentuk berdasarkan kemauan kita, tetapi buat sebahagian lainnya, pembentukan identitas itu sangat terhantung dari kekuatan-kekuatan obyektif

yang terjadi di sekitar kita, yang mengharuskan kita memberikan respons tertentu di mana respons ini kembali memberi bentuk yang lain terhadap apa yang kita anggap sebagai diri kita.

Sebagai suatu contoh, pemerintah kolonial Belanda melalui suatu kebijaksanaannya pernah menetapkan pembahagian kerja dalam pandangan di Hindia Belanda, di mana pembahagian itu didasarkan pada faktor-faktor etnis. Berdasarkan anggapan itu ditentukan bahwa perdagangan internasional di Hindia Belanda harus diserahkan kepada orang Eropah, perdagangan antar-pulau menjadi hak dan wewenang kelompok-kelompok etnis yang dinamakan "Timur Asing" (Cina, India, Arab), sedangkan penduduk pribumi hanya bergerak dalam perdagangan kecil (*petty trade*). Setelah kebijaksanaan ini dijalankan selama puluhan tahun, jelaslah bahwa pengalaman, ketrampilan dan keahlian orang-orang pribumi dalam perdagangan besar jauh tertinggal dari pengalaman dan keahlian orang-orang Eropah atau saudara-saudara kita yang kebetulan berasal dari golongan "Timur Asing" ini. Keadaan ini kemudian membuat banyak orang dan bahkan membuat kita sendiri akhirnya percaya bahwa pada hakekatnya, atau menurut esensinya, orang pribumi kurang pandai berdagang atau kurang cocok untuk tataniaga dibandingkan dengan orang Eropah atau orang-orang Timur asing. Padahal ini tidak ada hubungan dengan esensi apa pun, tetapi hanya merupakan akibat dari suatu kebijaksanaan politik yang diambil oleh pemerintah penjajahan.

Yang menjadi masalah ialah bahwa anggapan kita tentang identitas diri kita itu tidak saja dibentuk oleh tindakan dan pandangan orang lain, tetapi juga ditentukan oleh perbuatan dan pandangan kita sendiri. Hal ini menjadi penting karena sebagai suatu bangsa segala apa yang kita lakukan terhadap diri kita berlangsung dalam politik nasional yang dijalankan. Menurut pandangan saya, pemerintah kita sebaiknya menentukan bahwa dalam masa pemerintahan seorang presiden selama 5 tahun harus ada sejumlah masalah yang dijadikan program minimum yang harus diselesaikan, atau harus terlihat kemajuannya menuju penyelesaian. Hal ini penting untuk menjaga identitas kita sendiri. Kalau hampir semua soal besar tinggal terkatung-katung dan dibiarkan tergantung, maka lambat-laun akan muncul anggapan bahwa kita adalah suatu bangsa yang tidak sanggup menyelesaikan soal-soalnya sendiri, dan secara esensial

merupakan bangsa yang lemah jiwanya atau gelap pikirannya.

Ketika kita memulai masa reformasi semenjak pertengahan tahun 1998, secara pribadi saya berharap bahwa siapa pun yang akan memerintah negeri ini haruslah dapat menyelesaikan dalam kurun waktu lima tahun pemerintahannya salah satu dari tiga soal besar yang dihadapi oleh negeri kita pada waktu itu, kalau dia tidak sanggup menyelesaikan ketiga soal tersebut sekaligus. Ketiga soal tersebut adalah: perbaikan ekonomi dengan cara mengatasi kembali akibat-akibat krisis ekonomi yang kita alami sebelumnya, kedua, menyelesaikan konflik-konflik horizontal yang bermunculan di berbagai daerah dan mengembalikan perdamaian secara nasional, dan, ketiga, memaklumkan perang kepada praktek KKN dengan mengambil langkah yang tegas dalam membrantas atau menahan meluasnya KKN, baik melalui jalan hukum mau pun melalui jalan politik.

Jalan hukum akan memungkinkan bahwa seorang yang terbukti di pengadilan melakukan korupsi harus dihukum seberat-beratnya, sedangkan secara politik seorang yang terbukti melakukan KKN harus diberi disinsentif politik, misalnya dengan tidak memberikannya kemungkinan untuk promosi dalam jabatan atau karier politiknya diakhiri saja. Sering timbul pertanyaan mengapa kita begitu peka terhadap kesalahan yang dilakukan terhadap kekuasaan politik dan mudah sekali menghukumnya sebagai subversi, tetapi kita tidak peka sama sekali terhadap kesalahan yang dilakukan terang-terangan terhadap kesejahteraan rakyat, oleh orang-orang yang jelas-jelas melakukansubversi dalam ekonomi nasional melalui berbagai pencurian dan penyelewengan uang publik?

Kalau kita mengamati perkembangan politik saat ini terlihat jelas bahwa ketiga soal tersebut tidak banyak mengalami kemajuan yang berarti dalam usaha penyelesaiannya. Konflik daerah masih terus berlangsung, karena setelah Ambon dan Sampit agak mereda, kita berhadapan dengan masalah Aceh dan Poso, sementara bom-bom masih juga meledak di berbagai tempat. Ledakan bom di Denpasar, Bali, dianggap sebagai suatu tragedi nasional dan internasional karena menewaskan demikian banyak orang yang tak bersalah, bukan hanya orang Indonesia saja, tetapi juga para wisatawan dari berbagai kebangsaan lainnya. Patut dicatat bahwa sebahagian besar tempat pertemuan orang banyak sudah terkena ledakan bom: hotel,

bandara, dan rumah sakit. Demikian pula KKN tidak terlihat berkurang, karena korupsi berjalan secara besar-besaran dan dengan cara yang semakin terang-terangan. Perbedaan di antara KKN sebelum dan sesudah reformasi ialah bahwa KKN sebelumnya masih dikontrol oleh rasa malu meski pun tidak ada lagi rasa takut. Korupsi dijalankan dengan lebih tertutup. Sekarang ini korupsi dijalankan dengan lebih terbuka, karena tidak ada lagi rasa takut dan juga tidak ada lagi rasa malu. Demikian pula keadaan ekonomi masih ditandai oleh besarnya pengangguran dan kenaikan harga dan berbagai tarif. Kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka lambat laun kita tak cukup yakin lagi apakah sebagai bangsa kita sanggup menyelesaikan soal dan mengatasi kesulitan, atau selalu bisa dihanyutkan oleh persoalan seperti halnya banjir yang selalu menjebol banyak tempat di Jakarta setiap musim hujan.

Dalam hal ini saya ingin mencatat beberapa kecenderungan yang amat mempengaruhi identitas kita sebagai suatu bangsa pada saat ini.

Pertama, kita rupanya tidak mempunyai perspektif waktu. Pembangunan yang paling bersifat fisik pun sering tidak jelas dimensi waktunya. Di tempat tinggal saya di Rempoa di dekat Ciputat di Jakarta Selatan, jalan raya dari arah pekuburan Tanah Kusir menuju Ciputat itu selama 3 tahun terakhir ini bisa dibongkar 2 sampai 3 kali dalam setahun. Jadi pada waktu diadakan perbaikan jalan itu rupanya tidak diperhitungkan perbaikan itu dimaksudkan untuk beberapa lama (yaitu perspektif masa depan) dan apakah para pembangun jalan itu pernah belajar dari kekeliruan sebelumnya ketika mereka membongkar jalan itu untuk pertama kali kalinya (perspektif masa lampau). Ini tentu contoh yang sangat sepele, tetapi hal ini dapat menggambarkan bagaimana perspektif waktu itu diabaikan dalam perencanaan ekonomi atau perencanaan pembangunan politik yang lebih tinggi tingkat kesulitannya.

Dalam bidang politik intelektual diulang-ulang kesalahan yang sama yang sudah terjadi 50 tahun lalu, atau diperdebatkan suatu soal yang sudah dibicarakan dengan lebih baik dan lebih canggih bahkan sebelum Indonesia Merdeka. Fragmentasi dalam kalangan partai politik sekarang ini hanya mengulang fragmentasi politik yang terjadi pada tahun 50-an dengan pola yang tidak banyak berbeda, karena kita tidak mempersoalkan lagi apakah

pengelompokan politik sekarang didasarkan pada kriteria yang sudah lebih maju dari pola “aliran” pada tahun 50-an, atau hanya menjadi variasi baru dari pola “aliran” tersebut tanpa kita mau menyadarinya, atau pun, kalau sadar, enggan mengakuinya. Kita pada dasarnya tidak mempertimbangkannya masa lampau dan tidak memperhitungkan masa depan, dan karena itu terbiasa menghadapi masa sekarang sebagai sesuatu yang hanya dapat diterima, tetapi tidak bisa direncanakan dan diatur. Secara obyektif jelas kita mempunyai waktu lampau dan masa depan tetapi secara mental barangkali kita hanya mempunyai masa sekarang, dan selalu terjebak dan tak dapat keluar dari *political present tense*.

Dalam bidang intelektual kita tetap hidup dengan suatu pandangan antropologis yang sangat miskin, yang masih percaya bahwa bangsa kita berperasaan halus (sementara kita bisa menceritakan peristiwa pembakaran hidup-hidup seorang pencuri atau tukang palak yang tertangkap, dan dapat tertawa dalam menceritakan kembali peristiwa itu). Sementara di belahan dunia lain orang sibuk memikirkan siapakah manusia dan bagaimana hubungannya dengan kebudayaan, kita menghadapi masyarakat dan kebudayaan kita seakan-akan semuanya serba jelas. Berbagai kesulitan dalam bidang ekonomi dan politik tidak terpecahkan, karena kita tidak berusaha memahami tingkahlaku orangb Indonesia sendiri secara ilmiah, dan mencari jalan pemecahan dengan langkah-langkah metodis dan sistematis. Kita menderita suatu *anthropological poverty* atau kemiskinan antropologis dalam pandangan tentang bangsa kita dan diri kita sendiri. Dibutuhkan usaha yang terencana dan teratur untuk menyelidiki diri kita kita sendiri, kecenderungan kita, dan kelemahan kita, dan harus diambil langkah berikut untuk memperbaiki atau mengembangkannya lebih lanjut.

Sebagai sebuah contoh yang aktual, minggu lalu baru saja berlangsung Kongres Bahasa Indonesia di Jakarta, yang dihadiri oleh para pengajar bahasa, peneliti bahasa dan ahli bahasa dari dalam dan luar negeri. Setelah lewat beberapa kongres bahasa seperti ini, tetap gelap bagi kita bagaimana seharusnya kita melihat hubungan dan mengatur hubungan itu di antara perkembangan bahasa dan pembakuan bahasa Indonesia.

Pembakuan bahasa, menurut banyak pengalaman, akan menghadapi du risiko, yaitu bahwa pembakuan bahasa itu dapat

menjadi sarana yang dimanfaatkan oleh kekuasaan politik untuk melestarikan kekuasaannya, dengan mendidihkan pola-pola ketaatan kepada kekuasaan melalui ketaatan kepada kaidah-kaidah bahasa yang ditetapkan oleh kekuasaan. Risiko yang kedua ialah bahwa pembakuan bahasa akan membawa kita kepada terbentuknya bahasa formal yang ditentukan oleh kaidah-kaidah bahasa yang ditetapkan oleh para ahli bahasa, dan kehilangan spontanitas dan kreativitas para pemakai bahasa lainnya.

Tentu saja terjadi banyak sekali perkembangan dalam bahasa Indonesia, baik dalam jumlah kosa kata, baik dalam struktur kalimatnya, mau pun dalam gaya bahasa yang terjadi. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan yang belum dijawab dengan tegas ialah: adakah suatu ragam bahasa yang oleh khalayak pemakai bahasa Indonesia dapat dijadikan rujukan tentang pemakaian bahasa Indonesia baku? Bahasa Inggris menjadikan *oxford English* sebagai rujukan tentang bahasa Inggris yang baku, bahasa Jerman menjadi *Hochdeutsch* sebagai rujukannya. Kita tentu bertanya ragam bahasa Indonesia yang mana yang dapat dipegang sebagai bahasa Indonesia baku, yang dapat dipergunakan dalam bidang administrasi negara, ilmu pengetahuan, atau pun dalam media massa? Terlihat di sini bahwa tanpa pembakuan bahasa maka suatu bahasa kehilangan disiplinnya, sementara tanpa pengembangan bahasa maka suatu bahasa kehilangan dinamika dan kreativitasnya. Pembakuan membentuk identitas sedangkan kreativitas bahasa menerobos identitas tersebut.

Bahasa dan pembakuan bahasa hanyalah salah satu contoh, tetapi hal yang sama dapat dikatakan tentang pendidikan dan kebudayaan pada umumnya. Apakah kita mempunyai politik pendidikan yang jelas, yang menetapkan beberapa hal yang harus deicapai sebagai tujuannya yang baku? Demikian pun politik pendidikan yang serba kabur akan menyebabkan sikap kita yang serba ragu-ragu baik terhadap kebudayaan daerah mau pun terhadap kebudayaan asing.

Kedua, ada asimetri atau kesenjangan besar di antara tuntutan akan hak dan komitmen untuk kewajiban. Kalau anda menyetir mobil ke bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng dan memarkir mobil di salah satu blok parkir di sana, anda harus membayar sewa parkir yang cukup mahal dan mendapat karcis

parkir. Sekali pun demikian anda hendaknya membaca karcis parkir itu bolak-balik, karena di salah satu halaman karcis tertulis: kehilangan mobil tidak menjadi atnggungan dari perusahaan parkir itu. Jadi apa yang dapat kita harapkan kalau kita menitipkan mobil di sana dengan membayar sejumlah uang yang dihitung setiap jam?

Sekali lagi, ini juga contoh yang barangkali sepele, tetapi secara sosiologis dapat menjadi petunjuk tentang betapa takutnya orang bertanggungjawab, sementara betapa mudahnya dia menuntut haknya. Tingkahlaku di lapangan parkir ini tidak dapat dilihat sebagai suatu perilaku yang terlepas melainkan sebagai gejala dari suatu sikap yang jauh lebih luas dalam budaya politik kita, yaitu suatu situasi budaya dan mungkin juga situasi kejiwaan di mana hak tidak lagi berhubungan dengan kewajiban, kehormatan tidak lagi berhubungan dengan tanggungjawab, dan keuntungan tidak lagi berhubungan dengan risiko. Seseorang yang menuntut haknya tidak harus dibebani suatu tanggungjawab yang menjadi imbalan yang seharusnya dipertukarkan dengan haknya. KKN terjadi karena ada kesadaran palsu dalam budaya politik kita bahwa jabatan dan kekuasaan hanya berhubungan dengan hak tetapi tidak ada sangkut-pautnya dengan kewajiban.

Kalau anda pernah menghadiri promosi Doktor di sebuah universitas negeri di Indonesia, maka anda sebaiknya memperhatikan pernyataan resmi yang diucapkan oleh seorang promotor kepada promovendus yang hendak diangkat menjadi seorang doktor baru. Meski pun tidak persis dalam kata-katanya, ucapannya kira-kira begini bunyinya: " Dengan ini saya mengangkat saudara menjadi doktor dalam ilmu sosiologi. Saudara dapat menggunakan gelar ini dan mendapat segala hak dan kehormatan yang diberikan oleh gelar tersebut ". Yang ditekankan di sana hanyalah hak dan kehormatan, dan sama sekali tidak disebutkan juga bahwa dengan gelar tersebut seseorang mempunyai kewajiban dan beban baru. Ini sangat berbeda dengan menjadi pengajar di sebuah universitas di negara maju. Dosen tidak dapat bermain-main dengan tugasnya, karena dia bisa dimarahi mahasiswa kalau pada jam konsultasi yang sudah ditentukan dia tidak ada di tempat. Mahasiswa yang mendapat angka yang rendah tidak akan menerimanya begitu saja tetapi akan mendatangi dia dan mempertanyakan kenapa

angkanya tidak lebih tinggi. Aatau kalau pekerjaan ujian tidak selesai diperiksa pada waktunya mahasiswa akan menuntut dan bisa marah.

Ketiga, kesenjangan di antara pemikiran tentang keuntungan dan antisipasi terhadap risiko, dan bayangan tentang kemajuan tanpa antisipasi terhadap masalah yang muncul. Pada dasarnya kesadaran untuk mengantisipasi munculnya masalah ini rendah sekali. Di Jakarta setiap musim hujan boleh dikata selalu ada banjir. Semenjak reformasi, banjir yang terbesar terjadi pada bulan Februari 2001, ketika bahagian kota atau perkampungan yang tergenang air setinggi lebih dari satu meter terdapat hampir di seluruh Jakarta. Sungai meluap dan meninggalkan endapan lumpur yang tebal dan menimbulkan pendangkalan yang sangat nyata. Akan tetapi setelah peristiwa itu berlalu tidak terlihat usaha pemerintah DKI untuk melakukan pengerukan dasar sungai yang sudah meninggi itu, dan menyebabkan bahwa sungai lebih mudah meluap kalau turun hujan lebat.

Kadang-kadang saya berpikir apakah ini cerminan dari sikap *nrimo*, yaitu sikap yang tidak melihat persoalan dan masalah sebagai perkara yang harus diperhitungkan dan diantisipasi, tetapi sebagai keadaan yang hanya bisa diterima. Demikian pula pembukaan real estate yang baru tidak segera disertai dengan pembukaan jalan baru, dengan akibat bahwa jumlah mobil yang meningkat di suatu kompleks perumahan tiba-tiba harus memenuhi ruas jalan yang tetap sama seperti sebelumnya, dan mengakibatkan bahwa kemacetan terjadi setiap pagi saat orang ke kantor dan setiap sore saat orang kembali ke rumah.

Sebetulnya tidak ada perbedaan secara psikologis antara menerima saja banjir setiap musim hujan dan berusaha alakadarnya memberi pertolongan, dan menerima saja KKN yang terjadi dalam politik dan birokrasi dan berusaha alakadarnya mengurangi keguncangan sosial yang timbul. Demikian pula krisis ekonomi nasional barangkali dihadapi secara kejiwaan dengan sikap yang sama dengan sikap kejiwaan seorang mahasiswa yang kebetulan kehabisan uang dan belum mendapat kiriman baru dari rumahnya. Dengan lain perkataan, masalah atau kesulitan masih ditanggapi sebagai keadaan yang muncul secara alamiah dan akan teratasi juga secara alamiah. Pandangan ini harus diganti secara radikal dengan pandangan lain, bahwa masalah dan kesulitan, khususnya dalam politik,

ekonomi dan Kebudayaan, adalah keadaan yang telah kita ciptakan sendiri, entah secara sengaja, setengah sengaja, atau tidak sengaja, dan karena itu penyelesaian keadaan itu tergantung pada tindakan kita juga.

Filosof Jerman, Friedrich Nietzsche mengatakan bahwa menginginkan sesuatu selalu berarti ingin mewujudkan apa yang kita inginkan. *Wollen* selalu berarti *tun wollen*. Kalau kita hanya menginginkan sesuatu tetapi tidak bertekad mewujudkan apa yang kita inginkan maka keinginan itu tidak lebih dari suatu perbuatan menggantung asap. Keinginan kita sebagai bangsa adalah keinginan yang aktif dan dapat diwujudkan dan harus diwujudkan, dan sangat berbeda dari keinginan langit biru yang merindukan hijaunya bumi, yang menyebabkan angin yang berhembus di antaranya mengeluh: "Aduh".

Jakarta – Bukittinggi, 18 Oktober 2003

PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA KITA

(SUATU RESEPSI DARI HASIL PENGAMATAN
DALAM BENTUK POKOK-POKOK PIKIRAN)

oleh: **Ishak Ngeljaratan**

1. Fungsi Bahasa dan Sastra Indonesia

Pengembangan kebudayaan nasional mencakup pengembangan semua unsur yang membentuk kebudayaan sebagai suatu sistem yang utuh. Pengembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, juga pengembangan kehidupan beragama, kehidupan mencari nafkah, kehidupan berkesenian, berpolitik, beriptek, berkarya dan beraktualisasi diri. Pengembangan bahasa dan sastra adalah bagian integral dari seluruh pengembangan kebudayaan. Secara khusus, justru bahasa dan sastralah yang digunakan untuk mengemas seisi budaya yang dihasilkan oleh masyarakat. Isi budaya yang dikemas di dalam bahasa dan sastra dalam bentuk karya adalah juga guru terbaik bagi masyarakat. Dengan kata lain, proses pencerdasan bangsa dilakukan dengan menggunakan bahasa, namun bahasa dan sastra juga menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mencerdaskan bangsa melalui bacaan sebagai komunikasi yang bercorak dialog.

Ungkapan “gunakan Bahasa Indonesia (BI) dengan baik dan benar” tidak sepadan dengan fungsi BI untuk mencerdaskan bangsa. Seharusnya ungkapan dilengkapi atau disempurnakan menjadi “gunakan BI dengan baik dan benar untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran agar dapat dijadikan sikap berbahasa dan bertindak secara baik dan benar”. Ungkapan yang panjang ini dapat di simplifikasi menjadi “satunya atau samanya kata dengan perbuatan”. Bahasa yang baik dan benar haruslah bahasa yang mengandung nilai kebaikan dan kebenaran yang dipraktikkan.

Betapa retorika yang diucapkan oleh para elite dan para tokoh serta para pemimpin di negeri ini tidak mengandung kebaikan dan kebenaran. Betapa dengan sangat fasih BI digunakan dengan baik dan benar untuk menyebarkan dusta dan kebohongan serta fitnah. Betapa BI sudah digunakan untuk merusak nilai-nilai moral. Sedang terjadi korupsi nilai-nilai keutamaan (virtuis) dengan menggunakan BI sebagai pedang pembunuh.

Jika BI harus digunakan dengan baik dan benar, maka sastra adalah karya yang menggunakan BI untuk membangun berbagai

struktur literer yang berdaya haru dan pesona serta daya yang membahagiakan. Daya pukau ini bukan saja disebabkan oleh bahasa, melainkan oleh sistem yang menjadikan tema dan pesan-pesan tematis sebagai inti atau muatan nilai dari struktur bahasa. Dengan kata lain, tema dan pesan-pesan tematis yang benar dan baik distrukturkan ke dalam sebuah unit literer (sastra) yang memukau karena berdaya haru, pesona dan membahagiakan.

Jika BI sudah digunakan dengan baik dan benar untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang baik dan benar (etis dan rasional) maka kebudayaan bangsa akan semakin baik dan benar. Jika BI sudah berkembang bukan saja atas dasar bahasa yang baik dan benar, melainkan juga karena mengandung makna yang benar (rasional), baik (etis) dan berdaya pesona (estetis atau spiritual) maka manusia Indonesia dan budayanya dapat mencapai kualitas yang dapat dijadikan kebanggaan nasional kita.

Sesungguhnya, Bahasa Indonesia (BI) disamakan juga dengan “bahasa kita”. Karena Sastra Indonesia (SI) menggunakan BI sebagai medium pembentuk struktur literer, maka Sastra Indonesia dapat disebut juga sebagai “sastra kita”. Kata “kita” yang dipasangkan pada bahasa dan sastra, yaitu bahasa kita dan sastra kita, mengisyaratkan adanya semacam sasaran atau tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan bahasa (BI) dan sastra (SI).

Yang ingin dicapai melalui penggunaan BI dan SI yang terus menerus berkembang dan dikembangkan ialah mencairkan perbedaan di antara berbagai budaya milik komunitas nusantara yang menyebabkan adanya jarak cita rasa emosional dan kejiwaan di antara berbagai warga dan kelompok warga di dalam komunitas etnis yang plural. Perbedaan etnis yang lebih ditandai atau diwakili oleh adanya perbedaan bahasa-bahasa daerah dapat diangkat menjadi perbedaan yang justru memperkaya BI dan SI yang ditumbuhkan dan dikembangkan dalam bingkai ke-kita-an.

Karena BI dan SI adalah bahasa kita dan sastra kita, maka berbagai bahasa dan sastra daerah nusantara, selain dipayungi dan dilindungi oleh BI dan SI, juga dijadikan kekuatan baru yang “meng-kita-kan” berbagai suku dengan bahasa suku masing-masing. Lambat laun, pluralitas etnis yang diwakili secara sangat dekat dan akrab oleh bahasa-bahasa daerah yang cenderung secara dikotomis yang saling berhadapan sebagai lawan akan menumpul dan larut dalam pluralitas baru yang lebih bercorak

kultural. Coral kultural inilah yang tak harus dikaitkan dengan kemajemukan suku dan bahasa daerah atau bahasa suku.

Fungsi BI dan SI tidak terbatas pada mengakrabkan masyarakat nusantara yang pluralis. Fungsi BI dan SI ialah mengemas dan mewarnai seluruh proses dan hasil budaya yang digumuli dan digeluti masyarakat dengan substansi serta warna keindonesiaan dan kekitaan. Kita sebagai bangsa Indonesia ingin terus berubah secara positif atau berkembang, namun berkembang bukan untuk kehilangan identitas keindonesiaan atau kekitaan kita, melainkan justru untuk semakin mengindonesia tanpa melikuidasi pluralitas yang menjadi ciri khas dan unik dari budaya bangsa Indonesia.

2. Jalur Pengembangan BI dan SI

Bahasa dan sastra, dalam hal ini BI dan SI dapat ditempuh melalui berbagai jalur. SI mencakup sejarah SI, pendidikan dan pengajaran SI, penelitian SI, teori sastra dan kritik sastra sebagai ilmu, dan karya sastra Indonesia (KSI) sebagai sasaran apresiasi dan kajian kritis oleh ilmu-ilmu sastra. Minimal, ada tiga jalur pengembangan BI dan SI yang dapat ditandai. Jalur utama ialah jalur komunikasi sosial di antara sesama warga di dalam berbagai kelompok atau komunitas masyarakat. Jalur kedua ialah jalur pendidikan formal melalui pengajaran bahasa dan sastra melalui jenjang pendidikan. Melalui jalur inilah, KSI dapat diapresiasi dan dikaji secara kritis. Jalur ketiga mencakup komunikasi informasi melalui teknologi media cetak, media elektronik dan media optik atau film layar lebar.

Komunikasi sosial tak sebatas komunikasi antarwarga dan antarkelompok di dalam masyarakat, melainkan juga menjangkau komunikasi yang bermuatan substansi dari semua bidang kebutuhan atau kepentingan masyarakat seperti informasi tentang politik, hukum, ekonomi atau bisnis, seni, agama dan kebutuhan sehari-hari. Dalam konteks demikian bahasa dikembangkan atau berkembang secara alamiah melalui pergaulan sehari-hari antara para warga atau melalui diskusi, seminar, simposium dan berbagai pertemuan serta forum yang menggunakan BI sebagai bahasa dialog.

Secara khusus, BI dapat dikembangkan melalui pengajaran BI dengan mengapresiasi KSI atau dengan menyimak serta mengkaji KSI sebagai bagian dari pendidikan dan pengajaran SI secara kritis. Bukan saja bahasa sebagai bahasa (*language as such*) yang

menarik peserta didik, melainkan tema dan pesan-pesan yang terjabar dari tema di dalam sebuah KSI yang menarik karena menyentuh cita rasa serta emosi peserta didik. Justru daya tarik bahasa bahasa tergantung pada daya tarik makna atau pesan yang dikemas serta teknik pengemasannya. Daya tarik demikian secara implisit turut menanamkan pesan-pesan moral atau ideal menarik bagi peserta didik. Bukan saja pengetahuan dan keterampilan mereka dalam BI dikembangkan, melainkan kalbu mereka pun ditanami bibit moral dan ideal yang diharapkan akan berbunga serta berbuah di dalam sikap, tutur kata, serta perilaku mereka sehari-hari.

Maut, cinta, dendam, rindu, impian dan berbagai ilusi, yang diramu serta ditawarkan oleh sebuah KSI yang bermutu, akan berdaya tarik secara humanis (daya tarik human interest). Daya tarik inilah yang secara tak langsung dapat menggiring para peserta didik untuk semakin mahir menggunakan BI dalam berekspresi, secara lisan dan tulisan, dengan mengungkapkan apa yang dinikmati (apresiasi) atau yang dipahami secara kritis (melalui kajian kritis atau kritik sastra) terhadap KSI yang sedang digeluti. "Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui," Sekali menikmati dan mendalami sebuah KSI, dua keuntungan pun diraih, yaitu BI semakin dikuasi dan pemahaman serta pengetahuan tentang SI semakin teruji.

3. Bahasa dan Sastra Daerah

Bahasa dan sastra daerah dapat dimanfaatkan sebagai sumber untuk memperkaya kosa kata dan struktur gramatikal BI serta memperkaya tema dan pesan-pesan di dalam KSI. Namun, pemerikayaan kosa kata, terutama struktur gramatikal BI, tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan secara terkendali oleh tata bahasa baku dan oleh pusat pengembangan bahasa (BI dan bahasa daerah) dengan tetap membuka peluang bagi suatu perubahan atau modifikaasi tertentu yang dibutuhkan. Hasil pemerikayaan dapat membuka peluang lebih luas bagi pengguna bahasa (BI) untuk memilih kata dan struktur gramatikal atau menentukan "diksi" yang tepat secara lebih bebas.

Kosa kata tentang laut, perahu, dan kekuasaan yang melimpah ruah di dalam bahasa-bahasa daerah (misalnya Bugis, Mandar, Makassar, Toraja) dapat dijadikan kata atau istilah untuk mengisi kekuarangan kosa kata dalam kelautan dan pemerintahan. Sikap untuk dengan cepat menjatuhkan vonis

“salah” pada struktur BI yang dipengaruhi oleh struktur bahasa daerah tertentu kurang rasional. Bukan mustahil, struktur Bi yang terpengaruh itu lambat laun dapat berkemabang menjadi struktur gramatikal baku dalam BI yang diterima dan diterapkan dengan lebih mudah serta bebas oleh pengguna BI.

Sastra daerah atau karya-karya sastra daerah bukan saja sekedar dikemas oleh bahasa daerah, melainkan berbagai tema dan pesan yang berdaya pesona serta berdaya haru atau yang bercorak estetis dan religius distrukturkan ke dalam karya sastra secara memakau, unik, dan spesifik . Daya pukai makna yang disebabkan juga oleh teknik pembahasa-an makna atau penstrukturan makna oleh sastrawan dapat dijadikan sumber budaya bagi pemaknaan dan penstrukturan KSI yang akan ditulis.

Struktur yang dimaksud bukan hanya bahasa, melainkan juga aspek lain seperti plot (pengaluran atau teknik penulisan alur), penokohan, setting, tone, tipografi, dan bahkan aspek makna itu sendiri yang menjadi kekayaan dari budaya komunitas masyarakat Sulsel atau komunitas daerah senusantara yang lain di tanah air. Daripada mengambil alih kosa kata asing dan menjadi plagiat dan epigon sastra asing, baik dalam struktur dan makna , adalah lebih baik menimba kekayaan struktur dan makna dari dalam karya-karya sastra daerah bagi pemerdayaan KSI, sekaligus bagi pemerdayaan BI.

Bagaimanapun, harus ada sikap kritis dan selektif bagi elite pengembang BI dan KSI untuk tidak secara gegabah mengambil alih kosa kata atau sesuatu makna dari sastra daerah. Tak harus terjadi tumpang tindih pengertian dari sejumlah kata darai bahasa daerah dengan kosa kata BI yang sudah siap pakai. Karena itu. Kosa kata BI yang sudah baku dan memasyarakat, sebaiknya tak perlu ditumpangtindihkan dengan kosa kata bahasa daerah yang bersinonim. Namun, tak ada salahnya, sejumlah kosa kata dari bahasa daerah diambil alih dari sudut pandang usaha untuk memperkaya jumlah kosa kata BI dari sumber bahasa dan sastra daerah milik masyarakat. Usaha demikian dapat megurangi masuknya sejumlah kosa kata asing yang tak perlu karena sudah ada padanan kata dalam bahasa daerah.

Barangkali yang harus diperhatikan untuk dapat menghindari adalah sikap chauvinistis daerah. Chauvinisme dapat mengambuhkan sentimentalitas suku yang primordialis dan fanatis yang diwakili oleh bahasa daerah yang ingin

dikembangkan untuk merajai kosa kata BI secara sepihak. Namun, untuk mencegah terjadinya kompetisi tak sehat dalam perebutan posisi kosa kata dan makna-makna baru di dalam BI dan KSI, janganlah dicari jalan keluar atau eskapisme lewat penerimaan kosa kata dan makna baru yang tak dibutuhkan dari bahasa asing secara semena-mena. Pusat Bahasa diharapkan dapat berperan juga sebagai “siskamling” BI dan KSI agar bahasa dan sastra bangsa kita berkembang tanpa harus kececeran identitas diri yang berbeda dari bangsa lain.

4. Pendidikan dan Pengajaran BI dan SI

Tak ada pendidikan BI atau pendidikan SI. Yang ada ialah pendidikan peserta didik dan pengajaran ilmu bahasa serta pengajaran ilmu sastra. Yang dididik ialah peserta didik melalui pengajaran BI dan SI. Muatan (content) yang berdaya tarik yang dikemas oleh bahasa ditanamkan ke dalam kalbu peserta didik melalui proses yang disebut pendidikan, sedangkan yang ditanamkan ke dalam dunia pengetahuan (kognitif) lebih bercorak pengajaran atau pemberian ilmu pengetahuan (bahasa dan sastra), juga ada pelatihan (cakupan pendidikan dan pengajaran sekaligus) bagi keterampilan (aspek motorik) peserta didik.

Dapat dinyatakan bahwa dengan mendidik, peserta didik diharapkan dapat berbudi pekerti dan bersikap yang benar (rasional) dan baik (etis dan santun). Melalui pengajaran, dunia pengetahuan (kognisi) peserta didik diperluas dan diperdalam untuk menunjang sikapnya (afeksi) agar dapat berbuat sesuatu secara terampil, benar dan bertanggung jawab. Karena itu, pendidikan peserta didik melalui pengajaran bahasa yang menjadikan sebuah karya sastra sebagai sasaran apresiasi atau bahkan sebagai sasaran kajian secara ilmiah (menggunakan teori sastra atau kritik sastra) sangat dianjurkan.

Melalui pengajaran, struktur dan makna-makna yang terstruktur di dalam karya sastra dipahami (domain kognitif). Melalui pendidikan, makna tematis atau pesan-pesan yang benar (rasional), baik (etis), dan berdaya pesona (estetis atau religius) dari sebuah karya sastra (dalam hal ini KSI) dapat diangkat dan diproses menjadi sikap peserta didik (domain afektif). Makna dari dunia kognitif dan afektif diwujudkan melalui pelatihan (exercises) terhadap peserta didik agar apa yang diketahui dan dijadikan sikap dapat diwujudkan di dalam tutur kata serta perilaku nyata

yang benar, baik dan santun sehingga dapat membahagiakan peserta didik sebagai pelaku.

Karena itu, pengajaran bahasa (BI) tak boleh terlepas dari teks yang memiliki muatan yang benar, baik dan menarik atau bahkan berdaya pesona dan mengharukan (karya sastra sebagai teks atau diskursus). Tanpa daya tarik lewat makna yang menarik, pengajaran BI bukan saja tidak menarik, melainkan juga tidak terjadi pendidikan, kecuali pengajaran atau penanaman ilmu semata-mata. Pendidikan dan pengajaran adalah dua kegiatan yang secara interaktif saling mengisi dan saling melengkapi sebagai kekuatan untuk mengembangkan kualitas peserta didik secara utuh (kognitif, afektif, dan motorik).

Pendidikan peserta didik melalui pengajaran BI, dan SI serta pelatihan untuk semakin menanamkan nilai-nilai benar dan baik, bahkan nilai-nilai yang mempesona, mengharukan dan membahagiakan di dalam sikap serta perilaku peserta didik sudah harus dimulai sejak Taman Kanak-Kanak (TK) atau sejak SD. Keberhasilan di dalam pendidikan dan pengajaran yang benar dan baik terhadap peserta didik sejak dini dapat membekali para peserta didik untuk senantiasa bergairah di dalam menggeluti dunia pendidikan dan pengajaran yang melibatkan mereka di setiap jenjang pendidikan serta pengajaran yang diikutinya. Kejenuhan dan rasa bosan sebagai akibat dari pendidikan dan pengajaran yang tidak berdaya tarik akan mematikan langkah lanjut bagi peserta didik di dalam meraih kemajuan demi kemajuan.

Catatan Tambahan

Masih ada isu-isu bermasalah tentang nasib BI dan SI seperti faktor-faktor penyebab rusaknya BI, peranan pers, retorika para elit, pengaruh bahasa Jakarta, slang dan bahasa prokem remaja serta promosi BI lewat iklan, etc yang butuh bahasan. Catatan singkat ini masih sangat jauh dari sempurna karena hanya terbatas dalam bentuk pokok pikiran yang diharapkan akan dikembangkan dan disempurnakan oleh para peserta diskusi

Bulan Sumpah
Pemuda 2003

BUDAYA MARITIM dan OTONOMI DAERAH

Oleh: Muklis PaEni

Secara umum tradisi masyarakat Pesisir sebenarnya berada dalam sebuah skala besar yang di sebut Kebudayaan Maritim. Kompleksitas itu secara harfiah dapat dibagi dalam dua komponen dasar.

Pertama : Tradisi Besar (Great Tradition) Kemaritim merupakan Kompleksitas perwujudan Budaya yang mencakup : ide-ide, Gagasan, Nilai-nilai, Peraturan/undang/hukum, filsafat, karya seni, Arsitektural/ Rancang bangun,(perahu, dermaga, benteng-benteng pertahanan, kota-kota pantai) birokarasi, perang, kesusastaan, mistik, ilmu pengetahuan dan teknologi, diplomasi, dan lain-lain. Aktifitas komponen pertama erat hubungannya dengan Negara/Kerajaan, dimana raja/para Bangsawan, Syahbandar serta kelompok intelektual menjadi inti kegiatan. Karena itu kita tidak dapat menghindari satu realitas bahwa dengan hancurnya pusat-pusat kekuasaan maritim nusantara sejak abad ke 17-18, secara berangsur-angsur pula tradisi besar Kemaritim mengalami degradasi. Karena itu dengan hancurnya Kerajaan-kerajaan Maritim Nusantara abad ke 17 (Terakhir Gowa, Makassar, 1667) kekalahan ini tidak dapat diartikan secara sederhana sebagai kekalahan perang/ kehancuran kekuatan militer, politik, ekonomi semata-mata tapi juga secara langsung menghancurkan sendi-sendi utama pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan maritim dalam arti Great Tradition kemaritim kita secara mendasar hingga saat ini.

Kedua : Tradisi kecil (little tradition) kemaritim

Merupakan kompleksitas kegiatan/ aktivitas yang sangat terbatas pada kehidupan/dinamika sumber daya kelautan di kawasan pesisiran. Menyangkut penangkapan ikan dan pengelolaan sumber daya laut, tambak, teknologi berskala kecil, perdagangan antar pulau berskala dekat dan usaha-usaha lain berhubungan dengan pengelolaan laut secara terbatas. Rona Kehidupan masyarakat pesisir yang terbatas ini hampir tidak banyak berubah. Tradisi ini berlanjut memasuki perubahan zaman, sering kali digolongkan dengan tingkat kehidupan yang

amat sederhana, kata lain dari kemiskinan. Celakanya banyak diantara kita mengenal masyarakat Pesisir dan dimensi miskin, dari little tradition kemaritiman itu sebagai predikat masyarakat maritim. Anggapan ini tidak hanya di kalangan masyarakat umum saja tetapi juga dari kalangan Akademisi di berbagai Universitas yang konon mengfokuskan pola ilmiah pokoknya pada kajian kelautan, umumnya memasuki kawasan maritim melalui Perkampungan Nelayan sebagai titik tolak kajian, sementara pekerjaan intelektualnya dalam Great Tradition tidak tersentuh. Karena itu tidak mengherankan kalau saad ini menyebut masyarakat pantai atau masyarakat pesisir yang terbayang di benak seseorang adalah perkampungan nelayan miskin yang kumuh, perahu nelayan yang menganggur di musim paceklik, wanita yang menjemur ikan kering/asin, atau kesibukan membenahi jala/pukat dan mempersiapkan perahu dan lampu-lampu di musim tangkap. Keadaan/suasana seperti itu sudah berlangsung dari tahun ke tahun dari abad ke abad hingga sekarang syair masyarakat Pesisiran makassar meng gambarkannya.

Artinya

Bulang Sumarako naik
Na nuseorok ballaku
Na kacinikang
Sombere' kasi-asiku
Bintoeng paleng mummumba
Kukana wari-waria
Kutuju mata
Kupare' pannyaleori

Bulan bersinar engkau
Kau terangi rumahku
Agar tampak
Wujud kemiskinanku
Bintang rupanya yang muncul
Kusangka sang Kejora
Kutatap
Kujadikan pelipur lara¹

Dalam sejarah Indonesia yang kita kenal sekarang persepsi tentang kebaharian kita atau dunia maritim kita lebih samar-samar lagi karena amat terbatasnya dinamika sejarah kelautan, dikisahkan dalam tulisan-tulisan Sejarah Indonesia dibanding dengan begitu banyak kisah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi didaratan.

¹ Mukhlis PaEni, Memahami Kebudayaan Maritim, makalah Universitas Hasanuddin 1980

A.B. Lopian dalam kajian sejarah Maritim mengemukakan bahwa yang menggerakkan dinamika kemaritiman nusantara secara garis besar terbagi dalam tiga tipe ideal yang merupakan unsur utama kekuatan Bahari, Orang Laut, Bajak Laut dan Raja Laut.

Orang Laut:

Dalam arti yang lebih khusus sebenarnya orang laut dapat di kelompokkan sebagai pendukung dari Little Tradition karena secara khusus orang laut dapat di kenal melalui sifat lokalnya yang sangat menonjol demikian juga jangkauan jelajahnya yang sangat terbatas hanya pada perairan sekitarnya. Hal yang sama dapat juga dilihat karakteristiknya pada masyarakat pesisir secara keseluruhan (costal society) dalam bahasa makassar di sebut Tu 'pabiring artinya tu, to :orang, pa' biring, tepi pantai atau pesisir. Kelompok masyarakat tu pabiring, melangsungkan hidup dan mencari rezeki pada sektor yang berhubungan dengan laut. Karena itu pendukung Little Tradition ke baharian ini dibagi atas dua kelompok (bahasa makassar di sebut Tupabiring, yang mendiami pesisir pantai dan Tu' rijene, tu, to : orang, jene : air, masyarakat pengembara laut yang hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dari perairan ke perairan dari teluk ke teluk. Turijene secara umum di kenal dengan nama orang bajou, atau bajou di kenal juga dengan nama orang laut, pa' lau samal, atau sama. Dalam pandangan kosmologi Bajou dipercaya bahwa dunia ini dihuni oleh dua macam jenis manusia orang sama dan orang bagai disebut orang sama karena jenis manusia ini mendiami alam yang sama laut, mereka hidup diatas sarana yang sama, perahu. Cara hidup tradisi, nilai-nilai yang sama. Sedang disebut orang Bagai karena orang yang hidup didarat telah berbagai-bagai antara satu dengan lainnya. Dengan memperhatikan kosmologi ini orang pesisir yang dikategorikan dengan nama masyarakat Tu' pabiring (bahasa makassar) dapat digolongkan sebagai orang bagi karena sekalipun ia mencari makan dilaut ia tetap tinggal didarat dimana sebahagian aktifitasnya berlangsung di dua tempat. Kelompok masyarakat Tu' pabiring atau orang bagi banyak ditemukan di sepanjang kawasan pesisir Indonesia yang kehidupannya relatif hampir sama di semua kawasan. Di Bagan siapi-api, di perairan cilacap di pantai Barat Sulawesi, di Buton, di Riau, di Kalimantan Barat,

dan dimana-mana. Sementara orang sama yang kian hari kehilangan tempat untuk hidup secara khas, mulai memiliki hidup permanen di satu kawasan tertentu dan hanya sebagian kecil yang bermukim di daerah terpencil dimuara-muara sungai dipulau-pulau kecil yang berbeting karang hingga mereka menjadi “ masyarakat terasing “ kedua kelompok ini terakhir menjadi sasaran perampok-perampok laut, yang akhir-akhir ini merajalela di laut.

Bajak Laut :

Kekuatan bahari tipe Bajak Laut didukung oleh masyarakat yang telah mengenal struktur yang lebih maju dengan pimpinan yang lebih berwibawa. Sekalipun Bajak Laut diakui sebagai sebuah kekuatan dalam dunia kemaritiman tapi dengan Status/predikat sebagai bajak Laut, kelompok ini pada dasarnya adalah outlaw yang berada di luar sistem hukum yang berlaku. Dengan kata lain mereka merupakan penjahat dan perompak yang beroperasi di laut. Dilihat dari sudut pandangan netral, kekuatan Bajak Laut adalah kekuatan tandingan bagi Raja Laut, hal mana lebih-lebih dirasakan bila terjadi vakum kekuasaan di suatu wilayah perairan tertentu. Jika kekuatan Raja Laut merosot, maka peranannya diambil alih oleh Bajak Laut. Masyarakat di perairan bersangkutan cenderung untuk mengalihkan hubungan ketergantungannya dari Raja Laut kepada kekuatan tandingan ini demi security diri sendiri. Apabila kemerosotan di pihak Raja Laut terus berlangsung, ada kemungkinan bahwa Bajak Laut menjadi kekuatan unggul dan menggantikan peranan Raja Laut di sini. Dalam hal demikian Bajak Laut telah menjadi Raja Laut.

Dalam hubungan ini dapat dikatakan bahwa tipe Bajak Laut berada pada tingkat antara Orang Laut dan Raja Laut. Struktur kekuatannya lebih maju dan lebih besar daripada Orang Laut, akan tetapi masih berada di bawah tingkat Raja Laut yang struktur kepemimpinannya sudah lebih mapan dan didukung kosmogoni kebudayaan bersangkutan. Namun demikian proses perkembangan tidak harus mengikuti tahap-tahap dari Orang Laut, Bajak Laut, ke Raja Laut. Berbagai faktor sejarah dapat mengubah haluan perkembangan ini.

Berdasarkan studi tentang bajak laut di perairan Nusantara dan Asia tenggara maupun di daerah luar - terutama tentang

Laut Tengah yang mencakup jangka waktu yang lama sekali (dalam hal Laut tengah sejak zaman Yunani dan Romawi) Prof. AB Lopian mencoba menyoroti perihal bajak laut di Laut Sulawesi mendukung pendapat-pendapat sebelumnya.

Dengan demikian dapat dibuat beberapa generalisasi mengenai fenomena bajak laut. Pertama, bahwa istilah pirata (Spanyol, Portugis, Italia) umumnya diterjemahkan dengan “bajak laut” adalah suatu pengertian yang muncul di kalangan masyarakat yang mengakui pemerintahan yang sah. Pemerintahan ini menganggap piracy sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum, bahkan menurut hukum antarbangsa dianggap sebagai pelanggaran terhadap seluruh umat manusia, Kedua, bahwa antara pirata dan korsario (privateer) sulit untuk dibuat pembedaan yang tegas. Di perairan Nusantara istilah “bajak laut” mencakup kedua bentuk ini. Kebudayaan Barat dengan sangat tegas membedakan istilah Pirata dan Carsario. Carsario melakukan tindakan kekerasan di laut tapi tindakannya itu memperoleh autorisasi dari satu kekuasaan Negara atau Pemerintah tertentu. Ketiga, bahwa di kalangan tipe Bajak Laut dapat dibuat hirarki : ada bajak laut yang berkaliber besar yang membawahi gerombolan-gerombolan yang beroperasi secara lokal. Bentuk kerjasama demikian tercermin pada hubungan antara Orang Laut dan Bajak Laut. Yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut adalah pertanyaan apakah kelompok Orang Laut yang tersebar di Nusantara merupakan sisa-sisa pemukiman dalam jaringan operasi Bajak Laut pada abad XIX atau sebaliknya, Bajak Laut telah memanfaatkan kehadiran Orang Laut setempat untuk mendirikan pangkalan di seberang lautan. Yang jelas adalah bahwa lokasi pemukiman Orang Laut dewasa ini sedikit banyak ditemukan pada tempat-tempat yang pada abad XIX merupakan pangkalan Bajak Laut.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam berbagai studi-studi bahwa ada yang menilai bajak laut di Nusantara sebagai penjahat penilaian ini perlu dikoreksi. Ada yang menganut “teori kemerosotan” di mana gejala bajak laut hendaknya dilihat sebagai proses desintegrasi suatu kerajaan, sedangkan ada yang menunjuk kepada dinamika ekonomi pada waktu itu yang mengandalkan tenaga budak di sektor produksi dalam rangka memajukan kemakmuran kerajaan. Di samping itu ada pula yang menghubungkan fenomena ini dalam rangka “perang Moro”

yang berlangsung sejak abad XVI di perairan Filipina Selatan.

Dalam hubungan ini historiografi tentang “Bajak Laut Moro” mempunyai parallel dengan penilaian masyarakat Eropa Barat (Kristen) terhadap apa yang mereka sebut “Korsario Barbar” di Laut Tengah yang berasal dari pantai Afrika Utara. Apa yang dikatakan oleh Braudel mengenai penulisan sejarah tentang “Korsario Muslim” di Laut tengah dapat diterapkan pula dalam hal “Korsario Moro” di Asia Tenggara.

Dalil Braudel yang menghubungkan kegiatan bajak laut di Laut Tengah dengan konyungtur pada masa tertentu adalah sangat menarik untuk dihubungkan dengan fenomena yang serupa di Asia Tenggara. Peningkatan kegiatan bajak laut berkorelasi dengan keadaan kemakmuran di perairan bersangkutan. Makin banyak volume yang diperdagangkan, makin meningkat pula aktivitas perompakan. Jika keadaan perdagangan sedang lesu, maka barang dagangan yang potensial dirampas akan berkurang sehingga dorongan untuk mengadakan ekspedisi bajak laut akan berkurang pula. Ekspedisi lintas laut, legal atau pun tidak, memerlukan investasi yang tidak sedikit. Jadi kelompok yang mempersiapkan dan memperlengkapi ekspedisi demikian senantiasa mengharapkan hasil yang memuaskan. Oleh sebab itu di masa konyungtur sedang menurun tidak bisa diharapkan ekspedisi akan berhasil baik.

Teori ini kiranya dapat memberi jawaban kegiatan bajak laut di Asia Tenggara yang begitu meningkat pada akhir abad XVIII dan awal abad XIX dapat dihubungkan dengan bertambahnya perdagangan di kawasan ini. Itulah sebabnya mengapa negara Eropa Barat mulai tertarik ke daerah ini yang sebelumnya hanya dikunjungi kapal Spanyol dan Belanda (Pelayaran Portugis sejak akhir abad XVI sudah sangat berkurang). Begitu pula pada masa ketika perairan di bagian timur Indonesia mulai ramai dikunjungi kapal VOC pada abad XVII. Kegiatan bajak laut menunjukkan grafik yang tinggi seiring dengan adanya peningkatan pelayaran dan perdagangan di kawasan timur.

Jadi pendapat Braudel bahwa peningkatan kegiatan bajak laut berkaitan erat dengan naiknya konyungtur setempat telah teruji dalam konteks sejarah Asia Tenggara. Yang masih perlu dipelajari ialah persoalan apakah setiap kali terjadi konyungtur tinggi selalu disertai kegiatan bajak laut. Sejarah ekonomi Asia

Tenggara (berbeda dengan Asia Selatan dan Asia Timur) masih berada pada tahap awal² sehingga masih perlu diteliti tahap-tahap sejarah yang menunjukkan konyunktur tinggi di Asia tenggara Baru sesudah tahap-tahap ini diidentifikasi maka dapat diselidiki apakah betul terjadi peningkatan kegiatan bajak laut pada tahap itu.

Kolerasi antara kegiatan bajak laut dan perdagangan merupakan dua hal yang erat hubungannya karena perompakan laut itu sendiri adalah sebagai bentuk awal dari perdagangan. Kebutuhan akan perdagangan yang semula berupa tukar-menukar barang timbul karena adanya kekurangan suatu barang tertentu di suatu tempat, sedangkan tempat lain mempunyai surplus barang bersangkutan. Sering barang dagangan ini harus diangkut melintasi laut dan pada kesempatan ini bajak laut memperoleh barang tersebut secara paksa. Hal demikian terjadi di mana saja, malahan dapat ditelusuri sampai jauh ke masa lampau. Sejak ada berita mengenai perdagangan lintas laut, sejak itu pula muncul berita mengenai kegiatan bajak laut.

Namun kegiatan bajak laut dilanjutkan pada masa kemudian, juga ketika perdagangan telah berada pada tingkat maju. Untuk melindungi perdagangan lintas laut maka kekuatan-kekuatan bahari di masa lampau sengaja memberi perlindungan kepada kapal-kapal niaganya dengan menyelenggarakan pelayaran berkonvoi. Sementara itu perlu diingat bahwa untuk bisa menjual barang hasil rampasan, bajaklaut (yang bergerak di luar sistem hukum) harus memperdagangkannya di pasaran umum. Dengan kata lain, ia harus bekerjasama dengan dunia perdagangan yang legal.

Patut disebut pula pendapat yang melihat kegiatan bajak laut sebagai salah satu bentuk perang - semacam gerilya bahari. Di sini tipe Bajak Laut adalah korsario atau privateer yang sesungguhnya merupakan bentuk perantara dengan Raja Laut. Jika dilihat dari sudut pandangan demikian maka ekspedisi lintas laut yang ditujukan untuk menangkap orang dijadikan budak pada abad XIX dan masa sebelumnya merupakan suatu cara

² Thee Kian Wie dan Anne Booth, "Direction for further research", dalam Anne Booth dan William O

Malley (penyunting), *Indonesian economic history during the Dutch colonial period*, Yale Southeast Asia Monograph Series, 1986

“wajar” untuk memperoleh tenaga budak. Menurut norma tradisional pada waktu itu, tawanan perang umumnya dijadikan budak. Di samping itu tawanan perang dimanfaatkan pula untuk dipertukarkan dengan orang sendiri yang menjadi tawanan musuh, atau untuk dijadikan objek tembusan bagi pihak lawan. Dengan demikian usaha penangkapan orang sebagai “tawanan perang” menjadi suatu kegiatan yang bisa mendatangkan keuntungan ekonomis, sebagaimana terjadi pula di kawasan Laut tengah di masa lampau³. Kegiatan korsario demikian memperkabur perbedaan antara bajak Laut dengan Raja Laut.

Raja Laut :

Tipe Raja Laut mewakili kekuatan bahari yang sah, yakni yang diakui dalam pergaulan antarbangsa. Dalam realitas abad XIX dan sebelumnya keabsahan demikian lebih banyak ditentukan oleh kekuatan fisik, jadi dalam hal kekuatan laut berarti pemilikan armada tempur dan pertahanan yang memadai.

Dengan demikian kekuatan laut Eropa Barat yang pada abad XVI (Portugis dan Spanyol) dan abad XVII (VOC) bagi Raja Laut pribumi di perairan Asia Tenggara masih dianggap sebagai korsario (suatu bentuk Bajak Laut), makin lama makin tumbuh menjadi Raja Laut yang mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan bahari setempat.

Di antara kekuatan laut yang muncul di wilayah Laut Sulawesi hanya kerajaan Sulu dan Maguindanao yang berhasil menjadi kekuatan maritim yang besar. Tetapi sejak pertengahan abad XIX Maguindanao terpecah belah dan mulai di kuasai Spanyol sehingga akhirnya hanya Sulu yang dapat bertahan sebagai Raja Laut pribumi di kawasan ini. Raja-raja di pantai timur Kalimantan dan di bagian utara Sulawesi tidak berhasil mengembangkan suatu armada yang besar. Begitu pula di kepulauan Sangihe-Talaud, walaupun penduduknya berkebudayaan maritim, fragmentasi dalam satuan-satuan kecil tidak bisa menampilkan suatu kekuatan laut yang berjangkauan regional. Dalam hal ini Raja Laut harus bekerjasama dengan Orang Laut untuk membina kekuatan bahari yang berarti.

³ Tentang usaha penebusan pelaut Belanda di laut Tengah pada abad XVII dan XVIII, lihat karangan C.J. den Ridder, 1986, h. 3-22

Umumnya kerajaan-kerajaan ini mempunyai penduduk yang terbatas jumlahnya, sehingga tidak sanggup membentuk kekuatan laut yang besar⁴. Kekurangan penduduk di kepulauan Sulu dan lembah sungai Pulangi di Mindanao Selatan dapat diatasi dengan mengadakan ekspedisi lintas laut yang mendatangkan ratusan, malahan ribuan budak sebagai sumber tenaga kerja. Dengan kata lain, Raja Laut bekerjasama dengan Bajak Laut untuk menjamin adanya suplai tenaga kerja yang tetap.

Tenaga budak yang diambil dengan kekerasan dari segala penjuru Nusantara dan kepulauan Filipina berasal dari berbagai macam sukubangsa yang kemudian berbaur dengan penduduk setempat. Ekspedisi lintas laut dengan demikian dapat dilihat sebagai suatu faktor integratif yang menghimpun pelbagai sukubangsa dan membentuk masyarakat yang baru. Masyarakat Orang Laut bersifat homogen yang pada dasarnya terdiri dari anggota yang satu dengan lainnya mempunyai ikatan primordial, sedangkan tipe Raja Laut merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai sukubangsa. Masyarakat Raja Laut umumnya mengenal pelapisan sosial yang sering pula ditentukan oleh asal sukubangsanya. Misalnya dalam hal Sulu, sukubangsa Tausung menduduki lapisan tertinggi, sedangkan orang Bajau berada pada tingkat bawah dari golongan rakyat yang merdeka. Para budak menempati lapisan yang terbawah.

Masyarakat Bajak Laut pun terdiri atas berbagai jenis sukubangsa. Di sini masyarakat tidak terikat oleh tradisi dan hukum adat yang ketat, sehingga cenderung terlaksana proses pembauran yang lebih cepat. Dalam hal Balangingi malahan telah tumbuh identitas baru yang menyebut dirinya "Orang Balangingi". Ada gejala-gejala bahwa Balangingi makin lama makin bertumbuh menjadi kekuatan tandingan bagi Sulu, dan dalam hal ini ada kemungkinan bahwa Bajak Laut bisa beralih ke tingkat Raja Laut. Namun proses perkembangannya dihentikan sebagai akibat serangan Raja Laut asing.

⁴ Di antara unsur kekuatan laut ("elements of sea power") jumlah penduduk suatu negara maritim (unsur ke-4) sangat menentukan dalam perkembangannya sebagai kekuatan.

Selain itu terjadi pula persainan antara Raja Laut asing dan pribumi tipe terakhir dilihat oleh kekuatan asing sebagai tandingannya. Maka kekuatan asing (Barat) ini telah membuat perumusan sedemikian rupa sehingga Raja Laut pribumi bisa dianggap sebagai Bajak Laut. Dalam proses kemerosotan ada kekuatan pribumi yang memang jatuh ke status Bajak Laut, sedangkan mereka yang mau mengakui kekuasaan asing dapat meneruskan eksistensinya, meskipun gelar Raja laut yang disandangnya kini hanya mempunyai makna seremonial saja. Dalam hal Johor, Raja Laut menanggalkan identitasnya sebagai kekuatan bahari dan merubah orientasinya ke darat. Hal yang sama terjadi juga atas Gowa setelah kekalahannya tahun 1667.

Dengan beralihnya penguasaan laut dari tangan raja-raja pribumi kepada kekuatan asing, maka keadaan politik dan ekonomi kini ditentukan oleh keputusan-keputusan yang diambil oleh kekuatan asing ini. Di kawasan Laut Sulawesi yang memegang peranan utama pada waktu itu adalah Spanyol, Belanda, dan Inggris. Dengan demikian perkembangan politik dan ekonomi kawasan ini sebagian besar dikendalikan oleh pemerintah pusat masing-masing di Madrid, Den Haag, dan London. Di samping itu ada kekuatan Eropa lain terlibat sebagaimana akan diketengahkan di bawah. Apabila pada masa awal keadaan politik diwarnai oleh persaingan antara kekuatan Eropa tersebut, menjelang akhir abad XIX telah timbul kesadaran antara mereka untuk bekerjasama dan membagi-bagi kawasan ini dalam wilayah masing-masing. Jelas bahwa dalam perkembangan ini kekuatan pribumi setempat tidak lagi mengambil bagian. Walaupun intern mereka masih relatif berkuasa, politik sesungguhnya ditentukan oleh negara kolonial itu. Bagian ini akan menyoroti proses pembagian wilayah di antara kekuatan-kekuatan kolonial ini.

Spanyol. Telah diuraikan di atas bahwa Spanyol khususnya pemerintah kolonial yang berkedudukan di Manila, sejak abad XVI berusaha menaklukkan kerajaan-kerajaan Moro di sebelah selatan. Ketahanan Moro telah membuktikan bahwa politik ekspansi Spanyol dapat digagalkan, meskipun Spanyol telah mendirikan sebuah pangkalan di Zamboanga yang terletak di tengah-tengah wilayah Sulu dan Maguindanao. Kelemahan Spanyol terutama adalah faktor keuangan. Selama kurang lebih 250 tahun pemerintah di Manila hanya bisa bertahan karena

adanya situado Filipina, semacam subsidi berupa uang perak yang setiap tahun diterima dari Meksiko. Dengan anggaran yang selalu defisit dan mengharapkan subsidi dari Meksiko, maka usaha-usaha militer Spanyol di perairan selatan tidak memberi hasil yang memuaskan baginya, tambahan lagi karena harus menghadapi perlawanan yang berat dari pihak Moro⁵

Keadaan ini berubah pada abad XIX. Ketergantungan kepada Meksiko dihentikan (secara resmi pada tahun 1804) dan pada tahun 1815 kapal terakhir dari Manila Galleon yang selama 2½ abad bolak balik melintasi Pasifik setiap tahun, kembali dari Acapulco ke Manila. Kepulauan Filipina mulai mandiri secara ekonomis, mula-mula dengan membuka perkebunan tembakau dan kemudian disusul dengan tanaman komersial lainnya (tebu, abaca, dsb). Sebelumnya monopoli Manila Galleon telah ditembus ketika pemerintah Spanyol membuka hubungan langsung antara Eropa dengan Filipina melalui pelayaran Tanjung Harapan (Afrika Selatan) yang dahulu harus melalui Amerika Latin.

Pada pertengahan abad XIX Spanyol melancarkan kembali ofensif terhadap daerah Moro di selatan. Sebenarnya sampai waktu itu Spanyol telah menerima status quo dan menjalin hubungan persahabatan dan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan Moro, misalnya perjanjian dengan Sulu tanggal 23 September 1836 dan dengan Maguindanao tanggal 22 Mei 1837. Datu Dakula, penguasa utama di daerah Sibugay (Teluk Illana) menjadi sekutu Spanyol pada tahun 1843 dan menyerahkan daerah bagian barat Zamboanga. Sesudah datu wafat Spanyol berusaha untuk mendapat pengesahan tentang penyerahan wilayah ini dari pihak Sultan Maguindanao, hal mana terjadi melalui suatu perjanjian dengan Sultan Iskandar Qudratullah pada tahun 1845. Di antara ketentuan penting dalam perjanjian ini Sultan mengizinkan kepada Spanyol untuk membuka kantor dagang di Cotabato, tetapi lebih daripada itu, Sultan juga menerima perlindungan di bawah naungan kekuatan Spanyol.

Belanda. Pada abad XIX Belanda pun mengadakan ekspedisi berskala besar untuk menegakkan kekuasaannya di

⁵ Lihat Leslie E. Bauzon, *Deficit Coverment: Mexico and the Philippine Situado 1606-1804*. Tokyo, The Centre for East Asian Cultural Studies, East Asian Cultural Studies Series No. 21, 1981.

kepulauan Indonesia. Namun ekspedisi demikian lebih banyak ditujukan ke daerah di luar wilayah Laut Sulawesi. Sebagai mana dikemukakan di atas, fragmentasi di kawasan ini sudah sedemikian rupa sehingga Belanda tidak memerlukan lagi kekuatan besar-besaran untuk menumpas perlawanan yang timbul.

Kalau Spanyol mempunyai Zamboanga sebagai pangkalannya di Filipina Selatan, Belanda mempunyai Fort Amsterdam di kota Manado yang menjadi pusat kekuasaannya di sebelah utara. Perhatian lebih banyak ditujukan ke Manado dan sekitarnya, khususnya Minahasa, tempat penanaman kopi yang memberi keuntungan yang memuaskan baginya. Bagian lain di Sulawesi Utara dikuasai secara tak langsung. Hasil pertambangan dan pendulangan emas dari daerah ini tidak memberi keuntungan yang diharapkan, sehingga upeti emas kemudian diganti dengan pemungutan pajak yang dibebankan kepada setiap kerajaan secara keseluruhan.

Politik pemerintah kolonial terbagi dua : sekelompok menganut paham liberalisme yang menghendaki agar wilayah jajahannya dibuka secara bebas kepada setiap pengusaha (swasta Eropa) yang mampu mengeksploitasi kekayaan alam di Indonesia; di pihak lain ada kelompok yang cenderung meneruskan monopoli eksploitasi seperti yang sebelumnya dijalankan VOC. Abad XIX diwarnai oleh perdebatan antara dua aliran politik ini yang baru dimenangkan oleh kelompok pertama menjelang akhir abad XIX. Dalam hal politik ekspansi, pemerintah Hindia-Belanda terbagi dua pula. Ada kelompok yang menginginkan perluasan wilayah, terutama untuk memperluas lahan potensial untuk eksploitasi ekonomi. Paham ini sebageian besar didukung oleh pejabat kolonial setempat yang harus berhadapan dengan pemerintah pribumi yang intern masih berkuasa penuh meskipun telah mengakui kekuasaan Belanda dan berada di bawah perlindungan bendera Belanda. Sebaliknya ada kelompok yang beranggapan bahwa wilayah yang diperintah secara langsung sudah cukup luas dan setiap ekspansi akan membawa beban baru kepada kas negeri. Dalam hubungan ini dapat dimengerti mengapa rencana untuk memasukkan Gorontalo bersama seluruh Lima Pahala ke dalam wilayah yang diperintah langsung, mula-mula ditolak karena politik penghematan, sehingga baru dilaksanakan seperempat abad kemudian (1889).

Sifat Belanda yang hemat malahan seorang pejabat lebih cenderung mengatakan “kikir”⁶ sering memainkan peranan dalam politik kolonialnya. Namun demikian sering pula kekuatan luar mendesak Belanda untuk merobah sekap dan mengambil tindakan yang ekspansif.

Sejak akhir abad XVII telah ada kesepakatan antara Belanda dan Spanyol untuk membagi kawasan Laut Sulawesi dalam wilayah pengaruh masing-masing. Meskipun penguasaan sebenarnya tidak dilaksanakan, kedua negara ini menerima kenyataan bahwa bagian utara (juga yang menyangkut kalimantan) masuk wilayah Spanyol, sedangkan bagian selatan adalah wilayah Belanda. Perbatasan tidak diperinci secara tegas, melainkan didasarkan atas perbatasan antara kerajaan Sulu dan Berau di sebelah barat, dan antara Maguindanao dan kerajaan-kerajaan Sangihe (Kendahe dan Tabukan) di sebelah timur. Baru dengan masuknya Inggris di kawasan ini maka masalah batas-batas wilayah dipersoalkan kembali.

Inggris. Abad XX merupakan masa jaya bagi Inggris yang muncul sebagai kekuatan maritim yang terbesar. Kekalahan Prancis dalam Perang Napoleon menjadikan Inggris lebih mapan lagi dalam penguasaan laut, terutama penguasaan alur-alur pelayaran dan perdagangan. Kehadirannya di Asia tenggara hendaknya melihat dalam hubungan penguasaan pelayaran dan perdagangan antara sub-kontinen India dan negeri Cina khususnya, atau antara Inggris dan Asia Timur pada umumnya. Sepanjang jalur ini didirikan pangkalan penting, seperti di Afrika Selatan, Mauritius, Ceylon Sri Lanka), dan Penang, ditambah dengan pangkalan yang telah ada di Madras, Kalkuta dan Bombay. Dengan terbentuknya pelayaran melalui Terusan Sues, maka Aden dan pangkalan yang telah ada di Laut Tengah (Gibraltar, Malta, dsb.) Menjadi mata rantai yang penting dalam jalur pelayaran dan pertahanan bagi imperium Inggris.

Sebelum abad ini posisi Inggris di Asia Tenggara hanya terbatas di Bengkulu dan Penang. Di masa Perang Napoleon Inggris telah menduduki beberapa tempat di Asia Tenggara, khususnya di Jawa dengan ibukota Batavia yang direbut dari tangan Belanda, akan tetapi sesuai dengan ketetapan Kongres

⁶ J. Heyting, 1886, dimuat dalam B.J. Haga, Lima Pahala..., 1981, h. 47.

Wina (1815) wilayah ini harus diserahkan kembali. Untuk mengimbangi kedudukan Belanda di sini, maka atas usaha Raffles dicari pangkalan yang cocok sehingga akhirnya didirikan kota Singapura (1819). Dari kota ini Inggris mengadakan kegiatan di kawasan Asia tenggara pada abad XIX.

Selain Spanyol, Belanda dan Inggris muncul kemudian Prancis yang melakukan perjanjian dengan Sulu Tahun 1843, Itali yang mulai mempelajari kemungkinan untuk memperoleh daerah di seberang laut, kemudian Austria tahun 1868 mengirim ekspedisi ke Asia Timur, Jerman mulai memasuki perairan Asia Tenggara 1870-an yang kemudian Amerika yang menduduki Sulu tahun 1899.

Keunggulan Raja Laut asing dibanding dengan Raja Laut Pribumi terletak pada penguasaan teknologi maju yang berhubungan dengan Tradisi Besar Dunia kebaharian yang muthahir, seperti senjata api, teknologi metalurgi, kemajuan dalam bidang mesin yang kemudian melahirkan kapal api berbadan besi, bahan peledak dll. Penguasaan monopoli teknologi maju ini menjadikan mereka Adi-Raja Laut sulit ditandingi oleh pribumi. Dalam abad XIX peranan Raja Laut terutama dipegang oleh tiga penguasa, masing-masing Inggris, Belanda dan Spanyol. Mereka kemudian membagi kawasan ini dalam tiga bagian.

Batas-batas wilayah kekuasaan Adi Daya Laut tersebut menjadi batas teritorial daerah jajahan mereka di kawasan ini. Spanyol/Amerika, Belanda dan Inggris, daerah tersebut kini menjadi batas Negara Filipina, Indonesia dan malaysia.⁷

Budaya Maritim dan Otonomi Daerah

Memasuki abad ke 17 hingga abad ke 18 satu masa yang amat tragis dalam perjalanan sejarah Indonesia karena masa yang berlangsung $\pm$ satu abad itu yang ditandai dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan Maritim Nusantara. Kurun waktu tersebut adalah masa kelam dari Era ke Baharian kita. Satu Persatu Raja-raja Laut kehilangan kekuasaannya dan era itu dapat dianggap sebagai akhir kejayaan ke Maritiman Nusantara. Ketika itulah

⁷ Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut sejarah Kawasan laut Sulawesi abad XIX dirangkum dari Disertasi A.B. Lopian, Mukhlis PaEni, Peluncuran buku persembahan untuk 72 tahun Prof A. B. Lopian, 2001.

VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) sebuah organisasi dagang Belanda yang sebenarnya tidak lebih dari suatu Gerombolan Bajak Laut yang terorganisir, mengambil alih aktifitas kemaritiman Nusantara setelah menghancurkan Kerajaan-Kerajaan Maritim yang dianggap saingannya⁸ VOC kemudian mengeluarkan bermacam-macam aturan yang mengharuskan Raja-raja Laut taklukannya agar mengkosongkan kawasan pesisir 10 Mil Laut dari Pantai. Dengan demikian, perkampungan pesisir yang selama ini dihuni masyarakat Tu'pabiring harus dipindahkan jauh dari laut. Sementara Tu'rijene, orang Bajau atau orang Sama yang hidup diperkampungan diatas air laut secara langsung menjadi rakyat Compagnie.

Raja-raja Laut diminta menyuruh rakyatnya meninggalkan kegiatan Laut dan menjadi petani. Mereka diminta agar menanam kacang-kacangan dan padi sementara itu Ukuran/Tonase Perahu (Penisi, Pa'dewakang, lambo), yang sebelumnya 150 sampai dengan 350 Ton harus dikurangi tidak boleh lebih dari 50 ton, kemudian diperciut lagi menjadi 30 ton dan terakhir tidak boleh lebih 10 ton, selain itu setiap perahu/orang yang akan berpergian melalui Laut harus seizin Compagnie (VOC). Kekuasaan Raja-raja Laut dialihkan ke satu tahanan penguasaan wilayah/daerah berorientasi ke darat. Tradisi agraris mulai diperkenalkan dalam rangka pembentukan tatanan masyarakat petani. Bagi VOC rekayasa sosial ini penting untuk memacu pertumbuhan hasil pertanian/bahan pangan dan hasil hutan, hingga mekanisme perdagangan hanya akan diselenggarakan secara monopoli oleh VOC selaku penguasa maritim satu-satunya. Penciptaan Masyarakat Agraris ini berlangsung hingga ke runtuhnya VOC 31 Desember 1799⁹. Lebih satu abad setelah itu Pemerintah Belanda setelah diselingi kekuasaan Inggris (1811-1816), 1907 mulai secara utuh menancapkan kuku kekuasaannya di Indonesia. Seiring dengan itu Pemerintah Hindia Belanda segera akan menerapkan Undang-Undang Otonomi Daerah dengan memberi hak dan kewenangan bagi daerah untuk mengurus

⁸ Kerajaan Makassar Gowa dikalahkan 1667 (Perjanjian Bongaya) dan 1669 melalui perang laut yang besar di tutup dengan pembaruan perjanjian yang melumpuhkan kegiatan Kemaritiman Gowa secara total, lihat Mattulada, 1991, Mukhlis, 2002.

⁹ Lihat, Edward L. Paelinggong, 2002.

rumah tangga sendiri. Bagi daerah yang diakui sebagai daerah otonom (Indirect Bestuur Gebied atau Inlandsche Zelfbestuur) yang otonominya berasal daerah itu sendiri, diberi kewenangan mengatur dirinya sesuai kepentingan rakyatnya, sedang daerah yang berstatus diperintah langsung oleh Pemerintah Hindia Belanda (Direct Bestuur Gebied) kewenangannya diatur oleh Pemerintah Pusat¹⁰. Sampai tahun 1938 Format Otonomi bagi kedua bentuk daerah dibawah Pemerintahan Hindia Belanda ini gagal diwujudkan, salah satu faktor yang menjadi kendalanya adalah masalah kebudayaan. Penting diketahui bahwa otonomi, keterbukaan, dan desentralisasi adalah ciri dan karakteristik Masyarakat Maritim. Tradisi ini sudah mengalami methamorfose dan perubahan bentuk melalui rekayasa sosial selama masa VOC, yakni dengan lahirnya satu tatanan masyarakat agraris yang sangat sentralistik. Namun kemudian Kerajaan Belanda melalui Pemerintah Hindia Belanda menghadapi kegagalan dalam program Otonomi Daerah yang di undangkan tahun 1864, melalui De Indische Comptabiliteit wet yang kemudian diperkenalkan melalui undang-undang Desentralisasi 1903. Apa yang terjadi, undang-undang itu tidak jalan dengan baik, seperti apa yang diharapkan, karena masyarakat dan Rakyat Hindia Belanda yang sudah menjadi masyarakat agraris itu selama ini diatur oleh sistem kekuasaan yang sentralistik. Sementara sikap Otonomi adalah ciri Masyarakat Maritim.

Dimasa kekuasaan Jepang yang singkat itu karakteristik ini cukup disadari oleh pendudukan Jepang. Karena itu Jepang menempatkan Angkatan Darat di daerah yang memiliki tradisi agraris kuat di Jawa dan Sumatera (Indonesia Barat) dan menempatkan Angkatan Laut di kawasan yang memiliki Tradisi Maritim (Indonesia Timur).

Diawal Kemerdekaan Indonesia masalah ini masih terlihat dalam perdebatan tentang bentuk yang paling cocok untuk Indonesia antara Negara Kesatuan dan bentuk Federal (Federasi) bisa dilihat bahwa tokoh-tokoh yang mendukung bentuk Negara kesatuan yang sentralistik bertolak dari filosofis Negara Agraris dimana raja menjadi pusat kekuasaan, dan tokoh-tokoh yang mendukung Federasi tersosialisasi oleh

¹⁰ Otonomi Daerah di Hindia Belanda 1903-1940, ANRI, 1998.

Pandangan Budaya Maritim yang terbuka dimana keinginan rakyat menjadi penentu kebijakan. Perdebatan mengenai bagaimana sebaiknya bentuk negara ini, belum terjawab hingga tahun 1950, sampai akhirnya dukungan terhadap Format Negara Kesatuan yang setralistik menjadi dominan. Mereka yang berpandangan Federasi satu persatu tersingkir bahkan memperoleh pridikat yang kurang menyenangkan. Keterlibatan Dr. H.J van Mook sebagai pencetus pandangan Federasi itu, memperkuat asumsi bahwa taktik/pandangan Federasi adalah alasan yang dibuat-buat Belanda yang tidak menghendaki kemerdekaan Indonesia seutuhnya dan dianggap bahwa federasi adalah bahagian dari upaya memecah belah menambah berat beban sejarah pada tokoh-tokoh yang berpandangan Federasi, hingga akhirnya hal itu tidak diperdebatkan lagi. Andaikata bukan Dr. H.J van Mook yang mencetuskan ide federasi itu mungkin persolannya menjadi lain atau mungkin dapat dikatakan bahwa salah satu yang membuat faham Federasi itu dianggap "tidak" layak untuk di anut terutama di awal kemerdekaan ialah karena faham itu dicetuskan oleh H.J. Van Mook yang orang Belanda.

Diakhir tahun 50-an hingga awal tahun 60 an tuntutan otonomi dari berbagai daerah muncul lagi sebagai akibat ketidak puasan daerah pada pemerintah yang sentralistik. Pemberontakan terjadi dimana-mana, perpecahan diantara tokoh-tokoh nasional terjadi, hingga akhirnya lahir sistem pemerintahan dengan format demokrasi terpimpin yang sangat sentrlistik. Setelah melalui rentang waktu dan perjalanan sejarah yang panjang otonomi daerah yang senantiasa oleh pusat enggan diberikan kepada daerah, kini terjadi hal yang sebaliknya. Melalui UU No 22 Tahun 1999 pemerintah pusat memberi otonomi itu ke daerah dan masalah baru pun bermunculan. Penyakit lama kambuh kembali. Karena otonomi yang Desentralistik adalah karakteristik Budaya maritim, sementara yang diminta melaksanakannya tersosialisasi oleh pandangan agraris yang sentralistik. Terjadilah pertengkaratan Batas Laut antar kabupaten, sementara dalam Budaya Maritim Laut adalah kawasan semua orang.

Kita menjadi malu mendengar jawaban Raja Gowa Sultan Alauddin 1593-1639 ketika VOC memintanya agar melarang kapal-kapal dagang lain selain VOC untuk berlayar di perairan Makassar dan daerah-daerah kekuasaan kerajaan Makassar di Kawasan Timur. Alauddin menjawabnya:

Tuhan yang Maha Kuasa telah menciptakan bumi dan lautan. Bumi telah dibagi-bagikan diantara manusia begitu pun lautan telah diberikan secara umum, tidak pernah kami mendengar bahwa pelayaran dilaut di larang oleh seseorang. Jika Belanda melakukan larangan itu, maka itu berarti bahwa Belanda seolah-olah mengambil nasi dari mulut orang lain. Demikian pendirian kami¹¹

Kita menjadi lebih malu lagi melihat realitas dengan diberlakukannya UU 22 Tahun 1999 seorang Kepala Bidang Permuseuman di satu provinsi langsung diberhentikan kata lain dari di “usir” karena dua kesalahan besar yang menimpa dirinya Pertama jabatan di daerah pasca pemberlakuan UU 22 Tahun 1999 di prioritaskan pada putera daerah. Kedua SK yang dipegangnya selaku Kepala Museum dianggap kadaluarsa karena di tanda tangani oleh pejabat pusat. Sekalipun ia masih tetap bertahan di daerah tersebut dengan sebuah tugas yang baru, persoalan ini bukan hanya sampai disitu. Realitas ini menggambarkan betapa kecilnya perhatian kita terhadap orang yang mendarmakan dirinya di bidang Kebudayaan. Melihat realitas ini tampaknya kebutuhan yang amat mendesak sekarang adalah komunikasi terbuka antara pusat dan daerah menyangkut pembinaan Kebudayaan di daerah Pasca UU 22 Tahun 1999. Karena disatu pihak Daerah tidak mengalokasikan dananya dalam APBD dalam jumlah yang memadai bagi pembinaan Kebudayaan karena dianggap sebagai sektor yang tidak menguntungkan bagi penghasilan daerah. Sementara pusat enggan melemparkan program pembinaan ke daerah karena pembenaran administrasi tidak mendukungnya. Hal ini tidak boleh dibiarkan berlangsung terlalu lama. Sangat diharapkan Kongres Kebudayaan ke V ini dapat menjadi kesempatan yang baik bagi kedua pihak Pusat dan daerah untuk mencairkan kebekuan ini.

¹¹ Abd Razak dg Patunru, sejarah Gowa, YKBSS 1993.

DAFTAR PUSTAKA

AB. Lopian

- 1987 Orang Laut, Bajak Laut, dan Raja Laut. Disertasi Doktor, Universitas Gadjah Mada.

Abdul Razak Daeng Patunru

- 1993 Sejarah Gowa. YKSS,

Arsip Nasional RI

- 1998 Otonomi Daerah Di Hindia Belanda 1903-1940, ANRI.

Cabrera Agustin. A.

- 1969 The Badjaus: Cultural Identity and Education, Unitas, 42.

Edward Poelinggomang

- 2002 Makassar Abad Ke XIX, KPG. Gramedia, IKAPI, The Ford Foundation.

Harold Beyer Broch

- 2002 Jangan lupa An Experiment in Cross Culture Understanding, Gjovik Trykkeri. USA, Oslo, Norge.

Mattulada

- 1990 Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah. Hasanuddin University Press,.

Mukhlis, Ed.

- 1986 Dinamika Bugis Makassar. PT. Sinar Krida,.
1989 Persepsi Sejarah Kawasan Pantai, P3MP. Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

Sopher, David E.

- 1977 The Sea Nomads A study of The Maritime Boat People of Southeast Asia, Koon wah Lithographers. Singapore.

SANTRI, TRADISI LOKAL DAN KEBUDAYAAN

Oleh : KH. Maman Immanul Haq Faqieh

Dalam fase sejarah umat manusia, sesungguhnya apa yang telah *ditransformasikan* untuk menyatakan eksistensi serta *kobesivitas* dirinya di hadapan aktivitas makhluk-makhluk lain – juga Tuhan sebagai *mainstream*, tidak lain, akan menjadi “teks” kebudayaan. Sehingga tafsir dari kebudayaan dapat diartikan menjadi keseluruhan “ruang gerak” dalam aktivitas sosial yang ruas keberadaannya ditentukan oleh *kreativitas* manusia. Mungkin, karena itu juga Al-Qur’an menegaskan umat manusia sebagai *la qad khalaqna al-insani fi ahsani fi taqwim* (QS. 95:4). Agama – dalam konteks Islam, tetaplah menjadi kompilasi sistem nilai yang bersifat *holistik* dan *paradigmatik* dari wilayah berdasar penciptaan *al-khaliq*. Kebudayaan dan agama, pad akhirnya merupakan dua gagasan besar yang membuat *spesifikasi* dirinya masing-masing, yang memiliki proses transformasi sekaligus *resistensinya* sendiri di tengah publik serta gemuruh peradaban umat manusia.

Kebudayaan di satu sisi, mengemukakan sepenuhnya *dimanifestasikan* dan dikukuhkan dalam konteks psiko-sosial manusia. Namun sebaliknya, di satu sisi lain, agama – bahkan dalam konteks rumpun “bukan” agama semit (*samawiyah*) seperti; Tao, Budha, Hindu, Zheus, Shinto (untuk menyebut beberapa agama), telah meletakkan keseluruhan sistem nilai serta konstruksi ajaran-ajaran di dalamnya sebagai “wilayah Tuhan” yang diperuntukan manusia. Dalam skala *makrokosmis* maupun ruang *mikrokosmis* manusia, peran kognitif kebudayaan dan proses transformatif keagamaan – disadari atau tidak, melahirkan koherensi manusia menjadi “makhluk pencipta” sekaligus “makhluk penerima”. Dari perspektif inilah, menurut hemat penulis gagasan kebudayaan (yang datang dari manusia) dan ide-ide agama (yang diwahyukan Tuhan), tidak benar-benar menemukan titik-temu. Kebudayaan berada dan diperankan “sangat sosial” sedangkan posisi agama, tanpa eksplorasi lebih lanjut, diletakkan menjadi “sangat sakral”. Karen Armstrong dalam buku *The History of God: The 4000 – Year Quest of Judaism, Christianity and Islam* (1993) menegaskan psiko terapi kepada kita. Kita harus memutuskan, apakah kata Tuhan masih tetap

memiliki makna bagi kita pada masa sekarang ini.

Ironisnya, justru karena kita sendiri, para budayawan dan agamawan mendesain keduanya menjadi subsistem yang bisa saling menghidupkan saling merencanakan dirinya dalam teks maupun konteks sosialnya yang lebih luas.

Kebudayaan dibiarkan dan hanya ditafsirkan dalam *simplikasi* ke arah pemikiran seni menyesatkan. Bahwa di dalamnya, ia (kebudayaan), menampakkan pesonanya yang rumit sekalipun menjadi sebetulnya peneguhan di luar dirinya terhadap apa yang berbelit. Dan, agama dengan esensi nilai-nilai holistiknya telah menyusun semacam “pembebasan” manusia dalam *labirin* panjang kehidupan sosial yang meredam sejumlah *destruksi* di sekitar kita.

Keduanya, diperhadapkan untuk dibedakan: yang sosial dan yang sakral, yang politik – metafisik dan yang verbal – fisik. Dengan begitu jelas – mengutip kembali perspektif seorang mantan biarawati dan anggota Association of Muslim Social Sciences Karen Amstrong, bahkan kata Tuhan (Allah, Yahweh, al-Ilah, Ellohim dan sebagainya) sebagai perwujudan makna semiotik dari pusat nilai keseluruhan alam raya – karenanya, adakah masih cukup relevansi dalam kehidupan sosial hari ini? Karena, bukankah dalam teks-teks atau konteks agama apapun dari belahan benua manapun – yang dipertemukan agama dengan para pemeluknya, hanya dapat ditransformasikan kembali melalui format gagasan-gagasan kebudayaan para pemeluknya sendiri? Demikian seterusnya, adakah dengan tafsir seperti ini, fenomena agama dan budaya berhenti hanya pada konteks wacana?

Kabayan adalah contoh khas kearifan lokal Sunda, yang sering digambarkan sebagai sosok *pandir tapi cerdik*. Beberapa cerita yang mengambil sosok Kabayan sebagai tokohnya, banyak dijadikan ta'bir (contoh) oleh komunitas pesantren di tatar Sunda, dalam menyampaikan pesan dakwah. Kecenderungan tersebut, seharusnya menjadi sebuah pilihan menarik di tengah kebudayaan statis pesantren yang terjebak rutinitas yang beku serta ta'bir yang kaku. Padahal, pesantren sebagai sebuah lembaga alternatif dalam bidang pendidikan keagamaan (*tafaqqub fi ad-din*) dan pengembangan masyarakat yang menekankan asa *dakwah*, *ta'awwum*, *musyawarah*, *egalitarian*, *kesederhanaan* dan *kemandirian*, harus tetap

menunjukkan warna lokal dalam mencapai tujuan. Sehingga pesantren menyatu dengan masyarakatnya – penulis teringat sabda Nabi, “*khotib an-anas bi qodri aqulubim*, berdialoglah dengan masyarakat sesuai dengan kemampuannya”, serta mampu mengembangkan tradisi pesantren itu sendiri, baik tradisi pemikiran, keilmuan, berbahasa, berpakaian tanpa melukai hak-hak kultural masyarakat di mana pesantren itu berada.

Resistensi terhadap Ma’had Al-Zaitun di Gantar Indramayu, adalah salah satu contoh betapa keberadaannya yang tanpa silaurrahmi dan melibatkan masyarakat lokal akhirnya melukai “perasaan” masyarakat Indramayu. Pesantren – yang peran dan kedudukannya tidak terpisahkan dalam sejarah pertumbuhan masyarakat di Indonesia – bertujuan membentuk masyarakat *Rabbani* yang sesuai dengan tuntutan Islam serta bersifat *rahmatan el alamin*, membentuk manusia Indonesia yang berkualitas dalam segala bidang kehidupan, dan terlaksananya tujuan pembangunan demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran yang merata.

Tujuan yang luhur di atas, ternyata menghadapi kendala yang besar, dimana pesantren terjebak oleh *romantisme* kemapanan, menutup diri dari kritik-kritik atas tradisinya serta kegugupan mental dan intelektual dalam menghadapi kemajuan *transformasi* budaya. Semua itu, mengakibatkan pesantren kehilangan *vitalitas*, daya hidup dan daya saing di tengah masyarakat yang semakin maju, kritis dan penuh tantangan. Kegagalan pesantren dalam menyikapi problem kemanusiaan serta terabaikannya nilai *spiritualitas* dan nalar pembaruan dalam perubahan yang sangat cepat akan meruntuhkan citra pesantren dan mengurangi kekuatannya sebagai lembaga pendidikan keagamaan, pusat pengetahuan (*centre of excellence*), agen perubahan sosial dan pembangunan (*agent of social change and development*) serta “biang” budaya (*culture broker*).

Ini disebabkan pesantren melupakan jati dirinya sebagai “*penjaga tradisi*” dan “*pengayom*” masyarakat bawah (*grassroots society*), dan akhirnya hanya dijadikan alat legitimasi dan kendaraan bagi kepentingan tertentu. Seperti eksploitasi pesantren oleh para “*kuyaha*” (bentuk jamak dari “*kyai*”) yang terjun ke kancah politik dan wilayah kekuasaan dengan logika serta selera pribadi. Serta sepak tetrtjng para “*Guyasa*” (jamak

Gus) yang semakin berkuasa menghegemoni kehidupan pesantren serta mendominasi peran, kesempatan serta pandangan pesantren serta para santrinya yang tetap bergumul dengan rutinitas statis, kumuh dan terpisah dari realita. Begitu pula, berhentinya ikhtiar untuk mempertemukan gagasan dan ide-ide yang mempertemukan pemikiran yang emansipatorik dan eksploratif, baik bernuansa keagamaan maupun kebudayaan dalam satu momentum “budaya pesantren”, membuat pesantren kehilangan kemampuan dalam proses akulturasi dan asimilasi sendiri.

Yang itu terjadi – di pesantren-pesantren di tatar sunda – tempat dimana suku bangsa Sunda tinggal, yang dari tinjauan antropologi budaya adalah orang-orang yang turun menurut menggunakan bahasa ibu, yaitu Sunda – saat bahasa sunda dengan berbagai identitas dan nilainya, tidak lagi menjadi persenyawaan dalam sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai keagamaan di lingkungan ajaran Islam dari berbagai warna lokal serta praktek keagamaan rakyat (yang akhirnya memunculkan Arabisasi), indoktrinasi ‘ala Orde Baru dalam penggunaan bahasa Nasional (yang mematikan keragaman bahasa daerah), dan ketertarikan para kyai pada politik dari pada merawat dan berinteraksi dengan kebudayaan dan tradisi Sunda. Yang dari sudut kronologi sejarah, Sunda mempunyai hubungan panjang dengan Islam serta memuat nilai-nilai universalitas Islam yang kental seperti optimisme, terbuka (*inklusif*), halus dan mudah beradaptasi.

Beberapa karya Sunda, terlihat sangat kental nuansa ke-Islaman-nya, seperti wayang, wawacan dan cerita rakyat. Cerita wayang walaupun berasal dari epos Ramayana dan Mahabharata tetapi dipakai para misionaris Islam – terutama para Wali – untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Kata punakawan, misalnya, berasal dari “*Fanad*” dan “*Awan*” yang artinya teman yang tulus, pekeria yang tulus ikhlas. Begitu pula kata Dalang dari Dalla yang artinya penunjuk, seperti dalam hadits Nabi, “*Barang siapa yang menunjukkan (man dalla) kebaikan, maka ia mendapatkan pahala sebanding dengan pelaku kebaikan tersebut*”. Wawacan adalah bentuk cerita yang berbentuk puisi berisi kisah-kisah Islam, seperti wawacan Rengganis dan Purnama Alam. Semua itu tidak teralienasi dengan baik di pesantren, karena teks-klasik kitab-kitab kuning dikaji mentah-

mentah sebagai sesuatu yang “sakral”; bersifat “teosentrisme”, dan yang terasing dari realitas kemanusiaan.

Pesantren semakin eksklusif dikarenakan pemahamannya yang rendah akan analisa sosial problem sentral kemanusiaan, terabaikannya proses akulturisasi budaya serta tidak mengertian akan konsepsi pembacaan teks yang menekankan bahwa teks dipahami dari kekhususan sebab bukan keumuman lafadz (*al-ibroh bi khusus al-sabab la bi umum al-lafadz*). Hal itu, menjadi pesantren sulit merealisasikan ide atau wacana yang dipelajarinya dengan praksis perubahan pada masyarakat, sehingga signifikansi ajaran agama di pesantren – yang seharusnya – paralel dengan kabalitasnya dalam mencari solusi atas problem kemanusiaan, tidak terlaksana. Penulis melaksanakan itu, ketika “*mendekam*” di beberapa pesantren yang ada di wilayah Jawa Barat.

Di Baitul Arqom Ciparay Bandung, kebanggaan mengkaji bahasa Arab dan Inggris di nawdah al-lughah telah melaksanakan apra *Asatidz* dan para santri dari bahasa ibu serta akar budaya sendiri, yakni Sunda, tempat dimana para santri – yang berasal dari wilayah Sunda – akan melakukan kegiatan dakwah. Begitu pula ketika *pasaran* kitab alfiyah di Bantar Gedang, walaupun memakai bahasa Sunda, tapi *ta'bir* tetap memakai setting dan struktur Arab yang terpisah dari realitas empirik para santrinya yang nota bene berasal dari pedalaman dan pesisir laut. Sikap sebagian besar pesantren menolak seni tradisi Sunda seperti pantun, berbeluk, ngawih dengan perangkat instrumentalnya seperti suling, kecapi dan gamelan, semakin mengidentifikasikan dirinya sendiri (*self identification*) pada *great tradition* seperti diklasifikasikan **Ernest Gellner**, dimana tradisi tinggi adalah Islam resmi universal bukan lokal. Tapi pada kenyataannya, yang muncul adalah arabisasi – yang diperlihatkan dari jubah, tutup kepala, sorban, pengucapan kalimat arab, nasyid – semakin dianaggap pola keislaman yang resmi.

Inilah fenomena *tadayyun 'ala ma'na*, menunjukkan sikap keberagaman secara simbolik dan melupakan substansi nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Seandainya sosok Kabayan – dengan aksesories dan kepribadian khasnya; baju hitam, ikat kepala, yang bertanggung jawab dan mempunyai komitmen terhadap rakyat serta pencerahan terhadap ummat. Karena

manusia – yang santri termasuk di dalamnya – adalah hayawan mas’ul, hewan yang bertanggung jawab.

Sosok santri adalah sosok berkepribadian sholih (baik ritual maupun sosial), berawawasan inklusif, tolerans, humanis, kritis dan berorienttasi pada komitmen kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan (*al-musawah*). Karenanya, pesantren sebagai “*sub kultur*” harus mampu mempertemukan tradisi keilmuan dan transformasi budaya. Kalau bisa pesantren harus menyusun “*strategi kebudayaan*” (dalam konteks Sunda), sebagai sebuah ikhtiar dalam menerobos gagasan serta ide-ide untuk mempertemukan sejumlah pemikiran yang emansipatif dan eksploratis. Dimana kreatifitas dalam tradisi dan kebudayaan yang dimotivasi ruh ke-Islaman, mampu melibatkan pesantren dalam makro perubahan pada lapis struktur masyarakat yang beragam. Dan mengangkat pesantren serta umat Islam dari posisi termarjinalkan, sebagai “*objek*” hanya bisa “*teriak penuh kemarahan*” dan “*demontrasi sejuta umat*” menjadi subyek yang membumikan nilai keberagaman dalam konteks kemanusiaan serta memberi pencerahan terhadap semua aspek kehidupan di dunia ini.

Minimalisir Resistansi Tradisi Lokal

Kebudayaan lokal menjadi subsistem dalam merumuskan pluralitas masyarakatat dengan relasi-relasi sosial keberagaman di dalamnya. Sehingga fenomena sosial tidak hanya merujuk pada kontruksi yang mempertemukan sistem nilai dari agama. Tetapi pada dimensi yang lebih spesifik, lokaslitas akan mengilustrasikan konstruksi keberagaman dan konteks sosial lapisan masyarakat.

Kebudayaan lokal, mesti memiliki resistensinya sendiri yang kelak menjadi lebih inspiring atau malah memperlebar perbedaan-perbedaan. Sistem nilai agama yang menyuguhkan dimensi *holistik* melalui firman Tuhan, tidak lagi diperhadapkan kepada fenomena sosiologis yang menjadi faktoa dan realitas. Maka, resistensi budaya lokal maupun unsur-unsur lokalitas suatu masyarakat akan lebih menemukan paradigma yang menyusun faktor-faktor sosiologis dalam dimensi yang menyeluruh.

PUSAKA:

KEANEKARAGAMAN, KEUNIKAN, DAN KERANGKA DASAR GERAKAN PELESTARIAN¹

Oleh: **Laretna T. Adishakti²**

Abstrak

Pusaka Indonesia terserak dari Sabang sampai Merauke, dari Lautan Cina hingga Samudra Indonesia. Hadir dalam keanekaragaman, terlihat maupun tidak, yang terbentuk oleh alam atau olah budi manusia, serta interaksi antar keduanya dari waktu ke waktu. Ketika membicarakan pusaka budaya, tidak akan dapat dilepaskan dari aspek pusaka alam, begitu juga sebaliknya. Pusaka Indonesia mengandung keduanya. Manifestasi kesatuan ini merupakan pusaka saujana budaya (cultural landscape heritage). Sedangkan masing-masing ragam yang membentuk keanekaragaman itu memiliki keunikan tersendiri, apakah yang tumbuh di lingkungan budaya tertentu, ataukah hasil percampuran antar budaya baik di waktu lampau, saat ini dan nanti. Diyakini, Indonesia merupakan mosaik pusaka saujana budaya terbesar di dunia.

Fenomena keanekaragaman dan keunikan pusaka yang dimiliki Indonesia ini menjadi perhatian terus menerus para pemerhati dan pelaku pelestarian dari berbagai daerah di Indonesia dan memicu banyak pertanyaan serta pemikiran kritis. Disadari pelestarian pusaka merupakan persoalan lintas ilmu, lintas sektor, dan lintas daerah. Sementara, kenyataan yang ada sangat memprihatinkan. Persoalannya, pelestarian pusaka masih merupakan arogansi sektoral, keilmuan, bahkan dengan adanya otonomi daerah tumbuh menjadi arogansi daerah, dan

¹ Disampaikan dalam Kongres Kebudayaan V diselenggarakan di Bukittinggi, 19 – 23 Oktober 2003

² Dosen dan Peneliti, Pusat Pelestarian Pusaka Arsitektur, Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta; Ketua Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia; Ketua Jogja Heritage Society.

Email:

chc_ugm@idola.net.id

;

chc-ugm@indonesiapusaka.org

yang paling memprihatinkan adalah justru pusaka dan pelestarian tidak terpedulikan.

Makalah ini akan menekankan tentang pemahaman pusaka beserta keanekaragaman dan keunikannya, di antara terminologi warisan dan cagar budaya, serta upaya para pemerhati dan pelaku pelestarian dalam mewujudkan sebuah kerangka dasar gerakan pelestarian yang lintas ilmu, lintas sektor, dan lintas daerah melalui kegiatan Tahun Pusaka Indonesia 2003. Salah satu programnya adalah Penyusunan Piagam Pelestarian Pusaka untuk Indonesia. Dalam proses penyusunan piagam telah dilakukan beberapa kali diskusi dan lokakarya sejak awal tahun 2003. Hasil sementara adalah tersusunnya Draft Kaliurang yang memerlukan masukan dan penyempurnaan dari berbagai pihak, termasuk dalam Kongres Kebudayaan ini, untuk menjadi Piagam yang akan dideklarasikan pada bulan Desember 2003 dalam acara Tonggak Tahun Pusaka Indonesia 2003 yang sekaligus akan menetapkan dekade 2004 – 2014 sebagai dekade pelestarian pusaka dengan derap pembangunan berwawasan lingkungan-budaya.

1. Pendahuluan

Dalam Pra Kongres di Bali, saya menyampaikan makalah dengan judul "Pelestarian Pusaka Budaya: Masyarakat Sebagai Pusat Pengelolaan Perubahan" (Topik 3 Perubahan dan Pemberdayaan). Pemahaman tentang pelestarian yang menjadi inti makalah tersebut adalah kesinambungan yang menerima perubahan. Suatu perubahan yang tidak drastis dan dilakukan secara selektif. Untuk itu diperlukan kepekaan tinggi dalam mengelola perubahan pada pusaka yang dimiliki di berbagai pelosok tanah air, termasuk menetapkan pusaka yang perlu dipertahankan tanpa perubahan. Makalah tersebut juga membahas keragaman aset alam dan budaya nusantara dalam tatanan spasial yang merupakan pusaka saujana budaya (*cultural landscape heritage*), beserta permasalahan dan upaya pelestarian yang dilakukan. Termasuk ditetapkannya Tahun Pusaka Indonesia 2003 dengan berbagai kegiatan pelestarian yang diupayakan (lihat lampiran 2).

Beberapa prinsip penting dalam proses pelestarian yang disampaikan dalam makalah tersebut merupakan masukan untuk

penyempurnaan konsep, kebijakan, dan strategi dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia adalah:

- (1) masyarakat sebagai pusat pengelolaan (*people-centered management*),
- (2) pentingnya kerjasama/kolaborasi antar disiplin ilmu maupun sektor,
- (3) tercipta mekanisme kelembagaan yang mampu mengakomodasi apresiasi dan aksi masyarakat,
- (4) dukungan dan penegakan aspek legal, dan
- (5) perlu diwujudkannya pasar pelestarian untuk menunjang kesinambungan pengelolaan.

Salah satu ilustrasi untuk implementasi prinsip-prinsip tersebut adalah disusunnya suatu model Program Pelestarian “Kawasan Pusaka” yang kemudian diuji-cobakan di beberapa kawasan bersejarah baik diperkotaan maupun pedesaan. Model ini merupakan suatu proses pelestarian yang menjadi alat dalam mengelola perubahan dan berbasis pada kemandirian masyarakat setempat dalam mengelola berbagai aset budayanya. Ditekankan pula bahwa proses pelestarian ini membutuhkan waktu panjang, mulai dari pemahaman dan kepedulian pelestarian bagi berbagai pihak termasuk masyarakat lokal hingga upaya pelestarian fisik yang perlu dilakukan serta kemampuan masyarakat mengelola dan memanfaatkannya. Untuk itu diusulkan agar dekade 2004 – 2014 sebagai dekade pelestarian pusaka dengan derap pembangunan berwawasan lingkungan-budaya.

Dalam makalah ini, saya mewakili Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia beserta berbagai organisasi yang mengelola Tahun Pusaka Indonesia 2003 (TPI2003), kembali menyoroti persoalan pusaka dengan menekankan pada keanekaragaman dan keunikan pusaka yang dimiliki Indonesia serta, sudah mendesak, untuk dimilikinya kerangka dasar gerakan berbagai pihak yang terlibat termasuk masyarakat dalam pelestarian pusaka yang merupakan rangkaian proses proteksi hingga pengembangan secara berkesinambungan dan multi komponen. Salah satu kegiatan TPI2003 adalah penyusunan Piagam Pelestarian Pusaka untuk Indonesia (lihat lampiran 1). Melalui program ini dapat dicermati keterbatasan pemahaman publik akan pelestarian pusaka dan keinginan para pemerhati dan pelaku pelestarian untuk

melakukan pengembangan dan penguatan serta aksi-aksi nyata pelestarian pusaka secara sistematis. Diyakini pula, upaya pelestarian ini merupakan salah satu alat penting untuk melindungi dan mengembangkan kebudayaan Indonesia.

2. Mengapa Digunakan Kata Pusaka?

Pertama, kita memang perlu berfikir ulang akan terminologi berbagai aset alam dan budaya yang beraneka yang dimiliki Indonesia. Masing-masing bidang ilmu, sektor, atau daerah perlu mengkaji kembali apa sebenarnya esensi aset tersebut, untuk kemudian dibandingkan dengan yang lain. Diyakini, pasti ada prinsip-prinsip yang sama di antaranya dan memang perlu ada pengertian lintas-komponen serta aspek-aspek mendasar yang dapat mendukung kolaborasi.

Kedua, aset tinggalan dari waktu ke waktu umumnya hidup di antara dinamika keseharian masyarakat. Peran masyarakat sebenarnya sangat besar, dan memang diperlukan, dalam menjaga dan mengembangkan aset-aset tersebut. Mereka pula, berhak menetapkan apa yang menjadi “pusaka” masing-masing berdasarkan kriteria yang ditetapkan sendiri. Sudah saatnya tumbuh kembali kepekaan dan kemandirian dalam melihat dan mencermati lingkungannya sebagaimana halnya kondisi yang telah mengakar di masyarakat pada masa lalu. Kemudian bila telah ditetapkan berdasar UU No. 5, tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, pusaka tersebut akan disebut pula Benda Cagar Budaya.

Ketiga, mana yang lebih tepat kata warisan atau pusaka dalam menterjemahkan pemahaman “*heritage*”. Dalam kamus Poerwadarminto kata *heritage* diterjemahkan dengan warisan dan pusaka. Namun di sini, kita sebenarnya bisa membedakan adanya perbedaan yang mendasar antara keduanya. Warisan merupakan peninggalan masa lalu dalam bentuk apapun, bisa positif bisa negatif, bisa bernilai dan tidak bernilai. Ketika disebut sebagai pusaka, warisan tersebut merupakan suatu warisan yang memiliki nilai. Ketika warisan selalu dibagikan kepada generasi-generasi penerusnya, keadaan warisan tersebut semakin sedikit karena selalu dibagi dari generasi ke generasi. Sementara, pusaka ada kecenderungan untuk dipertahankan keberadaan dan tanpa berkurang nilainya.

Penting pula untuk memandang persoalan pusaka secara lebih tajam dan komprehensif. Bahwa pusaka tidak hanya berbentuk artefak saja. Pusaka dapat berbentuk tunggal, kelompok, atau ruang komponen lingkungan hidup yaitu abiotik (alam dan buatan), biotik (flora dan fauna), serta sosial-budaya dari bahasa hingga beragam seni dan olah budi manusia termasuk manuskrip. Aset tersebut dapat berskala kecil tingkat lokal seperti rukun tetangga hingga saujana budaya, desa, kota bersejarah atau suatu pulau. Juga dari yang sangat bersahaja (*ordinary heritage*) hingga budaya tingkat tinggi (*high culture*), serta terlihat (*tangible*) dan tidak terlihat (*intangible*). Sementara itu pusaka bisa menyangkut dimensi yang sangat luas, misalnya dalam pusaka kota bersejarah. Sebagai contoh Kota Yogyakarta yang memiliki keragaman *urban space heritage* yang merupakan komposisi antara struktur kota, bangunan dan ruang luar perkotaan (*ordinary* atau *high culture heritage*), vegetasi perkotaan serta penggunaan ruang beserta sistem kegiatannya (Adishakti, 1997).

Dalam penyusunan Piagam Pelestarian Pusaka untuk Indonesia disepakati pemahaman pusaka Indonesia adalah pusaka alam dan pusaka budaya yang membentuk kesatuan pusaka saujana yang beraneka ragam, yang merupakan bentukan alam dan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya lebih dari 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia, baik secara sendiri-sendiri, perpaduan dengan budaya lain, dan sebagai kesatuan bangsa Indonesia di sepanjang sejarah keberadaannya. Mengingat eratnya kaitan antara alam dan budaya, kami bersepakat untuk menggunakan istilah "pusaka saujana" untuk menggambarkan kesatuan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu (Draft Kaliurang, 3 Oktober 2003). Meskipun masih terjadi perdebatan yang panjang mengenai penggunaan istilah "saujana" atau "saujana budaya" dalam pemahaman akan "*cultural landscape*". Proses penyusunan piagam ini memang masih berlangsung hingga Desember 2003, sehingga semua pihak diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan penyempurnaan.

3. Pelestarian; Kesenambungan Yang Menerima Dinamika Perubahan

Dalam memahami pelestarian, tak jarang banyak pihak yang

mengartikannya sebagai upaya untuk mempertahankan keberadaan secara mengawetkan dengan tidak boleh merubah sepanjang jaman. Namun, konsep pelestarian (konservasi) kini memang telah jauh berkembang. Pada awalnya pelestarian pusaka dititik beratkan pada monumen, candi atau bangunan tunggal bersejarah. Kemudian berkembang hingga lingkup yang luas sampai kota ataupun pulau bersejarah dengan kehidupannya yang dinamik. Hal ini menekankan bahwa, pelestarian bukanlah romantisme masalalu atau upaya untuk mengawetkan komponen bersejarah saja, namun juga ditujukan untuk menjadi alat dalam mengolah transformasi dan vitalisasi pusaka. Upaya ini bertujuan pula untuk memberikan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik berdasar kekuatan aset lama, dan melakukan pencangkakan program-program yang menarik dan kreatif, berkelanjutan, serta merencanakan program partisipasi dengan memperhitungkan estimasi ekonomi.

Dalam penyusunan Piagam Pelestarian Pusaka untuk Indonesia disepakati bahwa pelestarian adalah upaya pengelolaan perubahan secara selektif melalui kegiatan perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan/atau pengembangan pusaka saujana untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman, kualitas hidup yang lebih baik serta menciptakan pusaka masa datang (Draft Kaliurang, 3 Oktober 2003).

Dalam pelaksanaannya berbagai benturan sering terjadi dan diperlukan kemampuan publik dalam melindunginya (Adishakti, 2003), seperti berikut:

1. Benturan-benturan ini merupakan bagian dari dinamika kehidupan yang selalu tumbuh dan berkembang sepanjang jaman. Menjadikan dialog selalu diperlukan tanpa henti. Konsep pelestarian yang memiliki semangat negosiasi dan dialog ini perlu dilaksanakan oleh pihak-pihak yang peka terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam aset-aset yang dimiliki. Mengingat keragaman pusaka memang tidak terbatas, kriteria penetapan pusaka dan upaya pelestariannya juga akan sangat beragam. Ini semua akan terkait erat dengan kepedulian masyarakat luas, termasuk pihak-pihak lain yang terkait seperti pemerintah dan swasta. Seperti halnya masyarakat dunia menetapkan World Heritage, atau suatu bangsa menetapkan National Treasures, masyarakat di

kalangan “biasa-biasa” selayaknya diberi kesempatan untuk secara selektif menetapkan pusaka dari lingkungannya (*Ordinary Heritage*).

2. Keberhasilan upaya pelestarian terletak pada kemampuan publik dalam memperdulikan aset yang dimilikinya. Suatu upaya yang perlu berangkat dari buah kecintaan, pemahaman dan apresiasi publik yang akan kemudian menciptakan suatu gerakan budaya masyarakat dalam pelestarian pusaka. Apalagi di tengah era otonomi daerah, kearifan lokal, *genius loci* perlu dikedepankan, termasuk pula peran serta masyarakat lokal dalam mengelolanya. Selain aktif berpartisipasi menganyam masa lalu, sekarang, dan masa datang, sangat perlu sekali membantu mengontrol perkembangan yang terjadi. Di samping itu perlu pranata pembangunan dan *good governance* yang mampu mengakomodasi apresiasi dan gerakan budaya masyarakat dalam pelestarian pusaka. Untuk itu diperlukan “*the total system of heritage conservation*” yang mengakar.

4. Piagam Pelestarian Pusaka Untuk Indonesia Sebagai Kerangka Dasar Gerakan Pelestarian

Lokakarya Penyusunan Piagam Pelestarian untuk Indonesia diselenggarakan pada tanggal 3 Oktober 2003 di Kaliurang setelah serangkaian Diskusi Meja Bundar untuk memperoleh masukan dari banyak pihak. Lokakarya diikuti oleh 60 peserta dari beragam latar belakang ilmu, sektor, dan daerah. Lokakarya menyepakati, walaupun masih banyak perdebatan yang terpicu setelahnya, beberapa pemahaman tentang pusaka Indonesia, pusaka saujana, dan pelestarian. Kemudian mengenai Judul piagam tersebut juga masih ada beberapa alternatif, yaitu:

- Piagam Pelestarian Pusaka Saujana Indonesia
- Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia
- Piagam Pusaka Indonesia

Dalam draft piagam, yang sementara ini disebut Draft Kaliurang, para pemerhati dan pelaku pelestarian menyatakan berbagai keprihatinan akan kondisi pelestarian pusaka yang ada di Indonesia, untuk kemudian bertekad untuk bersama-sama, melalui kemitraan yang sehat, sekuat tenaga memperjuangkan pelestarian pusaka saujana Indonesia secara holistik, sistematis

dan berkesinambungan, melalui mekanisme dan proses yang adil, demokratik, harmonis, dan didukung oleh landasan hukum yang jelas dan konsisten. Tekad ini diwujudkan dalam agenda aksi serta mengajak semua pihak untuk berpartisipasi. Agenda aksi tersebut adalah:

1. Melakukan **tindakan aktif perlindungan** terhadap berbagai ancaman yang ada
2. Melakukan penguatan kemampuan **dan sarana untuk inventarisasi, dokumentasi, klasifikasi** yang sistematis dan komprehensif, serta mengembangkan **teknik-teknik pelestarian** yang tepat dengan konteks Indonesia.
3. Meningkatkan **kesadaran publik** (pemerintah, masyarakat dan sektor swasta) tentang pentingnya pelestarian melalui berbagai kegiatan pendidikan (formal dan non-formal), pelatihan, kampanye publik, dan tindakan-tindakan persuasif lainnya.
4. Meningkatkan **kapasitas kelembagaan, mengembangkan mekanisme pembagian kewenangan dan tugas, mengembangkan perangkat lunak, memperluas jaringan kerjasama, membangun sistem pendanaan serta penguatan pengawasan dan pengendalian** agar upaya-upaya pelestarian dapat dilakukan lebih efektif dan sinergis.
5. Memperkuat **penegakan hukum** melalui pengembangan peraturan perundangan, sistem peradilan, mekanisme pelaksanaan lapangan yang jelas, adil serta penguatan tekanan dan kontrol masyarakat untuk perbaikan.
6. Mengenali, menghargai potensi, dan melakukan **upaya pendampingan bagi masyarakat yang terpinggirkan** guna memperkuat kembali keberdayaan mereka dalam melestarikan dan memanfaatkan pusaka mereka untuk kesejahteraan yang berkelanjutan.

Langkah-langkah pelaksanaan untuk ke enam agenda aksi tersebut akan disusun tersendiri dan ditempatkan sebagai lampiran piagam. Piagam akan dideklarasikan pada bulan Desember 2003 dalam Tonggak Tahun Pusaka Indonesia 2003. Isi dan lampiran piagam tersebut adalah **kerangka dasar gerakan pelestarian** yang perlu diteguhkan dan menjadi pegangan di berbagai pelosok tanah air.

5. Kesimpulan Dan Usulan

Sebenarnya **tidak ada komponen-komponen yang baru** dalam kita memperkuat dan meneguhkan apa yang kita punya dan bagaimana melindungi dan mengembangkannya. Semuanya telah ada jauh di masa silam, yang kini perlu kita bangkitkan dan tumbuhkan kembali dalam kerangka mensejahterakan seluruh anak bangsa dan mendudukkan Indonesia sebagai bangsa yang beradab di dunia ini. Tidak ada kata lain dalam menumbuhkan kembali kekuatan dan pusaka bangsa ini selain perlu dilakukan **gerakan aksi nyata secara bersungguh-sungguh dan berkelanjutan**. Untuk itu Piagam Pelestarian Pusaka untuk Indonesia yang merupakan kerangka dasar gerakan pelestarian diusulkan sebagai pertimbangan untuk konsep, strategi dan kebijakan kebudayaan Indonesia dan kembali saya menekankan usulan yang pernah saya sampaikan dalam Pra Kongres Kebudayaan di Bali:

1. Bahwa untuk penguatan masyarakat sebagai pusat pengelolaan perubahan tidak bisa dipisahkan dengan prinsip-prinsip proses pelestarian lainnya yaitu kolaborasi antar disiplin ilmu maupun sektor; mekanisme kelembagaan yang mampu mengakomodasi apresiasi dan aksi masyarakat; dukungan dan penegakan aspek legal; serta pasar pelestarian yang menunjang kesinambungan pengelolaan.
2. Bahwa **proses pelestarian pusaka membutuhkan waktu panjang**. Mulai dari pemahaman dan kepedulian pelestarian bagi berbagai pihak termasuk masyarakat lokal, hingga pelaksanaan pelestarian fisik, serta kesiapan kemampuan masyarakat mengelola dan memanfaatkannya. Untuk itu diperlukan suatu program pelestarian yang terus menerus secara berkesinambungan diupayakan. Diusulkan **2004 – 2014 sebagai Dekade Pelestarian Pusaka**
3. Memperhatikan bahwa kekuatan nilai pusaka Indonesia adalah keanekaragaman bentukan alam dan olahan manusia, **pembangunan berwawasan lingkungan-budaya** selayaknya menjadi semangat pembangunan yang spesifik Indonesia.

Daftar Pustaka:

-
- 2003 Notulensi-notulensi rangkaian kegiatan Penyusunan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia yang dilaksanakan antara bulan Mei – Oktober 2003 oleh Panitia Tahun Pusaka Indonesia 2003
 - 2003 Kumpulan Piagam/Deklarasi/Konvensi dari berbagai negara, dikumpulkan oleh Panitia Tahun Pusaka Indonesia 2003.

Adishakti, Laretna T.

- 2000 “Apa Pusaka Kota Bersejarah?”. Makalah disampaikan dalam Seri Dialog 2 Lintas “Pemerhati & Pecinta” Kota Bersejarah Yogyakarta.
- 2003 “Pusaka Bangsa dan Pranatanya”. Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel Terbatas „Gelora Bung Karno sebagai Pusaka Bangsa”, diselenggarakan oleh Yayasan Bung Karno, Jakarta.
- 2003 “Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Bersejarah: Futuristik berdasar pusaka lokal, *people-centered management*, multipihak, holistik, dan berkelanjutan “ Makalah disampaikan dalam Pra Kursus Revitalisasi Perkotaan dan Pembangunan Ekonomi Regional”, diselenggarakan oleh Dirjen Perencanaan Perkotaan dan Pedesaan KIMPRASWIL, Jakarta;
- 2003 “Pelestarian Pusaka Budaya: Masyarakat Sebagai Pusat Pengelolaan Perubahan”. Makalah disampaikan dalam Pra Kongres Kebudayaan, Denpasar, Bali, 2003;

DRAFT PIAGAM PELESTARIAN PUSAKA SAUJANA INDONESIA¹

Kami para pemerhati dan pelaku pelestarian pusaka Indonesia bersyukur bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbesar dikaruniai Tuhan keanekaragaman dan kekayaan alam dan budaya yang istimewa, yang menjadi sumber inspirasi, kreativitas, dan daya hidup. Dalam rangka Tahun Pusaka Indonesia 2003, kami bertekad menggali permasalahan, menjawab berbagai tantangan yang dihadapi, dan meneguhkan pelestarian pusaka saujana Indonesia.

Kami bersepakat bahwa pusaka Indonesia adalah pusaka alam dan pusaka budaya yang membentuk kesatuan pusaka saujana yang beraneka ragam, yang merupakan bentukan alam dan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya lebih dari 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia, baik secara sendiri-sendiri, perpaduan dengan budaya

¹ *Piagam disusun dalam rangka Tahun Pusaka Indonesia 2003 (TPI2003) yang dikelola oleh Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia (JPPI), International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Indonesia didukung Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata:*

- Melalui proses Umbar Gagas (Mei – September 2003), Lokakarya Penyusunan Piagam Pelestarian Pusaka untuk Indonesia (Draft Kaliurang, 1 – 3 Oktober), diseminasi draft dalam berbagai kesempatan antara lain Pasamuan Budaya Desa “Segara Gunung” di Temanggung; Konggres Kebudayaan di Bukittinggi; Diskusi Piagam di Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta; serta berbagai kesempatan diskusi terbuka lainnya dan secara cyber.
- Piagam akan diluncurkan pada Tonggak Tahun Pusaka Indonesia 2003 yang akan diselenggarakan bulan Desember 2003. Penjelasan dan teknis pelaksanaan piagam akan ditempatkan dalam lampiran yang akan disusun secara bertahap.
- Masukan, koreksi, harapan untuk penyempurnaan piagam ini terbuka bagi semua pihak dan dapat disampaikan hingga tanggal 30 November 2003 kepada Sekretariat TPI2003, Pusat Pelestarian Pusaka Arsitektur, Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Jl. Grafika 2, Yogyakarta.
Telp/fax: 0274 544910. Email: jppi@indonesiapusaka.org ;
chc-ugm@indonesiapusaka.org ;
chc_ugm@idola.net.id.

lain, dan sebagai kesatuan bangsa Indonesia di sepanjang sejarah keberadaannya. Mengingat eratnya kaitan antara alam dan budaya, kami bersepakat untuk menggunakan istilah “pusaka saujana” untuk menggambarkan kesatuan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu.

Kami bersepakat bahwa pusaka saujana yang kita terima dari generasi-generasi sebelumnya sangat penting sebagai landasan dan modal awal bagi pembangunan masyarakat Indonesia di masa depan, karena itu harus dilestarikan untuk diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan baik, tanpa berkurang nilainya.

Kami bersepakat bahwa pelestarian adalah upaya pengelolaan perubahan secara selektif melalui kegiatan perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan/atau pengembangan pusaka saujana untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman, kualitas hidup yang lebih baik serta menciptakan pusaka masa datang.

Kami prihatin bahwa banyak pusaka saujana Indonesia yang tak ternilai, rusak, hancur, hilang, dicuri atau dilarikan untuk keuntungan jangka pendek dan kepentingan kelompok tertentu, atau tengah terancam akibat ketidaktahuan, ketidakperdulian, ketidakmampuan, dan kesalahurusan.

Kami prihatin bahwa telah terjadi pendangkalan dan pemiskinan budaya yang terlihat pada melemahnya rasa percaya diri, inisiatif, kreativitas yang sangat diperlukan dalam menghadapi gejala perkembangan dunia dan untuk bertindak penuh kemandirian dalam menentukan masa depan bangsa.

Kami prihatin bahwa banyak masyarakat tradisional, golongan minoritas, dan kelompok tertentu yang terpinggirkan akibat kurangnya pemahaman bersama tentang keragaman, kebersamaan dalam keragaman, dan pentingnya membangun bangsa secara bergotong royong.

Kami prihatin bahwa sampai saat ini masih terdapat ketimpangan sosial, alokasi sumber daya, ekonomi, dan politik serta tidak adanya tatanan yang jelas yang merupakan keadaan yang tidak menguntungkan bagi upaya-upaya pelestarian pusaka saujana Indonesia.

Kami prihatin bahwa kita kurang mengenali untuk dapat memanfaatkan peluang-peluang dan kesempatan yang

dimungkinkan, disamping masalah yang ditimbulkan oleh proses-proses perubahan sosial, ekonomi dan politik masyarakat dunia, untuk melakukan transformasi sosial dan ekonomi bagi kepentingan pelestarian pusaka saujana Indonesia.

Atas keprihatinan tersebut diatas, kami para pemerhati dan pelaku pelestarian bertekad untuk bersama-sama, melalui kemitraan yang sehat, sekuat tenaga memperjuangkan pelestarian pusaka saujana Indonesia secara holistik, sistematis dan berkesinambungan, melalui mekanisme dan proses yang adil, demokratis, harmonis, dan didukung oleh landasan hukum yang jelas dan konsisten.

Kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif melakukan upaya-upaya nyata untuk melestarikan pusaka saujana Indonesia melalui tindakan perlindungan terhadap berbagai ancaman yang ada.

Kami mengajak semua pihak untuk melakukan penguatan kemampuan dan sarana untuk inventarisasi, dokumentasi, klasifikasi yang sistematis dan komprehensif, serta mengembangkan teknik-teknik pelestarian yang tepat dengan konteks Indonesia.

Kami mengajak semua pihak untuk meningkatkan kesadaran publik (pemerintah, masyarakat dan sektor swasta) tentang pentingnya pelestarian melalui berbagai kegiatan pendidikan (formal dan non-formal), pelatihan, kampanye publik, dan tindakan-tindakan persuasif lainnya.

Kami mengajak semua pihak untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, mengembangkan mekanisme pembagian kewenangan dan tugas, mengembangkan perangkat lunak, memperluas jaringan kerjasama, membangun sistem pendanaan serta penguatan pengawasan dan pengendalian agar upaya-upaya pelestarian dapat dilakukan lebih efektif dan sinergis.

Kami mengajak semua pihak untuk menguatkan penegakan hukum melalui pengembangan peraturan perundangan, sistem peradilan, mekanisme pelaksanaan lapangan yang jelas, adil serta penguatan tekanan dan kontrol masyarakat untuk perbaikan.

Kami mengajak semua pihak untuk mengenali, menghargai potensi, dan melakukan upaya pendampingan bagi masyarakat

yang terpinggirkan guna menguatkan kembali keberdayaan mereka dalam melestarikan dan memanfaatkan pusaka mereka untuk kesejahteraan yang berkelanjutan.

Demikian kesepakatan dan kesimpulan yang dapat kami capai dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari organisasi pelestarian pusaka di berbagai daerah, kalangan perguruan tinggi, pejabat pemerintah, profesional di bidang pelestarian pusaka, dan wakil-wakil masyarakat umum.

Kami berharap upaya-upaya pelestarian pusaka Indonesia dapat membantu kita untuk meneguhkan identitas kita dalam masyarakat dunia yang sangat beranekaragam dan dinamik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, dan menjamin keberlanjutan bangsa Indonesia dalam percaturan masyarakat dunia.

Kami berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kekuatan, kemampuan, dan kearifan kepada bangsa Indonesia dan pemimpinnya untuk dapat mencapai tujuan tersebut di atas.

Lampiran 2:

Tahun Pusaka Indonesia 2003 Merayakan keanekaragaman, dari kita untuk kita oleh kita bangsa Indonesia.

1. Mengapa Perlu Tahun Pusaka Indonesia 2003?

- Pusaka Indonesia terhampar luas dari puncak gunung, pusat-pusat kota tua, pedesaan, candi, hingga pulau-pulau dan lautan beserta isinya. Termasuk pula seni budaya baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Rajutan alam dan budaya yang tampil dalam berbagai pusaka yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa pada hakekatnya *eco-system* yang ada mempengaruhi perwujudan pusaka-pusaka tersebut;
- Karunia keanekaragaman alam dan budaya yang ada di Nusantara ini merupakan kekuatan bangsa Indonesia. Suatu "Pusaka Bangsa";
- Kenyataan menunjukkan Indonesia berada pada tahap awal *system* yang menyeluruh dalam pelestarian pusaka alam

dan budaya (*"the total system of natural & cultural heritage conservation"*);

- Karunia keragaman alam dan budaya Indonesia perlu dirayakan melalui peningkatan kepedulian tentang pusaka budaya dan alam, sekaligus membangun bangsa dan memperkuat "Bhinneka Tunggal Ika";
- Merayakan keanekaragaman dan mengupayakan kepedulian pelestarian pusaka Indonesia dilaksanakan melalui Tahun Pusaka Indonesia 2003 yang sekaligus memperingati 90 tahun kepurbakalaan di Indonesia dan 20 tahun restorasi Candi Borobudur;

2. Apakah Visi Tahun Pusaka Indonesia 2003?

Secara nasional tumbuh gerakan kepedulian publik dan meningkatnya pendidikan bangsa Indonesia dalam pelestarian pusaka alam dan budaya, serta menjadikan gerakan ini sebagai upaya membangun bangsa, demi menjadikan masyarakat Indonesia yang seimbang dan lebih baik.

3. Apakah Misi Tahun Pusaka Indonesia 2003?

- Melakukan kampanye dan berbagai kegiatan yang terkait selama tahun 2003. Termasuk dalam kampanye adalah sosialisasi berbagai upaya pelestarian yang telah dilakukan secara tepat oleh berbagai pihak baik masyarakat, swasta, eksekutif ataupun legislatif.
- Mewadahi terciptanya *"connected people"* melalui jaringan antar organisasi/individu peduli pelestarian pusaka hingga tumbuh gerakan budaya masyarakat untuk pelestarian.

4. Apa yang akan dilakukan?

- Setahun penuh KAMPANYE PELESTARIAN lokal & nasional
- Meningkatkan PENDIDIKAN pelestarian pusaka alam dan budaya
- PAMERAN keliling Indonesia
- Peluncuran BUKU pelestarian pusaka
- Menggalakkan JELAJAH PUSAKA ALAM DAN BUDAYA
- Deklarasi PIAGAM Pelestarian untuk Indonesia
- Berbagai inisiatif KEGIATAN lokal dan nasional

5. Apakah Pusaka (*Heritage*)?

Merupakan peninggalan baik yang terlihat (*tangible*) maupun tidak terlihat (*intangible*). yang dapat berwujud lingkungan alam termasuk flora dan fauna, lingkungan buatan, termasuk artefak, candi, bangunan, kawasan, hingga desa dan kota atau - perpaduan antara lingkungan alam dan buatan serta budayanya

6. Bagaimana Bentuk Kegiatannya?

Kegiatan dalam Tahun Pusaka Indonesia 2003 tidak terbatas pada obyek salah satu bentuk pusaka, namun memberikan kebebasan kepada semua pihak dalam mengangkat ragam pusaka yang digelutinya. Pengembangan pelestarian pusaka dapat dilakukan dalam berbagai basis, seperti misalnya:

- .. basis geografis: daerah, kota, desa, kawasan, dll.
- .. basis bidang: museum, teknik-teknik preservasi, bangunan tua, tenun ikat, dll.

Dan dalam berbagai tingkatan: komunitas, akademisi, kampung, kawasan, kota/desa, provinsi, nasional, internasional, dll.

7. Siapa yang akan terlibat?

PELAKU

Kelompok/institusi pelestari, organisasi peduli pusaka, pemerintah daerah dan pusat, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat umum dan individu di seluruh Indonesia yang peduli pelestarian pusaka.

PANITIA sebagai fasilitator

Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia (JPPI) bekerjasama dengan ICOMOS Indonesia (the International Council of Monuments and Sites) dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI.

8. Kapan?

Sepanjang tahun 2003: JANUARI-DESEMBER 2003

9. Bagaimana berpartisipasi?

Inisiatif semua pihak:

- masing-masing sukarela berpartisipasi
- ciptakan program
- kolaborasi dengan pihak-pihak lain

- kontak/buat jaringan lokal/regional
- dapat menghubungi Panitia Tahun Pusaka Indonesia 2003 bila memerlukan bantuan
- komunikasikan program ke Panitia Tahun Pusaka Indonesia 2003
- publikasi lokal-nasional dan aksi-aksi nyata
- sosialisasikan logo di berbagai kesempatan

10. Adakah target khusus?

Mengedepankan kekuatan upaya pelestarian di tingkat kota/kabupaten sebagai realisasi dalam era otonomi daerah. Kegiatan berbasis lokal yang akan memberi semangat secara nasional sangat diperlukan.

11. Logo



" Merayakan Keanekaragaman "

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PEMAKALAH

I. Identitas:

Nama : Laretna T. Adishakti
Tempat/tgl. Lahir : Yogyakarta, 19 Oktober 1958
Pekerjaan : - Dosen dan Peneliti, Pusat Pelestarian
Pusaka Arsitektur, Jurusan
Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas
Teknik, Universitas Gadjah Mada
- Pekerja Pelestarian, Jogja Heritage
Society
Jabatan : - Koordinator, Pusat Pelestarian Pusaka
Arsitektur, JUTAP, FT UGM
- Ketua Jogja Heritage Society

II. Riwayat Pendidikan:

- Doktor of Engineering, Graduate School of Global Engineering, Kyoto University, Kyoto, Japan, 1997
- Master of Architecture, School of Architecture & Urban Planning, Univ. of Wisconsin- Milwaukee, USA, 1988
- Joint Program, University of Wisconsin-Milwaukee and Ecole Speciale d'Architecture, Paris, France. 1987;
- Engineer (Ir), Department of Architecture and Planning, Faculty of Engineering, Gadjah Mada University, Yogya, 1982.

III. Pengalaman (5 tahun terakhir)

1. Organisasi:

- 2003 – sekarang, Anggota International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)
- 2002 – sekarang, Ketua Tahun Pusaka Indonesia 2003
- 2002 – sekarang, Fasilitator International Field School on Asian Heritage
- 2002 – sekarang, Anggota Eisenhower Fellowship, USA
- 2000 – sekarang, Ketua & co-founder, Jaringan Pelestarian Pusaka Arsitektur (JPPI)
- 2000 – sekarang, Pengurus Paguyuban Pecinta Batik

“Sekarjagad”

- 1999 – sekarang, Ketua & *co-founder* Jogja Heritage Society
- 1991 – sekarang, Anggota & *co-founder* Asia West Pacific Network for Urban Conservation
- 1991 – sekarang, Anggota Ikatan Arsitek Indonesia
- 1979 – sekarang, Sekretaris Eksekutif, Penata Artistik & Perangkai, Perhimpunan Penggemar Rangkaian Bunga “MAYASARI-INDONESIA” Yogyakarta.
- 2000 – 2002. Ketua & *co-founder* Forum Pelestarian Lingkungan Budaya Jogja (Forum Jogja)

2. Penelitian & Perencanaan:

Akademik

- Team leader. “Development of Guidelines for the Urban and Rural Conservation of the Minangkabau Hinterland” Stage III. Center for Heritage Conservation, Dept. of Architecture, GMU, supported by the Toyota Foundation. 2002– 2003;
- Principle Researcher. “Historic Preservation: After the Mistakes of American Urban Planning”. Independent research in USA supported by Eisenhower Fellowship. 2002
- Team leader. “A Study on the Urban and Rural Conservation Planning of Minangkabau Hinterland”. Stage I & II. Center for Heritage Conservation, Dept. of Architecture, Gadjah Mada Univ., supported by Toyota Foundation. 1999 – 2000 & 2001– 2002;
- Principle Researcher. “ Small Scale Industrial Linkage on Conservation Planning for Urban and Rural Space Heritage. Case Study: Yogyakarta Spatial Territory”. Supported by URGE. 1999 – 2001;
- Team leader. “A Comparative Study on Conservation District For Groups of Historic Buildings in Relation to The Community Benefit in Indonesia and Japan. Case Studies: Yogyakarta, Indonesia and Kyoto, Japan”. Center for Heritage Conservation, Department of Architecture, Gadjah Mada University, in collaboration with Dept. of Housing and Planning, Kyoto Prefectural University, supported by Japan Foundation. 1999 – 2000;

- Principle researcher. "A Study on the Conservation Planning of Yogyakarta Historic-tourist City based on Urban Space Heritage Conception". Unpublished dissertation. Kyoto University. Kyoto. 1997;

Pilot Projects

- Team Leader. "Tamansari as 100 of the World Endangered Site". A collaboration work among Jogja Heritage Society, Local Government Bodies, and World Monument Watch, NY., USA. 2003 – present.
- Team Leader. "Jogja nJeron Beteng Heritage Trail". Jogja Heritage Society in collaboration with Center for Heritage Conservation, GMU, Senthir and AusHeritage. Supported by AMEX Foundation. 2001 – present;
- Team Leader. "Demo Project: Conservation of Toraja Cultural and Natural Heritage". Center for Environmental Studies, Gadjah Mada University in Collaboration with Collaborative Environmental Project in Indonesia (CEPI), 1999 – 2000;
- Team Leader. "Kotagede - Yogyakarta Cultural District Pilot Project Stage II: Conservation of Traditional Culture". The Jogja Heritage Society in Collaboration with Center for Heritage Conservation, Department of Architecture, Gadjah Mada Univ., financed by The World Bank Small Grants Program. 1999;
- Team Leader. "Kotagede - Yogyakarta Cultural District Pilot Project Stage I: Conservation of Kampung Performing Arts and Its Environment". The Jogja Heritage Society in collaboration with Center for Heritage Conservation, Dept. of Architecture, Gadjah Mada Univ., financed by The World Bank Small Grants Program. 1998.

2.3. Planning dan Design Projects

- Team Leader. "Restoration of Umbul Binangun, Tamansari, Yogyakarta". Center for Environmental Studies, Gadjah Mada University in Collaboration with Cultural Agency, DIY and Office of History and Antiquity DIY. Supported by Qulbenkian

Foundation, Portugal. 2001 – present;

- Principle Architect. “Drini Beach Hotel”. Yogyakarta, 2001 – present;
- Team Leader. “Indonesian Culture Center”. Ministry of Culture and Tourism in collaboration with the Center for Tourism Studies, Gadjah Mada University. 2001 – 2002;
- Team member. “Revitalization of Yogyakarta Inner City”. Faculty of Engineering, Gadjah Mada University in collaboration with Provincial Government of Yogyakarta Special Territory. 2000;
- Team leader. “Preparation of Joglosemar Tourism Development Program”. Center for Tourism Studies, Gadjah Mada University in collaboration with Ministry of Tourism and Art. 1999-2000;
- Team Leader. “A Study on Tamansari Cultural District”. Cultural Agency, Yogyakarta Special Territory. 1998 – 1999;

3. Seminar & Lokakarya:

Internasional

- Speaker & Facilitator. “An Introduction Message: From Local Community Experiences to Common Understanding on Geritage Conservation in Indonesia”. Paper presented in the International Symposium on Asian Heritage Conservation, organized by Urban Design & Conservation Research Unit (UDCRU), Faculty of Built Environment, Universiti Teknologi Malaysia, in Melaka, Malaysia, 2003.
- Speaker. “Community Participation and Future Development of Borobudur Temple and Its Environment”. Paper presented in the Fourth International Experts Meeting on Borobudur, organized by Ministry of Culture and Tourism in collaboration with UNESCO in Borobudur, Magelang, 2003
- Project Director. “International Symposium and Workshop on Managing Heritage Environment in Asia”, organized by Center for Heritage Conservation, Dept. of Architecture, Gadjah Mada University in collaboration with Indonesian Network for Heritage Conservation, ICOMOS Indonesia, Jogja Forum for Cultural Environment Conservation, Sponsored by the Japan Foundation

Asia Center. Yogyakarta, 2003;

- Speaker. "Urban Planning in Indonesia". Presentation in the World Planning Day in Philadelphia, PA, USA, 2002;
- Participant. "3RD INTERNATIONAL PRESERVATION FORUM LANDED INTERESTS: Changing Approaches to Preserving Historic Landscapes" organized by Boston University and Newport Heritage Society in Newport, Rhode Islands. 2002;
- Participant. "Cities, Suburbs & Countrysides: National Preservation Conference 2002" organized by US National Trust for Historic Preservation, in Cleveland, Ohio, 2002;
- Speaker. "Heritage Promoter". Presentation in the Inaugural South-East Asian Regional Meeting and Workshop of National Trust. Kuala Lumpur, Malaysia, 2002;
- Speaker. "Innovative and Collaborative Works in Giving New Life to Urban Core" Building Civic Movement on Urban Conservation & Tourism". Paper presented in the "Seminar and Ex-Co Meeting: Urban Tourism Giving New Life to Urban Core", organized by Ministry of Settlements and Regional Infrastructure, Asean Association for Planning and Housing, and Provincial Government of Yogyakarta Special Territory, Yogyakarta, 2002;
- Speaker. "Lesson Learned from Cultural Heritage Adaptive Reuse in Indonesia". Paper presented in the International Symposium on Cultural Heritage Revitalization organized by Ministry of Interior in collaboration with Yaoshan Fondation, Taipei, 2001;
- Speaker. "Jogja Forum for Cultural Environment Conservation as Media for Building Civic Heritage Movement". Paper presented in the Regional Civic Innovation Forum, Bangkok, Thailand organized by the World Bank. 2001;
- Speaker. "Toward Sustainable Historic Environment: Building Heritage Communities and Awareness. Case study of Indonesia". Paper presented in the Okinawa International Forum "Community Development based on Historical Townscape and Social Climate", Naha City, Okinawa, Japan, 2001;
- Speaker. "A Study on the Rural Conservation Planning of

Minangkabau". Paper presented in the Regional Experts Group Meeting on Training Guidelines for Conservation and Regeneration of Historic Cities, Bangkok, Thailand. 2001;

- Speaker. "Urban Space Heritage and Conservation Management in Yogyakarta". Paper presented in the International Workshop on The Indonesian Towns Revisited, Leiden University, Leiden, the Netherlands. 2000;
- Speaker. "Indonesian Case: Public Participation in Historic Conservation and Tourism Development". Paper presented in the International Seminar on Historic Cities Conservation and Public Participation, Bangkok, Thailand. 2000;
- Speaker. "From Activities to Physical Environment: Conservation of Kotagede, the Old Capital City of Mataram, Yogyakarta, Indonesia". Paper presented in the International Seminar on Historic Cities Conservation and Public Participation, Kyoto, Japan. 1999;
- Project Director of the Seminar and Speaker. "Living With Heritage: Managing Its Own". The International Symposium and Workshop on Historic Cities in Islamic Societies. Co-organized by International Academic Exchange Program and International Research Center for Environment and Development, Ritsumeikan University, Kyoto and Department of Architecture, Faculty of Engineering, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 1998;
- Speaker. "The Emergence of Architecture and Urban Conservation in Southeast Asia". Paper presented in the Southeast Asia Forum, Center for Southeast Asia, Kyoto University, Kyoto. 1998;
- Speaker. Seminar Series on Indonesian Development. Ritsumeikan University, Kyoto, 1997;
- Speaker. "Overseas Studio on Urban Conservation: Experiment, Experience and Efforts to Build Cooperative Networks for Young Generation". Paper presented in the Sixth International Symposium and Workshop of Asia and West Pacific Network for Urban Conservation: Retrospective/perspectives of Grassroots Conservation Organization: Roles and Achievement, Taipei, Taiwan, 1997;
- Author. "An Understanding Various Attitudes of Cultures through

Urban Space Heritage Compositions in Yogyakarta Tourist-Historic City Indonesia". Poster presented in The Fourth International Seminar on Urban Form, University of Birmingham, UK, 1997;

Nasional

- Pembicara. "Pusaka Bangsa dan Pranatanya". Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel Terbatas „Gelora Bung Karno sebagai Pusaka Bangsa”, diselenggarakan oleh Yayasan Bung Karno, Jakarta, 2003;
- Pembicara. "Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Bersejarah: Futuristik berdasar pusaka lokal, *people-centered management*, multipihak, holistik, dan berkelanjutan " Makalah disampaikan dalam Pra Kursus Revitalisasi Perkotaan dan Pembangunan Ekonomi Regional", diselenggarakan oleh Dirjen Perencanaan Perkotaan dan Pedesaan KIMPRASWIL, Jakarta, 2003;
- Pembicara. "Pelestarian Pusaka Budaya: Masyarakat Sebagai Pusat Pengelolaan Perubahan". Makalah disampaikan dalam Pra Kongres Kebudayaan, Denpasar, Bali, 2003;
- Pembicara. "Pelestarian dari Sabang sampai Merauke: Menyoroti Pelestarian Kawasan Bersejarah yang Menggugah Apresiasi." Makalah disampaikan dalam Seminar-Lokakarya "Apresiasi Lingkungan dan Bangunan Bersejarah di kota Jakarta", diselenggarakan oleh Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2003;
- Pembicara. "Peran Jogja Heritage Society dalam Meningkatkan Apresiasi Masyarakat terhadap Tinggalan Budaya." Makalah disampaikan dalam "Rapat Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Pusaka" diselenggarakan oleh Asisten Deputi Pelestarian dan Pemeliharaan, Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata di Cisarua, Bogor, 2003;
- Pembicara. "Undang-undang Benda Cagar Budaya: Ditinjau dari Perspektif Arsitektur." Makalah disampaikan pada Rapat Pembahasan Revisi UU no 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya di Yogyakarta, 2002;
- Pembicara. "Pembelajaran Konservasi dalam Pendidikan Arsitektur." Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional

Muatan Pendidikan Arsitektur di Indonesia abad 21. Yogyakarta, 2002;

- Pembicara. "Pemanfaatan Pelestarian Kawasan Bersejarah" Makalah disampaikan pada Pertemuan Konsep Pembangunan Pelestarian Kawasan Bersejarah", Cipayung, Bogor, 2002;
- Pembicara. "Bangunan Candra Naya: Melestarikan Jiwa atau Raga?" Makalah disampaikan pada Seminar "Bagaimana Melestarikan Bangunan Candra Naya?. Jakarta, 2001;
- Pembicara. "Strategi Pengembangan Desa Wisata di Indonesia". Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Pengembangan Pariwisata Budaya dengan Swadaya Masyarakat di Daerah Bali", Bali, , 2000;
- Pembicara. "Mengasah Pusaka Kota dan Desa menjadi Media Usaha yang Berkilau". Makalah untuk Seminar Nasional Sinergi Pembangunan Regional Surakarta melalui Peningkatan Ketrampilan Budaya dan Teknologi," Surakarta, 2000;
- Panelis. "Model Konservasi di Indonesia: dari Kegiatan ke Lingkungan Fisik". Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Model Pelestarian di Indonesia, Jakarta, 2000;
- Fasilitator. "Pemanfaatan dan Konservasi Sumberdaya dalam Pembangunan Eco-City . Modul Pelatihan disampaikan pada Pelatihan Manajemen Lingkungan Perkotaan di Institut Teknologi Surabaya, 1999.

PLURALITAS KEPENDUDUKAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA

Oleh: **M.A. Tihami**

1. Pendahuluan

Pluralitas atau keragaman dalam suatu masyarakat adalah kenyataan kalau tidak ingin dikatakan keharusan, apalagi pada masyarakat terbuka seperti sekarang ini. Keterbukaan masyarakat dapat membuka peluang akan besarnya dinamika penduduk dan masalah-masalah kependudukannya. Demikian pula laju pertumbuhan penduduk dan migrasi serta bentuk mobilitas penduduk lainnya, menambah semakin pluralnya masyarakat.

Pluralitas penduduk akan berhubungan dengan budaya mereka karena, manusia yang berkedudukan sebagai penduduk (masyarakat) itu adalah makhluk yang berkebudayaan. Sebagaimana pula justeru penduduk (masyarakat) itulah yang berkedudukan sebagai pendukung suatu kebudayaan tertentu. Karena itu pluralitas kependudukan akan sangat berhubungan dengan kebudayaan.

2. Masyarakat dan Kebudayaan

Masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh Koentjaraningrat (1986:146). Adalah suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu bahwa masyarakat itu terdiri atas sekumpulan manusia yang berinteraksi, dan dalam interaksinya itu mengikuti aturan adat tertentu dan terus menerus dan ketundukannya pada adat istiadat adalah identitas bagi masyarakat itu.

Adat istiadat yang menjadi acuan masyarakat dalam berinteraksi tersebut berarti kebudayaan mereka dalam sebab adat istiadat adalah salah satu unsur kebudayaan. Penempatan interaksi manusia dalam masyarakat yang merupakan perbuatan mereka, juga kebudayaan mereka yang oleh Koentjaraningrat disebut kebudayaan dalam dimensi perbuatan (tingkah laku) ialah sebabnya seperti dikatakan Harsoyo (1984 : 105) bahwa seluruh tingkah laku dan tata kelakuan yang didapat dari pelajaran secara sosial itu, disebut kebudayaan. Sedangkan masyarakat yang berinteraksi atas dasar kebudayaan itu berkedudukan

sebagai kebudayaan mereka.

Dinamika masyarakat dan kebudayaan itu terus berlangsung kontinyu dan kebudayaan mereka ditransper kepada generasi selanjutnya melalui belajar. Hal ini pada gilirannya menunjukkan bahwa suatu masyarakat tertentu mempunyai kebudayaannya yang tertentu pula. Ketertentuan kebudayaan ini lalu menjadi pembela antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dan dari perbedaan itu masing-masing kebudayaan mengenal kebudayaannya sendiri dan pada waktu yang sama juga mengenal kebudayaan lain

3. Pluralitas Kependudukan

Boleh dinyatakan bahwa pluralitas kependudukan dalam masyarakat adalah suatu kenyataan yang sulit dibantah. Pengertian di masyarakat dewasa ini terjadinya pluralita penduduknya dihindari. Bagi masyarakat terbuka misalnya dalam sistem perkawinan, pekerjaan, pendidikan, maupun terhadap faktor-faktor migrasi penduduk lebih memungkinkan kependudukan di masyarakat itu menjadi sangat plural.

Keterbukaan masyarakat tersebut, misalnya dalam sistem perkawinan memungkinkan masuknya anggota (penduduk) masyarakat lain di sana yang berbeda kebudayaannya. Demikian pula melalui migrasi, suatu masyarakat akan didatangi oleh anggota masyarakat lain yang mempunyai kebudayaan sendiri. Misalnya suatu kebudayaan etnik tertentu dimana keberadaannya itu telah menjadi identitasnya sehingga memunculkan identitas etnik (*ethnic identity*) memasuki masyarakat dengan kebudayaan dan identitas etnik tersendiri pula, maka di masyarakat tersebut telah terjadi pluralitas penduduknya.

Pluralitas seperti itu akan semakin besar apabila di suatu masyarakat telah banyak masuk identitas-identitas etnik yang beragam. Keragaman ini bisa tampil lewat bahasa masing-masing etnik, agama, kepercayaan dan bahkan pengalaman masa lalu. Unsur-unsur atau ciri-ciri identitas yang beragam di suatu masyarakat menunjukkan bahwa kependudukan di masyarakat itu betul-betul plural. Gambaran inilah yang disebut dengan pluralitas kependudukan.

4. Kebudayaan dalam Pluralitas Penduduk

Masyarakat plural yang ditamdi dengan pluralitas kebudayaan

anggota masyarakatnya memperlihatkan bahwa disana ada interaksi lintas antar anggota masyarakat. Mungkin pula terjadi penyesuaian diri diantara pendukung kebudayaan yang berbeda itu tatkala ada interaksi tertentu. Misalnya penggunaan bahasa sebagai salah satu unsur kebudayaan antar anggota masyarakat yang berbeda bahasa, satu sama lain, atau salah satu di antaranya menyesuaikan diri dengan bahasa tertentu.

Interaksi lintas budaya dalam masyarakat plural terlihat jelas di masyarakat perkotaan. Dinamika dan mobilitas penduduk perkotaan yang lebih besar itu mengakibatkan keragaman penduduk yang juga besar. Interaksi antar individu sebagai pendukung kebudayaan yang berbeda akan terlihat pada kompleksitas yang unik. Pemahaman terhadap watak tingkah laku individu dalam masyarakat tersebut memang tidak sederhana. Sebetulnya tingkah laku individu tersebut akan lebih jelas dipahami jika dilihat dalam relasi yang dinamis antar individu dan antara individu dengan lingkungan.

Relasi yang dinamis antar individu dalam masyarakat plural tentu amat penting karena dinamisasi itulah yang menampakkan pluralitas itu tidak menjadi hambatan dalam aktivitas sosial. Jika pluralitas itu pada aspek budaya, dan relasi antar individu yang berbeda dukungan budayanya itu terjadi secara dinamis maka interaksi lintas budaya bukan saja tidak terhambat tetapi juga malah menjadi ciri masyarakat baru. Karena itu patut dicari nilai-nilai universal bagi setiap kebudayaan melalui pendukung-pendukungnya.

Setiap kebudayaan memang pasti berbeda dengan kebudayaan-kebudayaan lainnya terutama dalam pandangan pendukungnya. Tetapi didalam perbedaan-perbedaan itu sesungguhnya ada nilai-nilai universal yang sama. Biasanya nilai-nilai yang sama itu berada pada pelataran kebudayaan dalam dimensi kognitif (gagasan, ide, pengetahuan). Boleh jadi tingkah laku (perbuatan) manusia itu berbeda secara fisik berdasarkan kebudayaannya tetapi ide atau pengetahuan tentang perbuatan itu sama. Pemahaman terhadap pluralitas itu mestinya juga menjangkau hal-hal seperti itu: berbeda secara fisik tetapi kemungkinan besar sama dalam ide.

5. Budaya Plural

Jika kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan sistem gagasan,

tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik, diri manusia dengan belajar “(Koentjaraningrat)”, maka eksistensi kebudayaan itu nampak pada setiap dimensinya, yaitu kebudayaan pada setiap dimensi gagasan, kebudayaan pada dimensi tindakan atau kelakuan dan kebudayaan pada dimensi hasil tindakan (kebudayaan fisik). Kaitannya dengan budaya plural, berarti kebudayaan yang dibangun itu adalah pada dimensi-dimensi kebudayaan tersebut yang memihak pada pluralitas karena masyarakat plural adalah kenyataan.

Kebudayaan plural dalam dimensi gagasan adalah bahwa (gagasan-gagasan ide-ide) pendukung suatu kebudayaan tertentu berisi ide, gagasan yang boleh berbentuk pandangan tentang niscayanya pluralitas, gagasan atau pandangan tersebut itulah yang mendorong munculnya kelakuan ke arah tingkah laku plural. Tingkah laku individu-individu yang berpandangan plural itu akan menempatkan individu-individu lain yang berbeda budayanya, sebagai corak “baru” dalam relasi sehingga tidak merasa terhambat. Dari tingkah laku pluralistik itu akan menghasilkan karya-karya “pelangi” baik dalam simbol-simbol interaksinya maupun (apalagi) dalam fisik interaksi itulah sebetulnya masyarakat plural dengan tampilan budayanya yang juga plural.

Demikian pula jika kebudayaan itu diartikan sebagai “keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan yang dihadapi, dan untuk menciptakan serta mendorong terwujudnya kelakuan “(Parsudi Suparlan)” maka budaya plural adalah seluruh pengetahuan manusia yang memihak pada pluralitas budaya dan pendukungnya. Tentu saja manusia sebagai makhluk sosial, keseluruhan pengetahuannya memihak pada pluralitas masyarakat dari pengetahuan yang pluralistik tersebut dapat memahami lingkungan masyarakat yang plural, sehingga dapat terwujud kelakuan yang tidak terhambat oleh pluralitas masyarakatnya.

Budaya plural seperti tersebut di atas mesti memihak salah satu inti pengertian kebudayaan, yakni bernilai relatif. Pengertian adalah bahwa tidak ada jika suatu kebudayaan dinilai oleh kebudayaan lainnya yang kemudian menilai rendah dan tinggi. Nilai yang pada suatu kebudayaan itu menunjukkan nilai-nilai suatu

waktu yang hanya berlaku untuk suatu kelompok sehingga kelompok (kebudayaan) lain tidak bisa menilai. Karena itu *Ruth Benedict* menyatakan bahwa tidak ada suatu kebudayaan itu lebih rendah atau tinggi melainkan masing-masing kebudayaan itu mempunyai nilainya sendiri-sendiri.

Budaya plural mesti memandang bahwa setiap kebudayaan itu sama, tidak ada yang lebih rendah atau yang lebih tinggi. Terhadap suatu kebudayaan itu tidak bisa dipandang pada aspek-aspek fisiknya, atau terhadap simbol-simbolnya saja, melainkan harus pada aspek-aspek substansi, ide dan makna-maknanya. Baik substansi, ide, maupun makna-makna itu hanya bisa digali dari kebudayaan yang bersangkutan. Dengan pandangan seperti ini, sekali lagi pendukung budaya plural tidak pernah merasa terhambat ketika harus berinteraksi atau berlatas terus menerus sekalipun dengan pendukung-pendukung kebudayaan lainnya.

6. Pluralitas di Banten

Mengenai pluralitas di Banten, sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia secara umum dapat dikemukakan bahwa sebelum Banten menjadi provinsi, bahkan sejak zaman kesultanan, kependudukannya memang sudah plural. Meskipun Banten menjadi provinsi itu sejak 1 Oktober 2000, tetapi untuk memahami masyarakatnya mesti dilihat, sebetulnya Banten itu dihitung sejak kerajaan. Pada diskusi-diskusi yang berkembang ada kecenderungan memilih bahwa Banten itu dimulai sejak zaman kesultanan (Maulana Hasanuddin, putera Maulana Syarif Hidayatullah) pada tahun 1525 M. Penentuan ini beralasan bahwa berdirinya kesultanan itu menandai babak baru yang menentukan sejarah Banten pada fase-fase berikutnya. Berdirinya kesultanan dan kerajaan Banten yang berdaulat membawa perubahan-perubahan yang amat radikal bagi Banten. Perubahan-perubahan tersebut meliputi aspek politik, ekonomi dan budaya.

Pluralitas masyarakat Banten itu memang sepanjang sejarahnya. Misalnya etnik Cina dan Arab telah hadir dalam komunitas masyarakat Banten sejak lama berkenaan dengan perkembangan ekonomi dan politik. Kemudian hadir pula etnik-etnik lain dari seluruh nusantara karena ditarik perkembangan ekonomi di Banten sampai sekarang ini. Karena itu cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Banten adalah masyarakat plural.

7. Penutup

Dewasa ini hampir sulit didapatkan masyarakat yang tidak plural. Pluralitas masyarakat sebagai suatu kenyataan yang sulit dibantah di satu pihak dan kemungkinan pertentangan antar pendukung kebudayaan dipihak lain, nampaknya pluralitas menjadi sesuatu yang dikhawatirkan. Supaya pluralitas itu menjadi potensi pengembangan masyarakat, maka perlu ditanamkan adalah budaya plural. Artinya gagasan/ide tentang pengembangan masyarakat didalamnya ada gagasan yang menerima pluralistik menghargai keragaman, dan siap untuk berinteraksi dengan kebudayaan-kebudayaan yang berbeda.

Gagasan ide tersebut mendorong dan mewujudkan perbuatan yang memihak pada pluralistik sehingga dapat mengatasi kesenjangan-kesenjangan komunikasi dan interaksi. Jika demikian, sesungguhnya toleransi itu adalah kesiapan untuk berinteraksi dalam pluralitas lapangan. Karena itu, menempatkan pluralitas kependudukan (masyarakat) sebagai suatu potensi masyarakat berarti menyiapkan masyarakat pada kebudayaan plural.

Banten. 11 Oktober 2003

MENGGUGAT BUDAYA NEOLIBERAL¹

Oleh: **Mubyarto**

1. Pendahuluan

Dalam sejarah nasional Indonesia akan dikenal 6 periode “Kebangkitan Nasional” sebagai berikut:

I.	1879		Kebangkitan Kartini
II.	1908	29 th	Boedi Oetomo (BO)
III.	1928	20 th	Sumpah Pemuda
IV.	1945	17 th	Proklamasi
V.	1966	21 th	Orde Baru
VI.	1998	32 th	Orde Reformasi

Periode Kebangkitan Nasional dari yang satu ke yang lain tidak sama. Yang terpendek adalah 17 tahun, dan yang terpanjang adalah 32 tahun dengan rata-rata 24 tahun atau kira-kira 1 generasi. Tentu menarik untuk menganalisis mengapa Orde Baru dapat bertahan paling lama dan mengapa periode kebangkitan nasional sebelum kemerdekaan cenderung memendek. Orde Baru bertahan 32 tahun karena kuncinya pada “kestabilan politik”, sedangkan selama *reformasi* mulai 1998 Presiden (dan kabinet) hanya bertahan rata-rata kurang dari 20 bulan, dan pada tahun-tahun awal kemerdekaan hanya 12 bulan.

2. BO dan Sumpah Pemuda

Dari ke-6 periode “kebangkitan nasional”, kebangkitan nasional ke-2 yaitu *Boedi Oetomo* (1908) dan ke-3 yaitu *Sumpah Pemuda* (1928) adalah paling erat keterkaitannya, bahkan orang biasanya menganggap keduanya merupakan 1 mata rantai yang runtut berurutan. BO yang sebenarnya *merupakan* kelahiran gerakan politik paling awal terpaksa “disembunyikan” oleh tokoh-tokoh pemimpinnya sebagai gerakan *sosial-budaya* supaya rapat-

¹ Makalah Kongres Kebudayaan V, Bukittinggi, 19-23 Oktober 2003.

rapatnya memperoleh ijin dari pemerintah penjajah. Ketika tahun 1913 Suwardi Suryoningrat menulis "*Seandainya aku orang Belanda*" dan partainya *Indische Partij* dibentuk, maka serta-merta Suwardi ditangkap dan partainya dibubarkan.

BO sebagai gerakan kebangsaan juga penting untuk dicatat karena garis politik perjuangannya adalah ingin membela dan memperjuangkan kepentingan *wong cilik* (orang kecil, *ekonomi rakyat*), yang dalam proses pembangunan ekonomi liberal mulai 1870 semakin miskin padahal orang-orang Belanda bertambah kaya. Perlu dicatat hasil survey di Hindia Belanda tentang "kemerosotan kesejahteraan" (*declining welfare*) pada akhir abad 19 yang melahirkan "politik etik" tahun 1905 tentang tri E/ I, (*edukasi, irigasi, emigrasi*). Sebagaimana dilaporkan kemudian, ke-3 program "anti kemiskinan" ini ternyata "diselewengkan" demi kepentingan perusahaan-perusahaan besar dan sama sekali tidak untuk mengurangi kemiskinan penduduk pribumi.

3. Plus-Minus Kebangkitan Orde Baru

Ketika bangsa Indonesia memperingati 80 tahun BO, dan 60 tahun SP (Sumpah Pemuda) tahun 1988, banyak tulisan yang bernada "puas" dan "optimistik" tentang hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama 4 Repelita (1969-1989) yang telah mampu membawa pembangunan Indonesia sampai tahap *tinggal landas*. Namun,

*Kunci maknanya terletak pada naik mengangkasa **dengan kekuatan sendiri**.... Ia diperkirakan dan diharapkan akan mampu pula menghadapi tantangan dan ancaman berbagai corak cuaca sehingga memungkinkannya untuk terbang **dengan selamat**. Oleh karena itu sewaktu tinggal landas pesawat itu harus **betul-betul sudah siap**... kalau tidak, kapal terbang tersebut akan **mengalami kecelakaan**....²*

² Hadi Supeno, Reaktualisasi Kebangkitan Nasional Menuju Tinggal Landas: Perlunya Nasionalisme Baru dalam Transformasi Ilmu dan Teknologi, Pet Parmono (perangkum) *Kebangkitan nasional*, PWI Pusat, 1990, hl. 58.

Tidak cukup jelaskah “peringatan” tentang persyaratan tinggal landas yaitu harus “dengan kekuatan sendiri” yang kalau tidak betul-betul siap pembangunan “akan mengalami kecelakaan”? Jika kita catat benar-benar peringatan diatas, maka optimisme yang nampak berlebihan pada awal *Repelita VI* (1994-1999) bahwa pembangunan Indonesia sudah memasuki tahap *tinggal landas*, padahal belum semua persyaratan terpenuhi, termasuk dan terutama, ketergantungan pada *utang-utang luar negeri*, maka semestinya kita tidak perlu terkejut ketika “pesawat mengalami kecelakaan” yaitu dalam bentuk terjadinya *krismon* 1997-1998. Memang *krismon* menjadi lebih berat lagi daya rusaknya karena pada saat-saat terakhir menjelang *krismon* banyak pakar-pakar ekonomi kita, dan sejumlah pakar ekonomi asing, masih terlalu percaya bahwa Indonesia “tidak mungkin” mengalami krisis utang.

*Indonesia is **not** facing an imminent debt crisis... Indonesia's principal macroeconomic indicators bear little resemblance to those in Mexico before 1994 crisis. If recent economic trends continue, Indonesia's debt burden should ease gradually, even if they do not, adequate resources are available to finance even fairly significant balance of payments shocks until appropriate adjustments measures can be introduced.*³

Demikian salah satu kesimpulan penting dari ketelanjuran pembangunan Indonesia adalah “ketidaksabaran” dalam membangun ekonomi dan terlalu percaya (*over confidence*) bahwa “melalui pertumbuhan ekonomi tinggi semuanya akan beres”, meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi harus dicapai melalui “banjirnya modal asing” dalam bentuk pinjaman ataupun investasi (FDI). Pemerintah di bawah pengaruh para teknokrat, rupanya tidak khawatir sama sekali akan bahaya yang ditimbulkan utang-utang yang menumpuk (*overborrowing*). Deregulasi dan liberalisasi dalam aturan keluar-masuknya modal telah dibuat “terlalu bebas” sampai-sampai seorang tokoh teknokrat anggota pemerintah terkejut sendiri ketika ekonomi

³ Redelet, Steven, *Indonesian Foreign Debt: Headed for Crisis or Financing Sustainable Growth?* BIES, Vol. 31. No. 3, Dec 1995, p. 40.

Indonesia telah menjadi sangat liberal.

In this precarious state, the government took the bold move of removing all restrictions on the flow of capital into and out of the country. Indonesia's laws governing the flow of capital thus become some of the most liberal in the world, more so even than those of many of the most developed countries.⁴

Demikian kesimpulan kita tentang periode “kebangkitan nasional” Orde Baru adalah bahwa 32 tahun era pembangunan ekonomi telah “menjawab secara tepat” keprihatinan Soedjatmoko tahun 1954, bahwa “bangsa Indonesia telah mengabaikan sama sekali perlunya pembangunan ekonomi dan hanya memikirkan pembangunan politik”.⁵ Begitu kesempatan membangun ekonomi muncul, Indonesia tidak setengah-setengah tetapi melakukannya dengan “sepenuh hati” (*all out*) yaitu dengan cara mengundang modal asing secara besar-besaran (UU PMA), sampai-sampai menjadi kebablasan. Akibatnya ekonomi Indonesia “kembali dijajah” oleh ekonomi asing. Inipun pada tahun 1988 sebenarnya sudah diperingatkan, namun rupanya diabaikan oleh para teknokrat kita.

*Perkembangan sejarah mengajarkan kepada kita bahwa hakikat penjajahan yaitu **penghisapan** satu bangsa oleh bangsa yang lain tidak berhenti, setelah masa kemerdekaan tiba. Hakekat penjajahan itu tetap berlangsung hingga kini dalam bentuk yang lebih halus, lebih sopan, tetapi lebih kuat **daya hisapnya**, dan lebih sulit melawannya. Bentuk yang paling umum dari penjajahan model baru ini adalah penjajahan ekonomi diantaranya melalui cengkeraman Multi National Corporation.⁶*

⁴ Radius Prawiro, 1998, *Indonesia's Struggle for Economic Development: Pragmatism in Action*, Oxford UP, op.cit., p.90.

⁵ Soedjatmoko, 1954, *Economic Development as A Cultural Problem*, Cornell University.

⁶ M. Ridlo Eisy, 1990, *Perjuangan Nasional Perbaikan Nasib Rakyat, Kebangkitan Nasional*, PB PWI, op.cit., hal 21.

4. Warisan Sistem Ekonomi yang “Menghisap”

Sejak otonomi daerah dilaksanakan mulai Januari 2001 terjadilah semacam “perebutan” rezki antara pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah, dan antara pemerintah-pemerintah daerah (khususnya Kabupaten/kota) yang bertetangga. Karena dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah adalah Perda-perda disamping UU No. 22 dan No. 25/1999, maka pemerintah-pemerintah daerah bersama DPRD menyusun berbagai Perda, yang jika menimbulkan konflik dengan kepentingan pemerintah pusat, pemerintah pusat *dhi* Departemen Dalam Negeri “menegur” Pemda yang bersangkutan atau ada daerah-daerah yang secara tegas diminta untuk “mencabut Perda-perda bermasalah”.

Banyak daerah, terutama yang kaya sumber daya alam, di masa lalu merasa dihisap kekayaannya oleh pemerintah pusat, atau oleh investor dari luar. Nilai dan tingkat “penghisapan” ini dapat ditaksir. Salah satu cara menghitung atau menaksirnya adalah dengan membandingkan nilai PDRB (per kapita) dengan nilai pengeluaran konsumsi per kapita. Dengan asumsi tidak ada tabungan (*saving*), jika nilai PDRB per kapita jauh lebih tinggi dibanding nilai pengeluaran konsumsi penduduknya, maka berarti sebagian besar PDRB tidak dinikmati oleh penduduk setempat. Dengan perkataan lain sebagian PDRB memang “dikirimkan” kepada pemiliknya yaitu investor dari luar daerah, yang bisa beralamat di ibu kota atau di luar negeri.

Tabel 1 menunjukkan “derajat penghisapan” daerah provinsi tahun 1996 dan 2000. Terlihat jelas untuk tahun 1996 provinsi-provinsi yang paling kaya sumber daya alam yaitu *Kalimantan Timur, Riau, dan Irian Jaya*, derajat penghisapannya tinggi, masing-masing 87%, 80%, dan 78%. Artinya dari setiap 100 nilai PDRB, bagian yang dinikmati penduduk setempat hanya 13% (Kaltim), 20% (Riau), dan 22% (Irian Jaya) dan selebihnya dinikmati investor dari luar. Provinsi DKI Jakarta yang menjadi pusat peredaran uang Indonesia ternyata juga “dihisap” pemodal dari luar negeri yaitu 72%, atau hanya 28% yang dinikmati penduduk DKI Jakarta sendiri.

Adalah menarik membandingkan derajat penghisapan nasional tahun 1996 dan tahun 2000. Ternyata, dapat diduga, bahwa krisis moneter 1997-1998 yang mengakibatkan

“hengkangnya” banyak modal asing (ditaksir USD 10 milyar per tahun sejak 1997), berdampak positif yaitu menurunnya “derajat penghisapan” terhadap ekonomi Indonesia. Di Irian Jaya “derajat penghisapan” menurun deras dari 78% ke 52%, untuk Riau turun dari 80% ke 72%, Kaltim dari 87% ke 76%, dan secara nasional penghisapan turun dari 61% menjadi 52%.

$$\text{“Penghisapan” Ekonomi} = \left(1 - \frac{\text{Konsumsiperkapita}}{\text{PDRBperkapita}}\right) \times 100\%$$

5. Persatuan, Kesatuan, dan Nasionalisme.

Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang dokter pribumi Jawa dari Mlati, Yogyakarta, tokoh di balik pembentukan BO di Jakarta 1908, pernah menyatakan sebagai berikut:

Manawa bangsa kita bisa idu bareng, landa sing ana kene mesti mati keleleb kabeh (kalau bangsa kita dapat meludah bersama, maka penjajah Belanda yang ada disini pasti semua tenggelam).⁷

Ucapan yang menganjurkan nasionalisme dan dikukuhkannya persatuan dan kesatuan inilah yang akhirnya berhasil “membakar” semangat pemuda dari berbagai daerah di Indonesia tahun 1928.⁸

Satu: Kami putera dan puteri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Air Indonesia.

Dua: Kami putera dan puteri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia.

Tiga: Kami putera dan puteri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

Semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tidak pernah muncul selama penjajahan 350 tahun kemudian berhasil

⁷ G. Sunaryo, Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Peranannya dalam kebangkitan Nasional dalam *Kebangkitan Nasional*, PP-PWI 1990, h. 126.

⁸ Harpalis Alwi, *Dibutuhkan Semangat Kebangkitan Nasional Baru, Kebangkitan nasional*, PP-PWI, 1990, h. 35.

digugah dan digelorakan dalam berbagai tahap kebangkitan nasional terutama tahun-tahun 1908 dan 1928 dengan tokoh-tokohnya Sutomo, Gunawan, dan Tjipto Mangunkusumo, disusul pendirian *National Indische Partij* oleh dr. Tjipto Mangunkusumo, Suwardi Suryoningrat (Ki Hajar Dewantara), dan dr. Dows Dekker. Tahun 1912 Haji Samanhudi mendirikan *Sarekat Dagang Islam* (Solo), KH Ahmad Dahlan mendirikan *Muhammadiyah* (Yogyakarta) dan Dwijo Sewoyo dan kawan-kawan mendirikan *Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera* di Magelang, semuanya bertekad “mengusir penjajah” dari Indonesia dengan cara berbeda-beda di bidang politik, ekonomi, dan pendidikan. Para pejuang perintis kemerdekaan ini tidak gentar menghadapi ancaman-ancaman kekuasaan penjajah dan tidak sedikit yang ditangkap, diadili, dan dipenjarakan. Suwardi Suryoningrat menulis *Als ik een Nederlander was* (Seandainya aku orang Belanda), 20 Juli 1913 yang memprotes keras rencana pemerintah jajahan Belanda merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda di Hindia Belanda. Karena tulisan inilah dr. Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryoningrat dihukum dan diasingkan ke Banda dan Bangka, tetapi “karena boleh memilih”, keduanya “dibuang” ke Negeri Belanda. Di sana Suwardi justru belajar ilmu pendidikan dan dr. Tjipto karena sakit dipulangkan ke Indonesia.⁹

Sesudah kemerdekaan semangat nasionalisme sering diuji berupa kritik-kritik terhadap pemerintah dalam kebijakan berutang luar negeri. Tidak jarang sejarah jaman penjajahan berulang di jaman kemerdekaan dengan ditangkap dan dipenjarakannya tokoh-tokoh yang dianggap menentang pemerintah. Selama Orde Baru banyak tokoh-tokoh cendekiawan yang mengkritik pemerintah “*dipersona-non gratakan*”, meskipun banyak yang belakangan terbukti kritikan-kritikannya benar. Seandainya kritik-kritik yang dilancarkan diperthatikan mungkin banyak kesalahan-kesalahan kebijakan dapat dihindarkan.

Kini setelah krisis keuangan dan krisis perbankan berlangsung lebih dari 5 tahun sejak 1997, setelah 4 kali pergantian presiden, banyak yang menyesalkan telah diabaikannya kritik-kritik keras tentang peranan utang dan modal

⁹ Sebuah Renungan, *Teori Kebangkitan Nasional*, PP-PWI, 1990, hal. 59-63.

asing. Bahkan meskipun MPR sudah “memerintahkan penghentian program kerjasama dengan IMF, pemerintah dibawah pengaruh teknokrat-teknokrat ekonomi yang berpandangan Neoliberal ke-Barat-baratan (Amerika) sulit melepaskan diri dari cengkeraman IMF, dan memutuskan memilih program “pemandoran” (PPM).

6. Kesimpulan

Kebangkitan Nasional ke-6 kini sedang berproses dalam bentuk *reformasi* di segala bidang. *Reformasi* yang sudah berjalan lebih dari 5 tahun ini berlangsung amat lamban, banyak yang menyatakan telah melenceng, bahkan ada yang menyatakan telah “mati suri”, dilupakan sebelum mencapai hasil.

Dalam bidang ekonomi reformasi tidak mencapai hasil karena keengganan mengoreksi kebijakan dan strategi yang keliru termasuk teori-teori yang mendasarinya. Para teknokrat bersikukuh tidak ada yang salah dalam teori-teori ekonomi yang diacu untuk menyusun kebijakan-kebijakan. Menurut mereka yang salah adalah pelaksanaannya, sampai-sampai seorang pemenang Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz merasa perlu menyatakan dengan tandas,

*Textbook economics may be fine for teaching students, but not for advising governments ... since typical American style textbook relies so heavily on a particular intellectual tradition, the neoclassical model.*¹⁰

Alangkah tragis nasib bangsa dan ekonomi Indonesia setelah 58 tahun merdeka, yang begitu percaya sudah akan memasuki tahap “*tinggal landas*” pada tahun-tahun 1993-1998 (Repelita VI), tetapi justru kemudian menabrak batu karang sangat tajam yang nyaris menenggelamkannya, atau terkena badai krismon yang nyaris menghancurkannya.

¹⁰ Chang Ha-Joon, (ed), *Stiglitz and the World Bank: The Rebel Within*, 2001: 130).

Selama pakar-pakar ekonomi Indonesia yang *ke-Barat-baratan* dan menganut paham neoliberal tidak mengakui kekeliruan-kekeliruan ini, dan terus-menerus bersikukuh menyarankan dan menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi konvensional yang terlalu tunduk pada hukum-hukum ekonomi global-neoliberal, yang jelas-jelas lebih menguntungkan negara-negara industri maju, dan merugikan ekonomi rakyat kita, maka selama itu pula ekonomi nasional Indonesia akan tetap rapuh.

Daftar Pusaka

AR. Baswedan

1974 *Sumpah Pemuda Indonesia Keturunan Arab*, Pers Nasional, Surabaya.

Chang, Ha-Joon, ed.

2001 Stiglitz and the World Bank: *The Rebel Within*, Anthem Press.

Christianto Wibisono, dkk.

1982 *Sejarah Pergerakan Pemuda di Indonesia: Periode Mempertahankan Kemerdekaan*, Dep. P&K.

Ekins, Paul & Manfred Max-Neef

1992 *Real-Life Economics*, Routledge London – New York.

J. Th. Petrus Blumberger

tt *De Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indie*, 1931, HD Tjeenk Willink & Zoon Haarlem.

Nelson, Robert.

2001 *Economics As Religion*, University Park PA, The Pennsylvania State University Press.

Pet Parmono (perangkum)

1990 *Kebangkitan Nasional*, PP-PWI, Jakarta.

Radius Prawiro

1998 *Indonesia's Struggle for Economic Development*, Oxford UP, Singapore.



Soedjatmoko

1958 *Economic Development as A Cultural Problem*,
Modern Indonesia Project Southeast Asia Program,
Cornell University, Ithaca.

Yoran Anwar, dkk

1982 *Sejarah Pergerakan Pemuda di Indonesia: Periode
Mengisi Kemerdekaan*, Dep P&K.

20 Oktober 2003

INDUSTRI BUDAYA KITA DAN SEJUMLAH PERTANYAAN

oleh: N. Riantiarno

Mengupas permasalahan industri, sangatlah kompleks. Demikian pula pengupasan mengenai budaya atau kebudayaan. Maka sudah bisa dibayangkan betapa berkali lipat kompleksnya permasalahan (apa lagi, terutama, jika menyangkut Indonesia), begitu kedua masalah itu digabung menjadi satu pengertian; industri budaya!

Jika dipaksakan juga mengupasnya dalam kertas makalah beberapa halaman, maka mari kita bersiap memasuki rimba belantara yang mustahil, kesalahkaprahan yang sering tidak masuk akal dan yang makin lama semakin fatal. Di Indonesia terutama, kesalahkaprahan menjadi lengkap ketika pemahaman industri budaya lebih sering diartikan hanya demi kepentingan pariwisata saja. Suatu tindak lanjut dari 'politik devisa' yang, salah satunya, dengan enteng telah mengubah-ubah hari raya (bahkan yang punya hubungan dengan religi) menjadi sebuah hari libur belaka.

Istilah industri budaya (*Culture Industry*) pertama kali muncul dalam buku *Dialectic of Enlightenment*, yang diterbitkan oleh Theodor Adorno dan Max Horkheimer di Amsterdam, 1947. Istilah sebelumnya, 'kebudayaan massa'. Suatu kebudayaan yang muncul secara spontan dari massa itu sendiri, bentuk kontemporer dari kesenian populer. *Culture Industry* memadukan kebudayaan masa lampau yang sudah dikenal dengan kualitas baru. Dikemas untuk konsumsi massa, hadir tanpa pemaksaan atau keterpaksaan, dan direncanakan.

Menurut Adorno, 'kesenian adiluhung' (*high art*) dan 'kesenian rakyat' (*low art*) terpisah atau dipisahkan secara nyata sejak ribuan tahun yang lalu. Ada jarak tak terjangkau antara keduanya. Tapi kesenian 'adiluhung' berangsur musnah akibat spekulasi terhadap keampuannya sendiri. Terutama karena adanya anggapan (mentalitas) bahwa kehadirannya adalah given dan 'tak bisa diubah-ubah'. Memang harus seperti itu pakemnya. Siapa yang mengubahnya bisa kualat. Dan kesenian rakyat berangsur binasa pula karena perubahan masyarakatnya,

kebijakan politik dan/ atau lantaran perkembangan teknologi.

Tak perlu bercuriga terhadap industri budaya kata Adorno lagi. Sebab, massa bukanlah yang utama. Massa hanya obyek dari kalkulasi, bukan subyek dari kreatifitas. Massa Cuma sekunder, embel-embel. Dalam hal ini, konsumen (massa) bukan raja, seperti yang diibaratkan para pedagang. Pandangan atau pendapat konsumen (massa) bukan ukuran baku bagi bagus buruknya hasil dari kebudayaan. Justru hasil (produksi) dari kebudayaan itulah yang harus mampu memberikan pengaruh kepada massa, karena memang memiliki nilai (*value able*).

Sehungan dengan urusan *culture industry* itu, beberapa massa kemudian UNESCO mematok 'fokus utama bagi kebudayaan massa depan'. Termasuk diantaranya; penerbitan, teknologi audio visual, elektronik, vidio games dan internet. Lalu khusus di Indonesia apa sesungguhnya industri budaya itu?

Industri adalah; perusahaan untuk membuat atau menghasilkan/ memproduksi barang-barang (KBBI). Industri berhubungan erat denga ekonomi (modal, tenaga kerja, pasar, neraca rugi laba). Kita mengenal industri berat, madya dan industri kecil. Masing-masing mempunyai produksi yang berbagai-bagai pula.

Tapi Adorno juga menyebut dalam hubungannya dengan industri budaya (meski tetap ada kalkulasi modal-SDM-pasar-rugilaba), sebaiknya tidak terlalu mencurigai kata industri itu. Tidak mengartikannya secara harfiah, tetapi lebih dipahami sebagai standarisasi kualitas. Dia mencontohkan seperti dalam produksi film. Yang direncanakan dan ditangani adalah teknik pendistribusiannya, dan bukan proses produksinya (yang memang berhubungan dengan proses kreatif para senimannya).

Budaya adalah pikiran, akal budi (KBBI). Atau hal-hal yang bersangkutan dengan akal, yang jika dirangkum menjadi suatu definisi, maka budaya atau kebudayaan adalah keseluruhan system gagasan, tidnakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Kuncaraningrat). Jadi apa yang ada di dalam dan di luar diri manusia adalah kebudayaan. Yang terasa ada meski tak berwujud dan yang hadir kongkret.

Menurut Kuntjaraningrat, kebudayaan di mana pun, memiliki tiga wujud, yakni;

(1) suatu kompleks gagasan, nilai, norma, peraturan

(2) suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat

(3) benda-benda hasil karya manusia

Kuncaraningrat menyebut pula adanya tujuh unsure kebudayaan universal, yaitu;

(1) sistem peralatan dan perlengkapan hidup/teknologi

(2) sistem mata pencaharian

(3) sistem kemasyarakatan/ organisasi sosial

(4) bahasa

(5) kesenian

(6) sistem pengetahuan

(7) sistem religi

Sedangkan menurut Spradley; kebudayaan mengacu pada pengetahuan yang diperoleh manusia yang digunakannya untuk menginterpretasikan pengalamannya dan menghasilkan tingkah laku. Secara lebih rinci Suparlan menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan "serangkaian aturan, petunjuk, resep, rencana dan strategi yang terdiri atas serangkaian model kognitif yang digunakan secara selektif oleh manusia yang memilikinya sesuai dengan lingkungan yang dihadapinya" (Ensiklopedi Indonesia)

Lalu, apa tujuan dari budaya atau kebudayaan? Salah satunya "memuliakan kedudukan manusia (yang berakal budi) sebagai makhluk ciptaan Yang Maha Kuasa."

Mengacu pada definisi Kuncaraningrat, Spradly dan Suparlan, maka Industri pun termasuk sebagai bagian dari kebudayaan. Demikian pula "pariwisata!" Selain berusaha menjual alam, promosi pariwisata juga menawarkan kesenian dan/atau kebudayaan dari masyarakatnya. Pengelolaan dan pelayanan yang baik akan menjadikannya sebagai paket terpadu, sebagai "three in one" yang memancarkan daya tarik tertentu serta saling melengkapi. Kegiatan menjual dan pelayanan adalah salah satu aktivitas manusia (gagasan, tindakan dan hasil karya), dan yang terjadi setelah pembelajaran. Suatu pengembangan dari sistem pengetahuan.

Tapi catatan ini tidak dimaksudkan untuk menuju ke arah terjadinya perdebatan mengenai definisi kebudayaan (dan industri dan pariwisata). Dan pula bukan untuk memantik api perdebatan dari teori 'industri budaya itu sendiri. Cukup sudah kita berfikir, berteori, berbicara. Sebab jika hanya itu saja hasilnya kita sudah tahu, pikiran-pikiran dari teori itu akan jadi berkas-berkas kertas,

yang bertumpuk di gudang departemen, kemudian berdebu Karen tak pernah disentuh lagi. Sampai kemudian ada sebuah forum lagi. Dan kita bicara lagi, berada pikiran lagi, lalu dilupakan lagi. Demikian terjadi berulang kali, seakan hanya berputar-putar di tempat saja. Di Lingkaran yang tidak masuk akal, tanpa jalan pikiran. Labirin.

Yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan! Persoalan yang di depan kita, yang kongkret, yang perlu penanggulangan segera, itu yang saat ini paling utama. Para pelaku kesenian-kebudayaan tahu dan merasakan apa permasalahan yang tengah dihadapi. Sebab mereka ada di front terdepan, di dalam permasalahan di lapangan penuh lumpur dan keringat, menghadapi berbagai kenyataan yang jaung dari panggung dari api. Bukan di ruang ber-AC, berjas dan berdasi, bersih dari keringat dan Lumpur, duduk menghadapi meja yang bersih, hanya memandangi peta kebudayaan sambil menghitung-hitung anggaran dari proyek-proyek. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, ini persoalan hidup dan matinya kebudayaan kita (Indonesia).

Tapi, jikapun perdebatan terjadi, semoga bertujuan mendudukan soal ke posisi yang sebenarnya. Dan, kemudian, disusul dengan upaya pencarian jalan keluar tanpa dipengaruhi oleh target-target, kekuasaan politik yang sementara sifatnya dan pendek durasi kekuatannya, juga kepentingan sepihak para pejabat/ birokrat. Dan semoga akan melahirkan berbagai peristiwa 'pewarisan' yang berangkat dari akar kemandirian para pemilik kebudayaan (yang senantiasa mengupayakannya agar tetap hidup dan berkembang sesuai dengan lingkungan yang dihadapinya).

Juga, tulisan ini tidak bermaksud hanya menyajikan *visi* dan *misi* (seperti yang biasaterjadi), lalu ditutup dengan rekomendasi-rekomendasi (untuk proyek-proyek) yang harus segera ditindaklanjuti. Sehingga anggaran pemerintah bisa lekas cair. Dengan sejumlah uanga komisi, pengaruh politik, atau promosi jabatan elit. Dan, hanya itu.

Kita tengah menghadapi persoalan amat rumit. Amit-amit. Jangan sampai 'industri budaya' hanya diamini sebagai rahim subur pelahir proyek-proyek. Yang konon, demi devisa. Sambil berharap hasil *visi* dan *misi* menjadi primadona pendapatan negara. Tapi sebagian hasilnya masuk kantong pribadi. Jangan sampai jadi 'industri budaya'.

Catatan ini mungkin berisi asumsi-asumsi. Sekaligus

pemaparan sejumlah kasus, dari yang sederhana sampai yang ruwet. Kasus-kasus yang muncul dan hadir dari pengalaman lapangan, pengamatan dan wawancara informal.

Ada pula berbagai pertanyaan yang mau tidak mau akan menggumpal jadi suatu pertanyaan besar; "Siapa yang sesungguhnya bertanggungjawab terhadap pewarisan kebudayaan Indonesia? Dan hendak dibawa ke mana modal (kekayaan budaya) yang sudah dimiliki oleh nenek moyang kita sejak dulu kala itu?"

Sayangnya, pertanyaan serupa itu sering kali dianggap sebagai semacam gangguan, yang tidak memperoleh jawaban dan hanya menjadi gaung saja. Hingga sekarang.

Industri budaya boleh saja dianggap sebagai sub tema dari masalah budaya atau kebudayaan secara keseluruhan. Meski sesungguhnya dia justru sebuah tema besar yang kompleks. Memiliki latar belang, isi, pelaku, wujud dan tujuan/ sasaran, berhak memperoleh pembinaan (bukan pembinasakan) yang tanpa *vested interest* dan berhak berkembang dinamis. Semua itu jelas bersangkut paut dengan berbagai hal. Pasti sesuatu yang mudah menentukan fokusnya agar lebih tajam.

Tapi sebelum itu marilah kita tengok dulu berapa sesungguhnya modal budaya atau kekayaan kebudayaan yang kita (Indonesia) miliki sekarang ini.

Indonesia dihuni oleh sekitar 660 suku bangsa. Dari Sabang di Utara Sumatera hingga Merauke di Papua, dari Sangihe Talaud di Selatan Philipina hingga Waingapu-Sumba yang dekat dengan benua Australia. Mereka mendiami 6.850 pulau dari sekitar 13.700 pulau yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Berbagai perubahan yang terjadi belakangan ini memungkinkan jumlah itu bisa bertambah atau bahkan berkurang.

Kenyataan di atas jika diurai lagi maka sesungguhnya kita memiliki sekitar 660 bahasa, dengan dialek yang pasti lebih dari jumlah itu. Kita juga memiliki 660 ragam kebudayaan (bahkan lebih) dan jenis kesenian yang tentu lebih dari jumlah 660 itu. Disamping itu kita juga memiliki sekitar 660 hukum adat yang lahir dan hadir sebagai representasi dari kebijaksanaan (*wisdom*) local masing-masing daerah.

Pertanyaannya; hendak diapakan sejumlah 'kekayaan' atau sebut saja 'harta karun kebudayaan' yang sangat luar biasa itu? Adakah kebijakan politik kebudayaan untuk menanganinya, sebelum terlambat, sebelum satu-persatu mati atau musnah

taka berbekas? Siapa yang wajib bertanggung jawab? Pemerintah? Tentu. Apakah—khusus dalam hal ini—Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata? Atau para seniman dan budayawannya sendiri yang wajib bertanggung jawab, mereka yang bahkan untuk hidup sehari-hari pun sedah sedemikian tersengal-sengal?

Satu pertanyaan lagi, adakah anak-anak kita (atau bahkan kita sendiri) tahu bahwa di kawasan perbatasan Papuanigini dekat aliran sungai Digul, Kabupaten Merauke ada saudara-saudara kita dari suku Wanggom, dengan populasi hanya 1000 jiwa? Di Papua, juga ada suku Walsa (populasi 1.100 jiwa), atau suku Woriasi (populasi 2.000 jiwa), dan juga suku Wambon (populasi 2.000 jiwa). Menurut Zulzani Hidayah (Ensiklopedi suku bangsa di Indonesia, LP3ES), cacah jiwa itu dilakukan oleh para peneliti asing dan Depsos pada sekitar tahun 1984 dan 1985. Dan setelah 18 tahun berlalu (2003), adakah mereka masih sejumlah itu, atau malah berkurang, mengingat hidup di kawasan Papua sangatlah keras dan sukar? Tragisnya, kita bahkan tidak tahu apakah saat ini mereka masih ada.

Betapa pun sederhananya, pastilah suku bangsa di Papua (dengan populasi paling banyak 2.000 jiwa) itu, memiliki kebudayaannya sendiri. Menjalani ketujuh unsure 'kebudayaan universal'nya sendiri. Yang khas dan mandiri. Tapi ibarat buku, mereka belum sempat terbaca, masih tersembunyi di sudut rak yang berdebu. Padahal mereka adalah bagian dari kekayaan kebudayaan Indonesia. Lalu siapa yang akan membaca 'buku itu' dan memberi tahu kepada kita bahwa mereka ada? Ada bukan sekedar sebagai 'cacah jiwa' tapi ada sebagai kebudayaan? Manusia.

Industri Budaya, dalam hal ini kesenian (dan lebih khusus lagi, seni musik), kalau toh ada, hanya terjadi di kota-kota besar. Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Solo, Denpasar, Medan, dan beberapa kota di luar Jawa dan Sumatera. Kegiatannya berupa lembaga pendidikan musik (usaha swasta dan pemerintah), atau pentas-pentas (pop-roch-jazz-orkestra) dari para seniman local, nasional maupun global.

Usaha perekaman musik (lagu-lagu) dan penggandaannya juga marak, terutama, lagi-lagi di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Pasar sudah tercipta. Juga konsumennya. Bukan hanya musik pop-roch-jazz-klasik saja yang digandakan dan

dipasarkan, bahkan musik rakyat/daerah/tradisi dan cerita wayang pun memiliki konsumennya sendiri. Musuh utama penggandaan resmi (sehubungan dengan urusan pemungutan cukai dan perkara pidana) adalah pembajakan, yang hasilnya dijual lebih murah dari harga aslinya. Beberapa gebrakan 'anti pembajakan' yang bermaksud membuat jera para pembajak, nampaknya belum efektif. Hasil bajakan masih bebas dipasarkan di kios-kios kakilima, bahkan di mal dan plasa-plasa.

Pentas-pentas musik akbar biasanya bermodal besar. Kadang berhasil meraih keuntungan kakap tapi seringkali jeblok karena merugi (baik dari perolehan tiket ataupun dukungan sponsor). Sebagian besar para penyelenggara pentas musik itu bukan pemerintah. Swasta. Bisa perusahaan EO (Event Organizer), atau ditangani langsung oleh manajemen dari merek produk terkenal. Jika yang diusung adalah nama-nama beken, apalagi yang sudah mendunia, maka sponsor berdatangan seperti lebih mengisap madunya kembang. Pada saat acara digelar, kawasan pagelaran dipenuhi spanduk dan umbul-umbul dari pihak sponsor. Banner acara mengepung kota. Kalau Jakarta menjadi tempat tujuan pertama, sesudah itu biasanya mereka akan tur ke kota-kota lain. *Audience* seperti semut merubung gula.

Pentas-pentas musik yang lebih serius, biasa digelar untuk kalangan terbatas. Bisa di pusat kesenian (di Jakarta; di TIM dan Gedung Kesenian Jakarta yang milik Pemda) atau pusat-pusat kebudayaan asing.

Pemerintah juga sering membikin pagelaran musik kolosal (biasanya digabung dengan tari dan tablo). Terutama yang dikaitkan dengan perayaan-perayaan khusus kenegaraan. Penuh *visi* dan *misi*. Biayanya, basanya sangat besar. Dan hanya untuk sehari saja (atau beberapa jam saja). Masyarakat menyebutnya 'pagelaran kesenian dalam rangka'. Musik, terutama pop, memang bisa hidup mandiri tanpa mengharap uluran tangan pemerintah, kecuali perizinan. Mereka berhasil menggalang investasi dari pihak swasta, sekaligus mampu menciptakan mesin uang dan *networking*. Selain bikin pagelaran, kadang mereka juga merekam dan menggandakan hasil rekamannya untuk dijual. Baik pada saat pementasan berlangsung atau sesudahnya. Ini bisa disebut usaha bisnis dari hulu ke hilir. Sebagai sebuah industri budaya, kawasan musik (pop) pada

kenyataannya sudah berjalan dan 'menjadi'.

Pertanyaannya; adakah pemerintah (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, atau departemen lain yang terkait), memikirkan sarana agar konsidi yang sudah bagus itu bisa lebih berkembang? Misalnya, apakah tak pernah terpikirkan membangun sebuah *amphitheater* yang memadai untuk kebutuhan itu? Pihak swasta mungkin bisa dilibatkan sebagai rekan dalam urusan pendanaan,. Tapi jelas, tidak perlu dilibatkan dalam kebijakan keseniannya.

Setiap pagelaran musik (baik nasional maupun dunia), tidak punya pilihan lain. Jika berharap menjaring audience sekitar 4000, msks pilihan venue pagelaran adalah Jakarta Convention Centre. Padahal bangunan itu bukan dimaksudkan sebagai gedung pertunjukan yang criteria akustiknya memenuhi syarat. Dan jika audience lebih dari 4000, missal 10.000 atau lebih, maka pilihannya kalau tidak di Istora, Tennis Indoor, Gelora Bung Karno, atau Parkir Timur. Keempat venue itu ada di dalam kompleks Olahraga Senayan. Dan hal itu terus berjalan demikian, sampai sekarang.

Bagi dunia film, nampaknya sarana itu sudah ada. Juga dilakukan oleh pihak swasta. Di setiap kota besar, sejak lama sudah berdiri bioskop yang multi ruangan. Ruangan ber-AC yang nyaman, kursi yang enak dan empuk dan system tiketing yang rapih meski boleh dibilang mahal. Memang harga yang harus dibayar untuk kenyamanan itu. Film-film Hollywood banyak diputar di bioskop multi ruangan itu, baik yang menang Oscar maupun yang 'kacangan'.

Sedikit film Bollywood yang diputar, lebih sedikit lagi film-film karya sutradara Eropa (Prancis, Inggris, Jerman) yang baik mutunya. Jarang diputar film-film 'bawah tanah' yang 'independent' dari Iran, Thailand, Jepang, Korea dan China, atau film-film dri beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin. Dan nampaknya lebih sedikit lagi film-film nasional, karya sineas-sineas muda kita yang diputar di situ.

Sebuah festifal internasional, yang memutar film-film non-Hollywood, dibuka beberapa tahun lalu bagi masyarakat Jakarta dan digelar setiap tahun. Tapi belakangan, penyelenggaranya mengaku, nafas mulai tersengal-sengal (terutama menyangkut masalah pendanaan dan venue). Meski begitu, festifal tetap digelar juga, hingga tahun ini. Entah tahun depan.

Pada event ini diakui oleh banyak kalangan sebagai peluang

amat baik mengenal perkembangan film dunia di luar jalur Hollywood. Sebuah proses pembelajaran yang positif bagi masyarakat awam dan bahkan Masyarakat perfilman. Tapi, adakah para pejabat/ birokrat tahun ada event ini Dan menghargainya

Tema festival tahun ini adalah Memahami Perubahan Kenyataan berbicara; tak satu pun film peserta festival yang digelar di bioskop multi ruangan itu. Mungkin Karena dianggap kurang komersial. Atau barangkali ada pertimbangan lain. Maka, Beberapa venue segera mengakomodir gerak kegiatan itu. Antara; PPHUI/Pusat Perfilman H. Usmar Ismail. Goethe Haus, Erasmus Huis, dan Oktagon. Nama festival itu adalah Jiffest, Jakarta International Film Festival.

Pada masa lampau kita memiliki beberapa festival film dan teve yang berskala nasional. FFI, Festival Film Indonesia dan FSI, Festival Sinetron Indonesia, yang diselenggarakan setiap tahun. FFI punya sejarah panjang. Digelar pertama kali oleh para pejuang perfilman nasional (Usmar Ismail, D. Djajakusuma, Suryo Sumanto, Djamaludin Malik, Asrul Sani), hanya beberapa tahun kemudian sesudah kemerdekaan Republik Indonesia 1945. FFI pernah menjadi ajang kebanggaan orang film. Dan pemacu kreatifitas yang berpengaruh, juga menjadi ukuran pelatihan yang efektif bagi SDM perfilman Indonesia. FSI, pertama diselenggarakan pada masa Orde Baru, ketika istilah sinetron dipatok sebagai sebuah hasil karya film di layar kaca/televisei.

Kedua ajang festival itu, langsung maupun tidak langsung, diakui ataupun tidak telah melahirkan banyak sutradara besar, aktor-aktris dan para pekerja kreatif, baik untuk layar lebar maupun layar kaca, itulah kenyataan.

FFI dan FSI, sudah mati (tak ada penyelenggaraan selama beberapa tahun ini). Tapi di Bandung ada sebuah ajang yang diberi nama FFB, Festival Film Bandung (pernah bernama Forum Film Bandung), dan diselenggarakan oleh pihak swasta. Dari hasil pengamatan tahunan, FFB memilih film dan sinetron terbaik, sekaligus dengan unsure-unsurnya (penulis scenario, sutradara, aktor dan aktris, dsb).

Pertanyaannya, adakah kebijakan pemerintah (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata) yang menyangkut kepada kenyataan itu? Misalnya membangun sebuah gedung bioskop khusus yang bisa mengakomodir gerak perfilman nasional. Atau menimbang-nimbang aktivis yang dilakukan Jiffest? Pasti akan

tumbuh berbagai penyelenggaraan yang serupa. Dalam format dan sifat yang bervariasi. Jika bioskop khusus itu dibangun, tentu di situ bisa diputar film-film nasional dan/atau film-film non-Hollywood yang bermutu. Bioskop multi ruangan yang memutar film-film Hollywood komersial, barangkali juga perlu ada. Meskipun niatnya hanya berdagang, itu pun sah-sah saja.

Pertanyaannya; apa policy pemerintah untuk memacu kreatifitas sineas-sineas kita? Dan mungkin adakah kemungkinan menghidupkan kembali FFI dan FSI?

Bagi seniman kreatif, entah dia bekerja untuk film, teater, tari, musik atau bentuk kesenian lainnya, festival mungkin tidak terlalu diperlukan. Di dalam dunia film, kini sudah terbukti, justru film-film *independent* makin marak sesudah FFI dan FSI mati. Sebagian besar hanya menjadi bukti dari kreatifitas para senimannya (*Kuldesak, Beth, Novel Tanpa Huruf R, Pachinco*). Dan ada juga yang sukses secara komersial, menggaet banyak penonton dan meraup keuntungan besar (*Sherina, Jelangkung*). Tapi sebuah festival, tetap punya peluang untuk lebih memberdayakan kreatifitas.

Seni tari dan teater, mungkin nasibnya lebih apes. Lebih-lebih lagi, tari dan teater rakyat/tradisi. Yang bisa hidup justru modifikasi atau campursari dari teater rakyat/tradisi (yang sering diusung oleh televisi), macam *Ketoprak Humor* dan *Lenong Gaya Mandra* itu. Kita tak perlu memicingkan mata terhadap kenyataan ini. Mengacu pada teori Adorno, barangkali saat ini masyarakat memang sedang menginginkan bentuk kesenian semacam itu. Toh mereka lahir secara spontan. Dan digemari. Seperti halnya kenyataan ketika masyarakat menyukai 'bokong' inul itu.

Seni petunjukan menjadi lengkap kalau didukung oleh tiga unsur utama: *pekerja, tempat, penikmat*. Jika satu unsur saja tidak ada, maka seni pertunjukan takkan ada. Pada tahun 2000, Yayasan Kelola, menerbitkan sebuah *direktori seni*. Tercatat, sekitar 3.869 organisasi informal, yayasan, lembaga dan instansi pemerintah yang menyebar di seluruh Indonesia. Tapi ketika direcheck, ternyata sebagian ada yang fiktif. Artinya, hanya ada nama dan alamat tapi tidak ada pelaku/pekerjanya lagi. Karena aktifitasnya sudah lama padam. Mereka yang dulu memang pernah aktif, kini sudah jadi sejarah masa lampau.

Ada banyak penyebab dari 'kematian kreatif' itu. Mungkin karena usia sehingga habis enerjinya. Mungkin karena kebijakan

pemda setempat yang dianggap kurang mendukung. Bisa jadi karena pertikaian internal yang menyebabkan perpecahan organisasi. Mungkin pula karena menurun kualitas karyanya sehingga berangsur di jauhi oleh penikmat/*audience*, akibatnya penghasilan berkurang atau bahkan tak ada. Padahal mungkin mereka hidup hanya mengandalkan itu. Tapi perut tak bisa menunggu. Masalah bukan tidak mungkin penyebabnya lantaran biaya produksi yang semakin tinggi, sehingga kemampuan menghasilkan karya baru semakin terbatas.

Masalah yang amat kompleks itu, sesungguhnya bisa diurai. Asal mau meneliti persoalan lebih intensif, merencanakan langkah dan melakukan tindakan kongkret. Kerja keras. Tanpa mengharapkan hanya keuntungan materi, kecuali niat baik menanamkan suatu investasi kultural. Bagi pewarisan kebudayaan di masa depan.

Usia lanjut bisa menghentikan kreatifitas, jika tidak ada regenerasi. Jawabannya adalah pendidikan kesenian. Yang formal oleh pemerintah, atau yang informal (sanggar, padepokan, perkumpulan swadaya oleh masing-masing kelompok seni budaya). Seniman bisa mati, tapi kesenian seharusnya tidak. Penting dibangun banyak lembaga pendidikan/pengajaran/pelatihan kesenian yang terkonsep. Tapi ternyata, bahkan lembaga pendidikan kesenian formal pun bisa dihitung dengan jari. Tidak cukup ampung mengakomodir persoalan sebesar ini.

Pertanyaannya; apa kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kenyataan itu?

Jika seniman tidak ada, maka kesenian otomatis tidak ada pula. Bukankah ini gawat? Para seniman yang tergabung di dalam sanggar-padepokan-perkumpulan, terpaksa bergulat melawan kenyataan sehari-hari. Sementara itu mereka tetap dituntut untuk menghasilkan karya-karya baru. Harus merenung, berimajinasi, berkontemplasi dan bekerja, padahal perut kosong dan keluarga terlantar. Seakan mereka dipaksa jadi *superman*, demi kesenian.

Subsidi? Baik. Itu bagus. Tak perlu dipersoalkan berapa jumlah subsidi pemerintah untuk kesenian, karena kenyataannya memang sangat kecil sekali. Ya, barangkali kemampuan pemerintah cuma sebegitu. Apalagi sekarang dalam keadaan terbelit utang luar negeri yang sangat besar jumlahnya.

Bagaimana di negeri luar Indonesia? Ada data yang menyebutkan, bahwa pemerintah Australia menyediakan

sejumlah dana bagi pengembangan industri budaya mereka. Jumlahnya sekitar 8,7 milyar \$A (1989-1990). Juga, pernah terbetik kabar bahwa sejumlah penulis naskah drama Australia, masing-masingnya ditugasi untuk menulis hanya 2 naskah drama selama setahun. Dan subsidi bagi kerja penulisan kreatif itu, memang bisa untuk hidup selama setahun. Jika ada riset/survei bahan, ada dana tambahan. Itulah kebijakan terpuji. Kenyataan, yang bagaimanapun, bikin kita iri.

Pemerintah Singapura, lewat *Singapura Art Council* membagi-bagi subsidi selama dua tahun (2001-2002) kepada grup-grup teater mereka. Jumlah subsidinya setahun 5 juta \$\$\$. Dari jumlah uang subsidi yang diterima itu, sebuah grup teater segera mendirikan *performing art school*. Mereka menggaji dosen yang punya reputasi internasional. Dan satu angkatan (kelas) hanya diisi 15 siswa yang diseleksi dan direkrut secara hati-hari (dan disubsidi) dari seluruh dunia. Sebuah gurup lainnya, memanfaatkan subsidi itu, untuk upaya pensubsidian lain bagi seniman mana saja yang berminat memproduksi, mempelajari dan meneliti seni pertunjukan. Nampaknya subsidi dari pemerintah Singapura itu, tidak jatuh dengan sia-sia.

Baik, jumlah penduduk Australia kita tahu, tidak lebih dari 200 juta jiwa. Dan penduduk Singapore malah lebih sedikit dari penduduk Jabotabel. Yang kita bicarakan di sini, sesungguhnya bukan besarnya jumlah subsidi. Tapi, lebih kepada sebuah pertanyaan; adakah kebijakan politik kebudayaan yang mengakomodir aspirasi, aktifitas dan kreatifitas dari seniman-seniman kita?

Bicara soal subsidi, implementasinya juga bisa keliru. Niat baik belum tentu bisa melahirkan hasil yang baik. Satu contoh, ada pemda yang memberikan subsidi bagi kelompok teater rakyat jalanan. Bentuk subsidinya adalah, membantu membiayai pembangunan sanggar dan mengirimkan para siswa sekolah seni untuk belajar pada kelompok itu. Tapi syaratnya, mereka tak diperbolehkan *ngamen* lagi. Tentu saja itu subsidi yang keliru sasaran. Dan lebih lagi, hal itu dilakukan dengan alasan, bahwa *ngamen* di jalanan dianggap 'mengotori' pemandangan kota.

Teater jalanan lahir dan besar di jalanan. Lewat respons, reaksi dari penonton secara langsung. Para senimannya mereguk hikmah dari peristiwa interaktif itu. Dengan dipaksa berlatih di sanggar, mereka seakan dicabut dari akar

pertumbuhan dan pengembangannya. Mereka tidak lagi spontan, basah dan interaktif. Berangsur-angsur mereka menjadi elit. Dipisahkan dari habitatnya. Sebuah upaya subsidi yang tidak jelas konsepnya, tidak mempelajari akar, lingkungan dan secara tidak langsung justru malah 'mematikan' watak dari kesenian yang disubsidinya itu.

Pernah mendengar bahwa *Ma'badong* (suatu bentuk taru dan nyanyi dalam upacara ritual kematian adat Toraja) dianjurkan untuk membawa obor dan mengenakan pakaian warna kuning? Pakaian upacara *Ma'badong* hitam-hitam, karena berkaitan dengan ritus kematian. Dan tidak pernah membawa obor. Tragedi. Ada catatan dari kenyataan lapangan, bahwa beberapa bentuk kesenian rakyat/tradisi telah bergenti kostum; dari hitam dan mewah berubah kuning dan keemasan. Dari terakota menjadi merah berenda. Jika perubahan itu terjadi atas kehendak masyarakatnya sendiri, tidak ada. Tapi kalau ada penyebab lain di luar kehendak masyarakat pemilik kebudayaannya yang sah. Penyebab yang terkait dengan kekuasaan politik.

Pada sebuah festival yang digelar oleh pemda, upacara adat *Balia* dari masyarakat Kaili (Toraja Barat) dihadirkan di atas panggung. Padahal upacara itu berkaitan dengan upaya penyembuhan atau tolak bala yang sejak dulu dilakukan di halaman rumah pemujaan yang disebut *lobo*. Para pesertanya harus menginjak pasir atau tanah. Dengan demikian kekuatan magis yang mereka yakini akan hadir. Ada juga upacara menginjak bara api batok kelapa. Ketika mereka 'diharuskan' menginjak lantai panggung, maka kekuatan magis itu tidak hadir. Dan pada akhirnya, yang kita lihat hanyalah sebuah tontotan yang tidak berdaya karena tercerabut dari akarnya. Pertanyaannya; apa tidak sebaiknya pemerintah (Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata) berperan dalam hal ini? Ini menyakut masalah 'pewarisan nasional'.

Kita sekarang bicara soal *tempat*, yang di dalam seni pertunjukan merupakan unsur penting lain sesudah *pekerja* dan *penikmat/penonton*.

Ada bentuk kesenian yang tidak memerlukan gedung pertunjukan. Itulah jenis kesenian rakyat yang melaksanakan hajat kreatifnya di arena terbuka dengan cara *ngamen*. Bentuk seni yang sering dianggap 'mengotori' pemandangan kota. Mereka bisa berpentas di alun-alun, pasar ataupun di halaman

sebuah supermarket. Ada juga bentuk teater kontemporer (masa kini) yang tak membutuhkan gedung. Kita pernah lihat beberapa *happening art* menjadi pelengkap dari demonstrasi massa.

Tak bisa dipungkiri ada pula jenis teater yang membutuhkan pentas tertutup, agar *audience* bisa lebih terfokus menyerap hasil seninya. Tapi mari kita hitung, ada beberapa gedung pertunjukkan yang memadai. Dengan akustik yang baik, dan fasilitas peralatan panggung yang lengkap. Di Jakarta ada beberapa; Graha Bhakti Budaya di TIM, Gedung Kesenian Jakarta dan Teater Tanah Airku di TMII. Di Solo, Yogyakarta, Bandung, Makassar juga ada. Bahkan di Tasikmalaya dan Tenggarong. Auditorium milik beberapa sekolah internasional di Jakarta juga tergolong baik fasilitasnya.

Di sebagian besar kota-kota lain di luar Jawa, nyaris tak ada. Jika ada pagelaran besar, pilihannya pasti *ballrom* sebuah hotel bintang lima. Tapi ternyata ada sebuah kota kabupaten di Riau Kepulauan, yang memiliki gedung teater memadai dengan peralatan lampu dan sound system dari Singapura. Kabarnya, hal itu terjadi karena bupatinya menggemari teater. Ini unik. Bahkan Pekanbaru sebagai ibukota provinsi Riau tidak memiliki gedung teater, kecuali sebuah Taman Budaya yang apa adanya dan bangunan-bangunan besar peninggalan acara nasional MTQ.

Pusat Kesenian Jakarta TIM, selain Graha Bhakti Budaya (GBB) yang berkapasitas 850 kursi, dulu punya beberapa *venue*. Ada Teater Tertutup, kapasitas 350 kursi. Ada Tater Arena, kapasitas 450 kursi. Ada Tater Terbuka, kapasitas 2000 penonton. Ada penginapan seniman yang sewanya sangat murah tapi termasuk sarapan pagi. Ada Ruang Latihan Tari, Bengkel Kerja Senirupa, Ruang Pamer/Galeri, laboratorium film dan perumahan karyawan. Semua itu sudah digusur. Kini hanya tinggal GBB. Ditambah sebuah *Grand Theater* berkapasitas 1200 kursi yang tengah dibangun dan Tetaer Kecil, 200 kursi. Gedung itu diharapkan bisa beroperasi pada tahun 2004.

Di luar TIM dan Pusat-pusat Kebudayaan Asing di Jakarta, memang ada beberapa kantong kebudayaan yang mandiri dan dibangun oleh pihak swasta. Kegiatannya, selain menggelar diskusi, pameran senirupa, pemutaran film-film seni juga pentas teater. Antaranya; TUK dari grup Tempo, Betara Budaya dari grup Kompas, dan Balai Seni Onkor yang kegiatannya langsung

masuk ke masyarakat akar rumput pinggiran Jakarta. Kampus-kampus perguruan tinggi, meski kegiatannya agar kurang gaungnya, nampaknya tidak mau ketinggalan pula.

Pertanyaannya; lalu, apa kebijakan pemerintah melihat kenyataan ini? Apa tidak terbit keinginan untuk membangun, paling tidak sebuah gedung pertunjukan yang memenuhi persyaratan akustik dan artistik, di masing-masing ibukota provinsi? Kabarnya, pada masa jabatan Mendragri Rudini, pernah ada himbauan semacam itu. Entah mengapa tidak berlanjut. Kalau sebuah kota kecil kabupaten saja sanggup membangun sebuah gedung pertunjukan, tanpa ada himbauan dari menteri mana pun, masa Yang Mulia Paduka Gubernur (yang menguasai provinsi) tidak mampu melakukannya? Malahny memang terpulang kepada niat. *Nawaitu*.

Mari sekarang kita bicara perihal *penikmat* atau *penonton* atau *audience*. Dewan Kesenian Jakarta, dibantu Ford Foundation punya program 'Apresiasi Seni Pertunjukan Bagi Siswa-Siswi SMU' dan 'Pelatihan Seni Pertunjukan'. Dibuka pada 1997, kini, lebih dari 80 SMU di Jakarta terdaftar dalam program itu. Ini adalah semacam *audience development*. Bentuknya; para siswa SMU didatangi oleh para empu/seniman (tradisi maupun modern) langsung di sekolahnya. Para seniman berpentas, lalu diskusi. Bentuk lainnya; para siswa SMU didatangkan ke gedung, menonton pertunjukan dengan fasilitas pentas yang lengkap. Lalu diskusi. Konon, program semacam ini hanya ada di India dan Indonesia.

Bentuk 'Pelatihan Seni Pertunjukan' dilaksanakan lebih intensif. Para siswa yang berminat, mendaftar untuk dilatih para empu tradisi yang khusus didatangkan ke sekolahnya. Peralatan yang dibutuhkan disediakan. Tiga atau enam bulan kemudian, digelar pementasan di hadapan kawan-kawan sendiri, siswa sekolah lain, guru-guru dan masyarakat umum. Jenis kesenian tradisi yang dilatih, antaranya; *Tari Saman Aceh*, *Topeng Betawi*, *Tari Melayu*, *Gendang Rampak*, *Yosim Pancar Papua*, *Zapin Jampi*, *Gondang Sumatera Utara*. Kabarnya, Diknas juga punya program serupa. Dan juga PBAS, Program Bimbingan Anak Sampoerna, yang melatih pembuatan film bagi anak-anak SLTP, musik, paduan suara, dan teater.

Beberapa perusahaan besar, merayakan hari jadinya dengan menggelar pentas tari, pantomim atau teater. Petinggi-petinggi

perusahaan mulai dasar bahwa amat perlu memberikan apresiasi seni pertunjukan kepada para karyawannya. Lepas dari kualitas pemenmtasannya, ini suasana yang bagus, kalau tidak salah, bahkan untuk perayaan-perayaan pernikahan, jasa *storage manager* mulai dibutuhkan.

Arswendo Atmowiloto memboyong para selebriti untuk membaca puisi dan monolog di sebuah apartemen mewah di Jakarta. *Audience*-nya para eksekutif dan sejumlah konglomerat. Kabarnya, acara itu akan menjadi program tetap. Hotel Indonesia, pernah melakukannya pada sekitar 1960-an hingga 1970-an. Manajemen hotel berminat, mereka tidak hanya menjual kamar dan restoran tetapi juga 'menjual' seni budaya. Teater Populer pimpinan Teguh Karya (almarhum), lahir di Hotel Indonesia itu. Grup teater ini malah pernah berhasil menjaring penonton tetap yang membayar 'iuran' sebagai ganti karcis untuk menonton produksi-produksi teater mereka yang digelar setiap bulan. Bukankah itu upaya-upaya yang baik, sehubungan dengan apa yang kita ingin bangun melalui jalur 'Industri Budaya'?

Upaya apresiasi dan pengembangan penonton, menjadi penting dan marak dilakukan banyak pihak. Pertanyaannya; sejauh mana pemerintah bisa mengakomodir gerak kegiatan semacam itu? Banyak anak-anak kita yang tidak pernah tahu bahwa di daerah lain, nun di kampung yang jauh dari kebisingan kotam ada seniman besar yang kadang namanya sudah mendunia. Mereka belum pernah menyerap hasil karya para empu/seniman itu. Sebagian dari mereka yang lahir dan besar di Jakarta, bahkan belum pernah menginjang TIM dan Gedung Kesenian Jakarta, apalagi melihat pentas kesenian atau teater. Di sekolah, tidak ada kurikulum kesenian kecuali di luar jam pelajaran resmi. Sebuah ekstrakurikuler yang tidak wajib diikuti siswa.

Ada lagi program yang juga dibantu Ford Foundation. Namanya SBSB. Singkatan dari 'Sastrawan Bicara Siswa Bertanya'. Dibuka pada tahun 2000, dimotori oleh penyair Taufiq Ismail dan Majalah Sastra Horison. Hingga kini, 2003, puluhan sastrawan sudah berbicara di ratusan SMU/SMK/Madrasah Aliyah/Pesantren di berbagai kota seluruh Nusantara. Partisipan aktif SBSB sudah mencapai puluhan ribu siswa. Di dalam perjalanannya, program SBSB, sudah berhasil menerbitkan Empat Kitab; *Kitab Puisi*, *Kitab Drama*, *Kitab Nukilan Novel*, dan

Kitab Cerita Pendek.

Kenyataan-kenyataan itu, bagaimanapun patut diketengahkan. Paling tidak, jika ada pejabat/birokrat yang belum tahu, mudah-mudahan sekarang menjadi tahu. Karena, nampaknya, program *audience development* belum terlalu disentuh oleh kebijakan mereka secara lebih terkonsep, terpadu dan menyeluruh. Padahal *audience* merupakan pilar yang juga penting bagi pengembangan sebuah industri budaya.

Senirupa (lukisan, patung) punah nasib jauh lebih baik dibanding tari dan teater. Banyak galeri bermunculan di kota-kota besar, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Karya-karya para perupa dipamerkan, dan harga jualnya tinggi. Pameran seni rupa memperoleh perhatian yang baik. Biasanya dibuka oleh bapak menteri atau seorang konglomerat. Sebagian besar para perupa hidup layak dari hasil karyanya. Di Jakarta, ada Museum Seni Rupa hingga Dede Eri Supria dan Hardi. Bukan hanya dalam negeri, di luar negeri pun karya para perupa kita sangat dihargai. Semahalnya dengan musik, bisnis seni rupa agaknya sudah 'menjadi' pula. Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, malah berminat memematungkan para pahlawan yang jadi nama jalan.

Kawasan 'penerbitan, teknologi audio visual, elektronik, video games dan internet', tidak akan dibicarakan di sini. Mungin bisa didiskusikan terpisah. Karena memang diperlukan pembahasan dan penanganan yang sangat khusus.

Pariwisata, seni tradisi dan peta. Ada sebuah desa kecil, bernama Watublapi. Jaraknya sekitar 20 kilometer dari Maumere, ibukota kabupaten Sikka, Flores. Pelaksanaan industri budaya, dalam format yang sederhana ternyata sudah mereka laksanakan.

Desa itu bisa menerima kunjungan rombongan tamu, paling sedikit dua kali sehari. Rombongan tamu, biasanya disambut di tepi jalan di pinggir desa. Kemudian para penyambut membawa para tamu menyusuri jalanan desa, sekitar 200 meter. Di mulut arena utama, serombongan penari menyambut dengan 'tarian penyambutan'. Teriakan dan tetabuhan menggemakan. Dan daun kelapa mudah disentuhkan ke pundak para tamu, dimaksudkan sebagai simbol ucapan selamat datang.

Setelah disilahkan duduk di dalam gazebo beratap ilalang, tetapi disuguhi 'air kata-kata' atau sofi (yang alkoholnya berkadar tinggi), minuman tradisional Maumere. Dihidangkan pula kue-

kue beras merah dicampur gula kelapa bernama *lekun*. Dua lelaki warga desa menyalakan api yang marak karena pergesekan dua kayu keras dengan serabut kelapa. Cara lama. Dari api itu rokok dinyalakan, dan tetamu mengisap rokok dauan nipah, pertanda persahabatan: Semua itu dijelaskan oleh pemandu yang mahir berbahasa Indonesia, Inggris dan Belanda.

Tak lama kemudian nomor-nomor tari disajikan, juga dengan penjelasan dari sang pemandu. Usai suguhan tari, para tetamu dibawa masuk kampung untuk melihat pameran proses pemintalan kain ikat. Dari mulai kapas, benang, pemintalan kain, pencelupan dan penjemuran. Tak ada yang lolos, semua diterangkan dengan amat jelas dan fasih oleh sang pemandu.

Sesudah itu, para tamu dibawa ke sebuah *showroom* di udara terbuka. Nampak berbagai kain produksi desa itu digelar. Beberapa barang kerajinan juga nampak dipamerkan, antaranya buah maja kering berbentuk botol aqua. Semua yang dipajang, milik warga desa. Dan harga ditentukan oleh masing-masing pemiliknya.

Tak ada paksaan untuk membeli. Tapi biasanya, para tamu memborong. Lalu, setiap tamu diberi cinderamata sebuah selendang. Dan ketika parng tamu sudah merasa cukup puas, lalu pamitan, mereka mengantarnya kembali ke pinggir desa.

Warga desa Watublapi tak pernah belajar ilmu komunikasi, atau kursus pelayanan untuk menyambut turis-turis. Mereka juga tak tahu apa itu industri budaya. Tapi mereka melakukan kegiatan itu dengan gembira dan tulus. Justru itu dayatariknya.

Di Larantuka, Flores Timur, hotel selalu penuh pada setiap Paskah. Orang-orang datang dari tempat jauh untuk menyaksikan prosesi patung Jesus (yang konon selalu berkeringat) diseberangkan dengan perahu dari Pulau Adonara yang diarak ke tiga kamar-kamar rumahnya bagi para pendatang luar itu. Warung-warung makan disebut, cinderamata (kriya) laku keras dan para pendatang senang karena bisa menyaksikan prosesi patu Jesus dari Pulau Adonara. Mereka akan pulang dengan membawa berbagai kesan.

Para peziarah bahkan ada yang datang dari Belanda dan Italia. Semuanya dilayani dengan tulus dan gembira. Inilah kata kunci: pelayanan yang tulus dan gembira.

Perjalanan bus dari Ende (Flores Tengah) ke Ruteng (Flores Pedalaman), biasa ditempuh selama 9 jam. Berangkat pagi

sekitar pukul 08.00, dan tiba pada pukul 17.00. Orang lebih suka memilih naik bus bernama A Go Go. Menghapa? Karena bus itu berangkat tepat waktu, dan berapapun penumpangnya dia pasti berangkat. Armada pada supirnya memiliki keahlian dalam merayapi jalan naik turun, curam berliku-liku dari kiri gunung batu, kanan jurang sedalaam 300 m. Atau sebaliknya. Bus-bus lain batal berangkat jika penumpangnya di bawah lima orang. Ini juga kata kunci: pelayanan, tepat waktu, kepastian dan ditangani tenaga ahli.

Beberapa daerah ini nampak berlomba menggelar festival. Ada yang malah berani mematok merek 'internasional'. Padahal peserta dari luar negeri mungkin cuma satu atau dua saja. Dengan bersemangat mereka menyebut *visi dan misi*. Kalimat-kalimat yang dipilih sebagai slogan sangatlah mentereng. Misal: 'Menggalakkan Pariwisata' atau 'Menjadikan Kota Anu sebagai Daerah Tujuan Wisata' atau 'Menyambut Pasar Global 2020'. Dan sebagainya. Pendek kata semua dikaitkan dengan 'pariwisata'.

Tapi apa yang terjadi sesungguhnya? Bahkan untuk mendapatkan peta kota saja, sulitnya bukan main. Jika tamu bertanya, 'adakah petanya?' jawabnya selalu 'Ada. Nanti saya carikan', kenyataannya, tak ada. Kalaupun ada, biasanya terbitan tahun 1996 atau 1997. Padahal di tahun 2003, telah terjadi banyak perubahan.

Dan itu terjadi hampir di semua kota. Bukan hanya di luar Jawa bahkan di kota-kota dekat ibukota Jakarta. Kita malah bisa memperoleh data dan peta yang dibuat oleh Lonely Planet dan Periplus, di mal-mal besar di Jakarta. Di kotanya sendiri, justru tidak tersedia. Pertanyaannya; apakah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata memang tidak mengupayakan penerbitan peta mutakhir (*updating*), atau karena terbentur kepada masalah pendistribusiannya? Ini persoalan sederhana, tapi sangat penting.

Dalam hal ini, Bali tentu merupakan kekecualian. Jika ingin mencari contoh yang paling lengkap dari industri budaya, maka Bali-lah itu. Informasi apa pun, bisa dengan mudah diperoleh di sana. Nampaknya semua orang Bali adalah PR yang baik. Satu kata kunci lagi. PR. *Public Relation*. Kehumasan.

Di Toraja, seorang turis Inggris pernah bertanah: "Saya heran, mengapa kawan-kawan saya tidak datang ke Toraja yang begini

indah?" Lalu, dia menjawab snediri pertanyaannya: "Mungkin informasi mengenai Toraja masih kurang". Data kunjungan turis mencatat, orang Belanda dan Prancis paling banyak berkunjung ke Toraja. Dan kabarnya, di Prancis dan Belanda, Toraja selalu dipromosikan di televisi.

Ada begitu banyak kata kunci. Dan ada begitu banyak pertanyaan. Tidak tahu apakah semua akan memperoleh jawaban. Persoalannya memang sangat kompleks, itu bisa dipahami. Tapi dalam memasuki perencanaan era 'industri budaya', kita sebaiknya tetap berhati-hati. Dan sabar. Jangan sampai salah langkah. Ini adalah proses yang amat panjang. Menyangkut banyak aspek dan kepentingan.

Tapi jika mesti ditulis juga langkah apa yang pertama-tama harus dilakukan, maka rekomendasi di dalam kertas makalah ini 'hanya' ada *dua hal*.

Pertama;

membenahi pendidikan. Salah satunya, dengan memasukkan kembali pengajaran mengenai kesenian sejak dini. Apresiasi seni budaya sudah mulai dibuka, sejak Taman Kanak-Kanak. Dan juga intrakurikuler.

Kedua;

adanya suatu tindakan politik (segera) dari pemerintah dan para pengambil keputusan. Terutama dalam menjawab pertanyaan besar itu; *Siapa yang sesungguhnya paling bertanggungjawab terhadap pewarisan kebudayaan Indonesia? Dan apa tindakan konkretnya?*

Semua berawal dari pendidikan dan pengajaran. Dan suatu tindakan politik, paling tidak diharapkan bisa menimbulkan kecerahan baru. Kegembiraan baru. Semangat baru. Jika tidak, maka semuanya akan tetap berjalan di tempat. Hanya berputar-putar sehingga kita pusing sendiri. Dan, membuat kita merasa seakan tetap mandek. Semoga masalah ini diperhatikan.

Jakarta, Oktober 2003. NR.

STRATEGI PENGEMBANGAN WARISAN BUDAYA (SEBUAH PANDANGAN DARI SISI ARSITEKTUR)¹

Oleh: **Naniek Widayati**²

Pengantar

Makalah ini diharapkan dapat memberi gambaran kepada berbagai instansi terkait tentang bagaimana kondisi dunia arsitektur saat ini. Bagaimana kita semua menyikapinya, dan bagaimana langkah-langkah yang dapat diusulkan untuk mendapatkan hasil seperti yang kita harapkan semua.

Alangkah indahnya apabila wajah-wajah kota-kota kita tidak dipenuhi oleh bentuk bangunan yang beraneka ragam dan membingungkan yang kesemuanya berasal dari manca negara yang pada akhirnya membuat kota kita kehilangan identitas diri.

1. Pendahuluan

Telaah umum dari makalah ini berusaha menjabarkan secara umum dan singkat tentang arti dari warisan budaya potensi-potensi yang terkandung di dalamnya. Kemudian berusaha membahas warisan budaya tersebut dari sudut pandang arsitektur.

Selain itu makalah ini mencoba menggali berbagai macam peraturan yang dipunyai Indonesia yang ada keterkaitannya dengan warisan budaya dan pelestarian, dengan maksud agar kita semua mengetahui bahwa hukum dan peraturan, sebenarnya sudah dipunyai tetapi kenyataan di lapangan kenapa sangat berbeda ? dan inilah tugas kita semua untuk menjawabnya.

Adapun usaha untuk menjawab hal ini tersebut diperlukan langkah-langkah yang strategis yaitu dengan membuat jaringan-jaringan, organisasi-organisasi serta kader-kader yang aktif dan konsisten.

¹ Makalah ini dipresentasikan pada kongres Kebudayaan Indonesia ke V di Bukittinggi tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober 2003

² Dr. Ir. Naniek Widayati, MT Ars adalah Dosen Tetap Jurusan Arsitektur FT Univ. Taruman Negara Jakarta, Direktur dari Centre for Architecture and Conservation, Pengamat Sosial dan Budaya

Makalah ini juga memuat berbagai pendekatan yang diharapkan apa yang kita inginkan dapat tercapai. Untuk itu diperlukan berbagai pendekatan antara lain :

1. Pendekatan sebagai modal ekonomi
2. Pendekatan sebagai modal teknologi
3. Pendekatan sebagai modal budaya

Dengan berbagai uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Mengembangkan warisan budaya dari kajian arsitektur diperlukan semacam jaringan yang tugasnya memberikan informasi, penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat untuk supaya merasa memiliki warisan budaya yang berada di daerahnya masing-masing dengan berbagai pendekatan seperti tersebut di atas. Selain itu mengajari mereka yang sudah memahami untuk membuat jaringan seluas-luasnya agar pengetahuan tersebut segera dapat tersebar. Dapat juga membantu Pemerintah dalam intansi-intansi yang terkait.

2. Potensi Warisan Budaya

Apabila ditelaah secara umum yang dimaksud dengan warisan adalah tinggalan yang sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari kata pelestarian yang berarti *nguri-uri* (dalam bahasa Jawa). Sehingga segala hal yang menuju kepada pelestarian adalah berupa warisan. Sementara warisan cagar budaya yang menyangkut kehidupan di kota, merupakan bidang yang sangat khas dan dikenal dengan istilah sebagai “ ubah heritage” atau “man built heritage”.

Dalam dunia arsitektur dikenal istilah meng-konservasi yang kalau diartikan secara umum berarti “melestarikan”. Konteks melestarikan disini selalu ada keterkaitannya dengan sejarah dan warisan/peninggalan masa lalu. Sebagaimana diungkapkan oleh:

1. Papageorgeou (1971) dalam bukunya *Continuity and Change* mengungkapkan bahwa ada empat kawasan bersejarah yaitu:
 - Bangunan-bangunan sendiri dan kelompok bangunan
 - Desa kecil sebagai pusat sejarah
 - Kawasan bersejarah pada kota besar
2. Shankland (1985), menerangkan pula bahwa obyek konservasi dapat dibedakan sebagai berikut :
 - Desa dan Kota kecil bersejarah
 - Kawasan bersejarah di lingkungan kota besar
 - Kota bersejarah

- Kelompok bangunan bersejarah, tapak, istana dan artefak lainnya.

Sementara dalam berbagai diskusi yang diadakan oleh beberapa rekan arsitek dan disiplin ilmu lainnya didapat hasil kesepakatan tentang kriteria apa saja yang dapat dimasukkan dalam menentukan bentuk warisan budaya, sebagai berikut :

Kriteria warisan budaya secara nasional/internasional adalah :

1. Segala sesuatu yang mempunyai nilai penting (sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya),
2. Masterpiece (adiluhung),
3. Segala sesuatu yang mengandung keunikan atau kelengkapan,
4. Merupakan contoh terkemuka dari bangunan arsitektur, pemukiman tradisional, teknologi, lansekap, kategori klaster (merupakan beberapa tinggalan),
5. Merupakan budaya serupa, border (serumpun Melayu), merupakan kebudayaan bersinambungan dalam rentang masa tertentu (series),

Kriteria warisan budaya secara regional (provinsi) adalah :

1. Nilai penting (sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya),
2. Masterpiece regional.
3. Memiliki nilai atau kekhususan atau istimewa tingkat regional.
4. Merupakan contoh terkemuka dari bangunan arsitektur, pemukiman tradisional, teknologi, lansekap atau gabungannya, merupakan kawasan klaster, budaya serupa, border (serumpun etnis),
5. Kebudayaan berkesinambungan dalam rentang masa tertentu (series),
6. Merupakan gabungan antara cultural dan natural,
7. Merupakan suatu peristiwa penting tingkat provinsi,
8. Memiliki ciri khusus budaya masyarakat provinsi.

Kriteria warisan budaya secara lokal (Kabupaten atau Kodya) :

1. Memiliki nilai budaya lokal,
2. Puncak budaya local,
3. Corak lokal,
4. Potensi arkeologi lpcal
5. Kepemilikan perorangan atau kelompok (LSM) dan didaftarkan

ke pemiliknya.

Sementara hasil diskusi JPPI di Kaliurang Yogyakarta tanggal 1-3 Oktober 2003 menyatakan bahwa warisan budaya lebih menyeluruh apabila disebutkan sebagai pusaka Indonesia yang mencakup pusaka alam dan pusaka budaya yang membentuk kesatuan pusaka saujana yang beraneka ragam, yang merupakan bentukan alam dan hasil cipta, rasa, karsa dan karya lebih dari 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia, baik secara sendiri-sendiri, perpaduan dengan budaya lain, dan sebagai kesatuan bangsa Indonesia disepanjang sejarah keberadaannya (Draf Piagam Pelestarian Pusaka Saujana Indonesia, alinea ke 2).

Dari uraian tersebut terlihat bahwa warisan budaya dapat diartikan “berbagai macam” sesuai dengan persepsi dan wacana masing-masing, tetapi intinya adalah sama yaitu semua peninggalan masa lalu baik fisik maupun non fisik yang nyata maupun maya yang kita semua sepakati baik dengan alam pikiran maupun hati nurani.

3. Pranata Hukum Dan Perundang-Undangan

Seperti hanya negara lain, Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa peraturan perundangan antara lain : Undang-undang no 9 tahun 1990 tentang Pariwisata, Undang-undang no 24 tahun 1992 tentang Tata Ruang , Undan-undang no 12 tahun 1994 tentang Perubahan Undang-undang no 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-undang no 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (yang menggantikan Monumenhen Ordonantie 1933), dan Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU no.5-1992, serta beberapa perangkat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan khususnya antara lain :

- a. No. 62/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan, dan Penghapusan benda cagar budaya dan atau situs ;
- b. No. 63/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan benda caga budaya
- c. No. 64/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan benda cagar budaya dan atau situs;

Merupakan dasar atau payung dari segala tata pelaksanaan cagar budaya namun ternyata masih belum sepenuhnya mencerminkan bagaimana tata laksana penyelenggaraannya di

daerah melalui Peraturan Daerah ataupun Keputusan Gubernur/Kepala Daerah setempat.

Pemerintah DKI sejak 1974 telah menerbitkan berbagai perangkat yang mengukuhkan wilayah-wilayah dan bangunan tertentu sebagai benda cagar budaya, yang terakhir Perda no. 9 tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya di wilayah DKI Jakarta.

Apabila dilihat dari penelaahan anatara Perundangan dan Peraturan yang diterbitkan di tingkat “ Nasional” dengan Perundangan dan Peraturan yang diterbitkan oleh “Pemerintah Daerah DKI”, memang tidak ada yang berlawanan, tetapi di lain pihak masih ada yang belum terpaut secara sinkron . Apabila dilihat dari praktek di lapangan maka akan terlihat ketidak sinkronan tersebut sehingga sering terjadi pelaksanaan pelestarian ataupun pemanfaatan benda cagar budaya yang tidak sesuai dengan harapan dan peraturan.

4. Kajian Arsitektur

Dalam perkembangan dunia arsitektur sekarang ini banyak terjadi keresahan dalam menentukan gaya atau *style* dari bangunan yang akan didirikan, baik bangunan tersebut berupa bangunan rumah tinggal, kantor sewa, apartemen, bangunan umum dan sebagainya. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dari semenjak kita kecil tentang besarnya nilai peninggalan masa lalu yang kita miliki. Sebagaimana dalam dunia arsitektur kita memiliki berbagai macam bentuk rumah adat antara lain : rumah adat Jawa, Minangkabau, Batak, Nias, Bali, Kalimantan, Sulawesi (Bone ,Toraja), Timor, Papua dan lain sebagainya dengan variasi budaya yang sangat menarik dan indah. Tetapi sayangnya kita semua kurang dapat menghargai sehingga apa yang telah kita punya dan indah diasumsikan tidak indah dan tidak mau mengembangkannya. Kita selalu berpendapat bahwa yang berbau “asing” adalah yang indah sehingga tidak mengherankan kalau kita banyak melihat rumah tinggal dengan gaya Spanyol, Yunani, Italia dan sebagainya yang pada kenyataannya baik dari segi iklim maupun bentuk kurang memadai. Pergeseran yang terus menerus terjadi ini mengakibatkan kita kehilangan identitas diri. Penghargaan terhadap peninggalan masa lalu tidak ada, akibatnya banyak kawasan ataupun bangunan yang mempunyai nilai kesejarahan dibongkar dan didirikan bangunan baru dengan

gaya yang sangat “menakjubkan” . Terjadi perubahan tata nilai dalam masyarakat dalam mengartikan kata “modern” sehingga muncul berbagai bangunan dan kawasan yang banyak tidak mengikuti aturan yang sebenarnya. Akibatnya terjadilah diberbagai tempat kawasan hunian, perkantoran yang tidak nyaman, yang berdampak pada perubahan perilaku dan emosi manusia sebagai penghuninya . Demikian seterusnya, dan bagaimana kalau hal tersebut tidak cepat teratasi ?

Sebenarnya pada sisi yang lain kita dapat mengembangkan bentuk-bentuk bangunan tradiisional ke bentukan modern tanpa meninggalkan kaidah-kaidah arsitektur dan keindahan yang ada. Tetapi kembali kepada bagaimana cara menjadikan kita semua bangga terhadap apa yanga kita miliki sendiri sebagai sebuah warisan yang patut dilestarikan.

5. Langkah-Langkah Menuju Pengembangan

Untuk mencapai hal yang diinginkan tersebut diperlukan kesadaran dari setiap individu akan arti melestarikan peninggalan masa lalu, pada tahap awalnya dari diri sendiri dahulu kemudian mengajak lingkungan terdekat, terus ke lingkungan berikutnya terus menerus sehingga terciptalah suatu jaringan yang kokoh. Apabila setiap Kalurahan sudah dapat membuat jaringan demikian niscaya warisan budaya yang berada disetiap Kalurahan dapat terselamatkan. Tahapan berikutnya kelompok jaringan tersebut membuat organisasi-organisasi pelestarian warisan yang berbadan hukum sehingga dalam proses mengembangkan dan melestarikan warisan budaya dapat lebih didengarkan oleh masyarakat. Tahapan berikutnya menumbuhkan kader-kader yang dimulai dari tingkatan sekolah dasar.

6. Model Pendekatan

Peninggalan arsitektur dan taman kota adalah wujud fisiknya yang paling visual nyata di dalam bidang ini. Secara mendasar dalam menilai sasaran-sasaran konservasi atau pelestarian dari peninggalan warisan budaya tersebut, dapat dilakukan dengan cara pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan sebagai modal ekonomi
2. Pendekatan sebagai modal teknologi
3. Pendekatan sebagai modal budaya

Urutan tersebut di atas bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku.

Ad.1. Pendekatan sebagai modal ekonomi

Banyak cagar budaya dalam bentuk arsitektur masa lampau yang dinilai oleh pemiliknya sebagai benda yang *non marketed good*, tetapi adapula yang melihat justru sebaliknya yaitu sebagai asset yang dapat dipasarkan setelah melalui proses konservasi.

Dari sudut pandang *stake holders* yang tergolong sebagai pemilik dan penyandang biaya untuk pemeliharaan maka perspektif ekonomi-lah yang menjadi penentu.

Dalam kaitan ini ICOMOS-UNESCO di tahun 1993 (direview ulang pada tahun 1998) telah membuat rekomendasi tentang *Cost Benefit Analysis for the Cultural Built Heritage* dengan mengambil empat kemungkinan kasus dalam hubungan lingkungan dan bangunan cagar budaya dengan pemiliknya serta para pengunjungnya. Keempat kemungkinan tersebut dalam istilah aslinya dinamakan :

- a. Basic Model Maximizing Welfare
Adalah suatu keadaan dimana pemilik cagar budaya tidak Menggantungkan diri kepada para pengunjung, baik dari segi jumlah maupun perolehan dari kunjungan tersebut, bahkan pengunjung tidak dipungut biaya.
- b. Profit-maximizing Supply of Cultural Heritage
dalam kasus ini pengunjung bersedia membayar (*willingness to pay*) untuk mengunjungi cagar budaya tersebut. Tetapi kesediaan membayar tersebut.
- c. Supply Under a Zero-profit Restriction
Pemilik dapat meminta subsidi kepada pihak lain, sementara biaya masuk para pengunjung ditentukan oleh pihak lain tersebut. Apabila ada keuntungan lebih dari hasil kunjungan yang melebihi subsidi yang diterima pemilik, maka kelebihan tersebut menjadi milik pen-subsidi.
- d. Supply with a Fixed Cost Subsidy
Dalam kasus ini dibedakan antara biaya pemeliharaan fisik dari pemilik sendiri dan dari subdidi yang diterima secara terbatas dari sumber lain. Serta biaya untuk memberi pelayanan kepada pengunjung sesuai kerelaan mereka untuk membayar pada kunjungan tersebut.

Ad.2. Pendekatan sebagai Modal Teknologi

Kemajuan teknologi dimasa sekarang memberi peluang untuk secara teknis menerapkan apapun yang terbaik atau terancang seperti pekerjaan, rehabilitasi, restorasi, renovasi, ataupun revitalisasi. Modal teknologi selalu dikaitkan dengan ekonomi atau biaya yang kalau di negara maju merupakan sesuatu yang amat dipentingkan dan sebagai prasyarat di dalam proses pemugaran.

Sebuah format yang diusulkan oleh ICOMOS-UNESCO untuk menghitung biaya dalam pelaksanaan pemugaran khususnya yang berada dalam perhatian bagi para arsitek, perancang, atau konsultan, adalah checklist tentang unsur ruang dan unsur bangunan yang terkait dengan biaya di dalam perancangan pemugaran.

- a. Unsur ruang (*space elemen*). Yaitu semua biaya terkait sehubungan dengan penciptaan ruang.
- b. Unsur bangunan (*building element*). Yaitu semua biaya yang terkait dengan kebutuhan biaya bangunan secara fisik
- c. Unsur bangunan yang berkaitan dengan ruang (*buiding element related to space*) dan berdampak khususnya kepada biaya bangunan.

Segi lain dalam kepentingan modal tekonologi adalah perlunya tindakan penelitian arkeologis dan penelusuran data infomasi di masa lalu dan membuat dokumentasi untuk masa depan. Hal tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pemugaran.

Ad.3. Pendekatan sebagai Modal Budaya

Seni, budaya, peradaban, dan sejarah adalah kata-kata kunci di dalam gambaran perjalanan hidup manusia dan masyarakatnya yang diwariskan nenek moyang atau generasi-generasi terdahulu kepada generasi-generasi yang kemudian. Keunggulan seni dan budaya serta peradaban manusia ada yang bersifat peninggalan yang nyata (*tangible*) dan ada pula yang merupakan warisan yang tidak dapat terukur nyata (*intangible*). Apabila keduanya digabungkan, ternyata dapat dijual sebagai daya tarik yang memberi nilai tambah kepada lingkungan dan bangunan cagar budaya sebagai komoditi wisata budaya atau heritage touism.

7. Penyertaan Peran Masyarakat

Bila dibandingkan dengan hasil pengamatan di lapangan diberbagai Negara maka ada satu hal yang mencolok yaitu betapa besarnya kesertaan masyarakat lokal di dalam melaksanakan proyek pemugaran, baik sebagai organisasi maupun kesertaan perorangan berdasarkan manfaat yang diharapkan. Mereka cukup jelas disertakan di dalam menentukan, menyelenggarakan dan memanfaatkan proyek-proyek pemugaran cagar budaya yang dikelola oleh kota yang bersangkutan. Pendekatan berdasarkan "*community based actions*" di dalam pelaksanaan pemugaran atau pelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya, memang disarankan oleh UNESCO.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas dan disegala lapisan umur, UNESCO mengadakan kampanye mengenai cinta warisan budaya dengan program melalui sekolah-sekolah dari Taman Kanak-Kanak sampai ke Perguruan Tinggi, dengan nama : *Heritage In Young Hands*.

Dalam kaitan ini di Indonesia program inipun ada namun seakan-akan hanya dengan keterlibatan Dep. Pendidikan Nasional tanpa ada kesertaan Pemerintah Daerah secara proaktif.

Pihak UNESCO juga berpesan kepada para politisi/pemberi keputusan/Pemda, agar di dalam penyelenggaraan pemugaran cagar budaya hendaknya dilibatkan masyarakat terdekat dengan proyek ini dan jadikanlah proyek tersebut sebagai proyek bersama dengan masyarakat kalau proyek itu mau benar-benar berhasil.

7. Kesimpulan

Dalam mengembangkan warisan budaya dari kajian arsitektur diperlukan semacam jaringan yang tugasnya memberi informasi, penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat untuk supaya merasa memiliki warisan budaya yang berada di daerahnya masing-masing. Selain itu mengajari mereka yang sudah memahami untuk membuat jaringan seluas-seluasnya agar pengetahuan tersebut segera dapat tersebar. Selain itu organisasi yang terbentuk sebagai anak dari jaringan tersebut membantu "Pemerintah" dalam membuat peraturan tentang kriteria *me-listed*-kan warisan budaya yang ada di setiap daerah serta mengusulkan warisan budaya yang layak *di-listed*, mengusulkan kepada Pemerintah akan pentingnya mata pelajaran yang berkaitan dengan warisan budaya sejak dini dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

Alam Bina Fakulti

2000 Pusat Sumber Kit. Universiti Malaya

Attbe, Wayne dalam J. Catanese, Anthony

1988 Perencanaan kota, Edisi ke 2, Jakarta : Erlangga.

Bonafice. P cs

1993 Heritage and tourism in the global vilage, London:
Routhdge

Box.P.

1999 Cultural resource management, Unesco Publication.

Coppel, Charles A.

1983 Indonesian Chinese in crisis, Kuala Lumpur. Oxford
University Press

De Haan. F.

1981 Batavia lama, terjemahan, Jakarta: Jurusan Arsitektur
FT Untar

Fairbank, Wilma

1984 A pictorial hitory of Chinese architecture, Liang
Such'eng, China

Hutter. M, I. Rizzo

1997 Economic perspective on cultural heritage, Macmilan
Press, Ltd.

JPPI

2003 Draf Piagam Pelestarian Pusaka Saujana Indonesia,
Kaliurang, Yogyakarta.

Kain,Roger

1981 Planning for conservation, UK: Mansell Publishing.

Liu Laurence G.

1989 Chinese architecture, London : Academy Editions.

Our Heritage is In Our Hands

- 1999 Conservation Technical Leaflets. Urban Redevelopment Authority.

Papageorgeou, Alexander

- 1971 Continuity and Change, NY: Praeger Publisher, Inc.

Pickard, R.P.

- 1996 Conservation in the built environment, Singapore: Longman.

Paul Box

- 1999 GIS and Cultural Resource Management. UNESCO Publication.

Ray Isar, Yudhishthir, editor

- 1984 Why preserve the past? The challenge to our cultural heritage, Washington DC: Smithsonian Institution Press.

Sumintardja, Djauhari

- Tt Various seminar papers and project report on heritage and conservation, Jakarta : University of Tarumanagara.

Berbagai Makalah Seminar Tentang Pemugaran.

Steve van Beek

- 1999 Bangkok Then and Now. AB Publication. Sarina Haves Hoyt, 1992. Old Malacca. Oxford Univ Press.

Tjahjadi, Dkk

- 1999 Arsitektur Cina di Jakarta, Jakarta : Lembaga Penelitian Univ. Tarumanagara.

NN

- 1999 Treasures of Time National Archive of Singapore

TA Markus

1979 Building Conservation and Rehabilitation . London
Newness Buterworth.

Widayati, Naniek

tt Various seminar papers and project report on
heritage and conservation, Jakarta: University of
Tarumanagara.

.... Berbagai Makalah Seminar Tentang Pemugaran.

ZU Youyi

Tt Chinese Residences, China: Beijing Science and
Technology Publishing House

MULTIKULTUR: “POLITIK KEBUDAYAAN YANG MEMBERI RUANG KEPADA POTENSI BUDAYA LOKAL”

Oleh: **Ngurah Paramartha**

1. Pendahuluan

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia dihadapkan pada situasi paling krusial yang pernah “dinikmati” bangsa ini. Memang tiap fase sejarah Indonesia kurang lebih mengalami kondisi-kondisi terpuruk, masa pertarungan kerajaan-kerajaan di Nusantara, Kolonialisme, masa perebutan kemerdekaan, perang saudara karena ketidaksepahaman politik partai. Tetapi pada permulaan milenium ketiga ini, Indonesia benar-benar dipulangkan kepada titik nadir. Segala realitas terjerambab ke tingkat paling datar. Tak ada kepastian, tidak pula ada *good will*. Tiap isu dan wacana yang berkembang lebih banyak mendatangkan syak wasangka dan ancaman daripada harapan.

Dalam realitas praktis, tatanan nilai seperti tercerabut dari akarnya. Kebanyakan situasi yang terjadi hampir melepaskan akal sehat. Lihatlah lapangan politik. Ia dikacaukan dengan perilaku-perilaku manipulatif, tak sportif, kasar, brutal dan melulu mengacu kepada kekuasaan dan bukannya bagaimana politik diarahkan kepada distribusi yang adil dan beradab mengenai penyelenggaraan negara. Di lapangan ekonomi sama buruknya. Pengangguran, PHK, kemiskinan, mekanisme pasar yang amburadul, tumpang tindih dan seringkali tak adil. Kriminal meningkat, baik jumlah maupun kualitas kejahatannya. Hukum yang diharapkan untuk dapat mengatasi situasi *chaos* itu malah melecehkan rasa keadilan publik.

Dalam realitas wacana, yang mengemuka lebih banyak “pertengkar-pertengkar” di kalangan elit politik dan penyelenggara negara dengan statemen-statemen yang membingungkan, dangkal, inkonsistensi dan kadang-kadang hipokrit. Bukannya malah lebih menjelaskan, melainkan tambah membingungkan publik. Ada indikasi bahwa rakyat kehilangan kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin negeri, lembaga dan keadaan yang terjadi. Wacana malah lebih dipandang sebagai

memperkeruh suasana ketimbang sebaliknya. Antara wacana dan laksana ialah paradoksal realitas yang tengah terjadi di negeri ini.

Maka, dalam situasi seperti itu, pertanyaan besar yang mengemuka yang pantas direnungi bersama adalah: apakah pembangunan identitas ke Indonesiaan tengah mengalami guncangan signifikan?. Atau, pada pertanyaan yang lebih hakiki; apakah sesungguhnya telah terbangun ke Indonesiaan sehingga darinya kita pantas mengklaim sebuah identitas kebangsaan yang sempat kita punyai?. Para cendekiawan telah lama menanam pertanyaan ini ketika, misalnya, bahwa pasca kemerdekaan Indonesia, persoalan kultural yang menghadang di depan mata bukanlah mengkonstruksikan pembangunan lima tahun demi pembangunan lima tahun; melainkan yang mendasar ialah bangunan menjadi identitas ke Indonesiaan.

Secara konstitutif, ke Indonesiaan itu dicoba dijelaskan lewat rujukan “puncak-puncak kebudayaan daerah”. Tetapi banyak cendekiawan menganggap pandangan itu terlalu naif dan kurang mewakili secara utuh identitas itu. Lagi pula, bagaimana menjelaskan keberadaan subkultur-subkultur yang ada di negeri ini?. Belum lagi kemungkinan “turut campurnya” nilai modernitas ke dalam tatanan berbangsa. Ketika ke Indonesiaan menjadi persoalan urgen saat ini, maka diperlukan politik kebudayaan yang strategis, inheren dan membumi.

2. Multikultur Sebagai Konsep Kesadaran Sejarah

Multikultur adalah suatu tantangan yang mengedepankan majemuknya nilai-nilai, mekanisme dan struktur sosial dalam bingkai *human being*. Dalam kesadaran pluralisme manusia dihadapkan pada proses pembelajaran yang terus menerus bergulir sepanjang hidupnya terhadap sesuatu di luar pribadi dan identitas monokulturnya. Dalam kedua konteks itu (manusia dan multikultur); banyak perbenturan yang bisa terjadi. Tetapi itu adalah *impact* yang tidak bisa dihindari karena yang mau dicirikan adalah manusia sebagai realitas-realitas *human being*, manusia sebagai yang berakal budi.

Konsep multikultur saat ini menjadi kerinduan sosiologis ketika globalisme begitu deras mendera semua bangsa dan negara, menjadi harapan ketika banyak bangsa mengalami krisis identitas dan perpecahan, menjadi alternatif di tengah *chaos*

dan ketidakpastian hidup. Kita dalam bagian dari situasi yang mencoba merekatkan krisis identitas itu. Dan ketika multikultur menjadi bagian dari isu global, maka sebagai manusia yang merindukan tatanan nilai harmonis, multikultur mungkin menjadi harapan baru dalam membangun reidentifikasi tentang ke-Indonesiaan kita. dalam konteks itu, tak bisa dihindarkan adalah realitas-realitas waktu yang membentuk keberadaan manusia sebagai “mahluk sejarah” sebagaimana diungkapkan M. Sastraprateja, hakekat manusia itu sendiri adalah suatu sejarah, suatu peristiwa dan bukan semata-mata suatu datum (M. Sastraprateja, 19983: ix). Kesadaran sejarah inilah mengingatkan manusia kepada masa lalu sebagai realitas yang menjadi bagian yang membentuk dirinya hingga kini dan kemungkinan di masa depan. Sebagai bagian dari realitas, maka dalam konteks sosiologis tatanan sosial manusia Indonesia sesungguhnya menyimpan berbagai jalinan struktur pergaulan sosial yang dibangun dari keberagaman. Maka, apa yang disebut sebagai multikultur itu sesungguhnya adalah bagian dari fakta sejarah manusia. Dua kondisi geografis; agraris dan maritim menemukan sinkretismenya dalam perilaku budaya profetis, moral dan perilaku pergaulan dalam persatuan nusantara ini. Banyak tanda-tanda sejarah yang membuktikan di mana kebersamaan dalam keberagaman itu terjalin dalam bingkai semangat kemanusiaan sebagai bagian yang utuh dari hidup penuh nilai dan keberbedaan. Dalam lingkup yang paling kecil kenyataan historis itu misalnya dapat dilihat di Kubutambahan, Buleleng, Bali di mana situs-situs yang mencerminkan kehidupan multikultur ditandai dari abad ke-13. Maka, ketika isu multikultur itu merebak belakangan ini sebagai alternatif untuk membenang-merahi kesadaran hidup dalam keberagaman agama, etnis dan budaya, maka sesungguhnya itu bukanlah hal baru bagi bangsa Indonesia. Multikultur ketika itu tidak hanya menempatkan keberagaman dalam konteks sinkretisme fisik, melainkan telah tertanam dalam relasi-relasi rohani; multikultur bagi mereka ketika adalah kesadaran yang memahami satu sama lain sebagai bagian utuh dari ras kemanusiaan, bagian utuh dari tatanan yang meletakkan satu dengan yang lain saling memperkaya bangunan kebudayaan secara menyeluruh.

Dalam hubungan konteks kekinian, multikultur bukanlah suatu nilai dan tatanan baru di negeri ini, karena ia adalah realitas

sejarah bangsa Indonesia. Maka, dalam ikhtiar membangun rasa ke Indonesiaan ini, kita semua sangat membutuhkan kesadaran sejarah itu, bahwa di tengah krisis identitas, *chaos* di segala lini kehidupan, multikultur sangat perlu di kembalikan saat ini guna mendapatkan keharmonisan tatanan kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman.

3. Dinamika Budaya Lokal

Juga karena kesadaran sejarah, realitas geografi dan sosialogi (yang dengan sendirinya telah mencerminkan kenyataan beragam). Indonesia dibangun dari ribuan budaya lokal. Politik kebudayaan seyogyanya dibangun dari potensi itu. Dalam salah satu konsep keberagaman yang pernah kita punyai, tiap-tiap budaya mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya menjelaskan dirinya sendiri. Dalam pengertian itu, kondisi seperti sekarang di Indonesia ini sangatlah tepat memberi hak dan kesempatan kepada budaya-budaya lokal untuk mengekspresikan dirinya, memberi ruang yang layak bagi dinamika pertumbuhan dan pengembangan dirinya di tengah kemelut yang berkecamuk di negeri ini. Karena, bukan tak mungkin terjadi bahwa kekacauan, krisis dan ketidakpastian ini terjadi karena telah lama ketidakadilan diperlihatkan kepada masyarakat yang beragam ini. Jika politik kebudayaan mau dijadikan paradigma baru dalam konteks memulihkan keretakan yang berlangsung pada bangsa ini, maka itu dapat dimulai dari upaya memberi kesempatan bertumbuh dan berkembang kepada potensi-potensi budaya lokal.

Karena bukan tak mungkin ketika potensi-potensi lokal dibangkitkan, lambat laun para pengusungnya akan menyadari bahwa ada suatu benang merah yang perlahan-lahan menyadarkan dan membangun pribadinya tentang kekayaan beragam yang mereka punyai, dan ini juga perlahan-lahan membangkitkan keterpanggilan mereka tentang arti menjadi ancaman baru bagi rasa kebangsaan mereka, bukan tak mungkin secara instingtif muncul kerinduan untuk merekatkan identitas kebangsaan, identitas untuk menjadi

SEKILAS TENTANG PENYELENGGARAAN KONGRES KEBUDAYAAN¹

Oleh: **Nunus Supardi**

'Pemerintahan sesuatu negara dapat hidup subur apabila kebu-dayaan tinggi tingkatnya, karena kebudayaan berpengaruh pula pada sifat pemerintahan Negara. Kebudayaan lambat laun mesti sangat kuat tumbuhnya, karena kebudayaan adalah ciptaan hidup daripada sesuatu bangsa.'

(Bung Hatta)²

1. Pendahuluan

Kongres Kebudayaan merupakan suatu peristiwa budaya yang amat penting maknanya bagi kehidupan berbudaya sebuah bangsa. Lebih-lebih bagi bangsa Indonesia yang lahir dari berbagai macam suku bangsa (kurang-lebih ada 483 suku bangsa) yang berbeda-beda budaya, agama, dan bahasa (kurang-lebih ada 600 buah bahasa daerah dan dialek). Forum kongres yang mengandung makna: *'(rangkaian) pertemuan para wakil organisasi (politik, sosial, profesi) untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai suatu masalah,'*³ menjadi ajang yang dipandang paling tepat untuk bersama-sama membahas perma-salahan kebudayaan beserta unsur-unsurnya. Dalam forum itu diperdebatkan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan: pengertian, konsep, strategi, kelembagaan, kebijakan dan program serta hal-hal lain yang berkaitan erat dengan kebudayaan.

Catatan sekitar Penyelenggaraan Kongres Kebudayaan dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekilas tentang pernik-pernik sekitar penyelenggaraan Kongres Kebudayaan (KK) yang pernah diselenggarakan: materi yang dibahas, pandangan pemrasaran dan kesimpulan yang disepakati. Di

¹ Disampaikan pada Kongres Kebudayaan V di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tgl. 20-23 Oktober 2003.

² Diucapkan pada Kongres Kebudayaan tahun 1948, di Magelang.

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, hal. 455*

samping itu dalam catatan sekilas ini juga disampaikan berbagai hal yang berkenaan dengan bagaimana tindak lanjut dari hasil setiap kongres. Butir-butir kesimpulan mana yang telah ditindaklanjuti dan butir-butir mana yang sedang atau belum ditindaklanjuti dan perlu diperbincangkan pada kongres yang akan datang.

Gambaran agak lengkap dari seluruh perjalanan KK dapat dilihat pada buku yang berjudul 'KONGRES KEBUDAYAAN SEBELUM DAN SESUDAH INDONESIA MERDEKA,' yang telah disiapkan oleh Panitia. Khusus mengenai Kongres Kebudayaan sebelum Indonesia merdeka, sengaja ditampilkan dalam kongres sekarang sekilas ini sebagai bahan masukan baru. Selama ini bila kita berbicara tentang KK, perhatian hanya terpusat pada KK yang diselenggarakan sesudah Indonesia merdeka saja. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka (28 tahun sebelum merdeka) kaum terpelajar bumiputra di samping telah berjuang untuk '*menjadi satu bangsa*' dan '*menjadi bangsa yang merdeka*' juga sudah berjuang memerdekakan kebudayaan bang-sanya. Mereka telah melontarkan gagasan, mengambil prakarsa dan bertin-dak untuk memperbincangkan masalah kebudayaan dalam forum kongres, tidak jauh berbeda dengan yang kita lakukan sekarang. Sebagai suatu peristiwa budaya, kegiatan itu telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah kebudayaan kita. Peristiwa ini patut pula dicatat sebagai awal kongres yang mampu menjadi pendorong diselenggarakannya kongres-kongres berikutnya.

2. Kongres Kebudayaan Sebelum Indonesia Merdeka

Berdasarkan data yang dapat dikumpulkan (antara lain dari Museum Sono-budoyo, Yogyakarta), sebelum Indonesia merdeka telah diselenggarakan 7 kali KK, 2 kali Kongres Bahasa Jawa (1924 dan 1927), 2 kali Kongres Bahasa Sunda (1924 dan 1927) dan 1 kali Kongres Bahasa Indonesia (1938). Kongres Kebudayaan I diadakan di Surakarta, tanggal 5 – 7 Juli tahun 1918, dengan nama '*Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling*', atau kalau diterje-mahkan menjadi '**Kongres Guna Membahas Pengembangan Kebudayaan Jawa.**'⁴

⁴ *Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling*, Stoomdrukkrij CA. MISSET, Semarang 1918.

Munculnya inisiatif itu tidak dapat dilepaskan dari mulai bangkitnya kesadaran berbangsa, yang ditandai dengan berdirinya perkumpulan Boedi Oetomo, 1908. Inisiatif muncul tahun 1918, berarti tepat di tengah-tengah dua peristiwa yang amat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu antara berdirinya BO tahun 1908 dan Sumpah Pemuda tahun 1928. Hal ini tentu bukan hanya 'kebetulan' saja, tetapi karena kesadaran itu sejalan dengan makin tumbuhnya kesadaran ber-bangsa. Gagasan untuk menyelenggaraan KK muncul dari seorang terpelajar asli bumiputra. Ia adalah PAAP. Prangwadono, yang kemudian dinobatkan menjadi Mangkunegoro VII. Oleh karena itu nama Prangwadono patut pula untuk dinobatkan sebagai penggagas KK pertama di Indonesia.

Tema pokok yang dibahas pada KK tahun 1918 adalah ke arah mana kebuda-yaan Jawa dikembangkan? Pemilihan tema ini memberikan indikasi yang kuat bahwa kaum terpelajar telah memiliki kepekaan yang tinggi terhadap masa depan kebudayaannya. Berdasarkan tema tersebut topik yang dibahas adalah tentang perlunya pelajaran sejarah, pengembangan kebudayaan Jawa dan penguasaan ilmu pengetahuan Barat. Salah satu rekomendasi penting yang disampaikan dari kongres itu adalah agar segera didirikan lembaga penelitian kebudayaan. Berdasarkan rekomendasi ini, tahun 1919 berdiri **Java-Instituut**, yang selanjutnya lembaga ini aktif merencanakan dan melaksanakan 6 kali KK berikutnya.

Kongres Kebudayaan II diselenggarakan di Surakarta, tahun 1919. Kongres ini disiapkan dan dilaksanakan oleh Java-Instituut dan oleh karena itu nama kongres mengalami perubahan dari '*Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling*', menjadi '*Congres van het Java-Instituut*'. Mulai dari KK II bidang kebudayaan yang dibahas menjadi semakin luas. Tidak hanya berkenaan de-ngan kebudayaan Jawa saja tetapi meluas termasuk kebudayaan Sunda, Madu-ra dan Bali. Topik yang dibicarakan dalam KK II adalah pengajaran sejarah dan kebudayaan Jawa, Sunda, Madura dan Bali. Kongres Kebudayaan III diseleng-garakan di Bandung, tahun 1921. Topik yang dibahas mengenai pendidikan seni musik dan sejarah pada pendidikan bumiputra, pelestarian dan pengembangan seni musik serta perbandingan seni musik sekarang dengan masa lalu.

Tiga tahun kemudian, yakni pada bulan Desember tahun

1924 diselenggarakan Kongres Kebudayaan IV, di gedung Kepatihan Yogyakarta. Topik yang dibahas mengenai sejarah dan filosofi bangunan kuno di Jawa, nilai yang terkandung dalam bangunan kuno untuk Kebudayaan Jawa masa kini dan akan datang, serta pelestarian dan pemanfaatan bangunan kuno. Di samping itu juga dibahas mengenai cara bagaimana agar kebudayaan daerah mendapat perhatian lebih banyak dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kongres berikutnya (V) diselenggarakan di Surabaya pada tahun 1926. Topik yang dibahas mengenai: musik Hindu-Jawa dibandingkan dengan musik Sunda, serta musik dan sastra Madura, kebudayaan daerah dalam pendidikan, serta makna sisa-sisa bangunan Majapahit. Dalam kongres ini R. Sosrodanoe-koesoemo membawakan makalah berjudul: *'Tentang Kesusastraan dan Seni Budaya Madura,'* sedangkan Abdul Azis membawakan makalah berjudul: *'Meninjau Madura Zaman Dulu.'*

Setelah kongres tahun 1926 disusun oleh KK VI pada tahun 1929 di Surakarta. Kongres ini diselenggarakan dalam rangka memperingati 10 tahun berdirinya Java-Instituut. Topik yang dibahas adalah tentang pendirian perguruan tinggi jurusan sastra, filsafat dan budaya Timur. Dalam Kongres ini berbicara antara lain Ki Hajar Dewantara, yang menyampaikan usul *'agar Pemerintah mewajibkan para pegawai, insinyur, guru-guru, terutama kepala-kepala sekolah HIS untuk mengenal satu bahasa, bahasa Indonesia'*⁵.

Terakhir, KK VII diselenggarakan pada tahun 1937 di Bali. Transportasi para peserta dari pulau Jawa ke Bali diangkut dengan kapal laut bernama *'Op ten Noort'*. Karena kapal tidak dapat merapat di pelabuhan Padangbai, para peserta secara bertahap diangkut menuju daratan dengan sekoci. Para peserta menginap di dalam kapal tersebut, meskipun acara kongres diselenggarakan di Denpasar dan mengadakan kunjungan ke beberapa tempat, seperti Kintamani, pura Besakih, pura Kehen dan lain-lain. Dalam kongres ini dibahas makalah: (1) Kehidupan Sosial Masyarakat Bali; (2) Kehidupan Keluarga Bali; dan (3)

⁵ Ki Hadjar Dewantara, *Kebudayaan* Bagian II:1994.

⁶ *Majalah 'Djawa', Java Instituut:1938.*

Bangunan Tua Bali⁶.

Setelah Kongres Kebudayaan VII di Bali, Java-Instituut mengalami penurunan kegiatan, karena situasi pemerintah penjajah menghadapi masa-masa sulit menjelang pecahnya Perang Dunia II. Java-Instituut yang telah berjasa dalam memprakarsai 6 kali KK, 2 kali Kongres Bahasa Jawa dan 2 kali Bahasa Sunda membubarkan diri pada tahun 1949, sesuai dengan masa hidup yang tercantum dalam akte pendirian.

3. Kongres Kebudayaan Sesudah Indonesia Merdeka

Selama ini dasar untuk menentukan jumlah dan urutan KK sesudah Indonesia merdeka dimulai dari KK 1948 di pendopo Kabupaten Magelang. Ini berarti tiga tahun setelah Indonesia merdeka, atau 17 tahun setelah Sumpah Pemuda. Kongres ini ditetapkan sebagai KK pertama (meskipun sempat menjadi perdebatan), sebagai perwujudan dari keputusan konferensi persiapan yang diselenggarakan pada tanggal 6 Mei 1948.

Gagasan untuk menyelenggarakan kongres itu sendiri mula-mula datang dari Pusat Kebudayaan Kedu. Para budayawan Kedu mengambil langkah ini sebagai kelanjutan dari diselenggarakannya Musyawarah Kebudayaan, pada tanggal 31 Desember 1945, 4 bulan setelah Indonesia merdeka di sebuah kota kecil, Sukabumi. Kegiatan ini oleh sebagian budayawan dipandang sebagai awal dari KK sesudah Indonesia merdeka. Selanjutnya inisiatif itu *'diambil alih'* oleh Kementerian PP dan K, dalam arti sebatas *'campur tangan passief'*, seperti yang diakui oleh Mr. Ali Sastroamidjojo selaku Menteri PP dan K⁷. Kongres Kebudayaan I diselenggarakan saat situasi pemerintahan dan keamanan negara belum stabil *'....oleh sebab blokade politik dan terutama ekonomi oleh Belanda, terlebih pula yang mengenai perhubungan.'* Kondisi yang serba sulit itu juga digambarkan oleh Sutarjo yang menjabat sebagai Ketua Panitia sebagai berikut: *'Betul banyak kesukaran yang telah kami alami. Misalnya Bapak Mr. Wong-sonegoro sendiri telah beberapa kali dalam malam gelap gulita mengadakan istirahat yang terpaksa di tengah-tengah sawah, karena mobilnya pun beristirahat, walaupun zonder izin beliau. Begitu pula Bapak Bupati Mage-*

⁷ Majalah Indonesia, No. I-II, Tahun I, 1950, hal. 13

lang telah mengerahkan beberapa Lurah membuat balai-balai sekedar untuk menghilangkan kesukaran-kesukaran disebabkan masalah penginapan dsb..⁸

Kesulitan transportasi juga dialami oleh Ki Mangoensarkoro, salah seorang pemrasaran. Ia terpaksa harus menunda penyampaian prasarannya satu hari sebab ia berangkat dari Yogya pagi hari dan tiba di Magelang baru pada sore harinya. Pada akhirnya semua kesulitan Panitia dapat diatasi berkat bantuan dan gotong royong dari berbagai pihak. Bantuan itu tidak hanya datang dari pendudukan Magelang tetapi juga dari Temanggung dan sekitarnya, mulai dari berupa pinjaman piring, cangkir, sendok, kursi dan pemasangan lampu-lampu penerang, hingga tukang angkut air ke balai-balai tempat para peserta kongres menginap. Bantuan juga datang dari masyarakat Solo dan Yogyakarta.

Gambaran tentang situasi keamanan negara yang sedang tidak aman menjadi bertambah jelas ketika Mr. Wongsonegoro mengajak para peserta kongres untuk bersama-sama mengheningkan cipta selama 1 menit untuk mendo'akan beberapa korban pada insiden yang terjadi ketika pemuda-pemuda kita yang sedang merayakan peringatan 3 tahun kemerdekaan pada tanggal 16 dan 17 Agustus 1948 di Pegangsaan Timur, Jakarta.

Tentang *'kenekadan'* para budayawan, seniman dan cendekiawan pada saat itu digambarkan oleh Dr. Bahder Djohan sebagai *'...keberanian dan ketulusan pendekar-pendekar kita yang sangat membanggakan. Di saat Belanda bersiap-siap untuk menghancurkan pusat pemerintahan RI, di saat bangsa Indonesia secara halus telah dapat meraba akan bahaya yang mengancam lambang perjuangannya, di saat itulah Kongres Kebudayaan dilaksanakan sebagai wujud tantangan yang nyata terhadap bala yang akan datang.'* Di samping itu juga karena didasari oleh *'hasrat yang bernyala-nyala untuk menyelenggarakan dan memperkembangkan kebudayaan kita, sebagai sumbangan menyelesaikan perjuangan dan revolusi kita.'*

Titik berat yang akan dicapai oleh kongres menurut Wongsonegoro adalah meletakkan dasar kebijakan di bidang

⁸ Majalah Indonesia, No. I-II, Tahun I, 1950, hal. 7.

kebudayaan untuk hari kemudian, dan untuk itu perlu dipakai keadaan sekarang sebagai pangkalan dengan tidak melepaskan diri dari keadaan yang telah lampau. Sementara itu Mr. Ali Sastroamidjojo dalam pidato sambutannya selaku Menteri PP dan K lebih menekankan pengertian tentang krisis kebudayaan, bahwa penyebabnya bukan saja karena kita sedang dalam revolusi, melainkan sudah dimulai sejak jaman penjajahan. Pada bagian lain Moh. Hatta dalam sambutannya menyinggung tentang perlunya memajukan kebudayaan bangsa. *'Sebagai bangsa, kebudayaan kita memiliki usia amat panjang, dan di masa lampau memiliki riwayat yang hebat, harum dan tidak kalah dengan kebudayaan negeri-negeri lain'*. Untuk memajukan kebudayaan itu Moh. Hatta menyampaikan pandangan: *'Kebudayaan tidak dapat dipertahankan saja, kita harus berusaha merobah dan memajukan, oleh karena kebudayaan sebagai kultuur, sebagai barang yang tumbuh, dapat hilang dan bisa maju'*⁹.

Sementara itu Presiden Soekarno mengingatkan kepada kita bahwa: *'pada kongres inilah kita mulai dengan memperbincangkan **'kebudayaan nasional.'*** Mengapa demikian? Karena, *'....kita ini di dalam sejarah kita yang telah lampau ribuan tahun yang telah lalu, belum pernah mengalami kebudayaan nasional, tidak di jaman Belanda, tidak pula di jaman kebesaran kita sebelum jaman Belanda, tidak di jaman Sriwijaya atau di jaman Majapahit.'*¹⁰ Oleh karena itu Bung Karno mengharap agar melalui kongres akan diperoleh *'satu sifat impetus, satu pendorong yang sebenar-benarnya ke arah pembangunan nasional, kemajuan dan sebagainya.'*

Sengaja kisah tentang KK 1948 ini dikemukakan agak panjang lebar, karena dari kisah itu kita dapat memahami hasrat dan langkah yang dilakukan oleh para budayawan dalam menyikapi kehadiran kebudayaan Indonesia. Kesimpulan dari KK tahun 1948 dikelompokkan menjadi 5, yaitu: (1) kebudayaan dan pembangunan masyarakat dan negara; (2) kebatinan dalam hubungannya dengan kebudayaan; (3) kebudayaan dan pendidikan; (4) berbagai hal tentang kesenian; dan (5) tentang pembangunan perkotaan.

Setelah KK I 1948, pada tahun 1950 di Jakarta

⁹ Majalah Indonesia, No. I-II, Tahun I 1950, hal. 14-15.

¹⁰ Majalah Indonesia, No. I-II, Tahun I, 1950, hal. 17.

diselenggarakan Konferensi Ke-budayaan sebagai lanjutan kongres Magelang. Konferensi ini dilaksanakan oleh Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI) dan memilih tema khusus: *'Kebudayaan Nasional dan Hubungannya dengan Kebudayaan Bangsa-bangsa lain.'* Kon-ferensi ini memiliki makna yang amat penting dan penyelenggaraannya diran-cang sama dengan KK. Lagi-lagi kegiatan ini oleh sebagian peserta disebut sebagai KK II setelah KK di Magelang.

Kongres Kebudayaan II disiapkan dan diselenggarakan oleh LKI pada tahun 1951, di kota Bandung. Dalam kongres kali ini pokok masalah yang dibahas menyempit pada hal-hal yang berkenaan dengan: (1) Hak Pengarang; (2) Perkembangan Kesusastraan; (3) Kritik Seni; dan (4) Mengenai Sensor Film. Setelah itu disusul oleh KK III, tahun 1954 di Surakarta Kongres ini disiapkan dan dilaksanakan oleh BMKN, dan bersa-maan dengan Rapat Umum BMKN. Dalam kongres ini pokok masalah yang dibahas adalah tentang pendidikan kebudayaan. Kesimpulan kongres mencakup masalah: (1) pendidikan kebudayaan untuk masyarakat sekolah; (2) pendidikan kebudayaan untuk masyarakat kota; (3) pendidikan kebudayaan untuk masyarakat buruh dan tani.¹¹

Setelah KK III tahun 1954, pada bulan Juli 1960 di Bandung, BMKN menye-lenggarakan kongres yang diberi sebutan Kongres Badan Musyawarah Ke-budayaan Nasional. Sebagai suatu peristiwa kebudayaan, kongres ini memilih tema *'Fungsi Kebudayaan dalam Pembangunan Ekonomi'*, yang meliputi peranan ilmu dan sarjana, peranan seni dan seniman, dan peranan pendidikan dan pendidik.¹²

Kongres ini menjadi peristiwa yang cukup menghebohkan karena masalah Mani-festo Politik (Manipol), yakni pidato resmi Presiden Soekarno pada peringatan Hari Kemerdekaan tgl. 17 Agustus 1959, yang kemudian dikukuhkan dengan TAP MPRS No. I/MPRS/1960 sebagai *'Garis-garis Besar Haluan Negara.'* Para utusan Lekra dalam sidang mengajukan sebuah resolusi, yang pokok intinya supaya BMKN dalam kongresnya di Bandung

¹¹ Laporan BMKN, terbitan BMKN:1954.

¹² DS. Moeljanto dan Taufiq Ismail, *Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI* DKK, Terbitan Mizan dan HU Republika, 1995, hal 34

itu menerima Manipol dan Usdek sebagai landasan kegiatan kerjanya di masa depan. Sebab, menurut penilaian Lekra, selama ini belum pernah BMKN secara jelas menyatakan setuju atau tidak setujunya terhadap Manifesto Politik. Kongres ini dipandang sebagai sebuah kongres yang sarat dengan aroma politik sehingga DS Moeljanto dan Taufiq Ismail menyebutnya sebagai *'sekelumit peristiwa 'politik' yang mulai merembesi sektor kebudayaan, yang taktik dan strategi ofensifnya dilancarkan di tengah-tengah berlangsungnya Kongres BMKN.'*¹³

Setelah KK 1954, disusul oleh Kongres IV, di Jakarta tahun 1991. Ini berarti diselenggarakan setelah hampir 40 tahun setelah KK III. Sebagai konsekuensi dari bentuk sistem politik pemerintahan pada saat itu, ketika gagasan untuk menyelenggarakan KK yang muncul dari pihak Pemerintah, mendapatkan ber-bagai macam komentar bernada sumbang dari kalangan sebagian masyarakat. Muncul ungkapan-ungkapan yang bernada sinis terhadap rencana kongres seperti: *kongresnya baju Korpri, kongresnya baju safari, kongresnya pejabat pemerintah, kongres birokrasi, keputusan kongres sudah siap sebelum kongres dibuka, dan lain-lain.*

Berbagai komentar itu menjadi masukan yang amat berguna bagi Panitia, untuk berupaya agar kesan negatif tersebut dapat dihilangkan. Meskipun kongres selalu dibayang-bayangi oleh kekhawatiran terjadinya tindakan represif seperti pencekalan, pelarangan dan penangkapan, tetapi terbukti kongres dapat berlangsung dalam suasana penuh kebebasan dan keterbukaan dalam menyampaikan pendapat. Rekomendasi tentang perlunya penerapan system desentralisasi, debirokratisasi dan demokrasi kini menjadi kenyataan.

Topik-topik yang dibahas dalam KK IV adalah: (1) Warisan Budaya: Penya-ringan dan Pemeliharaan; (2) Kebudayaan Nasional: Kini dan di Masa Depan; (3) Daya Cipta dan Perkembangan Kebudayaan; (4) Kebudayaan dan Sektor-sektor Kehidupan Masyarakat; dan (5) Kebudayaan Indonesia dan Dunia (Umat Manusia).¹⁴

¹³ DS. Moeljanto dan Taufiq Ismail, *Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI DKK*, 1995, hal. 36

¹⁴ Laporan Kongres Kebudayaan 1991.

4. Beberapa Catatan dari Hasil Kongres dan Tindak Lanjutnya.

Untuk memperoleh gambaran secara lengkap tentang pokok bahasan yang telah diperdebatkan sejak Kongres Kebudayaan tahun 1918 hingga 1991, disajikan cuplikan dalam bentuk tabel seperti pada lampiran. Beberapa hal penting dari hasil kesimpulan kongres untuk mendapatkan pemikiran kita lebih lanjut adalah sebagai berikut.

1. Peran Pemerintah dalam penyelenggaraan Kongres Kebudayaan

Pemrakarsa dan pelaksana KK, baik sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka, kebanyakan datang dari kalangan budayawan, seniman dan cendekiawan yang menaruh perhatian besar terhadap kebudayaan. Pada KK sebelum Indonesia merdeka inisiatif pertama datang dari seorang terpelajar bumiputra, yaitu Prangwadono yang didukung oleh kaum terpelajar lainnya. Panitia Penyelenggara kebanyakan berasal dari kalangan bumiputra, sedangkan dana mendapat bantuan dadari pihak kerajaan, para penyumbang dan subsidi dari pemerintah Hindia Belanda.

Dari penyelenggaraan KK pertama tahun 1918 melahirkan sebuah lembaga penelitian kebudayaan, **Java-Instituut**. Misi lembaga ini adalah melakukan kegiatan untuk memajukan pengetahuan dan pengertian kebudayaan Jawa dengan mengadakan kongres-kongres, pameran, ceramah, diskusi, kursus, pertanyaan berhadiah (kuis) dan karang-mengarang. Sebagai bentuk realisasi dari misi tersebut mulai dari KK tahun 1919 hingga kongres terakhir tahun 1937, segala persiapan dan pelaksanaan dikoordinasikan oleh Java Instituut. Peran Pemerintah Hindia Belanda dan para raja yang terlibat dalam kongres sebatas memberikan bantuan fasilitas kepada lembaga tersebut.

Demikian pula halnya dengan KK sesudah Indonesia merdeka, inisiatif datang bukan dari kalangan Pemerintah. Para budayawan, seniman dan cendekiawan merasa terpenggil untuk memikirkan nasib kebudayaan bangsanya. Sebagian dari mereka yang terlibat dalam persiapan KK pertama tahun 1948 adalah kaum terpelajar yang telah terlibat dalam kegiatan Kongres Kebudayaan dan Kongres Bahasa sebelum Indonesia

merdeka. Nama-nama seperti Prof. Dr. Husein Dja-jadiningrat, Dr. Radjiman, Ki Hadjar Dewantara, Dr. Porbatjaraka, Mr. Wongsonegoro, banyak berperan dalam kongres-kongres sebelum Indonesia merdeka.

Seperti telah disebutkan di muka, persiapan penyelenggaraan kongres diawali dengan Musyawarah Kebudayaan di Sukabumi 1945. Setelah pertemuan Sukabumi, Pusat Kebudayaan Kedu mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan lanjutan dan sepakat untuk mengusulkan agar segera diselenggarakan KK. Dalam pelaksanaan Kementerian PP dan K *'berperan pasif'* saja. Sesudah KK I di Magelang disusul KK II di Bandung, pelaksanaannya ditangani oleh Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI), pada KK III 1954 kegiatan sepe-nuhnya ditangani oleh BMKN. Kongres itu diselenggarakan bersamaan dengan Rapat Umum BMKN.

Dari sedikit gambaran di atas jelas bahwa dalam hal penyelenggaraan tiga kali KK sesudah Indonesia merdeka, posisi Pemerintah hanya pasif, dalam arti sebagai fasilitator saja. Peran aktif lebih banyak dilakukan oleh organisasi kebudayaan yang bersifat non pemerintah, seperti yang diakui oleh Menteri PP dan K Mr. Ali Sastroamidjojo pada KK tahun 1948 yang antara lain mengatakan: *'...campur tangan Kementerian itu adalah pasif, oleh karena saya berpendirian, meskipun pemerintah telah mempunyai garis politik yang tertentu terhadap kebudayaan pada waktu sekarang ini, tidak seharusnya Kementerian PP dan K campur tangan sehingga seolah-olah merupakan tekanan atau merupakan perintah dari atas untuk menyelenggarakan sesuatu....'*¹⁵ Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Menteri PP dan K, Mr. Wongsonegoro yang hadir pada KK kedua tahun 1951 di Bandung, dan oleh Menteri PP dan K, Mr. Moh. Yamin pada pembukaan KK ketiga tahun 1954 di Surakarta. Dalam pidato sambutannya Mr. Moh. Yamin mengatakan bahwa BMKN adalah: *'...yang secara langsung merupakan koordinasi dalam usaha-usaha guna perkembangan kebudajaan dalam arti luas menampakkan kegiatan yang memberi dasar kepada pengharapan umum untuk mentjapai hasil yang baik. Berdasarkan keinsyafan itu maka Pemerintah tak segan-segan*

¹⁵ Majalah Budaya, Tahun 1950, hal. 13.

untuk mencurahkan perhatian kepada Kongres ini dan memberikan bantuan sebaik-baiknya dimana perlu dan dimana mungkin.¹⁶

Berbeda dengan ketiga KK tersebut, pada penyelenggaraan KK III 1991 inisiatif untuk menyelenggarakan KK datang dari pihak pemerintah, dalam hal ini dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Langkah ini dilakukan mengingat organisasi kebudayaan BMKN sedang mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan, seperti yang telah diutarakan di muka. Setelah KK III 1954, perkembangan politik di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar. Politik telah menjadi panglima dan sebagai imbasnya kebudayaan pun tidak terelakkan menjadi sarat bermuatan politik. Terbukti pendekatan budaya itu memang merupakan sarana ampuh untuk mencapai tujuan-tujuan politik.¹⁷ Akibatnya tidak hanya terjadi perang ideologi antara komunis dan non komunis, tetapi juga perang budaya dalam arti dua kelompok budayawan, cendekiawan dan wartawan yang menganut faham komunis dengan yang tidak setuju dengan faham komunis. Mencermati situasi pada saat itu DS Muljanto dan Taufiq Ismail sampai pada kesimpulan bahwa telah '*terjadi prahara budaya yang menggelegar di tahun 60-an itu.*'¹⁸

Setelah peristiwa G30S/PKI 1965 keberadaan organisasi kebudayaan menjadi semakin terpuruk. BMKN sebagai organisasi kebudayaan yang bersifat nasional tidak berdaya lagi. Menyadari betapa pentingnya peran KK bagi kemajuan kebudayaan, pada sekitar tahun 1987 para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan berkeinginan untuk menyelenggarakan KK berikutnya. Dengan demikian dapat dikatakan gagasan yang datang dari Pemerintah itu merupakan yang pertama sejak dari KK I sebelum Indonesia merdeka (1918) hingga KK III sesudah Indonesia merdeka (1954). Apakah peran Pemerintah seperti ini masih diperlukan pada Kongres Kebudayaan berikutnya?

2. Usul Pembentukan Kelembagaan di Bidang Kebudayaan

¹⁶ Majalah Budaya, September-Oktober 1954, hal.2

¹⁷ DS. Moeljanto dan Taufiq Ismail, *Prahara Budaya: Kilas Balik Offensif Lekra/PKI Dkk*, 1995, hal.9

¹⁸ DS. Moeljanto dan Taufiq Ismail, *Prahara Budaya: Kilas Balik Offensif Lekra/PKI Dkk*, 1995, hal. 6

Masalah kelembagaan kebudayaan, telah menjadi bahan perbincangan sejak awal KK tahun 1918. Rekomendasi untuk mendirikan lembaga penelitian kebudayaan diwujudkan dengan pendirian Java-Instituut tahun 1919. Telah diusulkan pula berdirinya lembaga pendidikan yang menampung anak-anak berbakat di bidang seni kerajinan. Pada tahun 1939 berdirilah sekolah kerajinan (*Kunst Ambaachtsschool*) di Yogyakarta. Sedangkan usul agar didirikan jurusan untuk studi sastra, filsafat dan budaya Timur direalisasikan dalam bentuk pendirian dibuka Fakultas Sastra dan Filsafat (*Faculteit der Letteren en Wijsbegeerten*) tahun 1940. Di samping itu didirikan museum, sebagai tempat penyelamatan benda peninggalan sejarah dan purbakala seperti: (1) tahun 1920, Museum Trowulan, Mojokerto; (2) tahun 1929, Museum Geologi, Bandung; (3) tahun 1932, Museum Bali; (4) tahun 1933, Museum Rumah Adat Banjuang, Bukittinggi; (5) tahun 1935, Museum Sonobudoyo, Yogyakarta; dan (6) tahun 1938, Museum Simalungun, Sumatera Utara. Untuk melengkapi upaya perlindungan bagi keselamatan benda-benda tersebut dikeluarkan peraturan perundang-undangan, yang dikenal dengan sebutan '*Monumenten Ordonnantie Stbl. Tahun 1931*,' yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Selanjutnya, hampir dalam setiap KK sesudah Indonesia merdeka disampaikan rekomendasi tentang perlunya dibentuk lembaga, panitia, atau badan yang akan melaksanakan fungsi teknis aspek kebudayaan. Bahkan dalam KK 1948, 1951 dan 1954 dibentuk sidang khusus untuk membahas masalah organisasi itu. Untuk mendapatkan gambaran tentang usul dibentuknya berbagai lembaga kebudayaan selama KK berlangsung dan realisasi dari usul tersebut dapat dilihat dalam tabel pada lampiran.

Dari sekian banyak usul untuk membentuk dan menata berbagai lembaga yang telah ada guna mendukung keberhasilan pembina-an dan pengembangan kebudayaan, telah dapat direalisasikan. Telah berdiri Museum Negeri Provinsi (di 27 provinsi), Museum Khusus, Galeri Nasional, Taman Budaya (27 provinsi), Perpustakaan (27 provinsi), Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (9 provinsi), Balai/Kantor Bahasa (17 provinsi), Balai Penelitian Arkeologi (10 provinsi), Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (11 provinsi), Balai Studi dan Kon-

servasi, Lembaga Sensor Film, dan masih banyak lagi yang lain. Di samping telah banyak berdiri lembaga atau organisasi kebudayaan/kesenian di ling-kungan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Ada beberapa usul yang hingga kini belum dapat direalisasikan. Salah satu usul yang paling penting adalah **pembentukan Kementerian Kebudayaan**, yang telah diusulkan mulai dilontarkan pada Musyawarah Kebudayaan 1945 di Sukabumi, diikuti oleh KK tahun 1948 dan desakan para peserta kongres pada sidang KK tahun 1991, dan Kongres Kesenian I tahun 1995.

Dalam sejarah kelembagaan, kebudayaan telah bersatu dengan bidang pendidikan selama 55 tahun, dalam naungan Kementerian PP dan K (1945-1964), Kementerian PD dan K (1964-1966), Depdikbud (1966-1999), dan Dep-diknas, (1999-2000). Mulai awal tahun 2000 bergabung dengan Pariwisata, menjadi De-partemen Kebudayaan dan Pariwisata. Departemen ini baru berjalan beberapa bulan diganti menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang mempunyai misi hanya menyusun kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan. Oleh karena itu untuk dapat menampung fungsi operasional teknis dibentuk Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, dengan misi mengoperasionisasikan kebijakan bidang kebudayaan yang digariskan oleh Menteri Budpar. Tetapi belum berusia 2 tahun berdasarkan Keputusan Presiden No. 29, 30, 31, dan 32 tanggal 26 Mei 2003 BP BUDPAR dibubarkan.

Dengan sering terjadinya perubahan bentuk kelembagaan itu ada langkah penataan kembali posisi (*reposisi*) kelembagaan kebudayaan. Sudah saatnya kebudayaan dapat berdiri secara mandiri dalam kelembagaan Pemerintah, sesuai dengan yang dicita-citakan oleh para peserta kongres, dalam bentuk Departemen atau Kementerian Negara, atau Lembaga Pemerintah Non De-partemen (LPND). Selain itu ada usul agar lembaga non-pemerintah seperti LKI atau BMKN, dapat dibentuk lagi dengan model baru tetapi memiliki misi yang sama, misalnya berupa Badan Pertimbangan Kebudayaan, seperti halnya Badan Pertimbangan Pendidikan dan Badan Pertimbangan Bahasa. Apakah pemikiran para pendahulu yang hingga kini belum dapat terwujud tidak perlu diusulkan kembali?

3. Hubungan Budaya Antarbangsa

Masalah hubungan budaya antarbangsa mulai diperbincangkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Dalam KK 1948, 1951, 1991 masalah ini menjadi pokok perbincangan. Dalam KK 1991 diusulkan agar kerja sama kebudayaan dengan Negara sahabat ditingkatkan. Setelah KK 1948, tepatnya pada tanggal 5-7 Agustus 1950 di Jakarta diselenggarakan Konfrensi Kebudayaan sebagai lanjutan Kongres Magelang. Konferensi ini secara khusus memilih tema: *'Kebudayaan Nasional dan Hubungannya dengan Kebudayaan Bangsa-bangsa lain.'* Kesimpulan yang dihasilkan dari konferensi itu pada umumnya sama dengan kesimpulan KK. Usul untuk mengadakan persetujuan-persetujuan kebudayaan dengan Negara-negara lain, sebagai realisasinya telah ditandatangani kerja sama kebudayaan (*Cultural Agreement*) dengan sekitar 30 negara. Usul untuk menempatkan atase-atase kebudayaan di Negara-negara lain, hingga saat ini baru ditempatkan 13 Atase Pendidikan dan Kebudayaan. Sehubungan dengan perpindahan kebudayaan dari Depdiknas, posisi Atase Pendidikan dan Kebudayaan mengalami masalah, karena status Atase yang ada menitik-beratkan pada misi pendidikan. Sementara itu mengenai usul untuk mengirim ke luar negeri dan melakukan pertukaran mahaguru, ma-hasiswa, seniman, sarjana dan calon ahli, realisasinya sudah cukup banyak tenaga kebudayaan yang dikirim belajar.

Hal lain yang perlu diperbincangkan dalam rangka kerja sama kebudayaan adalah perlunya didirikan semacam Pusat Kebudayaan Indonesia di luar negeri untuk memperkenalkan potensi budaya bangsa. Kebijakan kerjasama kebudayaan dengan Negara asing yang selama ini lebih menitikberatkan untuk menangkai pengaruh kebudayaan asing (*defensive*) perlu diimbangi dengan kebijakan pengenalan kebudayaan di luar negeri (*offensive*). Masalah ini kiranya masih cukup aktual untuk diperbincangkan pada kongres ini.

4. Tentang Masalah Hubungan Pendidikan dan Kebudayaan
Masalah ini yang paling banyak dijadikan topik perbincangan. Hampir pada setiap kali kongres masalah kaitan antara kebudayaan dan pendidikan dan sebaliknya pendidikan dan kebudayaan selalu ditampilkan dan menjadi topik yang seperti tidak pernah kering untuk diperdebatkan. Pendidikan sebagai sebuah proses pembudayaan telah diposisikan sebagai bagian

penting dalam mengembangkan dan melestarikan kebudayaan bangsa.

Untuk dapat menemukan strategi yang tepat '*guna mengembangkan kebu-dayaan Jawa*' para pemrasaran pada kongres tahun 1918 memusatkan per-hatiannya pada masalah pendidikan bagi anak-anak dan remaja bumiputra. Perbincangan diawali dengan memperdebatkan masalah pendidikan sejarah dan pendidikan bahasa Jawa, serta penyelenggaraan pendidikan yang berlandaskan kebudayaan bangsa. Di samping itu juga masalah pengajaran bahasa asing dalam kaitan dengan penyerapan ilmu pengetahuan Barat (KK:1918).

Topik ini pada kongres berikutnya diperluas cakupannya, tidak hanya masalah pendidikan sejarah dan kebudayaan Jawa saja, tetapi termasuk pendidikan sejarah dan kebudayaan Sunda, Madura dan Bali (KK:1919). Perbincangan tentang pendidikan sejarah meningkat lagi ke arah pemanfaatan bangunan tua serta benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala (monument) di Jawa Tengah (KK:1921, 1924), Jawa Timur, Madura (KK:1926) dan Bali (KK:1937) bagi pendidikan kesadaran berbangsa.

Di samping masalah pendidikan sejarah dan kebudayaan juga masalah pendidikan seni. Pada kongres tahun 1921, masalah pendidikan seni dalam hal ini seni sastra dan musik (seni nada) dari suku Sunda menjadi fokus perbincangan. Topik ini dilanjutkan lagi pada kongres tahun 1926 mengenai pendidikan seni sastra serta musik Jawa Jawa Timur dan Madura. Di samping itu juga perdebatan tentang hubungan dengan seni musik Jawa Timur dengan Jawa Tengah dan Sunda. Sedangkan pada kongres tahun 1937 di Bali dibahas tentang perkembangan berbagai macam seni kerajinan (tenun, ukir, patung, emas, perak, anyaman dan kulit) dan seni lukis. Selain dibahas masalah pendidikan di tingkat rendah juga pendidikan di Perguruan Tinggi, yaitu tentang perlu dibuka-nya jurusan sastra, budaya Timur dan filsafat (KK: 1918 dan 1929).

Pada KK setelah Indonesia merdeka masalah kaitan kebudayaan dan pendidikan tetap menjadi topik yang penting. Dalam KK 1951 meskipun topik yang dibahas mengenai kritik seni dan film, tetapi dalam pembahasan tetap menyinggung masalah pendidikan. Dalam kesimpulan dinyatakan bahwa untuk melaksanakan tercapainya tujuan kritik seni perlu diadakan perluasan kesempatan untuk mempertinggi nilai membanding

dari masyarakat terhadap seni, misalnya dengan mengadakan: akademi seni, mata pelajaran seni dan estetika pada universitas, serta pendirian museum hasil kesenian.

Topik mengenai pendidikan kebudayaan lebih diperdalam dan diperluas pada KK tahun 1954 dengan mengelompokkan rumusan menjadi 3 bagian, yaitu kebudayaan bagi pendidikan masyarakat sekolah, masyarakat kota dan masyarakat buruh dan tani. Usul agar segera ditetapkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan agar anggaran Departemen PP dan K dinaikkan menjadi 25%, dikeluarkan pada KK 1954. Dengan adanya perubahan posisi kebudayaan kini bergabung dengan pariwisata, maka permasalahan yang perlu diperbincangkan adalah bagaimana agar hubungan dengan pendidikan itu tetap berjalan seperti sebelum berpisah.

6. Masalah Kebudayaan Nasional, Daerah dan Global

Dalam kongres sebelum Indonesia merdeka, masalah kebudayaan nasional sesekali muncul dalam prasaran atau pidato sambutan. Pada kongres sesudah Indonesia merdeka terutama pada KK 1948 masalah itu dijadikan topik utama, karena saat itu diperlukan suatu konsep strategi dalam memelihara, memajukan dan mengembangkan kebudayaan nasional seperti yang diamanatkan oleh Pasal 32 UUD 1945: *'Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.'* Pada KK 1991, masalah kebudayaan nasional dan daerah dibahas secara lebih luas untuk perkembangannya pada masa kini dan untuk masa depan. Dalam era globalisasi dan perubahan sistem pemerintahan dari yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik, masalah keberadaan kebudayaan nasional dan daerah menjadi topik yang perlu diperbincangkan. Masalah sudah ada atau belum ada kebudayaan nasional, kebudayaan Indonesia kini mencuat ke permukaan. Demikian pula dengan adanya sistem demokrasi dan HAM, keinginan untuk mengedepankan kebudayaan daerah cenderung menguat.

Demikian beberapa hal yang dapat diangkat dalam catatan sekilas ini. Masih ada beberapa bagian yang menurut hemat kami masih perlu dibahas lebih lanjut dalam kongres yang akan datang. Masalah mendasar yang belum pernah diangkat tuntas, misalnya tentang konsep kehidupan berbangsa dalam semboyan *'Bhinneka Tunggal Ika.'* Keanekaragaman budaya bangsa Indonesia

memerlukan konsep yang jelas dalam hal tata hubungannya. Lebih-lebih dengan diterapkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999. Di samping itu juga masalah perubahan (amandemen) Pasal 32 UUD 1945 tentang kebudayaan yang menimbulkan pertanyaan makin menjadi jelas atau sebaliknya? Dalam kaitan dengan peraturan perundang-undangan, apakah diperlukan adanya Undang-undang tentang Kebudayaan? Di samping itu juga masalah bagaimana kita menyikapi perkembangan industri budaya dan keterbukaan informasi. Juga kapan atau berapa tahun sekali KK diadakan?

5. Penutup

Demikian sekilas gambaran dari seluruh Kongres Kebudayaan yang pernah diselenggarakan. Beberapa bagian yang belum dibahas atau ditindaklanjuti perlu dipikirkan tindak lanjutnya, karena masalah itu masih layak untuk diperbicangkan ulang pada Kongres Kebudayaan sekarang dan yang akan datang.

Dari bukit yang tinggi ini, marilah kita teriakkan lebih keras lagi jeritan tentang nasib kebudayaan bangsa ke depan, agar jeritan itu melalui *'tebing nan tinggi, sungai nan landai, masuk ke padang nan panjang, terus ke lubuk nan bermata kucing, dan melalui jalan berkelok ampik puluh ampik masuk ke koto tengah dan ke lebih dari lima puluh koto,'* sehingga jeritan itu dapat didengar, diperhatikan dan dijadikan kebijakan oleh para petinggi serta difahami dan dihayati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Kita patut berterima kasih kepada para pendiri bangsa yang telah meletakkan landasan berpikir dan bertindak dalam memajukan kebudayaan bangsa. Kita patut bangga, karena dalam suasana politik pemerintahan yang masih didominasi oleh penjajah, telah berani bergerak untuk mencari konsep kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan bangsa (*Cultural Policy*) oleh bangsa sendiri.

Akhirnya saya sampaikan sebuah pertanyaan nakal: ***'Apakah jumlah Kongres Kebudayaan yang pernah terjadi dapat berubah?'***

Bukittinggi, 18 Oktober 2003

Nunus Supardi

SIMBOL KESETARAAN GENDER DALAM NASKAH LONTARAQ TANETE

Karya

Retna Kencana Arung Pancana Toa Colliq Pujié*

Oleh: **Nurhayati Rachman****

Makkedai I Baégo (Arung Macécé) : "Kénagi Andi Patarai, Petta Juba" Makkedani Petta Matoaé : "Kumui monro ri Tanété atammu". Makkedasi I Baégo : Namakessing-kessing garéq Petta Juba, Andi Patarai. Iamu maéloq upolakkai"

Berkata I Baégo (Raja Macégég) : "Kemana gerangan Andi Patarai Petta Juba" Petta Matoaé (Raja Tua) pun menjawab: "Hambamu ada di Tanété", kembali berkata I Baégo: "Konon Khabarnya Petta Juba Patarai sangatlah tampan, dialah kelak yang akan kupersuamikan"
(dialog antara Raja Macégég dengan Raja Tanete)¹

"Di dalam hal-hal yang lama kutemukan sesuatu baru" kata Pak Ishak Ngeljaratan sekali waktu. Ternyata itu benar. Di dalam Pra-Kongres Kebudayaan di Bali beberapa bulan yang lalu, saya telah mempresentasikan sebuah makalah yang membahas tentang "Prinsip-Prinsip Demokrasi Sistem Pemerintahan Tradisional di Sulawesi Selatan". Kali ini saya menemukan sebuah naskah kuno di Kabupaten Barru Sul-Sel yang berjudul "Lontaraq Tanété" yang ternyata isinya menggambarkan bagaimana peran-peran publik kaum wanita yang menggambarkan kesejajaran dengan kaum pria.

Naskah tersebut ditulis oleh Colliq Pujié yang nama lengkapnya Terna Kencana Coliq Pujié Arung Pancana Toa

* Disampaikan dalam Kongres Kebudayaan V, Bukit Tinggi 20 Oktober 2003

**Dosen Fakultas Sastra Unhas

¹ Dalam buku

Geschiedenis van Tanette

, karangan Colliq Pujié

é yang diterbitkan oleh G.K. Niemen,

's Gravenhage, Martinus Nijhoff, Leiden 1883:108

Matinroé ri Tucaé. Bila diurai satu-satu arti nama itu, maka. “Retna Kencana”, adalah nama Melayu yang diberikan oleh orang tuanya sejak kecil². “Colliq Pujié” berarti: pucuk daun yang terpuji” sedangkan “Arung Pancana Toa” adalah gelar jabatannya sebagai Raja Tua di Pancana. Setelah meninggal dunia ia diberi gelar anumerta “Matinroé ri Tucaé” yang berarti “yang tertidur di Tucaé”? Tucaé adalah nama salah satu tempat di Lamuru³, tempat Colliq Pujié meninggal. Pancana tempat Colliq Pujié menjadi Ratu adalah salah satu kerajaan bawahan Tanété⁴ yang terletak di tepi pantai⁵.

Ayahnya bernama La Rumpang Mégga, yang dilantik menjadi Raja Tanété yang ke-19 pada 1840. La Rumpang tinggal di sebuah istana yang besar dan megah, namun menurut Matthes tidak terawat dengan baik, karena Rajanya (La Rumpang) tidak terlalu menghiraukan urusan kerajaan. Ia lebih banyak bersantai-santai atau pergi berburu. Itulah sebabnya, seluruh urusan kerajaan termasuk administrasinya dikendalikan oleh Colliq Pujié⁶.

Tidak diketahui dengan pasti kapan tepatnya Colliq Pujié lahir, hanya menurut perkiraan Matthes ia diperkirakan lahir sekitar tahun 1812-an. Ia kemudian menikah dengan La Tanampareq To Apatorang, Raja Ujung. Dari perkawinannya ini, ia dikaruniai tiga orang anak, dua di antaranya adalah perempuan: Wé Tenriollé Siti Aisyah, yang kedua I Gading dan yang laki-laki bernama La Makkawaru.

Tahun 1852 ketika berusia 40 tahun dan telah janda, ia bertemu dengan Matthes, seorang misionaris Belanda yang bertugas untuk mempelajari bahasa dan sastra Sulawesi Selatan. Atas kepiawaiannya di bidang mengarang dan menulis, ia menjadi narasumber utama beberapa peneliti dari Eropa, antara lain Ida Pfeiffer dari Austria, A. Lighvoed, dan Matthes. Dan, yang terakhir adalah yang terlama, sekitar 20 tahun ia membantunya, mengumpulkan, menyalin dan mengarang

² Dalam tradisi bugis khususnya di Tanété, orang yang mempunyai darah Melayu selalu mempunyai nama Melayu yang diberikan sejak ia lahir

³ Terletak di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan sekitar 140 km dari Makassar.

⁴ Terletak di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan sekitar 100 km dari Makassar

⁵ Terletak di Kabupaten Barru, sekarang.

⁶ Koolhof dalam Pendahuluan La Galigo, jilid I, 1995:6

naskah-naskah untuk keperluan penelitian Matthes. Selama itu pula ia mendampingi Matthes masuk keluar pedalaman Sulawesi Selatan, suatu tindakan yang paling berani untuk ukuran wanita saat itu.

Salah satu karya monumentalnya adalah salinan 12 jilid naskah La Galigo yang sebelumnya terserak-serak episodenya pada beberapa daerah. Waktu itu seseorang keluarga cukup memiliki satu episode saja sudah dianggap luar biasa. Karena naskah-naskah itu tak mau dilepaskan pemiliknya kepada Matthes, maka ia pun meminta Colliq Pujié menyalinnya dan menyusun episode itu secara berurutan sampai 12 jilid, jadi semacam editor. Dua belas jilid naskah La Galigo yang disalin Cooliq Pujié inilah yang dianggap sebagai karya sastra terpanjang di dunia – 300.000 bait, yang menurut Kern hanya sepertiga dari jumlah naskah La Galigo secara keseluruhan⁷.

Semua karyanya baik yang dihasilkan oleh Colliq Pujié maupun karya peneliti Eropa yang menjadikannya sebagai narasumber utama kini tersimpan di beberapa museum dan perpustakaan di Leiden dan beberapa perpustakaan dan museum di belahan dunia lainnya. Meskipun begitu, hidupnya sangat miskin dan menderita, ia diasingkan di Makssar, ia dipisahkan dari keluarganya dan tinggal di sebuah gubuk yang menurut Matthes jauh lebih besar kandang babi orang Belanda⁸. Menurut Matthes pengasingan ini dilakukan karena seringnya cekeok dengan puterinya I Ollé. Belanda berusaha mendamaikannya tapi tidak berhasil. Karena itulah, pada bulan Maret tahun 1857 Belanda melarang Colliq Pujié kembali ke Tanété dan ditetapkan untuk tinggal di Makassar dengan tunjangan 20 gulden ditambah 2 pikul beras perbulan. Belanda tidak menjelaskan apa sebab pertengkaran itu terjadi dan mengapa mesti dipisahkan dengan putrinya, hanya Matthes dalam sebuah suratnya kepada Nederlandsch Bibelgenootschap bercerita :

“Hampir setiap hari saya mengunjungi seorang Ratu Bugis (Colliq Pujié) yang tinggal berdekatan dengan saya, dan yang ditetapkan di sini oleh pemerintah (Belanda) dengan alasan politik⁹”

⁷ Koolhof dalam Pendahuluan La Galigo, jilid I, 1995:vii.

⁸ Idem halaman 13

⁹ Koolhof dalam Pendahuluan La Galigo, jilid I, 1995:12

Tidak ada sumber dokumen tertulis yang menjelaskan alasan politik itu. Hanya menurut Andi Muhammad Rum¹⁰ pertengkaran itu dipicu oleh besarnya dukungan yang diberikan oleh La Sangaji (suami I Ollé) kepada Belanda yang ditentang keras oleh Colliq Pujié.

Untuk memenuhi kebutuhannya, iapun menyalin karya sastra dan naskah-naskah di Sulawesi Selatan untuk Matthes. Gaji dari pemerintah Belanda sebanyak 20 gulden dan 2 pikul beras itu tidaklah cukup, sehingga seringkali ia menjual perhiasan warisan dari keluarganya. Beberapa kali ia minta untuk kembali ke daerahnya atau pindah di tempat lain untuk mencari penghidupan yang lebih baik, tetapi tak pernah diizinkan oleh pemerintah Belanda.

Pada tahun 1867 Colliq Pujié barulah mendapat izin untuk kembali ke Tanété. Namun karena tetap kurang cocok dengan I Ollé, ia kemudian berpindah-pindah di rumah anaknya yang lain, yaitu I Gading yang menjadi Ratu di Mario atau La Makkawaru yang menjadi Raja di Lamuru.

Tanggal 11 Nopember 1876 Retna Kencana Colliq Pujié Arung Pancana Toa meninggal dengan tenang di Lamuru, dan dimakamkan di Tucaé, maka digelarlah ia “Matinroé ri Tucaé” yang artinya terbaring di Tucaé.

Sejarah perjalanan hidup Colliq Pujié adalah sebuah perjalanan sejarah anak manusia yang panjang dan berliku, seperti halnya senarai sejarah perjalanan leluhurnya yang ia ceritakan dengan lantang, tanpa basa-basi, penuh dengan ketelanjangan data yang ditutup-tutupi dalam “Sejarah Kerajaan Tanété”. Naskah yang ditulisnya pada tahun 1852 ini kemudian dicetak dan diterbitkan oleh G.K. Niemen dengan judul *Geschiedenis van Tanette*, diterbitkan oleh Gravenhage, Martinus Nijhoff, Leiden pada tahun 1883 yang selanjutnya akan dibicarakan secara singkat di bawah ini.

Naskah ini dibagi ke dalam 18 bab yang menceritakan Raja

¹⁰ Cucu kelima lapis Colliq Pujié yang sekarang menjabat sebagai Bupati Barru, yang penulis wawancarai bulan Desember 2002.

I Tanété sampai Raja XX. Setiap tokoh diceritakan mulai lahirnya, percintaannya sampai perkawinannya. Alur ceritanya tunggal, tetapi kadang-kadang terdapat alur kilas balik di celah-celah peristiwa seorang tokoh. Hal ini menyebabkan alur cerita menjadi kompleks, ditambah lagi penamaan tokoh yang selalu berubah-ubah, karena hampir setiap tokoh mempunyai nama lebih dari satu. Isinya, cerita seputar kehidupan istana Raja-Raja Tanété dahulu yang digubah dalam bentuk prosa lirik dengan bentuk penceritaan yang bersifat monolog dan dialog. Karena itu, membaca buku ini tak ubahnya membaca sebuah roman yang berkisah di seputar percintaan, peperangan, intrik, kekuasaan, ketulusan, kejujuran dan berbagai nilai-nilai kebenaran lainnya yang berhadapan dengan nilai-nilai buruk. Semua itu diperankan oleh tokoh sejarah Tanété yang di dalam berinteraksi secara kultural dan sosial tidak mengenal batas-batas geografi, suku dan jenis kelamin. Kisah-kisah itu dibungkus dalam bahasa Bugis halus dengan kadar cita sastra yang tinggi sehingga ia dapat pula dikategorikan sebagai sastra sejarah.

Sejarah seperti ini di dalam tradisi Bugis disebut *lontaraq*,¹¹ sebuah bentuk penulisan sejarah tradisional di Nusantara yang oleh banyak ahli dari luar dianggap memenuhi kriteria untuk disebut sebagai sejarah modern. Hanya pada bagian awalnya saja yang dipenuhi oleh misteri. Sesudah itu, cerita mengalir dengan data dan fakta yang jelas tanpa dibumbui oleh hal-hal yang bersifat supernatural dan gaib.

Berbeda dengan cerita di Jawa dan Melayu yang genealoginya berasal dari tokoh penting dalam sejarah dunia yang berasal dari Islam atau Hindu seperti Nabi Adam, Iskandar Zulkarnain, atau Rama, dan sebagainya, kisah-kisah tradisional dalam sejarah kerajaan di Sulawesi Selatan genealoginya selalu berasal dari salah satu dari dua tempat, yakni: 1) dari *Boting Langiq* “pusat langit” atau 2) dari *Buri Liu* “dasar laut”. Yang berasal dari *Boting Langiq* disebutnya sebagai *To Manurung* “orang yang turun” sedangkan yang berasal dari *Buri Liu* disebutnya sebagai *To Tompoq* “orang yang muncul”. Mereka beranggapan bahwa baik *To Manurung* maupun *To Tompoq* adalah keturunan dewa

¹¹ Berasal dari kata “lontaraq” yang berarti daun lontar. Dalam kebudayaan Bugis/Makassar kata ini mempunyai dua makna: 1) huruf Bugis?Makassar yang dulu ditulis di atas daun lontar, 2) sejarah atau silsilah

yang dijelmakan di bumi. Karena itulah, mereka menyapa *To Manurung* sebagai *Dewataé*, sedang *To Tompoq* disapanya sebagai *To Sangiang* (Sang Hyang....?).

Agaknya kisah-kisah seperti itulah yang menyertai berdirinya Kerajaan Tanété – tempat Colliq Pujié dilahirkan, yang setelah kemerdekaan Indonesia dilebur menjadi bagian dari Kabupaten Barru Sulawesi Selatan (sekitar 100-an km dari Makassar).

Konon sekali waktu, orang Pangi naik ke gunung *jangang-jangangngé* untuk berburu. Pada waktu mereka tiba di puncak gunung, mereka dikejutkan oleh adanya sebuah guci yang berisi penuh air. Mereka berpikir, pastilah ada manusia di sekitar tempat ini. Mereka penasaran. Rasa penasaran itulah yang mengantarkannya masuk sampai ke ke dalaman puncak gunung tersebut. Dan, benar di sana ia temui pasangan suami isteri yang disekitarnya beterbangan burung-burung yang membawa ikan. Ikan-ikan itulah yang menjadi makanan utama pasangan suami isteri itu. Orang Pangi kemudian bertanya: "Darimanakah asal kalian berdua". Jawab mereka: "Kami tidak tahu asal kami, yang paasti salah satu dari empat mata arah angin, yaitu utara, timur, selatan dan barat? Orang Pangi pun yakin bahwa mereka itu pasti *To Manurung* atau *To Tompoq*. Benar juga dugaannya, karena dikemudian hari, kelak setelah dewa ini melahirkan anak-anaknya, maka anak-anak tersebut menyapanya *To Sangiang*. Itu pertanda dia adalah *To Tompoq* (Orang yang muncul dari Bui Liu), diperkuat lagi adanya petunjuk bahwa mereka berdua hanya makan ikan, di tengah-tengah gunung. Karena itulah, orang Pangi lalu memutuskan untuk mengajak orang asing ini turun menjadi Raja di daerahnya, tapi ditolak dengan halus oleh *To Sangiang*. Akhirnya, secara rutin orang Pangi itu naik ke gunung tersebut dengan tujuan: 1) berburu dan 2) menjenguk sepasang manusia dewa itu.

Tak lama kemudian dewa ini telah melahirkan puteri, dan setelah dewasa sang putri kemudian dijodohkan dengan putera Raja orang Pangi di *Ale-Kalegé*. Setelah itu, *To Sangiang* memilih turun dari gunung dan tinggal di sebuah tempat kosong yaitu *Batu Léppanaé* di kampung *La Poncing*. Di sanalah ia membangun sawah dan membentuk perkampungan. Kampung itulah kemudian yang diberi nama *Aganionjo*. *To Sangiang* menjadi Raja pertama di tempat itu. Tidak lama kemudian sepasang putranya tidak pernah akur, selalu bertengkar, *To*

Sangiang takut kalau mereka saling membunuh. Karena itulah, ia memutuskan untuk mencari Raja pengganti yang bisa dipatuhi oleh kedua putranya. Pilihannya jatuh pada Raja Segeri. Inilah cikal bakal Raja *Aganionjo*, yang di kemudian hari diubah namanya menjadi kerajaan Tanété. Perubahan ini dilakukan oleh *To Maburuqé Limanna* (Raja Tanété yang ke – 8) sebagai wujud persaudaraannya dengan kerajaan Tanété di selayar.

Dari sinilah Colliq Pujié memulai cerita leluhurnya, yang pada garis besarnya memberi gambaran kepada kita tentang 2 hal, antara lain: 1) silsilah Raja-Raja dan adat istiadat kerajaan Bugis/Makassar, 2) kebebasan berbicara dan berekspresi tanpa mengenal perbedaan jenis kelamin, agama, dan ras.

Setiap Raja mempunyai tanggung jawab untuk melanjutkan kebijakan Raja-Raja pendahulunya, meskipun begitu mereka juga melakukan evaluasi terhadap setiap kebijakan, yang mana bisa dilanjutkan dan mana yang tidak. Ia juga berimprovisasi secara kreatif untuk menciptakan hal-hal baru. Karenanya, setiap Raja mempunyai keunikan-keunikannya tersendiri serta kelebihan dan kekurangannya. Semua itu diceritakan secara gamblang tanpa ditutup-tutupi kejelekannya.

Raja Tanété adalah Datu Gollaé masih kerabat Raja Gowa. Oleh karena itu, mulai Raja I ini sampai ke Raja IX mereka dengan rutin datang ke Gowa memberikan sesembahan seperti mempersembahkan sebagian hasil panen bila habis panen. Hal ini merupakan tanda bukti akan kesetiaannya kepada Raja Gowa sebagai Raja bawahan Gowa yang berdaulat. Namun, sekali waktu terjadi insiden, ketika Raja Tanété X *Matinroé ri Bulianna* berkuasa, tanpa sengaja Raja Bone, Arung Palakka yang masih kerabat Raja Gowa diburu oleh Raja Gowa karena konflik yang tak bisa diredam. Raja Tanété menyembunyikannya, maka alangkah murkanya Raja Gowa. Sejak saat itu, hubungan antara Gowa dan Tanété memburuk dan selanjutnya berakhir dengan pemutusan diplomatik. Sejak saat itu pula, Tanété beralih menjadi negara bagian dari kerajaan Bone yang sekali-kali naik mempersembahkan pajak ke Bone. Sementara itu, Arung Palakka yang terdesak akibat tekanan Gowa yang terus-menerus, akhirnya meminta bala bantuan kepada kompeni Belanda, dan dengan bantuan Belanda inilah ia dapat melawan hegemoni kekuasaan Gowa yang sangat kuat dan ekspansif. Sebagai konsekwensinya, ia harus takluk di bawah kekuasaan

Belanda. Raja Tanété yang merupakan bawahan Raja Bone mau tak mau harus pula membantu Bone dan Belanda melawan Gowa, termasuk membantu kompeni menghalau pemberontakan Cina dan pasukan Jawa di Jawa Tengah.

Persekutuan dengan Bone ini berlangsung terus sampai akhirnya Raja Tanété X digantikan oleh putra sulungnya Daéng Matulung (Raja XI) yang tidak beberapa lama setelah dilantik ia mengundurkan diri karena tidak suka pergi menyembah ke Bone dan diperintah oleh Belanda. Ia lalu dititipkan kepada Raja Bone untuk belajar adat istiadat dan tata cara memegang kekuasaan.

Waktu berjalan terus dan sejarah anak manusia pun turut berputar, bergulir, dan mengalir mengikuti perjalanan sang waktu yang tak pernah bisa dihentikan sejenak oleh siapa pun. Raja-Raja Tanété silih berganti yang setuju tidak setuju, terima atau tidak terima, ia harus tunduk kepada takdir untuk menjadi bagian dari kekuasaan Bone dan Belanda. Namun, ketika kekuasaan tiba di tangan La Patau, Raja Tanété XVII, Raja yang tanpa basa-basi menolak permintaan Belanda untuk menghadap kepadanya dalam suatu pertemuan yang diadakan oleh Gubernemen di Makassar: "Kalau Belanda butuh dengan saya dia yang harus menghadap saya, bukan saya yang harus menghadap kepadanya" begitu katanya. Belanda sangat tersinggung, sekejap saja, kehidupan masyarakat Tanété tiba-tiba berubah, gonjang-ganjing, kacau-balau akibat peperangan yang tidak berimbang antara pasukan La Patau perang dan kompeni Belanda. Meskipun begitu, semangatnya luar biasa, dan tak pernah surut sedikit pun, sampai akhirnya terdesak masuk gunung. Beberapa saat ketika dia sudah kewalahan, penasehatnya menyarankan untuk mundur. Dengan tegas ia menjawab, "Turunkan saja perahuku, biar saya pergi merantau jauh". Sang Penasihat langsung menanggapi itu sebagai signal bahwa sang Raja meminta dirinya untuk diturunkan sebagai Raja, maka jawab sang penasihat, "tak ada satu pun yang bisa menurunkan tuanku kecuali atas keinginan tuan sendiri". Ketika itulah, ia mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada saudara perempuannya Daéng Tennisanga menjadi Ratu Tanété XVIII, sementara La Patau tetap melanjutkan perlawanan dari gunung, tiga kali gencatan senjata tiga kali pula berperang sampai akhirnya ia kalah. Itulah sebabnya, ketika ia meninggal ia digelar anumerta sebagai *Petta Mpélaingné*

Musuqna artinya “Raja yang meninggalkan peperangan”.

Tidak begitu lama setelah kekuasaan Daeng Tenrisanga (saudara perempuan La Patau) ia pun mengundurkan diri. Belanda menunjuk La Rumpang menggantikannya, ayah Colliq Pujié seperti yang telah dibicarakan di atas.

Gambaran umum yang kita dapatkan dalam penampakan hiruk-pikuk kehidupan setiap tokoh adalah tidak adanya batas-batas perbedaan antara berbagai jenis kelamin atau pun agama dan suku, baik dalam berinteraksi secara sosial maupun di dalam menduduki posisi-posisi penting dalam struktur kekuasaan. Bila dirunut satu-persatu, dari Raja I sampai XX dalam naskah ini, maka 9 di antaranya adalah perempuan, selebihnya adalah laki-laki, namun isterinya juga semuanya adalah Ratu yang berkuasa di tempat lain meskipun hanyalah Raja kecil tapi berdaulat di dalam sebuah kerajaan besar. Demikian pula halnya dengan para Ratu, suaminya adalah Raja di tempat lain, bahkan Terniléléang Ratu Tanété XV berkuasa di dua tempat sekaligus yaitu kerajaan Tanété dan kerajaan Luwuq¹² karena kebetulan ayahnya orang Luwuq.

Wanita-wanita itu merupakan mahluk-mahluk publik yang hidup melampaui zamannya. Mereka memimpin pasukan perang, berdiplomasi, mengambil kebijakan-kebijakan, memutuskan perkara, dan mengeskpresikan perasaannya sesuka hati tanpa dihalangi oleh basa-basi tata krama seperti yang sering kita temukan dalam kerajaan feodal lainnya. Wanita-wanita itu berseliweran ke sana-kemari dengan transportasi utama perahu. Kadang-kadang mereka melahirkan di tempat lain dan dengan entengnya anak itu dititipkan kepada ibu pengasuhnya lalu sang Ratu melanjutkan perjalanannya untuk kepentingan diplomasi. Hal ini dapat kita lihat ketika I Ollé yang ketika menghadap ke Raja Gowa, ia sedang hamil tua. Dua malam setelah tiba di Gowa, ia melahirkan. Anak itu diberi nama Wé Pancaitanya, dan ia mendapat ibu susu¹³ dua orang: satu

¹² KeRajaan tertua dan terbesar di Sulawesi Selatan

¹³ Biasanya ibu susu adalah orang terdekat Raja/Ratu yang memang sudah mednapat kepercayaan penuh untuk itu.

dari Raja Gowa yang satunya lagi dari Lamuru. Sesudah itu, anak tersebut dititipkan kepada pengasuhnya kemudian ia menuju Tanété kembali.

Kebebasan bukan hanya terlihat dalam posisi penting dalam kekuasaan tapi juga dalam hal perjudohan. Tenriléléang adalah Ratu yang paling eksotik. Ia meninggalkan suaminya menuju Sapirié karena sudah merasa tidak cocok, padahal ketika itu ia telah dikaruniai tujuh orang anak dan telah menjelang manupouse. Ketika suaminya menyindir dalam nyanyian, antara lain ia berkata “biar saja engkau pergi, tak mungkin lagi ada yang jatuh cinta padamu dan menikahimu, karena engkau sudah tua”. Kalau aku tidak masalah karena aku masih bisa punya selir yang lain”. Maka jawab Tenriléléang : “*Pekkumutono siaq pekkumutoni tauwe*” artinya kamu begitu aku juga bisa begitu, dengan kata lain, apa yang bisa kamu lakukan aku pun juga bisa melakukannya. Dan ternyata ia buktikan karena tidak lama sesudah ia berpisah dengan suaminya ia menikah lagi dengan Paoggaugé ri Bone (Raja Bone) dan meskipun sudah tua pesta perkawinannya dilangsungkan secara meriah.

Di dalam naskah ini juga kita temukan tradisi *mangoting-oting* suatu bentuk ungkapan perasaan cinta seorang wanita kepada laki-laki yang disukainya – tentu saja juga menyukainya – dengan jalan mengikatkan selendangnya ke ujung keris laki-laki¹⁴ maka kalau ini terjadi tak ada satupun orang yang bisa memisahnya kecuali menikahkannya. Hal ini dapat kita lihat pada percintaan antara Kadi dan I Buba, yang karena telah saling *mangoting*, maka Tenriléléang menikahkannya.

Peristiwa yang tidak kalah serunya adalah saat La Maddusila Raja Tanété XVI memerintahkan kepada Arung Lipukasi (salah satu Raja bawahan Tanété) *mallalengeng akka* (mengangkat baki) untuk tamu-tamu perempuan. Sang Raja Lipukasi protes tidak mau melaksanakannya, tapi jawab La Maddusila, “Yang saya perintahkan bukan pribadimu tapi kedudukanmu sebagai Raja bawahan yang punya tata krama untuk tunduk padaku”. Dengan perasan terpaksa ia pun melayani satu persatu tamu-tamu perempuan yang hadir dalam pertemuan itu. Alangkah risih

¹⁴ Zaman dulu, setiap lelaki Bugis/Makassar berpergian selalu mengikatkan keris di pinggangnya.

dan kikuknya sang Raja Lipukasi.

Sementara itu, di dalam lalu lintas pergaulan antarbangsa, kebebasan juga terlihat dengan jelas, antara lain dapat kita lihat hubungan orang Belanda, Bugis, Makassar, Buton, Melayu, Parengki (Perancis), Inggris, meskipun yang pertama dan yang terakhir ini sering bermusuhan sehingga mereka berperang, tapi bukan atas nama bangsanya ataupun agamanya, melainkan atas nama perilaku kolonialisme.

Peperangan antara Belanda dan Gowa yang tak kunjung usai membuat mereka terpaksa gencatan senjata yang diakhiri oleh sebuah perjanjian yaitu disebut, *Perjanjian Bongaya*. Para penanda tangan perjanjian itu masing-masing memegang kitab sucinya. Orang Belanda memegang kitab Injil, sementara orang Makassar memegang Al-Quran. Sebelum penandatanganan dilakukan, mereka bersumpah atas nama Tuhannya masing-masing, sambil meletakkan kitab suci mereka di kepalanya. Ini suatu gambaran yang memperlihatkan bagaimana mereka saling menghargai agama dan kepercayaan masing-masing, suatu gambaran yang belum ditemukan dalam laporan dan dokumen resmi pemerintah.

Dua bagian yang telah diceritakan di atas, yakni: 1) sejarah kehidupan pribadi Colliq Pujié yang dilatari oleh sistem sosial dan kultural dari zaman yang diwakilinya, 2) sejarah kehidupan Raja-Raja yang masih tersimpan dalam memori Colliq Pujié yang tentu saja didasari oleh berbagai bacaan lontaraq sebelumnya memberi gambaran kepada kita tentang adanya saling mempengaruhi dan tarik-menarik antara kenyataan di luar sastra dan kenyataan di dalam sastra.

Kedua-duanya menjelaskan kepada kita tentang pentingnya arti kebebasan dan kemerdekaan bagi manusia, baik perempuan maupun laki-laki di dalam berpikir dan bertindak. Tentu saja kemerdekaan dan kebebasan itu dibatasi oleh nilai-nilai yang dianggap luhur dan telah disahkan oleh masyarakat pendukungnya, yakni masyarakat Bugis. Nilai-nilai itu telah mengalami pengujian dan pengesahan secara evolutif dalam perjalanan dari waktu ke waktu.

Maka apa yang dikatan oleh Evert Jan¹⁵ bahwa wanita Bugis/ Makassar sangatlah berkuasa kepada laki-laki, sebaliknya laki-



laki sangat takut kepada perempuan merupakan suatu sistem yang tak pernah ia temukan dalam bangsa lain yang pernah ditemuinya. Oleh karena itu, benarlah apa yang dikatakan oleh DR. Ian Caldwell¹⁶ bahwa tatatan sosial dan kultural masyarakat Sulawesi Selatan tidaklah bias gender. Peran dan kedudukan wanita sama dan setara dengan laki-laki.

¹⁵ Hasil perbincangan saya di Leiden 23 Juli 1996. Yang bersangkutan pernah menjadi tenaga pengajar di Universitas Hasanuddin kurang lebih 10 tahun.

¹⁶ Hasil perbincangan saya Januari 2003 di Makassar

IDENTITAS BUDAYA DAN CITRA DIRI INDONESIA DITENGAH KONSTELASI GLOBAL*

Oleh: **Nyoman Nuartha****

Tatanan budaya Indonesia sangat mirip dengan miniatur budaya global. Keragaman yang terbentuk melalui sejarah panjang bangsa Indonesia sebagai anugrah, memiliki kelebihan yang mampu membentuk sinergi kebertahanan, namun sekaligus juga sinergi kerentanan. Kerentanan yang terjadi bukanlah karena tekanan yang bertubi-tubi dari luar, namun lebih berpangkal pada sikap diri sendiri yang kurang bijak dalam menyikapi perubahan dan tekanan dari luar.

Bali dilihat dari ketatanan budayanya, kian lama terkesan kian kokoh karena sikap bijak masyarakatnya dalam berinteraksi dengan pengaruh luar yang terkesan sangat organik, teratur, dan terarah. Industri Pariwisata yang menjadi motor penggerak ekonomi disadartinya sebagai alat pemacu, alat bertahan sekaligus sebagai pelindung budaya. Saya yakin bila masyarakat Bali tidak bijak dalam memanfaatkan industri pariwisata sebagai penggerak ekonomi mereka, pasti sudah lama budaya Bali itu akan runtuh. Munculnya adaptasi kesenian terhadap tuntutan industri malah membentuk citra etnik kontemporer yang terus berkembang dan berubah-ubah. Sebagai pertanda hidupnya kesadaran dalam menjaga keseimbangan kebutuhan material dan spiritual masyarakat. Jadi, budaya global dengan tampilan modernisasi sebagai *mainstream* menyiratkan tata kehidupan baru yang dekadennya bila terasa menekan janganlah terlalu dirisaukan.

Budaya ini berproses, bergerak saling mempengaruhi, saling ingin berbeda, membangun sinkretisasi dan eklektic yang pada akhirnya mencari keselarasan baru. Saya lebih ingin melihat makna budaya sebagai suatu sikap bijak terhadap diri sendiri, terhadap lingkungannya, terhadap kondisi kemampuannya membangun keselarasan yang berkelanjutan. Kita kendalikan

*Disampaikan dalam Kongres Kebudayaan V, Bukit Tinggi 20 Oktober 2003

**Nyoman Nuartha

sinergi yang terbangun dari sebuah elemen budaya seperti kesenian, adat, agama, iptek, ekonomi, hukum dan filsafat tetap mengedepankan citra diri. Identitas dalam berinteraksi dengan budaya global.

Modernisasi sebagai *mainstream* budaya global, telah memperlihatkan gejala buruknya melalui mekanisme industri. Dengan memperhitungkan efisiensi dan efektifitas, mekanisme industri mendorong penyeragaman produk secara massal, mengangkat promosi yang sangat mempengaruhi psikologi sosial dan melemahkan kreativitas masyarakat yang sangat besar pengaruhnya terhadap gaya hidup.

Modernitas Vs Etnisitas

Terjadi fenomena yang mencolok di akhir abad 20, Gerakan modernisasi di segala bidang menjadi arus kuat yang terjadi di Eropa dan Amerika berpengaruh ke seluruh konsep pembangunan dan filsafat pemikiran yang secara langsung pula mempengaruhi konsep pendidikan secara luas. Gerakan *mainstream* ini memberikan resonansi di negara-negara yang sedang berkembang dan mendapat reaksi balik yang tidak sepenuhnya menerima. Modernitas yang berpangkal pada individualitas pada dasarnya antitradisi, sedangkan di kalangan tradisi memiliki kebanggaan turun temurun yang juga berkembang secara inovatif, tanpa landasan konsep yang tegas.

Masyarakat tradisi tidak menganggap penting efisiensi dan efektifitas dalam produksi. Mereka lebih berorientasi terhadap ruang dan tidak terhadap waktu. Orientasi terhadap ruang melandasi keselarasan hidup dengan lingkungannya, memberikan pemahaman tentang mutu hidup yang lebih spiritual dibandingkan material.

Kekuatan tradisi ini yang dalam konteks karsa dan karya masyarakat mendapatkan label etnik, satu citra yang berakar secara turun temurun. Etnisitas merupakan refleksi sikap masyarakat dalam menerima dan merumuskan nilai-nilai lama sebagai bagian dari upaya mencapai keselarasan. Basis tradisi itulah yang menimbulkan ketegangan nilai dalam menerima pengaruh luar seperti modernisasi. Modernisasi dianggap sebagai satu ancaman yang akan mengganggu keselarasan hidup.

Ketegangan nilai dalam budaya mengalami kelenturan-

kelenturan untuk beradaptasi dalam satu proses transformasi nilai membangun bentuk sinkretisasi nilai yang baru. Dalam proses akulturasi tersebut, hiduplah wacana tentang etnik kontemporer atau konklusi tentang *indigenous culture*, suatu dasar sikap untuk terus bertahan dan tidak menerima begitu saja tekanan modernisasi. Wacana tentang dilema ini terus berlangsung. Jepang yang berada di barisan negara-negara timur tetap ingin konsisten dengan konsep *indigenous culture*. Dalam wacana tentang strategi industri Jepang, aspek *indigenous* seringkali diidentifikasi sebagai identitas produk. Dengan mengedepankan identitas produk dianggap mampu bersaing secara kuat di pasaran global. Jadi, dalam skema industrial mereka dirumuskan bahwa faktor-faktor penting dalam produksi adalah : identitas, kualitas, produktifitas, baru marketing akan tergiring.

Ketegangan nilai budaya umumnya tidak akan melahirkan konflik sosial. Rasa menghargai karsa dan karya orang lain merupakan bagian dari proses kreativitas seseorang atau masyarakat. Oleh karena itu segala bentuk konflik sosial yang berakar pada kepentingan ekonomi, politik dan agama seringkali dapat diredam melalui diplomasi budaya.

Di penghujung abad 20 sepertinya terjadi kesepahaman baru di mana masyarakat modern juga melihat kenyataan bahwa tradisi ternyata tidaklah statis dan terlihat dalam gerakan kesenian sebagai gerakan seni etnik kontemporer, sebagaimana terlihat di Jepang dan Bali. Masyarakat tradisional melihat satu kenyataan bahwa modernisasi telah dapat memberikan jawaban dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang populasinya terus meningkat drastis. Kenyataan juga bahwa filsafat modernisme telah memacu kreativitas, keseragaman produk, teknologi, hingga ke gaya hidup.

Kemungkinan-kemungkinan pada Pasca Abad ke-20

Kegelisahan yang terjadi di akhir abad ke-20, menunjukkan bahwa konflik yang terjadi senantiasa bertitik tolak pada kepentingan ekonomi. Faktor kepentingan ekonomi makro terkonsentrasi kepada kepentingan menguasai sumber energi yang selama ini secara massal bergantung kepada minyak bumi. Kecenderungan untuk keluar dari kegelisahan ini tentu mencari sumber energi baru yang lebih murah, bertahan lama dan

aplikatif dengan risiko rendah.

Bila hal tersebut dapat teratasi di abad ke-21, maka akan terjadi perubahan besar konstelasi dunia, melemahkan konflik ekonomi dan politik serta lebih berorientasi untuk secara mandiri mengembangkan mutu hidup. Proyeksi ini memberikan peluang yang sangat besar terhadap reorientasi untuk secara mandiri mengembangkan mutu hidup. Proyeksi ini memberikan peluang yang sangat besar terhadap reorientasi budaya untuk meningkatkan mutu hidup, membangun keselarasan-keselarasan baru, dan ujian bagi semua agama dalam menanamkan nilai-nilai yang memberikan pengaruh terhadap perilaku-perilaku sosial. Wacana tentang modernisasi dan tradisi akan mengalami kompromi-kompromi yang dapat memperkaya mutu hidup.

Perkembangan iptek, khususnya di bidang komunikasi dan transportasi, akan memperketat interaksi global. Globalisasi bukanlah isu yang dilandasi pada kepentingan-kepentingan hegemoni, karena persaingan tidak ditentukan lagi oleh kekuasaan politik dan militer, tetapi ditentukan oleh kekuatan pasar. Kelak kekuatan pasar tidak lagi didongkrak oleh dominasi atas dasar merk tertentu, melainkan benar-benar oleh mutu dan identitas produk. Identifikasi tentang hal tersebut dapat dengan mudah diteliti spesifikasinya melalui internet yang dapat memberikan simulasi yang tepat dalam memberikan jaminanurnajual.

Teknostruktur bukan lagi sebagai harapan masa depan, melainkan sudah tumbuh dan memayungi kepentingan-kepentingan material masyarakat. Akselerasi budaya mendapat perhatian yang sangat khusus karena pola berpikir masyarakat tidak lagi dibelengu oleh dogma-dogma yang tidak berhubungan dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat. Apakah kristalisasi budaya yang terjadi akan lebih mengarah kepada sekularisme, dari itulah lahan yang harus digarap oleh semua agama.

Proyek-proyek kemanusiaan perlu dirintis dari sekarang, terutama proyek yang akan memberikan implikasi luas dalam waktu yang panjang. Konsep dasarnya berpijak pada kondisi objektif yang sedang berlangsung dan prediksi kemungkinan yang akan datang terjadi di masa depan. Proyek kemanusiaan harus masuk ke dalam struktur budaya global, termasuk

masalah kemiskinan yang akan tetap menghantui daerah-daerah terpencil. Struktur budaya yang paling utama dan berproses berkelanjutan adalah masalah pendidikan masyarakat.

Langkah Nyata

Banyak omong besar tentang budaya. Dari yang paling netral hingga yang paling tendensius. Apakah tendensius agama atau tendensius sekularisme hingga yang paling tendensius nasionalisme. Semuanya bisa dianggap benar dan berpengaruh menurut kubu masing-masing. Sedikit sekali yang melihat budaya dari sisi kepentingan kemanusiaan, tidak disekat-sekat seperti masuk ke dalam labirin yang tidak ketahuan ujung pangkalnya.

Saya memandang bangsa ini melalui format keselarasan global. Dunia yang tampak disorientasi kultural karena menempatkan ekonomi sebagai tujuan dan bukan sebagai alat telah melahirkan banyak konflik, telah menggiring proses politik ke dalam pemahaman kepentingan yang sempit.

Disorientasi kultural yang ditopang dengan kemajuan lptek khususnya di bidang komunikasi telah menjerat peradaban dunia ke dalam kemelut yang panjang dan sulit diatasi. Disorientasi kultural telah mengabaikan seni budaya tidak lagi berfungsi sebagai penyeimbang dan refleksi kebahagiaan serta mutu hidup tetapi dinilai sebagai pelengkap kebutuhan yang sangat materiil.

Word Cultural Forum akan mendinamisasi tata hubungan budaya-budaya dunia, saling mengenal dan saling menghormati perbedaan, memperkaya khasanah kreativitas dan mendorong peran serta seniman dalam ikut mewarnai peradaban dunia. Perbedaan itu harus dicari kesamaan dan yang kemudian membangun kebersamaan melalui simbol-simbol yang terasa tendensius. Tanpa disadari penyeragaman untuk membangun kebersamaan itu adalah peruntuan nilai-nilai asasi manusia.

Gagasan ini merupakan program utama yang akan secara permanen ada di GWK, menempatkan budaya kita di tengah jajaran budaya-budaya lain. Diharapkan implikasinya akan menembus ke seluruh sektor dan elemen budaya secara interaktif dan terintegrasi. Satu mimpi yang telah dirintis dipersiapkan untuk masa depan kita dan kemanusiaan.

PARADOKS BISSU BUGIS: MENCARI IDENTITAS SEKALIGUS KEHILANGAN IDENTITAS

Oleh: **Halilintar Lathief**

“... Suatu ketika pemerintah akan membutuhkan Bissu, tetapi sudah tidak ada lagi ... kelak mereka akan menyesal”¹ Demikian ucapan seorang Bissu Soppeng H. Sakke (95 tahun), tepat sepuluh jam sebelum meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 17 September 2003. Ketika berucap, dia masih tegar dan antusias untuk bersama-sama melatih calon-calon Bissu baru. Sakke adalah kandidat Puang Matowa Soppeng. Apa yang dilontarkannya di atas, kenyataannya memang demikian. Komunitas Bissu hanya dilirik oleh pemerintah bila mereka merasa membutuhkannya saja, setelah itu mereka masa bodoh.

Satu per satu komunitas ini berkurang. Tanggal 15 Oktober 2002 lalu, Wahide, seorang pemusik bissu Segeri juga wafat. Menyusul Bissu Puang Huseng seorang Bissu senior di pinggir sungai Pallime Bone (Februari 2003); lalu Bissu Made seorang Bissu senior Segeri yang meninggal dalam kesendiriannya (19 Agustus 2003). Peristiwa kematian memang tidak harus selalu diratapi, tetapi kematian generasi terakhir pewaris sebuah tradisi khas memang sangat memilukan.

Kini komunitas yang makin berkurang ini berada dalam ambang antara ada dan tiada. Dikatakan ada karena sesekali komunitasnya masih menghendaki dan memandang perlu untuk mengedepkannya bagi kepentingan yang bertalian dengan upacara. Dapat menjadi tiada ketika masyarakat yang semula menopang keberadaannya kemudian meninggalkannya karena berbagai sebab.

Berbagai peristiwa yang berusaha menyapukan eksistensi mereka telah dialami oleh komunitas Bissu di Sulawesi Selatan. Mereka telah melewati jaman di mana mereka harus diburu bahkan dibunuh untuk dilenyapkan. Saat itu, nyawa seekor anjing

¹ Wawancara terakhir H. Sakke (95 tahun), Puang Matowa Bissu Soppeng tanggal 11 September 2003 jam 20.30 malam. Beliau meninggal tanggal 12 September 2003 jam 07.00 pagi, tepat 10 jam setelah wawancara video.

lebih berharga dibanding nyawa mereka. Masyarakat Bugis sebagai pemilik tradisi ini, kini sebagian besar bahkan menyudutkan komunitas Bissu ini. Berbagai tekanan menjadikan mereka sebagai suatu komunitas yang terasing, walau beberapa di antaranya masih dapat tegar bertahan dengan berkompromi dengan perubahan. Komunitas Bissu cerai berai, jumlah dan kualitasnya semakin menyusut dari hari ke hari. Melihat pola regenerasi dan dukungan mayoritas masyarakat Bugis masa kini, maka dapat dipastikan bahwa bissu-bissu yang tersisa sekarang adalah generasi terakhir pewaris tradisi Bugis klasik ini.

Dengan memikirkan eksistensi mereka dan keberlanjutan tradisi ini sudah di ujung tanduk, maka LSM Latar Nusa berupaya memperkuat komunitas Bissu yang merupakan benang merah kesinambungan tradisi klasik Bugis ini. Bissu sebagai anggota masyarakat perlu mendapat penghargaan seperti anggota masyarakat yang lain dan tidak dapat diremehkan. Profesi sebagai Bissu perlu dibedakan dengan profesi calabai atau wadam. Reinterpertasi dan reposisi harus segera dilakukan. Sekarang, *mapping*, penelitian, dialog, kampanye, pemugaran rumah upacara, pelaksanaan upacara, pelantikan lembaga bissu, pelatihan dan magang telah dan sementara diupayakan. Komunitas-komunitas bissu berhasil dibangun kembali lembaganya, pimpinannya telah dilantik oleh pemangku adat dan pemerintah. Komunitas-komunitas Bissu mulai memiliki kembali rumah upacara yang baru, upacara mulai berjalan rutin, dan harkat mereka mulai dihargai kembali di tengah masyarakat. Dampak dari kampanye ini adalah mulai dilirikinya kembali komunitas ini oleh berbagai pihak. Ada yang melihatnya sebagai potensi "souvenir" yang dapat dijual, ada yang mulai memanfaatkannya sebagai lahan eksplorasi segar untuk kepentingan mereka.... tanpa secara bijak mempertimbangkan efek perbuatan mereka pada komunitas Bissu secara keseluruhan. Ritualitas mereka mulai digeser oleh kekuasaan dan kekuatan kapital.

Makalah ini mencoba melukiskan perjalanan panjang komunitas Bissu yang penuh *paradoks*: mengejar *identitas* tetapi sekaligus berangsur kehilangan *identitas*. Digambarkan siapa dan mengapa mereka, bagaimana nasib mereka kini, dan apa kiat mereka menyiasati lingkungan, agama, Negara dan para pendukung yang terus berubah.

Bissu adalah pendeta agama Bugis kuno pra Islam. Ketua para Bissu adalah seorang yang diberi gelar Puang Matowa atau Puang Towa. Dia adalah *figur feminim* dengan wajah yang licin seperti seorang kasim. Para Bissu lain adalah lelaki yang keadaan jasmaniahnya *abnormal*. Bissu dan tradisi *transvestites* (lelaki yang berperan sebagai perempuan) di tana Bugis sudah ada sejak Ratusan tahun yang lalu. Naskah La Galigo banyak mengungkapkan tentang keberadaan Bissu dalam budaya Bugis, yang konon sebagai pendamping dan pelengkap kedatangan para tokoh utama dari langit atau dari pertala bumi. Salah satu kisah melukiskan ... ketika tengah hari itu cuaca gelap gulita, taufan dan badai turun. Puang Matowa Bissu dari Lae-Lae, We Salareng dan We Apanglangi, kepala Bissu dari Ware dan Luwu turun ke bawah bersama perlengkapannya, taufan dan badai pun reda.²

Norma-norma, konsep-konsep kehidupan, bahkan silsilah dewa-dewa dan kosmologi orang Bugis dalam kitab La Galigo, mereka peroleh secara lisan atau tertulis dari guru-guru pendahulu mereka yang telah wafat. Pengetahuan-pengetahuan warisan Bugis kuno itu mereka pertahankan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan atau upacara orang Bugis, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Bissu memiliki bahasa sendiri untuk berkomunikasi dengan para dewata dan untuk berkomunikasi antara sesama mereka. Bahasa tersebut disebut bahasa suci, *basa Torilangi*, bahasa Bissu atau bahasa dewata. Para Bissu beranggapan bahwa bahasa tersebut diturunkan dari surga melalui dewata. Kata-kata dalam bahasa dewata ini telah banyak dimuat dalam naskah La Galigo.

Bissu merupakan penasehat Raja beserta seluruh keluarganya, mengabdikan dan menjaga *Arajang* yang merupakan benda pusaka keramat. Mustika-mustika tuah ini memiliki sifat keluarbiasaan karena dua sebab, yakni karena cara menemukannya dan bentuknya yang tidak lazim. Benda pusaka ini dipelihara dalam tempat khusus di ruang istana dan tempat

² Lihat Kren; R.A. / *La Galigo*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1989. h. 34. Pada bagian lain kisah itu, dikisahkan bahwa Puang Matowa dari Lae Lae adalah satu-satunya Bissu yang diturunkan dari langit.

persembahan. Kadang mereka mengadakan upacara khusus untuk benda pusaka itu. Pusaka-pusaka ini diberi nama dan diperlakukan melebihi dari sekedar lambang. Roh-roh nenek moyang diharapkan bersarang dalam benda-benda pusaka tersebut atau turun menjelma kepada para pemiliknya saat mereka memerlukannya.

Bissu umumnya adalah Wadam (Wanita Adam) atau wanita dari kalangan putri bangsawan tinggi. Kata Bissu sendiri berasal kata *bessi* (Bugis) yang berarti bersih. Mereka disebut Bissu karena tidak berdarah, suci (tidak kotor), tidak ada tetek, dan tidak haid.³ Matthes menyebut Bissu ini sebagai *priesters en priesteresse*. Matthes menggambarkan Bissu sebagai pendeta-pendeta pria-wanita (*Calabai*) Bugis, dinyatakan bahwa sumbernya datang dari Raja Luwu yaitu Batara Guru anak sulung dari Raja Agung di Kayangan yang turun ke bumi (*Tumanurung*). Dia turun dalam sebatang bambu dan ia keluar dan terasa asing dari penduduk. Kekurangan ini ditutupi dengan bersatunya We Nyili Timo, saudara peremuan dewa mereka yang bangkit dari lautan. Dengan gadis-gadis cantik yang berdiam di Kayangan dan bumi yang *fana*, barulah kehidupan yang pertama di mulai.

Hubungan Batara Guru dengan We Nyili Timo termasuk dewa-dewa dan roh-roh lain, dapat dilakukan melalui para Bissu. Misalnya dewata yang memberikan dan menghibur serta memberi kesuburan bumi, masyarakat yang bersungguh-sungguh dapat memperolehnya melalui perantaraan Bissu. Para Bissu dapat diberdayakan sebagai suatu penghubung ke dewata dengan persembahan masyarakat, khususnya pada upacara-upacara keagamaan dari suatu kelompok masyarakat dengan dewa-dewa nenek moyang yang diadakan dengan sangat meriah.⁴ Pada upacara semacam itu, para Bissu tergolong melebur ke dalam upacara tersebut untuk menyampaikan doa-doa mereka. Merekalah sebagai tempat penegak pertama antara

³ Keterangan Angkong Petta Rala, di rumah Andi Palinrunji di Desa Pasaka Palattae Bone pada tanggal 26 Juli 1999. Diijinkan untuk dikutip.

⁴ Mengadakan sebuah upacara penghormatan pada leluhur dan dewa-dewa langit dan bumi dibutuhkan biaya cukup besar. Karena itu orang-orang miskin dan yang tidak mampu jarang mengundang Bissu untuk melaksanakan upacara semacam itu. Mereka biasanya turut ramai apabila sebuah hajatan tengah berlangsung. Biaya hidup Bissu sebagian besar tergantung pada pesta-pesta tersebut.

roh nenek moyang dengan keturunan mereka. Sebelum Islam, fungsi upacara mereka mendapat kedudukan penting dalam masyarakat⁵. Setelah Agama Islam dianut oleh orang Bugis, peranan para Bissu digantikan oleh *Puang Kali (Kadhi)*. Sebagian upacara-upacara Bissu juga telah diambil alih pelaksanaannya oleh *Petta Kali*.

III

Gerombolan Kahar Muzakar mengganggu kegiatan para Bissu ini adalah menyembah berhala, tidak sesuai dengan ajaran Islam dan membangkitkan *feodalisme*. Karena itu kegiatan, alat-alat upacara, serta para pelakunya diberantas. Ratusan perlengkapan upacara dibakar atau di tenggelamkan ke laut. Banyak *sanro* (dukun) dan Bissu di bunuh atau dipaksa menjadi pria yang harus bekerja keras.⁶

Penderitaan para *Sanro* dan Bissu masih berlanjut ketika Orde Lama (Orla) ditumbangkan oleh rejim Orde Baru (Orba) pada tahun 1965. Keributan yang menyoroti *aRajang* dan pelaksanaan upacara mappalili terjadi di Segeri. *ARajang* hampir diganyang oleh salah satu ormas pemuda yang berkuasa ketika itu. Para Bissu dan mereka yang percaya akan kesaktian *aRajang* menjadi tertuduh penganut komunis atau anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka dianggap tidak beragama, melakukan perbuatan *siriq*, dianggap menganut ajaran *anisme*. Barang siapa masih menganggap *aRajang* sebagai benda kramat berarti

⁵ Pranata-pranata keagamaan yang berhubungan sistem kepercayaan *Attoriolong* orang Bugis pra Islam pada dasarnya dapat dilihat dari segi kepercayaan mereka yang meliputi kepercayaan tentang :

- (1) *Atuwong Lino* (kehidupan duniawi);
- (2) *Eso ri Munri* atau *Pammasareng* (akhirat);
- (3) *Lasa na Amateng* (penyakit dan kematian);
- (4) *Dewatae* (para dewa-dewa);
- (5) *Tau Tenrita* (mahluk halus);
- (6) *Tau Rioloe* (para leluhur);
- (7) *Makerre* (keramat dan Sakti);
- (8) *Simak na Ulawu* (jimat); dan
- (9) *Massompa* (persembahan).

⁶ Pada masa itu rakyat takut pada gerombolan dan tentara, karena tentara membakar semua padi penduduk pedalaman agar tidak diambil oleh gerombolan. Sedang ketakutan pada gerombolan disebabkan karena membunuh mereka yang kedapatan masih melakukan upacara-upacara Bissu atau menyembah berhala. (Wawancara dengan bapak Angkong Petta Rala, 52 tahun, di Palattae Bone tanggal 26 Juli 1999, diijinkan untuk dikutip).

menduakan Tuhan. Di antara mereka yang tertangkap harus memilih antara mati di bunuh atau memilih masuk agama Islam serta menjadi manusia normal (pria). Muncul doktrin dalam masyarakat, bahwa bila melihat Bissu atau *Wandu* maka konon mereka yang melihatnya akan sial tidak mendapatkan rejeki selama 40 hari – 40 malam. Demikian pula seluruh amal baik yang diperbuatnya selama 40 hari tersebut tidak diterima pahalanya oleh Tuhan YME. Karena itu, jika melihat Bissu atau *Wandu* maka dia harus diusir jauh-jauh. Banyak di antara sanro dan Bissu yang sebelumnya sangat dihormati oleh masyarakat, kini menjadi sasaran lemparan dan olok-olokan bocah di jalanan.

Gerakan pemurnian ajaran Islam tersebut mereka sebut “*Operasi Toba*” (Operasi Taubat) yang gencar-gencarnya terjadi pada tahun 1966. Sejak itu, upacara Mappalili mengalami kemunduran, upacara-upacara Bissu tidak lagi diselenggarakan secara besar-besaran. Para Bissu bersembunyi dari ancaman maut yang memburunya. Masyarakat tidak lagi peduli akan nasib mereka, karena sebagian dari mereka memang mendukung gerakan “*Operasi Toba*” tersebut. Sebagian masyarakat yang bersimpati kepada para Bissu, hanya tinggal diam tanpa bisa berbuat apa-apa. Namun ketika masyarakat menuai padinya, ternyata hasilnya memang kurang memuaskan sehingga beberapa masyarakat beranggapan hal tersebut terjadi karena tidak melakukan upacara Mappalili⁷. Dengan kesadaran itulah beberapa di antara mereka menyembunyikan Bissu yang tersisa agar tidak di bunuh dan agar upacara mappalili dapat dilaksanakan lagi. Bissu-bissu yang selamat itulah yang masih ada sekarang ini. Kini jumlah mereka yang tersisa di seluruh wilayah adat Sulawesi Selatan tidak lebih dari empatpuluh orang saja. Padahal untuk melakukan sebuah upacara Mappalili yang besar, jumlah Bissu minimal harus berjumlah empatpuluh orang

⁷ Dahulu masyarakat Segera percaya apabila tidak melakukan tradisi Mappalili, maka akan datang suatu petaka.

⁸ Salah satu bait mantera dalam bahasa biksu (bahasa dewata atau *basa to rilangi*’), yakni *sessukeng* menyebutkan “empat puluh dewata” (*de’wata patappuloe*). Dalam hal ini angka empat puluh dianggap sebagai angka “sempurna” anggota perkumpulan Bissu. Angka ini juga ada hubungannya dengan empat puluh dewata yang lahir hanya dari mani Hawa sendiri, yang kemudian tersebardi atas bumi di dalam lautan dan di atas langit, dapat menerangkan banyaknya dewa-dewa yang kedudukannya tidak begitu penting dalam kisah La Galigo, yang segenerasi dengan Datu Patoto.

(Bissu PattappuloE)⁸ . dalam sebuah wilayah adat

Memang banyak faktor penyebab sehingga upacara-upacara kaum Bissu ini mengalami pergeseran dan penyesuaian dengan waktu dan lingkungannya. Penyebab-penyebab tersebut terdiri dari faktor *eksternal* dan faktor *internal* komunitas Bissu itu sendiri. Salah satu faktor *eksternal* yang utama adalah perubahan sistem kenegaraan, dari sistem kerajaan menjadi negara kesatuan. Peranan Raja yang berwibawa, *kharismatik* dan berpengetahuan luas tentang adat-istiadat sekarang digantikan oleh peranan seorang Camat yang masa jabatannya relatif terbatas di suatu daerah. Demikian pula akibat mudarnya peranan lembaga-lembaga adat, sangat terasa pula pada komunitas Bissu. Pada masa pemerintahan kerajaan Bugis, seluruh pembiayaan upacara dan keperluan hidup komunitas Bissu diperoleh dari hasil sawah kerajaan. Para Bissu juga memperoleh sumbangan dari dermawan yang berupa pedagang, kaum tani, bangsawan yang datang sendiri atau secara rutin memberikan sedekahnya. Selain itu sepetak atau dua petak tanah persawaan dari kerajaan diserahkan pengelolannya oleh Raja kepada Puang Matowa Bissu dan kawan-kawan. Sawah yang merupakan tempat upacara Palili tersebut, hasilnya untuk biaya upacara-upacara dan kebutuhan hidup komunitas Bissu selama setahun.

Adat istiadat yang dijalankan oleh pemerintah kerajaan Bugis dahulu mengandung makna *malebbi* dan *malempu*, yaitu kemuliaan dan kejujuran. Karena itu seluruh tata aturannya ditaati dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Moral menjadi sasaran utama aturan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran upacara akan tercapai dengan baik. Ketika aturan-aturan lisan bermuatan moral tersebut digantikan dengan aturan-aturan tertulis yang konon lebih *modern*, maka masyarakat tradisional mulai kehilangan kekuatannya. Undang-undang tertulis banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang pandai dan cerdik berpikir untuk kepentingan *material* lahiriahnya. Terpuruklah mereka, karena seluruh tanah adat ini tidak memiliki sertifikat. Sejak Puang Matowa, pimpinan komunitas Bissu meninggal, tanah adat ini sekarang dikuasai oleh pemerintah sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960 tentang Hak-hak atas tanah. Kini tidak ada lagi sumber dana tetap untuk biaya upacara dan biaya hidup para Bissu yang tinggal di *Bola ARajang*. Kini mereka dan nasib upacara tersebut hampir seluruhnya tergantung

kepada swadaya masyarakat pendukungnya yang makin menyusut dan bantuan pemerintah setempat.

Ketika para bissu dan penganut fanatik upacara tradisional mappalili mengusulkan upacara tersebut dilaksanakan lagi, maka aparat pemerintah desa di kecamatan campur tangan. Terjadi kompromi tentang lama masa upacara dan beberapa tata upacara, tentunya dengan pertimbangan alasan keamanan. Mereka membuat aturan tersebut agar setiap pelaksanaan upacara mappalili berjalan dengan lancar. Walau pun terkadang terjadi kekacauan-kekacauan kecil pada penonton dan masyarakat atau kecelakaan-kecelakaan pada Bissu, namun semuanya dapat di atasai sesuai dengan aturan yang mereka terapkan saat itu.

Konsekwensi dari campur tangan aparat kecamatan dan desa tersebut adalah diambilnya beberapa hak Bissu menjadi wewenang pemerintah. Penentuan hari upacara yang dahulunya ditentukan atas ramalan Puang Matowa, kini ditentukan oleh Camat atau aparat Kantor Kecamatan. Kadang rapat penentuan pelaksanaan upacara tersebut harus ditunda karena kesibukan camat atau ada tamu dari kabupaten, provinsi atau dari pusat. Tata laksana upacara Mappalili yang berjalan sekarang juga diambil alih pengaturannya oleh pemerintah setempat. Di Segeri misalnya, jika dahulu ada upacara Palili berarti ada pula Bissu dan *Mabbissu*. Sekarang, yang ada hanya upacara mappalili saja, tanpa *mabbissu*. Jika dahulu arak-arakan Palili diiringi duabelas bendera, sekarang hanya tiga bendera saja.

Seperti terjadi di mana-mana di nusantara ini, lambat laun tata upacara ini diarahkan untuk kepentingan penggalangan massa partai tertentu dan untuk memajukan pembangunan. Masuklah beberapa acara baru dalam tata upacara tradisional yang telah dipertahankan kelestariannya oleh orang-orang Bugis selama beberapa dekade di desa tersebut. Demi untuk penyesuaian dengan dinamika pembangunan, kemudian tata laksana upacara mappalili yang disusun oleh pemerintah Orde Baru lebih diarahkan kepada menggalang wisatawan. Upacara Palili diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Upacara dan benda-benda pusaka yang dulunya *sakral*, kini menjadi seni kemas untuk wisatawan dan menjadi ajang hiburan saja. Tidak sedikit anak muda mempergunakan kesempatan upacara *sakral* mappalili ini sebagai ajang main-

main. Misalnya pada saat acara siram-siraman usai Palili, ada sebagai orang yang sengaja menyiram peserta upacara dengan air yang bercampur dengan air comberan. Upacara itu tidak lagi dianggap *sakral* bagi mereka. Pada hal sebagaimana yang dipercaya masyarakat Segeri, bahwa upacara mappalili sebagai salah satu upacara sakral mempunyai beberapa pantangan yang harus ditaati oleh warga masyarakat. Kini mereka tidak hanya meladeni hajatan masyarakat yang sesekali mengundang mereka, tetapi mereka juga menari untuk suguhan wisatawan yang berkunjung ke Segeri atau di Pare-pare.⁹ Bahkan Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep telah menurunkan fungsi dan derajat komunitas Bissu Segeri ini menjadi sebuah sanggar tari bernama Sanggar La Pawowoi Segeri.

Faktor *eksternal* lainnya adalah penyebaran ajaran Islam yang menganggap seluruh kegiatan Bissu tersebut bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam murni. Penyebaran agama Islam membawa arti dan pengaruh yang sangat cepat bagi perkembangan yang menyimpang dari kebiasaan lama Bissu. Tradisi Bissu pelan-pelan memudar, berkat kokohnya peningkatan dari cita-cita *moderen* dan juga pertambahan keinsyapan dalam masalah agama Islam secara mendasar dalam masyarakat.

Pada masa lampau, pelaksanaan upacara *ritual* Palili yang dipelopori oleh kaum bangsawan dan hartawan Bugis di Segeri dilaksanakan sangat meriah dan hikmat. Upacara ini dilaksanakan sekali setahun sebagai tanda memulai mengerjakan sawah untuk bertanam padi. Akan tetapi sejak tahun 1966, upacara ini sudah disederhanakan. Kalau tadinya upacara berlangsung selama 40 hari – 40 malam, kemudian berubah 7 hari - 7 malam, sekarang hanya satu malam saja. Mengomentari perubahan ini, Haji Syamsuddin, Lurah Bontomatene Segeri hanya mengatakan : “... upacara palili tetap dilaksanakan, akan tetapi tidak semeriah dulu ketika Puang Towa masih tinggal di

⁹ Misalnya pada suatu siang di tahun 1996, ketika kami sedang duduk di *Bola ARajangE* bersama Masse, tiba-tiba muncul Saidi. Kedatangan Saidi bermaksud mengundang Masse untuk bersiap tampil *Mabbissu* dalam suatu hajatan di Pare Pare. Tahun 2001 lalu, Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep dan Propinsi Sulawesi Selatan telah pula membawa rombongan Bissu ke Makassar, Bali, dan Jakarta untuk ajang promosi pariwisata daerah tanpa jelas konsep apa yang meraka tawarkan (tempat dan jadual upacara mereka tidak miliki).

Bola ARajang. Hal ini disebabkan karena dianutnya paham baru dalam masyarakat Segeri Mandalle, yaitu semakin tingginya keimanan mereka terhadap Tuhan YME”.¹⁰

Walaupun demikian, *sinkritisme* telah terjadi di kalangan pendukung ritual Bissu. Menurut Imam Kampung Panaikang: “... sekarang ini tidak ada lagi pengkelompokan dalam masyarakat Sigeri. Masyarakat sekarang sudah menganut satu ajaran atau aliran yaitu *Al Sunnah Jamaah*. Ada pun golongan masyarakat ini tidak menentang diadakannya upacara mappalili, tetapi mereka tidak ikut secara langsung mendukung pelaksanaan upacara. Sebab menurut ajaran mereka sebelum memulai sesuatu terlebih dahulu harus membaca doa-doa yang diiringi *sesajen* untuk di baca.”¹¹

Sebuah upacara pelepas nasar yang menarik terjadi di Desa Kanaungan Kecamatan Labbakkang pada awal 1 hingga 3 September 1999 yang lalu. Para Bissu ini datang dari desa lain dan dihargai oleh kaum tua. Khusus bagi generasi muda, upacara tersebut hanyalah sebagai suatu jenis hiburan yang aneh belaka. Upacara yang menelan biaya tidak kurang dari lima juta rupiah tersebut, dilaksanakan oleh sepasang suami-istri yaitu Haji Nawir dan istrinya Hajja Moga. Upacara tersebut baru dilakukan kembali oleh keluarga tersebut setelah terhenti selama 35 tahun lamanya (terakhir tahun 1964).¹² Yang menarik selama tiga hari upacara ini adalah para pesertanya yang terdiri ibu-ibu dan bapak-bapak haji, keluarga besar Haji Nawir dan Hajja Moga. Semua mengenakan pakaian haji. Bukan itu saja, pada saat-saat tertentu (misalnya pada *matangesso* dan *malabbekesso*) ternyata para Bissu juga membungkus kepalanya dengan sehelai kain putih mirip para haji tersebut. Bahkan Bissu Lolo Saidi yang bertindak sebagai *Pangulu* (pimpinan) mengenakan jubah serbah putih.¹³ Pada hari terakhir dilakukan persembahan turun dan naik. Persembahan turun

¹⁰ Keterangan Bapak H. Syamsuddin, Lurah Bontomatene (sekarang mantan Lurah), di Bontomatene Segeri, tahun 1996. Diijinkan untuk dikutip.

¹¹ Wawancara dengan Abdul Gafar Daeng Lulu (50 tahun), Imam Kampung Panaikang, tahun 1996, di Segeri. Diijinkan untuk dikutip.

¹² Upacara ini adalah upacara *Attoriolong* yang saat ini adalah giliran keluarga Haji Nawir yang melaksanakannya karena sudah dipandang mampu untuk melakukannya. (Keterangan H. Nawir, Pengusaha empang yang sukses, di rumah upacara tanggal 3 September 1999, diijinkan untuk dikutip).

dilakukan dengan mengendari duabelas mobil ke enam lokasi upacara yang jaraknya berjauhan satu dengan lainnya.¹⁴ Pada tempat-tempat tersebut, seorang pembaca doa dari desa bersangkatan ikut membacakan doanya. Malam harinya dilakukan persembahan ke atas yang sebelumnya dilakukan oleh seorang imam mesjid yang bergelar *Gurutta*.

IV

Boleh dikatakan, Bissu yang masih tersisa sekarang ini adalah generasi terakhir yang mewarisi tradisi Bugis klasik. Kini komunitas Bissu yang makin berkurang ini berada dalam ambang antara ada dan tiada. Dikatakan ada karena sesekali komunitasnya masih menghendaki dan memandang perlu untuk mengedepkannya bagi kepentingan yang bertalian dengan upacara. Dapat menjadi tiada ketika masyarakat yang semula menopang keberadaannya kemudian meninggalkannya karena berbagai sebab. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa Bissu saat ini hanya sebagai perhiasan saja, dalam arti keberadaannya kini masih dirasakan kehadirannya namun dianggap tidak ada lagi. Hidup tidak, mati pun tak rela.

Berbagai faktor eksternal dan *faktor internal* yang menjadikannya demikian. *Faktor eksternal* antara lain adalah pergseran pemahaman tentang keagamaan dan perubahan sistem pemerintahan dari sistem kerajaan ke negara kesatuan yang bermuara pada melemahnya lembaga adat dan hak tanah adat. Sementara *faktor internal* komunitas Bissu adalah bagaimana mereka harus beradaptasi jaman yang penuh perubahan, dan *regenerasi* kepemimpinan serta keanggotaan baru.

Demikian perjalanan panjang komunitas Bissu di Segeri yang penuh *paradoks*: mengejar *identitas* tetapi sekaligus berangsur kehilangan *identitas*. Moga-moga tulisan ini akan memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan tradisi yang telah diambang kepunahan. Langkah maju bagi penguatan komunitas Bissu yang termarginalkan oleh masyarakat Bugis pemilik tradisi tersebut.

¹³ Hal ini dilakukan meniru seperti Puang Towa terakhir setelah naik haji. (Keterangan Masse di rumah upacara, tanggal 2 September 1999, diijinkan untuk dikutip).

¹⁴ Dulu upacara dilakukan dengan arak-arakan berjalan kaki yang disebut Palili.

DAFTAR PUSTAKA

Gonggong, Anhar

- 1992 *Abdul Qahar Muzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak.*

Hafidy; H.M. As'ad El.

- 1982 *Aliran-aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia. (Cetakan kedua).

Harun Hadiwijono, Dr.

- 1977 *Religi Suku Murba Di Indonesia.* Jakarta: BPK Gunung Mulia,.

Harvey, Barbara Sillars

- 1989 *Pemberontakan Kahar Muzakkar dari Tradisi ke DI/ TII.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Holt, Claire.

- 1939 *Dance Quest in Celebes.* Paris: Les Archives Internationales de la Dance.

Kern; R.A.

- 1989 *I La Galigo.* Yogyakarta-Jakarta: Gajah Mada University Press & KITLV, 1989.

Koolhof, Sirtjo dan Roger Tol.

- 1995 *I La Galigo* (Menurut Naskah NBG 188 yang disusun oleh Arung Pancana Toa). Jakarta : KITLV dan Djambatan. .

Lathief, Halilintar

- 1987 *Tari-tarian Daerah Bugis.* Yogyakarta: Institut Press.
2003 *Bissu, Tradisi Transvestities Shammans Bugis.* Jakarta: Desantara.

Lathief; Major Inf. A.

- 1957 *Masalah Keamanan.* Makassar: Ko.Pemuda Pembangunan Lompobattang.

Noorduyn

- 1972 *Islamisasi Makassar.* Jakarta : Bhratara

Pritchard; E.E.Evans.

- 1987 *Teori-teori Tentang Agama Primitif.* (Terjemahan: Chen Hock Tong). Bangi: Universitas Kebangsaan Malaysia.

Roham; Drs. H. Abujaman.

- 1991 *Agama Wahyu dan Kepercayaan Budaya*. Media Da'wah.

Subagya, Rachmat.

- 1976 *Kepercayaan: Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan*. Yogyakarta: Kanisius.

- 1981 *Agama Asli Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Loka Caraka.

Tule LIC, Drs. Philipus dan Wilhelmus Djulei LIC.

- 1994 *Agama-agama Kerabat Dalam Semesta*. Nusa Indah Flores, NTT.

Verkuyl, Dr. J.

- 1958 *Tari dan Dansa*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.

PLURALITAS KEPENDUDUKAN DALAM PERSPEKTIF*

Oleh : **Iwan Nurdaya, Djafar dan Pulung Swandaru**

MUKADIMAH

Berdasarkan Pendataan Penduduk dan Pencatatan Pemilihan Berkelanjutan (P4B) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat/Statistik Provinsi Lampung pada bulan April 2003, populasi penduduk Provinsi Lampung adalah sekitar 6.900.000 jiwa. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2000, dengan jumlah penduduk saat itu 6.646.890 jiwa, komposisi penduduknya menurut suku bangsa adalah suku Jawa 61,88% (4.113.731 jiwa), suku Lampung (Pepadun, Abung Bunga Mayang, Peminggir) 11,92% (792.312 jiwa), suku Sunda (termasuk Banten) 11,27% (749.566 jiwa), suku Semendo dan Palembang 3,55% (236.292 jiwa), dan suku bangsa lainnya (Bengkulu, Batak, Bugis, Minang dll.) 11,35% (754.989 jiwa). Dalam makalahnya bertajuk "Pandangan Pemangku Kebudayaan Daerah/Suku Bangsa Lampung tentang Kebudayaan Nasional" yang disampaikan pada Temu Budaya Daerah Lampung tanggal 5-6 September 1988 di Bandarlampung, Prof. Hilman Hadikusuma, S.H. menulis, "Orang Lampung merasa miskin budaya dan miskin pencipta, miskin pelaku dan miskin pendukungnya dikarenakan jumlah penduduk berbudaya Lampung memang sedikit (di sekitar satu juta jiwa) Kepala BPS Provinsi Lampung, Nursinah Amal Urai, SE, MA pernah mengatakan bahwa pada P4B tahun 2003 memang sengaja tidak ditanyakan mengenai suku bangsa karena pada pendataan sebelumnya (SP 2000) orang merasa kesulitan menentukan suku bangsanya disebabkan orang tuanya sudah melakukan perkawinan antar suku bangsa.

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut suku bangsa di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat pluralitas kependudukan di Provinsi Lampung.

Dengan demikian, penduduk Lampung merupakan

*Makalah disampaikan pada kongres kebudayaan V tahun 2003 di bukit Tinggi Sumatera Barat 19-23 Oktober 2003

masyarakat majemuk (*plural society*) yang terdiri dari multi-etnik.

Orang Lampung asli diyakini berasal dari Gunung Pesagi, Lampung Barat, yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru Lampung. "Ini terjadi pada sekitar abad ke-14. Keberadaan etnik non-Lampung di Provinsi Lampung pun sudah demikian menyebar dan berbilang abad. Orang Baten sudah masuk ke Lampung sejak zaman Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1683) pada abad ke-17 dengan menempatkan wakil-wakil Sultan Banten di Lampung yang disebut *jenang* atau kadangkala disebut *gubernur*. Namun, menurut Drs A.S. Wibowo dalam tulisannya Lampung pada Abad XVII" penguasa-penguasa Lampung asli yang terpencar-pencar pada tiap-tiap desa atau kota yang disebut *adipati* secara hierarkis tidak berada di bawah koordinasi penguasaan jenang/gubernur. Penguasaan Sultan Banten atas Lampung adalah dalam hal garis pantai saja dalam 1 rangka menguasai monopoli arus ke luarnya hasil-hasil bumi terutama lada. Dengan demikian, jelas hubungan Banten-Lampung adalah dalam hubungan saling membutuhkan timbal-balik. (Penjelasan lain mengatakan bahwa pada zaman dulu orang Lampung wajib melakukan *seba* (datang menghadap, audiensi) kepada Sultan Banten; dan beroleh nama gelar. Bahkan *pepadun* (pedudukan, bangku) diilhami ketika melihat para petinggi Banten tidak duduk sama tinggi, yang kemudian melahirkan sebutan 'Lampung Pepadun salah satu dari dua sub-adat Lampung, di samping Lampung Saibatin (Peminggir). Di Banten terdapat kampung Lampung Cikoneng).

Begitu pun orang Bugis sudah masuk ke Lampung pada abad ke-19. Salah satu buktinya adalah Masjid Jami Al-Anwar di Telukbetung, yang dibangun oleh keturunan Bugis pada 1839. Pada mulanya masjid itu berupa surau, yang kemudian hancur pada 1883 ketika Gunung Krakatau meletus, dan kemudian dibangun kembali pada 1888 lewat suatu musyawarah bersama para saudagar dari Palembang dan Banten. Masjid Jami Al-Anwar itu adalah masjid tertua di Lampung. Di Menggala juga sudah lama terdapat Kampung Bugis dan Kampung Palembang, bahkan mereka termasuk ke dalam *kebuwaian* (keturunan darah) yang ada di sana.

Kehadiran orang Bengkulu di Lampung juga sudah terjadi pada abad ke-19. Masjid Jami Al-Yaqin yang terletak di jalan Raden Intan, Bandar Lampung, dibangun oleh orang Bengkulu

yang merantau di Tanjungkarang pada 1883. Semula masjid itu terletak di dekat pos polisi Pasar bawah lalu dipindahkan kedepan BRI di jalan raden inten itu masjid itu.

Sementara itu, kedatangan orang Jawa di Lampung untuk pertama kalinya terjadi pada 1905 melalui program kolonisasi di Pringsewu. Selanjutnya melalui program transmigrasi, sedangkan orang Bali datang pada tahun 1963 karena meletusnya Gunung Agung.

Multietnik

Tentu saja, pelbagai etnik tadi memiliki dan membawa budayanya sendiri-sendiri. Tak ada kelompok manusia yang tak terikat budaya (*culture bound*). Di dalam perjalanan waktu yang relatif panjang itu, masing-masing etnik tadi melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya, di samping mungkin juga terjadi kontak budaya.

Pelestarian dan pengembangan kebudayaan masing-masing etnik tadi, pada waktu mutakhir tampak pada organisasi-organisasi kebudayaan etnik di Lampung. Orang Banten mendirikan Paguyuban Keluarga (Paku) Banten, sementara orang Sunda lainnya mendirikan Peguyuban Warga Jawa Barat (Pajar) dan Mangle. Orang Jawa Tengah mendirikan Pangenyonan, Keluarga Wonogiri, Paguyuban Keluarga Purworejo (Paku Wojo), dan orang Jawa Timur mendirikan Jamur Kesuma Jawa Timur Kelahiran Sumatera). Di samping itu, terdapat organisasi Persatuan Pedalangali Indonesia (Pepadi) dan perkumpulan kesenian Jawa lainnya. Bahkan orang Cina di Lampung mulai menampakkan wajah keseniannya dengan mementaskan tari-tarian dan barongsai.

Orang Lampung sendiri di antaranya mendirikan Lembaga Kebudayaan Daerah Lampung (LKDL), namun tidak aktif dan relatif menjadi organisasi papan nama. Mungkin karena muncul dari prakarsa pemerintah, dan bukan tumbuh dari masyarakat sendiri. Lalu muncul juga Lampung Sai, yang sebenarnya tidak eksklusif untuk etnik Lampung tapi terbuka juga untuk etnik lainnya. Di samping itu muncul juga Forum Silaturahmi antar Paguyuban (Forsap) Saburai yang terdiri dari 40 paguyuban di Lampung Tengah, yang merupakan tandingan Lampung Sai.

Orang Minang di Lampung mendirikan Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) dan orang Aceh membuat Aceh

Seupakat. Terdapat juga kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), di samping organisasi kebudayaan orang Bali dan Batak.

Dari sebegitu banyak organisasi kebudayaan, sebagian besar memang murni organisasi budaya, tetapi ada juga yang memolitisasi budaya. Yang belakangan ini tampak misalnya pada Paku Banten, Lampung Sai, Forsab Saburai, dan Pepadi (Persatuan Pedalangan Indonesia). Menurut Kuntowijoyo, pedalangan pada masa euphoria hanya digunakan untuk propaganda politik. Misalnya Habibie dipersamakan dengan took Gareng dan Amien Rais diidentikkan dengan Sengkuni. Ini suatu politisasi budaya yang justru dilakukan oleh masyarakat sendiri. Pada era Orba, politisasi wayang dilakukan oleh penguasa lewat lakon *Wahyu Makutha Rama* yang otoriter itu, atau *Semar Mbabar wahyu jatidiri* yang sekenanya populis dan egaliter, namun tingkah laku Orba justru otoriter.

Paku Banten tampaknya juga dipolitisasi dan dimanfaatkan oleh penguasa untuk menghalau para demonstran yang anarkis, yang bisa menimbulkan benturan horizontal di dalam masyarakat. Belakangan muncul Palu Lampung yang ingin menandingi eksistensi Paku Banten. Begitu juga Lampung Sai yang lebih kental aktivitas politiknya ketimbang kegiatan budayanya.

Politisasi budaya yang dilakukan oleh masyarakat, meskipun merupakan gejala sementara, perlu disikapi karena akan menimbulkan dampak yang lebih luas dan lebih lama. Politik tidak perlu lagi menggunakan kebudayaan, dan sebaliknya kebudayaan tidak perlu takut ditinggalkan massa. Kita harus sadar bahwa keduanya mempunyai landasan berbeda. Politik bertumpu pada massa dan kebudayaan bertumpu pada minoritas kreatif. Untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, budaya perlu otonomi. Artinya, lepas dari politisasi dan komersialisasi.

Seraya mengesampingkan politisasi budaya yang sayangnya masih terjadi, keberadaan etnik non Lampung dan pelbagai budaya etnik di Lampung sudah merupakan realitas historis sekaligus realitas sosiologis dan realitas budaya. Secara demikian, masyarakat Lampung memanglah suatu masyarakat majemuk atau masyarakat multietnik. Oleh karena itu, Lampung dikenal juga sebagai Indonesia Mini.

Multikulturalisme

Kini muncul gugatan terhadap konsep masyarakat multietnik, dan karenanya perlu dilakukan kajian kembali. Menurut Dr. Parsudi Suparlan, landasan sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang bercorak majemuk sudah saatnya dikaji kembali. Ideologi masyarakat majemuk yang menekankan pada keanekaragaman suku bangsa tidak akan mungkin mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*, masyarakat madani yang demokratis. Untuk mencapai tujuan proses-proses demokratisasi yang sedang dijalani Indonesia, ideologi harus digeser menjadi keanekaragaman budaya atau multikulturalisme.

Dalam makalahnya "Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia" yang disampaikan pada Simposium Internasional Antropologi II di Padang, 19 Juli 2001, Parsudi Suparlan menyebutkan Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk, yaitu masyarakat negara yang terdiri atas suku-suku bangsa yang baik langsung maupun tidak langsung dipaksa bersatu di bawah kekuasaan sebuah sistem nasional. Yang mencolok dari ciri kemajemukan Indonesia adalah penekanan pada pentingnya kesukubangsaan yang terwujud dalam komunitas-komunitas suku bangsa, dan digunakannya kesukubangsaan sebagai acuan utama bagi jatidiri individu.

Menurut Parsudi, ada sentimen-sentimen kesukubangsaan yang mempunyai potensi pemecahbelah dan penghancuran di antara sesama bangsa. Potensi yang dapat dimanipulasi secara sosial dan politik sebagai pemecah-belah dan antidemokrasi itu antara lain karena masyarakat majemuk menghasilkan batas-batas suku bangsa yang didasari oleh stereotip dan prasangka, yang menghasilkan penjenjangan sosial secara primordial yang subyektif.

Konflik-konflik antarsuku bangsa dan antarkelompok agama yang sejak beberapa tahun ini terjadi berintikan pada permasalahan hubungan antarsuku bangsa asli dan pendatang. Konflik-konflik itu terjadi karena adanya pengaktifan jatidiri suku bangsa untuk solidaritas memperebutkan sumberdaya yang ada.

Karena ideologi kesukubangsaan serta pengaktifan jatidiri suku bangsa itu, maka seperti yang terjadi di Sambas adalah preman Madura yang mengawali konflik itu dianggap mewakili

suku Madura, sehingga konflik berkembang menjadi konflik antarsuku bangsa,” kata Parsudi yang melakukan penelitian di Kalimantan dan Maluku. Demikian pula yang terjadi di Ambon, bentrokan antarpenduduk Ambon dan Buton Bugis Makasar (BBM) menjadi konflik antargolongan agama. Pada tahun 2000 juga pernah terjadi konflik antarsuku bangsa di Desa Jepara, Lampung Timur, yang ditandai dengan pembakaran puluhan rumah tinggal. Masyarakat majemuk termasuk Indonesia, tidak menghasilkan tatanan kehidupan yang egalitarian dan demokratis, melainkan sebuah masyarakat yang berpotensi otoriter dan despotis karena corak suku bangsanya yang beraneka ragam dari feodalistis dan paternalistik sampai etnosentris.

Prinsip demokrasi hanya mungkin dapat berkembang dan hidup secara mantap dalam sebuah masyarakat sipil yang terbuka, yang warganya mempunyai toleransi terhadap perbedaan-perbedaan dalam bentuk apa pun, karena adanya kesetaraan dalam derajat kemanusiaan yang saling menghormati, dan yang diatur *oleh* hukum yang adil dan beradab yang mendorong kemajuan dan menjamin kesejahteraan warganya.

Masyarakat majemuk yang menekankan keanekaragaman suku bangsa sudah sepatutnya dikaji untuk digeser penekanannya pada keanekaragaman kebudayaan, yang mencakup bukan saja kebudayaan suku bangsa, tetapi juga berbagai kebudayaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat di Indonesia. Hal ini harus pula dibarengi dengan kebijakan politik nasional yang akan meletakkan berbagai budaya itu dalam kesetaraan derajat, sehingga nantinya diharapkan tidak akan ada lagi suku bangsa yang merasa lebih tinggi atau yang merasa terpuruk dan tak berguna karena tiada lagi jenjang sosial yang dilatarbelakangi asal suku bangsa. Sampai di sini, sudah waktunya kita melihat hubungan antarbudaya dalam paradigma multikulturalisme.

Pluralisme

ADA tiga teori tentang hubungan antara kebudayaan dalam masyarakat multi-etnis, yaitu etnosentrisme, cawan peleburan (*melting pot*), dan pluralisme. Etnosentrisme terjadi jika masing-masing budaya bersikukuh dengan identitasnya, menolak

bercampur dengan kebudayaan lain. Porter dan Samovar mendefinisikan etnosentrisme seraya menuturkan, "Sumber utama perbedaan budaya dalam sikap adalah etnosentrisme, yaitu kecenderungan memandang orang lain secara tidak sadar dengan menggunakan kelompok kita sendiri dan kebiasaan kita sendiri sebagai kriteria untuk penilaian... Makin besar kesamaan kita dengan mereka, makin dekat mereka dengan kita makin besar ketidaksamaan, makin jauh mereka dari kitaKita cenderung melihat kelompok kita, negeri kita, budaya kita sendiri, sebagai yang paling baik, sebagai yang paling bermoral.

Pandangan ini menuntut kesetiaan kita yang pertama dan melahirkan kerangka rujukan yang menolak eksistensi kerangka rujukan yang lain. Pandangan ini adalah posisi mutlak yang menafikan posisi yang lain dari tempatnya yang layak bagi budaya yang lain." dari uraian ini dapatlah dipahami mengapa Binhangh dan Pennington menyatakan bahwa Etnosentrisme adalah pluralisme. *Melting pot* ialah peleburan komponen-komponen etnis ke dalam hanya satu identitas baru. Sementara, dengan pluralisme dimaksudkan bahwa setiap etnis tetap memegang identitas kelompoknya, yang dalam beberapa hal terdapat identitas yang sama. Etnosentrisme terjadi jika kelompok etnis mempunyai ketakutan tertentu untuk bercampur dengan kebudayaan lain, yang disebabkan oleh dua hal: inferioritas dan superioritas. Inferioritas budaya tidak memungkinkan percampuran kebudayaan, karena percampuran itu akan menghilangkan identitas budaya. Biasanya ini dialami oleh suku-suku minoritas, seperti suku Badui, Samin, Sakai, Kubu, dan suku-suku terasing lainnya. Bahkan, kekhawatiran mengenai etnosentrisme masih ada Raja suku, suku yang sudah lama jadi Indonesia. Ingat polemik Javanologi, Melayulogi, Sundanologi, atau Madurologi.

Superioritas pun bisa menyebabkan etnosentrisme. Etnis Jawa Raja masa yang lewat merasa superior alas etnis lain. Perkawinan antaretnis di masa lampau selalu mengakibatkan pengucilan. Antara etnis Jawa dan Sunda ada mitos Perang Bubat, konon jauh terjadi di zaman Majapahit. Antara Jawa dan Sulawesi ada mitos tentang "Bugis", antara Jawa dan Sumatera ada mitos tentang "wong sabrang". Sebaliknya juga bisa terjadi, antara Jawa dan Minang ada mitos "Minangkabau". Seorang antropolog dari Universitas Andalas, Dr Mochtar Naim, membuat



orang Jawa tersinggung ketika mengemukakan ada dua macam budaya, budaya “M” (Minangkabau) dan budaya “J” (Jawa). Isu mengenai dominasi mayoritas Jawa masih cukup membuat pusing. Pemberontakan-pemberontakan daerah di masa lalu selalu disertai isu tentang dominasi Jawa, bahkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh pada saat ini pun masih menyebut-nyebut dominasi “bangsa” Jawa. Tahun-tahun yang lalu Departemen Transmigrasi marah besar ketika sebuah lembaga penelitian membuat laporan bahwa Orang Irian mengkhawatirkan Jawanisasi, Kota besar seperti Medan, masih menunjukkan etnosentrisme Melayu, Minang, Jawa, dan Batak. UUD 45 menyatakan secara tertulis bahwa presiden Indonesia asli, tetapi yang baik tertulis adalah harus orang Jawa. Bahkan gagasan pemilihan presiden secara langsung masih dihantui oleh keniscayaan: ..bahwa Orang Jawalah yang akan jadi presiden, karena mereka mayoritas.

Daniel S. Lcv, seorang Indonesia asal AS, pernah menyoal mitos kebudayaan Jawa yang diusulkannya supaya dihilangkan saja. Dia merasa tertipu oleh pengertian mitos tentang Jawa yang sangat dimistikkan. Dimitoskan bahwa orang Jawa penurut, bahwa terdapat ide keserasian dan harmonis, ada ide halus dan kasar. Secara empiris, menurutnya, semua itu tidak begitu betul. “Kalau memang betul Orang Jawa begitu halus, kenapa teman-teman saya yang begitu banyak agak kasar... dulu dalam riset saya, yang kelihatan sejak Zaman Belanda dan selalu diulang kembali, orang Jawa tidak suka konflik.

Di sini ada sesuatu yang aneh, karena dalam sejarah Jawa sejak abad ke-12, di sini selalu ada peperangan. Kebanyakan persoalan di Indonesia terlalu gampang tanpa bukti disalahkan kepada kebudayaan Jawa, tetapi dalam pembicaraan politik, ada baiknya kebudayaan Jawa dilupakan karena bukan Jawa yang menyatukan persoalan yang ada di Indonesia. Mitos Jawa saya harap tidak akan dibicarakan lagi...” tandas Lcv. Menghadapi semua itu, kita harus berani menghapus mitos etnosentrisme!

Sekaitan dengan itu, kita pun harus membuang stereotip-stereotip antarsuku. Tidak jarang kita mendengar bahwa orang Sunda suka basa-basi, lelakinya tukang kawin, wanitanya pesolek Orang Padang perlu Orang Jawa penganut aliran kepercayaan orang Batak kasar; Orang Lampung pemalas, dan sebagainya.

Stereotip-stereotip tersebut pada dasarnya tidak menguntungkan. Stereotip dapat menimbulkan *self fulfilling prophecy*. Apa yang kita persepsi sangat dipengaruhi oleh apa yang kita harapkan. Sebaliknya, bersikaplah seperti Moritoshi Iwasaki seorang manusia antarbudaya asal Jepang yang pindah ke AS dan hidup bahagia dengan menikahi seorang perempuan Negro Amerika yang berdasarkan pengalaman lintas budayanya menyimpulkan bahwa semua budaya itu sederajat. Tidak ada budaya yang jahat disebut baik atau buruk, sebab pada setiap kebudayaan niscaya melekat kebaikan dan keburukan sekaligus.

Peleburan budaya (*Melting pot*) barangkali sudah terjadi di kola-kola besar, seperti Jakarta. Wayang, dangdut, keroncong, campursari, sudah menasional. Demikian juga sinetron, film dan lawak. Seni lukis, kaligrafi, seni kriya, bahkan masakan rendang, juga sudah menasional. Birokrasi, militer, sekolah, dan dunia usaha merupakan basis-basis peleburan. Kita masih punya hasil-hasil kebudayaan tradisional, yang justru konon merupakan “puncak-puncak kebudayaan daerah” yang akan kehilangan daya tariknya kok” .

111

ett a menastona. Keragaman Indonesia akan hilang jika kita memakai konsep peleburan. Bahasa Indonesia merupakan pertumbuhan yang paling menakjubkan dalam sejarah kebudayaan, menuju kepada konsep peleburan. Tetapi, bahasa dan sastra daerah merosot tajam. Menurut prediksi Hasan Alwi, dalam dua puluh tahunan ke depan sastra daerah akan punah. Jumlah penutur bahasa Jawa menurun drastis, tinggal 60% menurut Kongres Bahasa Jawa pada 1980. Pada Juli 2001 muncul seruan dari Semarang agar dikeluarkan Perda untuk menyelamatkan bahasa Jawa, dengan memasukkannya sebagai muatan lokal pada kurikulum SD di Jawa Tengah. Adapun bahasa Lampung lebih parah lagi, karena gagal menjadi *lingua franca* di tanah-tumbuhnya sendiri. Ada prediksi, dalam 75 tahun ke depan bahasa Lampung akan punah. Rezim Orde Baru yang menerapkan *melting pot* sebagai kebijakan budaya telah menghancurkan banyak sistem nilai dan pranata adat budaya etnik, dan kehidupan menjadi serbaseragam.

Menginsafi hal itu, maka kita harus realistis dan tidak menuntut terlalu banyak dari kebudayaan, meskipun telap terbuka



kepada eksperimen-eksperimen budaya, misalnya eksperimen dalam tari yang mencoba memadukan konsep-konsep gerak dari berbagai daerah, atau eksperimen dalam musik yang melahirkan musik kontemporer.

Pluralisme mungkin merupakan kebijakan budaya yang paling tepat, dalam Pancasila (sila ketiga) disebutkan 'Persatuan Indonesia', bukan kesatuan Indonesia. Artinya bahwa keragaman itu diakui; pluralisme bukan *melting pot*. Pluralisme berarti bahwa semua daerah, semua tradisi, dan semua kebudayaan patut dilestarikan dan dikembangkan.

